

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 37

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2024

NOMOR : 37 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Kota Sukabumi untuk periode 3 (tiga) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sukabumi untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

8. Rencana ...

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota sebagai:

- a. penjabaran dari Rancangan Perubahan RKPD 2024;
- b. pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. perwujudan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- d. instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

- (2) Perubahan ...

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - k. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Sosial;
 - r. Dinas Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - u. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. Kecamatan Cikole;
 - z. Kecamatan Warudoyong;
 - aa. Kecamatan Lembursitu;
 - bb. Kecamatan Gunung Puyuh;
 - cc. Kecamatan Citamiang;
 - dd. Kecamatan Baros; dan
 - ee. Kecamatan Cibeureum.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Perangkat Daerah menggunakan P-RAPBD Tahun 2024 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 61);
2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 62);
3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 63);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 64);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 65);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 66);
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 68);
9. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 69);
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 70);
11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 71);
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 72);
13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 73);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 74);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 75);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 76);
17. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 77);
18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 78);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 79 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 79);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 80);
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 81);
22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 82);
23. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 83);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 84);
25. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 85 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikole Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 85);
26. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 86 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Gunung Puyuh Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 86);
27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 87 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 87);
28. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Warudoyong Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 88);
29. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Baros Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 89);
30. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 9);
31. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 91);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 21 November 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 21 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMMAD HASAN ASARI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 37 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024.

A. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah yang memuat arah dan kebijakan umum Pemerintah Kota Sukabumi, semua kebijakan diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam indikator makro yang akan dicapai. Sebagai bagian integral dari RPD, maka keberadaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi sangat penting untuk mendukung tercapainya Tujuan RDP Kota Sukabumi. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun ke-1 dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimulai dari penyusunan rancangan awal perubahan renja perangkat daerah yang akan menjadi dasar bagi rancangan perubahan RKPD Kota Sukabumi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota, maka rancangan perubahan renja perangkat daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Wali Kota.

Perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, secara yuridis formal berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi

Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);

18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 61);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024”.

b. Tujuan

Tujuan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya;
2. Sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi 2024;
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan Perubahan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;
4. Sebagai dasar penilaian pencapaian laporan kinerja tahunan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;
5. Tersedianya dokumen Perencanaan Perubahan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2022 Sampai Triwulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

BAB IV Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II berdasarkan target dan sasaran Renstra 2024-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Renja s/d Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah daerah	%	100	50
		Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Memenuhi Aspek Penilaian	%	80	-
		Indeks pelayanan Publik	Nilai	3.40	-
		Presentase dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	%	100	50
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	%	100	40.48
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.01.2.0 1.06.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD	Lapor an	7	5
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Lapor an	2	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Perse n	100	50
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang /Bula n x 14 bulan	1442	721
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Kueuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	1	0
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.01.2.0 2.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kueuangan Bulanan/ Triwulanan /semesretan SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Kueuangan Bulanan/ Triwulanan /semesretan SKPD	Lapor an	4	2

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Doku men	1	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang mulik daeran pada perangkat daerah	%	100	
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	1	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	%	100	50
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.01.2.0 5.03.	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Doku men	1	0
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 05.04.	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepagawaian	doku men	1	0
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 05.09.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100	Kode... 00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	64.88
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapam kantor yang disediakan	paket	2	1
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	paket	3	2
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.01.2.0 6.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	3
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 06.06.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Doku men	8	5
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Lapor an	12	6
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 06.09.	Penyeolenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapor an	12	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	60.71
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel Yang Disediakan	paket	2	1
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	7	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	50
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000. 01.2. 08.01.	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	Laporan	12	6
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000. 01.2. 08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	6
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000. 01.2. 08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	6
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000. 01.2. 08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	%	100	57.24
4.01.4.01.0.00.0.00.01. 0000.01.2.0 9.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	8	4
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000. 01.2. 09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	72	45

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	28	18
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	18	6
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 09.07.	Pemeliharaan aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainya yang di pelihara	Unit	3	1
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara dan di rehabilitasi	Unit	3	3
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.01.2.0 9.10.	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/ rehabilitasdi	Unit	18	-
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 09.11.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabili tasi	Unit	16	16
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Sarana Operasional KDH/WKDH	%	100	69.79
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	orang /bula n	14	8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 11.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala Daerah yang disediakan	Paket	8	5
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.01.2.1 1.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti medikal <i>check up</i> kepala daeran dan wakil kepala daerah	orang	1	1
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 11.04.	Penyediaan Dana Penunjang operasional KDH/WKDH	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	orang /bula n	12	6
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH dan Lingkup Setda	%	100	45
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuh rumah tangga kepala daerah yang dibutuhkan	Paket	5	2
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah peket kebutuhan rumah tangga sekretariat daera yang dibutuhkan	Paket	4	2
	Penataan Organisasi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Organisasi	%	100	65
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Doku men	4	2
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Doku men	2	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja reformasi dan birokrasi	Doku men	2	1
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Doku men	4	2
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Doku men	4	3
	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Prosentase pelayanan keprotokolan KDH/WKDH	%	100	50
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 14.01.	Fasilitas keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Lapor an	12	6
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 14.02.	Fasilitas komunikasi pimpinan	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Lapor an	12	6
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 01.2. 14.03.	Pendokumentasia n Tugas pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	lapora n	12	6
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	50
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	%	100	50
		Persentase pelaksanaan kebijakan	%	100	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Targ et	Kinerja
		kesejahteraan rakyat			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan urusan kepemerintahan	%	100	62.70
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Doku men	3	2
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Doku men	8	4
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Doku men	7	5
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terpenuhinya layanan keagamaan, kesejahteraan sosoal dan kesejahteraan kesehatan masyarakat	%	100	56.11
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Doku men	10	6
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	Doku men	4	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusanKepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	3	1
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terpenuhinya layanan Hukum untuk perangkat daerah dan fasilitasi bantuan Hukum	%	100	86.25
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	J Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Buah	228	210
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan bantuan Hukum	Kasus	3	2
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Dokumen	500	1680
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan kerjasama daerah	%	100	11.11

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Doku men	12	4
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Doku men	1	0
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 02.2. 04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Lapor an	2	0
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	%	100	50
		Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	%	100	50
		Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara online	%	100	50
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan pengendalian, BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti	%	100	0
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.2. 01.01.	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMDdan BLUD	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Doku men	2	0

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.2. 01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	-0
4.01.4.01.0. 00.0.00.01. 0000.03.2.0 1.03.	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	0
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan Pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	%	100	50
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.2. 02.02.	Pengendalian dan Evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	2
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Layananpengadaan baran / jasa yang berkualitas	%	100	50
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.2. 03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	10	5
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.2. 03.02.	Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	10	5
4.01.4.01.0. 00.0. 00.01.0000. 03.2. 03.03.	Pembinaan dan advokasi Pembinaan dan Barang Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	50

Sumber: Laporan Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui kegiatan yang sudah memenuhi dan belum memenuhi target kinerja. Dari total 19 Kegiatan di Sekretariat Daerah, terdapat 13 Kegiatan yang realisasinya sudah lebih dari 50% atau pencapaian target kinerja sudah sesuai. berikut faktor-faktor terpenuhinya capaian target kinerja:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas yang telah di tetapkan;
- b. Penyertaan anggaran yang memadai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah yaitu mendukung ketercapaian target Indikator Program.

Selanjutnya dapat digambarkan kegiatan yang belum memenuhi target kinerja sebagai mana tabel berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang belum memenuhi target

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	%	100	40.48
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan capaian kinerja dan lhtisar	Laporan	7	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
	Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD			
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.01 .2. 01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	0
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.01 .2. 03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0
	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Keburuhan Rumah Tangga KDH/WKDH dan Lingkup Setda	%	100	45
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.01 .2. 12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuh rumah tangga kepala daerah yang dibutuhkan	Paket	5	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan an /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II	
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja	
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.01 .2. 12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daera yang dibutuhkan	Paket	4	2	
4.01.4.01.0.00 .0.00.01.0000. 02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT					
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan kerjasama daerah	%	100	11.11	
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.02 .2. 04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Doku men	12	4	
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.02 .2. 04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Doku men	1	0	
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.02 .2. 04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Lapor an	2	0	
4.01.4.01.0.00 .0. 00.01.0000.03 .	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan pengendalian, BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti	%	100	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03.2.01.01.	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	0
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	-0
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03.2.01.03.	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	0

Sumber: Laporan Pengendalian Triwulan II Sekretariat Daerah

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 kegiatan yang belum tercapai atau realisasinya masih dibawah 50%, adapun yang menjadi faktor penghambat tercapainya target kinerja adalah sebagi berikut:

- Sifat output yang berupa dokumen/laporan yang biasanya baru akan terealisasi pada tw 3 dan 4;
- Belum terlaksananya program/kegiatan karena menyesuaikan kebutuhan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian tersebut dapat digambarkan bahwa tidak terlalu berpengaruh karena yang belum terlaksana, mayoritas baru akan direalisasikan pada triwulan III dan IV.

Adapun kegiatan yang outputnya belum terealisasi sama sekali dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kegiatan yang belum terealisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Realisasi s/d Triwulan II
		Indikator	Satuan	Target	Kinerja
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan pengendalian, BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti	%	100	0
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03.2.01.01.	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	0
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	-0
4.01.4.01.0.00.00.01.0000.03.2.01.03.	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	0

Sumber: Laporan Pengendalian Triwulan II Sekretariat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat di lihat bahwa terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi, adapun faktor-faktor penyebab belum terlaksananya kegiatan yaitu karena pelaksanaan secara proses sudah berjalan tetapi untuk outputnya baru akan terealisasi di triwulan III dan IV, terutama yang outputnya berupa buku/laporan;

Implikasi yang timbul tentu berpengaruh terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah. Adapun yang belum terlaksana, mayoritas berupa buku laporan yang akan direalisasikan pada triwulan III dan IV.

Kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil, yaitu dengan menyesuaikan kembali target dan indikatornya berdasarkan kebutuhan yang realistis dalam pencapaian sasaran.

2.1.4 Laporan Pengendalian Triwulan II Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah

Berikut disajikan matriks pengendalian triwulan II pada Sekretariat daerah dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Matrik Pengendalian
Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bulan : TRIWULAN II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi S.D Triwulan II			
		Indikator	Satu an	Targ et		Kinerja s.d Trw II	Capaian (%)	Anggaran s.d Trw II (Rp)	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah daerah	%	100	35,560,092, 471	50	50	20,703,575,556	58.2 2
		Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Memenuhi Aspek Penilaian	%	80		-			
		Indeks pelayanan Publik	Nilai	3.40		-			
		Presentase dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	%	100		50.00	50		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	%	100	95,849,700	40.48	40.48	46,650,000	48.67
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	45,000,000	2	50.00	21,634,500	48.08
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	7	45,000,000	5	71.43	25,015,500	55.59
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	5,849,700	0	0.00	-	0.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	16,444,346,647	50.00	50.00	9,210,585,751	56.01
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	113	16,437,606,647	113	100.00	9,206,985,751	56.01

4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Kueuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapo ran	1	1,745,000	0	0.00	1,745,000	100. 00
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesretan SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Kueuangan Bulanan/ Triwulanan / semesretan SKPD	Lapo ran	4	2,498,500	0	0.00		0.00
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Dok ume n	1	2,496,500	1	100.00	1,855,000	74.3 0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang mulik daeran pada perangkat daerah	%	100	17,870,000	0.00	0.00	-	0.00
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	Lapo ran	1	17,870,000	0	0.00		0.00

	Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhi Pelayan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	%	100	47,980,000	50.00	50.00	18,265,000	38.07
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.03.	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	15,630,000	0	0.00	5,810,000	37.17
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.04.	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepagawaian	Dokumen	1	2,000,000	0	0.00		0.00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.09.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100	30,350,000	50	50.00	12,455,000	41.04
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	3,211,980,214	64.88	64.88	2,506,792,856	78.05
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	34,396,800	3	100.00	33,980,000	98.79

	n Bangunan Kantor								
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlangkapam kantor yang disediakan	pake t	2	134,223,250	1	50.00	38,559,250	28.73
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	pake t	3	218,295,164	2	66.67	149,541,850	68.50
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	pake t	4	206,150,000	3	75.00	178,008,750	86.35
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.06.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok ume n	8	523,915,000	5	62.50	411,480,000	78.54
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	Lapo ran	12	1,475,000,000	6	50.00	1,125,254,216	76.29
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapo ran	12	620,000,000	6	50.00	569,968,790	91.93
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	%	100	315,690,000	60.71	60.71	118,574,508	37.56

4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel Yang Disediakan	Unit	2	71,900,000	1	50.00	23,847,681	33.1 7
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	7	243,790,000	5	71.43	94,726,827	38.8 6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	5,161,746,340	50.00	50.00	2,578,077,027	49.9 5
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08.01.	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	Laporan 1	12	33,873,000	6	50.00	17,260,000	50.9 6
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan 1	12	679,589,340	6	50.00	329,161,994	48.4 4
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan 6	12	1,432,388,000	6	50.00	738,655,000	51.5 7
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan 12	12	3,015,896,000	6	50.00	1,493,000,033	49.5 0

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	%	100	1,945,920,000	57.24	57.24	861,432,913	44.27
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	8	230,065,000	4	50.00	28,880,000	12.55
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	72	582,345,000	45	62.50	237,577,050	40.80
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	28	14,000,000	18	64.29	9,944,000	71.03
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	18	59,690,000	6	33.33	13,578,500	22.75
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.07.	Pemeliharaan aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang di pelihara	Unit	3	159,984,000	1	33.33	29,772,750	18.61

4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara dan di rehabilitasi	Unit	3	879,256,00 0	3	100.00	532,095,313	60.5 2
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09.10.	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/ rehabilitasdi	Unit	18	10,980,000	0	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09.11.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabili tasi	Unit	16	9,600,000	16	-	9,585,300	-
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Sarana Operasional KDH/WKDH	%	100	1,393,447,3 70	69.79	69.79	556,716,005	39.9 5
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	oran g/bu lan	12	734,408,93 0	8	66.67	307,000,000	41.8 0

4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala Daerah yang disediakan	Paket	8	333,500,000	5	62.50	184,787,695	55.41
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti medikal check up kepala daeran dan wakil kepala daerah	orang	1	100,000,000	1	100.00	4,850,000	4.85
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang operasional KDH/WKDH	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	orang/bulan	12	225,538,440	6	50.00	60,078,310	26.64
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH dan Lingkup Setda	%	100	608,060,000	45.00	45.00	143,453,645	23.59
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuh rumah tangga kepala daerah yang dibutuhkan	Paket	5	238,760,000	2	40.00	33,407,663	13.99
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah peket kebutuhan rumah tangga sekretariat daera yang dibutuhkan	Paket	4	369,300,000	2	50.00	110,045,982	29.80

	Penataan Organisasi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Organisasi	%	100	354,059,000	65.00	65.00	150,147,255	42.41
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	4	114,399,650	2	50.00	35,849,000	31.34
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	2	60,000,000	2	100.00	49,480,664	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja repormasi dan birokrasi	Dokumen	2	51,459,900	1	50.00	31,665,800	61.53
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	4	75,699,900	2	50.00	15,613,991	20.63
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusuna laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen	4	52,499,550	3	75.00	17,537,800	33.41
	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan KDH/WKDH	%	100	5,963,143,200	50.00	50.00	4,512,880,596	75.68
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.01.	Fasilitas keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	3,515,740,000	6	50.00	3,165,181,740	90.03

4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.02.	Fasilitas komunikasi pimpinan	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	1,506,875,000	6	50.00	732,651,856	48.62
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	laporan	12	940,528,200	6	50.00	615,047,000	65.39
		Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	50.1	-	-		-	
		Persentase Koordinasi Kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Produk Hukum Daerah	%	100	12,764,343,219	50.00	50	6,849,153,562	53.66
		Persentase pemenuhan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100		50.00	50		
		Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100		50.00	50		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya	%	100	2,517,863,000	62.70	62.70	1,465,013,838	58.18

		pelayanan urusan pemerintahan							
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3	795,589,800	2	66.67	448,668,717	56.39
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	8	515,528,200	4	50.00	258,324,128	50.11
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	7	1,206,745,000	5	71.43	758,020,993	62.82
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terpenuhinya layanan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan kesehatan masyarakat	%	100	9,027,730,219	56.11	56.11	4,898,314,740	54.26
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	10	1,800,535,220	6	60.00	891,641,420	49.52

4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	5,428,375,853	3	75.00	3,977,483,820	73.27
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusanKepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	3	1,798,819,146	1	33.33	29,189,500	1.62

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terpenuhinya layanan Hukum untuk perangkat daerah dan fasilitasi bantuan Hukum	%	100	772,500,000	86.25730994	86.26	357,741,984	46.31
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Buah	228	119,975,000	210	92.11	63,556,200	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan bantuan Hukum	Kasus	3	445,000,000	2	66.67	185,280,784	41.64
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Dokumen	500	207,525,000	1680	100.00	108,905,000	52.48
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan kerjasama daerah	%	100	446,250,000	11.11	11.11	128,083,000	28.70
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	358,750,000	4	33.33	113,695,000	31.69
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	45,000,000	0	0.00	14,388,000	31.97
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	42,500,000	0	0.00		0.00

		Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	100	-	-		-	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	%	100	-	-		-	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	%	100	541,978,000	50	50	341,689,316	63.04
		Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	%	100		50	50		
		Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara online	%	100		50	50		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan pengendalian, BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti	%	100	199,125,000	0.00	0.00	125,494,372	63.02

4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01.01.	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	47,625,000	0	0.00	28,867,869	60.61
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	90,000,000	0	0.00	56,224,401	62.47
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01.03.	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	61,500,000	0	0.00	40,402,102	65.69
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan Pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	%	100	70,386,600	50.00	50.00	43,129,000	61.27
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 02.02.	Pengendalian dan Evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	70,386,600	2	50.00	43,129,000	61.27
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Layanan pengadaan barang / jasa yang berkualitas	%	100	272,466,400	50.00	50.00	173,065,944	63.52
4.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	10	109,241,400	5	50.00	90,857,244	83.17

4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	10	69,025,000	5	50.00	30,628,700	44.37
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.03.	Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	94,200,000	50	50.00	51,580,000	54.76
JUMLAH					48,866,413,690			27,894,418,434	57.08

Sumber: laporan evaluasi TW II Sekretariat Daerah

Dari tabel matriks evaluasi triwulan 2 tersebut dapat tergambarkan bahwa realisasi Kinerja Sekretariat Daerah sudah mencapai 57.08 persen, terdapat 13 kegiatan yang realisasinya sudah melebihi 50% dan 5 kegiatan yang masih dibawah 50%. Dari data tersebut selanjutnya dirumuskan rencana kerja perubahan untuk optimalisasi pencapaian output yang dituangkan dalam BAB III.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja pada Sekretariat daerah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR	Rumusan Perhitungan
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	72	72,5	73	73	Nilai dikeluarkan oleh Kemenpan RB
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	50,1	50,1	51	51	51	Nilai dikeluarkan oleh LAN
3	Persentase Koordinasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	Perbandingan antara realisasi kinerja kegiatan Pemerintahan, Hukum, dan Kesra dengan target
4	Nilai Sakip Komponen Kinerja	Nilai	12,2	12,2	12,3	12,4	12,4	Nilai dikeluarkan oleh Kemenpan RB
5	Kategori Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kategori	A-	A-	A-	A-	A-	Nilai dikeluarkan oleh Kemenpan RB
6	Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Tugas KDH/WKDH	%	100	100	100	100	100	Nilai Persentase realisasi kinerja keprotokolan dan Umum
7	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	60	65	70	75	75	Hasil penilaian dari komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah)
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	26,49	60	65	70	70	Nilai dihitung dan dikeluarkan oleh LKPP.
9	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	%	100	100	100	100	100	Perbandingan antara realiasi kinerja dengan target

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Arah kebijakan yang menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yaitu:

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut dapat digambarkan bahwa Sekretariat Daerah tidak berhubungan langsung dalam bidang urusan SPM. Adapun yang melaksanakannya adalah Perangkat Daerah teknis terkait. Sekretariat Daerah terdiri dari 9 (Sembilan) bagian yang mengampu 1 (satu) tujuan RPD yaitu terkait Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Sekretariat Daerah tidak bergerak langsung dibidang pelayanan public sehingga tidak ada indikator SPM yang ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah:

Pada Umumnya kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Namun demikian untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Kota Sukabumi maka diperlukan upaya yang lebih maksimal pada tahun mendatang.

Sekretariat Daerah harus menjadi unit kerja yang professional dan berperan dalam rumusan kebijakan publik sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan diharapkan mampu mengimplementasikan profesionalismenya, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator, Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas dan lembaga teknis daerah agar dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.

Disisi lain Sekretariat Daerah berperan sebagai advisor dalam perumusan kebijakan publik yang mengandung arti memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonomi.

Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang akuntabel dimaksudkan sebagai upaya perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat digambarkan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Kelembagaan	Terdapat beberapa kegiatan/ sub kegiatan yang penganggarannya menumpang di Bagian/ Bidang lain	Permendagri Nomor 56 Tahun 2019	SDM	Masih terdapat Beberapa aturan kementerian yang belum sinkron	Adanya ketidak sinkronan antara nomekleatur unit kerja dalam Permendagri 56 Tahun 2019 dengan kodefikasi penganggaran dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
3. Pengendalian kegiatan	Rendahnya capaian jumlah paket pengadaan dan tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP	Realisasi Kegiatan Kota	SDM, Prosedur regulasi	Kebijakan pengadaan barang/ jasa yang sering terjadi perubahan	Belum Optimalnya capaian paket pengadaan tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP
4. Laporan akuntabilitas kinerja setda	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setda belum optimal	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kapasitas SDM yang memahami akuntabilitas kinerja	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait	Belum meratanya level akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
5. Manajemen perubahan	Hasil evaluasi manajemen perubahan belum optimal		Aspek Komunikasi, SDM, Karakteristik implementator dan struktur birokrasi	Komitmen pada setiap perangkat	Penerapan agen perubahan belum dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
6. Penataan Peraturan Per undang – Undangan	Belum optimalnya penyusunan tata naskah	Undang-undang 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019	Sumber Daya (Manusia, Sarpras) Belum adanya fungsional Penyusun Perancang Peraturan Perundang-Fungsional	Pengusulan terkadang mendadak	Pengajuan SKPD masih mentah (belum mengetahui penyusunan tata naskah produk hukum) Ketidakhadiran monisan peraturan perundang-undangan atau kebijakan antar kementerian atau bahkan dalam satu kementerian, yang berakibat pada tidak jelasnya aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan di daerah
7. Kualitas Pelayanan Publik	Implementasi kebijakan belum optimal	Perwal, proses bisnis, SOP.	Keterbatasan SDM	Peraturan diatasnya berubah-ubah, Rantai birokrasi panjang	Ada beberapa perangkat daerah yang belum memiliki SOP (Belum ditetapkan)
8. Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Belum dapat mengakomodir semua usulan fasilitas kegiatan keagamaan	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan	Keterbatasan SDM dan anggaran	Tingginya permohonan fasilitas kegiatan keagamaan	Tidak berimbangnya anggaran dengan permohonan fasilitas

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
		Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat			
9. Kualitas Layanan Keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan		intensitas kerja yang sangat tinggi	Jadwal dengan pihak luar yang tidak terduga	Belum optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan
10. Kerjasama Daerah	- Belum optimalnya kerjasama yang di tindaklanjuti. - Belum optimalnya pemahaman tata cara dan objek kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa dan pihak ketiga	Permendagri 22 tahun 2020	Kapasitas SDM	adanya pengaruh faktor non teknis	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi

Sumber: wawancara ke setiap Bagian

Dampak dari permasalahan tersebut, mengacu pada Tujuan RPD, Kebijakan Nasional (SPM dan IPM), Internasional (MDG's/ SDG's) yang telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, dan program pada Sekretariat Daerah, secara teknis memerlukan dukungan *man, money, and method* yang harus bersinergi dengan baik. Sekretariat Daerah secara berjenjang telah melaksanakan berbagai kebijakan, komitmen, tujuan dan sasaran pembangunan baik dari pusat, provinsi, dan daerah.

Untuk memetakan permasalahan serta menentukan solusi dan faktor pendukung maka dibuat matrik berupa analisis SWOT yang mana dijabarkan faktor-faktor dari pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

A. Kekuatan Internal (S)

1. Komitmen tinggi Pimpinan;
2. Sarana dan prasarana memadai;
3. Renstra telah selesai disusun.

B. Kelemahan Internal (W)

1. Tidak berimbangny anggaran dengan permohonan fasilitasi;
2. Belum meratanya level akuntabilitas;
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan

C. Peluang Eksternal (O)

1. Mengikuti Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB;
2. Optimalnya Koordinasi lintas SKPD;
3. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang sudah berbasis SIPD dari Kemendagri;

D. Tantangan Eksternal (T)

Tingginya permohonan fasilitasi dan Jadwal dengan pihak luar yang tidak terduga. Berdasarkan pembahasan telaahan pada subbab sebelumnya maka dapat dirumuskan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam melaksanakan pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, sehingga dapat diambil beberapa isu-isu strategis perencanaan diantaranya:

- a. Optimalisasi koordinasi dibidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesra;
- b. Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Optimalisasi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa, perekonomian dan pengendalian pembangunan;
- d. Optimalisasi pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah; dan
- e. Optimalisasi fasilitasi urusan penunjang pemerintahan daerah.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2024 dilakukan melalui tahapan Musrenbang yang di mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang tingkat Kecamatan, merupakan salah satu kegiatan musyawarah rutin setiap tahun anggaran pembangunan untuk tahun pelaksanaan pembangunan berikutnya, yang dilakukan bersama masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Pada forum Musrenbang Kelurahan diharapkan masyarakat berperan secara aktif dalam proses perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari Swadaya Masyarakat, sehingga *output* dari musrenbang menghasilkan dokumen Rencana Tahunan Kelurahan yang berisi daftar kebutuhan masyarakat yang dapat direalisasikan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting serta strategis dalam rangka peningkatan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan. Diharapkan pada musrenbang tingkat Kecamatan mampu menghasilkan kesepakatan diantara *stakeholder* dan pemerintah sebagai pelaku pembangunan dalam merencanakan program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hasil usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan tersebut diteruskan kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Sekretariat Daerah menghimpun usulan hasil musrenbang untuk selanjutnya dilakukan FGD yang hasilnya diselaraskan dengan rencana kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah.

Terdapat 2 (dua) usulan musrenbang yang terverifikasi dan 32 (tiga puluh dua) hasil reses DPRD atas aspirasi masyarakat yang dapat digambarkan dalam tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.7 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	Catatan
1	2	3	4	6	7
1	Pelatihan Pemulasaraan jenazah	Kel Karamat	Terlaksananya bimtek	30.000.000	Diakomodir, Bagian Kesra akan menyelenggarakannya, dengan peserta seluruh kelurahan, tidak hanya untuk karamat atau gunung puyuh saja. Pagu akan menyesuaikan
2	Pelatihan Pemulasaraan jenazah	Kel Gunung puyuh	Terlaksananya bimtek	35.000.000	
3	Pembayaran guru ngaji	Sindangpalay	Terbayarkannya guru ngaji	10.800.000	Akan dilakukan verifikasi guru mengaji, karena usulannya tidak mencantumkan volume/jumlah guru ngajinya. Pagu akan menyesuaikan.

Sumber: Aplikasi SIPD Kota Sukabumi menu perencanaan tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan pada Sekreretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024, dapat digambarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKA JAWA B	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkur ang (10- 12)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIK ATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NAS IONAL	DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SEKRETARIAT DAERAH								49.756.992.882,00	46.697.744.467,00	52.130.153.750,00	2.373.160.868,00							5.249.775.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							49.756.992.882,00	46.697.744.467,00	52.130.153.750,00	2.373.160.868,00							5.249.775.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							49.756.992.882,00	46.697.744.467,00	52.130.153.750,00	2.373.160.868,00							5.249.775.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	34.276.174.994,00	35.528.563.981,00	37.859.948.131,00	-4.994,00							0,00		

		KABUPAT EN/KOTA																		
	4.01.01.2. 01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	95.849. 700,00	95.849 .700,0 0	116.927. 000,00	21.077.30 0,00			-	-	-		0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
	4.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokum en Perenc anaan Perang kat Daerah</i>				0 Doku men	4 Doku men	45.000. 000,00	45.000 .000,0 0	55.000.0 00,00	10.000.00 0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
	4.01.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu</i>				0 Lapora n	7 Lapor an	45.000. 000,00	45.000 .000,0 0	45.000.0 00,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH

			<i>nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD</i>																	
	4.01.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Lapora n Evalua si Kinerja Perang kat Daerah</i>				0 Lapora n	2 Lapor an	5.849.7 00,00	5.849. 700,00	16.927.0 00,00	11.077.30 0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
	4.01.01.2. 02	Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah	-				-	-	16.883. 251.34 8,00	16.412 .818.1 57,00	16.444.3 46.647,0 0	- 438.904.7 01,00			-	- -	-		0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
	4.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN</i>				0 Orang /bul an	113 Oran g/ bulan	16.876. 509.22 8,00	16.406 .078.1 57,00	16.437.6 06.647,0 0	- 438.902.5 81,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	- -			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH

													a Kel/ Desa							
4.01.01.2. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				0 Laporan	1 Laporan	1.745.3 00,00	1.745. 000,00	1.745.00 0,00	-300,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
4.01.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan</i>				0 Laporan	4 Laporan	2.499.5 00,00	2.498. 500,00	2.498.50 0,00	-1.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH

			Laporan Keuangan Bulanan /Triwulana n/Semesteran SKPD																	
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	1 Dokumen	2.497.320,00	2.496.500,00	2.496.500,00	-820,00	Kota Sukabumi, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	17.959.750,00	17.870.000,00	17.870.000,00	-89.750,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan				0 Laporan	1 Laporan	17.959.750,00	17.870.000,00	17.870.000,00	-89.750,00	Kota Sukabumi, Semu a Kecamatan	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

			<i>Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>										n, Semu a Kel/ Desa							
4.01.01.2.05	Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	-				-	-	47.980.000,00	47.980.000,00	57.980.000,00	10.000.000,00			-	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	15.630.000,00	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-				0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-				0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH

			waian																	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan an				0 Orang	100 Orang	30.350.000,00	30.350.000,00	40.350.000,00	10.000.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.098.646.200,00	3.211.980.214,00	4.121.728.714,00	1.023.082.514,00			-	-	-		0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	34.400.400,00	34.396.800,00	55.075.300,00	20.674.900,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKR ETAR IAT DAER AH

[illegible]

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	8 Laporan	1.475.000,00	1.475.000,00	1.725.000,00	250.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	12 Laporan	620.000,00	620.000,00	890.000,00	270.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					-	-	233.190,00	315.690,00	417.357,350,00	184.167.350,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	2 Unit	71.900,00	71.900,00	71.900,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung</i>				0 Unit	7 Unit	161.290,00	243.790,00	345.457,350,00	184.167.350,00	Kota Sukabumi, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	28 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	18 Unit	59.690.000,00	59.690.000,00	59.690.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	3 Unit	232.999.000,00	159.984.000,00	159.984.000,00	-73.015.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				0 Unit	3 Unit	810.311.328,00	879.256.000,00	960.150.000,00	149.838.672,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				0 Unit	18 Unit	10.980.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

	04																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				0 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	208.288.500,00	225.538.440,00	143.960.000,00	- 64.328.500,00	Kota Sukabumi, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	558.185.000,00	608.060.000,00	503.885.000,00	- 54.300.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				0 Paket	5 Paket	238.885.000,00	238.760.000,00	150.185.000,00	- 88.700.000,00	Kota Sukabumi, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				0 Paket	4 Paket	319.300.000,00	369.300.000,00	353.700.000,00	34.400.000,00	Kota Sukabumi, Semu a Kecamatan, Semu a	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

													Kel/ Desa							
	4.01. 01.2. 13	Penataan Organisasi	-				-	-	354.059 .600,00	354.05 9.000, 00	404.05 8.850, 00	49.999.25 0,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARI AT DAERAH
	4.01. 01.2. 13.00 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaa n Kelembaga an dan Analisis Jabatan</i>				0 Doku men	4 Doku men	114.399 .950,00	114.39 9.650, 00	114.39 9.650, 00	-300,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARI AT DAERAH
	4.01. 01.2. 13.00 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				0 Lapor an	2 Lapora n	60.000. 000,00	60.000 .000,0 0	60.000 .000,0 0	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARI AT DAERAH
	4.01. 01.2. 13.00 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningka tan Kinerja</i>				0 Doku men	2 Doku men	51.460. 000,00	51.459 .900,0 0	51.459 .900,0 0	-100,00	Kota Suka bumi, Semu a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARI AT DAERAH

			dan Reformasi Birokrasi										Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0 Dokumen	4 Dokumen	75.699.900,00	75.699.900,00	75.699.900,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0 Dokumen	4 Dokumen	52.499.750,00	52.499.550,00	102.499.400,00	49.999.650,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	5.130.755.114,00	5.963.143.200,00	6.964.158.200,00	1.833.403.086,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.	Fasilitasi Keprotokolan																		

	14.00 01																				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				0 Laporan	10 Laporan	3.115.740.000,00	3.515.740.000,00	4.015.740.000,00	900.000.000,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				0 Laporan	10 Laporan	1.106.886.914,00	1.506.875.000,00	1.856.935.000,00	750.048.086,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				0 Laporan	10 Laporan	908.128.200,00	940.528.200,00	1.091.483.200,00	183.355.000,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0 Dokumen	8 Dokumen	743.528.200,00	515.528.200,00	515.528.200,00	- 228.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi				0 Dokumen	3 Dokumen	191.101.000,00	1.206.745.000,00	1.206.745.000,00	1.015.644.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH			

			Daerah										ua Kel /De sa							
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	terlaksananya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, kesejahteraan Masyarakat dan kesejahteraan sosial				-	100 %	10.953.570.190,00	6.890.589.486,00	9.852.729.969,00	- 1.100.840.221,00			-	-	Masyarakat Kota Sukabumi		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0 Dokumen	10 Dokumen	2.118.735.220,00	1.517.735.220,00	1.880.535.220,00	- 238.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Sindan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

													gpal ay							
	4.01.02.2. 02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian				0 Dokumen	4 Dokumen	4.568.7 35.220,00	4.790.2 35.120,00	6.173. 375.603,00	1.604.6 40.383,00	Kot a Suk abu mi, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a Kot a Suk abu mi, War udo yon g, Ben teng Kot a Su ka bu mi, Le mb urs itu, Sin da ngs ari	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD) BAN TUA N KEU ANG AN KHU SUS DAR I PEM ERI NTA H PRO VINS I	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

			Penduduk dan KB																	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				0 Dokumen	3 Dokumen	4.266.099.750,00	582.619.146,00	1.798.819.146,00	- 2.467.280.604,00	Kotaka Sukabumi, Semau Kecamatan, Semau Kel /Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	572.500.000,00	772.500.000,00	778.860.000,00	206.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukh	-	seluruh perangkat dae		629.775.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														anka m Dan Tran sfor masi Pela yana n Publi k		rah dan pih ak ter kait				
	4.01.02.2. 03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			<i>Jumla h Produ k Huku m Daera h yang Disus un</i>				0 Doku men	228 Doku men	119.975 .000,00	119.975 .000,00	149.97 5.000, 00	30.000. 000,00	Kot a Suk abu mi, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel /De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	Mem per uat Stab ilitas Polh ukh anka m Dan Tran sfor masi Pela yana n Publi k	- -			131.975 .000,00	SEKRETARI AT DAERAH
	4.01.02.2. 03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			<i>Jumla h Kasus yang Menda patka n Fasilit asi Bantu an Huku m</i>				0 Kasus	3 Kasus	245.000 .000,00	445.000 .000,00	421.36 0.000, 00	176.360 .000,00	Kot a Suk abu mi, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel /De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	Mem per uat Stab ilitas Polh ukh anka m Dan Tran sfor masi Pela yana	- -			269.500 .000,00	SEKRETARI AT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PERI ODE REN STR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkur ang (10- 12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)	
							SEBE LUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024				NASIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaa n dan Pengawasa n Ekonomi Mikro Kecil</i>				0 Doku men	1 Doku men	61.500.0 00,00	61.500. 000,00	61.500 .000,0 0	0,00	Kota Sukab umi, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETAR IAT DAERAH
	4.01.03. 2.02	Pelaksana an Administ rasi Pembangu nan	-				-	-	70.387.0 58,00	70.386. 600,00	100.38 6.600, 00	29.999.5 42,00			-	-	-		0,00	SEKRETAR IAT DAERAH
	4.01.03. 2.02.000 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendali an dan Evaluasi Program Pembangu</i>				0 Lapora n	4 Lapora n	70.387.0 58,00	70.386. 600,00	100.38 6.600, 00	29.999.5 42,00	Kota Sukab umi, Semua Kecam atan, Semua Kel/De	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETAR IAT DAERAH

			nan										sa							
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	271.966.640,00	272.466.400,00	272.466.400,00	499.760,00			-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa					0 Dokumen	10 Dokumen	109.241.640,00	109.241.400,00	109.241.400,00	-240,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
		Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik					0 Dokumen	10 Dokumen	68.525.000,00	69.025.000,00	69.025.000,00	500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peni			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																ngk atan Kual itas Pela yan an Publ ik Den gan Pen guat an Bud aya Krea tif & Inov atif					
	4.01.03. 2.03.000 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	100 Orang	94.200.0 00,00	94.200. 000,00	94.200 .000,0 0	0,00	Kota Sukab umi, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETAR IAT DAERAH	
	J U M L A H								1.039.26 0.049.16 2,00	1.272.8 28.818. 997,00	1.337. 805.49 7.363, 00	298.545. 448.201, 00							349.459.9 04.296,00		

Sumber: SIPD Anggaran Perubahan 2024

Dari tabel tersebut dapat tergambarkan bawa dalam anggaran perubahan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 2.373.160.868,00 yang dialokasikan untuk optimalisasi pencapaian output. Dalam masing-masing sub kegiatan dapat dilihat ada yang mengalami pergeseran pagu baik bertambah maupun berkurang berdasarkan hasil kajian/analisis masing-masing PPTK untuk pencapaian outputnya masing-masing. Implikasi yang mungkin timbul adalah adanya efisiensi anggaran dalam pemenuhan output, sehingga pergeseran anggaran akan difokuskan berdasarkan skala prioritas pada masing-masing sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman agar program dan kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tersebut dapat dicapai.

Sekretariat Daerah dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta dapat berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai *fasilitator* maupun *advisor* perumusan kebijakan publik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

B. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemerintah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat inovatif dan respek terhadap aturan- aturan yang ditentukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk diimplementasikan, termasuk dalam tatanan proses perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun ke-1 dalam Rencana Strategis Satuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengalami perubahan seiring dengan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap mengacu kepada bentuk dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas dan tanggung jawab sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang tersebut meletakkan otonomi seluas-luasnya pada Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang

kewenangan daerah Kota Sukabumi. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi. Sehubungan dengan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi di bidang Keamanan dan ketertiban umum masyarakat, ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagai dasar hukum dan kerangka acuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam menentukan arah dan kebijakan Pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kota Sukabumi. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi maka disusun Rencana Perubahan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024, dengan tujuan di samping untuk dijadikan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi juga untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) periode tertentu.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 ini mencerminkan Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi merupakan unsur untuk mendukung fasilitas pelayanan administratif serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan (Supporting System) Renja ini dibuat mengacu pada Renstra yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun. Selain itu juga sebagai bahan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi yang merupakan bahan dalam proses penyusunan APBD Kota Sukabumi. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 dimulai dari penyusunan rancangan awal perubahan renja perangkat daerah yang akan menjadi dasar bagi rancangan perubahan RKPd Kota Sukabumi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat

daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait.

Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan walikota, maka rancangan perubahan renja perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari walikota. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan Sekertaris DPRD Kota Sukabumi selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Sekertariat DPRDKota Sukabumi Tahun 2024.

1.2 Landasan hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25);
18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 62);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dibuatnya Rencana Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah menyusun Rencana Pembangunan, Program dan Kegiatan Tahunan yang sifatnya aspiratif dan terpadu serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Perubahan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah agar tercipta pelaksanaan program dan kegiatan yang sinergi dan efisien sesuai dengan alokasi dan sumber daya pembangunan dengan sasaran RPJMD Kota Sukabumi dan Renstra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi .
disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan triwulan II (semester I)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

Berisi matrik renja sesuai SIPD, berikan penjelasan point-point penting anggaran perubahannya.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja s/d Triwulan II

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02 .01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	36,179, 897,64 3	57.91	57.91	20,682,749,063	57.17

4.02.01.200		PRENCANAAN, PENGANGGARAN , DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	100	74,756,450	50.00	50.00	53,920,950	72.13
4.02.01.201		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, FPD)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	48,000,000	2	100.00	36,998,000	77.08
		Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2,249,000	1	50.00	0	0.00

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	2	2,221,000	1	50.00	1,532,950	69.02
		Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	2,237,500	0	0.00	1,371,500	61.30

		Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	dokumen	2	2,249,250	0	0.00	0	0.00
		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	2	15,003,700	1	50.00	12,687,500	84.56

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	2	2,796,000	2	100.00	1,331,000	47.60
4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	4,161,260,861	80.00	80.00	2,194,475,233	52.74

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	35	4,141,261,311	35	100.00	2,187,517,733	52.82
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keunagan SKPD	<u>dokumen</u>	12	5,000,000	6	50.00	3255000	65.10

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	4,999,700	1	100.00	1,755,000	35.10
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	1	4,999,850	1	100.00	0	0.00

		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan laporan koorsinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	12	5,000,000	6	50.00	1,947,500	38.95
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	588,918,700	71.03	71.03	454,908,306	77.24

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	kegiatan	1	100,000	1	100.00	-	0.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	terpenuhinya PSL , PDH Pakaian Adat	paket	3	80,999,700	2	66.67	58,310,000	71.99
		sosialisasi Peraturan Perundang	Jumlah orang yang mengikuti	orang	28	349,999,850	20	71.43	240,213,156	68.63

		- undangan	sosialisasi peraturan perundang undangan							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementa si peraturan perundang undangan	oran g	20	157,819,150	15	75.00	156,385, 150	99. 09
4.02.0 6.2.0		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran	%	100	2,109,319,200	62.39	62.39	1,128,5 43,055	54
4.02.0 1.2.0		Penyediaan Komponen Instansi listrik/peneran gan bng. Kantor	Jumlah tersedianya kebutuhan alat listrik dan instalansi listrik	jenis	17	26,996,200	10	58.82	26,818,0 00	99. 34

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor, peralatan pendukung kebersihan kantor, jumlah peralatan pendukung kebersihan lainnya , jumlah souvenir hut kota , kemerdekaan RI dan pelantikan	buah	92	488,343,500	80	86.96	194,667,200	39.86
4.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di	paket	2	67,996,500	1	50.00	14,436,500	21.23

			sediakan							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3	214,000, 000	2	66.67	206,028,00 0	96. 27
4.02.0 1.2.06 .05		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU -an	Jumlah surat kabar harian dan jumlah surat kabar mingguan	expl	35	600,000, 000	24	68.57	357,550,00 0	59. 59
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah sewa jasa tenaga kesenian , sewa peralatan , sewa kendaraan bermotor , sewa alat rumah tangga , sewa bangunan gedung, sewa taman , sewa hotel	paket	7	320,994, 000	4	57.14	79,624,000	24. 81

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	dus	1650	324,995,000	800	48.48	191,341,635	58.88
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	8	64,994,000	5	62.50	58,077,720	89.36
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Arsip	3	1,000,000	-	0.00	-	0.00

4.02.01. 2.0 7		PENGADAAN ARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	141,207,100	66.6 7	66.67	38,500,000	27.26
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	3	141,207,100	2	66.67	38,500,000	27.26
4.02.01. 2.0 8		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	941,136,820	52.3 5	52.35	452,461,802	48.08
4.02.01. 2.08 .01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	<u>lembar</u>	36 0	5,000,000	200	55.56	3,000,000	60.00
4.02.01. 2.08 .03		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	bulan	12	156,116,820	6	50.00	69,567,800	44.56

Kode	Tujuan / Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	jumlah belanja bahan bakar gas dan non subsidi , jumlah jasa kebersihan , jumlah pembayaran jasa keamanan	bulan	12	219,920,000	6	0.00	91,534,000	41.62
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL)	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	13	560,100,000	7	53.85	288,360,002	51.48

4.02.01.09.20		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%	100	792,322,600	61.67	61.67	471,914,361	59.56
4.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	kendaraan	1	49,860,000	1	100.00	6,074,513	12.18
4.02.01.2.09.06		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	kendaraan	15	129,981,000	10	66.67	94,827,535	72.95

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.09.09		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	paket	5	98,970,000	2	40.00	22,519,000	22.75
		Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	pekerjaan	5	513,511,600	2	40.00	348,493,313	67.86

		LAYANAN KEUANGAN & KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD	%	100	26,299,528,912	50.00	50.00	15,313,996,932	58.23
		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD (Gaji & Tjngn Dewan)	jumlah anggota dprd yang menerima hak keuanagan DPRD	orang	35	26,009,543,312	35	100.00	15,218,463,932	58.51
		Penyediaan Pakaian Dinas & Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut dprd yang disediakan	paket	4	239,985,650	2	50.00	94,803,000	39.50

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	orang	35	49,999,950	-	0.00	730,000	1.46
		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase pemenuhan administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD	%	100	1,071,447,000	27.08	27.08	574,028,424	53.58
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Fraksi DPRD	lan	12	250,000,000	3	25.00	153,643,374	61.46
		asilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (rapat Paripurna)	mlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	kegiatan	24	821,447,000	7	29.17	420,385,050	51.18

		DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	%	100	19,258,439,45 0	61.83	61.83	12,359,350,434	64.18
--	--	---	--	---	-----	--------------------	-------	-------	----------------	-------

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PEMBENTUKAN PERDA & PERATURAN DAERAH	Persentase Raperda Yang ditetapkan menjadi Perda	%	100	1,914,417,850	66.43	66.43	781,516,442	40.82
		Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasahan program pembentukan peraturan daerah	dokumen	8	1,010,856,400	6	75.00	383,875,158	37.98

		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	7	849,999,000	4	57.14	397,641,284	46.78
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	dokumen	35	49,929,050		0.00	-	0.00
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik yang di fasilitasi	dokumen	1	2,633,450	1	100.00	-	0.00
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	dokumen	1	999,950	1	100.00	-	0.00

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	Persentase Terasiliasi Pembahasan APBD	%	100	2,232,820,950	50.00	50.00	929,058,795	41.61
		Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	8	1,007,721,700	4	50.00	560,870,400	55.66
		Pembahasan APBD	Keputusan hasil pembahasan APBD	kgt	1	399,999,750	0	0.00	5,510,000	1.38

		Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	Dokumen	1	399,999,800	0	0.00	0	0.00
		Pembahasan Laporan Semester	jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemeser	dokumen	1	100,000	1	100.00	0	0.00
		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	dokumen	1	424,999,700	1	100.00	362,678,395	85.34
		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Terfasilitasi kegiatan Komisi	%	100	9,195,199,300	61.46	61.46	7,301,910,528	79.41

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Komisi I)	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	laporan	35	2,690,000,000	18	51.43	1,924,109,339	71.53
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Komisi 3)	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kegiatan	27	3,205,039,800	17	62.96	2,488,809,795	77.65
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah laporan hasil pengawasan	lapor	20	2,875,159,	14	70.00	2,467,750,894	85.

		Perekonomian (Komisi 2)	urusan pemerintahan bidang perekonomian	an		700				83
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	dokumen	1	424,999,800	1	100.00	421,240,500	99.12
		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas & Fungsi DPRD	%	100	2,461,972,900	62.45	62.45	1,227,505,168	49.86
		Pendalaman tugas/ Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan Adeksi, Partai dan Bimtek DPRD	kegiatan	12	1,020,045,000	6	50.00	356,367,571	34.94

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	kegiatan	98	838,998,000	77	78.57	595,060,697	70.93
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang terbayarkan	bulan	11	572,930,000	6	54.55	258,447,000	45.11
		Penyusunan Program Kerja DPRD (Banmus)	tersusun nya rencana kerja DPRD	kegiatan	12	29,999,900	8	66.67	17,629,900	58.77

		PENYERAPAN & PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	1,029,616,650	83.33	83.33	939,145,000	91 21
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Hearing/dialog)	jumlah laporan hasil kerja kunjungan kerja DPRD	laporan	36	224,958,800	30	83.33	147,150,000	65 41
		Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	jumlah dokumen pokok pokok pikiran dDPRD	dokumen	12	24,998,000	8	66.67	16,295,000	65 19
		Pelaksanaan RESES	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	kegiatan	1	779,659,850	1	100.00	775,700,000	99 49
		PELAKSANAAN & PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib & Kode Etik	%	100	433,424,350	50.83	50.83	167,740,500	38 70
		Penyusunan Kode etik DPRD	Jumlah kode etik dan tataberacara DPRD	kegiatan	12	22,674,750	5	41.67	2,600,000	11 47

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II			
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Kegiatan	5	410,749,600	3	60.00	165,140,500	40.20
		FASILITASI TUGAS DPRD	Persentase Pembahasan Kerja sama yang ditindak lanjuti	%	100	1,990,987,450	58.33	58.33	1,012,474,001	50.85
		Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	Laporan	8	698,277,850	5	62.50	285,604,197	40.90

			dan konsultasi DPRD							
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (perjadin)	terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Kegia tan	8	940,129,700	5	62.50	560,908,224	59. 66
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah dokumen hasil fasilitasi dan tugas pimpinan DPRD	Kegia tan	8	352,579,900	4	50.00	165,961,580	47. 07
Jumlah						55,438,337,0 93	59.87	59.87	33,042,09 9,497	59. 60

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekertariat DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024 Tabel 2.2 (Tabel Tc. 29)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran	Prosentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01. 2 .01.01	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Renja, FPD)	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen FGD	100%	100%	2	2	93%	100%	1 Dok	100 %

4.02.01.2 .01.02	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	100%	100%	4	4	100%	100%	1 Dok	100%
4.02.01.2 .01.03	Koordinasi & Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	100%	100%	2	2		100%	1 Dok	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Perubahan RKA- SKPD						100%			
4.02.01. 2 .01.04	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	100%	100%	3	3	100%	100%	1 Dok	100%
4.02.01. 2 .01.05	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	100%	100%	3	3	100%	100%	1 Dok	100%

4.02.01.2 .01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja ddan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan Rapat Laporan evaluasi kinerja ,jumlah dokumen LAKIP, LPPD,LKPJ dan SPM	100%	100%	3	2	82%	100%	12 Dok	100%
4.02.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen SPIP	100%	100%	2	2	99%	100%	1 Dok	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.02.01. 2.02	ADMINIST RASI KEUANGA N PERANGKA T DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	100	97%	100%	100	100%
4.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	100%	100%	1 (35)	35	97%	100%	1 (34)	100%
4.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat	100%	100%	2	2	90%	100%	1 Dok	100%

	Akhir Tahun SKPD	waktu								
4.02.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan /triwulan/ Semester an SKPD	Jumlah dokumen perencanaan laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	2	2	98%	100%	4 dok	100%
4.02.01.	ADMINISTRASI	Persentase	100%	100%	100	100	99%	100%	100	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.05	KEPEGAW AIAN PERANGKA T DAERAH	pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah								
4.02.01. 2 .05.02	Pakaian Dinas beserta perlengkap anny a	pakaian adat setwan/pak aian olahraga setwan	100%	100%	0	0	0%	100%	56 Stel	100%
4.02.01. 2 .05.10	sosialisa si Peratura n Perunda ng- undangan	Kepesertaan Asdeksi Nasional dan Asdeksi Korwil	100%	100%	3	3	100%	100%	6 Dok	100%

4.02.01. 2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU	Jumlah Bimbingan teknis Sekretariat DPRD	100%	100%	1	1	100%	100%	1 Dok	100%
4.02.01. 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.01. 2 .06.01	Penyediaan Komponen	Jumlah tersedianya kebutuhan alat listrik	100%	100%	14	14	100%	100%	15 Jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Instansi listrik/pene rang an bng. Kantor	dan instalansi listrik								
4.02.01. 2 .06.02	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor, peralatan pendukung kebersihan kantor,Pembuata n aplikasi dan belanja Tablet anggota DPRD , Komputer, AC	100%	100%	124	124	100%	100%	35 unit	100%
4.02.01. 2 .06.03	Penyediaa n Peralatan rumah	Jumlah peralatan rumah tangga (gelas Cangkir, gelas	100%	100%	3	3	100%	100%	20 Jenis	100%

	Tangga	minum, piring makan)								
4.02.01.2 .06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya cetakan dan pengadaan	100%	100%	14/15177/20	14/151177/20	98%	100%	1 Dok	100%
4.02.01.2 .06.05	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU - an	Jumlah surat kabar harian dan jumlah surat kabar mingguan	100%	100%	29	29	100%	100%	50 Exp	100%
4.02.01.2 .06.07	Penyediaan	Jumlah sewa peralatan	100%	100%	3	3	99%	100%	2 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Bahan Material	kantor, untuk HUT Kota Sukabumi, Hut DPRD Kota Sukabumi, Hut RI, Karpet								
4.02.01. 2 .06.08	fasilitas i Kunjun gan Tam u	jumlah makanan & minuman Tamu DPRD & Sekretariat dan snack tamu DPRD & Sekretariat	100%	100%	1665/48 0	1665/48 0	100%	100%	200 dus	100%
4.02.01. 2 .06.09	Penyelengga raa n Rapat Koordinasi	Jumlah Kegiatan Konsultasi dan	100%	100%	5	5	100%	100%	20 keg	100%

	dan Konsultasi SKPD	koordinasi keluar dan dalam Daerah								
4.02.01. 2.07	PENGADAA N BARANG MILIK DAERAH PENUNJAN G URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.01. 2 .07.05	Pengada an Mebel	Jumlah tersedianya mebel (Meja kerja, Sofa, Lemari	100%	100%	3	3	100%	100%	3 paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		penyimpanan, Kursi kerja pejabat).								
4.02.01. 2.08	PENYEDI AAN JASA PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	100	94%	100%	100	100%
4.02.01. 2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 10.000	100%	100%	200	200	100%	100%	2000 lbr	100%
4.02.01. 2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber	Jenis rekening yang dibayar : Telpon, Air , Internet	100%	100%	12	10	82%	100%	12	100%

	daya air dan Listrik									
4.02.01. 2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkap an Kantor	1. Jumlah belanja tabung pemadam kebakaran, bahan bakar gas non subsidi, 2. onorarium Rohaniawan, Jasa Tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan	100%	100%	4/24	4/24	98%	100%	50 kali	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.02.01. 2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL)	Pembayaran honorarium tenaga THL, BPJS Kesehatan dan Ketenagkerjaa n THL	100%	100%	20	20	96%	100%	20	100%
4.02.01. 2.09	PEMELIHAR AAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJAN G URUSAN PEMERIN TAH	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100	100	97%	100%	100	100%

	DAERAH									
4.02.01. 2 .09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara & dbayarkan pajaknya dan perizinanya	100%	100%	3	3	90%	100%	3 Unit	100%
4.02.01. 2 .09.02	Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan	100%	100%	15	15	99%	100%	10 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	pemelihara an, biaya pemelihara an dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasion al atau lapangan	perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara & dbayarkan pajak dan perizinnnya								

4.02.01. 2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara { (1. Jumlah perbaikan /instansi jaringan internet (beban tv kabel, jasa internet), 2. perbaikan alat kantor/rumah tangga(pompa air tangki,CCTV,gen set,ha ndycam,instalnsi internet,LCD proyektor,Mic Chairman,Sound	100%	100%	12	12	99%	100%	12 bulan	100%
-------------------------	---	---	------	------	----	----	-----	------	----------	------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Sytem,TV), 3.Perbaikan Printer., 4. Perbaikan AC Ruangan, 5. Perbaikan Komputer PC/Notebook }								
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan	Jumlah terpeliharanya perawatan gedung kantor	100%	100%	1	1	97%	100%	1 gedung	100%

	lainnya									
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN & KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD	100%	100%	100	100	99%	100%	100	100%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD (Gaji & Tjngn Dewan)	GAJI DAN TUNJANGAN DEWAN	100%	100%	35	35	99%	100%	35	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.02.01. 2 .15.01.0 2	Penyediaan Pakaian Dinas & Atribut DPRD	Jumlah Pakain Dinas & Atribut (PSH, PDH, pakaian Adat DPRD dan atribut DPRD)	100%	100%	105	105	98%	100%	35 stel	100%
4.02.01. 2 .15.03	Pelaksana an Medical Check Up DPRD	Jumlah terpenuhinya Jaminan Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya	100%	100%	35	35	93%	100%	35	100%

4.02.01. 2.16	LAYANAN ADMINIST RASI DPRD	Persentase pemenuhan administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.01. 2 .16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat Fraksi	100%	100%	12	12	100%	100%	10 kgt	100%
4.02.01. 2 .16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (rapat Paripurna)	Jumlah Kegiatan Rapat Paripurna dan Risalah Paripurna	100%	100%	39	39	100%	100%	10 kgr	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.02.02	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERDA & PERATURAN DAERAH	Persentase Raperda Yang ditetapkan menjadi Perda	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%

4.02.02.2 .01.01	Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pansus Non Raperda dan terfasilitasinya kegiatan pembahasan propemperda	100%	100%	7	7	100%	100%	10 Keg	100%
4.02.02.2 .01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama ditetapkan menjadi perda	100%	100%	11	11	100%	100%	6 Reperda	100%
4.02.02.2 .01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah terlaksananya konsultasi dan koordinasi kajian perundang undangan	100%	100%	16/5	16	99%	100%	2 buku	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.02.02. 2 .01.04	Fasilitasi Penyusuna n Penjelasan/ Kete rangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah terlaksananya konsultasi dan koordinasi Penjelasan/kete ranga n dan /atau Naskah akademik	100%	100%	3	3	100%	100%	1	100%
4.02.02. 2 .01.05	Penyusu nan Tata Tertib DPRD	Jumlah terfasilitasinya Kegiatan Tata Tertib DPRD	100%	100%	1	1	92%	100%	1	100%
4.02.02. 2.02	PEMBAHA SAN KEBIJAKA N	Persenta se Terfasilt asi	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%

	ANGGARAN	Pembahasan APBD								
4.02.02.2.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terwujudnya KUA dan PPAS	100%	100%	5	5	100%	100%	1 keg	100%
4.02.02.2.02	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Terwujudnya KUPA dan PPAS Perubahan	100%	100%	5	5	100%	100%	8 keg	100%
4.02.02.2.03	Pembahasan AP BD	Keputusan hasil pembahasan APBD	100%	100%	12	12	100%	100%	1 keg	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.02.02. 2 .04	Pembaha san APBD Perubahan	Keputusan hasil pembahasan APBD Perubahan	100%	100%	13	13	100%	100%	1 keg	100%
4.02.02. 2 .06	Pembahas an Pertanggu ng Jawaban APBD	keputusan hasil pembahasan pertanggungjaw aban APBD	100%	100%	1	1	100%	100%	1 keg	100%
4.02.02. 2.03	PENGAWAS AN PENYELEN GGAR AAN PEMERINTA HA N	Persentase Terfasilitasi kegiatan Komisi	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%

4.02.02.2.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Komisi I)	Jumlah kegiatan urusan Pemerintah dibidang hukum dan pemerintahan (Komisi 1)	100%	100%	45	45	100%	100%	12 keg	100%
4.02.02.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah kegiatan urusan Pemerintah dibidang	100%	100%	45	45	99%	100%	12 keg	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Bidang Kesejatera an Rakyat (Komisi 3)	kesejahteraan (komisi 3)								
4.02.02. 2 .04	Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomi an (Komisi 2)	Jumlah kegiatan urusan Pemerintah dibidang Ekonomi (komisi 2)	100%	100%	45	45	100%	100%	12 keg	100%

4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas & Fungsi DPRD	100%	100%	100	100	99%	100%	100	100%
4.02.02.2.04.02	Pendalaman tugas/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan Adeksi, Partai dan Bimtek DPRD	100%	100%	3	3	100%	100%	12 keg	100%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi	Website DPRD, Dokumentasi kegiatan,	100%	100%	2 , 1200 , 12	2,1200,12	100%	100%	12 bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Dewan	Sosialisasi Promosi kegiatan DPRD								
4.02.02. 2 .04.05	Penyedia an Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang terbayarkan	100%	100%	8	8	98%	100%	10 orang	100%
4.02.02. 2 .04.07	Penyusun Program Kerja DPRD (Banmus)	Pembahasan Agenda Rencana Kegiatan tahunan DPRD, pembahasan agenda rencana kegiatan bulanan DPRD,	100%	100%	18	14	80%	100%	8 keg	100%

		Dokumen hasil rapat								
4.02.02.2.05	PENYERAPAN & PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Hearing/dialog)	Dialouge/hearing dan Kopdar	100%	100%	6	6	100%	100%	12 keg	100%
4.02.02.2.05.02	Penyusunan pokok-pokok	Pokir DPRD	100%	100%	3	3	100%	100%	1 keg	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	pikiran DPRD									
4.02.02. 2 .05.03	Pelaksan aan RESES	Jumlah Kegiata Reses: 1. Masa Persidangan ke I (Tgl 2 Sept - Desember 2021), 2. Masa Persidangan ke II (Januari - April 2021), 3. masa Persidangan III (Mei - Agustus 2021)	100%	100%			91%	100%	3 kali	100%

4.02.02.2.06	PELAKSANAAN & PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib & Kode Etik	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode etik DPRD	Jumlah sidang/rapat/rekomen/dasi/ran/keputusan	100%	100%	3 , 322	3,322	34%	100%	5 buku	100%
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, jumlah rapat - rapat pengawasan dan penegakan kode etik	100%	100%	12	12	100%	100%	8 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2))	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n- 1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		dan tatib								
4.02.02. 2.08	FASILITA SI TUGAS DPRD	Persentase Pembahasan Kerja sama yang ditindak lanjuti	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%
4.02.02. 2 .08.01	Koordina si & Konsulta si Pelaksana an Tugas DPRD	Jumlah terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	8	8	100%	100%	5 kegiatan	100%

4.02.02. 2 .08.03	Fasilitasi Pelaksana an Tugas Badan Musyawarah (perjadin)	Jumlah kegiatan Koordinasi Badan Musyawarah DPRD Kota Sukabumi	100%	100%	12	12	100%	100%	8 kegiatan	100%
4.02.02. 2 .08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah terlaksannya undangan Pimpinan DPRD	100%	100%	6	6	99%	100%	10 kegiatan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 dan 121 tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang Pencapaian dan Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (T.C.3)
Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1.	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.	Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD				90%	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Sumber : Diolah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Tahun anggaran 2024 hingga triwulan I bsemua indikator kinerja mencapai target yang telah di tetapkan. Hal ini karena waktu pelaksanaan kegiatan ada yang di tetapkan di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga realisasi capaian pun hampir sesuai dengan target.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, maka dapat terlihat dan terukur kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi secara baik dan signifikan.

Dampak dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Sukabumi adalah adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi adalah perlunya Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Sukabumi

Berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi bahwa tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi teridentifikasi sebagai berikut:

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan kondisi SDM, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yg belum sesuai;
2. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD Sehingga waktu pembahasan oleh DPRD Menjadi tidak maksimal

3. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan

Dalam rangka meningkatkan Kinerja serta Akuntabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas Kinerja Para Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

Tabel 2.4 (T.C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4:02:01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	37.431.290.605	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	37.431.290.605	
4.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat	100%	67.975.765	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan	100%	67.975.765	

			daerah					laporan kinerja perangka t daerah			
01.5.01.2:0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETW AN	Jumlah Do kumen Perencana an Perangkat Daerah	2 Dok.	47.000.0 00	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	SETW AN	Jumlah D okumen Perencan aan Perangka t Daerah	2 Dok.	47.000.000	APB D
4.02.01.20 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	SETW AN	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.550.00 0	Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA- SKPD	SETW AN	Jumlah Dokum en RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokumen RKA- SKPD	2 Dok.	2.550.000	APB D

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dok	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dok.	2.450.000	APB D
--	--	------------	---	-------	-----------	--	------------	---	--------	-----------	----------

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SETW AN	RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SETW AN	RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2.450.000	APB D
4.02.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2.500.000	APB D

4.02.01.20 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lapor an	7.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lapor an	7.950.000	APB D
4.02.01.20 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	SETW AN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Lapor an	3.075.765	Evaluasi Kinerja Perangkat	SETW AN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Lapor an	3.075.765	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1 4.02.01.20 2	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	4 Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5 100%	6 3.941.562.423	7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	9 Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	10 100%	11 3.941.562.423	12 APB D
4.02.01.20 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SETW AN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.876.462.423	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SETW AN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.876.462.423	APB D
4.02.01.20 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SETW AN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Dok	100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SETW AN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Dok	100.000	APB D

			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
4.02.01.20 2.03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	12 Dok	5.000.000	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	12 Dok	5.000.000	APB D
4.02.01.20 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok.	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok.	2.500.000	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sum r Angga an
1 4.02.01.20 2.06	2 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 SETW AN	4 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 12 Dok	6 15.000.000	7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8 SETW AN	9 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 12 Dok	11 15.000.000	12 APB D
4.02.01.20 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	2.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.500.000	APB D

			Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD								
4.02.01.20 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SETW AN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	40.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SETW AN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	40.000.000	APB D
4.02.01.20 5	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi kepagawaian sesuai standar	100%	180.000.000	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	SETW AN	Persentase ketersediaan administrasi kepagawaian sesuai standar	100%	180.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sum r Anggaran
1 4.02.01.20 5.01	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 SETW AN	4 Jumlah pakaian seragam Polisi Pamong Praja beserta perlengkapannya dan Pakaian Kerja Lapangan	5 165 Paket	6 180.000.000	7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 SETW AN	9 Jumlah pakaian seragam Polisi Pamong Praja beserta perlengkapannya dan Pakaian Kerja Lapangan	10 165 Paket	11 180.000.000	12 APB D
4.02.01.20 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SETW AN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SETW AN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	45.000.000	APB D

4.02.01.20 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SETW AN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 Orang	100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SETW AN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 Orang	100.000	APB D
4.02.01.20 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SETW AN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Kegiatan	330.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SETW AN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Kegiatan	330.000.000	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETW AN	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	125.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETW AN	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	125.000.000	APB D
4.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	1.435.990.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	1.435.990.000	
4.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SETW AN	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan	20 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SETW AN	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan	20 Paket	15.000.000	APB D

			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
4.02.01.20 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SETW AN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Unit	220.000.00 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SETW AN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Unit	220.000.00 0	APB D
4.02.01.20 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SETW AN	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	14.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SETW AN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	14.000.000	APB D
4.02.01.20 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SETW AN	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	200.000.00 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SETW AN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	200.500.00 0	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SETW AN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Expl	600.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SAET WAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Expl	600.000.000	APB D
4.02.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	SETW AN	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Kegiatan	131.000.000	Penyediaan Bahan/Material	SETW AN	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Kegiatan	131.000.000	APB D
4.02.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SETW AN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1650 Dus	214.990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SETW AN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1650 Dus	214.990.000	APB D

4.02.01.20 6.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lapor an	40.000.00 0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETW AN	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lapor an	40.000.00 0	APB D
4.02.01.20 6.10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	5 Arsip	1.000.00 0	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	SETW AN	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	5 Arsip	1.000.00 0	APB D
4.02.01.20 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	120.000.0 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	120.000.0 00	
4.02.01.20 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SETW AN	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SETW AN	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1000.000	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPd 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1 4.02.01.20 7.02	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 SETW AN	4 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 6 Unit	6 1.000.000	7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 SETW AN	9 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 6 Unit	11 1.000.000	12 APB D
4.02.01.20 7.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	SETW AN	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	100.000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	SETW AN	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	100.000	APB D
4.02.01.20 7.05	Pengadaan Mebel	SETW AN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	Pengadaan Mebel	SETW AN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	APB D

4.02.01.20 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000	APB D
4.02.01.20 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	APB D
4.02.01.20 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.000.000	APB D
4.02.01.20 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPd 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	758.047.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	758.047.600	
4.02.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETW AN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETW AN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	2.000.000	APB D
4.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SETW AN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SETW AN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Bulan	120.000.000	APB D

			Listrik yang Disediakan					Listrik yang Disediakan			
4.02.01.20 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SETW AN	Jumlah Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Kali	135.000.00 0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SETW AN	Jumlah Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Kali	135.000.0 00	APB D
4.02.01.20 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SETW AN	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL) yang Disediakan	12 Bulan	503.000.00 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SETW AN	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL) yang Disediakan	12 Bulan	503.000.0 00	APB D
4.02.01.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	615.195.05 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	615.195.0 50	

4.02.01.20 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SETW AN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	34.987.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SETW AN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	34.987.75 0	APB D
--------------------	---	------------	--	--------	------------	--	------------	--	--------	----------------	----------

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPd 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SETW AN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Untuk roda 2 dan 4	10 Unit	104.948.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SETW AN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Untuk roda 2 dan 4	10 Unit	104.948.000	APB D
4.02.01.209.05	Pemeliharaan Mabel	SETW AN	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	100.000	Pemeliharaan Mabel	SETW AN	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	100.000	APB D
4.02.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	SETW AN	Jumlah Peralatan dan	12 Bulan	49.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	SETW AN	Jumlah Peralatan dan	12 Bulan	49.960.000	APB D

	Lainnya		Mesin Lainnya yang Dipelihara			Lainnya		Mesin Lainnya yang Dipelihara			
4.02.01.20 9.09	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilit asi	3 Gedu ng	60.000.000	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabili tasi	3 Gedu ng	60.000.000	APB D
4.02.01.20 9.10	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilit asi	1 Unit	100.000	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabili tasi	1 Unit	100.000	APB D
4.02.01.20 9.11	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilit asi	1 Unit	424.999.30 0	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETW AN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabili tasi	1 Unit	424.999.30 0	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	29.195.267.367	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	29.195.267.367	
4.02.01.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SETW AN	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	28.972.267.367	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SETW AN	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	28.972.267.367	APB D
4.02.01.215.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	SETW AN	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	190.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	SETW AN	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	190.000.000	APB D

4.02.01.21 5.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SETW AN	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	33.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SETW AN	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	33.000.000	APB D
4.02.01.21 6	Layanan Administra si DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	800.000.00 0	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	800.000.00 0	
4.02.01.21 6.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	SETW AN	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Kegiat an	205.000.00 0	Fasilitasi Fraksi DPRD	SETW AN	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Kegiat an	205.000.00 0	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1 4.02.01.21 6.03	2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 SETW AN	4 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 12 Kegiatan	6 595.000.000	7 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 SETW AN	9 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10 12 Kegiatan	11 595.000.000	12 APB D
4:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	15.284.347.850	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	15.284.347.850	

4.2.2.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Propemperda yang ditetapkan dengan peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	2.043.917.500	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Propemperda yang ditetapkan dengan peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	2.043.917.500	APB D
4.2.2.201.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilaku	8 Dok	925.559.900	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilaku	8 Dok	925.559.900	APB D

			kan Penind akan					kan Penind akan			
4.2.2.201.2	Pembaha san Rancangan Perda	SETW AN	Terlaksanany a Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dok	750.194.05 0	Pembaha san Rancangan Perda	SETW AN	Terlaksanany a Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dok	750.194.05 0	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2.201.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	SETW AN	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Sosialisasi Perda	35 Dok	5.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	SETW AN	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Sosialisasi Perda	35 Dok	5.000.000	APB D
4.2.2.201.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Dok	2.633.450	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Dok	2.633.450	APB D

4.2.2.201.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	SETW AN	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Dok.	999.900	Penyusunan Tata Tertib DPRD	SETW AN	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Dok.	999.900	APB D
4.2.2.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	8 Dok	2.052.862.250	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	8 Dok	2.052.862.250	
4.2.2.202.1	Pembahasan KUA dan PPAS	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok.	15.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok.	15.000.000	APB D
4.2.2.202.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	959.099.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	959.099.500	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2.202.3	Pembahasan APBD	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan APBD	Dok	359.552.800	Pembahasan APBD	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan APBD	Dok	359.552.800	APBD
4.2.2.202.4	Pembahasan APBD Perubahan	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	359.579.900	Pembahasan APBD Perubahan	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	359.579.900	APBD
4.2.2.202.5	Pembahasan Laporan Semester	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok	100.000	Pembahasan Laporan Semester	SETW AN	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok	100.000	APBD

4.2.2.202.6	Pembahasan Pertanggung- awaban APBD	SETW AN	Terlaksananya a Pembahasan Pertanggung- awaban APBD	1 Dok	359.530.15 0	Pembahasan Pertanggung- awaban APBD	SETW AN	Terlaksananya a Pembahasan Pertanggung- awaban APBD	1 Dok	359.530.15 0	APB D
4.2.2.203	Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		Persentase Pengawasa n Penyelengg araan Pemerintah an	100%	5.169.839.6 50	Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		Persentase Pengawasa n Penyelengg araan Pemerintah an	100%	5.169.839.6 50	
4.2.2.203.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SETW AN	Terlaksananya a Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Keg	1.420.409.9 50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SETW AN	Terlaksananya a Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Keg	1.420.409.9 50	APB D
4.2.2.203.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SETW AN	Terlaksananya a Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Keg	100.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SETW AN	Terlaksananya a Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Keg	100.000	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2.203.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Keg	1.791.199.850	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Keg	1.791.199.850	APB D
4.2.2.203.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Keg	1.598.699.700	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Keg	1.598.699.700	APB D
4.2.2.203.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Keg	100.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Keg	100.000	APB D

4.2.2.203.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Keg	-	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Keg	-	APB D
4.2.2.203.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	SETW AN	Terlaksananya a Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	1 Keg	359.530.15 0	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	SETW AN	Terlaksananya a Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	1 Keg	359.530.15 0	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2.204	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	2.557.939.400	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	2.557.939.400	
4.2.2.204.1	Orientasi DPRD	SETW AN	Terselenggaranya Orientasi DPRD			Orientasi DPRD	SETW AN	Terselenggaranya Orientasi DPRD			APB D
4.2.2.204.2	Pendalaman Tugas DPRD	SETW AN	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	3 Keg	1.026.949.700	Pendalaman Tugas DPRD	SETW AN	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	3 Keg	1.026.949.700	APB D
4.2.2.204.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SETW AN	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan	98 Keg.	939.990.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SETW AN	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum	98 Keg.	939.990.000	APB D

			Dokumentasi Dewan					Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
4.2.2.204.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SETW AN	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SETW AN	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli			APB D
4.2.2.204.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	SETW AN	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	12 Keg	560.999.80 0	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	SETW AN	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	12 Keg	560.999.80 0	APB D
4.2.2.204.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SETW AN	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SETW AN	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat			APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2.204.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	SETW AN	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	12 Keg	29.999.900	Penyusunan Program Kerja DPRD	SETW AN	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	12 Keg	29.999.900	APB D
4.2.2.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.701.350.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.701.350.000	
4.2.2.205.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SETW AN	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD (Heraring dialouge)	12 Keg	204.980.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SETW AN	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD (Heraring dialouge)	12 Keg	204.980.000	APB D

4.2.2.205.2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	SETW AN	Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD	12 Keg	14.900.00 0	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	SETW AN	Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD	12 Keg	14.900.00 0	APB D
4.2.2.205.3	Pelaksanaan Reses	SETW AN	Terlaksananya Reses	1 Keg	1.481.470. 000	Pelaksanaan Reses	SETW AN	Terlaksananya Reses	1 Keg	1.481.470. 000	APB D
4.2.2.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	355.944.8 50	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	355.944.8 50	
4.2.2.206.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	SETW AN	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	12 Keg	22.674.90 0	Penyusunan Kode Etik DPRD	SETW AN	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	12 Keg	22.674.90 0	APB D
4.2.2.206.2	Pengawasan Kode Etik	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Kode	8 Keg	333.269.9 50	Pengawasan Kode Etik	SETW AN	Terlaksananya Pengawasan Kode	8 Keg	333.269.9 50	APB D

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DPRD		Etik DPRD			DPRD		Etik DPRD			
4.2.2.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Pembahasan Kerja Sama Daerah			Pembahasan Kerja Sama Daerah		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4.2.2.207.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			APB D
4.2.2.208	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	1.762.024.400	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	1.762.024.400	
4.2.2.208.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SETW AN	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	8 Keg	557.296.850	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SETW AN	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	8 Keg	557.296.850	APB D

			Pelaksanaan Tugas DPRD					Pelaksanaan Tugas DPRD			
4.2.2.208.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	SETW AN	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	SETW AN	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD			APB D
4.2.2.208.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Lap	913.009.850	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Lap	913.009.850	APB D
4.2.2.208.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8 Keg	291.627.700	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8 Keg	291.627.700	APB D
4.2.2.208.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8 Keg	291.627.700	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SETW AN	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8 Keg	291.627.700	APB D
					52.715.638.455					52.715.638.455	

Sumber : Diolah oleh Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

Dari anggaran rancangan awal RKPD daerah jumlah total pagu Rp. 52.687.829.206 (Lima puluh dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua ratus lima rupiah). Jumlah Program yang di laksanakan sebanyak 2 program, 17 kegiatan, 59 sub kegiatan dan 59 out put kegiatan yang di laksanakan oleh 3 bidang 1 sekretariat.

ANALISA RINCIAN PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN BERJALAN

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan</i>	100 %	100 %	Rp36.179.897.643	Rp36.801.930.443	Rp 622.032.800	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Pemerintah Daerah</i>						
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	100 %	100 %	Rp74.756.450	Rp79.754.200	Rp4.997.750	
4.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dok.	2 Dok.	Rp48.000.000	Rp48.000.000	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah								
4.02.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	Rp2.249 .000	Rp2.249 .000	Rp -	
4.02.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	Rp2.221 .000	Rp2.221 .000	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				an Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
4.02.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	Rp2.237 .500	Rp2.237 .500	Rp -	
4.02.01 .2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dok	2 Dok	Rp2.249 .250	Rp7.247 .000	Rp 4.997.750	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>						
4.02.01 .2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</i>	2 Laporan	2 Laporan	Rp15.003.700	Rp15.003.700	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>						
4.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	2 Laporan	Rp2.796.000	Rp2.796.000	Rp -	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %	100 %	Rp4.161.260.861	Rp4.161.260.861	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 orang	35 orang	Rp4.141.261.311	Rp4.141.261.311	Rp -	
4.02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dok	1 Dok	Rp-	Rp-	Rp -	
4.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian</i>	12 Dok	12 Dok	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verifikasi Keuangan SKPD		/Verifikasi Keuangan SKPD						
4.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok.	1 Dok.	Rp4.999.700	Rp4.999.700	Rp -	
4.02.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1 Dok	1 Dok	Rp4.999.850	Rp4.999.850	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tanggapan Pemeriksaaan	<i>Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>						
4.02.01 .2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/</i>	12 Laporan	12 Laporan	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Triwulan n/Semesteran SKPD</i>						
4.02.01 .2.02.0 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2 Dok	2 Dok	Rp-	Rp-	Rp-	
4.02.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %	100 %	Rp588.9 18.700	Rp651.4 18.650	Rp 62.499.950	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01 .2.05.0 001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	165 Paket	165 Paket	Rp100.000	Rp100.000	Rp-	
4.02.01 .2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	4 Paket	4 Paket	Rp80.999.700	Rp103.499.950	Rp22.500.250	
4.02.01 .2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	1 Orang	1 Orang	Rp-	Rp-	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		n Tugas dan Fungsi		yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
4.02.01 .2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Rp349.999.850	Rp369.999.650	Rp 19.999.800	
4.02.01 .2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp157.819.150	Rp177.819.050	Rp 19.999.900	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Perundang-Undangan</i>						
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran</i>	100 %	100 %	Rp2.109.319.200	Rp2.184.305.050	Rp 74.985.850	
4.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	20 Paket	Rp26.996.200	Rp26.996.200	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	80 Unit	80 Unit	Rp488.343.500	Rp508.343.350	Rp19.999.850	
4.02.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Jenis	3 Jenis	Rp67.996.500	Rp67.996.500	Rp-	
4.02.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan</i>	2 Jenis	2 Jenis	Rp214.000.000	Rp214.000.000	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan						
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Expl	35 Expl	Rp600.000.000	Rp625.000.000	Rp 25.000.000	
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp320.994.000	Rp320.994.000	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Disediaan</i>						
4.02.01 .2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1650 Dus	1650 Dus	Rp324.995.000	Rp344.995.000	Rp 20.000.000	
4.02.01 .2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan	50 Laporan	Rp64.994.000	Rp74.980.000	Rp 9.986.000	
4.02.01 .2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis</i>	5 Arsip	5 Arsip	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>pada SKPD</i>						
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</i>	100 %	100 %	Rp141.207.100	Rp191.207.100	Rp 50.000.000	
4.02.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	Rp-	Rp-	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Disediaan</i>						
4.02.01 .2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	6 Unit	6 Unit	Rp-	Rp-	Rp-	
4.02.01 .2.07.0 004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	Rp-	Rp-	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	Rp141.207.100	Rp191.207.100	Rp 50.000.000	
4.02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	Rp-	Rp-	Rp -	
4.02.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	Rp-	Rp-	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Disediaan</i>						
4.02.01 .2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	Rp-	Rp-	Rp-	
4.02.01 .2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor</i>	1 Unit	1 Unit	Rp-	Rp-	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Rp941.136.820	Rp963.116.820	Rp21.980.000	
4.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	360 Lembar	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Bulan	12 Bulan	Rp156.16.820	Rp156.16.820	Rp -	
4.02.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Kali	12 Kali	Rp219.920.000	Rp241.900.000	Rp 21.980.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Bulan	12 Bulan	Rp560.100.000	Rp560.100.000	Rp -	
4.02.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	<i>Persentase Pemeliharaan barang milik daerah</i>	100 %	100 %	Rp792.322.600	Rp1.044.892.100	Rp 252.569.500	
4.02.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan</i>	3 Unit	3 Unit	Rp49.860.000	Rp52.429.850	Rp 2.569.850	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>						
4.02.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan</i>	10 Unit	10 Unit	Rp129.981.000	Rp149.980.900	Rp19.999.900	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 atau Lapangan		<i>Perizinannya</i>						
4.02.01 .2.09.0 005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	1 Unit	1 Unit	Rp-	Rp-	Rp-	
4.02.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Bulan	12 Bulan	Rp98.970.000	Rp98.970.000	Rp-	
4.02.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara</i>	3 Gedung	3 Gedung	Rp-	Rp-	Rp-	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/Direhabilitasi						
4.02.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp-	Rp-	Rp-	
4.02.01 .2.09.0 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	1 Unit	Rp513.511.600	Rp743.511.350	Rp229.999.750	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		atau Bangunan Lainnya		<i>Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi</i>						
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD	<i>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD</i>	100 %	100 %	Rp26.29 9.528.912	Rp26.33 4.528.662	Rp 34.999.750	
4.02.01.2.15.001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima</i>	35 Orang	35 Orang	Rp26.00 9.543.312	Rp26.00 9.543.312	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kuangan DPRD		<i>Hak Keuangan DPRD</i>						
4.02.01 .2.15.0 002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	Rp239.985.650	Rp239.985.650	Rp -	
4.02.01 .2.15.0 003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	35 Orang	35 Orang	Rp49.999.950	Rp84.999.700	Rp 34.999.750	
4.02.01 .2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan administrasi	<i>Persentase kepatuhan</i>	100 %	100 %	Rp1.071	Rp1.191	Rp 120.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Anggota dan Pimpinan DPRD	<i>DPRD terhadap Tatib & Kode Etik</i>			.447.000	.447.000		
4.02.01.2.16.002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp250.000.000	Rp270.000.000	Rp 20.000.000	
4.02.01.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp821.447.000	Rp921.447.000	Rp 100.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	PROGRAM DUKUNGAN	Tingkat Kepuasan terhadap	<i>Tingkat Kepuasan</i>	100 %	100 %	Rp19.25	Rp21.12	Rp 1.865.001.050	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	<i>terhadap Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD</i>			8.439.450	3.440.500		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Raperda Yang ditetapkan menjadi Perda	<i>Persentase Raperda Yang ditetapkan menjadi Perda</i>	100 %	100 %	Rp1.914.417.850	Rp2.069.417.850	Rp 155.000.000	
4.02.02.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	8 Dok	8 Dok	Rp1.010.856.400	Rp1.035.856.400	Rp 25.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Peraturan Daerah</i>						
4.02.02.2.01.002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	7 Dok	7 Dok	Rp849.999.000	Rp849.999.000	Rp -	
4.02.02.2.01.003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	35 Dok	35 Dok	Rp49.929.050	Rp49.929.050	Rp -	
4.02.02.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan</i>	1 Dok	1 Dok	Rp2.633.450	Rp32.633.450	Rp 30.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		n Naskah Akademik	<i>Akademik yang Difasilitasi</i>	<i>Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>						
4.02.02 .2.01.005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>	<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>	1 Dok.	1 Dok.	Rp999.950	Rp100.999.950	Rp100.000.000	
4.02.02 .2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terfasilitasi Pembahasan APBD	<i>Persentase Terfasilitasi Pembahasan APBD</i>	8 Dok	8 Dok	Rp2.232.820.950	Rp2.342.820.550	Rp109.999.600	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.2.02.001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	1 Dok.	1 Dok.	Rp1.007.721.700	Rp1.037.721.700	Rp 30.000.000	
4.02.02.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	1 Dok	1 Dok	Rp-	Rp20.000.000	Rp 20.000.000	
4.02.02.2.02.003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	1 Dok	1 Dok	Rp399.999.750	Rp429.999.550	Rp 29.999.800	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1 Dok	Rp399.999.800	Rp429.999.600	Rp 29.999.800	
4.02.02.2.02.005	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok	1 Dok	Rp100.000	Rp100.000	Rp -	
4.02.02.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dok	1 Dok	Rp424.999.700	Rp424.999.700	Rp -	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Pertanggungjawaban APBD</i>						
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terfasilitasi kegiatan Komisi	<i>Persentase Terfasilitasi kegiatan Komisi</i>	100 %	100 %	Rp9.195.199.300	Rp9.345.199.100	Rp 149.999.800	
4.02.02.2.03.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	20 Keg	20 Keg	Rp2.690.000.000	Rp2.740.000.000	Rp 50.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02 .2.03.0 003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	20 Keg	20 Keg	Rp3.205 .039.80 0	Rp3.255 .039.60 0	Rp 49.999.800	
4.02.02 .2.03.0 004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	20 Keg	20 Keg	Rp2.875 .159.70 0	Rp2.925 .159.70 0	Rp 50.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.2.03.008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Keg	1 Keg	Rp424.999.800	Rp424.999.800	Rp -	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas & Fungsi DPRD	Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas & Fungsi DPRD	100 %	100 %	Rp2.461.972.900	Rp2.591.972.900	Rp 130.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	3 Keg	3 Keg	Rp1.020.045.000	Rp1.040.045.000	Rp 20.000.000	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	98 Keg.	98 Keg.	Rp572.930.000	Rp607.930.000	Rp 35.000.000	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	12 Keg.	12 Keg.	Rp29.999.900	Rp29.999.900	Rp -	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	12 Keg.	12Keg.	Rp838.998.000	Rp913.998.000	Rp 75.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti	<i>Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti</i>	100 %	100 %	Rp1.029.616.650	Rp1.474.618.650	Rp 445.002.000	
4.02.02.2.05.001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	12 Keg	12 Keg	Rp224.958.800	Rp249.958.800	Rp 25.000.000	
4.02.02.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	12 Keg	12 Keg	Rp24.998.000	Rp45.000.000	Rp 20.002.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.2.05.003	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	1 Keg	1 Keg	Rp779.659.850	Rp1.179.659.850	Rp 400.000.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib & Kode Etik	<i>Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib & Kode Etik</i>	100 %	100 %	Rp433.424.350	Rp433.424.050	-Rp 300	
4.02.02.2.06.001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>	<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>	12 Keg	12 Keg	Rp22.674.750	Rp22.674.650	-Rp 100	
4.02.02.2.06.002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan</i>	8 Keg	8 Keg	Rp410.749.600	Rp410.749.400	-Rp 200	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>an Kode Etik DPRD</i>						
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib & Kode Etik	<i>Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib & Kode Etik</i>	100 %	100 %	Rp1.990.987.450	Rp2.865.987.400	Rp 874.999.950	
4.02.02.2.08.001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	8 Keg	8 Keg	Rp698.277.850	Rp773.277.850	Rp 75.000.000	
4.02.02.2.08.003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi</i>	8 Lap	8 Lap	Rp940.129.700	Rp990.129.700	Rp 50.000.000	

Kode Rekening	Program /Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program (outcome) / kegiatan (Outcome) / Sub Kegiatan (sub Output		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Musyawarah		<i>Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>						
4.02.02 .2.08.0 004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	8 Keg	8 Keg	Rp352.579.900	Rp1.102.579.850	Rp749.999.950	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengembalikan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matriks Renja
Perubahan 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024								

							M	H								H					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SEKRE TARI AT DPRD							74.08 205	38.3 93	570.943	541.78							8.0		
	4	UNSU R PEND UKUN G URUS AN PEME RINTA HAN							74.08 205	38.3 93	570.943	541.78							8.0		
	4.02	SEKR ETARI AT DPRD							74.08 205	38.3 93	570.943	541.78							8.0		
1 ;	4.02. 01	PROG RAM PENU NJAN G URUS AN PEME	-				-	-	37.40 355	38.1 97.6	36.801 30.443	37.403 481.55							8.0		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRE NJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8.01.2:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	-				-	-	42.938.700	14.458.700	19.754.600	37.155.800			-	-	-		800	
																			SEKRETARIAT	

		a a n P e r a n g k a t D a e r a h																		
			Jumla h Doku men Perenc anaan Peran gkat Daera h				0 D o k u m e n	0 D o k u m e n	23.652,2 50,00	0,00	0,00	23.652,2 50,00	Kot a Suk abu mi, Se mu a Kec am a tan Ciko le	PE ND A PAT AN ASL I DA ER A H (PA D)	-	-			800	SEKRE TARI AT DPR D

	8.02.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	
--	-------------	--------------------------------	--

		n g k a t Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	IDokumen	0,00	48.000.000,00	48.000,00	48.000,00	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semarang, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kondisi Fasilitas Kota Peningkatan Kondisi Fasilitas Kota			800	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRE NJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAA NCAPAIAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKASKPD dan				Dokumen	Dokumen	6.659.000,00	6.659.000,00	6.659.000,00	800	Kotakabum	PENDAPATAN ASLI DAE	-	-			8.000	SEKRETARIAT DPR

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									i, Sekretaris Kecamatan, Cikole	RAH (PAD)						D
	4.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000,00	2.221,00	1.000,00	800	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	--			800	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	7.680,00	500,00	7.680,00	100,00	Kotakabumi, Semarang, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				0 Dokumen	0 Dokumen	9.300,00	250,00	7.680,00	700,00	Kotakabumi, Semarang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD										atan, Cikole							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET HIRPERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY AS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.01.00.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				0 La por an	0 La por an	3.480,00	15.700,00	3.700,00	7.818,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------	-----------	----------	----------	--	---------------------------------------	---	---	--	--	------	---------------------

			Kinerja SKPD																	
4.02.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	2.190,00	2.000,00	2.000,00	150,00	Kotaka Bumi, Kecamatan, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat	-					-	-	3.989,00	4.181,61	4.181,61	15.864,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADTAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Dokum en Hasil Penyed iaan Admini strasi Pelaks anaan Tugas ASN				0 Do ku m en	0 Do ku m en	0 0	00	0 0	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokum en Penata usaha an dan Penguji an/Veri fikasi Keuang an SKPD				0 Do ku m en	0 Do ku m en	5.000 0	5.889 000,0	5.000 0	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

													Cikole						
4.02.01.2.02.00.05	koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.250.000,00	4.889.700,00	4.889.700,00	3.749.700,00	Kotaka Bumi, Semarang, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.00.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[illegible]

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000,00	0,00	00	10.000,00	Kota Sukabungumi, Semuakemasatnan, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
402.05	Administrasi Kepegawaian Peran gkat Daerah	-					-	-	502.900,00	502.900,00	413.650,00	141.300,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
402.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan				0 Unit	0 Unit	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	Kota Sukabungumi,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEKUALAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Paket	Paket	4.990,00	80.990,00	98.990,00	78.990,00	Kota Sumba Bumi, Selama Kecamatan, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan				Orang	Orang	00	00	00	00	Kota Sumba Bumi, Selama Kecamatan, n,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

			ikan dan Pelatihan										Se mu a Kel /D esa							
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosiali sasi Peratur an Perund ang-Undan gan				Orang	Orang	827,00	348,82	389,62	400,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n Ci kol e	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengik uti Bimbin				Orang	Orang	24,00	15,81	17,08	050,00	Kot a Su ka b um	PEN DAP ATA N ASLI DAE	-	-			0,00	SEKRE TARI AT

			gan Teknis Implem entasi Peratur an Perund ang- Undang an									i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	RAH (PAD)							DPR D
4.02: 06	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	-				-	-	1.414 .970 00,00	2.189 319,2 00,00	2.384 .305 50,00	769.333 .050,0			-	-	-		0,00		SEKRE TARI AT DPR D

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

81.2.01	06.00	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0.000,00	26.990,00	26.990,00	200,00	Kotak Subdistribusi, Sekamata Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
81.2.02	06.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0.000,00	488.350,00	343.350,00	303.350,00	Kotak Subdistribusi, Sekamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

													n, Cik ole							
4.02: 01.2: 06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
		Jumlah Paket Peralat an Rumah Tangga yang Disedia kan				Pak et	Pak et	0.000 00	07.500 00	8.500 00	340.000 00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02: 01.2: 06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
		Jumla h Paket Baran g Cetak an				Pak et	Pak et	0.000 00	218.000 00	218.000 00	340.000 00	Kot a Su ka b um i,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH	-	-				0,00	SEKRE TARI AT DPR D

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Dokum en Bahan Bacaa n dan Peratur an Perund ang- Undan gan yang Disedia kan				0 Do ku m en	0 Do ku m en	880,00 0,00	880,00 0,00	868,00 0,00	680,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
	812,07	Penyelesaian Bahan/material																		
			Jumlah Paket Bahan /Materi al yang Disedia kan				0 Pak et	0 Pak et	130,00 0,00	320,99 0,00	320,99 0,00	190,99 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

												Cikole							
806.08	40%	fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	214.90,00	324.980,00	344.990,00	130.000,00	Kotaka Bumi, Kecamatan Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
806.09	40%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				0 Laporan	0 Laporan	40.000,00	64.994,00	64.980,00	34.980,00	Kotaka Bumi, Kecamatan Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRE NJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[illegible]

			Jumlah Unit Kendar aan Perora ngan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabata n yang Dised iakan				Unit	Unit	0 0	0,00	00	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.92: 01.2: 07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an yang Dised iakan				Unit	Unit	0 0	0,00	00	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disedi akan				Unit	Unit	60.000,00	147.780,00	207.100,00	121.200,00	Kotak Sumbu, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)	-	-			0,00	SEKRE TARIT AT DPR D
4.02.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Unit Peralat an dan Mesin Lainnya yang Disedi akan				Unit	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kotak Sumbu, Se mu a Kec	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)	-	-			0,00	SEKRE TARIT AT DPR D

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit	Unit	0 0	0,00	00	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02: 01.2: 07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Unit	Unit	0 0	0,00	00	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

			a yang Disedia kan									Se mu a Kel /D esa							
4.02: 01.2: 08	Penye diaan Jasa Penun jang Urusa n Pemer intahan Daera h	-				-	-	47.66 0,00	941.13 0,00	983.1 16.82 0,00	2051.09 160,0 0			-	-	-		0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02: 01.2: 08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	Juml ah Lapor an Peny ediaan Jasa Surat Meny urat					0 La por an	0 La por an	1.992 0,00	3.880 0,00	3.880 0,00	3.880 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n Ciköl	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

													e							
	41.02.02	08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				0 Laporan	0 Laporan	17.460,00	156.116.820,00	156.116.820,00	36.999.360,00	Kotak Sumbum i, Semu a Kecamatan Se mu a kel/D	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Disedi kan										esa								
81.2. 08.00 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Peralat an dan Perleng kapan Kantor yang Disedia kan				0 La por a n	0 La por a n	834,8 0,00	219,92 0,00	641,9 0,00	107.020 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-				0,00	SEKRE TARI AT DPR D
81.2. 08.00 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa				0 La por a n	0 La por a n	592,8 0,00	508,18 0,00	880,1 0,00	880,00 0,00	Kot a Su ka b um i,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH	-	-				0,00	SEKRE TARI AT DPR D

			Pelaya nan Umum Kantor yang Disedi akan									Se mu a Kec am ata n, Cik ole	(PA D)						
81.02.09.2:	Pemeli haraa n Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemer ntaha n Daerah	-				-	-	914,8 0,00	192,32 0,00	1.054,1 00,00	429.99,0 050,0			-	--	-		0,00	SEKRE TARI AT DPR D
81.02.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas																		
	Jumlah Kendar aan Perora ngan Dinas atau					Unit	Unit	54.98 7.750 00	49.800 00,00	92.42 9.850 00	16.442 100,00	Kot a Su ka b um i,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

			Kendar aan Dinas Jabata n yang dipilih ara aan											Se mu a Kec am ata n, Cik ole	(PA D)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--	--	--	--	--	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAD	REALISASI CAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGET REJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dibayarkan Pajaknya																	
8.02.09.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				

	02							0 Unit	0 Unit	194.00 0,00	129.98 1.00 0,00	149.98 0.90 0,00	45032.900,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
	4.02.09.00	Pemennaraan Mebel																			
			Jumla h Mebel yang Dipelih ara					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAA NMAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangun an Lainny a yang Dipelih ara/Dir e habilita si				Unit	Unit	800	0,00	000	800	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasar ana Gedung Kantor atau Bangun an Lainny a yang Dipelih ara/Dir				Unit	Unit	800	0,00	000	800	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

			e habilita si										Se mu a Kel /D esa							
4.02: 01.2: 09.00 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasar ana Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainny a yang Dipelih ara/Dir e habilita si				Unit	Unit	964,8 0,00	513,80 0,00	543,35 0,00	318,51 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02: 01.2: 15	Layan an Keuan gan	-				-	-		967,4 048,0	20,239 912,00	4,528 662,00	- 2.855.1 45.386, 00			-	-	-		0,00	SEKRE TARI AT

		dan Kesejahteraan DPRD																	DPR D
401.2.01.00	01.2.01.00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				Orang / Bulan	Orang / Bulan	28.973.367,00	26.109.312,00	26.009.312,00	- 2.962.724.055,00	Kotaka Bumi, Kecamatan Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN PERANTARA TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET REOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								SEBELUM	SEBESUDAH	RKPD 2024				APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	812.02	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakainya				0 Paket	0 Paket	999.450,00	239.985.650,00	239.985.650,00	24.988.200,00	Kotaka	PENDAPATAN	-	-			0,00	SEKRETARI

			n Dinas dan Atribut DPRD yang Disedi akan										b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	ASLI DAE RAH (PAD)						AT DPR D
4.02. 01.2. 03	05.00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengik uti Medical Check Up DPRD				Or ng	Or ng	82.2 31 00	49.99 .950 00	84.99 .700 00	469,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	--			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.02. 01.2. 16		Layan an Admi nistra	-				-	-	999. 05 0,00	447.0 00,00	447.0 00,00	391.447. 950,0 0			-	-	-		0,00	SEKRE TARI AT

		si DPRD																	DPR D
01.2.02	fasilitasi Fraksi DPRD																		
		Jumla h Lapora n Hasil Fasilit asi Fraksi DPRD				0 La por an	90 La por an	268. 00 0,00	258.88 0,00	278.88 0,00	880.88 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Cik ole	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
01.2.16.03	fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
		Jumlah Lapora n Hasil Fasilita si Rapat Koordin asi dan Konsult asi				0 La por an	0 La por an	898. 00 0,00	821.88 0,00	921.88 0,00	520.88 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

			<i>DPRD</i>										Kec am ata n, Cil e							
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODEN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA	-				-	-	83.347.850,00	19.438.450,00	21.448.500,00	-	15.284.347,850,00						0,00	

		A AN TUGA S DAN FUNG SI DPRD																		
402.01.01	2:	Pembentuk an Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	4.984.380,00	1.974.50,00	2.094.40,00	383.030.550,00			-	-	-		0,00	SEKRE TARI AT DPR D
402.01.00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan				0 Do ku men	0 Do ku men	923.559.00,00	1.010.856.400,00	1.033.856.400,00	110.290.500,00	Kota Sum ba ra, Se mu a Kec am atan, Cik	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D	

			Daerah										ole						
4.02.02.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	184.050,00	849.990,00	849.990,00	92.804.950,00	Kotak Sumbung, Kecamatan, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-				0 Dokumen	0 Dokumen	8.000,00	49.929.050,00	49.929.050,00	44.929.050,00	Kotak Sumbung, Se	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

			Unda ngan										mu a Kec am ata n, Se mu a Kec /D es a	)								
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Disiliasi				0 Do ku men	0 Do ku men	3.230,00	4.250,00	5.450,00	880,00	Kotaka Bumi, Se mu a Kecamatan, Se mu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.92.05	81.00	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Do ku men	0 Do ku men	990,00	990,00	100.990,00	100.050,00	Kotaka Bumi, Se mu a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

												Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa								
82.2:	02	Pemb ahasa n Kebija kan Angga ran	-				-	-	2.86 50,0	4.334 50,00	4.334 50,00	203.300,0			-	-	-		0,00	SEKRE TARI AT DPR D
82.2:	01	Pembahasan KUA dan PPAS																		
		Jumlah Dokum en Hasil Pemba hasan KUA dan PPAS					0 Do ku m en	0 Do ku m en	848. 50 0,00	1.997. 00,00	1.997. 00,00	93.032. 00,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUSAHA	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Dokumen Hasil Pemba hasan Peruba han KUA dan Peruba han PPAS				-	1 Do ku men	800	20.000,00	600,00	-	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uata n Buda ya Kreat if & Inova tif Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------	-----	-----------	--------	---	---	---	--	--	--	------	---------------------------------

[illegible]

04							0 Do ku men	0 Do ku men	359.579,800,00	399.880,000,00	429.990,000,00	404.19800,000,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
802.02.05	02:00	Pembahasan Laporan Semester																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAD	REALISASI CAPAIAN RENJADTAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Dokum en Hasil Pemba hasan Lapora n Realisa si Pelaks anaan APBD Per Semeste r				0 Do ku m en	0 Do ku m en	00,00	00,00	00 0,00	00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
892- 02.00 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokum en Hasil Pemba hasan Pertang gungja waban APBD				0 Do ku m en	0 Do ku m en	30,13 0,00	428,90 0,00	545,70 0,00	550,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

													Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa							
802.2: 03	Penga wasan Penyel enggar aan Pemer intaha n	-				-	-	8.189. 50,00	9.193. 00,00	9.38 00,0	8.450. 00			-	-	-		0,00		SEKRE TARI AT DPR D
802.2: 03.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
802.2: 03.01		Jumla h Lapora n Hasil Penga wasan Urusa n Pemer intahan Bidang Pemer				0 La por an	0 La por an	4.099. 50,00	4.880. 00,00	6.00 00,0	90.050. 00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00		SEKRE TARI AT DPR D

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRADAOPD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan				0	0	1.199.50,00	5.483.00,00	5.483.00,00	39.750.00	Kotakabum	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT

			Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat										i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	RAH (PAD)						DPR D
822.04	83.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	1.385.169.00,00	2.843.00,00	2.923.00,00	1.328.60.000.00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

													a Kel /D esa						
802.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah				0 Do ku men	0 Do ku men	389.330,00	424.990,00	424.990,00	65.469.650,00	Kota Sukabumi, Semarang Kecamatan, Semarang a Kel /D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARAT DPRD
802.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	2.939.00,00	4.729.00,00	4.729.00,00	380.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARAT DPRD

	8.02.02	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokum en Hasil Pendal aman Tugas DPRD				0 Do ku m en	0 Do ku m en	1.020 949 00,00	1.020 045.0 00,00	1.020 045.0 00,00	1.020 300,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPERD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENCANA OPERD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUSAHA	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Se mu a Kel /D esa								

4.92.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																				
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				0 Or ng	0 Or ng	999 00 0,00	572 00 0,00	607 00 0,00	489 00 0,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel es a	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-				0,00	SEKRE TARI AT DPR D
4.92.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																				
			Jumlah Dokum en Rencan a Kerja DPRD				0 Do ku m en	0 Do ku m en	299 00 0,00	299 00 0,00	299 00 0,00	0 00	Kot a Su ka b um i,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH	-	-				0,00	SEKRE TARI AT DPR

												Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	(PA D)						D
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumla h Doku men Publik asi dan Doku menta si DPRD				0 Do ku men	0 Do ku men	938.990,00	838.990,00	913.990,00	25.992.000,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-		0,00	SEKRE TARI AT DPR D

													a Kel /D esa							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

		Aspirasi Masyarakat																	
822.01.00		Kunjungan kerja di dalam Daerah																	
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				0 Laporan	0 Laporan	980,00	228,880,00	980,00	88,968,800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
822.02.00		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pikiran DPRD yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	18,800,00	24,998,000,00	18,800,00	88,968,800,00	Kotak Sumbar, Kecamatan, Se	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

													mu a Kel /D esa							
	802.05.03	Pelaksanaan Reses																		
			<i>Jumah Dokum en Hasil Pelaks anaan Reses</i>				0 Do ku m en	0 Do ku m en	1.470,00	178.830,00	9.655,00	- 301.810,150,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
	802.06	Pelaks anaan dan Penga wasan Kode	-				-	-	822,00	432.320,00	422,00	200,00			-	-	-		0,00	SEKRE TARI AT DPR D

[illegible]

N O	KOD E	URUS AN / BIDA NG URUS AN / PROG RAM / KEGI ATAN / SUB KEGI ATAN	INDIK ATOR PROG RAM / KEGI ATAN / SUB KEGI ATAN	TAR GET AK HIR PERI ODE RENS TRA A OP D	RE ALI SA SI CA PAI AN RE NJ A OP D TA HU N 202 2	PRA KIR AA N CAP AIA N TAR GET RE NJA OP D TA HU N 202 3	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE LO MP PO K SA RA N	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR GET 20 24	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET		PAGU INDIKATI F (Rp)		
								RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beraca				0 Do ku men	0 Do ku men	44.800,00	22.874.750,00	44.860,00	250,00	Kotaka bum	PENDAPATAN ASLI DAE	-	-			0,00	SEKRETARIAT

			ra DPRD										i, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel /D esa	RAH (PAD)						DPR D
	822. 86.00	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumla h Lapora n Hasil Penga wasan Kode Etik DPRD				0 La por a n	0 La por a n	389. 285. 0,00	418. 748. 0,00	418. 748. 0,00	450,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n, Se mu	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

												a Kel /D esa							
802.08.2:	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	2.094.440,00	1.990.450,00	5.887.400,00	63.000,00			-	--	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
802.08.001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Do ku m en	0 Do ku m en	296.850,00	698.770,00	277.850,00	218.980,00	Kota Sukabumi, Semarang, Semarang, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

	8.02.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokum en Hasil Fasilita si Pelaks anaan Tugas Badan Musya warah				0 Do ku m en	0 Do ku m en	853.948.700,00	948.700,00	948.700,00	850,00	Kot a Su ka b um i, Se mu a Kec am ata n,	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAD	REALISASI CAPAIANRENJADTAHUN 2022	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGETRENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAA NCAPAIANRENTAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								SEBELUM	SEUSAHA	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Se mu a Kel /D esa								

402.2.08.00.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0 Do ku men	0 Do ku men	291.627,00	332.860,00	2.195,00	810.952,00	Kota Suka bumi, Semur a Kec amatan, Semur a Kel esa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRE TARI AT DPR D
			Jumlah						87.829,00	55.437,00	25.970,00	5.417,00							0,00	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu bentuk responsibilitas dalam mengantisipasi berbagai perubahan situasi dan kondisi serta tuntutan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Dengan adanya Perubahan Rencana Sekretariat Dewan Perwakilan *Rakyat* Kota Sukabumi Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Semoga melalui Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi Tahun 2024 ini, keberhasilan pencapaian Kinerja Pemerintahan secara umum dapat dicapai dengan lebih baik.

C. PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, tujuan dan proses yang diperlukan untuk mencapai sasaran kerja dalam periode 1 (satu) tahun ke depan. Dengan adanya rencana kerja, dapat memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik. Melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah pula Inspektorat Daerah Kota Sukabumi dapat menjadikan tugas-tugas lebih ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Adapun tahapan penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- e. Penetapan.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada renstra Inspektorat Kota Sukabumi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam system perencanaan daerah karena renja PD adalah bagian yang utuh dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat, dan aspirasi daerah serta masyarakatnya. Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerahnya dengan memperhatikan kewenangan dan permasalahan yang menjadi lingkup Nasional ataupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan pada tingkat Kota. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang memberikan arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan Daerah. Untuk itulah Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, yang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

Beberapa aspek, fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan antara lain:

- a) Pembagian Urusan yaitu Kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b) Kelembagaan Daerah yaitu:
 - Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.
 - Beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.
- c) Kepegawaian Daerah yaitu:
 - Transformasi jabatan struktural ke fungsional.
 - Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.
 - Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.
 - Pembangunan system pencegahan korupsi aspek manajemen Aparatur Sipil Negara.
- d) Keuangan Daerah yaitu:
 - Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - Pengelolaan pendapatan daerah.
 - Pengelolaan belanja daerah.
 - Pengelolaan pembiayaan daerah.
 - Optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Evaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - Pembangunan system pencegahan korupsi aspek keuangan daerah
- e) Pembangunan Daerah yaitu:
 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - Pembangunan system pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah.
- f) Kerja Sama Daerah yaitu:

- Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Pembangunan system pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah.
- Inovasi Daerah.
- Tata cara kerja sama daerah.

Berkaitan kinerja pemerintah daerah Kota Sukabumi adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat, pada aspek Sumber Daya Manusia permasalahan yang menjadi isu strategis adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan praktek KKN; belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum optimal/memadai; belum meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja, seperti belum lengkapnya SOP kegiatan-kegiatan yang ada pada SKPD dan standar manajemen mutu ISO yang terbatas; manajemen pengelolaan keuangan; adanya hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan umum; belum optimalnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat mendorong mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel, ditandai oleh pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, tertib, dan kepastian dari segi persyaratan biaya waktu pelayanan dan aturan hukum, serta tidak adanya pungutan tidak resmi. Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan, dituntut mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa.

Perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen pembangunan ke arah penyelenggaraan *good governance*, antara lain: menjadi *entrepreneurial competitive government* (pemerintahan yang kompetitif), *customer driven* dan *accountable government* (pemerintahan tanggap/responsif), serta *global-cosmopolit orientation government* (pemerintahan yang berorientasi global); penerapan prinsip pelayanan prima: metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, standar pelayanan minimal, pengembangan model

dan penanganan keluhan masyarakat/pengguna jasa secara terorganisasi, serta partisipasi masyarakat;

proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran/elektronis di setiap instansi pemerintah serta penerapan dan pengembangan *e-government*; publikasi secara terbuka baik dari prosedur, biaya dan waktu pelayanan; dan peran serta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat.

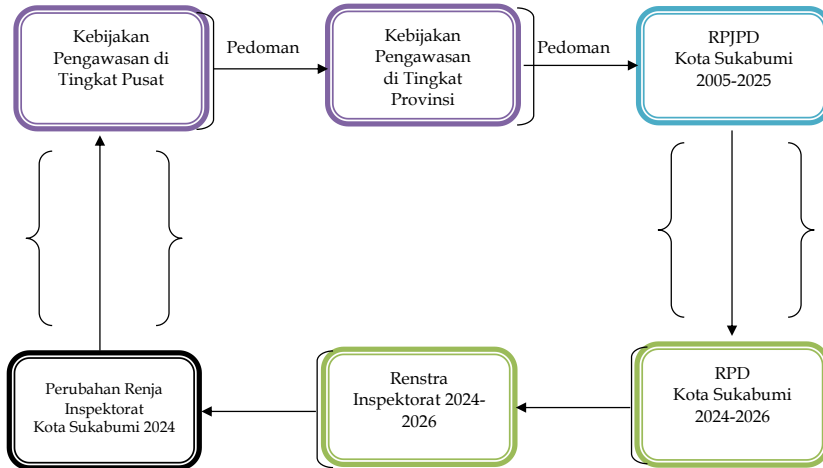
Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi dari waktu ke waktu senantiasa melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran, maupun penyempurnaan pada organisasi perangkat daerah. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, termasuk Inspektorat sebagai APIP sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Sukabumi guna mengatasi permasalahan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, guna mempertahankan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah yang sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tentunya membutuhkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan.

Menyadari fungsi pengawasan yang demikian berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan melalui Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Pencapaian tujuan ini dikelompokkan menjadi empat tujuan SPIP, yaitu (1) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) keamanan aset negara/daerah, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kota Sukabumi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kota Sukabumi sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 138 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, terus berupaya melakukan perbaikan terhadap rencana strategis pengawasan dan pembinaan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi periode tahun 2018-2023. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, Inspektorat secara konsisten telah merumuskan kembali Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 yang mengacu

pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Sukabumi periode tahun 2018-2023.

Pola hubungan antara Renja Inspektorat dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);
18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 63);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2024 untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat untuk mewujudkan tujuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sukabumi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sukabumi yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Sukabumi;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Program/Kegiatan Tahunan Inspektorat Kota Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Sukabumi
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sukabumi
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Sukabumi
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKP
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Rencana Kerja Inspektorat Kota Sukabumi
3.2	Pendanaan Inspektorat Kota Sukabumi
BAB IV	PENUTUP
	Lampiran-lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Sukabumi

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat diukur melalui pencapaian terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Sukabumi melalui pengukuran indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah capainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Sukabumi

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog/Keg s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Target RENSTRA s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Semester I Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu Pemrintah Daerah	90 %	61%	65%	65%	100%	70%	70%	100%
6.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	90 %	60%	65%	65%	100%	70%	70%	100%
6.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 dokum en	3 dokum en	3 dokum en	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

6.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 laporan	4 laporan	100%
6.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 laporan	4 laporan	100%
6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	53%	65%	66%	101%	70%	63%	90%
6.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	30 ASN/Bulan	30 ASN/Bulan	31 ASN/Bulan	103%	1 ASN/4 Bulan	1 ASN/4 Bulan	100%
6.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

6.01.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	-	-		-	-	-
6.01.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	-	-		-	-	-
6.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	-		-	-	-
6.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	8 laporan	8 laporan	100%
6.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %	51%	65%	65%	100%	70%	41%	59%
6.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	14 orang	14 orang	100%	7 Paket	7 Paket	100%
6.01.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen							

6.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	6 orang	30 orang	30 orang	100%	3 orang 1	3 orang 1	100%
6.01.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	3 orang 3	3 orang 3	100%
6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	82%	65%	65%	100%	70%	94%	134%
6.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
6.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
6.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-8 - jenis - 50 0 lembar	60 - jenis 8 - lembar	60 - jenis 8 - lembar	100%	1 paket	1 paket	100%
6.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan 2	1 laporan 2	100%
6.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10 dus 21	11 dus 92	11 dus 92	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24 hok 85	13 hok 00	13 hok 00	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	90 %	60%	65%	65%	100%	70%	28%	40%

6.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 unit 0	3 unit 0	100%
6.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 unit 0	5 unit 0	100%
6.01.01.2.0 9.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
6.01.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	3 unit	3 unit	100%
6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	60%	65%	65%	100%	70%	100%	143%
6.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13 kg	13 kg	13 kg	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	60%	65%	65%	100%	70%	66%	94%

6.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	17 unit	15 unit	88%
6.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
6.01.01.2.0 9.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 unit	2 unit	100%
6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 unit	4 unit	100%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan BPK RI yang ditindaklanjuti	76 %	73.72%	40%	76%	190%	76%	76%	100%
		Persentase Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	80 %	78%	40%	81%	203%	85%	85%	100%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti	-	77.42%	65%	55%	85%	81%	81%	100%
6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Dokumen Pengawasan Internal	90 %	42%	65%	67%	103%	70%	70%	100%
6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	3 LHA	3 LHA	3 LHA	100%	1 laporan 0	1 laporan 0	100%
6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	12 LHP	20 LHP	23 LHP	115%	2 laporan 0	2 laporan 0	100%
6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	1 LHR	2 LHR	2 LHR	100%	2 laporan	2 laporan	100%

6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 LHR	2 LHR	2 LHR	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	3 LHM	3 LHM	3 LHM	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Dokumen laporan hasil pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 %	70%	40%	40%	100%	45%	20%	44%
6.01.02.2.0 2.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	2 Lapora n	1 Lapora n	2 Lapora n	200%	5 Laporan	5 Laporan	100%
6.01.02.2.0 2.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	2 Lapora n	1 Lapora n	2 Lapora n	200%	5 Laporan	5 Laporan	100%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Leveling Kapabilitas Aparat Pengawassan Intern Pemerintah	3,21 Angka	2 Level	3 Level	3 Level	100%	3 Level	3 Level	100%
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,05 Angka	3 Level	3 Level	3 Level	100%	3 Level	3 Level	100%
6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Pengawasan	90 %	35%	40%	53%	133%	45%	67%	149%
6.01.03.2.0 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	- Peraturan	- Peraturan	- Peraturan	-	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%
6.01.03.2.0 1.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	5 Rekomendasi	2 Peraturan	2 Peraturan	3 Peraturan	150%	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%

		Pengawasan yang Disusun								
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi	90 %	35%	40%	44%	110%	45%	40%	89%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	2 LHE	2 LHE	2 LHE	100%	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	100%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	1 LHE	1 LHE	2 LHE	200%	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	100%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31 perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	100%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2021 sampai tahun 2023 hingga disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
 - Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti.
- b. Program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - Pendampingan dan Asistensi.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA INSPEKTORAT Kota Sukabumi adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang sudah terpenuhi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sukabumi

Sesuai dengan dokumen RENSTRA Inspektorat Kota Sukabumi yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya yang dikaji, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sukabumi terkait dengan Kinerja Pelayanan tersebut, disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sukabumi
Selama Periode 2022-2023

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
				2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn +1)	2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu Pemerintah Daerah			65%	70%	90%	93%	65%	79%	90%	93%	
2	Persentase Hasil Pengawasan BPK RI yang ditindaklanjuti			40%	45%	76%	77%	76%	76%	76%	77%	
3	Persentase Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti			40%	45%	80%	81%	81%	81%	80%	81%	
4	Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			3 Level	3 Level	3,05 Angka	3,1 Angka	3 Level	3 Level	3,05 Angka	3,1 Angka	
5	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			3 Level	3 Level	3,21 Angka	3,27 Angka	3 Level	3 Level	3,21 Angka	3,27 Angka	
6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			65%	70%	-	-	-	-	-	-	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi Inspektorat Kota Sukabumi yang telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- Mekanisme kerja Inspektorat Kota Sukabumi yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Sukabumi dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat:

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
- Belum memadai Anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah sekitar 0,75% dari Nilai APBD Kota Sukabumi.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Sukabumi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Sukabumi tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2023 = BB), walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kota Sukabumi masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tersebut atau meningkatkannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan lambat walaupun di tahun 2023 menunjukkan progres yang baik.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
5. Maturitas Kapabilitas APIP di Tahun 2023 mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance*.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024
Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	INSPEKTORAT DAERAH				9,727,954,934					9,936,328,034	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu Pemerintah Daerah	90 %	8,386,996,934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu Pemerintah Daerah	100%	8,782,530,534	

6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	90 %	39,880,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	39,880,000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,365,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,365,000.00	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,400,000.00	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,400,000.00	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,425,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,425,000.00	

6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,405,000.00	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3,235,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3,235,000.00	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,650,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,650,000.00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	6,368,493,327	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,369,493,327	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	6,351,383,327	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 Orang/bulan	6,352,383,327	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2,100,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2,100,000	

6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,040,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,040,000	
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,980,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,980,000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,965,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,965,000	
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,010,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,010,000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	3,010,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3,010,000	

6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3,005,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3,005,000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %	351,112,300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	351,112,300	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	100,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	100,000,000	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1,990,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1,990,000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Sukabumi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	176,860,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Sukabumi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	176,860,000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	72,262,300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	72,262,300	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	948,730,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,163,909,700	

6.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,000,000	
6.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85,515,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85,524,700	
6.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,540,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,160,000	
6.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Sukab umi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 Dokume n	3,450,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Sukab umi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 Dokume n	3,450,000	
6.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukab umi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	123,525,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukab umi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	123,525,000	
6.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukab umi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	699,700,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukab umi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	910,250,000	
6.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Sukab umi	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	90 %	98,650,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Sukab umi	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	275,305,000	
6.01.01.2. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Sukab umi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Sukab umi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	

6.01.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	19,750,000	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	19,750,000	
6.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	78,900,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	236,435,000	
6.01.01.2. 07.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	
6.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19,120,000	
6.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	287,012,107	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	279,683,707	
6.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	
6.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	148,402,107	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162,673,707	
6.01.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62,400,000	

6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51,610,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51,610,000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	293,119,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	97%	303,146,500	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	158,244,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	158,244,500	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17,702,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	27,730,000	
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	10,000,000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	107,172,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	107,172,000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Sukabumi	Persentase Hasil Pengawasan BPK RI yang ditindaklanjuti	76 %	648,320,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Sukabumi	Persentase Hasil Pengawasan BPK RI yang	75%	581,307,500	

								ditindaklanjuti			
		Kota Sukabumi	Persentase Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	80 %			Kota Sukabumi	Persentase Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	80 %		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Sukabumi	Persentase Dokumen Pengawasan Internal	90 %	475,965,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Sukabumi	Persentase Dokumen Pengawasan Internal	90 %	475,965,000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	81,855,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	81,855,000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	67,865,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	67,865,000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	82,735,000	Reviu Laporan Kinerja	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	82,735,000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	91,760,000	Reviu Laporan Keuangan	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	91,760,000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	151,750,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	151,750,000	

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Sukabumi	Persentase Dokumen laporan hasil pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 %	172,355,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Sukabumi	Persentase Dokumen laporan hasil pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 %	105,342,500	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	82,920,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	15,880,000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	89,435,000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	89,462,500	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Sukabumi	Leveling Kapabilitas Aparat Pengawassan Intern Pemerintah	3,05 Angka	692,638,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Sukabumi	Leveling Kapabilitas Aparat Pengawassan Intern Pemerintah	3,05 Angka	572,490,000	
		Kota Sukabumi	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,147 Angka			Kota Sukabumi	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,147 Angka		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Pengawasan	90 %	185,580,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Pengawasan	90 %	169,260,000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	86,370,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	82,290,000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Kota Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	5 Rekomendasi	99,210,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Kota Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	5 Rekomendasi	86,970,000	

	Fasilitasi Pengawasan		Pengawasan yang Disusun			Fasilitasi Pengawasan		Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi	90 %	507,058,000	Pendampingan dan Asistensi	Kota Sukabumi	Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi	90 %	403,230,000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	140,083,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	113,535,000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	120,780,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	76,140,000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Sukabumi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	129,840,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Sukabumi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	129,840,000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 perangkat daerah	116,355,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31 perangkat daerah	83,715,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari masyarakat. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut belum ada dan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Sukabumi

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Inspektorat Daerah Kota Sukabumi tidak langsung berhubungan dengan usulan program atau kegiatan dari masyarakat, namun tugasnya selaku Instansi Pembinaan dan Pengawasan yang juga terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu: melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara.

Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang pemerintahan umum. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan reviu tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat. Adapun Tabel T-C.32. (nihil) tidak dibuat karena Inspektorat Daerah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

3.1. Rencana Kerja Inspektorat Kota Sukabumi

Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kota Sukabumi mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Ppemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat 2024

KODE PROGRAM KEGIATAN & SUB KEGIATAN	URAIAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM & KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENGAMPU (PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Irban 1,2,3 Irban 1 Irban 1 Irban 3 Irban 3 Irban 3 Irban 1,2,3 Irban 2 Irban 1,2,3 Irban 3 Irban 3 Irban 3 Irban 3 Irban 3 Irban 3 Irban 1,2,3 Irban 1,2,3
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah A. Audit Kinerja (performance Audit) B. Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan C. Reviu Tata Kelola Manajemen ASN D. Reviu Tata Kelola PBJ E. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah F. Monitoring Inflasi	
6.01.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah A. Audit Ketaatan Berbasis Risiko (Compliance Risk Based) B. Reviu KUA-PPAS C. Reviu RKA dan RKA Perubahan D. Reviu SSH, ASB, dan HSPK E. Reviu HPS F. Reviu Pendapatan G. Reviu Hibah dan Bansos H. Pengawasan P3DN I. Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ (per Triwulan)	
6.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja A. Reviu RPJMD B. Reviu Renstra C. Reviu RKPD D. Reviu Renja E. Reviu LPPD F. Reviu LKJIP	
6.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan A. Reviu LKPD B. Reviu BMD	
6.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP A. TLHP BPK B. TLHP APIP Provinsi Jawa Barat C. TLHP APIP Kota Sukabumi D. Ikhtisar Hasil Pengawasan	

KODE PROGRAM KEGIATAN & SUB KEGIATAN	URAIAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM & KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENGAMPU (PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban 4
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
	A. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah	
6.01.02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
	A. Audit Investigasi	Irban 4
	B. Pengawasan Gender	Irban 1
	C. Monitoering BOS	Irban 2
	E. Reviu DAK Fisik dan Non Fisik	Irban 2
	F. Pengawasan Pengadaan CPNS dan P3K	Irban 1,2,3,4
	G. Pengawasan Khusus Lainnya sesuai tugas yang diberikan atasan	
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Irban 1,2,3,4
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
6.01.03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
	A. PKPT BR	
	B. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengawasan (Audit/Reviu/Kegiatan Operasional Pengawasan)	Irban 1,2,3,4
		Irban 1,2,3,4
6.01.03.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Irban 1,2,3,4
	A. Fasilitasi Kebijakan Pengawasan lainnya	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Irban 1,2,3,4
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
	A. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	
	B. Penjaminan Kualitas - Maturitas SPIP	
	C. PK APIP	Irban 4 & 1
	D. Pendampingan Manajemen Risiko	
6.01.03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 4
	A. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	B. Evaluasi AKIP	Irban 4
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
	A. TL perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	Irban 4
	B. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan sapu bersih pungutan liar	Irban 4
	C. Penanganan Pengaduan (PAKAR)	Irban 4
	D. Fraud Control (Pemetaan Risiko Fraud)	Irban 4
	E. Kegiatan MCP Korsupgah KPK	
	F. Sosialisasi Gratifikasi dan Anti Korupsi	

KODE PROGRAM KEGIATAN & SUB KEGIATAN	URAIAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM & KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENGAMPU (PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN)
6.01.03.2.02.04.	G. Sosialisasi Benturan Kepentingan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas A Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas B Survey Penilaian Integritas KPK	Irb an 4 & 1

Penyelenggaraan pengawasan tersebut dalam implementasi kebijakan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi, maka salah satu kebijakan yang memuat fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diimplementasikan salah satunya termuat dalam Program meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi Perencanaan Program Pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Sukabumi mengimplementasikannya dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah mulai dari RPD dan RENSTRA Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah daerah.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Inspektorat Daerah Kota Sukabumi melaksanakan fungsi Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan membuat kebijakan pengawasan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Hal ini untuk menghindari tumpang-tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan sinkronisasi program pengawasan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pada pemerintah daerah. Perumusan kebijakan pengawasan juga

mengacu pada hasil evaluasi pada tahun sebelumnya, sehingga bisa disusun kebijakan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fungsi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Sukabumi melalui kegiatan-kegiatan dalam mendukung kegiatan Pengawasan seperti pelaksanaan Diklat, sarana dan prasana dan kebutuhan kepegawaian Auditor dan PPUPD.

3.2. Pendanaan Inspektorat Kota Sukabumi

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama satu tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam satu tahun. Inspektorat Kota Sukabumi dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama satu tahun. Sumber dana pendanaan Inspektorat diperoleh dari sumber Perubahan APBD Kota Sukabumi. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C. 34 berikut ini:

Tabel T-C. 34.

Mantrik Rencana Kera Inspektorat Daerah Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Sukabumi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Volume/ Satuan	Jumlah Pagu (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						Inspektorat Daerah			9.936.300.534,00			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			9.936.300.534,00			
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			9.936.300.534,00			
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 %	8.782.530.534,00			
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu dan Berkualitas	100 %	39.880.000,00			
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.365.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.425.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.405.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.235.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.650.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	100 %	6.368.493.327,00		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.010.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.005.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	351.112.300,00		
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	100.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.990.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	176.860.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	72.262.300,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	948.730.200,00			
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.524.700,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.160.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.450.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	123.525.000,00	Kota Sukabumi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

									Kecamatan, Semua Kel.		
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	910.250.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	98.650.000,00		
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	19.750.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	236.435.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud					
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.120.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	98 %	287.012.107,00			
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.673.707,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.610.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	97 %	293.119.000,00			
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	158.244.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	27.730.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	10.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	107.172.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	80 75 % %	581.280.000,00			
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	90 %	475.965.000,00			

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	15.880.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	89.435.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.05 3.147 Level Level	572.490.000,00			
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Pengawasan	90 %	185.580.000,00			
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	82.290.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	86.970.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi	90 %	507.058.000,00			
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						

							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	113.535.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	76.140.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	129.840.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31 perangkat daerah	83.715.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	J U M L A H								9.936.300.534,00			

Inspektorat Daerah Kota Sukabumi mengemban amanat guna menyelenggarakan kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik, kegiatan penunjang pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Secara teknis, kegiatan pengawasan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan total sebanyak 3 Program yang terbagi ke dalam 11 kegiatan dan dibagi lagi sebanyak 49 Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan disesuaikan dengan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 (Anggaran Pengawasan 0,75% dari Nilai Total APBD) dengan anggaran dana Inspektorat Daerah Kota Sukabumi sebesar Rp. 11.995.341.736,87,-. Adapun hasil dari Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 anggaran dana Inspektorat Daerah Kota Sukabumi sebesar Rp. 9.936.300.534,00,- belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Anggaran Pengawasan 0,75% dari Nilai Total APBD) yang diusulkan.

BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja 2024 merupakan merupakan rencana perubahan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026. Perubahan Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2024 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.

Alokasi Anggaran indikatif Perubahan pada tahun 2024 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokkan sebesar Rp9.936.300.534,00,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 8.782.530.534,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 581.280.000,-, dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Rp. 572.490.000,-.

Kesesuaian alokasi anggaran Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Sukabumi dengan total belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kota Sukabumi mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang kami susun sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Sukabumi yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

D. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan wajib Pelayanan Dasar maupun Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja



Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Telah ditetapkan, namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan yang berimplikasi pada perubahan RKPD tahun 2024, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada Pasal 343 ayat (1) bahwa : Perubahan RKPd dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 311 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal);
21. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru (DOB);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042;
24. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
25. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi;
26. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;

27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan Rencana Kerja karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan diatasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Berjalan (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2024 yang disertai pendanaan

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester 1 Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, Evaluasi Renja dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan semester 1 tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra. Evaluasi yang dilakukan terhadap semua program , kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Renja tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah merencanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebanyak 10 program 20 kegiatan dan 96 subkegiatan dengan total anggaran sebesar . 259.000.738.343

Realisasi Anggaran Belanja Daerah secara keseluruhan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sampai Bulan Juni Tahun 2024 adalah sebesar .118.460.084,- atau mencapai 45,46% . Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang belum mencapai target, ketidak tercapaian tersebut disebabkan karena jadwal kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan
2. efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi anggaran.

Tabel T.C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100
1.01.1.02.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100
1.01.1.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3	dokumen	3	100,00	2	2
1.01.1.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	-	-	dokumen	-	-	2	0
1.01.1.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	-	-	dokumen	-	-	2	0
1.01.1.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	-	-	dokumen	-	-	2	0
1.01.1.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	2	-	-	dokumen	-	-	2	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.1.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	dokumen	4	100,00	4	100,00%
1.01.1.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	laporan	3	100,00	3	33,33%
1.01.1.02.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100
1.01.1.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1699		1216	orang	1216	100,00	1165	68,57%
1.01.1.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	dokumen	1	100,00	1	100,00%
1.01.1.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	Laporan	1	100,00	1	100,00%
1.01.1.02.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	-	Dokumen	-	0,00	1	100,00%
1.01.1.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	2	1	1	Laporan	1	100,00	2	0,00%
1.01.1.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	dokumen	1	100,00	1	0,00%
1.01.1.02.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	100	-	100	Persen	-	-	100	100
1.01.1.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1	-	-	Laporan	-	-	1	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
	SKPD	Daerah pada SKPD									
1.01.1.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	Laporan	-	-	1	0	0,00%
1.01.1.02.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100	100
1.01.1.02.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	-	-	Paket	-	-	1	1	33,33%
1.01.1.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	150	160	orang	160	100,00	221	221	73,67%
1.01.1.02.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100	100
1.01.1.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	15	1	paket	1	100,00	5	3	60,00%
1.01.1.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	23	1	paket	1	100,00	2	1	10,00%
1.01.1.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	7	1	paket	1	100,00	2	0	0,00%
1.01.1.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	1	paket	1	100,00	6	6	100,00%
1.01.1.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	1	paket	1	100,00	12	6	50,00%
1.01.1.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	dokumen	2	100,00	2	2	100,00%
1.01.1.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	-	-	Laporan	-	-	1	0	0,00%
1.01.1.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	2	laporan	2	100,00	12	6	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.1.02.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100	-	100	Persen	-	-	100	100	100
1.01.1.02.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	-	-	Unit	-	-	7	5	71,43%
1.01.1.02.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100	100
1.01.1.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	laporan	1	100,00	12	6	50,00%
1.01.1.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	laporan	3	100,00	12	6	50,00%
1.01.1.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Laporan	1	100,00	1	0	0,00%
1.01.1.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	laporan	1	100,00	12	6	50,00%
1.01.1.02.09	PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	Persen	100,00	100,00	100	100	100
1.01.1.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	33	18	Unit	18	100,00	9	3	16,67%
1.01.1.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	4	5	unit	5	100,00	1	0	0,00%
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	100	88,83	100	persen	90,38	90,38	100	90,38	90,38
1.01.02.01.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar yang teenuhi	100	99,18	100	Persen	97,49	97,49	100	97,49	97,49
1.01.02.01.04	Pembangunan Ruang Unit	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	-	-	Ruang	-	-	1	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)	
	Kesehatan Sekolah	yang Telah Dibangun									
1.01.02.01.010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	-	-	unit	-	-	1	0	0,00%
1.01.02.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	27	27	5	Paket	5	100,00	22	0	0,00%
1.01.02.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	2	2	1	Paket	1	100,00	2	0	0,00%
1.01.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26447	1562	1572	orang	1572	100,00	26447	26447	100,00%
1.01.02.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2	900	90	unit	90	100,00	72	0	0,00%
1.01.02.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	296	296	296	orang	296	100,00	296	296	100,00%
1.01.02.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	60	50	Orang	50	100,00	140	0	0,00%
1.01.02.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	124	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	126	0	0,00%
1.01.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT)	124	101	124	Sekolah	124	100,00	124	124	100,00%
1.01.02.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	5	-	Ruang	-	-	3	0	0,00%
1.01.02.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	124	-	-	Orang	-	-	345	0	0,00%
1.01.02.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1	-	-	Dokumen	-	-	1	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)	
	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)									
1.01.02.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	-	-	Dokumen	-	-	1	0	0,00%
1.01.02.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1560	1562	-	Paket	-	-	1572	0	0,00%
1.01.02.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	-	-	Ruang	-	-	2	0	0,00%
1.01.02.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	9	-	Unit	-	-	2	0	0,00%
1.01.02.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	90	-	-	Orang	-	-	43	43	100,00%
1.01.02.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	50	147	-	Satuan Pendidikan	-	-	126	0	0,00%
1.01.02.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	-	-	Ruang	-	-	6	0	0,00%
	PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama yang teenuhi	100	96,54	100	Persen	91,36	91,36	100	91,36	91,36
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	2	3	Ruang	3	100,00	1	0	0,00%
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	21	-	ruang	-	-	13	0	0,00%
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	-	Unit	-	-	1	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	26	26	5	Pkaet	5	100,00	13	0	0,00%
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	746	744	744	Siswa	744	100,00	12121	12121	100,00%
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2	36	18	Unit	18	100,00	6	0	0,00%
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500		403	Peserta Didik	403	100,00	403	403	100,00%
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	60	60	170	Orang	170	100,00	176	0	0,00%
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	46	46	46	Satuan Pendidikan	45	97,83	47	0	0,00%
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	46	16	46	Sekolah	46	100,00	47	47	100,00%
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	46	-	-	Orang	-	-	176	0	0,00%
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	46	-	-	Orang	-	-	47	47	100,00%
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	-	-	Dokumen	-	-	1	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	-	-	Dokumen	-	-	1	0	0,00%
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	72	-	orang	-	-	47	0	0,00%
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	46	-	-	Sekolah	-	-	23	0	0,00%
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	746	744	-	Sekolah	-	-	744	0	0,00%
1.01.02.03	PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase Standar Pelayanan Minimal Anak Usia Dini yang teenuhi	100	79,21	100	persen	80,32	80,32	100	80,32	80,32
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	-	Unit	-	-	3	0	0,00%
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2	-	3	Paket	3	100,00	2	0	0,00%
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4	2	4	Orang	4	100,00	20	18	90,00%
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	228	244	223	Satuan Pendidikan	224	100,00	224	224	100,00%
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	228	244	223	Satuan Pendidikan	224	100,00	224	224	100,00%
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	228	-	-	Orang	-	-	224	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	-	-	Dokumen	-	-	1	0	0,00%
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	-	-	Dokumen	-	-	1	0	0,00%
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan(Orang)	228	-	-	Orang	-	-	224	0	0,00%
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3900	3800	3800	Paket	3800	100	3230	0	0,00%
1.01.02.04	PENGLOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan/ Nonformal yang teenuhi	100	93,21	100	Persen	92,52	92,52	100	92,52	92,52
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	370	233	8154	Peserta Didik	8154	100,00	7512	7048	93,82%
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	55	50	29	orang	29	100,00	50	0	0,00%
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14	14	Satuan Pendidikan	14	100,00	15	0	0,00%
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14	13	14	Satuan Pendidikan	14	100,00	15	15	100,00%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	14	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	15	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	0,2	0,29	0,2	Indeks	0,29	51,72	0,2	0,29	51,72
1.01.04.01	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/ KESETARAAN	Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi standar Minimal Jumlah PTK	169	169	169	sekolah	169	100,00	169	169	100
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	4	Dokumen	4	100,00	2	0	0,00%
1.01.5.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui	100	-	100	Persen	-	-	100	100	100
1.01.05.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usulan kelayakan perizinan pendidikan dasar yang dinilai(Usulan)	10	-	-	Jumlah	-	-	10	10	100
1.01.05.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	-	-	Dokumen	-	-	1	1	100,00%
1.01.6.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Hasil publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di Apresiasi	75	-	90	persen	100,00	100,00	75	75	100
1.01.06.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di apresiasi	2	-	2	Publikasi	100,00	100,00	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
1.01.06.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1	-	1	Bahasa	1	100,00	1	100,00%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan di kembangkan	13	13	17	Objek	100	100,00	13	76,92%
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dikelola oleh masyarakat	3	3	3	Objek	100	100,00	3	100,00%
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	-	4	Objek	4	100,00	4	100,00%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	55	69	69	persen	100	100,00	55	72,73%
2.22.03.2.01	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pembinaan Kesenian yang dilaksanakan	100	100	5	Jumlah	100	100,00	100	100
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100	100	100	orang	100	100,00	100	100,00%
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	5	Lembaga	5	100,00	5	0,00%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan sejarah Lokal	60	-	-	persen	-	-	60	0,00%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dilaksanakan	100	-	-	Jumlah	-	-	5	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target RENJA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat realisasi (%)
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	75	-	-	orang	-	-	100	0	0,00%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	76	75	76	persen	81	100,00	76	81	100
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kota yang sudah ditetapkan	5	4	5	Jumlah	3	60,00	5	3	60,00%
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	3	2	Objek	2	100,00	3	3	100,00%
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif	55	-	80	persen	0	0,00	55	0	0,00%
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kota Sukabumi yang representatif	1	-	1	Jumlah	0	0,00	1	0	0,00%
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara	-	-	-	Unit	-	-	1	0	0,00%
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5	-	-	Unit	-	-	1	0	0,00%

Tabel di atas menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis dan capaian Misi D. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Kota Sukabumi sampai dengan semester 1 Tahun 2024, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa dari 10 Program yang sudah direncanakan, 9 program belum mencapai target kinerja yang direncanakan, 1 Program sudah mencapai target kinerja yang direncanakan. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja yang direncanakan antara lain perencanaan target yang kurang sesuai dengan kebutuhan riil beberapa program dan kegiatan rencana pelaksanaannya di triwulan tiga. Hal tersebut tentu akan berimplikasi pada ketercapaian tujuan dan sasaran pada renstra. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain harus dilakukan perbaikan perencanaan kinerja yaitu dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan perjanjian kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasinya. Secara tugas, pokok, dan fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi mengakomodir tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (D) Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahunan merupakan hasil kinerja melalui pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel T.C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	
	Nilai SAKIP Perangkat daerah	-	-	71	72	73	75	70,60	-	72	73	
	Rata-Rata Lama Sekolah	-	-	10,15 tahun	10,15 tahun	10,17 Tahun	10,19 Tahun	10,15	-	10,15 tahun	10,17 Tahun	
	Angka Harapan Lama Sekolah	-	-	13,59 tahun	13,59 tahun	13,60 tahun	13,61 tahun	13,58	-	13,59 tahun	13,60 tahun	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang beartisipasi dalam PAUD	√	√	100%	100%	100%	100%	81.21%	-	100%	100%	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang beartisipasi dalam Pendidikan Dasar	√	√	100%	100%	100%	100%	98.87%	-	100%	100%	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13 -15 tahun yang beartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	√	√	100%	100%	100%	100%	92.15%	-	100%	100%	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang beartisipasi dalam Pendidikan Kesetaran	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	√	-	62.26	62.26	65.72	69.17	56.60	-	62.26	65.72	
	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	√	-	44.86	44.86	47.41	49.96	40.91	-	44.86	47.41	
	Rerata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	√	-	76.91	76.91	79.52	80.83	79.15	-	76.91	79.52	

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Rerata Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	√	-	61.08	61.08	65.05	69.02	58.8	-	61.08	65.05	
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D IV	√	-	84.31	84.31	86.41	88.51	82.21%	-	84.31	86.41	
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	√	-	64.82	64.82	71.33	77.84	66.9	-	64.82	71.33	
	Indeks Iklim Keamanan SD	√	-	77.67	77.67	79.22	80.77	70.49	-	77.67	79.22	
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	√	-	75.15	75.15	80.77	86.40	68.67	-	75.15	80.77	
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	√	-	62.52	62.52	64.30	66.09	52.14	-	62.52	64.30	
	Indeks Iklim Keamanan SMP	√	-	77.28	77.28	78.75	80.22	70.6	-	77.28	78.75	
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	√	-	73.12	73.12	77.95	82.78	68.7	-	73.12	77.95	
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	-	-	61.56	61.56	63.74	65.93	55.36	-	61.56	63.74	
	Indeks Pemajuan Kebudayaan	-	-	75%	75%	75%	80%	-	-	75%	75%	
	Persentase peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya	-	-	80%	80%	80%	85%	-	-	80%	80%	
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	-	√	76%	76%	77%	78%	83,56%	-	76%	77%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menyikapi paradigma Pendidikan dan Kebudayaan yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan dengan visi Kota Sukabumi maka kami berusaha menyikapi beberapa isu Pendidikan dan Kebudayaan yang berkembang saat ini dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi. Adapun isu pendidikan tersebut antara lain :

1. Bidang Pendidikan

1.1. Akses

- a. Masih Adanya Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah
- b. Belum Meratanya Layanan Pendidikan Non Formal

1.2. Mutu

- a. Belum Optimalnya Pendidikan Karakter
- b. Belum Optimalnya Layanan Pendidikan Inklusi
- c. Masih Rendahnya Budaya Literasi
- d. Masih Diperlukannya Peningkatan Profesionalisme Dan Penataan Guru Dan Tenaga Kependidikan
- e. Belum Optimalnya Standar Nasional Pendidikan

1.3. Daya Saing

Belum Maksimalnya Perolehan Nilai Hasil Assesment Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi)

1.4. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Peningkatan Kualitas Belajar Siswa Melalui Program Sekolah Penggerak
- b. Transformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul melalui kebijakan Merdeka Belajar

2. Bidang kebudayaan

2.1. Pengembangan

- a. Belum Optimalnya Aplikasi Bidang Kebudayaan
- b. Belum Optimalnya Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi Dan Dikembangkan Pemeliharaan

2.2. Perlindungan

- a. Kurangnya Perlindungan Pemeliharaan Dan Penyelamatan Warisan Budaya Tak Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual
- b. Kurangnya Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Ditetapkan Oleh TACB
- c. Belum Teenuhinya Tim Ahli Cagar Budaya Yang Tersertifikasi

2.3. Pengelolaan

- a. Kurang Optimalnya Saran Gedung Kesenian
- b. Belum Adanya Museum Kota Sukabumi Yang Representatif
- c. Belum Tenuhinya Pojok Budaya Yang Di Publikasikan

2.4. Pembinaan

- a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
- b. Kurang Optimalnya Lembaga, Komunitas Sanggar, Dan Lingkung Seni Yang Dibina Dan Berbadan Hukum

Dalam menjalankan kewenangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa melihat tantangan dan peluang sebagai dasar dari fokus kinerja yang akan dilaksanakan dan bercermin pada kegiatan yang sudah dilakukan. Adapun tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pendidikan dan Kebudayaan dapat dibagi pada dua bagian yang kami analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

1.1 Lingkungan Internal

1.1.1. Peluang

Peluang strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk bekerja profesional, yaitu sistem kinerja yang senantiasa diarahkan pada pagu aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- b. Adanya pengalaman sebagian besar aparatur dalam mengelola pendidikan. Pengalaman dimaksud adalah bahwa setiap kinerja yang dilakukan senantiasa diupayakan untuk di evaluasi dan ditingkatkan pada masa yang akan datang;
- c. Meningkatnya Jumlah Penduduk Usia Sekolah;
- d. Otonomi regulasi bidang pendidikan;

1.1.2. Tantangan

Tantangan Strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ;
- b. Belum meratanya jumlah kelembagaan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;

- c. Masih kurangnya pendidik jenjang SD dan SMP;
- d. Masih tingginya pendidik non PNS belum linear pada jenjang PAUD, SD dan pendidikan non formal;
- e. Belum optimalnya zonasi penerimaan peserta didik baru;

1.2 Lingkungan External

1.2.1. Peluang

Peluang strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang mendukung pembangunan pendidikan antara lain banyaknya diluncurkan peraturan-peraturan pemerintah daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perwal yang fokus terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan;

1.2.2. Tantangan

Tantangan strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pendidikan;
- b. Masih tingginya masyarakat memilih sekolah negeri favorit pada jenjang SMP;

2. Bidang Kebudayaan

2.1 Lingkungan Internal

2.1.1. Peluang

Peluang strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen dan sinergitas pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk bekerja profesional, yaitu sistem kinerja yang senantiasa diarahkan pada pagu aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- b. Adanya pengalaman sebagian besar aparatur dalam mengelola kebudayaan. Pengalaman dimaksud adalah bahwa setiap kinerja yang dilakukan senantiasa diupayakan untuk di evaluasi dan ditingkatkan pada masa yang akan datang;

- c. Keragaman warisan budaya, potensi sumber daya seni dan budaya;

2.1.2. Tantangan

Tantangan Strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya kompetensi pengelola seni dan budaya;
- b. Belum optimalnya SDM dibidang seni dan budaya;
- c. Masih kurangnya regulasi tentang seni dan budaya;
- d. Belum teenuhinya sarana dan prasarana seni dan budaya yang memadai;

2.2 Lingkungan Eksternal

2.2.1. Peluang

Peluang strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut

- a. Tingginya Minat masyarakat kota sukabumi terhadap seni dan budaya;
- b. Banyaknya organisasi seni, komunitas JARAHNITRA dan MUSKALA;

2.2.2. Tantangan

Tantangan strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya peraturan Pemerintah Kota Sukabumi dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dalam rangka pendayagunaan obyek pemajuan kebudayaan ;
- b. Belum optimalnya Dewan Keseniaan dan belum terbentuknya Dewan Kebudayaan;
- c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada organisasi seni dan budaya;
- d. Masih terdapat organisasi seni dan budaya yang belum memiliki izin;
- e. Belum adanya sinergitas organisasi seni dan budaya dengan Pemerintah;
- f. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperkuat peran aktif dan inisiatif masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKP

Rancangan awal Perubahan Renja 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, ada

beberapa perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Perubahan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap perubahan Renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C-31.

Tabel T.C. 31.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100	%	173.667.404.643		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100	%	173.782.912.643		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	%	54.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	%	54.500.000		
1.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	40.000.000	APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	40.000.000	APBD	
1.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	Dokumen	4.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	Dokumen	4.000.000	APBD	
1.01.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2	Dokumen	1.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Dokumen	1.000.000	APBD	
1.01.01.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Dokumen	1.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Dokumen	1.000.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.01.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2	Dokumen	1.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	Dokumen	1.000.000	APBD	
1.01.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.000.000	APBD	
1.01.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3.500.000	APBD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3.500.000	APBD	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	%	167.460.644.459		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	167.460.644.459		
1.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1165	Orang	167.449.444.459	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1165	Orang	167.449.444.459	APBD	
1.01.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	6.000.000	APBD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	6.000.000	APBD	
1.01.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.500.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	1.500.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			(Laporan)							Tahun SKPD (Laporan)					
1.01.01.2.02. 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	Dokumen	1.000.000	APBD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	Dokumen	1.000.000	APBD	
1.01.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	2	Laporan	1.350.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	Laporan	1.350.000	APBD	
1.01.01.2.02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Laporan	1.350.000	APBD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Laporan	1.350.000	APBD	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah (%)	100	%	4.500.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah (%)	100	%	4.500.000		
1.01.01.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	APBD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	APBD	
1.01.01.2.03. 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	Laporan	-	APBD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	-	Laporan	-	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			SKPD							Milik Daerah SKPD					
1.01.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	2.500.000	APBD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	2.500.000	APBD	
1.01.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	2.000.000	APBD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	2.000.000	APBD	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar (%)	100	%	50.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar (%)	100	%	70.000.000		
1.01.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	Paket	30.000.000	APBD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	Paket	30.000.000	APBD	
1.01.01.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Dokumen	-	APBD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	20.000.000	APBD	Penambahan untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi
1.01.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	221	Orang	20.000.000	APBD	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	221	Orang	20.000.000	APBD	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah (%)	100	%	1.040.106.300		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah (%)	100	%	1.054.588.300		
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	Paket	5.887.000	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	Paket	5.887.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	Paket	16.500.000	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	Paket	16.500.000	APBD	
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	Paket	16.000.000	APBD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	Paket	16.000.000	APBD	
1.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	Paket	576.586.300	APBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	Paket	591.068.300	APBD	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pemenuhan gaji petugas kebersihan
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	Paket	45.000.000	APBD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	Paket	45.000.000	APBD	
1.01.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	Dokumen	30.072.000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	Dokumen	30.072.000	APBD	
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	Laporan	20.000.000	APBD	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	Laporan	20.000.000	APBD	
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	330.061.000	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	330.061.000	APBD	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan (%)	100	%	100.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan (%)	100	%	175.508.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.01.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	Unit	100.000.000	APBD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	Unit	175.508.000	APBD	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (30.508.000) 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kecembagaan dan Manajemen PAUD (45.000.000) untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan (%)	100	%	4.816.767.200		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan (%)	100	%	4.802.285.200		
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	Laporan	1.800.000	APBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	Laporan	1.800.000	APBD	
1.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	Laporan	289.600.000	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	Laporan	289.600.000	APBD	
1.01.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	32.690.000	APBD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	32.690.000	APBD	
1.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	4.492.677.200	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	4.478.195.200	APBD	Digesor/dipindahk an ke sub kegiatan 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan (%)	100	%	140.886.684		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan (%)	100	%	160.886.684		
1.01.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	16	Unit	84.271.771	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas	16	Unit	104.271.771	APBD	Penambahan untuk pemenuhan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					BBM kendaraan Operasional
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Unit	56.614.913	APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Unit	56.614.913	APBD	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	100	%	84.898.252.700		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	100	%	85.447.744.700		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar yang terenuhi (%)	100	%	40.875.706.200		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar yang terenuhi (%)	100	%	41.248.498.200		
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang	139.958.000	DAK Fisik	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang	139.958.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	unit	82.015.000	DAK Fisik	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	unit	82.015.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	22	Paket	416.500.000	DAK Fisik	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	22	Paket	416.500.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	Paket	30.000.000	APBD	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	Paket	230.000.000	APBD	Penambahan Untuk Penyediaan Perlengkapan Sekolah
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	26447	Peserta Didik	1.577.213.000	APBD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	26447	Peserta Didik	1.650.005.000	APBD	Pergeseran dari Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	72	Unit	400.000.000	DAK Fisik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	72	Unit	400.000.000	DAK Fisik	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.02.2.01. 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	296	Peserta Didik	48.223.000	APBD	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomb a Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	296	Peserta Didik	148.223.000	APBD	Penamgahan untuk Pelaksanaan Pentas PAI tingkat Kota, FLS2N tingkat Kota, O2SN tingkat Kota, Festival Bahasa Ibu tingkat Kota dan Fasilitasi Ke tingkat Provinsi dan Nasional
1.01.02.2.01. 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		Orang	88.943.200	APBD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		Orang	88.943.200	APBD	
1.01.02.2.01. 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	124	Satuan Pendidikan	27.520.000	APBD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	123	Satuan Pendidikan	27.520.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT)	124	Sekolah	31.159.790.000	DAK Non Fisik	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT)	124	Sekolah	31.159.790.000	DAK Non Fisik	
1.01.02.2.01. 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	Ruang	1.384.281.000	DAK Fisik	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	Ruang	1.384.281.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.01. 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	345	Orang	15.000.000	APBD	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	345	Orang	15.000.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
										untuk Pendidikan (Orang)					
1.01.02.2.01. 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	15.000.000	APBD	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1572	Paket	2.243.580.000	APBD	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1572	Paket	2.243.580.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	Ruang	789.218.000	DAK Fisik	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	Ruang	789.218.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.01. 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	193.132.000	APBD	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	193.132.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	43	Orang	15.000.000	APBD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	43	Orang	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	124	Satuan Pendidikan	25.440.000	APBD	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	124	Satuan Pendidikan	25.440.000	APBD	
1.01.02.2.01. 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6	Ruang	2.209.893.000	DAK Fisik	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	6	Ruang	2.209.893.000	DAK Fisik	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Sedang/Berat					Sekolah		Direhabilitasi Sedang/Berat					
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama yang teenuhi (%)	100	%	27.896.581.000		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama yang teenuhi (%)	100	%	27.913.281.000		
1.01.02.2.02. 0006	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	Ruang	341.160.000	DAK Fisik	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	Ruang	341.160.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.02. 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	ruang	2.116.740.200	DAK Fisik	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	ruang	2.116.740.200	DAK Fisik	
1.01.02.2.02. 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	76.212.800	DAK Fisik	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	76.212.800	DAK Fisik	
1.01.02.2.02. 0025	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13	Ruang	270.250.000	DAK Fisik	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13	Ruang	270.250.000	DAK Fisik	
1.01.02.2.02. 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	12121	Peserta Didik	2.426.839.000	APBD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	12121	Peserta Didik	2.123.539.000	APBD	Digeser/dipindah ke sub kegiatan 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (200.000.000) 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (72.792.000) 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (30.508.000)
1.01.02.2.02. 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6	Unit	170.775.000	DAK Fisik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6	Unit	170.775.000	DAK Fisik	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.02.2.02. 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	403	Orang	680.000.000	APBD	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomb a Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	403	Orang	780.000.000	APBD	Penambahan untuk Pelaksanaan Pentas PAI tingkat Kota, FLS2N tingkat Kota, O2SN tingkat Kota, Festival Bahasa Ibu tingkat Kota dan Fasilitasi Ke tingkat Provinsi dan Nasional
1.01.02.2.02. 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	176	Orang	280.000.000	APBD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	176	Orang	280.000.000	APBD	
1.01.02.2.02. 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	47	Satuan Pendidikan	45.000.000	APBD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	47	Satuan Pendidikan	45.000.000	APBD	
1.01.02.2.02. 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	47	Sekolah	18.305.940.000	DAK Non Fisik	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	47	Sekolah	18.305.940.000	DAK Non Fisik	
1.01.02.2.02. 0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	47	Orang	15.000.000	APBD	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	46	Orang	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.02. 0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	47	Orang	98.864.000	APBD	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	46	Orang	108.864.000	APBD	Penambahan untuk Fasilitasi PPDB Online

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			(Orang)							dilaksanakan (Orang)					
1.01.02.2.02. 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	satuan Pendidikan	15.000.000	APBD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	satuan Pendidikan	215.000.000	APBD	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP
1.01.02.2.02. 0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	Dokumen	25.000.000	APBD	Penambahan Untuk Kegiatan Pameran Pendidikan
1.01.02.2.02. 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Proses Belajar	47	Satuan Pendidikan	21.200.000	APBD	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Proses Belajar	46	Satuan Pendidikan	21.200.000	APBD	
1.01.02.2.02. 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	324	Orang	15.000.000	APBD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	324	Orang	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.02. 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	744	Paket	3.003.600.000	APBD	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	744	Paket	3.003.600.000	APBD	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Standar Pelayanan Minimal Anak Usia Dini yang teenuhi (%)	100	%	7.411.755.500		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Standar Pelayanan Minimal Anak Usia Dini yang teenuhi (%)	100	%	7.566.755.500		
1.01.02.2.03. 0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi	3	Unit	567.469.000	DAK Fisik	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	3	Unit	567.469.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Sedang/Berat							Direhabilitasi Sedang/Berat					
1.01.02.2.03. 0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit		APBD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	100.000.000	APBD	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Nonformal/Kesetara an
1.01.02.2.03. 0007	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	Paket	50.850.000	DAK Fisik	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	Paket	50.850.000	APBD	
1.01.02.2.03. 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	20	Orang	585.000.000	APBD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	750	Orang	580.000.000	APBD	
1.01.02.2.03. 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	224	Satuan Pendidikan	1.419.000.000	APBD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	224	Satuan Pendidikan	1.474.000.000	APBD	Penambahan untuk - Pelaksanaan Kegiatan PAUD HI - Program Stunting BUNDA PAUD - Sosialisasi ARKAS BOSP PAUD Pergeseran/ dipind ah ke sub kegiatan 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.02.2.03. 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	224	Satuan Pendidikan	4.574.760.000	DAK Non Fisik	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	224	Satuan Pendidikan	4.574.760.000		
1.01.02.2.03. 0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan	224	Orang	15.000.000	APBD	Pembinaan Penggunaan Teknologi,		Jumlah Orang yang Mendapatkan	224	Orang	15.000.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
	dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)					Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)					
1.01.02.2.03. 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.03. 0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	Dokumen	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.03. 0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	223	Orang	15.000.000	APBD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	223	Orang	15.000.000	APBD	
1.01.02.2.03. 0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3230	Paket	154.676.500	APBD	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3230	Paket	154.676.500	APBD	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan/ Nonformal yang teenuhi (%)	100	%	8.714.210.000		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Keseta raan		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan/ Nonformal yang teenuhi (%)	100	%	8.719.210.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.02.2.04. 0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetara an		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetara an yang Telah Dibangun	2	Unit	105.000.000	APBD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Keseta raan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Keset araan yang Telah Dibangun	2	Unit		APBD	digeser/dipindah ke sub kegiatan 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Penyesuaian Sub Kegiatan dengan isi Rincian Belanja)
1.01.02.2.04. 0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetara an		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetara an yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7512	Peserta Didik	2.293.840.000	APBD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keseta raan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Keset araan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7512	Peserta Didik	2.209.240.000	APBD	digeser/dipindah ke sub kegiatan 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetar aan
1.01.02.2.04. 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50	Orang	573.000.000	APBD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50	Orang	573.000.000	APBD	Pemberian Insentif Tutor / Instruktur Pendidikan Nonformal/Kesetar aan
1.01.02.2.04. 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetara an		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	15	Satuan Pendidikan	45.000.000	APBD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta raan		Jumlah Sekolah Nonformal/Keset araan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	15	Satuan Pendidikan	234.600.000	APBD	Penambahan Hibah dan Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetar aan untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Nonformal/Kesetar aan
1.01.02.2.04. 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Mengelola Dana BOP	15	Satuan Pendidikan	5.547.370.000	DAK Non Fisik	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan		Jumlah Sekolah Nonformal/Keset araan yang Mengelola Dana BOP	15	Satuan Pendidikan	5.547.370.000	DAK Non Fisik	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1.01.02.2.04. 0040	Pengadaan Perlengkapan sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Paket		APBD	Pengadaan Perlengkapan sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	15	Paket	105.000.000	APBD	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetar aan
1.01.02.2.04. 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15	Satuan Pendidikan	50.000.000	APBD	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15	Satuan Pendidikan	50.000.000	APBD	
1.01.02.2.04. 0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	Unit	100.000.000	APBD	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	Unit		APBD	di geser/di pindahkan ke sub kegiatan 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Indeks Pemerataan guru (Indeks)	0,175	Indeks	59.889.800		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Indeks Pemerataan guru (Indeks)	0,175	Indeks	59.889.800		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an		Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Satuan Pendidikan)	169	Satuan Pendidikan	59.889.800		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an		Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Satuan Pendidikan)	169	Satuan Pendidikan	59.889.800		
1.01.04.2.01. 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an (Dokumen)	2	Dokumen	59.889.800	APBD	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Keset araan (Dokumen)	2	Dokumen	59.889.800	APBD	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang	100	%	10.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN		Persentase Usulan Izin Satuan	100	%	10.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
	PENDIDIKAN		diterbitkan/diperbar ui (%)					PENDIDIKAN		Pendidikan yang diterbitkan/diper barui (%)					
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Usulan kelayakan perizinan pendidikan dasar yang dinilai (Usulan)	10	Dokumen	10.000.000		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Usulan kelayakan perizinan pendidikan dasar yang dinilai (Usulan)	10	Dokumen	10.000.000		
1.01.05.2.01. 0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	10.000.000	APBD	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	10.000.000	APBD	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	45	%	30.000.000		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	45	%	30.000.000		
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di apresiasi (Publikasi)	2	Publikasi	30.000.000		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di apresiasi (Publikasi)	2	Publikasi	30.000.000		
1.01.06.2.01. 0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1	Bahasa	30.000.000	APBD	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1	Bahasa	30.000.000	APBD	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan (Objek)	13	Objek	97.889.200		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan (Objek)	13	Objek	97.889.200		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dikelola	3	Objek	97.889.200		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang	3	Objek	97.889.200		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
	Daerah Kabupaten/Kota		oleh masyarakat (Objek)					Daerah Kabupaten/Kota		dikelola oleh masyarakat (Objek)					
2.22.02.2.01. 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	Objek	97.889.200	APBD	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	Objek	97.889.200	APBD	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	55	%	120.677.000		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	55	%	120.677.000		
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kesenian yang dilaksanakan	100	%	120.677.000		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kesenian yang dilaksanakan	100	%	120.677.000		
2.22.03.2.01. 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100	Orang	45.000.000	APBD	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100	Orang	45.000.000	APBD	
2.22.03.2.01. 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	Lembaga	75.677.000	APBD	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	Lembaga	75.677.000	APBD	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal (%)	60	%	16.000.000		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal (%)	0	%	-		
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dilaksanakan	100%	%	16.000.000		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dilaksanakan	0	%	-		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2.22.04.2.01. 0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	100	Orang	16.000.000	APBD	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	Orang	-	APBD	digeser/dipindah ke sub kegiatan 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	76	%	35.000.000		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	76	%	101.625.000		
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kota yang sudah ditetapkan (Cagar Budaya)	5	Cagar Budaya	35.000.000		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kota yang sudah ditetapkan (Cagar Budaya)	5	Cagar Budaya	101.625.000		
2.22.05.2.01. 0002	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	Objek	35.000.000	APBD	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	Objek	101.625.000	APBD	Pergeseran dari sub kegiatan 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif (%)	55	%	65.625.000		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif (%)	55	%	15.000.000		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota		Jumlah Museum Kota Sukabumi yang representatif (Museum)	1	Museum	65.625.000		Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota		Jumlah Museum Kota Sukabumi yang representatif (Museum)	1	Museum	15.000.000		
2.22.06.2.01. 0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terelihara (Unit)	1	Unit	30.000.000	APBD	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terelihara (Unit)	1	Unit	15.000.000	APBD	digeser/dipindah ke sub kegiatan 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
2.22.06.2.01. 0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum	1	Unit	35.625.000	APBD	Revitalisasi Sarana dan		Jumlah Sarana dan Prasarana	1	Unit	-	APBD	digeser/dipindah ke sub kegiatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
	Museum		yang Direvitalisasi (Unit)					Prasarana Museum		Museum yang Direvitalisasi (Unit)					2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
						259.000.738.343							259.660.738.343		

Tabel 2.1
Analisa Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Berjalan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100	100	Persen	173.667.404.643	173.752.404.643	85.000.000	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	Persen	54.500.000	54.500.000	-	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	Dokumen	40.000.000	40.000.000	-	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	Dokumen	4.000.000	4.000.000	-	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	Dokumen	1.000.000	1.000.000	-	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	Dokumen	1.000.000	1.000.000	-	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	Dokumen	1.000.000	1.000.000	-	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	Laporan	4.000.000	4.000.000	-	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	Laporan	3.500.000	3.500.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	167.460.644.459	167.460.644.459	-	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1165	1165	Orang	167.449.444.459	167.449.444.459	-	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	Dokumen	6.000.000	6.000.000	-	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	Laporan	1.500.000	1.500.000	-	
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	-	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	Laporan	1.350.000	1.350.000	-	
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	Laporan	1.350.000	1.350.000	-	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	100	100	Persen	4.500.000	4.500.000	-	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	Laporan	2.500.000	2.500.000	-	
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	Laporan	2.000.000	2.000.000	-	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar (%)	100	100	Persen	50.000.000	70.000.000	20.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	Paket	30.000.000	30.000.000	-	
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1	Dokumen	-	20.000.000	20.000.000	Penambahan Pagu untuk Fasilitas Uji Kompetensi
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	221	221	Orang	20.000.000	20.000.000	-	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	Persen	1.040.106.300	1.054.588.300	14.482.000	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	Paket	5.887.000	5.887.000	-	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	Paket	16.500.000	16.500.000	-	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	Paket	16.000.000	16.000.000	-	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	Paket	576.586.300	591.068.300	14.482.000	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pemenuhan kekurangan honor tenaga kebersihan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	Paket	45.000.000	45.000.000	-	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	Dokumen	30.072.000	30.072.000	-	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	Laporan	20.000.000	20.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	Laporan	330.061.000	330.061.000	-	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan (%)	100	100	Persen	100.000.000	145.000.000	45.000.000	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	10	Unit	100.000.000	145.000.000	45.000.000	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (45.000.000) untuk pengadaan sarana prasarana kantor (komputer tab)
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan (%)	100	100	Persen	4.816.767.200	4.802.285.200	- 14.482.000	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	Laporan	1.800.000	1.800.000	-	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	Laporan	289.600.000	289.600.000	-	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	Laporan	32.690.000	32.690.000	-	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	Laporan	4.492.677.200	4.478.195.200	- 14.482.000	Digeser/dipindahkan ke sub kegiatan 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (efisiensi anggaran)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan (%)	100	100	Persen	140.886.684	160.886.684	20.000.000	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	Unit	84.271.771	104.271.771	20.000.000	Penambahan Pagu Untuk BBM kendaraan Operasional

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	Unit	56.614.913	56.614.913	-	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	100	100	Persen	84.898.252.700	85.473.252.700	575.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar yang terpenuhi (%)	100	100	Persen	40.875.706.200	41.175.706.200	300.000.000	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	Ruang	139.958.000	139.958.000	-	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Ruang	82.015.000	82.015.000	-	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	22	22	Paket	416.500.000	416.500.000	-	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	3	Paket	30.000.000	230.000.000	200.000.000	Penambahan Pagu Untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah Meja Kursi, Rehab Toilet
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	26447	26447	Peserta Didik	1.577.213.000	1.577.213.000	-	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	72	72	Unit	400.000.000	400.000.000	-	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	296	296	Peserta Didik	48.223.000	148.223.000	100.000.000	Penambahan Pagu karena ada Penyesuaian Rincian belanja untuk kegiatan minat bakat dan kreatifitas siswa
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	140	140	Orang	88.943.200	88.943.200	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	124	124	Satuan Pendidikan	27.520.000	27.520.000	-	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	124	124	Satuan Pendidikan	31.159.790.000	31.159.790.000	-	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	3	Ruang	1.384.281.000	1.384.281.000	-	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	345	345	Orang	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1572	1572	Paket	2.243.580.000	2.243.580.000	-	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	2	Ruang	789.218.000	789.218.000	-	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Unit	193.132.000	193.132.000	-	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	43	43	Orang	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	124	124	Satuan Pendidikan	25.440.000	25.440.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	6	Ruang	2.209.893.000	2.209.893.000	-	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama yang terpenuhi (%)	100	100	Persen	27.896.581.000	28.016.581.000	120.000.000	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	1	Ruang	341.160.000	341.160.000	-	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	13	Ruang	2.116.740.200	2.116.740.200	-	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit	76.212.800	76.212.800	-	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13	13	Paket	270.250.000	270.250.000	-	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	12121	12121	Peserta Didik	2.426.839.000	2.426.839.000	-	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6		Unit	170.775.000	170.775.000	-	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	403	403	Orang	680.000.000	780.000.000	100.000.000	Penambahan Pagu karena ada Penyesuaian Rincian belanja untuk kegiatan minat bakat dan kreatifitas siswa
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	176	176	Orang	280.000.000	280.000.000	-	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	47	47	Satuan Pendidikan	45.000.000	45.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	47	47	Satuan Pendidikan	18.305.940.000	18.305.940.000	-	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	47	47	Orang	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	47	47	Orang	98.864.000	108.864.000	10.000.000	Penambahan untuk pemenuhan kekurangan fasilitas internet PPDB Online
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	Dokumen	15.000.000	25.000.000	10.000.000	Penambahan Untuk Kegiatan Pameran Festival Pendidikan Jawa Barat
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Proses Belajar	47	47	Satuan Pendidikan	21.200.000	21.200.000	-	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	324	324	Orang	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	744	744	Paket	3.003.600.000	3.003.600.000	-	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Standar Pelayanan Minimal Anak Usia Dini yang terpenuhi (%)	100	100	Persen	7.411.755.500	7.561.755.500	150.000.000	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	Unit	567.469.000	567.469.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dirhabilitasi Sedang/Berat	-	1	Unit	-	100.000.000	100.000.000	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Nonformal/Kesetaraan untuk Penataan Hardscape Taman
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2	2	Paket	50.850.000	50.850.000	-	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	20	19	Orang	585.000.000	580.000.000	- 5.000.000	pengurangan Rincian Objek
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	224	224	Satuan Pendidikan	1.419.000.000	1.474.000.000	55.000.000	Penambahan untuk kegiatan sosialisasi PAUD HI dan Parenting
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	222	222	Satuan Pendidikan	4.574.760.000	4.574.760.000	-	
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	224	224	Orang	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	224	224	Orang	15.000.000	15.000.000	-	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3230	3230	Paket	154.676.500	154.676.500	-	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan/ Nonformal yang terpenuhi	100	100	Persen	8.714.210.000	8.719.210.000	5.000.000	
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)	15	0	Unit	105.000.000	-	- 105.000.000	digeser/dipindah ke sub kegiatan 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Penyesuaian Sub Kegiatan dengan isi Rincian Belanja)
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	464	464	Peserta Didik	2.293.840.000	2.209.240.000	- 84.600.000	digeser/dipindah ke sub kegiatan 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan untuk penyesuaian sub kegiatan dengan Rincian Belanja)
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50	50	Orang	573.000.000	573.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	15	15	Satuan Pendidikan	45.000.000	234.600.000	189.600.000	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	15	Unit	-	105.000.000	105.000.000	Pergeseran dari sub kegiatan 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan (Penyesuaian Sub Kegiatan dengan isi Rincian Belanja)
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15	15	Satuan Pendidikan	5.547.370.000	5.547.370.000	-	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	15	15	Satuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	-	Unit	100.000.000	-	- 100.000.000	di geser/di pindahkan ke sub kegiatan 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan guru (Indeks)	0,2	0,2	Angka	59.889.800	59.889.800	-	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Satuan Pendidikan)	169	169	Satuan Pendidikan	59.889.800	59.889.800	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	Dokumen	59.889.800	59.889.800	-	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (%)	100	100	Persen	10.000.000	10.000.000	-	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usulan kelayakan perizinan pendidikan dasar yang dinilai (Usulan)			Jumlah	10.000.000	10.000.000	-	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	Dokumen	10.000.000	10.000.000	-	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	75	75	Persen	30.000.000	30.000.000	-	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di apresiasi (Publikasi)	2	2	Jumlah	30.000.000	30.000.000	-	
1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1	1	Bahasa	30.000.000	30.000.000	-	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan (Objek)	13	13	Jumlah	97.889.200	97.889.200	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dikelola oleh masyarakat (Objek)	3	3	Jumlah	97.889.200	97.889.200	-	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	4	Objek	97.889.200	97.889.200	-	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	55	55	Persen	120.677.000	120.677.000	-	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang dilaksanakan	100	1100	Jumlah	120.677.000	120.677.000	-	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100	100	Orang	45.000.000	45.000.000	-	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	5	Lembaga	75.677.000	75.677.000	-	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal (%)	60	-	Persen	16.000.000	-	- 16.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dilaksanakan	100	-	Jumlah	16.000.000	-	- 16.000.000	
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100	-	Orang	16.000.000	-	- 16.000.000	digeser/dipindah ke sub kegiatan 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	76	76	Persen	35.000.000	101.625.000	66.625.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kota yang sudah ditetapkan	5	5	Jumlah	35.000.000	101.625.000	66.625.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target			Pagu		Selisih	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah		
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2	2	Objek	35.000.000	101.625.000	66.625.000	Pergeseran dari sub kegiatan 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif	55	55	Persen	65.625.000	15.000.000	- 50.625.000	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kota Sukabumi yang representatif	1	1	Jumlah	65.625.000	15.000.000	- 50.625.000	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3	1	Unit	30.000.000	15.000.000	- 15.000.000	digeser/dipindah ke sub kegiatan 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1	-	Unit	35.625.000	-	- 35.625.000	digeser/dipindah ke sub kegiatan 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
J U M L A H						259.000.738.343	259.660.738.343	660.000.000	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan yang berimplikasi pada perubahan RKPD tahun 2024, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, perubahan dianggap perlu untuk menyesuaikan kondisi riil saat ini. Perubahan tersebut berupa pengalokasian dan rasionalisasi anggaran berdasarkan arahan dari Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam perubahan Renja tahun 2024 ini berisi rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Semester tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 terjadi Penambahan/pengurangan serta pergeseran pagu indikatif sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Ringkasan perubahan pagu tahun 2024

Uraian	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024		Bertambah/Berkurang
	Awal (Murni)	Perubahan	
Pagu (Rp)	259.000.738.343	259.660.738.343	660.000.000
Program	10 Program	10 Program	-
Kegiatan	20 kegiatan	20 Kegiatan	-
Sub Kegiatan	96 Sub Kegiatan	100 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		145.047.468.050	259.000.738.343	259.660.738.343				259.660.738.343			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		144.762.274.578	258.665.547.143	259.325.547.143				259.325.547.143			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		144.762.274.578	258.665.547.143	259.325.547.143				259.325.547.143			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	131.567.764.378	173.667.404.643	173.752.404.643		100 Persen	173.752.404.643		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	49.500.000	54.500.000	54.500.000		100 Persen	54.500.000		
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Sukabumi, Lembursitu, Cipanengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokume n	40.000.000		
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Sukabumi, Lembursitu, Cipanengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokume n	4.000.000		
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokume n	1.000.000		
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokume n	1.000.000	
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokume n	1.000.000	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	4.000.000	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	3.500.000	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	124.693.639.252	167.460.644.459	167.460.644.459		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Para Pemangku Kepentingan	100 persen	167.460.644.459	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1165 Orang/bul an	1165 Orang/bul an	124.682.439.252	167.449.444.459	167.449.444.459	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1165 Orang/b ulan	167.449.444.459	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokume n	6.000.000	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.500.000	
1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokume n	1.000.000	
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.350.000	1.350.000	1.350.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1.350.000	
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000	1.350.000	1.350.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokume n	1.350.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 persen	4.500.000	4.500.000	4.500.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Para Pemangku Kepentingan	100 persen	4.500.000	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.500.000
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.000.000
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi kepagawaian sesuai standar	100 Persen	100 persen	50.000.000	50.000.000	50.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	50.000.000	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	30.000.000
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen			20.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokume n	20.000.000
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	221 Orang	221 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		221 Orang	20.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
				0008	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	30.072.000	30.072.000	30.072.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokume n	30.072.000	
1	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	20.000.000	
1	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	330.061.000	330.061.000	330.061.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	330.061.000	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100 Persen	100 persen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	100.000.000	
1	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	11 Unit	100.000.000	100.000.000	145.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	145.000.000	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100 Persen	100 persen	5.440.653.000	4.816.767.200	4.816.767.200		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	4.816.767.200	
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.800.000	
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	289.600.000	289.600.000	289.600.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	289.600.000
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	32.690.000	32.690.000	32.690.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	32.690.000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.116.563.000	4.492.677.200	4.478.195.200	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.478.195.200
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	189.365.826	140.886.684	140.886.684		-	100 persen	140.886.684
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	84.271.771	84.271.771	104.271.771	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Unit	104.271.771
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1 Unit	1 Unit	105.094.055	56.614.913	56.614.913	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	56.614.913
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	100 Persen	100 Persen	13.094.620.400	84.898.252.700	85.473.252.700			100 Persen	85.473.252.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	72 Unit	72 Unit		400.000.000	400.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	72 Unit	400.000.000		
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	296 Peserta Didik	296 Peserta Didik	48.223.000	48.223.000	148.223.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296 Peserta Didik	148.223.000		
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Orang	88.943.200	88.943.200	88.943.200	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Orang	88.943.200		
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
					Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	124 Satuan Pendidikan	124 Satuan Pendidikan	27.520.000	27.520.000	27.520.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124 Satuan Pendidik an	27.520.000		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	124 Satuan Pendidikan	124 Satuan Pendidikan		31.159.790.000	31.159.790.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	124 Satuan Pendidik an	31.159.790.000		
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar											
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 ruang		1.384.281.000	1.384.281.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	3 ruang	1.384.281.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan										
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	345 Orang	345 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		345 Orang	15.000.000
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokume n	15.000.000
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan										
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokume n	15.000.000
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1572 Paket	1572 Paket	1.657.680.000	2.243.580.000	2.243.580.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1572 Paket	2.243.580.000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang		449.320.000	789.218.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		2 Ruang	789.218.000
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang		193.132.000	193.132.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		2 Ruang	193.132.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	1 unit		76.212.800	76.212.800	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		1 unit	76.212.800	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah											
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket	13 Paket		270.250.000	270.250.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		13 Paket	270.250.000	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12121 Peserta Didik	12121 Peserta Didik	2.226.839.000	2.426.839.000	2.426.839.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12121 Peserta Didik	2.426.839.000	
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa											
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 Unit	6 Unit		227.700.000	170.775.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		6 Unit	170.775.000	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	403 Peserta Didik	403 Peserta Didik	680.000.000	680.000.000	780.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		403 Peserta Didik	780.000.000	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	176 Orang	176 Orang	230.000.000	280.000.000	280.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		176 Orang	280.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47 Satuan Pendidikan	45.000.000	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan		18.305.940.000	18.305.940.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler		47 Satuan Pendidikan	18.305.940.000	
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	47 Orang	47 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47 Orang	15.000.000	
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	47 Orang	47 Orang	26.000.000	98.864.000	108.864.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47 Orang	108.864.000	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15.000.000	
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	25.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25.000.000	

[illegible]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Satuan Pendidikan	50.000.000		
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah												
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	0 Unit	100.000.000	100.000.000		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit			
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	0,2 Indeks	59.889.800	59.889.800	59.889.800				0,2 Indeks	59.889.800		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	59.889.800	59.889.800	59.889.800	-		169 Satuan Pendidikan	59.889.800		
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	59.889.800	59.889.800	59.889.800	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	59.889.800		
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			100 Persen	10.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usulan kelayakan perizinan pendidikan dasar yang dinilai	10 Usulan	10 Usulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10 Usulan	10.000.000		
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokume n	10.000.000	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	75 Persen	75 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000			75 Persen	30.000.000	
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di apresiasi	2 Hasil Publikasi	2 Hasil Publikasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-		2 Hasil Publikas i	30.000.000	
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	1 Bahasa	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Bahasa	30.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				285.193.472	335.191.200	335.191.200				335.191.200	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				285.193.472	335.191.200	335.191.200				335.191.200	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	13 Objek	13 Objek	38.514.472	97.889.200	97.889.200			13 Objek	97.889.200	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dikelola oleh masyarakat	3 Objek	3 Objek	38.514.472	97.889.200	97.889.200			-	3 Objek	97.889.200
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	38.514.472	97.889.200	97.889.200	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Objek	97.889.200
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	55 persen	55 persen	120.679.000	120.677.000	120.677.000				55 persen	120.677.000
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	120.679.000	120.677.000	120.677.000			-	100 persen	120.677.000
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional											
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100 Orang	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	45.000.000
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	75.679.000	75.677.000	75.677.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga	75.677.000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal (%)	60 Persen	0 Persen	16.000.000	16.000.000					0 Persen	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dilaksanakan	100 persen	0 persen	16.000.000	16.000.000		-	0 persen			
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota											
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	0 Orang	16.000.000	16.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang			
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	76 Persen	76 Persen	35.000.000	35.000.000	101.625.000		76 Persen	101.625.000		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kota yang sudah ditetapkan	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	20.000.000	35.000.000	35.000.000	-	5 Cagar Budaya	35.000.000		
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya											
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	0 Objek	10.000.000		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Objek			
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya											
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	10.000.000	35.000.000	101.625.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Objek	101.625.000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kota yang dikelola	-	0 Cagar Budaya	15.000.000			-	0 Cagar Budaya			
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya											
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek	15.000.000		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Objek			
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif	55 persen	55 persen	75.000.000	65.625.000	15.000.000		55 persen	15.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kota Sukabumi yang representatif	1 Museum	1 Museum	75.000.000	65.625.000	65.625.000	-	1 Museum	65.625.000		
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	30.000.000	30.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	15.000.000	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	0 Unit	45.000.000	35.625.000		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit		
J U M L A H									145.047.468.050	259.000.738.343	259.660.738.343				259.660.738.343	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada Pasal 343 ayat (1) bahwa : Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti refocusing anggaran.
2. Penyusunan skala prioritas program dan kegiatan.
3. Pemenuhan Belanja Pegawai PPPK
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Hal-hal tersebut diatas memerlukan pencermatan untuk pelaksanaan program kegiatan kedepan.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dapat berjalan secara sinergis. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
2. Dalam upaya pencapaian kinerja, program dan kegiatan prioritas menjadi sasaran utama dan alokasi pendanaannya, sesuai dengan program-program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Program dan Kegiatan prioritas dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 diakomodir dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
4. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan tersebut diatas, perlu adanya rencana tindak lanjut antara lain:

1. Menyusun skala prioritas program dan kegiatan sesuai program-program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam perubahan RKPD
2. Melakukan penyesuaian – penyesuaian program dan kegiatan seandainya anggaran perubahan tahun 2024 yang diusulkan tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.

E. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh berkesinambungannya program dan kegiatan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri atas perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat, adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama, serta pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan, yaitu Kesehatan Ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan penguatan sistem kesehatan nasional melalui transformasi kesehatan. Transformasi Kesehatan yang dimaksud yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis sebagai upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan agenda Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

Rencana Strategis dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (*Renja Perangkat Daerah*) yang merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai upaya pengendalian berbagai permasalahan kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang dan dengan sub bagian dan seksinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung dan penunjang program dan kegiatan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis seperti Puskesmas, Rumah Sakit, UPT Labkesda dan UPT Penunjang.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan lintas Perangkat Daerah di Kota Sukabumi.

Dalam pelaksanaannya Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024, mengalami perubahan yang harus mengakomodir beberapa hal antara lain:

1. Penyesuaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Sukabumi;
2. Penyesuaian pendapatan dari berbagai sumber anggaran yang berpengaruh terhadap belanja yang dilaksanakan;
3. Pemenuhan program prioritas dan pelayanan dasar bidang kesehatan;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih ada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2023, secara yuridis formal berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023;
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/209/2020;
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023;
25. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 60);

26. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024;
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024;
3. Sebagai dasar penilaian pencapaian laporan kinerja tahunan Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024;
4. Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada Tahun 2024;
5. Sebagai arah dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan, lebih terarah dan terukur, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kota Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II – Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III – Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya;

BAB IV - Penutup, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator Renstra Dinas Kesehatan Sampai Triwulan II Tahun 2024

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan pada program maupun kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026, sesuai indikator sasaran yang telah ditentukan. Indikator sasaran yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.

Secara rinci hasil evaluasi pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kota
Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Triwulan II)			
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1.02	DINAS KESEHATAN			77	61.4	79.96
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	71.07	71.07
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	77.78	77.78
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100.00
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0.00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100.00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		0.00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100.00	100.00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	914	914	100.00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0.00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0	0.00

1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0	0.00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	%	100	66.67	66.67
1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0.00
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100.00
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100.00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	50.00	50.00
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	50	50.00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	70.73	70.73
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	14	100.00
1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	6	50.00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50.00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	%	100	51.35	51.35
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100.00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	50.00
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	50.00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	50.00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	52.00	52.00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	6	50.00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	6	50.00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD	%	100	100.00	100.00

1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD R Syamsudin Sh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	3	3	100.00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Angka	92	40.5	43.99
		Prevalensi stunting pada balita	%	6	5.69	100.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	15.88	95.2	100.00
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	100	100.0	100.00
		Persentase kepesertaan JKN	%	98.5	101.4	100.00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan UKM & UKP	%	100	37.70	37.70
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	0	0.00
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	0	0.00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	10	2	20.00
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	6	2	33.33
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	0	0.00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	umlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	16	0	0.00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	0	0.00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	100.00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			15	15	100.00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan berkualitas	%	100	23.66	23.66
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	umlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6393	2317.00	36.24
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6346	2198,0	34.64

1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5994	2258.0	37.67
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30252	12484.0	41.27
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51329	2614.0	5.09
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	228066	46687.0	20.47
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	41026	20233.0	49.32
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	34835	8053.0	23.12
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5254	1832.0	34.87
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	512	125.0	24.41
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9032	1174.0	13.00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	11905	1945.0	16.34
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	2.0	40.00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	1.0	16.67
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	0	0.00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	0	0.00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	20	5.0	25.00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	20	5.0	25.00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.0	100.00
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasvankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) dan Sekolah	Orang	20	0.0	0.00



1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	20	5.0	25.00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi	Unit	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100	50.0	50.00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100	50.0	50.00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1.0	100.00
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	5	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase UPT yang memiliki sistem informasi kesehatan terintegrasi	%	100	0.00	0.00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	0.0	0.00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100.00	100.00
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinanannya	Unit	6	6	100.00

1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	15	15	100.00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	21	21	100.00
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	2	2	100.00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	100	67	66.67
1.02.03.2.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	Persentase pemenuhan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	%	100.0	100.00	100.00
			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Triwulan II)			
	Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota					
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	100.00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan perencanaan dan kebutuhan SDMK	%	100.0	0.00	0.00
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	0	0.00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	0	0.00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100.0	100.00	100.00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orang	30	30	100.00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	%	100	80.00	80.00
1.02.04.2.01	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Makro obat Tradisioanal (UMOT)	Persentase Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Makro obat Tradisioanal (UMOT)	%	100	100.00	100.00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	100.00

1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase pemenuhan sertipikat P-IRT	%	100	100.00	100.00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	100.00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Prosentase Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga beredar yang di lakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	%	100	40.00	40.00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga beredar yang di lakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	50	20	40.00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan msyarakat kesehatan	%	100	31.75	31.75
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	%	100	0.00	0.00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	0	0.00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	%	100	95.24	95.24
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	0	0.00
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	20	20	100.00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM	%	100	0.00	0.00

1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	0	0.00
JUMLAH				76.7	61.4	79.96

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan
Dinas Kesehatan s.d Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET ANGGARAN	JUMLAH REALISASI S/D SEMESTER I	%
4	Pendapatan Daerah	337,922,716,849	160,550,389,781	47.51
4.1	Pendapatan Asli Daerah	337,922,716,849	160,550,389,781	47.51
4.1.02	Retribusi Daerah	30,919,997,922	13,840,958,766	44.76
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	30,919,997,922	13,840,958,766	44.76
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1,520,000,000	1,347,786,000	88.67
	Retribusi Dinas Kesehatan (Labkesda)	191,240,000	230,826,000	120.70
	Retribusi Penerimaan Puskesmas	1,058,760,000	856,960,000	80.94
	Upt Penunjang		2,375,000	
	Pendapatan Retribusi BLUD Selabatu	270,000,000	257,625,000	95.42
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	29,399,997,922	12,493,172,766	42.49
	Pendapatan Retribusi BLUD RS. Syamsudin, SH	27,445,160,000	11,735,405,911	42.76
	Pendapatan Retribusi BLUD UOBK RSUD Al Mulk	1,954,837,922	757,766,855	38.76
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	307,002,718,927	146,709,431,015	47.79
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	307,002,718,927	146,709,431,015	47.79
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	307,002,718,927	146,709,431,015	47.79
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	307,002,718,927	146,709,431,015	47.79
	Pendapatan BLUD UOBK RSUD Syamsudin, SH	292,554,840,000	138,313,730,789	47.28
	Pendapatan BLUD Selabatu	1,950,000,000	1,033,483,143	53.00
	Pendapatan BLUD UOBK RSUD AL Mulk	11,499,128,927	6,845,159,683	59.53
4.3.03.02.01.0001	Dana Non Kapitasi JKN FKTP	998,750,000	517,057,400	51.77

Pendapatan Dinas Kesehatan berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, jasa layanan BLUD dan Non Kapitasi JKN. Realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2024 sebesar 47,51% dari target Rp. 337.922.716.849. Jenis pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sampai dengan Semester II Tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi yang signifikan, hal ini dikarenakan telah diterapkan tarif baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sukabumi, sehingga perlu perubahan

target pendapatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Cakupan hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi berdasarkan indikator Renstra Tahun 2024 - 2026 terlihat bahwa sebagian besar target yang ditetapkan telah tercapai bahkan ada yang melampaui target. Walaupun demikian masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan yang harus menjadi prioritas pada tahun berikutnya.

Hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi berdasarkan SPM dan IKK pada semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian
Kinerja Pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Satuan	Capaian	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
A	Indikator Kinerja Utama					
1	Indeks Pembangunan Manusia			Angka	77.16	
2	Indeks Keluarga Sehat			Angka	0.34	
B	Indikator Kinerja Daerah					
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	√	√	persen	44.21	
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	√	√	persen	44.52	
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	√	√	persen	45.94	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar	√	√	persen	50.41	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	persen	97.61	
6	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)	√	√	persen	26.28	
7	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	√	√	persen	56.73	
8	persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standart	√	√	persen	61.26	
9	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	√	√	persen	34.40	
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	√	√	persen	46.69	
11	Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	√	√	persen	23.81	
12	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	√	√	persen	16.34	
13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		√	persen	0,39	
14	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		√	persen	100	

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 12 indikator SPM, belum memenuhi

target yang ditetapkan (100%), hal ini dikarenakan pencapaian pelayanan dasar bidang kesehatan dilaksanakan bertahap yang dilaksanakan selama 1 tahun.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.3.1 Tingkat kinerja dan hal kritis pelayanan Dinas Kesehatan

Pada umumnya kinerja pelayanan kesehatan pada Triwulan II Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Namun demikian untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi maka diperlukan upaya yang lebih maksimal pada tahun mendatang.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, walaupun pada kenyataannya tidak semua masalah kesehatan bisa dan menjadi tugas Dinas Kesehatan. Meningkatnya masalah kesehatan terutama penyakit degeneratif, penyakit berbasis lingkungan dan kelainan kongenital, tidak sepenuhnya bisa diatasi oleh Dinas Kesehatan, tetapi sangat tergantung dari adanya perubahan perilaku individu yang menyangkut pola hidup (*life skill*). Perubahan kebijakan dalam alokasi anggaran juga turut berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan; misalnya untuk pengadaan obat program dalam pengadaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah (Kab/Kota). Sementara alokasi anggaran daerah belum sepenuhnya mendukung, termasuk juga untuk kegiatan yang bersifat *promotif* dan *preventif*.

Dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Pemerintah Kota Sukabumi telah mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Kota Sukabumi dalam mendukung program pemerintah yaitu Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan program kesehatan antara lain:

- a. Regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan tidak seiring dengan turunnya anggaran diawal tahun.
- b. Pemenuhan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

- c. Penurunan Stunting dan kematian ibu serta bayi
- d. Pemenuhan kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM)
- e. Keterbatasan sumber daya manusia di unit teknis Dinas Kesehatan seiring dengan kebijakan pegawai non ASN.
- f. masih terbatasnya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan dibandingkan tuntutan masyarakat.

2.3.3 Dampak

Dinas Kesehatan secara berjenjang adalah unit kerja yang melaksanakan berbagai kebijakan, komitmen, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan baik dari Pusat, Provinsi dan Daerah. Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Kebijakan Nasional (SPM dan IPM), Internasional (MDG's/ SDG's), terdapat berbagai sasaran indikator yang menjadi tujuan setiap program / kegiatan pembangunan kesehatan. Terdapat beberapa penekanan substansi pada setiap indikator yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yang pada intinya memerlukan tiga (3) faktor, yaitu: *"man, money and method"*. Sinergitas yang baik antara faktor-faktor tersebut akan berdampak baik terhadap pencapaian sasaran.

Secara teknis, capaian program nasional dan internasional telah dijabarkan secara detail terhadap program dan kegiatan yang harus dilakukan, namun untuk keberhasilannya harus ditunjang oleh ke-tiga faktor tadi. Perlu dicermati pula bahwa Dinas Kesehatan tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan kesehatan yang timbul tanpa campur tangan pihak lain (SKPD lain), antara lain: masalah kemiskinan berdampak terhadap munculnya masalah gizi buruk, diare, TB paru dan lainnya. Artinya, harus ada OPD / pihak lain yang menggarap masalah kemiskinan dan penyebab kemiskinan itu sendiri.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya, terdapat tantangan dan sekaligus peluang sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat yang semakin dinamis. Tantangan yang dihadapi secara garis besar diantaranya adalah:

- 1) Masih terdapatnya indikator SPM yang belum memenuhi target
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi kedepannya harus menjamin seluruh warga memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar dan sesuai kebutuhannya. Implementasi SPM bidang Kesehatan yang sesuai standar diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- 2) Meningkatnya kasus penyakit tidak menular
Tantangan yang harus dikendalikan ke depan yaitu bagaimana pemahaman pentingnya deteksi dini pada masyarakat untuk mengetahui status kesehatannya, sehingga diharapkan penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Obesitas maupun keganasan dapat dikendalikan faktor resikonya. Masyarakat dapat secara mandiri mengatasi faktor resiko agar tidak berkembang menjadi penyakit kronis.
- 3) Munculnya *re-emerging*, *emerging* dan *new emerging*
Tren penyakit menular zoonosis yang masih sering terjadi seperti kasus DBD, Chikungunya yang endemis berkaitan erat dengan faktor perilaku dan lingkungan. Sementara itu kasus penyakit menular langsung seperti TB, HIV, Hepatitis ditemukan dengan kasus yang meningkat. Selain itu peningkatan juga ditemukan pada penyakit yang dulu telah dinyatakan hilang seperti dipteri, hal ini berkaitan erat pada status imunisasi dasar lengkap yang perlu diperbaiki. Kemudian akhir tahun 2019, diinformasikan terdapat penyakit baru yang muncul di kasawan Cina yang berpotensi menyabar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga sampai ke Kota Sukabumi yang membutuhkan penanganan yang komprehensif.
- 4) Masih terdapatnya makanan dan obat-obatan yang belum memiliki izin atau tidak sesuai standar
Tantangan ke depan bagi Dinas Kesehatan yaitu bagaimana menjamin makanan dan obat-obatan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat Kota Sukabumi aman dan sesuai

standar. Penguatan pengawasan dan penerbitan izin sesuai standar mendorong pelaku usaha industri makanan dan obat-obatan untuk menjaga kualitas makanan dan obat-obatan.

- 5) Jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai dengan standar minimal ketenagaan
Kondisi SDM Kesehatan saat ini yang belum memenuhi kuantitas dan kualitas menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan agar adanya regulasi untuk mengembangkan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan program pengembangan akademik yang terencana dan terarah sesuai kebutuhan SDM Kesehatan.
- 6) Masih rendahnya Keluarga dan rumah yang termasuk dalam kategori keluarga dan rumah sehat
Tantangan lain yang banyak membutuhkan peran serta lintas sektor dan juga pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mendorong partisipasi seluruh masyarakat dalam menanamkan Paradigma Sehat di unit terkecil yaitu keluarga. Kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan dan juga tentang rumah sehat akan meningkatkan cakupan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Sukabumi.

Selain adanya tantangan, tentunya ada peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan tersebut, antara lain:

- 1) Adanya bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi serta dari pihak swasta serta fokus pembiayaan pada hal-hal strategis
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mendapatkan banyak dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain:
 - a. Dana Alokasi Khusus
 - b. Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat
 - c. APBD Kota Sukabumi
 - d. Kapitasi JKN
 - e. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- 2) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Jumlah sarana pendidikan di Kota Sukabumi cukup banyak terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Pengetahuan masyarakat semakin tinggi salah satunya karena faktor pendidikan. Pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat untuk mencapai kesadaran akan pentingnya kesehatan.

- 3) Meningkatnya skill tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

Program peningkatan kapasitas untuk SDM kesehatan terus dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi melalui kegiatan pelatihan, tugas belajar dan juga program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi tenaga kesehatan yang tidak sesuai kualifikasinya, walaupun dari segi jumlah anggaran dan kepesertaan masih terbatas diharapkan akan adanya peningkatan program ini kedepannya.

- 4) Kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dengan kewajiban akreditasi fasyankes

Adanya akreditasi Fasyankes memberikan peluang untuk pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko. Secara bertahap Dinas Kesehatan memfasilitasi Akreditasi Puskesmas dan juga pembinaan terhadap Akreditasi Klinik dan Rumah sakit.

- 5) Peran serta masyarakat semakin baik dan bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan kesehatan

Masyarakat Kota Sukabumi secara bertahap memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Pola hidup sehat sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar masyarakat. Hal ini mendorong berbagai elemen masyarakat secara aktif untuk berkolaborasi dalam bidang kesehatan seperti adanya UKBM Posyandu, Posbindu, Poskestren, UKS, Lembaga Lansia Indonesia (LLI), LSM HIV/AIDS, Forum Kota Sukabumi Sehat, Organisasi Profesi Kesehatan. Kolaborasi yang sinergis dari Dinas kesehatan lintas sektor dan juga peran serta masyarakat menjadi daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian derajat

kesehatan masyarakat Kota Sukabumi.

2.3.5 Rekomendasi

Dari isu-isu penting yang berkembang, beberapa rekomendasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar, melalui peningkatan kualitas/kualifikasi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, penganggaran dan manajemen Puskesmas;
- b. Melakukan kerjasama lintas sektor dengan perangkat daerah lain dalam penanganan masalah kesehatan dan penyebab timbulnya masalah kesehatan;
- c. Advokasi terhadap Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan kebutuhan pelaksanaan program/ kegiatan kesehatan, baik dari sisi anggaran program maupun dukungan kebijakan;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan, unit pelayanan kesehatan swasta dan organisasi kesehatan lainnya;

2.4 Analisis Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Atas dasar hasil evaluasi Renja sampai dengan Semester II Tahun 2024, disusun Analisis Rincian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 baik itu perubahan belanja dan perubahan pendapatan.

Tabel 2.4
Analisis Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Belanja Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target		Pagu								
					Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah (Usulan)						
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN					496,565,188,576	496,565,188,576		509,690,484,409	509,690,484,409		13,125,295,833		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	421,076,237,542	421,076,237,542		431,830,532,605	431,830,532,605		10,754,295,063		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	213,425,000	213,425,000		213,425,000	213,425,000		-		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	43,000,000	43,000,000	APBD	43,000,000	43,000,000	APBD	-		
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	APBD	3,000,000	3,000,000	APBD	-		
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,750,000	3,750,000	APBD	3,750,000	3,750,000	APBD	-		
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	4 dokumen	4 dokumen	9,925,000	9,925,000	APBD	9,925,000	9,925,000	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					Target	Pagu								
						Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	153,750,000	153,750,000	APBD	153,750,000	153,750,000	APBD	-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	77,115,353,571	77,115,353,571		77,115,353,571	77,115,353,571		-	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	975 orang	975 orang	76,999,099,646	76,999,099,646	APBD	76,999,099,646	76,999,099,646	APBD	-	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	7,312,500	7,312,500	APBD	7,312,500	7,312,500	APBD	-	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/	1 Laporan	1 Laporan	5,865,300	5,865,300	APBD	5,865,300	5,865,300	APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD											
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	103,076,125	103,076,125	APBD	103,076,125	103,076,125	APBD	-		
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemuahan administiras barang milik daerah perangkat daerah	Persentase pemuahan administiras barang milik daerah perangkat daerah	100%	100%	29,700,000	29,700,000		29,700,000	29,700,000		-		
1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	APBD	10,000,000	10,000,000	APBD	-		
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8,200,000	8,200,000	APBD	8,200,000	8,200,000	APBD	-		
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	1 Laporan	11,500,000	11,500,000	APBD	11,500,000	11,500,000	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Setelah (Usulan)		Sumber Dana			
					Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan				Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah			28,000,000	28,000,000		28,000,000	28,000,000		-		
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 orang	100 orang	28,000,000	28,000,000	APBD	28,000,000	28,000,000	APBD	-		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	2,247,735,050	2,247,735,050		2,706,135,050	2,706,135,050		458,400,000		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	APBD	15,000,000	15,000,000	APBD	-		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37,500,000	37,500,000	APBD	37,500,000	37,500,000	APBD	-		
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,741,700,550	1,741,700,550	APBD	2,200,100,550	2,200,100,550	APBD	458,400,000	Penambahan gaji TKS Pembayaran Listrik untuk penambahan daya di Puskesmas Pengadaan & Pemeliharaa n Sarana Prasarana Penunjang Puskesmas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					Target	Pagu								
						Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53,534,500	53,534,500	APBD	53,534,500	53,534,500	APBD	-	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	APBD	50,000,000	50,000,000	APBD	-	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	350,000,000	350,000,000	APBD	350,000,000	350,000,000	APBD	-	
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%				445,000,000	445,000,000		445,000,000	
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 unit				445,000,000	445,000,000	APBD	445,000,000	Digitalisasi Retribusi & Digitalisasi SIK untuk pelaporan aplikasi dibidang
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	5,363,307,072	5,363,307,072		5,448,307,072	5,448,307,072		85,000,000	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	APBD	3,000,000	3,000,000	APBD	-	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.	1 laporan	1 laporan	406,002,647	406,002,647	APBD	421,002,647	421,002,647	APBD	15,000,000	Pembayaran jasa media

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu							
							Sebelum		Sesudah (Usulan)		Sumber Dana			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	303,618,025	303,618,025	APBD	373,618,025	373,618,025	APBD	70,000,000	Penambahan jasa kantor/ instruktur dan perlengkap n pegawai
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4,650,686,400	4,650,686,400	APBD	4,650,686,400	4,650,686,400	APBD	-	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	404,750,000	404,750,000		404,750,000	404,750,000		-	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	284,750,000	284,750,000	APBD	284,750,000	284,750,000	APBD	-	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	20,000,000	20,000,000	APBD	20,000,000	20,000,000	APBD	-	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi	1 unit	1 unit	100,000,000	100,000,000	APBD	100,000,000	100,000,000	APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Per Sumber Anggaran	Sebelum	Sumber Dana	Sesudah (Usulan)	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.01	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan UKM & UKP	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan UKM & UKP	100%	100%	16,340,445,808	16,340,445,808		17,179,096,578	17,179,096,578		838,650,770		
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas ditingkatkan SPA dan SDM	Jumlah puskesmas ditingkatkan SPA dan SDM	4 unit	4 unit	1,425,000,000	1,810,000,000	DAK Fisik - Penguatan Sistem	1,425,000,000	1,425,000,000	DAK Fisik - Penguatan Sistem	385,000,000	Ambulan/ Pusing (pindah ke sub kegiatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit berdasarkan pemetaan dari kemendagri)	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas					385,000,000		DBHCHT	-		DBHCHT			
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas lain ditingkatkan SPA dan SDM	Jumlah Fasilitas lain ditingkatkan SPA dan SDM	1 unit	1 unit	139,000,000	171,000,000	DAK Fisik - Penguatan Sistem	139,000,000	171,000,000	DAK Fisik - Penguatan Sistem	-		
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					32,000,000		DAK Fisik - Penguatan Sistem	32,000,000		DAK Fisik - Penguatan Sistem			
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 unit	7 unit	1,750,000,000	1,750,000,000	DBHCHT	1,750,000,000	1,750,000,000	DBHCHT	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan	
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Oleh Puskesmas	Oleh Puskesmas											
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					-		-	-		-			
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 unit	3 unit	1,100,000,000	1,100,000,000	DBHCHT	1,100,000,000	1,500,000,000	DBHCHT	400,000,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan Pustu/ Gedung (SILPA 2023)	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								400,000,000					DBHCHT
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-		-	-		-			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1 unit	1 unit	200,000,000	560,273,750	DBHCHT	200,000,000	760,273,750	DBHCHT	200,000,000	Pengadaan alkes dental unit (SILPA 2023)	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			-		-	200,000,000					DBHCHT
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					360,273,750		DAK Fisik - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi,	360,273,750					DAK Fisik - Penguatan Penurunan Angka Kematian Aneka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target	Pagu									
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Setelah (Usulan)		Sumber Dana		
	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 dan Intervensi Stunting	11	12	13	14	15	
												Kematia n Ibu, Bayi, dan Interven si Stuntin g			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					1,806,425,898	3,306,425,898	DAK Fisik - Penguatan Penuruna n Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	1,806,425,898	3,306,425,898	DAK Fisik - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	-		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					1,500,000,000		DAK Fisik - Penguatan Sistem	1,500,000,000		DAK Fisik - Penguatan Sistem			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					1,500,000,000	1,500,000,000	DAK Fisik - Penguatan Sistem	1,500,000,000	1,500,000,000	DAK Fisik - Penguatan Sistem	-		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	50,000,000	100,919,000	APBD	50,000,000	100,919,000	APBD	-		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas					50,919,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	50,919,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan	
					Target		Pagu								
							Sebelum		Sesudah (Usulan)		Sesudah (Usulan)				
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan													
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	240,000,000		DBHCHT	240,000,000		DBHCHT			
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000						385,000,000		DBHCHT			
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit					240,000,000								
								240,000,000		200,000,000		825,000,000	DBHCHT	585,000,000	Rehab ruang perawatan RSAM (SILPA 2023)
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	352,552,500		DBHCHT	352,552,500		DBHCHT			
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						5,669,774,360			38,650,770	5,708,425,130	DBHCHT	38,650,770	Bahan habis pakai (reagen) pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan (SILPA 2023)
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,					335,700,000		APBD	335,700,000		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Setelah (Usulan)					
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					1,067,119,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	1,067,119,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					3,914,402,860		DAK Non Fisik - BOK Dinas	3,914,402,860		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					132,052,800	132,052,800	DAK Non Fisik - BOK Dinas	132,052,800	132,052,800	DAK Non Fisik - BOK Dinas	-		
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP	1	1	52,587,271,688	52,587,271,688		54,221,271,688	54,221,271,688		1,634,000,000		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang	Jumlah Ibu Hamil yang	5773 orang	5773 orang	17,795,000	17,795,000	APBD	17,795,000	17,795,000	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Setelah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan Ibu Hamil	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar											
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					38,400,000	38,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	38,400,000	38,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					42,000,000	42,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	42,000,000	42,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					34,200,000	34,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	34,200,000	34,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					42,000,000	42,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	42,000,000	42,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					5,400,000	5,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,400,000	5,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					4,200,000	4,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,200,000	4,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					13,200,000	13,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	13,200,000	13,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan									8,400,000	8,400,000	DAK Non Fisik - BOK	8,400,000	8,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Sesudah (Usulan)						
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0001	Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan Ibu Hamil							Puskesmas			BOK Puskesmas				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					40,800,000	40,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	40,800,000	40,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					36,000,000	36,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	36,000,000	36,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					21,600,000	21,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	21,600,000	21,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					56,700,000	56,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	56,700,000	56,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					32,400,000	32,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	32,400,000	32,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									53,200,000	53,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	53,200,000	53,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	5510 orang	5510 orang	24,200,000	24,200,000	APBD	24,200,000	24,200,000	APBD	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana				
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					21,300,000	21,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	21,300,000	21,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					35,200,000	35,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	35,200,000	35,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					11,300,000	11,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	11,300,000	11,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					12,700,000	12,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	12,700,000	12,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					16,600,000	16,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,600,000	16,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					10,300,000	10,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	10,300,000	10,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					17,000,000	17,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	17,000,000	17,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					26,500,000	26,500,000	DAK Non Fisik - BOK	26,500,000	26,500,000	DAK Non Fisik - BOK	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	target		Pagu								
					Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Sebelum Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Sesudah (Usulan) Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					19,900,000	19,900,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	19,900,000	19,900,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					15,400,000	15,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	15,400,000	15,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					8,500,000	8,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	8,500,000	8,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					6,600,000	6,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	6,600,000	6,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					9,000,000	9,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	9,000,000	9,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					64,250,000	64,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	64,250,000	64,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									20,300,000	20,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	20,300,000	20,300,000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	5248 orang	5248 orang	232,900,000	326,712,640	APBD	232,900,000	326,712,640	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			93,812,640		DAK Non Fisik - BOK Dinas	93,812,640		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25357 orang	25357 orang	15,305,000	15,305,000	APBD	15,305,000	15,305,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45268 orang	45268 orang	50,000,000	50,000,000	APBD	50,000,000	50,000,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					34,400,000	34,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	34,400,000	34,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					24,800,000	24,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	24,800,000	24,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					4,000,000	4,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,000,000	4,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					50,400,000	50,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	50,400,000	50,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		target		Rencana Kerja						Selisih (+/-)	Keterangan
							Pagu							
							Sebelum		Sesudah		Sebelum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					24,000,000	24,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	24,000,000	24,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					19,200,000	19,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	19,200,000	19,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					28,800,000	28,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	28,800,000	28,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					24,000,000	24,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	24,000,000	24,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					19,200,000	19,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	19,200,000	19,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					26,400,000	26,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	26,400,000	26,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					11,200,000	11,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	11,200,000	11,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					16,000,000	16,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,000,000	16,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Setelah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					34,500,000	34,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	34,500,000	34,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					12,000,000	12,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	12,000,000	12,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231513 orang	231513 orang	45,800,000	45,800,000	APBD	45,800,000	45,800,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42166 orang	42166 orang	45,800,000	45,800,000	APBD	45,800,000	45,800,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74852 orang	74852 orang	28,600,000	28,600,000	APBD	28,600,000	28,600,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18658 orang	18658 orang	18,200,000	440,480,000	APBD	18,200,000	440,480,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			422,280,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	422,280,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	494 orang	494 orang	20,000,000	20,000,000	APBD	20,000,000	20,000,000	APBD	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu									
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah (Usulan)				Sumber Dana			
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar												
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20012 orang	20012 orang	45,800,000	552,342,200	APBD	45,800,000	552,342,200	APBD	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					506,542,200		DAK Non Fisik - BOK Dinas	506,542,200		DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					21,600,000	21,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	21,600,000	21,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					14,400,000	14,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	14,400,000	14,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					6,000,000	6,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	6,000,000	6,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum		Sesudah (Usulan)							
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan			Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100,000	100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	100,000	100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					5,200,000	5,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,200,000	5,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					7,200,000	7,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	7,200,000	7,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					3,400,000	3,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,400,000	3,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Sesudah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11906 orang	11906 orang	156,200,000	216,200,000	APBD	156,200,000	216,200,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					60,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	60,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					3,200,000	3,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,200,000	3,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					10,000,000	10,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	10,000,000	10,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					8,000,000	8,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	8,000,000	8,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu							
							Sebelum			Setelah (Usulan)				
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran 8	Per Sub Kegiatan 9	Sumber Dana 10	Per Sumber Anggaran 11	Per Sub Kegiatan 12	Sumber Dana 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					3,200,000	3,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,200,000	3,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					800,000	800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	800,000	800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					1,200,000	1,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,200,000	1,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					4,000,000	4,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,000,000	4,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					800,000	800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	800,000	800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Setelah (Usulan)					
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					3,600,000	3,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,600,000	3,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					1,600,000	1,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,600,000	1,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	APBD	50,000,000	50,000,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen				39,000,000		APBD	39,000,000	Pelaksanaan intervensi serentak stunting	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					87,974,000		DBHCHT	87,974,000		DBHCHT			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					25,000,000	142,974,000	DBHCHT	25,000,000	181,974,000	DBHCHT			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-		-	-		-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													DAK Non Fisik -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu									
							Sebelum		Sesudah (Usulan)							
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan Gizi Masyarakat					12,000,000		BOK Dinas	12,000,000		BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Dinas			DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Sesudah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					208,360,000	208,360,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	208,360,000	208,360,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					169,924,000	169,924,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	169,924,000	169,924,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					190,556,000	190,556,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	190,556,000	190,556,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					268,204,000	268,204,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	268,204,000	268,204,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					194,776,000	194,776,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	194,776,000	194,776,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					147,728,000	147,728,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	147,728,000	147,728,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					226,150,000	226,150,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	226,150,000	226,150,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					122,200,000	122,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	122,200,000	122,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan			
					Target		Pagu										
							Sebelum		Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	11,900,000	11,900,000	APBD	11,900,000	11,900,000	APBD	-				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	220,000,000	1,062,230,000	DBHCHT	220,000,000	1,062,230,000	DBHCHT	-				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					200,000,000		DBHCHT	200,000,000		DBHCHT					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					75,000,000		DBHCHT	75,000,000		DBHCHT					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					200,000,000		DBHCHT	200,000,000		DBHCHT					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					60,000,000		DBHCHT	60,000,000		DBHCHT					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-		-	-		-					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					307,230,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	307,230,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					33,000,000		33,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		33,000,000		33,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												10,600,000	10,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	10,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu							
							Sebelum		Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana		
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					16,000,000	16,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,000,000	16,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					8,200,000	8,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	8,200,000	8,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					5,600,000	5,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,600,000	5,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					6,000,000	6,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	6,000,000	6,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					9,800,000	9,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	9,800,000	9,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					34,800,000	34,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	34,800,000	34,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					10,200,000	10,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	10,200,000	10,200,000	DAK Non Fisik - BOK	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Setelah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					34,200,000	34,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	34,200,000	34,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3,900,000	3,900,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,900,000	3,900,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					6,200,000	6,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	6,200,000	6,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					6,400,000	6,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	6,400,000	6,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	38,800,000	308,902,000	APBD	38,800,000	308,902,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					104,010,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	104,010,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					112,780,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	112,780,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					44,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	44,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					9,312,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	9,312,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	28,600,000	28,600,000	APBD	28,600,000	28,600,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000		APBD	50,000,000		APBD			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					22,000,000	157,000,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas	22,000,000	157,000,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas	-		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					85,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	85,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					45,200,000	45,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	45,200,000	45,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					81,700,000	81,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	81,700,000	81,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		target		Rencana Kerja						Selisih (+/-)	Keterangan
							Pagu							
									Sebelum		Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					38,800,000	38,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	38,800,000	38,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					23,150,000	23,150,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	23,150,000	23,150,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					54,800,000	54,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	54,800,000	54,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12,050,000	12,050,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	12,050,000	12,050,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					26,100,000	26,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	26,100,000	26,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					63,400,000	63,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	63,400,000	63,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					80,600,000	80,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	80,600,000	80,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					23,400,000	23,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	23,400,000	23,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Per Sub Kegiatan			Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana						
					Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					28,250,000	28,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	28,250,000	28,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					16,400,000	16,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,400,000	16,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					17,700,000	17,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	17,700,000	17,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					120,450,000	120,450,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	120,450,000	120,450,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					39,400,000	39,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	39,400,000	39,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17,200,000	17,200,000	APBD	17,200,000	17,200,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	18,700,000	53,455,700	APBD	18,700,000	53,455,700	APBD	-			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					25,755,700		DAK Non Fisik - BOK Dinas	25,755,700		DAK Non Fisik - BOK Dinas				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					9,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	9,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	44,800,000	929,518,000	APBD	74,800,000	959,518,000	APBD	30,000,000	Penambahan untuk fogging (bahan dan honor)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					139,509,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	139,509,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					181,935,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	181,935,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					84,700,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	84,700,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					21,335,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	21,335,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					367,251,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	367,251,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					89,988,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	89,988,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					118,450,000		118,450,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		118,450,000		118,450,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu									
							Sebelum		Sesudah (Usulan)							
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					123,050,000	123,050,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	123,050,000	123,050,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					74,100,000	74,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	74,100,000	74,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					111,000,000	111,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	111,000,000	111,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					106,600,000	106,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	106,600,000	106,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					59,800,000	59,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	59,800,000	59,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					117,075,500	117,075,500	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	117,075,500	117,075,500	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					114,200,000	114,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	114,200,000	114,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					199,950,000	199,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	199,950,000	199,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Sesudah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					112,400,000	112,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	112,400,000	112,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					106,250,000	106,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	106,250,000	106,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					34,950,000	34,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	34,950,000	34,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					141,000,000	141,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	141,000,000	141,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					105,850,000	105,850,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	105,850,000	105,850,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					88,600,000	88,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	88,600,000	88,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	14,420,000,000	20,662,351,898	APBD	15,920,000,000	22,162,351,898	APBD	1,500,000,000	Tambahan kecurangan pembayaran iuran PBPU & BP kewajiban pemda kota		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					6,242,351,898		Bankru Prov. Jabar	6,242,351,898		Bankru Prov. Jabar				
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahguna	Deteksi Dini Penyalahguna	Jumlah Orang yang Menerima	Jumlah Orang yang Menerima	20 orang	20 orang	18,600,000	18,600,000	APBD	18,600,000	18,600,000	APBD	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	n NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	n NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Layanan Deteksi Dini Penyalahguna n NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Layanan Deteksi Dini Penyalahguna n NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah											
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasio nal	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasio nal					16,500,000	16,500,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas	16,500,000	16,500,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas	-		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	140,480,000	140,480,000	APBD	140,480,000	140,480,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Klinik sore	Operasional Pelayanan Puskesmas - Klinik sore	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 dokumen	16 dokumen	660,000,000	1,658,750,000	APBD	660,000,000	1,658,750,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Non Kapitasi	Operasional Pelayanan Puskesmas - Non Kapitasi					998,750,000		Non Kapitasi	998,750,000		Non Kapitasi			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					149,160,000	149,160,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	149,160,000	149,160,000	DAK Non Fisik - BOK Puskes mas	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Sukabumi	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Sukabumi					2,088,000,000	2,243,770,000	Kapitasi	2,088,000,000	2,243,770,000	Kapitasi	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					155,770,000		DAK Non Fisik - BOK	155,770,000		DAK Non Fisik -			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Puskesmas	11	12	13 BOK Puskesmas	14	15	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Cipelang	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Cipelang					1,254,000,000	1,372,360,000	Kapitasi	1,254,000,000	1,372,360,000	Kapitasi	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					118,360,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	118,360,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Benteng	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Benteng					1,123,000,000	1,264,230,000	Kapitasi	1,123,000,000	Kapitasi	-			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					141,230,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	141,230,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Pabuaran	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Pabuaran					540,000,000	659,240,000	Kapitasi	540,000,000	Kapitasi	-			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					119,240,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	119,240,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Nanggaleng	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Nanggaleng					788,000,000	881,707,000	Kapitasi	788,000,000	Kapitasi	-			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					93,707,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	93,707,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan	Operasional Pelayanan									894,000,000	1,017,600,000	Kapitasi	894,000,000	1,017,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Puskesmas - Puskesmas Tijar	Puskesmas - Puskesmas Tijar													
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					123,600,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	123,600,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Gedong Panjang	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Gedong Panjang					787,000,000		Kapitasi	787,000,000		Kapitasi			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					129,570,000	916,570,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	129,570,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Baros	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Baros					1,500,000,000		Kapitasi	1,500,000,000		Kapitasi			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					186,630,000	1,686,630,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	186,630,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Lembur Situ	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Lembur Situ					819,000,000		Kapitasi	819,000,000		Kapitasi			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					125,470,000	944,470,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	125,470,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Karang Tengah	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Karang Tengah					1,009,000,000	1,141,910,000	Kapitasi	1,009,000,000		Kapitasi	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
							Sebelum			Sesudah (Usulan)						
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					132,910,000	870,237,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	132,910,000	870,237,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Sukakarya	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Sukakarya					770,000,000		Kapitasi	770,000,000		Kapitasi				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					100,237,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	100,237,000		DAK Non Fisik - BOK Puskesmas				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Limus Nunggal	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Limus Nunggal					794,000,000	Kapitasi	794,000,000	Kapitasi	-					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					906,840,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	112,840,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas						
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Cikundul	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Cikundul						694,000,000	Kapitasi	694,000,000			Kapitasi			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					157,810,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	157,810,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Cibeureum Hilir	Operasional Pelayanan Puskesmas - Puskesmas Cibeureum Hilir					878,000,000	Kapitasi	878,000,000	Kapitasi	-					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas					116,350,000	DAK Non Fisik - BOK	116,350,000	DAK Non Fisik - BOK						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu							
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah (Usulan)				
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	263,400,000	APBD	250,000,000	263,400,000	APBD	-	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					13,400,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	13,400,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum			Setelah (Usulan)						
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu							
							Sebelum			Sesudah (Usulan)				
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,000,000	5,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	195,000,000	195,000,000	APBD	195,000,000	195,000,000	APBD	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan	144,455,375	154,455,375	APBD	144,455,375	154,455,375	APBD	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					10,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	10,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan									1,800,000	1,800,000	DAK Non Fisik - BOK	1,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Data	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	(Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)							Puskesmas			Puskesmas			
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					200,000	200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	200,000	200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu							
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah (Usulan)					
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0036	Pemberian Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)					800,000	800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	800,000	800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					200,000	200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	200,000	200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskemas	-					
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian	Investigasi Awal Kejadian					2,600,000	2,600,000	DAK Non Fisik -	2,600,000	2,600,000	DAK Non	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)							BOK Puskesmas			Fisik - BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Iminisasi dan Pemberian Obat Massal)					1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	34,438,375	34,438,375	APBD	64,438,375	64,438,375	APBD	30,000,000	Kejar imunisasi vaksin baru	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	750,000,000	750,000,000	APBD	785,000,000	785,000,000	APBD	35,000,000	Piket PILKADA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum		Sumber Dana	Setelah (Usulan)		Sumber Dana			
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 orang	1000 orang	19,400,000	19,400,000	APBD	19,400,000	19,400,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					21,600,000	21,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	21,600,000	21,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas mas	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					12,600,000	12,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	12,600,000	12,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas mas	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					14,400,000	14,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	14,400,000	14,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas mas	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas mas	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas mas	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas mas	-		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu									
							Sebelum		Sesudah (Usulan)							
									Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					12,000,000	12,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	12,000,000	12,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,000,000	2,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					1,200,000	1,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,200,000	1,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,800,000	4,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	15,000,000	15,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana			
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 orang	100 orang	19,400,000	19,400,000	APBD	19,400,000	19,400,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					3,600,000	3,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,600,000	3,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,400,000	2,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,000,000	1,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					1,200,000	1,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	1,200,000	1,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	-	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	-	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan					600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK	600,000	600,000	DAK Non Fisik - BOK	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu							
							Sebelum		Sesudah (Usulan)					
									Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	orang dengan HIV (ODHIV)	orang dengan HIV (ODHIV)							Puskesmas			Puskesmas		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					7,200,000	7,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	7,200,000	7,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	400,000	400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja										Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu									
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana				
					Per Sumber Anggaran	Per Sumber Anggaran				Per Sumber Anggaran	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 orang	1 orang	17,200,000	35,010,000	APBD	17,200,000	35,010,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					11,960,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	11,960,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					5,850,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	5,850,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas				
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	APBD	20,000,000	20,000,000	APBD	-			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					25,500,000	25,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	25,500,000	25,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8,600,000	8,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	8,600,000	8,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7,400,000	7,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	7,400,000	7,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					24,000,000	24,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	24,000,000	24,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan					44,000,000	44,000,000	DAK Non Fisik -	44,000,000	44,000,000	DAK Non	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu							
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah (Usulan)		Sumber Dana			
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kesehatan Reproduksi	Kesehatan Reproduksi							BOK Puskesmas			Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					30,300,000	30,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	30,300,000	30,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					84,800,000	84,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	84,800,000	84,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7,950,000	7,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	7,950,000	7,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6,600,000	6,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	6,600,000	6,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					20,400,000	20,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	20,400,000	20,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					31,200,000	31,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	31,200,000	31,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					4,200,000	4,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	4,200,000	4,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan					3,400,000	3,400,000	DAK Non Fisik - BOK	3,400,000	3,400,000	DAK Non Fisik -	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Setelah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kesehatan Reproduksi	Kesehatan Reproduksi										DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					11,600,000	11,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	11,600,000	11,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7,200,000	7,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	7,200,000	7,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	55,000,000	APBD	55,000,000	55,000,000	APBD	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	54,600,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	54,600,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					13,100,000	67,700,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas	13,100,000	67,700,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas	-	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat - Surveilans dan Tata laksana Kesehatan Ibu dan Anak - Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring skrining	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target	Pagu									
								Sebelum		Sumber Dana	Sesudah (Usulan)		Sumber Dana		
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					107,200,000	107,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	107,200,000	107,200,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	layak hamil, ANC dan stunting	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					75,500,000	75,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	75,500,000	75,500,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					64,000,000	64,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	64,000,000	64,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					69,400,000	69,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	69,400,000	69,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					8,100,000	8,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	8,100,000	8,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					5,400,000	5,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	5,400,000	5,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					18,800,000	18,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	18,800,000	18,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									44,400,000	44,400,000	DAK Non Fisik - BOK	44,400,000	44,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					193,800,000	193,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	193,800,000	193,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					77,600,000	77,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	77,600,000	77,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					46,000,000	46,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	46,000,000	46,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					30,800,000	30,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	30,800,000	30,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					71,900,000	71,900,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	71,900,000	71,900,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					26,400,000	26,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	26,400,000	26,400,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									42,700,000	42,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	42,700,000	42,700,000
1.02.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi	1	1	235,668,500	235,668,500		260,668,500	260,668,500		25,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan		
					target	Pagu										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Sesudah (Usulan)				Sumber Dana	
	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	secara Terintegrasi	secara Terintegrasi	kesehatan terintegrasi	kesehatan terintegrasi												
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	218,000,000	218,000,000	APBD	243,000,000	243,000,000	APBD	25,000,000	- Peringatan Hari Kesehatan Nasional - Biaya langganan aplikasi zoom - Penyusunan Profil Kesehatan - pengadaan Camera Zoom - Pengadaan Komputer PC Perubahan Renja :		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							397,000	397,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	397,000	397,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							150,000	150,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	150,000	150,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							625,000	625,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	625,000	625,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							454,000	454,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	454,000	454,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem	Pengelolaan Sistem									653,000	653,000	DAK Non Fisik -	653,000	653,000	DAK Non

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan	
					target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Informasi Kesehatan	Informasi Kesehatan							10 BOK Puskesmas				13 Fisik - BOK Puskesmas		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					3,795,000	3,795,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,795,000	3,795,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					3,374,500	3,374,500	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,374,500	3,374,500	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					222,000	222,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	222,000	222,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					235,000	235,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	235,000	235,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					672,000	672,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	672,000	672,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					3,627,000	3,627,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	3,627,000	3,627,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					938,000	938,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	938,000	938,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem	Pengelolaan Sistem					325,000	325,000	DAK Non Fisik - BOK	325,000	325,000	DAK Non Fisik -	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target		Pagu								
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum			Setelah (Usulan)					
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Informasi Kesehatan	Informasi Kesehatan							Puskesmas			BOK Puskesmas			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					2,043,000	2,043,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	2,043,000	2,043,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					158,000	158,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	158,000	158,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	557,844,000	557,844,000		567,844,000	567,844,000		10,000,000		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6 sarana	6 sarana	31,500,000	31,500,000	APBD	41,500,000	41,500,000	APBD	10,000,000	Fasilitasi Kamar Rawat Inap Standar (KRIS)	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan	6 sarana	6 sarana	60,800,000	60,800,000	APBD	60,800,000	60,800,000	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan	
					target	Pagu										
						Sebelum		Sesudah (Usulan)								
								Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	15 unit	15 unit	150,000,000	218,144,000	DBHCHT	150,000,000	218,144,000	DBHCHT	-			
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					13,900,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	13,900,000				DAK Non Fisik - BOK Dinas		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					54,244,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	54,244,000				DAK Non Fisik - BOK Dinas		
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dokumen	2 dokumen	247,400,000	247,400,000	APBD	247,400,000	247,400,000	APBD	-			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	2,562,181,906	2,562,181,906		1,964,781,906	1,964,781,906		- 597,400,000			
1.02.03.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Persentase pemenuhan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	100%	100%	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Setelah (Usulan)					
							Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	APBD	20,000,000	20,000,000	APBD	-		
1.02.03.2.02	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan perencanaan dan kebutuhan SDM	Persentase pemenuhan perencanaan dan kebutuhan SDM	100%	100%	1,734,531,106	1,734,531,106		1,137,131,106	1,137,131,106		- 597,400,000		
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17,200,000	17,200,000	APBD	17,200,000	17,200,000	APBD	-		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,439,831,106	1,717,331,106	APBD	842,431,106	1,119,931,106	APBD	- 597,400,000	Penyesuaian pembayaran insentif covid Tahun 2021, Hibah PTGMI : 20.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				22,500,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas		22,500,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas					
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				11,633,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas		11,633,000	DAK Non Fisik - BOK Dinas					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan	
					target	Pagu									
						Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah (Usulan)			
										Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			Per Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					67,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	67,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					-		DAK Non Fisik - BOK Dinas	-		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					19,300,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	19,300,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					157,067,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	157,067,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					-		DAK Non Fisik - BOK Dinas	-		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					807,650,800	807,650,800		807,650,800	807,650,800		-		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan					-	807,650,800	DAK Non Fisik - BOK Dinas	-	807,650,800	DAK Non Fisik - BOK Dinas	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan	
					target	Pagu									
						Sebelum		Sesudah (Usulan)							
								Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan			Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					153,920,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	153,920,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					99,920,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	99,920,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					99,920,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	99,920,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					20,300,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	20,300,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					16,900,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	16,900,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target	Pagu									
						Sebelum		Sesudah (Usulan)		Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					100,970,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	100,970,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					29,245,500		DAK Non Fisik - BOK Dinas	29,245,500		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					29,245,500		DAK Non Fisik - BOK Dinas	29,245,500		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					64,486,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	64,486,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber					16,864,800		DAK Non Fisik - BOK Dinas	16,864,800		DAK Non Fisik - BOK Dinas			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					target	Pagu									
						Sebelum			Sesudah (Usulan)						
						Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					175,879,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	175,879,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	1	1	524,031,000	524,031,000		524,031,000	524,031,000		-		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sertifikat P- IRT	Persentase pemenuhan sertifikat P- IRT	1	1	226,786,000	226,786,000		226,786,000	226,786,000		-		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	100 Lokasi	100 Lokasi	10,000,000	226,786,000	APBD	10,000,000	226,786,000	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Setelah (Usulan)					
							Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					216,786,000		DAK Non Fisik - BOK POM	216,786,000		DAK Non Fisik - BOK POM			
1.02.04.2.06							209,120,000	209,120,000		209,120,000	209,120,000		-		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak						209,120,000	DAK Non Fisik - BOK POM		209,120,000	DAK Non Fisik - BOK POM	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
					target	Pagu								
								Sebelum		Setelah (Usulan)		Sumber Dana		
								Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.04.2.06.0001	Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					209,120,000		DAK Non Fisik - BOK POM	209,120,000		DAK Non Fisik - BOK POM		
1.02.04.2.01							88,125,000	88,125,000		88,125,000	88,125,000		-	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					88,125,000	88,125,000	DAK Non Fisik - BOK POM	88,125,000	88,125,000	DAK Non Fisik - BOK POM	-	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	100%	100%	2,681,508,132	2,681,508,132		3,142,258,132	3,142,258,132		460,750,000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase pemenuhan advokasi, pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	Persentase pemenuhan advokasi, pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	100%	100%	46,600,000	46,600,000		46,600,000	46,600,000		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	19,200,000	46,600,000	APBD	19,200,000	46,600,000	APBD	-		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					27,400,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas	27,400,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	100%	100%	39,535,000	39,535,000		39,535,000	39,535,000		-		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1 dokumen	19,535,000	19,535,000	APBD	19,535,000	19,535,000	APBD	-		
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	20,000,000	APBD	20,000,000	20,000,000	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
							Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100%	100%	2,595,373,132	2,595,373,132			3,056,123,132	3,056,123,132		460,750,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	1,413,800,000		APBD	1,874,550,000		APBD		460, 750,000	Penambahan Insentif Kader - Pemberdayaan an SBH - Bimtek Kader Integrasi Layanan Primer - Hibah posyandu nusa indah Rv 5 Cibeureum hilir
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					120,000,000	1,971.123.132	DAK Non Fisik - BOK Dinas	120,000,000		DAK Non Fisik - BOK Dinas			Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat - Penguatan Posyandu dan UKBM lainnya - Advokasi, koordinasi dan BinteK kelompok kerja operasional posyandu,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target	Pagu									
						Sebelum			Sesudah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan		Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					437,323,132		Bankru Prov. Jabar	437,323,132		Bankru Prov. Jabar		Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					56,250,000		56,250,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesma s	56,250,000	56,250,000			DAK Non Fisik - BOK Puskes mas
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					71,100,000		71,100,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesma s	71,100,000	71,100,000			DAK Non Fisik - BOK Puskes mas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	target		Pagu								
					Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah (Usulan)					
							Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					39,000,000	39,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	39,000,000	39,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					36,750,000	36,750,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	36,750,000	36,750,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					39,800,000	39,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	39,800,000	39,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12,850,000	12,850,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	12,850,000	12,850,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target		Pagu								
							Sebelum			Sesudah (Usulan)					
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					26,300,000	26,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	26,300,000	26,300,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					26,950,000	26,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	26,950,000	26,950,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					57,600,000	57,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	57,600,000	57,600,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					43,000,000	43,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	43,000,000	43,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja								Selisih (+/-)	Keterangan
	Sebelum	Sesudah	target		Pagu									
			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah (Usulan)						
					Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					19,800,000	19,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	19,800,000	19,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					39,000,000	39,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	39,000,000	39,000,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	16,800,000	16,800,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					95,700,000	95,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	95,700,000	95,700,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan		Rencana Kerja									Selisih (+/-)	Keterangan
					Target	Pagu									
						Sebelum			Setelah (Usulan)						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana	Per Sumber Anggaran	Per Sub Kegiatan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					43,350,000	43,350,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	43,350,000	43,350,000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	-		
							496,565,188,576			509,690,484,409					

Tabel 2.5
Analisis Pagu Perubahan Rencana Kerja Pendapatan Tahun 2024

No	Unit Organisasi	Pagu 2024 (Rp)			Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Selisih (+/-)	
1	Dinas Kesehatan	1,250,000,000	2,500,000,000	1,250,000,000	
	a. Retribusi	1,250,000,000	2,500,000,000	1,250,000,000	Peningkatan pencapaian realisasi pendapatan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
	b. Non Kapitasi JKN	998,750,000	998,750,000	-	
2	RSUD R Syamsudin SH	320,000,000,000	305,000,000,000	(15,000,000,000)	
	a. Retribusi	27,445,160,000	25,945,160,000	(1,500,000,000)	Penyesuaian pendapatan jasa layanan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
	b. Pendapatan lain - lain yang sah	292,554,840,000	279,054,840,000	(13,500,000,000)	Penyesuaian pendapatan jasa layanan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
3	RSUD Al - Mulk	13,453,966,849	14,243,071,860	789,105,011	
	a. Retribusi	1,954,837,922	1,791,810,560	(163,027,362)	Penyesuaian pendapatan jasa layanan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
	b. Pendapatan lain - lain yang sah	11,499,128,927	12,451,261,300	952,132,373	Penyesuaian pendapatan jasa layanan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
4	Puskesmas Selabatu	2,220,000,000	2,581,930,000	361,930,000	
	a. Retribusi	270,000,000	516,000,000	246,000,000	Peningkatan pencapaian realisasi pendapatan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
	b. Pendapatan lain - lain yang sah	1,950,000,000	2,065,930,000	115,930,000	Penyesuaian pendapatan jasa layanan atas dasar hasil evaluasi s.d Semester II 2024
Total		335,673,966,849	321,825,001,860	(13,848,964,989)	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung upaya - upaya pembangunan kesehatan terutama dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan anggaran biaya yang cukup yang ditampilkan dalam bentuk rencana kerja yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi maupun oleh RSUD dan Puskesmas sebagai sub unit organisasi, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perubahan Pagu Anggaran Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi
Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024

No	Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Selisih (+/-)
I	Unit Organisasi			
1	Dinas Kesehatan	131,511,105,829	134,870,506,599	3,359,400,770
II	Sub Unit Organisasi			
1	RSUD R Syamsudin SH	323,306,425,898	329,097,056,807	5,790,630,909
2	RSUD Al - Mulk	14,953,966,849	18,147,791,105	3,193,824,256
3	Puskesmas Selabatu	3,082,877,000	3,864,316,898	781,439,898
4	Puskesmas Sukabumi	2,985,980,000	2,985,980,000	-
5	Puskesmas Cipelang	1,869,641,000	1,869,641,000	-
6	Puskesmas Benteng	1,893,342,000	1,893,342,000	-
7	Puskesmas Pabuaran	1,174,833,000	1,174,833,000	-
8	Puskesmas Nanggaleng	1,221,704,000	1,221,704,000	-
9	Puskesmas Tipar	1,556,478,000	1,556,478,000	-
10	Puskesmas Gedong Panjang	1,472,352,000	1,472,352,000	-
11	Puskesmas Baros	2,562,239,000	2,562,239,000	-
12	Puskesmas Lembur Situ	1,486,098,000	1,486,098,000	-
13	Puskesmas Karang Tengah	1,759,141,000	1,759,141,000	-
14	Puskesmas Sukakarya	1,246,001,000	1,246,001,000	-
15	Puskesmas Limus Nunggal	1,407,993,000	1,407,993,000	-
16	Puskesmas Cikundul	1,607,153,000	1,607,153,000	-
17	Puskesmas Cibeureum Hilir	1,467,858,000	1,467,858,000	-
Total		496,565,188,576	509,690,484,409	13,125,295,833

Penjelasan lebih rinci tentang rencana perubahan anggaran Dinas Kesehatan tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APRDI 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)						
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Dinas Kesehatan			110.129.338.494,00	122.880.746.509,00	134.870.506.599,00							0,00						
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			110.129.338.494,00	122.880.746.509,00	134.870.506.599,00							0,00						
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			110.129.338.494,00	122.880.746.509,00	134.870.506.599,00							0,00						
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	80.948.079.744,00	83.451.586.403,00	86.390.670.693,00							0,00						
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penemuan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	43.425.000,00	213.425.000,00	213.425.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis	0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																0,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	2 Dokumen	23.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			0 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			0 Laporan	4 Laporan	9.925.000,00	9.925.000,00	9.925.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024					Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APED 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	100 %	72.628.982.813,00	75.164.669.281,00	75.164.669.281,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	975 Orang/bulan	72.612.728.888,00	75.048.415.356,00	76.999.099.646,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	7.312.500,00	7.312.500,00	7.312.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	1 Laporan	5.865.300,00	5.865.300,00	5.865.300,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan				0 Dokumen	1 Dokumen	3.076.125,00	103.076.125,00	103.076.125,00	Kota Sukabumi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan			0,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikator (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikator (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana					Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							Kecamatan, Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif								
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	-			100 %	39.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00			Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	1 Laporan	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	106.400.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	50 Orang	106.400.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-			100 %	1.625.635.050,00	2.247.735.050,00	2.247.735.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis	0,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024				Pagu Indikator (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikator (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APED 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah				
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					perangkat daerah												Dan Berdaya Saing	Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
					Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	1 Paket	8.620.550,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Pemeliharaan dan Perengkapan Kantor																		
					Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	1 Paket	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	14 Paket	925.980.000,00	1.741.700.550,00	2.200.100.550,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	1 Paket	53.534.500,00	53.534.500,00	53.534.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Pemerintah Daerah											Budaya Kreatif & Inovatif						
	1	02	01	2.07	0006	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	445.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-		-	100 %	6.114.186.881,00	5.363.307.072,00	5.363.307.072,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	427.399.647,00	406.002.647,00	421.002.647,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	237.818.025,00	303.618.025,00	373.618.025,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	5.447.969.209,00	4.650.686.400,00	4.650.686.400,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-		-	100 %	389.750.000,00	404.750.000,00	404.750.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	DINAS KESEHATAN		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APRDI 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Unit	8 Unit	1.750.000.000,00	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	200.000.000,00	560.273.750,00	760.273.750,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusasan-Pemurnaan AKI dan AKB	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	16 Unit	50.000.000,00	100.919.000,00	100.919.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.01	0022	Pembangunan Rumah Sakit																				
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	240.000.000,00	825.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																				
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0 Paket	4 Paket	2.500.000.000,00	5.669.774.360,00	5.708.425.130,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Perencanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah		APED 2024						Nasional	Daerah		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			yang diusulkan										Dinas BOK Kabupaten/Kota						
	1 02 02	2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				-	15 Paket	0,00	132.052.800,00	132.052.800,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00		DINAS KESEHATAN
	1 02 02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	18.418.723.750,00	22.413.148.290,00	22.413.148.290,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00		DINAS KESEHATAN
	1 02 02	2.03 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5773 Orang	30.000.000,00	17.795.000,00	17.795.000,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00		DINAS KESEHATAN
	1 02 02	2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5510 Orang	30.000.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00		DINAS KESEHATAN
	1 02 02	2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5248 Orang	30.000.000,00	326.712.640,00	326.712.640,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00		DINAS KESEHATAN
	1 02 02	2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	25357 Orang	30.000.000,00	15.305.000,00	15.305.000,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00		DINAS KESEHATAN
	1 02 02	2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan				0 Orang	45268 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Sukohumi, Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan		0,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										Semua Kel/Desa			Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif								
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	231513 Orang	50.000.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	42166 Orang	50.000.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	74852 Orang	30.000.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	18658 Orang	20.000.000,00	440.480.000,00	440.480.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	494 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	20012 Orang	50.000.000,00	552.342.200,00	552.342.200,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV																		
			Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	11906 Orang	157.600.000,00	216.200.000,00	216.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan		0,00	DINAS KESEHATAN					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikator (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikator (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Pelayanan Sesuai Standar										Semua Kel/Desa	Dinas-BOK Kabupaten/Kota		Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	142.974.000,00	181.974.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	1 Dokumen	20.300.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	1.062.230.000,00	1.062.230.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	308.902.000,00	308.902.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Anjuran Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan			0,00	DINAS KESEHATAN	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024					Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APED 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Specimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rajakan/Nasional yang Didistribusikan					-	20 Paket	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					0 Dokumen	1 Dokumen	140.480.000,00	140.480.000,00	140.480.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	2 Dokumen	1.658.750.000,00	1.658.750.000,00	1.658.750.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	263.400.000,00	263.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masak)								Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masak)					0 Laporan	1 Laporan	147.255.375,00	154.455.375,00	154.455.375,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah								Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah					0 Dokumen	1 Dokumen	35.838.375,00	34.438.375,00	64.438.375,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APED 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			Kreatif & Inovatif	Kreatif & Inovatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				0 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	785.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	25.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	25.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	1 Orang	20.000.000,00	35.010.000,00	35.010.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok				0 Tatanan	5 Tatanan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan			-	1 Dokumen		0,00	67.700.000,00	67.700.000,00	Kota Sukabumi, Semua	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
								0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	247.400.000,00	247.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN				
3	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	-	1.740.000.000,00	2.562.181.906,00	1.964.781.906,00						0,00					
	1	02	03	2.01	Pemberian Iain Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan pemberian Iain praktik tenaga kesehatan	-	-	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Tenaga Kesehatan	0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.01	Pengendalian Perilaku Praktik Tenaga Kesehatan																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perilaku Praktik Tenaga Kesehatan			0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan perencanaan dan kebutuhan SDM	-	-	100 %	1.720.000.000,00	1.734.531.106,00	1.734.531.106,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Tenaga Kesehatan	0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.02	Perencanaan dan Distribusi serta Peralatan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Peralatan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.02	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00	1.717.331.106,00	1.119.931.106,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	0,00	807.650.800,00	807.650.800,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya	-	0,00	DINAS KESEHATAN				

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikator (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikator (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1						2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Kreatif & Inovatif					
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					-	30 Orang	0,00	807.650.800,00	807.650.800,00		Kota Sukohumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	
4	1	02	04			PROGRAM SEDHAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																		
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					-	-	10.000.000,00	524.031.000,00	524.031.000,00							0,00		
	1	02	04	2.01			-	-			-	-	0,00	88.125.000,00	88.125.000,00				-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
	1	02	04	2.03		Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sertifikat P-IRT	-			-	100 %	10.000.000,00	226.786.000,00	226.786.000,00				-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Toko Alat Kesehatan, P-IRT, Kelompok Masyarakat, Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi					0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	226.786.000,00	226.786.000,00		Kota Sukohumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						oleh Industri Rumah Tangga																
1	02	04	2.06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	0,00	209.120.000,00	209.120.000,00			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-	50 Unit	0,00	209.120.000,00	209.120.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
5	1	02	05			PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	2.584.535.000,00	1.619.935.000,00	2.518.008.132,00			0,00			
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	-		-	100 %	22.000.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		Puskesmas, Posyandu, Kelompok Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Uraian Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	-		-	100 %	39.535.000,00	39.535.000,00	39.535.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		Puskesmas, Posyandu, Kelompok Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	0001	Pembelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	1 Dokumen	19.535.000,00	19.535.000,00	19.535.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikator (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikator (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APRDI 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																Kreatif & Inovatif								
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
					Jumlah keluarga yang Mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Serah dan Sehat			0 Keluarga	20 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM	-	-	100 %	2.523.000.000,00	1.533.800.000,00	1.533.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Puskesmas, Posyandu, Kelompok Masyarakat, Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0 Dokumen	1 Dokumen	2.523.000.000,00	1.533.800.000,00	2.431.873.132,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Non Fiskal-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	DINAS KESEHATAN					

Tabel 3.3
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Syamsudin, S.H

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Setelah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
									1	2	3	4	5	6								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
										280.000.000.000,00	323.306.425.898,00	329.097.056.807,00										
1	1									280.000.000.000,00	323.306.425.898,00	329.097.056.807,00										
	1	02								280.000.000.000,00	323.306.425.898,00	329.097.056.807,00										
1	1	02	01					-	-	280.000.000.000,00	320.000.000.000,00	325.790.630.909,00										
	1	02	01	2.10	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD	-	-	100 %	280.000.000.000,00	320.000.000.000,00	325.790.630.909,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	RSUD SYAMSUDIN, S.H		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Pemenuhan Pelayanan BLUD																
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemenuhan Pelayanan		0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	280.000.000.000,00	320.000.000.000,00	325.790.630.909,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Cikole	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	RSUD SYAMSUDIN, S.H			
1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	-	-											0,00			
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan UKM & UKP	-	-	100 %	0,00	3.306.425.898,00	3.306.425.898,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	RSUD SYAMSUDIN, S.H		
	1	02	02	2.01	0014	Penyediaan Alat Kesehatan/Alat Pemenuhan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemenuhan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	3.306.425.898,00	3.306.425.898,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Cikole	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	RSUD SYAMSUDIN, S.H				
J U M L A H										280.000.000.000,00	323.306.425.898,00	329.097.056.807,00							0,00			

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 RSUD Al-Mulk

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Aktur Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian Target RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					RSUD Al - Mulk						13.453.966.849,00	14.953.966.849,00	18.147.791.105,00							0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.453.966.849,00	14.953.966.849,00	18.147.791.105,00							0,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						13.453.966.849,00	14.953.966.849,00	18.147.791.105,00							0,00	
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						13.453.966.849,00	13.453.966.849,00	16.647.791.105,00							0,00	
					KABUPATEN/KOTA																
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD	-			100 %	13.453.966.849,00	13.453.966.849,00	16.647.791.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	RSUD AL- MULK
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	13.453.966.849,00	13.453.966.849,00	16.647.791.105,00			Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Lembusatu	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	RSUD AL- MULK
2	1	02	02		PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00							0,00	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan UKM & UKP	-			100 %	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Karyawan, Unit Kerja, Unit Teknis		0,00	RSUD AL- MULK
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Lembusatu	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	RSUD AL- MULK

Tabel 3.5
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 202

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Selabatu

No	Kode		Urusan / Bidang Ururan / Program / Kegiatan / Sub Registan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Pyrkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab					
								Target 2024				Pagu Indikatif Rpj					Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPd 2024	APlRD 2024	RKPd Perubahan 2024	Nasional	Daearah									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
					-					2.130.487.000,00	3.082.877.000,00	3.864.316.898,00								0,00			
	1-02									2.130.487.000,00	3.082.877.000,00	3.864.316.898,00								0,00			
	1-02									2.130.487.000,00	3.082.877.000,00	3.864.316.898,00								0,00			
	1-02	01								2.130.487.000,00	2.220.000.000,00	3.001.439.898,00								0,00			
	1-02	01	2.10							2.130.487.000,00	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Puskesmas		0,00	PUSKESMAS SELABATU			
	1-02	01	2.10	0001																			
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungjut Pelayanan			0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.220.000.000,00	3.001.439.898,00	Kota Sukabumi, Kecamatan Selabatu	Pendapat an dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Puskesmas	0,00	PUSKESMAS SELABATU				
	2	1-02	02							0,00	806.627.000,00	806.627.000,00							0,00				
	1-02	02	2.02							0,00	806.230.000,00	806.230.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pringkaton Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SELABATU				
	1-02	02	2.02	0001																			
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	5773 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisisk-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peringkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SELABATU				
	1-02	02	2.02	0002																			
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	5510 Orang	0,00	21.300.000	21.300.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisisk-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengiktangan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SELABATU				
	1-02	02	2.02	0005																			
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan			0 Orang	45268 Orang	0,00	34.400.000	34.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisisk-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengiktangan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SELABATU				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENSIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENSIA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah				
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						</													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENSIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENSIA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Biotan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)																
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Biotan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)																
							0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.000.000	2.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
							0 Orang	100 Orang	0,00	21.600.000	21.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
							0 Orang	100 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
							0 Orang	100 Orang	0,00	25.500.000	25.500.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-	1 Dokumen	0,00	107.200.000	107.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi		-		100 %	0,00	397.000,00	397.000,00									
					Persentase penuhian penyelenggaraan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indika tif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Kesehatan Secara Terintegrasi	sistem informasi kesehatan terintegrasi								Berkualitas Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif								
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	397.000,00	397.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS SELABATU		
3	1	02	05			PROGRAM PEMBIYARAHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-			-	100 %	0,00	56.250.000	56.250.000					0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM	-			-	100 %	0,00	56.250.000	56.250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SELABATU	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	56.250.000	56.250.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SELABATU	

Tabel 3.6
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sukabumi

No	Kode	Urusan / Bidang Ururan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target REKENIA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Pkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Puskesmas Sukabungur							1.800.000.000	2.985.980.000,00	2.985.980.000,00								0,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WALIH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.800.000.000	2.985.980.000,00	2.985.980.000,00								0,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.800.000.000	2.985.980.000,00	2.985.980.000,00								0,00	
2	1	02	PROGRAM PEMENANTHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	-	1.800.000.000	2.914.880.000,00	2.914.880.000,00								0,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP	-	100%	1.800.000.000	2.914.730.000,00	2.914.730.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat					0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	5773 Orang	0,00	42.000.000	42.000.000	Kota Sukabungur, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5510 Orang	0,00	35.200.000	35.200.000	Kota Sukabungur, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	45268 Orang	0,00	16.800.000	16.800.000	Kota Sukabungur, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	20012 Orang	0,00	16.800.000	16.800.000	Kota Sukabungur, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan	0 Orang	11906 Orang	0,00	10.000.000	10.000.000	Kota Sukabungur, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			17	Target		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	18			19		
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Pelayanan Sesuai Standar										Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	02	2.02	0018		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	227.710.000	227.710.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.600.000	10.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	81.700.000	81.700.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	123.050.000	123.050.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000.000	2.243.770.000	2.243.770.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		
1	02	02	2.02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)				0 Laporan	1 Laporan	0,00	1.800.000	1.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)							Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif							
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0 Orang	100 Orang	0,00	12.600.000	12.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0 Orang	100 Orang	0,00	3.600.000	3.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					0 Orang	100 Orang	0,00	8.600.000	8.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	1 Dokumen	0,00	75.500.000	75.500.000	Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pemertasi peneruban penyenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			-	100 %	0,00	150.000	150.000		DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	150.000	150.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBIYERGAHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	-	0,00	71.000.000	71.000.000						0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Pemertasi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	-			-	100 %	0,00	71.000.000	71.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS SUKABUMI		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Prnkiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Daerah Kabupaten/Kota																		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																							
	1	02	05	2.03	0001	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	71.000.000	71.000.000	Kota Sukahumi, Kecamatan Cikole	DAK Non Fisik- Dana BOR-BOR Pukesma s	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SUKAHUMI	

Tabel 3.7
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Cipelang

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kekompok Sasaran	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika of (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Puskesmas Cipelang						1.100.000.000	1.869.641.000.00	1.869.641.000.00							0,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERGATAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.100.000.000	1.869.641.000.00	1.869.641.000.00							0,00	
	1	02			URUSAN PEMEMTUHAN BIDANG KESEHATAN						1.100.000.000	1.869.641.000.00	1.869.641.000.00							0,00	
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	1.100.000.000	1.830.641.000.00	1.830.641.000.00							0,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan pelayanan kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	1.100.000.000	1.830.016.000.00	1.830.016.000.00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat				0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	5773 Orang	0,00	34.200.000	34.200.000	Kota Sukohumi, Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS CIPELANG
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5510 Orang	0,00	11.300.000	11.300.000	Kota Sukohumi, Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS CIPELANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Prondiksi Dasar	Jumlah Anak Usia Prondiksi Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	45268 Orang	0,00	24.800.000	24.800.000	Kota Sukohumi, Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS CIPELANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menditeria Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	20012 Orang	0,00	14.400.000	14.400.000	Kota Sukohumi, Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS CIPELANG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menditeria HIV yang Mendapatkan	0 Orang	11906 Orang	0,00	8.000.000	8.000.000	Kota Sukohumi, Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS CIPELANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakirakan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakirakan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Pelayanan Sesuai Standar											Puskesmas as	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	140.456.000	140.456.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.000.000	16.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	38.800.000	38.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	74.100.000	74.100.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000.000	1.372.360.000	1.372.360.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak				0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Saasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Diharapkan (Rejadian Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masasl)										BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0 Orang	100 Orang	0,00	14.400.000	14.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)			0 Orang	100 Orang	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0 Orang	100 Orang	0,00	7.400.000	7.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-	1 Dokumen	0,00	64.000.000	64.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-	-	100 %	0,00	625.000	625.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	625.000	625.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	39.000.000	39.000.000			0,00	PUSKESMAS CIPELANG	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKIM	-	-	100 %	0,00	39.000.000	39.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS CIPELANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikator (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RPKD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	39.000.000	39.000.000		Kota Sukabumi, Kecamatan	DAN Non Fiskal- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPELANG

Tabel 3.8
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Benteng

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024			Pagu Indikasi (Rp)				Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indika tif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelayanan Sesuai Standar										Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	277.658.000	277.658.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	
	1	02	03	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.200.000	8.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	23.150.000	23.150.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	111.000.000	111.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	2 Dokumen	960.000.000	1.264.230.000	1.264.230.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Beracian Buntan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	0 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000	1.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Diharapkan (Rejadian lutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)										BOK-BOK Puskesmas as	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0 Orang	100 Orang	0,00	4.800.000	4.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0 Orang	100 Orang	0,00	1.000.000	1.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					0 Orang	100 Orang	0,00	24.000.000	24.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak						1 Dokumen	0,00	69.400.000	69.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS BENTENG
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak																		
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-	-	100 %	0,00	454.000	454.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	454.000	454.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS BENTENG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	-	0,00	36.750.000	36.750.000						0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKHM	-	-	100 %	0,00	36.750.000	36.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif							
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKM)																				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	36.750.000	36.750.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BENTENG		

Tabel 3.9
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pabuaran

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif [Rp]			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indika tif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										538.500.000	1.174.833.000,00	1.174.833.000,00							0,00	
1										538.500.000	1.174.833.000,00	1.174.833.000,00							0,00	
1	02									538.500.000	1.174.833.000,00	1.174.833.000,00							0,00	
2	1	02	02					-	-	538.500.000	1.135.033.000,00	1.135.033.000,00							0,00	
										538.500.000	1.135.033.000,00	1.135.033.000,00							0,00	
1	02	02	2.02					-	100 %	538.500.000	1.134.380.000,00	1.134.380.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penggiatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggiatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PABUARAN
1	02	02	2.02	0001																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kekompok Sasaran	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024					Prioritas						Target	Pagu Indika tif (Rp)	
							Sekelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Puskemas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	162.640.000	162.640.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PAHUARAN		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.600.000	5.600.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PAHUARAN		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	54.800.000	54.800.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PAHUARAN		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	106.600.000	106.600.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PAHUARAN		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	538.500.000	659.240.000	659.240.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS BENTENG		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PAHUARAN		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Berjalan Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.000.000	2.000.000	Kota Subakunmi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PAHUARAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Diharapkan (Rejadian Butan Pasca Imuniasi dan Pemberian Obat Masal)											BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	4.800.000	4.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	1.200.000	1.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	44.000.000	44.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	8.100.000	8.100.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi					100%	0,00	653.000	653.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	653.000	653.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan	Persentase pengembangan pelayanan kesehatan UKM	-				100 %	0,00	39.800.000	39.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PABUARAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif										
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																								
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	39.800.000	39.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PABUARAN						

Tabel 3.10
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Nanggaleng

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kekompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024					Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
													Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif							
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	163.202.000	163.202.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.000.000	6.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.050.000	12.050.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	59.800.000	59.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	710.000.000,00	881.707.000	881.707.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Beracikan Rautan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	200.000	200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)											BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	2.000.000	2.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	0	0	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	30.300.000	30.300.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	5.400.000	5.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi					100 %	0,00	3.795.000	3.795.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.795.000	3.795.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	12.850.000	12.850.000					0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan dan pelaksanaan UKM	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKM	-			-	100 %	0,00	12.850.000	12.850.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.850.000	12.850.000		Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOR-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS NANGGELENG	

Tabel 3.11
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Tipar

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kekompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas						Target	Pagu Indika tif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	183.028.000	183.028.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.100.000	26.100.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	117.075.500	117.075.500	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	880.000.000,00	1.017.600.000	1.017.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Berjalan Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	600.000	600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskem as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masak)										BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0 Orang	100 Orang	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0 Orang	100 Orang	0,00	600.000	600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berproduksi						0 Orang	100 Orang	0,00	84.800.000	84.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-	1 Dokumen	0,00	18.800.000	18.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						-	100%	0,00	3.374.500	3.374.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.374.500	3.374.500	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	26.300.000	26.300.000						0,00	PUSKESMAS TIPAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan dan pelaksanaan UKM						-	100%	0,00	26.300.000	26.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS TIPAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif									
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																							
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.300.000	26.300.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOR-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TIPAR					

Tabel 3.12
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00010 Puskesmas Gedong Panjang

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah					
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Pelayanan Sesuai Standar										Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif							
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	208.360.000	208.360.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GEDONG PANJANG		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.800.000	9.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GEDONG PANJANG		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	63.400.000	63.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GEDONG PANJANG		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	114.200.000	114.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GEDONG PANJANG		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	2 Dokumen	570.000.000,00	916.570.000	916.570.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diurungkan (Kejadian Buntan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak				0 Laporan	1 Laporan	0,00	800.000	800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masak)							BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif							
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0 Orang	100 Orang	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berproduksi					0 Orang	100 Orang	0,00	7.950.000	7.950.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	1 Dokumen	0,00	44.400.000	44.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak																
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			-	100%	0,00	222.000	222.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	222.000	222.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	-	0,00	29.950.000	29.950.000						0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKIM	-			-	100%	0,00	29.950.000	29.950.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.950.000	29.950.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		

Tabel 3.13
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00011 Puskesmas Baros

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Keompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perngkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024				Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Pelayanan Sesuai Standar											Puskesmas as	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	169.924.000	169.924.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.800.000	34.800.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	80.600.000	80.600.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	199.950.000	199.950.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	1.686.630.000	1.686.630.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Berjalan Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak				0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)										BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	12.000.000	12.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	7.200.000	7.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi				0 Orang	1 Dokumen	0,00	6.600.000	6.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	193.800.000	193.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			-	100%	0,00	235.000	235.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	235.000	235.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	-	0,00	57.600.000	57.600.000						0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKIM	-			-	100 %	0,00	57.600.000	57.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif										
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0	Dokumen	1	Dokumen	0,00	57.600.000	57.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS	

Tabel 3.14
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00012 Puskesmas Lembur Situ

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Registan / Sub Registan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Saasran	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024					Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas				Target	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
													Puskesmas	Dan Herdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif								
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	190.556.000	190.556.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.200.000	10.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	23.400.000	23.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				
1	02	02	2.02	0023	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	112.400.000	112.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	620.000.000,00	944.470.000	944.470.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Beratikan Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	200.000	200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)										BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	2.000.000	2.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi				0 Orang	1 Dokumen	0,00	20.400.000	20.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	77.600.000	77.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi					100%	0,00	672.000	672.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	672.000	672.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	43.000.000	43.000.000					0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKM	-			-	100 %	0,00	43.000.000	43.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.000.000	43.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		

Tabel 3.15
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00013 Puskesmas Karang Tengah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENTA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENTA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif [Rp]			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif [Rp]		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kekompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024				Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indika tif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	268.204.000	268.204.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.200.000	34.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.250.000	28.250.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	106.250.000	106.250.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000,00	1.141.910.000	1.141.910.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Beradan Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	600.000	600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBID 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Diharapkan (Rejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masual)										BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Herdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	1.200.000	1.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi				0 Orang	1 Dokumen	0,00	31.200.000	31.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	46.000.000	46.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi				-	100%	0,00	3.627.000	3.627.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.627.000	3.627.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKIM	-			-	100%	0,00	19.800.000	19.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.800.000	19.800.000		Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOR-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS	

Tabel 3.16
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00014 Puskesmas Sukakarya

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kekompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	194.776.000	194.776.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.900.000	3.900.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.400.000	16.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.950.000	34.950.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	770.000.000,00	870.237.000	870.237.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Beracikan Rautan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indika tif (Rp)		
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)										BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi				0 Orang	1 Dokumen	0,00	4.200.000	4.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	30.800.000	30.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi				-	100%	0,00	938.000	938.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	938.000	938.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	39.000.000	39.000.000					0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKM	-			-	100 %	0,00	39.000.000	39.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	39.000.000	39.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		

Tabel 3.17
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00015 Puskesmas Limus Nunggal

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Registan / Sub Regiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian REINA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Saasran	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024					Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah	Target									
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
															Puskesmas	Dan Herdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	147.728.000	147.728.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.200.000	6.200.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.700.000	17.700.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0023	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	141.000.000	141.000.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			0 Dokumen	2 Dokumen	728.000.000,00	906.840.000	906.840.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Di harapkan (Beratian Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak			0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.600.000	2.600.000	Kota Sukabungri, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Herdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indika tif (Rp)		
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masak)											BOK-BOK Puskesmas as	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0 Orang	100 Orang	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berproduksi						0 Orang	1 Dokumen	0,00	3.400.000	3.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi																		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-	1 Dokumen	0,00	71.900.000	71.900.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	PUSKESMAS
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak																		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			-	100 %	0,00	325.000	325.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	325.000	325.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	PUSKESMAS
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	16.800.000	16.800.000							0,00	PUSKESMAS
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Terintegrasi	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKM	-			-	100 %	0,00	16.800.000	16.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.800.000	16.800.000		Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS	

Tabel 3.18
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00016 Puskesmas Cikundul

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				</															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Keompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perngkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024						Prioritas				Target	Pagu Indika tif (Rp)	
							Sekelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelayanan Sesuai Standar										Puskemas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	226.150.000	226.150.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.450.000	120.450.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	105.850.000	105.850.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	2 Dokumen	570.000.000,00	694.000.000	694.000.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	Lain-lain PAD yang sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Beratikan Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.400.000	2.400.000	Kota Sukabungari, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)											BOK-BOK Puskesmas	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	4.800.000	4.800.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi				0 Orang	1 Dokumen	0,00	11.600.000	11.600.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	26.400.000	26.400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-				100%	0,00	2.043.000	2.043.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.043.000	2.043.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																0,00	PUSKESMAS
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKM	-			-	100%	0,00	95.700.000	95.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Peranggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indika tif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBED 2024		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif								
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0	1	0,00	95.700.000	95.700.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOR-BOR Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS				

Tabel 3.19
Program Dan Kegiatan Perangkat Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00017 Puskesmas Cibeureum Hilir

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif [Rp]			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif [Rp]		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kekompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024				Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indika tif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelayanan Sesuai Standar										Puskesmas	Dan Berdaya Saing	Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif					
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	122.200.000	122.200.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.400.000	6.400.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	39.400.000	39.400.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	88.600.000	88.600.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	2 Dokumen	830.000.000,00	994.350.000	994.350.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	Lain-lain PAD yang Sah, DAK, Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000	5.000.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Berakibat Runtan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000	1.000.000	Kota Subakbumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskemas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00		PUSKESMAS	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah					
										8	9	10	11	12			13		14	15		16	17	18
1						Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)									BOK-BOK Puskesmas as	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif							
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0 Orang	100 Orang	0,00	15.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0 Orang	100 Orang	0,00	400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										400.000	400.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berproduksi						0 Orang	1 Dokumen	0,00	7.200.000	7.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi										7.200.000	7.200.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-	1 Dokumen	0,00	42.700.000	42.700.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak										42.700.000	42.700.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			-	100%	0,00	158.000	158.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	158.000	158.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										158.000	158.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas as	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	PUSKESMAS
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	0,00	43.350.000	43.350.000						0,00	PUSKESMAS		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase pengembangan dan pelaksanaan UKM	-			-	100 %	0,00	43.350.000	43.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indika tif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024				Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Bersumber Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif						
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM)				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.350.000	43.350.000	Kota Sukabumi, Kecamatan	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS		

BAB VI

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran dari perubahan sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu yang memperhatikan catatan penting yang menjadi dasar perubahan rencana kerja. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024 serta didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan melihat capaian tahun sebelumnya serta memperhatikan tujuan dan sasaran.

Anggaran indikatif berdasarkan pagu Renja Perubahan Tahun 2024 yang tercantum pada SIPD-RI bagi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi beserta dengan Unit Teknis sebesar Rp. 509,690,484,409 yang mengacu pada RKPD Perubahan Kota Sukabumi Tahun 2024.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman kerja pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Dinas Kesehatan Kota Sukabumi wajib melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024;
3. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 akan dimonitoring secara berkala dan dilaporkan kepada kepala dinas.
4. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kesehatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 akan dilakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Berikutnya.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sukabumi Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPPA.

F. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 telah mengamanatkan bahwa salah satu strategi pembangunan sektor pertanian di Kota Sukabumi adalah melakukan peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian dalam arti luas agar mampu memperkuat basis produksi untuk ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional dengan tetap mempertahankan lahan pertanian produktif secara selektif. Strategi tersebut diimplementasikan melalui revitalisasi sarana prasarana pertanian, mengembangkan iptek dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang tersedia. RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 juga menegaskan perlunya dilakukan upaya pengembangan agroindustri dan agribisnis secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu ruang terbuka kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu RKPD, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. RPD ini merupakan kerangka pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-

2025. Selain itu, RPD ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga terpilihnya Wali Kota Sukabumi definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024. RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, dan kinerja pemerintahan daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi setiap tahunnya mulai tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 pada tujuan ke-1 menjelaskan tujuan yang ingin dicapai Kota Sukabumi pada periode 2024 – 2026 yaitu “Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif” yang dijabarkan menjadi sasaran yang salah satu sasarnya yaitu “Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa”. Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu dengan mendorong peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan dalam kerangka memperkuat pembangunan ketahanan pangan dan pertanian. Strategi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Sukabumi, diantaranya melalui: peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan kualitas SDM agribisnis, revitalisasi kelembagaan usaha bidang agribisnis, peningkatan revitalisasi agribisnis baik agribisnis *on farm* maupun *agribisnis off-farm*, peningkatan fasilitasi permodalan dan bantuan sarana produksi agribisnis, serta pengembangan diversifikasi usaha tani.

Di masa kini maupun masa yang akan datang, sektor pertanian diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi strategis yang saling mendukung dan memperkuat dengan sektor-sektor lainnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Sukabumi. Beberapa fungsi strategis tersebut diantaranya adalah sebagai penyediaan bahan pangan pokok; sumber ekonomi kreatif berbasis agribisnis; penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat; pelestarian keanekaragaman biohayati; pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan; menjaga keseimbangan ekosistem daerah perkotaan; dan lain-lain. Fungsi-fungsi strategis sektor pertanian sebagaimana dimaksud di atas, sangat selaras dan sinergis dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Seiring dengan semakin tinggi dan cepatnya perkembangan pembangunan dalam berbagai sektor baik di wilayah Kota Sukabumi maupun wilayah

sekitarnya berdampak ganda pada pembangunan sektor pertanian. Disatu sisi perkembangan perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif, misalnya semakin meningkatnya peluang pasar berbagai produk agro (pangan maupun non-pangan) dan semakin mudahnya pergerakan atau distribusi barang/bahan agro. Namun di sisi lain juga memunculkan tantangan dan permasalahan pembangunan sektor pertanian yang semakin berat dan kompleks. Beberapa bentuk tantangan tersebut diantaranya adalah mewujudkan sistem perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian produktif, meningkatkan penyediaan pangan pokok masyarakat yang memenuhi standar dan mewujudkan diversifikasi pangan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk agribisnis dengan pendekatan teknologi agribisnis tepat guna dan ramah lingkungan, mengembangkan agribisnis kreatif berbasis sumber daya lokal untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan komperatif, meningkatkan kontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) khususnya yang terkait dengan angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan serta kelestarian lingkungan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis untuk bersaing di pasar lokal, regional maupun global, menumbuhkan para pelaku agribisnis baru yang produktif dan inovatif, memperkuat kemandirian kelembagaan usaha agribisnis, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset agribisnis milik pemerintah yang masih diklasifikasikan *idle* atau tidak produktif.

Dalam rangka menghadapi berbagai kendala dan tantangan serta untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian di Kota Sukabumi sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) DKP3 Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan sektor pertanian yang sistematis, terarah, terfokus, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Memasuki periode pembangunan pertanian Kota Sukabumi tahun 2024, maka DKP3 Kota Sukabumi sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja PD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah DKP3 Kota Sukabumi tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Renja" adalah dokumen perencanaan DKP3 Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung Januari sampai Desember 2024, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam

pelaksanaan rencana kerja tersebut, perubahan terhadap rencana kerja diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi yang berjalan selama tahun 2024.

Penyusunan Renja dan perubahannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Dalam rangka mengidentifikasi dinamika pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, yang telah berlangsung sampai dengan Triwulan II, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja beberapa program dan kegiatan pada DKP3 Kota Sukabumi, dengan menyusun Rencana Kerja Perubahan DKP3 Kota Sukabumi 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perubahan. Beberapa perubahan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- DKP3 Kota Sukabumi saat ini memiliki setidaknya 8 aplikasi yang dibangun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi yang sudah dibangun beberapa tahun lalu, perlu maintenance dan pengembangan seiring dengan adanya berbagai masukan, saran baik internal maupun eksternal agar penggunaan aplikasi dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.
- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024 dilakukan secara hibrid yaitu dilaksanakan secara online mandiri oleh DKP3 Kota Sukabumi pada semester 1 kepada responden yang merupakan pengguna layanan pada seluruh unit pelayanan DKP3 Kota Sukabumi melalui link yang disebarakan pada nomor whatsapp pengguna layanan dan untuk semester 2 dilakukan secara langsung dengan bekerjasama dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang sangat penting untuk kelancaran operasional dinas perlu diberikan tambahan anggaran. Sumber penambahan berupa penambahan anggaran baru dari Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan pergeseran beberapa kegiatan yang masih memungkinkan untuk digeser yang secara kinerja tidak memiliki dampak signifikan atas hasil pergeseran tersebut.

- Penyediaan makan minum untuk keperluan rapat-rapat koordinasi teknis baik dengan internal dinas maupun eksternal dinas. Intensitas pelaksanaan rapat-rapat teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas menjelang akhir tahun cenderung mengalami peningkatan sehingga ketersediaan fasilitasi makan dan minum harus terpenuhi.
- Untuk mendukung pelaksanaan arsip, DKP3 Kota Sukabumi pada tahun 2024 perlu penambahan anggaran untuk pengadaan lemari arsip yang baru agar pelaksanaan pengarsipan menjadi lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharuskan tersedia baik oleh penilai tingkat kota maupun provinsi.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana di UPTD Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC) agar pelayanan edukasi kepada pengunjung dapat ditingkatkan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi;
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
17. Perwal Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan DKP3 Kota Sukabumi Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dinas dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah berubah terlebih dulu.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan DKP3 Kota Sukabumi tahun 2024 adalah:

- a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- b. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;

- c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika Renja Perubahan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Penyusunan Renja Perubahan DKP3 Kota Sukabumi tahun 2024 dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, diketahui adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja DKP3 Kota Sukabumi tahun 2024 dilakukan dengan terfokus pada beberapa poin yaitu pencapaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, target program dan kegiatan Renstra sampai dengan tahun 2024. Beberapa poin tersebut didasarkan pada indikator kinerja program dan kegiatan serta target-targetnya yang menjadi alat ukur dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat diketahui persentase kontribusi kegiatan-kegiatan tersebut terhadap pembangunan di Kota Sukabumi, khususnya di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Kegiatan yang memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan diupayakan untuk dilanjutkan dan kegiatan yang memiliki kontribusi negatif terhadap pembangunan disarankan untuk tidak dilanjutkan.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 (sampai dengan Triwulan II)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	11.093.127.064	74,87	74,87	5.460.331.723	49,22	APBD		
2.09.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	%	100	135.649.450	62,50	62,50	10.659.750	7,86	APBD		
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.949.750	2	100,00	10.659.750	76,42	APBD		
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	121.699.700	2	25,00	0	0,00	APBD		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	9.137.491.414	75,00	75,00	4.410.871.533	48,27	APBD		
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	58	9.137.491.414	58	100,00	4.410.871.533	48,27	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Bulan	12		6	50,00			APBD		
2.09.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	%	100	19.950.000	100,00	100,00	19.875.000	99,62	APBD		
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	123	19.950.000	123	100,00	19.875.000	99,62	APBD		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	252.979.800	73,59	73,59	160.973.977	63,63	APBD		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	11	10.000.000	6	54,55	4.773.800	47,74	APBD		
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	27.339.600	36	97,30	25.639.400	93,78	APBD		
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	9.020.200	4	80,00	8.658.200	95,99	APBD		
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	42.000.000	10	83,33	35.768.520	85,16	APBD		
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	614	164.620.000	324	52,77	86.134.057	52,32	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	%	100	225.860.000	94,44	94,44	213.490.000	94,52	APBD		
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	21	7.150.000	21	100,00	7.000.000	97,90	APBD		
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	218.710.000	8	88,89	206.490.000	94,41	APBD		
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	1.156.974.400	62,50	62,50	562.367.563	48,61	APBD		
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1520	1.520.000	1520	100,00	1.520.000	100,00	APBD		
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	161.194.500	6	50,00	80.820.503	50,14	APBD		
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	385.447.300	6	50,00	179.917.060	46,68	APBD		
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	608.812.600	6	50,00	300.110.000	49,29	APBD		
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	164.222.000	56,02	56,02	82.093.900	49,99	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	124.242.000	8	47,06	55.653.400	44,79	APBD		
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	9.980.000	6	35,29	3.299.500	33,06	APBD		
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	7	30.000.000	6	85,71	23.141.000	77,14	APBD		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	%	10	5.680.000	2,00	20,00	-	0,00	APBD		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Lumbung Pangan Masyarakat yang ada	Unit	4	5.680.000	4,00	100,00	-	0,00	APBD		
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Sinkronisasi Koordinasi dalam dan rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	4	5.680.000	0	0,00	0	0,00	APBD		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	%	40	3.157.278.700	38,00	95,00	128.016.500	4,05	APBD		
		Skor Pola Pangan Harapan	%	81,8		86,10	105,26					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)	%	2419		2647	109,43					
		Angka Kecukupan Protein (gram/kap /hari)	%	107,1		125,7	117,37					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	%	100	2.802.699.000	100,00	100,00	116.455.000	4,16	APBD		
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	12	153.000.000	6	50,00	114.480.000	74,82	APBD		
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	500	2.641.599.000	0	0,00	0	0,00	BANKEU		
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	12	8.100.000	6	50,00	1.975.000	24,38	APBD		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Tersalurkannya CPP	%	90	308.683.800	100,00	100,00	3.875.000	1,26	APBD		
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	52,34	299.226.200	0	0,00	3.875.000	1,30	APBD		
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	38,97	9.457.600	0	0,00	0	0,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kabupaten/Kota yang Terpelihara										
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Kegiatan	5	45.895.900	50,00	100,00	7.686.500	16,75	APBD		
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi PerKapita Per Tahun	Laporan	12	45.895.900	6	50,00	7.686.500	16,75	APBD		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan data kerawanan pangan	%	100	113.650.000	42,59	42,59	14.250.000	12,54	APBD		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	%	90	13.650.000	35,19	39,09	1.950.000	14,29	APBD		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	13.650.000	0	0,00	1.950.000	14,29	APBD		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan	%	90	100.000.000	50,00	55,56	12.300.000	12,30	APBD		
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	12	100.000.000	6	50,00	12.300.000	12,30	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	%	89	6.749.400	89,36	100,00	3.141.500	46,54	APBD		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan yang dilaksanakan	Kegiatan	80	6.749.400	50,00	62,50	3.141.500	46,54	APBD		
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	12	6.749.400	6	50,00	3.141.500	46,54	APBD		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Budidaya Perikanan	%	24,83	474.991.150	13,87	55,86	405.440.150	85,36	APBD		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan yang mendapat Pembinaan	Pokdakan	2	62.200.000	2,00	100,00	34.210.000	55,00	APBD		
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	2	62.200.000	1	50,00	34.210.000	55,00	APBD		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya	%	1,2	412.791.150	1,40	100,00	371.230.150	89,93	APBD		
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	220.000.000	1	100,00	208.328.000	94,69	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	57.536.150	1	100,00	33.083.150	57,50	APBD		
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	66	135.255.000	66	100,00	129.819.000	95,98	DBHCHT		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	%	42,31	59.020.000	24,33	57,50	41.446.000	70,22	APBD		
		Persentase Keamanan Pangan Produk Perikanan	%	89		99	111,24					
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase produk Perikanan yang aman dikonsumsi	%	75	47.720.000	0,00	0,00	33.326.000	69,84	APBD		
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit	2	47.720.000	0	0,00	33.326.000	69,84	DBHCHT		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan (ton)	Ton	2828,44	11.300.000	2854,00	100,00	8.120.000	71,86	APBD		
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	11.300.000	2	20,00	8.120.000	71,86	APBD		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produksi padi	Ton	19143	708.724.500	9130	47,69	204.807.500	28,90	APBD		
		2. Luas panen	Ha	2703		1381	51,09					
		3. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisme pertanian dengan baik	%	65		65	100,00					
		4. Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian	%	75		75	100,00					
		5. Produksi daging	Ton	5844,35		2942	50,34					
		6. Luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi	Ha	6,1		6,1	100,00					
		7. Jenis komoditas hortikultura yang didaftarkan registrasi kebun	Jenis	8		8	100,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis di Kota Sukabumi	%	10		10	100,00					
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian yang diberikan	%	80	657.964.500	25,00	31,25	192.932.500	29,32	APBD		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	455.000.000	0	0,00	0	0,00	DAK NON FISIK		
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	202.964.500	6	50,00	192.932.500	95,06	APBD		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi peningkatan produksi peternakan	Unit	2	50.760.000	2,00	100,00	11.875.000	23,39	APBD		
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	50.760.000	3	25,00	11.875.000	23,39	APBD		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	40	561.956.000	45,81	100,00	321.887.320	57,28	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan /pertanian	%	100		100	100,00					
		3. Persentase prasarana yang digunakan	%	100		100	100,00					
		4. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	%	10		10	100,00					
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasana pertanian yang dikembangkan	%	90	336.000.000	50,00	55,56	108.400.000	32,26	APBD		
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	336.000.000	6	50,00	108.400.000	32,26	APBD		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	%	90	225.956.000	100,00	100,00	213.487.320	94,48	APBD		
3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	225.956.000	1	100,00	213.487.320	94,48	APBD		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	100	195.852.380	100,00	100,00	122.669.860	62,63	APBD		
		2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV	%	50		50	100,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)										
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22	42.999.990	70,00	100,00	28.599.990	66,51	APBD		
3.27.04.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	10	42.999.990	7	70,00	28.599.990	66,51	APBD		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pemenuhan usaha pangan asal hewan yang difasilitasi sertifikasi Pra NKV atau NKV	%	90	152.852.390	65,00	72,22	94.069.870	61,54	APBD		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	32.248.390	6	50,00	26.098.390	80,93	APBD		
3.27.04.2.04.08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	100	120.604.000	80	80,00	67.971.480	56,36	DBHCHT		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	%	80	8.629.500	55,00	68,75	7.684.500	89,05	APBD		
		2. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUDP	%	25		25	100,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Unit	10	8.629.500	10	100,00	7.684.500	89,05	APBD		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	5	8.629.500	4	80,00	7.684.500	89,05	APBD		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	%	7	335.686.050	6,88	98,29	217.229.960	64,71	APBD		
		Persentase lembaga usaha tani dengan katagori kelas utama	%	7		6,71	95,82					
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN	%	2	335.686.050	2	100,00	217.229.960	64,71	APBD		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unir	3	16.675.050	2	66,67	13.925.000	83,51	APBD		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	40.000.000	1	33,33	21.895.000	54,74	APBD		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	5	109.011.000	1	20,00	59.430.000	54,52	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	2	170.000.000	0	0,00	121.979.960	71,75	DBHCHT		
JUMLAH					16.721.344.744	480,45	48,92	6.926.905.013	41,43%	APBD		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja DKP3 pada Triwulan II, capaian realisasi target kinerja bervariasi mulai dari Sangat Rendah (SR), Rendah hingga Sangat Tinggi (ST), dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 dibawah ini:

Tabel 2.2.1
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Triwulan II Tahun 2024)

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase ketersediaan pangan (%)	100	54,4	54,4	KP
2	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah (%)	22	11,4	52,27	KP
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,61	6,0	90,77	TPHP
4	Produktivitas Budidaya Perikanan	25,87	14,25	55,08	Perikanan
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,5	86,1	99,54	KP
6	Persentase Keamanan Pangan	89	85,44	96	KP
7	Nilai SAKIP perangkat daerah	76	77,61	102,12	Sekretariat

Berdasarkan serapan anggaran pada Triwulan II, persentase serapan anggaran kegiatan di Lingkungan DKP3 adalah sebesar 41,43%. Kegiatan Pengendalian pada Triwulan II dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Secara umum, dari tabel Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Triwulan II Tahun 2024), capaian kinerja DKP3 Kota Sukabumi menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator telah menunjukkan capaian yang ideal. Pada Triwulan II tahun 2024, ke-7 indikator telah tercapai berada diatas 50% dari target pada tahun berjalan. Hanya indikator nilai SAKIP yang sudah melebihi target yang ditentukan karena indikator Nilai SAKIP merupakan nilai penilaian SAKIP atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dampak pasca pandemi Covid-19 meskipun tidak signifikan, menyebabkan keterbatasan anggaran dinas sehingga tidak tercapainya beberapa indikator kinerja yang menjadi IKU dinas. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, antara lain:

- a. Fungsi pembinaan yang menjadi tugas dari Dinas di bidang pangan, pertanian dan perikanan, biasanya dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, sekolah lapang maupun temu teknis lainnya belum dapat dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.

- b. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran yang seharusnya ada meskipun upaya optimalisasi anggaran sudah dilakukan dengan sangat ketat.
- c. Pendapatan beberapa unit pelayanan di Dinas yang merupakan unit penghasil, seperti Kawasan Agroeduwisata Cikundul, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan, belum pulih secara normal paska pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi beberapa kendala di atas, dilakukan strategi antara lain:

- a. Pembinaan tetap dilakukan dengan memberlakukan protokol kesehatan, dilakukan terhadap kelompok-kelompok kecil, sehingga fungsi pembinaan tetap bisa dilakukan, tetap membuka forum konsultasi baik secara langsung maupun online.
- b. Rapat koordinasi internal dilakukan secara daring, sehingga meminimalisir anggaran makan minum dinas.
- c. Optimalisasi penjualan produk-produk Kawasan Agroeduwisata Cikundul sebagai masukan pendapatan.
- d. Optimalisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang ada, sehingga masyarakat tetap dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

- a. Realokasi anggaran berdasarkan skala prioritas kinerja;
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengutamakan pergeseran anggaran;
- d. *Output* kegiatan prioritas yang belum tercapai.
- e. *Output* yang dirasa dapat dialihkan pencapaiannya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan antara lain:

1. Pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk dialihkan ke Sub Kegiatan yang memerlukan intervensi anggaran agar pencapaian target kinerja dan pelayanan publik lingkup DKP3 Kota Sukabumi dapat berjalan secara maksimal.
2. Pengurangan dan Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penambahan anggaran berasal dari Sub Kegiatan lain yang dikurangi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

maintainance sistem informasi yang ada di DKP3 Kota Sukabumi serta pengembangan aplikasi yang selama ini sudah berjalan agar lebih efektif dan efisien dan multi fungsi dalam kerangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan anggaran berupa pengurangan anggaran pembuatan aplikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas lingkup Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

3. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Penambahan anggaran direncanakan untuk pengadaan pakaian batik Khas Kota Sukabumi bagi seluruh Pegawai DKP3 Kota Sukabumi sesuai dengan Instruksi Penjabat Wali Kota Sukabumi.
4. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk memenuhi kebutuhan ATK dan alat kebersihan kantor yang saat ini ketersediaan anggarannya sudah tidak ada.
5. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yang akan digunakan untuk pemenuhan makan minum dan snack rapat untuk kegiatan rapat koordinasi teknis dinas.
6. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk pengadaan perangkat kerja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
7. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebugaran pegawai DKP3 Kota Sukabumi, berupa fasilitasi sewa gelanggang olah raga bagi Pegawai.
8. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk dialihkan pada kegiatan lain yang memerlukan anggaran dan dan penting untuk dipenuhi kebutuhan anggarannya untuk pencapaian target kinerja dinas.
9. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, untuk dialihkan pada kegiatan lain yang memerlukan anggaran dan dan penting untuk dipenuhi kebutuhan anggarannya untuk pencapaian target kinerja dinas.
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, mengalami penambahan karena kebutuhan pemeliharaan di kantor - kantor bidang yang cukup banyak.
11. Pengurangan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik, pengurangan digunakan untuk menambah

anggaran kegiatan lain yang memerlukan tambahan anggaran dalam pencapaian target kinerja dinas.

12. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, penambahan anggaran diperuntukan untuk memperkuat Cadangan Pangan Pokok Pemerintah sesuai dengan target pemerintah daerah Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat.
13. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dialokasikan untuk honorarium pendampingan kegiatan dari unsur Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.
14. Pergeseran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Pergeseran dilakukan untuk penambahan pakan pendederan di Balai Benih Ikan.
15. Penambahan sekaligus pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat. Pergeseran dilakukan untuk pengadaan bahan Kimia, honor narasumber dan dinas dalam. Sementara penambahan anggaran dilakukan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja budidaya perikanan. Penambahan ini berasal dari dana DBHCHT.
16. Penambahan sekaligus pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Pergeseran dilakukan untuk pembelian sampel, honorarium narasumber dan pemeriksaan sampel produk perikanan. Sementara untuk penambahan anggaran dilakukan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Penambahan anggaran ini berasal dari dana DBHCHT.
17. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian akan digunakan untuk honorarium pendampingan unsur Kodim 0607 Sukabumi dalam program nasional pompanisasi dan pupuk bersubsidi di Kota Sukabumi.
18. Penambahan sekaligus pergeseran pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya. Pergeseran dilakukan untuk pembelian pompa air dan kaptan. Sementara, penambahan anggaran yang diberikan akan digunakan untuk melakukan rehabilitasi kandang sapi dan beberapa fasilitas lain di Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC).
19. Pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Pergeseran dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam daerah.
20. Pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik

Lokasi. Pergeseran dilakukan untuk menyesuaikan uang saku peserta dari akun belanja perjalanan dinas dalam daerah pada akun belanja sosialisasi berupa uang saku untuk kegiatan pelatihan.

21. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan. Penambahan anggaran rencananya akan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja pada sektor peternakan dan kesehatan hewan. Penambahan anggaran ini berasal dari dana DBHCHT.
22. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Penambahan anggaran diperuntukan untuk Hibah kepada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Sukabumi yang direncanakan akan digunakan untuk fasilitasi Rembug KTNA Tingkat Nasional yang telah dilaksanakan di Provinsi Bali.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan DKP3 Kota Sukabumi pada tahun 2024 yang disertai dengan target kinerja, disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024										Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14-13)	16	17	18	19	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											14.276.486.364	14.613.427.364	336.941.000	4.577.548.261	APBD	-	-	-	11.803.084.164
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											14.276.486.364	14.613.427.364	336.941.000	4.577.548.261	APBD	-	-	-	11.803.084.164
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11.093.127.264	11.205.069.564	111.942.300	4.447.368.261	APBD	-	-	-	11.103.874.914
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											135.649.650	37.359.250	-98.290.400	10.659.750	APBD	-	-	-	71.699.700
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersaji tepat waktu	Kota Sukabumi	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	90 %	90 %	13.949.950	10.659.750	-3.290.200	10.659.750	APBD	-	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	29.999.950
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	Kota Sukabumi	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	90 %	90 %	121.699.700	26.699.500	-95.000.200	-	APBD	-	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	41.699.750
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9.137.491.414	9.137.491.414	-	3.524.046.946	APBD	-	-	-	9.137.491.414
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	58 Orang / Bulan	58 Orang / Bulan	90 %	90 %	9.137.491.414	9.137.491.414	-	3.524.046.946	APBD	-	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.137.491.414

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										19.950.000	36.825.000	16.875.000	19.875.000	-	-	-	25.935.000		
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	110 Paket	110 Paket	90%	90%	19.950.000	36.825.000	16.875.000	19.875.000	APBD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	25.935.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										252.979.800	266.155.000	13.175.200	137.089.977	APBD			283.347.700		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perna ngan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	11 Paket	11 Paket	90%	90%	10.000.000	10.000.000	-	4.773.800	APBD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12.997.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	37 Paket	37 Paket	90%	90%	27.339.600	30.514.800	3.175.200	25.639.400	APBD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35.541.900	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	5 Jenis	5 Jenis	90%	90%	9.020.200	9.020.200	-	8.618.200	APBD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	11.726.800	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	95%	42.000.000	52.000.000	10.000.000	31.968.520	APBD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	164.620.000	164.620.000	-	66.090.057	APBD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	181.082.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										225.860.000	247.592.500	21.732.500	213.490.000	APBD			192.021.900		
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	21 Unit	21 Unit	90%	90%	7.150.000	7.150.000	-	7.000.000	APBD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	100%	9.260.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Pemerintah Daerah														Pemerintah Daerah				
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	9 Unit	9 Unit	90%	90%	218.710.000	240.442.500	21.732.500	206.490.000	APBD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	182.761.900
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.156.974.400	1.115.424.400	-41.550.000	474.097.188	APBD				1.157.454.400
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	1.520.000	1.520.000	-	1.520.000	APBD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.000.000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	161.194.500	173.194.500	12.000.000	66.837.500	APBD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	161.194.500
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	385.447.300	356.647.300	-28.800.000	150.114.688	APBD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	385.447.300
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	608.812.600	584.062.600	-24.750.000	255.625.000	APBD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	608.812.600
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											164.222.000	364.222.000	200.000.000	68.109.400	APBD				235.924.800
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	17 Unit	17 Unit	90%	90%	124.242.000	124.242.000	-	46.031.400	APBD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	123.544.800
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan	Jumlah Peralatan dan	Persentase pemeliharaan	Kota Sukabumi	100%	100%	17 Unit	17 Unit	90%	90%	9.980.000	9.980.000	-	3.099.500	APBD		Persentase Pemenuhan	100%	12.380.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				bertambah/ berkurang	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah					Tolak Ukur	Target	
		Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mesin Lainnya yang dipelihara	barang milik daerah												Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kota Sukabumi	100%	100%	7 Unit	7 Unit	90%	90%	30.000.000	230.000.000	200.000.000	18.978.500	APBD	-	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.000.000
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUЛАTAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN											5.680.000	-	-	-	APBD			-	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											5.680.000	-	-	-	APBD			-	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	Jumlah Sinkronisasi Koordinasi dalam dan rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Sukabumi	25%	25%	12 Laporan	12 Laporan	75%	75%	5.680.000	-	-	-	APBD		Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	10 ton	-
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											3.057.279.700	3.287.958.400	230.678.700	115.355.000	APBD, BANK KEU				533.259.250
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan											2.702.700.000	2.812.698.700	109.998.700	109.260.000	APBD BANK KEU				147.374.850
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase ketersediaan pangan pokok	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	75%	75%	153.000.000	153.000.000	-	107.585.000	APBD		Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	40%	127.374.850
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase ketersediaan pangan pokok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase peningkatan ketahanan pangan keluarga	Kota Sukabumi	100%	100%	500 Keluara	500 Keluara	75%	75%	2.641.599.000	2.651.598.700	9.999.700	-	BANK KEU		Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	40%	-
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan	Persentase ketersediaan pangan pokok	Informasi Stok Pangan	Persentase ketersediaan informasi stok pangan	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	75%	75%	8.100.000	8.100.000	-	1.675.000	APBD		Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	40%	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota											308.683.800	429.363.800	120.680.000	1.400.000	APBD			339.988.500	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan penyaluran CBPK kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan	Kota Sukabumi	22%	22%	24.250 kg	24.250 kg	100%	100%	299.226.200	422.163.800	122.937.600	1.400.000	APBD	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	40%	339.988.500	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Persentase pelayanan penyaluran CBPK kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan	Kota Sukabumi	22%	22%	24.250 kg	24.250 kg	100%	100%	9.457.600	7.200.000	-2.257.600	-	APBD	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	40%	-	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											45.895.900	45.895.900	-	4.695.000	APBD			45.895.900	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase ketersediaan pangan pokok	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Per Tahun	Persentase capaian tingkat konsumsi pangan masyarakat	Kota Sukabumi	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	45.895.900	45.895.900	-	4.695.000	APBD	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah		45.895.900	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											113.650.000	113.650.000	-	11.850.000	APBD			120.000.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											13.650.000	13.650.000	-	1.950.000	APBD			20.000.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penanganan daerah kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Persentase pemutakhiran data pada peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan	Kota Sukabumi	90%	90%	1 dokumen	1 dokumen	90%	90%	13.650.000	13.650.000	-	1.950.000	APBD	Persentase ketersediaan data ketahanan pangan dan kerawanan pangan	100%	20.000.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											100.000.000	100.000.000	-	9.900.000	APBD			100.000.000	
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Persentase pemutakhiran data pada peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan	Kota Sukabumi	90%	90%	12 Laporan	12 Laporan	90%	90%	100.000.000	100.000.000	-	9.900.000	APBD	Persentase ketersediaan data ketahanan pangan dan kerawanan pangan	100%	100.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											6.749.400	6.749.400	-	2.975.000	APBD			45.950.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024								Sumber r Dana	Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											6.749.400	6.749.400	-	2.975.000	APBD				45.950.000
2.09.05.2.01.0 7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Persentase kegiatan pengawasan keamanan yang dilaksanakan	Kota Sukabumi	89%	89%	12 Doku men	12 Doku men	80%	80%	6.749.400	6.749.400	-	2.975.000	APBD		Persentase kegiatan pengawasan keamanan yang dilaksana n	90%	45.950.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											2.344.859.580	2.849.271.480	504.411.900	828.430.290					1.513.372.900
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											534.011.150	687.596.050	153.584.900	204.714.150					412.457.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUIDIDAYA											474.991.150	589.991.050	114.999.900	176.029.150	DBHC HT, APBD				318.505.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil											62.200.000	97.200.000	35.000.000	34.210.000	APBD				82.500.000
3.25.04.2.02.0 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kota Sukabumi	1.422, 86 Ton	1.422, 86 Ton	4 Kelom pok	4 Kelom pok	10%	10%	62.200.000	97.200.000	35.000.000	34.210.000	APBD		Produksi Perikanan	1.422, 86 Ton	82.500.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											412.791.150	492.791.050	79.999.900	141.819.150	APBD, DBHC HT				236.005.000
3.25.04.2.04.0 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kot a	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya	Kota Sukabumi	1.422, 86 Ton	1.422, 86 Ton	1 Doku men	1 Doku men	1,2%	1,2%	-	9.999.900	-	-	APBD		Produksi Perikanan	1.422, 86 Ton	-
3.25.04.2.04.0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudididyaan n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kot a	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya	Kota Sukabumi	1.422, 86 Ton	1.422, 86 Ton	1 Unit	1 Unit	1,2%	1,2%	220.000.000	220.000.000	-	20.072.000	APBD		Produksi Perikanan	1.422, 86 Ton	-
3.25.04.2.04.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya	Kota Sukabumi	1.422, 86 Ton	1.422, 86 Ton	1 Unit	1 Unit	1,2%	1,2%	57.536.150	57.536.150	-	33.083.150	APBD		Produksi Perikanan	1.422, 86 Ton	100.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pemбудidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan	Jumlah Pemбудidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pemбудidayaan Ikan di Darat	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya	Kota Sukabumi	1.422,86 Ton	1.422,86 Ton	100 orang	100 orang	1,2%	1,2%	135.255.000	205.255.000	70.000.000	88.664.000	DBHC HT		Produksi Perikanan	1.422,86 Ton	135.255.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											59.020.000	97.605.000	38.585.000	28.685.000	APBD, DBHC HT				93.952.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											47.720.000	86.305.000	38.585.000	20.565.000	DBHC HT				47.720.000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang MendapatkanPembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan Berusaha pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase produk Perikanan yang aman dikonsumsi	Kota Sukabumi	42,73 Kg/Ka p/Tahun	42,73 Kg/Ka p/Tahun	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	75%	75%	47.720.000	86.305.000	38.585.000	20.565.000	DBHC HT		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	42,73 Kg/Ka p/Tahun	47.720.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											11.300.000	11.300.000	-	8.120.000	APBD				46.232.000
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terasilitasi	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terasilitasi	Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan (ton)	Kota Sukabumi	42,73 Kg/Ka p/Tahun	42,73 Kg/Ka p/Tahun	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	2828,44 Ton	2828,44 Ton	11.300.000	11.300.000	-	8.120.000	APBD		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	42,73 Kg/Ka p/Tahun	46.232.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											1.810.848.430	2.161.675.430	350.827.000	623.716.140	APBD DAK				1.100.915.900
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											708.724.500	723.724.500	15.000.000	199.982.500	APBD DAK				274.020.950

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah					Tolak Ukur	Target	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										657.964.500	672.964.500	15.000.000	188.907.500	APBD DAK			223.260.950		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Produksi padi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase pemenuhan sarana pertanian yang diberikan	Kota Sukabumi	19143 ton GKP	19143 ton GKP	12 Laporan	12 Laporan	80%	80%	455.000.000	455.000.000	-	-	DAK NON FISIK	Produksi padi	19143 ton GKP	-	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Produksi padi	Jumlah Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian yang diberikan	Kota Sukabumi	19143 ton GKP	19143 ton GKP	12 Laporan	12 Laporan	80%	80%	202.964.500	217.964.500	15.000.000	188.907.500	APBD	Produksi padi	19143 ton GKP	223.260.950	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota											50.760.000	50.760.000	-	11.075.000	APBD			50.760.000	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala kecil	Produksi daging	Jumlah pelaku usaha peternakan yang difasilitasi perijinan	Jumlah fasilitasi peningkatan produksi peternakan	Kota Sukabumi	5902,8 ton	5902,8 ton	3 Orang	3 Orang	6 Jenis	6 Jenis	50.760.000	50.760.000	-	11.075.000	APBD	Produksi daging	5.902,7 ton	50.760.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											561.956.000	841.956.000	280.000.000	137.417.320	APBD			243.956.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian											336.000.000	616.000.000	280.000.000	93.909.000	APBD			18.000.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Jenis statistik pertanian yang disusun	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	Kota Sukabumi	40 ha	40 ha	3 Jenis	3 Jenis	90%	90%	336.000.000	616.000.000	280.000.000	93.909.000	APBD	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	44 ha	18.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											225.956.000	225.956.000	-	43.508.320	APBD			225.956.000	
3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah sarana RPH yang dipelihara dan dirawat	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	Kota Sukabumi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	90%	90%	225.956.000	225.956.000	-	43.508.320	APBD	Persentase prasarana yang digunakan	100%	225.956.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											195.852.380	236.679.380	40.827.000	105.044.860	APBD			267.723.950	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembekuan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular											42.999.990	42.999.990	-	28.599.990	APBD			-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
	Dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
3.27.04.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Jumlah pos pelayanan kesehatan hewan siaga (posyankeswan siaga) yang dibentuk dan dikembangkan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Kota Sukabumi	100%	100%	10 unit	10 unit	22%	22%	42.999.990	42.999.990	-	28.599.990	APBD		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	100%	-
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Penyiaran Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner											152.852.390	193.679.390	40.827.000	76.444.870	APBD, DBHC HT				267.723.950
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hewan Kurban yang laik dan Benar	Persentase pemenuhan usaha pangan asal hewan yang difasilitasi sertifikasi Pra NKV atau NKV	Kota Sukabumi	45%	45%	50 Orang	50 Orang	90%	90%	32.248.390	32.248.390	-	8.473.390	APBD		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	50%	147.119.950
3.27.04.2.04.08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Jumlah Lokasi Pemasaran PAH yang diawasi/dipantau	Persentase pemenuhan usaha pangan asal hewan yang difasilitasi sertifikasi Pra NKV atau NKV	Kota Sukabumi	45%	45%	9 Lokasi	9 Lokasi	90%	90%	120.604.000	161.431.000	40.827.000	67.971.480	DBHC HT		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	50%	120.604.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											8.629.500	8.629.500	-	7.684.500	APBD				10.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											8.629.500	8.629.500	-	7.684.500	APBD				10.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	Jenis pestisida yang disediakan	Jumlah fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Kota Sukabumi	80%	80%	2 jenis	2 jenis	10 kali	10 kali	8.629.500	8.629.500	-	7.684.500	APBD		Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	90%	10.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											335.686.050	350.686.050	15.000.000	173.586.960	APBD, DBHC HT				305.215.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											335.686.050	350.686.050	15.000.000	173.586.960	APBD, DBHC HT				305.215.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase lembaga usaha tani yang	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang penerapan	Peningkatan jumlah kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN	Kota Sukabumi	7%	7%	200 orang	200 orang	2%	2%	16.675.050	16.675.050	-	12.000.000	APBD		Persentase lembaga usaha tani yang	7%	20.757.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				(bertambah/ berkurang)	Realisasi (sampai dengan Bulan Mei 2024)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Murni)	Sesudah							
		berbadan hukum	teknologi pertanian													berbadan hukum				
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Jumlah lembaga usaha tani yang dibina	Peningkatan jumlah kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN	Kota Sukabumi	7%	7%	182 kelompok	182 kelompok	2%	2%	40.000.000	40.000.000	-	20.895.000	APBD	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	2%	50.683.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Bibit percontohan toga, tanaman hias, sayuran dan buah-buahan	Peningkatan jumlah kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN	Kota Sukabumi	7%	7%	1255 bibit	1255 bibit	2%	2%	109.011.000	124.011.000	15.000.000	53.830.000	APBD	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	2%	63.775.000	
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase lembaga usaha tani dengan kategori kelas utama	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Kota Sukabumi	7%	7%	2 Dokumen	2 Dokumen	2%	2%	170.000.000	170.000.000	-	86.861.960	DBHC HT	Persentase lembaga usaha tani dengan kategori kelas utama	2%	170.000.000	
TOTAL						TOTAL						16.721.344.744	17.462.698.844	741.354.100	5.405.978.551				13.316.457.064	

Perubahan Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKP3 Kota Sukabumi pada tahun 2024 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

NO	KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI (sd JUNI 2024)	RENCANA PERUBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	489.210.000	213.409.000	482.090.000	
I	4.1.	RETRIBUSI DAERAH	489.210.000	213.409.000	482.090.000	
I	4.1.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	47.000.000	26.305.000	48.000.000	
a	4.1.02.02.12.001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir Pertokoan dan Tempat Usaha	47.000.000	26.305.000	48.000.000	
		Pemakaian Kios-Kios dipasar	7.500.000	1.305.000	6.000.000	
		Pemakaian Lapak/warung sederhana di pasar hewan	2.000.000	100.000	2.000.000	
		Pasar Hewan Ternak Kecil	37.500.000	24.900.000	40.000.000	
b	4.1.02.02.15.001	Retribusi Pelayanan Rumah Potomongan Hewan Ternak	54.000.000	44.735.000	54.000.000	
		Pelayanan Potomongan Hewan	54.000.000	44.735.000	54.000.000	
c	4.1.02.02.17.001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.000.000	5.660.000	15.000.000	
		Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	10.000.000	5.660.000	15.000.000	
d	4.1.02.02.19.001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	81.210.000	41.059.000	87.490.000	
		Penggunaan ruangan, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan	12.010.000	7.830.000	15.990.000	
		Produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	16.500.000	5.426.000	16.500.000	
		Produksi hasil perikanan	27.700.000	9.863.000	30.000.000	
		Pemakaian RPC	25.000.000	17.940.000	25.000.000	
f	4.1.02.02.20.001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	297.000.000	95.650.000	277.600.000	
		Pemakaian Kandang Penampungan RPH	7.400.000	7.395.000	8.000.000	
		Pemakaian Kandang Sapi	32.500.000	0	35.000.000	
		Penggunaan Ruangan, Peralatan dan Fasilitas Penunjang lainnya untuk penyimpanan ikan beku (Cold Storage)	45.000.000	22.500.000	22.500.000	
		Pemakaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	212.100.000	65.755.000	212.100.000	
		JUMLAH DKP3	489.210.000	213.409.000	482.090.000	

BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja DKP3 Kota Sukabumi Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPPA-SKPD) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun anggaran 2024.

G. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai pedoman dalam penyusunan RENSTRA pada masa Transisi Tahun 2024-2026. RENSTRA tersebut sebagai dasar acuan bagi pembuatan RENJA 2024 DP2KBP3A Kota Sukabumi.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah, adalah meliputi:persiapan penyusunan;

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. penyusunan rancangan
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

RENJA 2024 DP2KBP3A Kota Sukabumi Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kota Sukabumi. Rencana Kerja Tahun 2024 DP2KBP3A Kota Sukabumi merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam Bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 105

Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi.

Keterkaitan antara Rencana Kerja DP2KBP3A Kota Sukabumi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi akan dijadikan sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengakomodir rencana-rencana SKPD yang ada di Kota Sukabumi maka untuk bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera. Rencana Kerja Pemerintah Daerah akan mengakomodir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi yang dalam hal ini mempunyai urusan wajib tentang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi Tahun yang bersangkutan dan selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi. Berikut Alur keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan:



Gambar 1.1

Alur keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Maka dari itu, terjadi perubahan pada Rencana Kerja DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan perubahan akibat pergeseran, penambahan dan pengurangan yang terjadi pada anggaran APBD DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
- t. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
- t. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi;
- u. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Taggal 28 Desember 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
- v. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
- w. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 142 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi;
- x. Peraturan Walikota Sukabumi Tanggal 18 April 2023 Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis DP2KBP3A Tahun 2024-2026;
- y. Peraturan Wali Kota Sukabumi Tanggal 29 Juli 2024 Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan selama Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahunan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, selama Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 DP2KBP3A Kota Sukabumi disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta alasan melakukan perubahan. Kemudian Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan. Lalu Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Terakhir Sistematika Penulisan yang Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II/Semester 1 Tahun berjalan. Kemudian Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Lalu terakhir terdapat Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta hambatan

yang harus dihadapi dan solusi serta langkah-langkah ke depan dalam mengatasi semua permasalahan yang ada.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi matrik renja sesuai SIPD, berikan penjelasan point-point penting anggaran perubahannya. Program, kegiatan dan sub kegiatan apa yang berubah dan berikan alasannya

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan terhadap indikator yang ada dalam Renstra Dinas Dalduk, KB, dan P3A dan indikator RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026, sesuai indikator sasaran yang telah ditentukan. Indikator sasaran yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.

Berdasarkan realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi Tahun 2024, secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai indikator sasaran telah memenuhi target kinerja, walaupun masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Pada Tahun 2024, telah ditetapkan 11 indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi untuk menunjang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sebagaimana berikut:

2.1.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota pada Tahun 2024 memiliki target 79% dan baru terdapat hasil pencapaian sebesar 33%. Hasil yang optimal akan dicapai pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV;
- b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada Tahun 2024 memiliki target 0,008% dan belum terdapat hasil pencapaiannya. Kemungkinan akan diselesaikan pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV.;
- c. Indeks Kualitas Keluarga pada Tahun 2024 memiliki target 72,5% dan sudah terdapat hasil pencapaiannya sebesar 73%. Kemungkinan capaian tersebut akan terus bertambah hingga Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV.;
- d. Jumlah Dokumen Terpilah Gender pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 2 Dokumen dan terdapat hasil pencapaian sebesar 1 dokumen. Hasil yang optimal akan dicapai pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV;
- e. Peningkatan Kategori Kota Layak Anak pada Tahun 2024 memiliki target Madya dan Capaian yang telah diraih adalah Madya.

Capaian Indikator Kinerja tersebut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.;

- f. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 0,034% dan baru terdapat hasil pencapaian sebesar 0,11%. Hasil realisasi capaian tersebut masih belum optimal dan masih ada potensi untuk menurun pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV.

2.1.2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu pada Tahun 2024 memiliki target 100% dan hasil pencapaiannya Triwulan II adalah 55%. Hasil realisasi capaian tersebut masih belum optimal dan masih ada potensi untuk meningkat pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV;
- b. Nilai self assesment Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada Tahun 2024 memiliki target B dan belum terdapat hasil pencapaiannya Triwulan II. Kemungkinan indikator tersebut akan terealisasi pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III atau IV;
- c. Persentase keluarga yang mengikuti program KB pada Tahun 2024 memiliki Target yaitu 65% dan hasil pencapaian yang diraih pada Triwulan II sebesar 50%. Hasil realisasi capaian tersebut masih belum optimal dan masih ada potensi untuk meningkat pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV;
- d. Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 12,5% dan belum terdapat capaian pada Triwulan II tahun 2024. Kemungkinan indikator tersebut akan terealisasi pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV;
- e. Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 62% dan capaiannya adalah 31%. Hasil realisasi capaian tersebut masih belum optimal dan masih ada potensi untuk meningkat pada Triwulan berikutnya yaitu Triwulan III dan IV.

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rencana kerja yang tercermin pada realisasi perjanjian kinerja Triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Realisasi dan Ketercapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1) Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	55%
2.	Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	2) Nilai self assesment Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Hak Perempuan,	3) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	79%	33%
		4) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,008%	0
		5) Indeks Kualitas Keluarga	72,5%	73%
3.	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	6) Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	2 Dokumen	1 dokumen
		7) Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya
		8) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,0340%	0,11%
4.	Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif	9) Persentase keluarga yang mengikuti program KB	65%	50%
5.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	10) Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12,5%	0
		11) Presentase keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan keluarga	62%	31%

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II, selain dilihat dari pencapaian indikator kinerja juga dilihat dari realisasi penggunaan anggaran. Pada Tahun 2024 DP2KBP3A Kota Sukabumi menerima total anggaran sebesar Rp. 12.507.237.357,-, yang termasuk didalamnya Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung DP2KBP3A Kota Sukabumi.

Jumlah anggaran yang terealisasi Pada Triwulan II sebesar Rp. 6.129.216.522,-, yang termasuk didalamnya Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung DP2KBP3A Kota Sukabumi. Persentase capaian realisasi anggaran tersebut mencapai 49,01%. Rekapitulasi Capaian Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2023 Triwulan II Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matrik Pengendalian DP2KBP3A kota Sukabumi
Sampai Dengan Tahun 2024 Triwulan II

NO	KODE	TUJUAN / SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB, KEGIATAN			ANGGARAN 2024	REALISASI S.D.TRIWULAN II				SUMBER DANA	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Anggaran	% Realisasi			
	1	2	3	4	5	6	7			14	15	16	17	18
	2.14	Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	SEKRETARIAT				5.869.696.434			4.075.376.631	34,58			
	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	%	100	5.869.696.434	55	55	4.075.376.631	34,58			
	2.14.01.2.01	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah (%)	%	100	4.374.300	33	33	2.874.950	65,72			
1	2.14.01.2.01.001	Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Buku	2	3.274.950	2	100	2.874.950	87,79	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Honor Narasumber walikota tidak hadir waktu FPD	Dialih diperubahan Anggaran

2	2.14.01.2.01.00 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Buku	2	599.750	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kegiatan diakhir tahun	Dilaksanakan diakhir tahun
3	2.14.01.2.01.00 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	laporan	2	499.600	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kegiatan diakhir tahun	Dilaksanakan diakhir tahun
	2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (%)	%	100	4.187.658.294	33	33	2.990.139.713	32,92			
4	2.14.01.2.02.00 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	orang/bulan	31/14	4.187.216.294	31/8	72	2.990.139.713	71,41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai setiap bulan	pembayaran setiap bulan
5	2.14.01.2.02.00 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Buku	1	221.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kegiatan diakhir tahun	Dilaksanakan diakhir tahun
6	2.14.01.2.02.00 08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Buku	1	221.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kegiatan di semester 1 akhir juni	Dilaksanakan di semester 1 akhir juni
	2.14.01.2.06	Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah (%)	%	100	549.196.000	67	67	481.127.174	71,94			

7	2.14.01.2.06.00 01	Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	3.500.000	2	50	3.499.300	99,98	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
8	2.14.01.2.06.00 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	357.000.000	3	98	347.728.000	97,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
9	2.14.01.2.06.00 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	3	2.500.000	2	60	1.075.000	43,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
10	2.14.01.2.06.00 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	2	4.000.000	2	100	2.920.000	73,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
11	2.14.01.2.06.00 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	2.640.000	0	0	600.000	22,73	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
12	2.14.01.2.06.00 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	15	21.000.000	13	96	19.960.000	95,05	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
13	2.14.01.2.06.00 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	30	158.556.000	21	67	105.344.874	66,44	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan (%)	%	100	889.964.540	50	50	389.682.392	25,04			

14	2.14.01.2.08.00 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	4/12	114.131.940	3/6	50	56.249.186	49,28	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
15	2.14.01.2.08.00 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan/ perbulan	3/12	775.832.600	3/7	50	333.433.206	42,98	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar (%)	%	100	238.503.300	92	92	211.552.402	12,55			
16	2.14.01.2.09.00 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	3	80.000.000	2	75	60.688.512	75,86	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
17	2.14.01.2.09.00 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	2	2.500.000	2	100	2.500.000	100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
18	2.14.01.2.09.00 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi (Unit)	Unit	1	156.003.300	1	100	148.363.890	95,10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.08	Tujuan : Terwujudnya Keseimbangan Gender dan Perlindungan Anak Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan	BIDANG P3A				1.217.633.410			365.277.178	16,26			

		Perempuan, Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak												
1.	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota (%)	%	79	94.350.000	33	33	15.322.580	5,19			
	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PD yang melakukan PPRG (%)	%	100	10.350.000	0	0	2.200.000	0,00			
1	2.08.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	2	5.000.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan sesuai jadwal triwulan 2,3,4	Pelaksanaan sesuai jadwal triwulan 2,3,4

2	2.08.02.2.01.003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	24	5.350.000	0	0	2.200.000	41,12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan sesuai jadwal triwulan 2,3,4	Pelaksanaan sesuai jadwal triwulan 2,3,4
	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PD yang melakukan PPRG (%)	%	79	9.000.000	50	50	4.900.000	54,44			
3	2.08.02.2.02.001		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	2	4.000.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan sesuai jadwal triwulan 2,3,4	Pelaksanaan sesuai jadwal triwulan 2,3,4
4	2.08.02.2.02.002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	Organisasi	2	5.000.000	2	100	4.900.000	98,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tidak 100% karena kebutuhan dan efisiensi anggaran	

	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota (Lembaga)	Lembaga	2	75.000.000	0	0	8.222.580	0,00			
5	2.08.02.2.03.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	Lembaga	2	75.000.000	0	0	8.222.580	10,96	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	%	0,008	183.917.050	0	0	59.197.050	14,13			
	2.08.03.02.01		pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	orang	10	25.375.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
6	2.08.03.02.01.01		koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Layanan	1	25.375.000	0	0	0	0,00	DAK Non Fisik		

	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan (Layanan)	Layanan	1	112.827.700	15	0	31.382.700	17,80			
7	2.08.03.2.02.001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	orang	10	48.222.700	3	30	24.722.700	51,27	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
8	2.08.03.2.02.002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1	64.605.000	0	0	6.660.000	10,31	DAK Non Fisik		
	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	layanan	1	45.714.350	50	50	27.814.350	12,91			

9	2.08.03.2.03.00 04		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	2	45.714.350	1	50	27.814.350	60,84	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3.	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (%)	%	72,5	451.097.510	73	73	195.604.598	18,99			
	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	Kegiatan	3	445.747.810	1	33	195.604.598	19,22			
10	2.08.04.2.01.00 01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	7	41.927.950	2	29	28.492.600	67,96	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
11	2.08.04.2.01.00 02		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Kegiatan	3	5.350.000	2	67	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

12	2.08.04.2.01.00 03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	2	398.469.860	1	50	167.111.998	41,94	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.08.04.2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota yang tersedia (Layanan)	Layanan	1	5.349.700	0	0	0	0,00			
13	2.08.04.2.03.00 01		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	Layanan	1	5.349.700	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
4.	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak (Dokumen)	Dokumen	2	24.999.900	1	1	18.599.900	74,40			
	2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah gender dan anak (Dokumen)	Dokumen	2	24.999.900	1	50	18.599.900	74,40			

14	2.08.05.2.01.00 01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Dokumen	2	24.999.900	1	50	18.599.900	74,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
5.	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak (Level)			74.089.750	Madya	Madya	15.038.750	8,81			
	2.08.06.2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (Lembaga)	Lembaga	6	74.089.750	50	50	15.038.750	8,81			
15	2.08.06.2.01.00 01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	Organisasi	10	68.739.750	5	50	15.038.750	21,88	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
16	2.08.06.2.01.00 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	2	5.350.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

6.	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota (%)	%	0,034	389.179.200	0,011	33	61.514.300	14,46			
	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak lingkup daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	9	122.032.300	0	0	8.857.300	2,95			
17	2.08.07.2.01.00 04		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	1	76.125.000	0	0	0	0,00	DAK Non Fisik		
18	2.08.07.2.01.00 05		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuman)	Kegiatan	12	45.907.300	0	0	8.857.300	19,29	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Layanan)	Layanan	1	192.776.900	1	64	51.657.000	26,80			
19	2.08.07.2.02.00 05		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	orang	26	18.901.900	23	88	13.897.000	73,52	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

20	2.08.07.2.02.00 06		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang	5	173.875.000	2	40	37.760.000	21,72	APBD dan DAK Non Fisik		
	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan (Layanan)	Layanan	1	74.370.000	0	0	1.000.000	1,34			
21	2.08.07.2.03.00 06		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	1	69.020.000	0	0	0	0,00	DAK Non Fisik		
22	2.08.07.2.03.00 08		Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (Orang)	orang	2	5.350.000	0	0	1.000.000	18,69	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Tujuan : Terkend alinya Angka Kelahir an Total Sasaran : Meningk atnya Cakupa n Peserta KB aktif	BIDANG KB				3.045.514.613			952.699.863	9,46			

3.	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB (%)	%	65	3.045.514.613	50	50	952.699.863		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Usia Nikah Pertama (Tahun)	Tahun	21	1.047.583.063	0	0	444.720.063	4,68	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)/DAK-BOKB		
1	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	85.600.000	0	0		0,00	APBD dan DAK Non Fisik		
2	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	347.200.000	1	1	152.390.000	43,89	DAK Non Fisik		
3	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	210.000.000	0	0	63.000.000	30,00	DAK Non Fisik		

4	2.14.03.2.01.00 12		Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak, elektronik dan media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	150.000.000	0	0	149.987.000	99,99	DAK No fisik		
5	2.14.03.2.01.00 13		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen	1	86.101.000	0	0	41.401.000	48,08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
6	2.14.03.2.01.00 14		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Organisasi	33	168.682.063	2,0	2,0	37.942.063	22,49	APBD dan DAK Non Fisik		
	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	%	16,5	521.470.550	0	0	49.784.000	0,05	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

7	2.14.03.2.02.00 04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	orang	33	101.990.550	0	0	49.784.000	48,81	DAK Non fisik		
8	2.14.03.2.02.00 06		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIGA	laporan	1	419.480.000	0	0		0,00	DAK FISIK		
	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP	%	23,8	986.511.150	0	0	240.449.000	18,85	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
9	2.14.03.2.03.00 01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	26.100.000	0	0	8.550.000	32,76	DAK Non fisik		

10	2.14.03.2.03.00 03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1593	898.479.000	1.000	63	192.940.000	21,47	APBD, DAK Fisik dan non fisik		
11	2.14.03.2.03.00 07		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	46	20.300.000	15	33	13.930.000	68,62	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
12	2.14.03.2.03.00 08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	3	25.459.000	1	33	8.954.000	35,17	APBD dan DAK Non fisik		
13	2.14.03.2.03.00 14		Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamildan Ibu Pasca Persalinan	Kota	1	16.173.150	0	0	16.075.000	99,39	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB	%	65	489.949.850	30	50	217.746.800	10,79	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
14	2.14.03.2.04.00 02		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	3.750.000	0	0	3.750.000	100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

15	2.14.03.2.04.00 06		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	17	486.199.850	2	12	213.996.800	44,01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Tujuan : Terkendalinya Angka Kelahiran Total Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	BIDANG PPKS				2.374.392.900			735.862.850	3,58			
	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (%)	Persen	12,5	267.539.400	0	0	113.150.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (%)	Persen	12,5	6.000.000	0	0	0	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

1	2.14.02.2.01.00 09		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	Satuan Pendidikan	2	3.000.000	0	0		0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	2.14.02.2.01.00 20		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	Dokumen	1	3.000.000	0	0		0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Diperolehnya Perkiraan Data Kuantitas Penduduk (%)	%	82	261.539.400	32	26	113.150.600	26,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3	2.14.02.2.02.00 11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	Dokumen	1	7.845.000	0	0	5.231.200	66,68	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
4	2.14.02.2.02.00 12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	2	154.943.800	1	50	61.643.800	39,78	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

5	2.14.02.2.02.00 13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	2	84.000.000	0	0	42.000.000	50,00	DAK Non Fisik		
6	2.14.02.2.02.00 19		Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	14.750.600	0	0	4.275.600	28,99	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga (%)	%	62	2.106.853.500	31	50	622.712.250	0,75	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksana Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%)	%	75	414.053.500	38	50	38.938.750	3,84	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	2.14.04.2.01.00 16		Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dokumen	2	9.600.000	0	0		0,00	DAK Non Fisik		

8	2.14.04.2.01.00 17		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Laporan	2	17.235.750	0	0	3.170.750	18,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
9	2.14.04.2.01.00 18		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Unit	25	300.000.000	0	0		0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
10	2.14.04.2.01.00 19		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Laporan	2	15.000.000	0	0	11.520.000	76,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
11	2.14.04.2.01.00 21		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	Orang	102	26.869.750	10	10	12.025.000	44,75	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

12	2.14.04.2.01.00 28		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Kelompok	14	45.348.000	2	2	12.223.000	26,95	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok UPPKS Aktif (%)	%	88	1.692.800.000	0	0	583.773.500	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
13	2.14.04.2.02.00 02		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Laporan	2	14.000.000	0	0	1.233.500	8,81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

14	2.14.04.2.02.00 03		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)	Organisasi	5	3.000.000	0	0		0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
15	2.14.04.2.02.00 05		Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Laporan	2	798.000.000	0	0	319.200.000	40,00	DAK Non Fisik		
16	2.14.04.2.02.00 06		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/keahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan			877.800.000	0	0	263.340.000	30,00	DAK Non Fisik		
J U M L A H							12.507.237.357	50	50	6.129.216.522	49,01			

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra DP2KBP3A Kota Sukabumi s/d Tahun 2024 (T-C. 29)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

[illegible]

2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang dicetak	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Laporan	0	0
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Laporan	0	0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32,9%	32,9%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangan	31 Orang	33 orang	32 orang	32 orang	32 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
			14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Buku	0	0
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Buku	0	0
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,9%	71,9%
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan kantor	10 Paket	12 jenis	16 buah	16 buah	16 buah	100%	4 paket	2 paket	50%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	-	12 item	7 item	7 item	7 item	100%	-	-	-
		Jumlah ATK yang diadakan dalam satu Tahun	-	23 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	-	-	-

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	-	-	-	4 paket	3 paket	75%
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Gas LPG yang diisi ulang	-	4 tabung	9 bulan	9 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	-	-	-	-	3 paket	3 paket	100%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy	-	1137 lembar	4347 lembar	4347 lembar	100%	-	-	-
		Jumlah jenis barang yang dicetak	-	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	2 paket	1 paket	50%
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3 jenis	3 surat kabar	3 surat kabar	100%	1 Dokumen	0	0
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack dan Makan tamu dalam satu tahun	-	50 dus;	50 dus	50 dus	100%	-	-	-
		Jumlah Snack dan Makan Rapat dalam satu tahun	-	150 dus	150 dus	150 dus	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	-	-	-	-	15 Laporan	10 Laporan	66,67%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	60 HOK	15 laporan	15 laporan	100%	-	-	-
		Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	-	104 HOK	90 HOK	90 HOK	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	-	-	-	-	30 Laporan	21 Laporan	70%
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telp, Faximile/Internet	-	60 kegiatan	60 kali	60 kali	100%	-	-	-

2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah dan Penyedia Layanan	-	100%	40%	85%	100%	-	-	-
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	80%	-	-	-	-	79%	0	0
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ARG PUG dan Anak	-	30 OPD	25 OPD	25 OPD	100%	-	-	-
		Persentase PD yang melakukan PPRG	100%	-	-	-	-	100%	0	0
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 perangkat daerah	-	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	100%	22 perangkat daerah	0	0
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan	-	100%	85%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	2 lembaga	-	-	-	-	2 lembaga	0	0
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota yang mendapat peningkatan kapasitas	-	0	100 orang	100 orang	100%	2 lembaga	0	0

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0075%	-	-	-	-	0,008%	0	0
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	-	85%	85%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	-	-	-	10 Orang	0	0
		Jumlah Fasilitas upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/ Kota	5 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten -kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perlindungan	-	85%	85%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	1 Layanan	-	-	-	-	1 layanan	0	0
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	16 Orang	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang	3 Orang	33,33%

2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Layanan	-	16 Layanan	16 Layanan	100%	1 Layanan	0	0
2.08.03.2.03	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	-	-	85%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	-	-	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Dokumen Hasil penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	-	85%	85%	100%	100%	-	-	-
		Indeks Kualitas Keluarga	72,6%	-	-	-	-	72,5%	2,83%	4,03%

2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan terbina	-	24 kelompok	28 kelompok	28 Kelompok	100%	-	-	-
		Jumlah Fasilitas upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	1 kegiatan	33,33%
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 perangkat daerah	-	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100%	7 perangkat daerah	2 perangkat daerah	28,57%
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	2 dokumen	66,67%
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	3 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah gender dan anak	3 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	3 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%

		Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Madya	Madya	Madya	100%	Madya	0	0
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	1 Lembaga	16,67%
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	9 organisasi	0	31 organisasi	31 organisasi	100%	8 organisasi	1 organisasi	12,5%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan perlindungan khusus anak	-	100%	85%	100%	100%	-	-	-
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,0335%	-	-	-	-	0,034%	0	0
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak	-	70%	85%	85%	100%	-	-	-
		Jumlah Fasilitas upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	10 kegiatan	-	-	-	-	9 kegiatan	0	0
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	Jumlah perangkat daerah mendapat advokasi	5 Perangkat daerah	-	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	100%	-	-	-
		Peningkatan Pemahaman terkait Bullying	-	-	90%	90%	100%	-	-	-

	Kab/Kota									
2.08.07.2.01.02	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
		kegiatan pencegahan tindak kekerasan yang terlaksana	-	-	25 Kasus	25 Kasus	100%	-	-	-
		Pertemuan kampanye Pencegahan KTA	-	-	150 Orang	150 Orang	100%	-	-	-
		Rakor pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	25 Orang	25 Orang	100%	-	-	-
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan pengaduan perlindungan anak	-	85%	85%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 layanan	-	-	-	-	1 layanan	1 layanan	100%
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus yang ditangani	25 orang	25 kasus	30 kasus	30 kasus	100%	-	-	-
		Terlayannya laporan kasus kekerasan anak	-	100%	85%	85%	100%	-	-	-
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	-	17 Layanan	17 Layanan	100%	-	-	-
2.08.07.2.03	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Persentase Peningkatan Lembaga Perlindungan Anak	-	100%	85%	85%	100%	-	-	-

	Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	1 Layanan	-	-	-	-	1 Layanan	0	0
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA									
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	-	82,42%	85%	85%	100%	-	-	-
		Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	25,5%	-	-	-	-	12,5%	0	0
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Diperolehnya Perkiraan Data Kuantitas Penduduk	82%	82,42%	85%	85%	100%	82%	0	0
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Sosialisasi rumah data kependudukan	-	105 orang	210 orang	210 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-

2.14.02.2.02.11	Penyedia data dan Informasi Keluarga	Cetak Data Keluarga (berisiko stunting)	-	-	1569 Rukun Tetangga (RT)	1569 Rukun Tetangga (RT)	100%	-	-	-
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%
		Sosialisasi/Ekspose Pemuktahiran data Keluarga	-	-	50 Orang	50 Orang	100%	-	-	-
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dukungan SIGA (Paket data Komunikasi di 7 Balai Penyuluh	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	0	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera II	-	75,5%	76%	76%	100%	-	-	-
		Presentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	62,2%	-	-	-	-	62%	0	0
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksana Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75,6%	75,5%	76%	76%	100%	75%	0	0
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	Kegiatan Harganas	-	-	1 Kali	1 Kali	100%	-	-	-
		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	23 kelompok	-	16 kelompok	16 kelompok	100%	-	-	-

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk								
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 unit	-	30 unit	30 unit	100%	-	-	-
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
		Penguatan Tribina (BKB, BKL,BKR) dan PIK-R	-	-	28 Kelompok	28 Kelompok	100%	-	-	-
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Terdampinginnya Calon Pengantin	-	2575 orang	591 orang	591 orang	100%	-	-	-
		Terdampingnya ibu Hamil	-	5913 orang	5913 orang	5913 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	828 Orang	-	798 Orang	798 Orang	100%	-	-	-
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sosialisasi Curling bagi BKR	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-

		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Kelompok UPPKS Aktif	88%	88%	88%	88%	100%	88%	0	0
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan Kelompok UPPKA	-	100 orang	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	-	-	-	-	2 laporan	0	0
2.14	BIDANG KELUARGA BERENCANA									
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1) Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB;	-	74,62%	67,90%	69,99%	100%	-	-	-
		2) Usia Nikah Pertama	-	22 Tahun	21,32 Tahun	21,32 Tahun	100%	-	-	-
		3) Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP;	-	29,64%	23,57%	22,51%	95,5%	-	-	-
		4) Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	-	9,24%	11,12%	10,9%	100%1	-	-	-
		Persentase keluarga yang mengikuti program KB	66,5%	-	-	-	-	65%	16,25%	25%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Usia Nikah Pertama	21 Tahun	22 Tahun	21,32 Tahun	21,32 Tahun	100%	21,32 Tahun	0	0

2.14.02.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta Kesorak PKK- KB-Kes	-	100 orang	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Pencanaan Kesorak PKK- KB Kes	-	80 orang	80 orang	80 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Pertemuan advokasi Program Bangga Kencana	-	47 orang	42 orang	42 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Rakerda (Rapat kerja daerah)	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Organisasi (Stakeholder dan Mitra Kerja) yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	33 organisasi	-	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Media Luar Ruang (Baligho)	-	6 buah	180 buah	180 buah	100%	-	-	-
		Jumlah Media Luar Ruang (spanduk)	-	336 buah	80 buah	80 buah	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta harganas	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Pencanaan TMKK	-	100 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Souvenir Kecil	-	600 buah	665 buah	665 buah	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.01.04	Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta media Luar Ruang	Tersedianya Bahan Media (Kesenian Tradisional)	-	4 kali	5 kali	5 kali	100%	-	-	-
		Tersedia bahan media KIE (Media Cetak)	-	3552 lembar	3552 lembar	3552 lembar	100%	-	-	-
		Tersedia bahan media KIE (Media elektronik)	-	500 tayang	500 tayang	500 tayang	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa								
2.14.02.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minlok)	Jumlah Peserta Minlok bangga Kencana	-	840 orang	840 orang	840 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Biaya Jasa Pramusaji	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Biaya Jasa Tenaga Keamanan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Biaya Langganan daya listrik	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Biaya operasional Penyuluh KB	-	1260 orang	1260 orang	1260 orang	100%	-	-	-
		Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan	-	1260 orang	1260 orang	1260 orang	100%	-	-	-
		Biaya Pembinaan Kader	-	630 orang	630 orang	630 orang	100%	-	-	-
		Operasional Pengolah Data	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Tersedia Laporan Audit Stunting Tk. Kota Sukabumi	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	-	-	-
		Jumlah peserta Audit Kasus Stunting	-	-	200 orang	200 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	0	0

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	16,45%	9,24%	11,12%	10,9%	100%1	16,5%	0	0
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah peserta Pembinaan IMP (PPKBD, Sub. PPKBD, Kelompok Akseptor) tentang Program KB	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3 organisasi	-	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	33 orang	-	33 orang	33 orang	100%	33 orang	0	0
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP	23,85%	29,64%	23,57%	22,51%	95,5%	23,8%	0	0
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0
		Pelaksanaan Distribusi Alkon	-	24 faskes	25 faskes	25 faskes	100%	-	-	-
		Terlaksananya Visitasi dan registrasi faskes	-	25 faskes	25 faskes	25 faskes	100%	-	-	-

2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Capaian Akseptor Implan/IUD	-	1209 orang	1600 orang	1600 orang	100%	-	-	-
		Capaian Akseptor Medis Operasional Wanita	-	56 orang	72 orang	72 orang	100%	-	-	-
		Capaian Akseptor Medis Operasional Pria	-	3 orang	3 orang	3 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1665 orang	-	1675 orang	1675 orang	100%	1593 orang	1000 orang	62,77%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	124 Orang	-	30 orang	30 orang	100%	46 orang	15 orang	32,61%
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peserta Sosialisasi Jejaring PMB	-	30 orang	30 orang	30 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Peserta Koordinasi Kesehatan Reproduksi	-	20 Faskes	20 Faskes	20 Faskes	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 laporan	-	-	-	-	3 laporan	1 laporan	33,33%
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah pertemuan Kesehatan Reproduksi dengan Kader PKK	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Pertemuan sosialisasi kesehatan reproduksi dengan karang taruna	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Pertemuan sosialisasi kesehatan reproduksi dengan MUI	-	50 orang	50 orang	50 orang	100%	-	-	-

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100 orang	-	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB;	65,5%	74,62%	67,90%	69,99%	100%	65%	0	0
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Kampung KB	-	16 Kampung KB	16 Kampung KB	100%	17 Kampung KB	2 Kampung KB	11,76%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi bekerja dan berperan sebagai pelaksana Bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan DP2KBP3A Kota Sukabumi dapat dianalisis berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2KBP3A Kota Sukabumi
Sampai Dengan Tahun 2024 Triwulan II

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn n+1)	2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n) Triwulan II	2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Usia Nikah Pertama Wanita	-	21,3 tahun	21,32 tahun	21,32 tahun	21 tahun	21 tahun	22 tahun	21,32 tahun	0	21,32 tahun	
2.	Persentase Peserta KB Aktif	-	69,99%	67,89%	67,90%	65%	65,5%	74,62%	69,99%	50%	69,99%	
3.	Persentase KB Aktif MKJP	-	22,52%	23,56%	23,57%	23,8%	23,85%	29,64%	22,52%	0	23,85%	
4.	Peserta PUS dan KB belum terlayani (Unmetneed)	-	10,9%	11,13%	11,12%	16,5%	16,45%	9,24%	10,9%	0	10,9%	
5.	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	-	-	-	-	12,5%	25,5%	-	-	0	25,5%	
6.	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	-	-	-	-	62%	62,2%	-	-	31%	62,2%	
7.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	-	-	-	-	79%	80%	-	-	33%	80%	
8.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	-	-	0,008%	0,0075%	-	-	0	0,0075%	
9.	Indeks Kualitas Keluarga	-	-	-	-	72,5%	72,6%	-	-	73%	72,6%	
10.	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	-	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	
11.	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	-	-	Madya	Madya	Madya	Nindya	Madya	Madya	Madya	Nindya	
12.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,0340%	0,035%	-	-	0,11%	0,0335%	

Sumber : RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

Kinerja pelayanan DP2KBP3A Kota Sukabumi dapat dianalisis berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional tahun 2024, tidak terdapat indikator kinerja pelayanan OPD pada DP2KBP3A Kota Sukabumi.

Realisasi capaian Indikator kinerja pelayanan DP2KBP3A Kota Sukabumi Pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024 Triwulan II yang mengacu pada Indikator pelayanan pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi 2024- 2026 dan proyeksi untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Usia Nikah Pertama Wanita pada tahun 2022 memiliki target sebesar 21,32 tahun dengan capaian kinerja sebesar 22 tahun. Kemudian pada tahun 2023 memiliki target sebesar 21,32 tahun dengan capaian kinerja sebesar 21,32 tahun. Sedangkan untuk tahun 2024 Triwulan II memiliki target sebesar 21 tahun dan belum terdapat capaian. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 adalah 21,32 Tahun seperti capaian pada tahun 2023.;
- 2) Indikator Persentase Peserta KB Aktif pada tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 74,62% dari target yang diharapkan sebesar 67,89%. Kemudian pada tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 69,99% dari target sebesar 67,9%. Sedangkan untuk tahun 2024 Triwulan II memiliki capaian kinerja baru sebesar 50% dari target sebesar 65%. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 minimal stagnan sesuai capaian tahun 2023 yaitu 69,99%.;
- 3) Persentase KB Aktif MKJP pada tahun 2022 memiliki target sebesar 23,56% dengan capaian yang diraih sebesar 29,64%. Kemudian pada tahun 2023 memiliki target sebesar 23,57% dengan capaian kinerja sebesar 22,52%. Sedangkan untuk tahun 2024 Triwulan II memiliki target sebesar 23,8% dan belum terdapat capaian kinerja. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 minimal sesuai target tahun berkaitan (2025) yaitu 23,85%.;
- 4) Peserta PUS dan KB belum terlayani (Unmetneed) dengan target Renstra DP2KBP3A Kota Sukabumi pada tahun 2022 memiliki target

sebesar 11,13% dan capaian yang diraih sebesar 9,24%. Kemudian pada tahun 2023 memiliki target sebesar 11,12% dengan capaian kinerja sebesar 10,9%. Sedangkan untuk tahun 2024 Triwulan II memiliki target sebesar 16,5% dan belum terdapat capaian kinerja. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 minimal stagnan sesuai capaian tahun 2023 yaitu 9,24%;

- 5) Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB merupakan indikator yang baru muncul pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 Triwulan II targetnya adalah 12,5% dan belum terdapat capaian kinerja. Proyeksi capaian Tahun 2025 minimal sesuai target tahun berkenaan (2025) yaitu 25,5%;
- 6) Seperti indikator sebelumnya, Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga juga baru muncul pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada tahun 2022 dan 2023. Pada Tahun 2024 Triwulan II, target untuk indikator tersebut sebesar 62% dengan capaian baru sebesar 31%. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada Tahun 2025 yaitu 62,2% sesuai target pada tahun berkenaan (2025).;
- 7) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota pun juga baru muncul pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk tahun 2024 triwulan II terdapat capaian yang baru diraih sebesar 33% dari target sebesar 79%. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 yaitu 80% sesuai target pada tahun berkenaan (2025).;
- 8) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pun juga baru muncul pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk tahun 2024 triwulan II terdapat target sebesar

0,008% yang belum terdapat capaian kinerja. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 yaitu 0,0075% sesuai target pada tahun berkenaan (2025).;

- 9) Indeks Kualitas Keluarga pun juga baru muncul pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk tahun 2024 triwulan II terdapat target sebesar 72,5% dengan capaian kinerja sebesar 73%. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 yaitu 73% sesuai realisasi capaian pada tahun sebelumnya (2024).;
- 10) Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak pada tahun 2022 tidak dilaksanakan karena terdampak *refocusing* anggaran. Kemudian pada Tahun 2023 terdapat target capaian sebesar 5 dokumen dengan capaian yang diraih sebesar 5 dokumen. Sedangkan untuk tahun 2024 Triwulan II terdapat capaian yang baru diraih sebesar 1 dokumen dari target 2 dokumen. Proyeksi Realisasi Capaian Indikator tersebut Pada tahun 2025 minimal stagnan sesuai capaian tahun 2023 yaitu 2 dokumen.;
- 11) Peningkatan Kategori Kota Layak Anak pada tahun 2022 memiliki target Madya dan capaian yang diraih adalah sesuai yang diharapkan yaitu Madya. Kemudian pada Tahun 2023 capaian yang diraih yaitu Madya dari target Madya. Sedangkan untuk Triwulan II tahun 2024 capaian yang diraih adalah Madya dari target Madya. Proyeksi realisasi capaian indikator tersebut Pada tahun 2025 yaitu Nindya sesuai target tahun berkenaan (2025).;
- 12) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota baru muncul pada RENSTRA DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 triwulan II capaiannya baru sebesar 0,11% dari target sebesar 0,0340%. Proyeksi realisasi capaian indikator tersebut Pada tahun 2025 yaitu 0,0335% sesuai target tahun berkenaan (2025).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Identifikasi isu-isu strategis dalam Renstra Dinas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Kota Sukabumi selama pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun (2024-2026).

Dalam menentukan isu strategis, DP2KBP3A Kota Sukabumi mempertimbangkan isu strategis yang telah dimiliki Kota Sukabumi dalam pembangunan pada Tahun 2024-2026 ke depan. Berikut Isu strategis yang dimiliki Kota Sukabumi Periode 2024-2026:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
2. Dampak proyek strategis nasional dan mega proyek lain;
3. Pemukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan;
4. Inovasi di Pemerintahan;
5. Pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024.

Beberapa isu strategis DP2KBP3A Kota Sukabumi yang diidentifikasi dapat berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Sukabumi serta performa pelayanan DP2KBP3A Kota Sukabumi untuk Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis yang dimiliki DP2KBP3A Kota Sukabumi pada Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional, diantaranya adalah:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
2. Penurunan Unmet Need;
3. Optimalisasi SDM Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Peningkatan Peran Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
5. Resiko Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

6. Mendorong Peran Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga.

7. Percepatan Penurunan Stunting dengan Intervensi Sensitif

Kemudian struktur organisasi DP2KBP3A Kota Sukabumi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 142 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi:

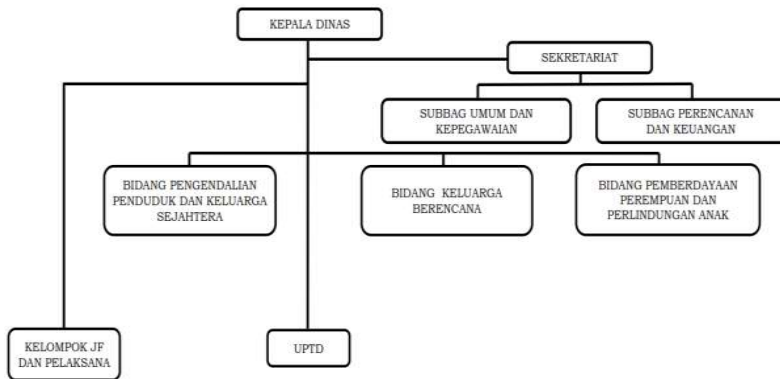
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari Kelompok JF dengan sub-substansi sebagai berikut:
 - 1) Kelompok sub-substansi peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 2) Kelompok sub-substansi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
 - 3) Kelompok sub-substansi pengendalian penduduk, data, dan informasi,
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari Kelompok JF dengan sub-substansi sebagai berikut:
 - 1) Kelompok sub-substansi pelayanan peserta keluarga berencana
 - 2) Kelompok sub-substansi kesehatan reproduksi
 - 3) Kelompok sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok JF dengan sub-substansi sebagai berikut:
 - 1) Kelompok sub-substansi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan
 - 2) Kelompok sub-substansi perlindungan perempuan dan anak
 - 3) Kelompok sub-substansi pemenuhan hak anak

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya:

- 1) Penyuluh KB
- 2) Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan (TPD/K)
- 3) Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar)

Gambar 1.1 berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi, berdasarkan Perda Kota Sukabumi No. 105 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi:



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi DP2KBP3A Kota Sukabumi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi memiliki Jumlah pegawai sebanyak 104 orang dengan rincian jenis kelamin perempuan sebesar 61 orang dan pegawai laki-laki sebesar 43 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, jumlah pegawai yang berstatus ASN sebesar 55 orang yang terbagi menjadi struktural sebesar 9 orang, Staf Pelaksana 27 orang dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebesar 19 orang. Kemudian jumlah pegawai Non ASN pada DP2KBP3A Kota Sukabumi sebesar 49 orang yang terbagi menjadi Tenaga Honorer Lepas (THL) sebesar 14 orang, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebesar 7 orang, Motivator Ketahanan Keluarga (MOTOKAR) sebesar 9 orang, Petugas

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar 11 orang, dan Teladan KB sebesar 7 orang, dan Operator Balai KB 1 orang. Berdasarkan pendidikannya, jumlah pegawai dengan Pendidikan Magister sebesar 10 orang, Sarjana sebesar 48 orang, D3 sebesar 12 orang. SMA sebesar 33 orang, dan SMP sebesar 1 orang.

Tingkat kinerja pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi sampai sejauh ini dapat dikatakan cukup lancar, dalam artian bahwa walaupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan program/kegiatan masih ditemui beberapa kendala atau hambatan namun masih dapat diatasi dengan penanganan ataupun solusi sementara secara cepat dan efisien.

Beberapa kondisi di sisi lain yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dirasakan cukup mempengaruhi performa atau kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya anggaran pemeliharaan untuk 7 (tujuh) Balai Penyuluhan KB Kecamatan;
- 2) Masih kurangnya anggaran pemeliharaan kendaraan operasional roda 4;
- 3) Masih kurangnya anggaran pendukung pelayanan KB (sebagai dana pendamping DAK) khususnya pada kegiatan momentum pelayanan KB;
- 3) Kurangnya anggaran peningkatan Kompetensi keahlian pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan khususnya Dokter dan Bidan Praktek Mandiri;
- 4) Kurangnya SDM/Tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 5) Masih kurangnya anggaran pendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Akan tetapi, dibalik permasalahan dan hambatan yang menjadi tantangan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi, juga terdapat peluang-peluang yang akan menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Telah menjalin komunikasi dan kesepakatan antar Kepala OPD untuk bekerjasama dalam menjalankan tujuan dan sasaran

Daerah;

- 2) Memiliki bank daerah yang siap menyalurkan dana CSR-nya untuk kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya masif dan membutuhkan sponsorship;
- 3) Didukung anggaran dari BKKBN terkait Biaya Operasional Keluarga Berencana serta pengadaan fisik berupa kendaraan atau beberapa kelengkapan bangunan untuk Balai Penyuluhan Keluarga Berencana berikut renovasi bangunan Balai Penyuluhan KB;
- 4) Didukung anggaran dari KEMENPPPA terkait Biaya Operasional PPPA khusus pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPd

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi dimulai pada awal Tahun sebelumnya, dengan melihat situasi kondisi serta kebutuhan program berdasarkan analisis pencapaian kinerja Tahun sebelumnya. Setelah itu barulah menampung aspirasi masyarakat melalui musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan serta tingkat Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kemudian pada pertengahan tahun tepatnya pada sekitar triwulan III terdapat opsi untuk pergeseran anggaran sesuai kebutuhan yang disusun dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja.

Pada awalnya, Terdapat 10 Program, 25 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 7.277.052.770 dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi Tahun 2024 tanpa menyertakan anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik. Kemudian setelah dimasukkannya anggaran dari DAK Non Fisik tersebut, anggaran total Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi yang resmi menjadi DPA pada Tahun 2024 adalah Rp. 12.507.237.357.

Pada pertengahan tahun 2024, terjadi pergeseran anggaran secara resmi yang dikomandoi oleh BPKPD dan BAPPEDA Kota Sukabumi

sehingga terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 12.476.812.557. Secara rinci Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan hasil kebutuhan terlihat pada tabel TC. 31 dibawah ini:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C. 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu; Nilai self assesment Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100%;	5.869.696	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu; Nilai self assesment Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100%;	5.839.271	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	4.374	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	4.374	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.274	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.274	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	599	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	599	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	499	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	499	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.187.658	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.187.658	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.187.216	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.187.216	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	221	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	221	
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	221	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	221	
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	549.196	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	549.196	

I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500	
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	357.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	377.000	
I.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2.500	
I.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000	
I.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.640	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.640	
I.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	21.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	29.750	
I.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	158.556	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	185.846	
I.4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	889.964	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	889.964	
I.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	114.131	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	139.131	
I.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	775.832	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	664.367	
I.5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	238.503	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	238.503	
I.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80.000	
I.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.500	
I.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	156.003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP2KBP3A KOTA SUKABUMI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	156.003	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota	79%	94.350	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota	79%	94.350	

II.1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		Perentase PD yang melakukan PPRG	100%	10.350	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		Perentase PD yang melakukan PPRG	100%	10.350	
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	5.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	5.000	
II.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 OPD	5.350	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 OPD	5.350	
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Perentase PD yang melakukan PPRG	30%	9.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Perentase PD yang melakukan PPRG	30%	9.000	
II.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	4.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	4.000	
II.2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Organisasi	5.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Organisasi	5.000	
II.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/ kota	2 Lembaga	75.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/ kota	2 Lembaga	75.000	
II.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	75.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	75.000	
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,008%	183.917	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,008%	183.917	
III.1.	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/ kota		Terlayani Perempuan Korban Kekerasan	80%	25.375	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/ kota		Terlayani Perempuan Korban Kekerasan	80%	25.375	
III.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program	1 dokumen	25.375	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	1 dokumen	25.375	

	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		
III.2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	1 Layanan	112.827	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	1 Layanan	112.827
III.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	48.222	Kota Sukabumi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	48.222
III.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	64.605	Kota Sukabumi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	64.605
III.3.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota		Jumlah Layanan anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1 Layanan	45.714		Jumlah Layanan anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1 Layanan	45.714
III.3.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.714	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.714
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Indeks Kualitas Keluarga	72,5%	451.097		Indeks Kualitas Keluarga	72,5%	451.097
IV.1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota	3 Kegiatan	445.747.		Jumlah Fasilitas upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota	3 Kegiatan	445.747.
IV.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah	41.927	Kota Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah	41.927
IV.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	5.350	Kota Sukabumi	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	5.350
IV.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	3 dokumen	398.469	Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	3 dokumen	398.469

	Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sukabumi	Kabupaten/Kota			Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sukabumi	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		
IV.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/ kota yang tersedia	1 Layanan	5.349	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/ kota yang tersedia	1 Layanan	5.349
IV.2.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Layanan	5.349	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Layanan	5.349
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	2 dokumen	24.999	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	2 dokumen	24.999
V.1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/ Kota		Tersedianya data terpilah gender dan anak	2 dokumen	24.999	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/ Kota		Tersedianya data terpilah gender dan anak	2 dokumen	24.999
V.1.1	Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/ kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2 Dokumen	24.999	Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/ kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2 Dokumen	24.999
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	Madya	74.089	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	Madya	74.089
VI.1.	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	6 Lembaga	74.090	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	6 Lembaga	74.090
VI.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	68.739	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	68.739
VI.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	5.350	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	5.350
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	0.034%	389.179	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	0.034%	389.179
VII.1.	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/ kota		Jumlah Fasilitasi upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	12 Kegiatan	122.032	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/ kota		Jumlah Fasilitasi upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	12 Kegiatan	122.032

VII.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	76.125	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	76.125	
VII.1.2	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kota Sukabumi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	45.907	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kota Sukabumi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	45.907	
VII.2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Layanan	192.776	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Layanan	192.776	
VII.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	18.901	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	18.901	
VII.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Sukabumi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 orang	173.875	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Sukabumi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)	5 orang	173.875	
VII.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	1 Layanan	74.370	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	1 Layanan	74.370	
VII.3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Sukabumi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 orang	69.020	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Sukabumi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 orang	69.020	
VII.3.2	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Sukabumi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Khusus	2 orang	5.350	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Sukabumi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Khusus	2 orang	5.350	
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12,5%	267.539	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12,5%	129.739	
VIII. 1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12,5%	6.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12,5%	6.000	

VIII.1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalar Nonformal dan Informal	Kota Sukabumi	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalar Nonformal dan Informal	2 Satuan Pendidikan	3.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalar Nonformal dan Informal	Kota Sukabumi	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalar Nonformal dan Informal	2 Satuan Pendidikan	3.000
VIII.1.2	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	3.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	3.000
VIII.2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Diperolehnya Perkiraan Data Kuantitas Penduduk	82%	261.539	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Diperolehnya Perkiraan Data Kuantitas Penduduk	82%	261.539
VIII.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Sukabumi	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	7.845	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Sukabumi	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	7.845
VIII.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	154.943	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	154.943
VIII.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 dokumen	84.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 dokumen	84.000
VIII.2.3	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	14.750	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	14.750
IX.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase keluarga yang mengikuti program KB	65%	3.045.514	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase keluarga yang mengikuti program KB	65%	3.045.514
IX.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Usia Nikah Pertama	21 Tahun	1.047.583	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Usia Nikah Pertama	21 Tahun	1.047.583
IX.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	85.600	Pengendalian Program KKBPK	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	85.600
IX.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	347.200	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	347.200
IX.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	1 Laporan	210.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	1 Laporan	210.000

	dan Mini Lokakarya (Minilok)		Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
IX.1.4	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000	
IX.1.5	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Sukabumi	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	86.101	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Sukabumi	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	86.101	
IX.1.6	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	33 organisasi	168.682	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	33 organisasi	168.682	
IX.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	16,5%	521.470	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	16,5%	521.470	
IX.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Sukabumi	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	33 Orang	101.990	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Sukabumi	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	33 Orang	101.990	
IX.2.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	419.480	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	419.480	
IX.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP	23,8%	986.511	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP	23,8%	986.511	
IX.3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1593 orang	898.479	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1593 orang	898.479	
IX.3.2	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	46 orang	20.300	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	46 orang	20.300	

IX.3.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 laporan	25.459	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 laporan	25.459	
IX.3.4	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kota Sukabumi	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kota	16.173	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kota Sukabumi	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kota	16.173	
IX.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB	65%	489.949	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB	65%	489.949	
IX.4.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750	
IX.4.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Sukabumi	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 kampung KB	486.199	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Sukabumi	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 kampung KB	486.199	
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	62%	2.106.853	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	62%	2.106.853	
X.1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksana Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.5%	414.053	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksana Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.5%	414.053	
X.1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Sukabumi	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan	9.600	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Sukabumi	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan	9.600	
X.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 laporan	17.235	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	2 laporan	17.235	

X.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 unit	300.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 unit	300.000	
X.1.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Sukabumi	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	102 orang	15.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Sukabumi	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	102 orang	15.000	
X.1.5	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Sukabumi	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	14 Kelompok	45.348	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Sukabumi	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	14 Kelompok	45.348	
X.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Kelompok UPPKS Aktif	88%	1.692.800	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Kelompok UPPKS Aktif	88%	1.692.800	
X.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 laporan	14.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 laporan	14.000	
X.2.2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	3.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Sukabumi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	3.000	

X.2.3	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Sukabumi	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	798.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Sukabumi	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	798.000	
-------	---	---------------	---	-----------	---------	---	---------------	---	-----------	---------	--

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung upaya-upaya pembangunan daya saing Kota Sukabumi terutama dalam melakukan pembangunan Kota Sukabumi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera diperlukan anggaran biaya yang cukup yang dikemas dalam bentuk rencana kerja. Pembiayaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 diusulkan dari berbagai sumber anggaran yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Sukabumi
Tahun 2024 (TC. 34)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana Strategis OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak							7.277.052.770	12.507.237.357	12.476.812.557							18.270.111.765
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.277.052.770	12.507.237.357	12.476.812.557							18.270.111.765
	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							791.634.333	1.217.633.410	1.217.633.410							2.571.969.860
1	2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	174.350.000	94.350.000	94.350.000							396.000.000
	2	8	2	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PD yang Melakukan PPRG	-			-	100%	10.350.000	10.350.000	10.350.000			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	SKPD		66.000.000
	2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa				33.000.000
	2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG															

						Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Peringkat Daerah	24 Peringkat Daerah	5.350.000	5.350.000	5.350.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa				33.000.000
	2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan	-			-	30%	9.000.000	9.000.000	9.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Masyarakat		110.000.000
	2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa				55.000.000
	2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Organisasi	2 Organisasi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa				55.000.000
	2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	-			-	2 Lembaga	155.000.000	75.000.000	75.000.000			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Masyarakat		220.000.000

[illegible]

						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia					0 Dokumen	2 Dokumen	5.350.000	5.350.000	5.350.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			346.500,00
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Dokumen	3 Dokumen	298.469.860	398.469.860	398.469.860	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			398.469.860	
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota yang tersedia (Layanan)	-			-	1 layanan	5.350.000	5.349.700	5.349.700			Meningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Kelompok keluarga		93.500,000	
	2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
					Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					0 Layanan	1 Layanan	5.350.000	5.349.700	5.349.700	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			93.500,000	
4	2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak				-	2 Dokumen	25.000,000	24.999,900	24.999,900							88.000,000	

2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah gender dan anak	-				2 Dokumen	25.000.000	24.999.900	24.999.900			-	-	SKPD		88.000.000
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	24.999.900	24.999.900	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.000.000
5	2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	-			-	Madya	74.090.000	74.089.750	74.089.750							116.000.000
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	-			-	6 Lembaga	74.090.000	74.089.750	74.089.750			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah dan Dunia Usaha		116.000.000
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 Organisasi	10 Organisasi	68.740.000	68.739.750	68.739.750	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			110.000.000
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	2 Dokumen	5.350.000	5.350.000	5.350.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			6.000.000
6	2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	-			-	0,03%	73.159.200	389.179.200	389.179.200							770.500.000

2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak lingkup daerah Kabupaten/Kota	-				12 Kegiatan	45.907.300	122.032.300	122.032.300			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Anak Korban Kekerasan	173.500.000
2	8	7	2.01	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA															
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	1 Orang	0	76.125.000	76.125.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		80.000.000
2	8	7	2.01	5	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota															
						Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				0 Dokuman	1 Dokuman	45.907.300	45.907.300	45.907.300	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		93.500.000
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Layanan)	-			-	1 Layanan	21.901.900	192.776.900	192.776.900			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Anak	385.000.000
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				0 Orang	26 Orang	18.901.900	18.901.900	18.901.900	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		55.000.000
2	8	7	2.02	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK															
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				0 Orang	5 Orang	3.000.000	173.875.000	173.875.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		330.000.000

2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan (Layanan)	-				1 layanan	5.350.000	74.370.000	74.370.000			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	anak		212.000.000
2	8	7	2.03	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	1 Orang	0	69.020.000	69.020.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			80.000.000
2	8	7	2.03	8	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																
						Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				0 Orang	2 Orang	5.350.000	5.350.000	5.350.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			132.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6.485.418.437	11.289.603.947	11.259.179.147							15.698.141.905
7	2	14	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.069.019.012	5.869.696.434	5.839.271.634							8.947.908.300
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	-			-	3 Dokumen	4.374.550	4.374.300	4.374.300			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	SKPD		77.000.000
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2 Dokumen	3.275.000	3.274.950	3.274.950	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			55.000.000
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	2 Laporan	599.950	599.750	599.750	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			11.000.000

2	1	1	2.	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	4		01		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	2 Laporan	499.600	499.600	499.600	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		11.000.000
2	1	1	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	3 Dokumen	4.897.995.522	4.187.658.294	4.187.658.294			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	SKPD	6.603.908.300
2	1	1	2.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	4		02		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.897.553.322	4.187.216.294	4.187.216.294	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		6.597.308.300
2	1	1	2.	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
	4		02		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	221.000	221.000	221.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.300.000
2	1	1	2.	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
	4		02		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	1 Dokumen	221.200	221.000	221.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		3.300.000
2	1	1	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	-		-	3 Dokumen	277.196.000	549.196.000	549.196.000			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	SKPD	606.000.000
2	1	1	2.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	4		06		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		38.500.000
2	1	1	2.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	4		06		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	5 Paket	85.000.000	357.000.000	377.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		100.000.000

2	1	1	2.	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	4		06		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		27.500.000
2	1	1	2.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	4		06		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		33.000.000
2	1	1	2.	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	4		06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000	2.640.000	2.640.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		22.000.000
2	1	1	2.	8	Fasilitas Kunjungan Tamu														
	4		06		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	15 Laporan	21.000.000	21.000.000	29.750.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		55.000.000
2	1	1	2.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	4		06		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	30 Laporan	158.556.000	158.556.000	185.846.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		330.000.000
2	1	1	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	-		-	100%	756.952.940	889.964.540	889.964.540			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	SKPD	1.089.000.000
2	1	1	2.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	4		08		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	94.131.940	114.131.940	139.131.940	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		154.000.000
2	1	1	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	4		08		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	3 Laporan	662.821.000	775.832.600	664.367.800	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		935.000.000
2	1	1	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	-		-	100%	132.500.000	238.503.300	238.503.300			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	SKPD	572.000.000

						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			25.000.000
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Diperolehnya Perkiraan Data Kuantitas Penduduk	-			-	82%	123.739.400	261.539.400	261.539.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Masyarakat		269.000.000
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	1 Dokumen	7.845.000	7.845.000	7.845.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			44.000.000
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	2 Laporan	101.143.800	154.943.800	154.943.800	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			170.000.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	2 Dokumen	0	84.000.000	84.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			0
2	14	2	2.02	19	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																
						Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				0 Dokumen	1 Dokumen	14.750.600	14.750.600	14.750.600	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			55.000.000

9	2	1	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-					-	-	135.206.3 75	3.045.514. 613	3.045.514. 613							3.353.633. 605
	2	1	3	2.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk da KB	-				-	6 Kegiatan	55.333.06 3	1.047.583. 063	1.047.583. 063			-	Optimali sasi Sektor Perdaga ngan dan Jasa	Pasanga n Usia Subur		1.189.000. 000
	2	1	3	2.	8	Pengendalian Program KKBPK																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				0 Laporan	1 Laporan	5.600.000	85.600.00 0	85.600.00 0	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	Optimali sasi Sektor Perdaga ngan dan Jasa				110.000.0 00	
	2	1	3	2.	9	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																	
						Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	-				0	
	2	1	3	2.	1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																	
					0	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	1 Laporan	0	347.200.0 00	347.200.0 00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	-				400.000.0 00	
	2	1	3	2.	1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
					1	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0 Laporan	1 Laporan	0	210.000.0 00	210.000.0 00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	-				300.000.0 00	

						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					0 Organisasi	1 Organisasi	2.990.812	0	0	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			0	
	2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					-	1 Laporan	0	419.480.000	436.930.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			500.000.000	
																	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar						
	2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP	-			-	23,80%	42.682.500	986.511.150	986.511.150			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	PUS, Petugas PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, Fasyankes			1.013.500.000
	2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
	2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					0 Orang	1593 Orang	2.800.000	898.479.000	898.479.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			825.000.000	
																	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar						

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kota Sukabumi Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah kegiatan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi untuk mengembangkan dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi DP2KBP3A, Visi Misi Pemerintah Kota Sukabumi (Wali kota dan Wakil Wali kota) dan Visi dan Misi Kota Sukabumi.

Yang perlu mendapat perhatian untuk dapat mencapai apa yang diharapkan diantaranya peningkatan kualitas PKB/PLKB dan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) disamping pemenuhan anggaran yang dibutuhkan, sehingga kendala-kendala teknis dapat segera teratasi dengan baik dan kelangsungan program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

Selanjutnya rencana tindak lanjut dari semua Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sempurna jika permasalahan teknis dari awal sudah dapat diantisipasi dengan baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tatanan aturan yang berlaku

H. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

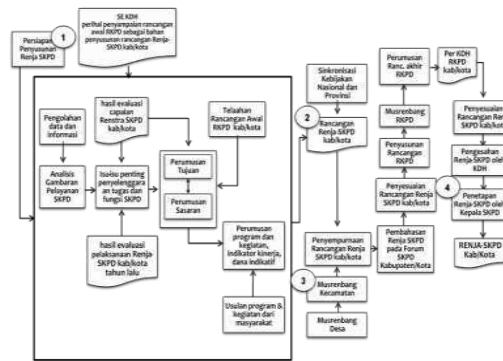
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Dinas merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum OPD; dan (4) Penetapan Renja.

Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Sukabumi dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 proses penyusunan Renja dapat digambarkan pada bagan sebagaimana berikut:

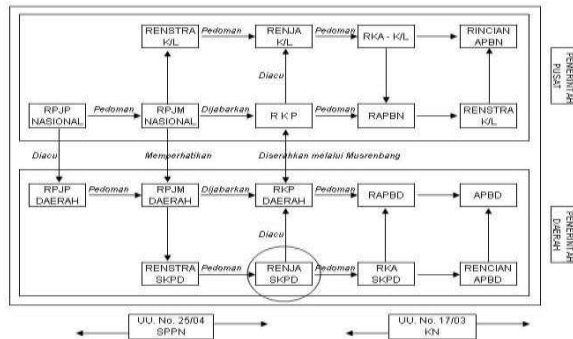


Gambar 1. 1
Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Perubahan Renja DLH Kota Sukabumi sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kota Sukabumi, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional:



Gambar 1. 2
Hubungan RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa : perubahan RPKD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RPKD berkenaan; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun hal teraktual lain dan arah kebijakan yang melatarbelakangi Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi pada Tahun anggaran 2024 ini, sebagai berikut:

- Proses penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perubahan Renja dimaksud adalah:

- a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan;
 - b. Pergeseran anggaran pada rekening antar kegiatan; dan
 - c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.
- 2) Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diperlukan untuk optimalisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Renja Dinas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 65);
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 63);
22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 14);
23. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 144);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 29);
26. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024; dan

27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Dinas;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Dinas yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Semester I tahun 2024 dan Capaian Renstra.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan dan Pendanaan;

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menggambarkan mengenai kesimpulan yang didapat pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Evaluasi Renja sampai dengan Semester I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-6 dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

- Misi ke 6 : Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
- Tujuan ke 3 : Terwujudnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan
- Sasaran : Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Dalam rangka mencapai Misi ke 6 Kota Sukabumi serta sesuai dengan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi pada tahun 2024 melaksanakan 10 program, 18 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan sampai dengan Semester I
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.634.601.681	14.413.597.915	54,12
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.998.800	28.581.000	20,56
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.999.900	27.023.500	87,17
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.700	212.500	42,53
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.900	-	0,00
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	499.700	-	0,00
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	499.600	-	0,00
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.000.000	-	0,00
1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	1.345.000	33,63
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.064.074.931	5.537.516.781	55,02
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.063.175.481	5.537.516.781	55,03
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	399.950	-	0,00
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	499.500	-	0,00
1.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	212.500.000	204.580.000	96,27
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	212.500.000	204.580.000	96,27
1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.512.700	220.835.384	67,84
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	6.360.000	63,60
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.446.500	23.532.250	61,21
1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.742.000	7.192.000	66,95
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.333.200	21.906.110	38,89
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.032.000	5.250.000	37,41
1.4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.990.000	27.690.000	89,35
1.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.969.000	121.439.024	80,98
1.4.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.000.000	7.466.000	49,77

1.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.325.000	121.939.540	94,29
1.5.1.	Pengadaan Mebel	31.145.000	27.267.640	87,55
1.5.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.180.000	94.671.900	96,43
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.821.011.300	5.208.679.660	53,04
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.770.000	10.500.000	82,22
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.619.300	76.650.842	47,14
1.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.193.978.000	4.894.077.946	53,23
1.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.644.000	227.450.872	50,36
1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.943.178.950	3.091.465.550	52,02
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.690.000	106.082.139	26,88
1.7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.327.986.950	2.775.806.731	52,10
1.7.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.570.000	10.880.000	52,89
1.7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.932.000	198.696.680	99,38
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	314.195.550	105.854.800	33,69
2.1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	178.670.800	104.703.900	58,60
2.1.1.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	117.277.000	88.682.000	75,62
2.1.2.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	61.393.800	16.021.900	26,10
2.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	135.524.750	1.150.900	0,85
2.2.1.	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	135.524.750	1.150.900	0,85
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.637.489.400	102.328.036	6,25
3.1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.611.032.900	93.608.036	5,81
3.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.570.422.900	93.608.036	5,96

3.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40.610.000	-	0,00
3.2.	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	26.456.500	8.720.000	32,96
3.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	21.241.500	4.500.000	21,18
3.2.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	5.215.000	4.220.000	80,92
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	237.703.450	207.788.707	87,42
4.1.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	237.703.450	207.788.707	87,42
4.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10.000.000	-	0,00
4.1.2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.703.600	-	0,00
4.1.3.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	224.999.850	207.788.707	92,35
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAYAH DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.980.000	21.025.000	87,68
5.1.	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.980.000	21.025.000	87,68
5.1.1.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemnuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23.980.000	21.025.000	87,68
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	41.263.100	16.363.500	39,66
6.1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.263.100	16.363.500	39,66
6.1.1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	26.645.350	2.230.000	8,37
6.1.2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.617.750	14.133.500	96,69

7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.500.000	1.593.000	3,66
7.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.500.000	1.593.000	3,66
7.1.1.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	43.500.000	1.593.000	3,66
8.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21.731.100	9.381.000	43,17
8.1.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.731.100	9.381.000	43,17
8.1.1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	21.731.100	9.381.000	43,17
9.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	54.483.650	9.316.600	17,10
9.1.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	54.483.650	9.316.600	17,10
9.1.1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	37.999.900	3.933.000	10,35
9.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	16.483.750	5.383.600	32,66
10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.409.538.686	1.348.410.651	14,33
10.1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	9.409.538.686	1.348.410.651	14,33
10.1.1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.722.500	216.942.250	72,14
10.1.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.261.437.286	541.628.951	6,56
10.1.3.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	90.000.000	-	0,00

10.1.4.	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	500.000.000	380.839.950	76,17
---------	--	-------------	-------------	-------

10.1.5.	Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah	257.378.900	208.999.500	81,20
TOTAL		38.418.486.617	16.235.659.209	42,26

Total anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN dan belanja langsung yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi sebesar Rp. 38.418.486.617 dengan realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.235.659.209 (42,26%).

Rincian untuk belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 5.537.516.781 (34,11% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp. 10.698.142.428 (65,89% dari total realisasi), adapun rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung adalah:

- 1) Program utama sebesar Rp. 1.822.061.294 (15,46% dari total anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 11.783.884.936).
- 2) Program pendukung sebesar Rp. 8.876.081.134 (53,56% dari total anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 16.571.426.200).

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, terdapat beberapa catatan penting, antara lain:

1. Dari 10 indikator program sebanyak 7 indikator belum memenuhi target kinerja, sedangkan dari 20 indikator kegiatan sebanyak 16 indikator belum memenuhi target kinerja, dan dari 51 indikator sub kegiatan sebanyak 36 indikator yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Belum Memenuhi Target Kinerja

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
2.11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	62,40
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	38,57

2.11.01.2.01.01	Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	85,71
-----------------	-------------------------------	-------------------	---	-------

2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	60,00
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	64,44
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93,33
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	00,00
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	81,29
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0,35
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	37,50

2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5,00
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70,00
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	37,50
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50,00
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	77,48
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92,77
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17,14
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40,00
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen RPPLH, DIKPLHD, IKLH dan Indeks Kenyamanan	50,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	66,67
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0,00
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	0,00

2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	99,25
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	31,25
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0,00
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas air sungai	0,00
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	0,00
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks RTH	0,00
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	0,00
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0,00
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0,00

2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	25,58
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	25,60
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12,50
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup memenuhi baku mutu	25,58
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	45,45
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	0,00

2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	0,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	95,00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	88,89
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	62,63
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	76,62
		Persentase pengurangan sampah	44,64
		Jumlah sampah yang masuk ke TPA	65,08
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	60,00
2.11.11.2.01.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0,00
2.11.11.2.01.12	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	25,05
2.11.11.2.01.19	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah Sampah yang Terdaur Ulang	58,72

2. Dari 10 indikator program sebanyak 3 indikator telah memenuhi target kinerja, sedangkan dari 20 indikator kegiatan sebanyak 4 indikator memenuhi target kinerja, dan dari 51 indikator sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah sebanyak 15 indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
2.11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	100,00
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	100,00
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	300,00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	300,00

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	300,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	600,00
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300,00
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non PNS (THL) yang mendapatkan gaji	600,00
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
2.11.03.2.03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Dengan Dampak di Kabupaten/Kota	100,00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	Persentase limbah B3	100,00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3	100,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	100,00

2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	140,00
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	136,36
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti penyuluhan lingkungan hidup	409,09
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diverifikasi	100,00
2.11.10.2.01.06	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00

3. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:

- a. Kurangnya analisis dalam menentukan target kinerja yang direncanakan sehingga tidak dapat terealisasi;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, faktor yang memengaruhinya dokumen pengujian air masih dalam tahap musim pertama;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, faktor yang memengaruhinya dokumen untuk gas rumah kaca (GRK) belum disusun;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota, faktor yang memengaruhinya

- dokumen untuk kegiatan proklim sudah disusun tetapi dikarenakan akan ada proklim tahap 2, maka dokumennya akan diperbaharui;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran, kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke IV;
 - f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), terdapat 2 sub kegiatan yang belum dapat terealisasi hingga semester I dikarenakan dokumen DPA tidak sesuai yaitu sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - g. Adanya Kerjasama dengan semua pihak dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 62,40%. Dari 7 (tujuh) kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan yang sudah tercapai sebesar 100% yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 40,00%. Dari 2 (dua) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan;
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 100%. Dari 2 (dua) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan;
 - d. Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 0%. Dari 1 (satu) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan.
 - e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 100% dan

kegiatan yang telah direncanakan telah mencapai 100% atau sebesar 250% tingkat capaian realisasi target Renstra;

- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 25,58%. Dari 1 (satu) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan.
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 45,00%. Dari 1 (satu) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan.
 - h. Program penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 0%. Dari 1 (satu) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan.
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 0%. Dari 1 (satu) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan.
 - j. Program Pengelolaan Persampahan yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sampai dengan Semester I yaitu sebesar 0%. Dari 3 (satu) kegiatan belum ada yang mencapai target yang telah ditentukan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:
- a. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
 - 1) Mengevaluasi kembali langkah-langkah dalam pencapaian target kinerja;
 - 2) Mengkoreksi dan melakukan perubahan terhadap hal yang menjadi tidak terpenuhinya target kinerja;

- 3) Melakukan konsolidasi. Konsolidasi bisa dilakukan dengan pihak internal atau eksternal. Konsolidasi ini diperlukan untuk strategi dalam mencapai target kinerja;
- 4) Meningkatkan disiplin kinerja aparatur sehingga kinerja dapat terealisasi;
- b. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
 - 1) Tetap konsistensi terhadap perencanaan dalam memenuhi target kinerja dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Kota Sukabumi;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak sehingga kinerja dapat terealisasi;
 - 3) Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai rencana yang ditargetkan;
- c. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
 - 1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain, sebagai bahan analisa dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai, sehingga disesuaikan dengan analisa kebutuhan di lapangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2. 4 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Semester II
Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023 dan Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.02.	Lingkungan Hidup									
2.11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	62,40%	62,40%

2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	-	-	-	-	100%	38,57%	38,57%
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun	7 dokumen	8 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	2 dokumen	15,38%
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	-	-	-

		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33,33%
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	-	-	-

		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 laporan	-	-	-	-	5 laporan	3 laporan	20,00%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan SPIP yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	-	-	-	-	5 laporan	3 laporan	20,00%
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-

		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	-	-	-	100%	64,44%	64,44%
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangan 14 bulan	128 orang/bulan	100 orang/bulan	89 orang/bulan	89 orang/bulan	100,00%	-	-	-
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	90 orang/bulan	-	-	-	-	90 orang/bulan	84 orang/bulan	93,33%
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	33,33%
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	-	-	-

		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	0 laporan	0%
2.11.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang pengguna semesteran yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100,00%
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	33,33%
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-

		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	-	-	-	-	100%	81,29%	81,29%
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah/jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	22 jenis	22 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	-	-	-	-	1 paket	2 paket	66,67%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis alat dan bahan kebersihan yang dibeli	44 jenis	44 jenis	23 jenis	23 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah/jenis alat tulis kantor yang dibeli	42 jenis	42 jenis	24 jenis	24 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	-	-	-	-	2 paket	6 paket	100,00%
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli/disewa	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	-	-	-

		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	-	-	-	-	2 paket	6 paket	100,00%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	19 jenis	4 jenis	13 jenis	13 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	-	-	-	-	2 paket	6 paket	100,00%
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	188 exp	188 exp	3.508 exp	3.508 exp	100,00%	-	-	-
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	5.184 dokumen	-	-	-	-	1.728 dokumen	6 dokumen	0,116%
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	6 laporan	200,00%

2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	150 HOK	1.464 HOK	511 HOK	511 HOK	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 laporan	-	-	-	-	2 laporan	1 laporan	16,67%
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 dokumen	-	-	-	-	2 laporan	1 laporan	16,67%
2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	-	-	-	-	100%	37,50%	37,50%
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	120 unit	-	-	-	-	40 unit	2 unit	1,67%
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah alat studio yang dibeli	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 unit					10 unit	7 unit	22,58%

2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	-	-	-	-	100%	37,50%	37,50%
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen kontrak kerja Non PNS	1.900 materai	1.690 materai	1.000 materai	1.000 materai	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	0 laporan	0%
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening/jenis jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	-	-	-	-	4 laporan	2 laporan	16,67%
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pegawai non PNS (POK dan Musiman) yang mendapatkan gaji	430 orang	370 orang	370 orang	370 orang	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	0 laporan	0%

		peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non PNS (THL) yang mendapatkan gaji	28 orang	19 orang	17 orang	17 orang	100,00%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	6 laporan	200,00%
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	77,48%	77,48%
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	-	-	-	-	26 unit	26 unit	100,00%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara	310 kendaraan	101 kendaraan	102 kendaraan	102 kendaraan	100,00%	-	-	-

		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	83 unit	-	-	-	-	83 unit	77 unit	92,77%
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diperbaiki	39 unit	39 unit	28 unit	28 unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	-	-	-	-	35 unit	6 unit	15,00%
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan lokasi gedung kantor yang dipelihara	4 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	-	-	-
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	33,33%
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup	100%	50%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	100%	-	-	-	-	100%	40%	40,00%
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan	100%	50%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase Penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Jumlah ketersediaan dokumen RPPLH, DIKPLHD, IKLH dan Indeks Kenyamanan	12 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	2 dokumen	16,67%
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan indeks kualitas lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-

		Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-	-	-
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	---

		lingkungan hidup daerah								
		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	9 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	2 dokumen	22,22%
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	100%	-	-	-	-	100%	0%	0%
2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%

2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase pengendalian pencemaran air	17%	16,67%	17%	16,67%	98,06%	-	-	-
---------	--	--	-----	--------	-----	--------	--------	---	---	---

	Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran udara	80%	81,25%	80%	100%	125,00%	-	-	-
		Indeks Kenyamanan	Predikat Nyaman	-	-	-	-	Predikat Nyaman	Predikat Nyaman	100,00%
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Air Sungai	17%	16,67%	17%	27,58%	162,24%	-	-	-
		Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	80%	81,25%	80%	100%	125,00%	-	-	-
		Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi	7%	6%	7%	7%	100,00%	-	-	-
		Persentase capaian kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	100%	-	-	-	-	100%	31,25%	31,25%

2.11.03.2.01.01	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	7 titik	8 titik	8 titik	8 titik	114,29%	-	-	-
-----------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

	Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Jumlah titik lokasi pengujian kualitas sungai	29 titik lokasi	29 titik lokasi	29 titik lokasi	29 titik lokasi	100,00%	-	-	-
		Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	6 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.03.2.01.02	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah energi baru terbarukan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah lokasi yang masyarakatnya menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan	26 RW	22 RW	24 RW	23 RW	95,83%	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%

2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan dan/atau Pencemaran	Persentase capaian kualitas udara	80%	81,25%	80%	100%	125,00%	-	-	-
--------------	--	-----------------------------------	-----	--------	-----	------	---------	---	---	---

	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ambien memenuhi baku mutu								
		Persentase Peningkatan Kualitas Air Sungai	17%	16,67%	17%	27,58%	119,05%	-	-	-
		Persentase peningkatan kualitas air sungai	100%	-	-	-	-	100%	0%	0%
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah lokasi pengujian emisi kendaraan bermotor	3 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah RW yang berbudaya lingkungan	2 RW	2 RW	2 RW	1 RW	50,00%	-	-	-
2.11.03.2.03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	5 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	20,00%

	Kabupaten/Kota	pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota								
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Indeks RTH	26,5 m ² /orang	-	-	-	-	25,5 m ² /orang	0 m ² /orang	0%
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	-	-	-	-	100%	0%	0%
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah roadshow pengelolaan keanekaragaman hayati	33 kelurahan	2 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100,00%	-	-	-
		Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Jumlah penanaman pohon pada area-area konservasi	2 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00%	-	-	-

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	20 orang	-	-	-	-	10 orang	0 orang	0%
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	3 unit	-	-	-	-	1 unit	0 unit	0%
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	11%	41,46%	12%	20%	166,67%	-	-	-
		Persentase limbah B3	100%	-	-	-	-	100%	100%	100,00%
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	40%	-	-	-	-	40%	100%	250,00%
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3	15 laporan	-	-	-	-	5 laporan	7 laporan	46,67%

2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terkumpulnya B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik	11%	41,46%	12%	20%	166,67%	-	-	-
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. Pengolahan. dan/atau Penimbunan	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diverifikasi	20 pelaku usaha/kegiatan	17 pelaku usaha/kegiatan	20 pelaku usaha/kegiatan	10 pelaku usaha/kegiatan	50,00%	-	-	-
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	92,11%	100%	70%	70,00%	-	-	-
		Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	-	-	-	-	100%	25,58%	25,58%

2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	10%	9,2%	10%	7%	70,00%	-	-	-
		Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	9%	4,74%	9%	4,95%	55%	-	-	-
		Persentase pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	10%	-	-	-	-	10%	2,56%	2,56%
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi lingkungan hidup yang dikeluarkan	55 dokumen	24 dokumen	22 dokumen	11 dokumen	50,00%	-	-	-
		Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	28 dokumen	-	-	-	-	24 dokumen	3 dokumen	10,71%

2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lngkungan hidup memenuhi baku mutu	63%	47%	50%	52,5%	103%	-	-	-
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	48 badan usaha	-	-	-	-	43 badan usaha	11 badan usaha	22,92%
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	-	-	-	-	33%	45%	45,00%
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti penyuluhan lingkungan hidup	33 lembaga	-	-	-	-	11 lembaga	45 lembaga	136,36%

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan dan Penyuluhan Lingkungan Kampanye Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	330 orang	-	-	-	-	110 orang	50 orang	15,16%
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	14%	11,43%	14%	11,14%	79,57%	-	-	-
		Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	75%	-	-	-	-	25%	0%	0%
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	22%	20%	22%	20%	90,91%	-	-	-
		Persentase jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	23,5%	-	-	-	-	22,5%	0%	0%
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Program Adiwiyata)	40 sekolah	38 sekolah	40 sekolah	38 sekolah	95,00%	-	-	-
		Jumlah anggota saka kalpataru	60 orang	0 orang	60 orang	0 orang	0,00%	-	-	-

		Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	42 entitas	-	-	-	-	40 entitas	38 entitas	83,33%
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran	20%	20%	20%	25,99%	129,95%	-	-	-
		Persentase pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diverifikasi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100,00%
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-

2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi. Penyelesaian Sengketa dan/atau Penytidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah masyarakat dan/atau pelaku usaha yang diberikan sosialisasi pengaduan dan penataan hukum lingkungan	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	80 pelaku usaha dan/atau kegiatan	80 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100,00%	-	-	-
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	27 pengaduan	-	-	-	-	9 pengaduan	8 pengaduan	29,63%
2.11.10.2.01.06	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	21 perkara	-	-	-	-	7 perkara	7 perkara	33,33%
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	27%	26,1%	27%	26,01	96,3%	-	-	-
		Persentase penanganan kebersihan	74%	73,76%	72%	73,76%	102,44%	-	-	-

		Cakupan pengelolaan sampah	100%	-	-	-	-	99,00%	62%	62,00%
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase pelayanan kebersihan	67%	100%	67%	73,76%	110%	-	-	-
		Persentase Pemrosesan Akhir Sampah	100%	88%	100%	100%	100,00%	-	-	-
		Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	15%	1,41%	15%	4,20%	28,00%	-	-	-
		Persentase penanganan sampah	69%	-	-	-	-	71%	54,4%	78,84%
		Persentase pengurangan sampah	31%	-	-	-	-	28%	12,5%	40,32%
		Jumlah sampah yang masuk ke TPA	64.100 ton/tahun	-	-	-	-	64.500 ton/tahun	41.975 ton/tahun	65,48%
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan sampah kota	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-	-	-
		Nilai perolehan Adipura	75 nilai	75 nilai	75 nilai	0 nilai	0,00%	-	-	-
		Jumlah wilayah peduli lingkungan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100,00%	-	-	-

2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah teknologi pengelolaan sampah yang dimanfaatkan	3 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00%	-	-	-
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaen/Kota	Jumlah data TPS/bukit tinggi/tempat sampah komunal/kontainer	33 kelurahan	33 kelurahan	33 kelurahan	33 kelurahan	100,00%	-	-	-
		Jumlah data angkutan dan daya angkut kendaraan roda empat atau lebih	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah data angkutan dan daya angkut kendaraan roda tiga	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah data angkutan dan daya angkut dari penyapu di jalan raya	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pemukiman yang melakukan pengelolaan sampah	33 lokasi	1 lokasi	33 lokasi	13 lokasi	39%	-	-	-
		Jumlah metode pengurangan sampah di sumber	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	-	-	-
		TPS3R terbaik	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00%	-	-	-

		Bank sampah terbaik	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00%	-	-	-
		Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	6 kelompok	-	-	-	-	2 kelompok	1 kelompok	16,67%
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	13.179,15 ton/tahun	17.624,75 ton/tahun	12.260,00 ton/tahun	11.965,00 ton/tahun	97,59%	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	75,00%	-	-	-
		Luasan TPA terbangun	7 ha	9,9 ha	9,8 Ha	10,7 Ha	109,18%	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	7 unit	-	-	-	-	5 unit	3 unit	42,86%
2.11.11.2.01.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	6 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	0 dokumen	0%

2.11.11.2.01.12	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	67.163,78 ton/tahun	-	-	-	-	66.564,70 ton/tahun	16.674,282 ton/tahun	24,83%
2.11.11.2.01.19	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah Sampah yang Terdaur Ulang	20.149,13 ton/tahun	-	-	-	-	18.638,12 ton/tahun	10.944 ton/tahun	54,32%
2.11.11.2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase prosedur izin pengelolaan sampah oleh pihak swasta	70%	0%	0%	0%	0,00%	-	-	-
2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aturan terkait layanan izin daur ulang	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0,00%	-	-	-
2.11.11.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pihak swasta	80%	23,08%	80%	100%	125,00%	-	-	-
2.11.11.2.02.01	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah pembinaan terhadap TPS3R/Bank Sampah/Rumah Kompos/RDF yang beroperasi	10 lokasi	3 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	100,00%	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Tahun 2024-2026, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas, dan/atau indikator lainnya seperti IKK ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas yaitu pelayanan berbasis Non SPM bidang lingkungan, karena berdasarkan urusan pemerintahan Daerah, Dinas ini bukan merupakan bagian dari urusan pelayanan dasar sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas tidak memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yang telah ditetapkan. Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2024, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Lingkungan Hidup yang dapat terukur hanya indikator Cakupan wilayah pelayanan persampahan sedangkan untuk indikator Persentase pemenuhan indeks kenyamanan lingkungan hidup, Persentase ruang terbuka hijau, dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup baru dapat diukur pada akhir tahun 2024.

Keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Dinas dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2. 5 (T-C.30.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks kualitas Air (IKA)	-	-	60,51 poin	61,51 poin	-	-	54,48 poin	52,76 poin	-	-	
2.	Indeks kualitas Udara (IKU)	-	-	77,39 poin	78,39 poin	-	-	83,01 poin	84,24 poin	-	-	
3.	Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	22,38 poin	22,38 poin	-	-	25,57 poin	27,62 poin	-	-	
4.	Persentase Pengelolaan Sampah	-	-	68%	69%	-	-	99,86%	99,22%	-	-	
5.	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	-	-	-	-	343 RW	349 RW	-	-	343 RW	349 RW	
6.	Persentase pemenuhan indeks kenyamanan lingkungan hidup	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
7.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	21,24%	21,25%	-	-	21,24%	21,25%	
8.	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	73,00 poin	73,27 poin	72,81 poin	74,31 poin	75,00 poin	75,31 poin	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi selama kurun waktu terakhir ini. Namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik), kerusakan lahan kritis, serta dampak perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada masa sekarang masih akan dihadapkan pada persoalan persampahan, diperlukan suatu alternatif penanganan sampah, masih banyaknya buangan liar ataupun cecean sampah di sepanjang jalan protokol, pasar-pasar maupun TPS. Sehingga diperlukan suatu upaya/solusi untuk menangani permasalahan sampah di Kota Sukabumi.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan urusan wajib lingkungan hidup.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Sukabumi meliputi jenis pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Capaian Tingkat Kinerja Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Capaian	
		2023	2024 (s/d semester I)
1	Pelayanan kebersihan	66.783,46 ton/tahun (sampah terkelola)	48.259,72 ton/tahun (sampah terkelola)
		1.097,69 ton/tahu (sampah yang diolah)	509 ton/tahun (sampah yang diolah)
2	Pelayanan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan/persetujuan lingkungan	11 rekomendasi UKL-UPL	3 rekomendasi UKL-UPL
		93 dokumen SPPL	63 dokumen SPPL
3	Pelayanan penerbitan persetujuan teknis dan SLO pembuangan	3 persetujuan teknis air limbah	5 persetujuan teknis air limbah

	dan/atau pemanfaatan air limbah	1 Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	2 Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)
4	Pelayanan penerbitan persetujuan teknis dan SLO pembuangan emisi	0 persetujuan teknis pembuangan emisi	0 persetujuan teknis pembuangan emisi
5	Pelayanan penerbitan rincian teknis limbah B3	10 Laporan	7 Laporan
6	Pelayanan tindak lanjut pengaduan	100% (20 pengaduan)	100% (8 pengaduan)

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mencapai indikator:

Tabel 2. 7
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Tingginya timbulan sampah kota	1.1. Masih tingginya sampah yang dibuang ke TPA
2	TPA Cikundul merupakan tempat untuk pengelolaan akhir sampah yang bersumber dari Kota Sukabumi sudah dinyatakan <i>overload</i>	2.1. Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tua sehingga sering rusak, Lahan yang semakin sempit, Volume sampah yang setiap harinya meningkat
3	Tingginya tingkat perubahan tata guna lahan yang menyebabkan berkurangnya Area Tutupan Lahan (RTH)	3.1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyediaan RTH privat dan terbatasnya anggaran untuk penyediaan RTH publik

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu:

Tabel 2. 8
Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional SPM dan SDGs

Program Nasional	Jenis Pelayanan	Capaian		Dampak
		2023	2024 (s/d semester I)	
SPM	1. Pelayanan pencegahan pencemaran air	Capaian indeks kualitas air 52,76 poin (85,77%)	-	Menurunnya kualitas air sungai
	2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dan sumber tidak bergerak	Capaian indeks kualitas udara 84,24 poin (107,46%)	-	Menurunnya kualitas udara

	3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia
	4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100% (20 pengaduan)	100% (8 pengaduan)	Menurunnya kualitas aspek lingkungan hidup di tempat pengaduan dan munculnya ketidaktaatan pada suatu usaha dan/atau kegiatan karena terbukti melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan
SDGs	Air bersih dan sanitasi layak	Pengurangan sampah 26,01% (17.508,46 ton/tahun)	Pengurangan sampah 9,25% (6.284,72 ton/tahun)	1. Pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga dan usaha/kegiatan 2. Keberadaan sampah yang tidak pada tempatnya mengurangi estetika kota dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat
	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Capaian indeks kualitas tutupan lahan sebesar 27,62 poin (123,41%)	-	Menurunnya luasan tutupan lahan dapat menyebabkan : 1. Berkurangnya daya dukung air 2. Meningkatkan suhu udara
	Penanganan perubahan iklim	23 kampung iklim	5 kampung iklim	Perubahan iklim di Kota Sukabumi akan mengakibatkan menurunnya ketersediaan air bersih, kurangnya ketersediaan pangan, dan timbulnya bencana

Adapun beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mencapai indikator:

Tabel 2. 9
Tantangan dan Peluang

Tantangan	Peluang
a. Berkurangnya kuantitas dan kualitas tutupan lahan karena perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun jadi terbangun	a. Adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
b. Masih rendahnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	b. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup
c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup merusak lingkungan sementara alternative lapangan pekerjaan yang lain masih sulit	c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	d. Adanya program-program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun yang akan direncanakan adalah:

1. Melakukan pengurangan sampah dari sumbernya;
2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air akan diadakan sosialisasi mengenai pengendalian pencemaran air;
3. Mengadakan Program Kali Bersih (PROKASIH);
4. Melakukan pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat;
5. Melaksanakan penanaman pohon di lahan kritis dan area perkotaan.

Tabel 2. 10 (T-C. 31.)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	26.634.601.681	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	26.710.478.231	
1.1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	138.998.800	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	189.648.650	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	30.999.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	30.999.900	
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	499.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	499.700	

1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	499.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	499.900	
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	499.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	499.700	
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	499.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	499.600	
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	102.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	102.000.000	
1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	56.649.850	

1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	10.064.074.931	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	10.074.074.931	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	90 orang/bulan	10.063.175.481	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.176 orang/bulan	10.073.175.481	
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	399.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	399.950	
1.2.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan	499.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan	499.500	
1.5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	100%	212.500.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	100%	219.850.000	
1.5.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut	1 paket	212.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut	8 paket	219.850.000	

1.6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	325.512.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	399.617.400	
1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Sukabumi	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Sukabumi	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 paket	10.000.000	
1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	38.446.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	38.446.500	
1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Sukabumi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	10.742.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Sukabumi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	10.742.000	
1.6.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Sukabumi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	56.333.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Sukabumi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	56.332.900	
1.6.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.728 dokumen	14.032.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	14.032.000	
1.6.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukabumi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	30.990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukabumi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	65.105.000	
1.6.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	149.969.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	189.959.000	

1.6.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 dokumen	15.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	15.000.000	
1.7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	129.325.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	129.225.000	
1.7.1.	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	31.145.000	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 unit	32.545.000	
1.7.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	98.180.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 unit	96.680.000	
1.8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	9.821.011.300	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	9.829.499.300	
1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	12.770.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12.770.000	
1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	162.619.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	163.119.300	
1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	9.193.978.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 laporan	9.193.970.000	

1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	451.644.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	459.640.000	
1.9.1.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	5.943.178.950	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	5.868.562.950	
1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	394.690.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	312 unit	362.200.000	
1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	83 unit	5.327.986.950	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	924 unit	5.285.860.950	
1.9.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28 unit	20.570.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28 unit	20.570.000	
1.9.4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	199.932.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	199.932.000	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	100%	314.195.550	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	100%	614.195.350	

2.1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah ketersediaan dokumen RPPLH, DIKPLHD, IKLH dan Indeks Kenyamanan	4 dokumen	178.670.800	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah ketersediaan dokumen RPPLH, DIKPLHD, IKLH dan Indeks Kenyamanan	4 dokumen	328.670.700	
2.1.1.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	3 dokumen	117.277.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	3 dokumen	267.276.900	
2.1.2.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provisis	1 dokumen	61.393.800	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provisis	1 dokumen	61.393.800	
2.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase dokumen KLHS yang disusun	100%	135.524.750	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase dokumen KLHS yang disusun	100%	285.524.650	
2.2.1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	- dokumen	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	149.999.900	
2.2.2.	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen KLHS Rencana Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	135.524.750	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen KLHS Rencana Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	135.524.750	

3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Indeks Kenyamanan	Predikat Nyaman	1.637.489.400	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Indeks Kenyamanan	Predikat Nyaman	1.637.489.400	
3.1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase capaian kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	100%	1.611.032.900	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase capaian kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	100%	1.611.032.900	
3.1.1.	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	2 dokumen	1.570.422.900	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	3 dokumen	1.570.422.900	
3.1.2.	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	40.610.000	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 dokumen	40.610.000	
3.2.	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase peningkatan kualitas air sungai	100%	26.456.500	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase peningkatan kualitas air sungai	100%	26.456.500	
3.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian	1 dokumen	21.241.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian	1 dokumen	21.241.500	

			sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan					sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan			
3.2.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota	1 kegiatan	5.215.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota	1 kegiatan	5.215.000	
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kota Sukabumi	Indeks RTH	25,5 m ² /orang	237.703.450	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kota Sukabumi	Indeks RTH	26,00 m ² /orang	237.703.450	
4.1.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	237.703.450	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	237.703.450	
4.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	10.000.000	
4.1.2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Sukabumi	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	10 orang	2.703.600	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Sukabumi	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	8 orang	2.703.600	

4.1.3.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	224.999.850	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	224.999.850	
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kota Sukabumi	Persentase limbah B3	100%	23.980.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kota Sukabumi	Persentase limbah B3	100%	23.980.000	
5.1.	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Sukabumi	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	40%	23.980.000	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Sukabumi	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	40%	23.980.000	
5.1.2.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Sukabumi	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 pemerintah dan provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pmda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	5 laporan	23.980.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Sukabumi	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 pemerintah dan provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pmda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	5 laporan	23.980.000	

6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Sukabumi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	41.263.100	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Sukabumi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	41.263.100	
6.1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase pengawasan terhadap usaha dab/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	10%	41.263.100	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase pengawasan terhadap usaha dab/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	10%	41.263.100	
6.1.1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Sukabumi	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	24 dokumen	26.645.350	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Sukabumi	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	11 dokumen	26.645.350	
6.1.2.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	43 badan usaha	14.617.896	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	43 badan usaha	14.617.896	
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Sukabumi	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	33,00%	43.500.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Sukabumi	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	33,00%	43.500.000	

7.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti penyuluhan lingkungan hidup	11 Lembaga	43.500.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Sukabumi	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti penyuluhan lingkungan hidup	11 Lembaga	43.500.000	
7.1.1.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	110 orang	43.500.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	110 orang	43.500.000	
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Sukabumi	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	25%	21.731.100	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Sukabumi	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	25%	21.731.100	
8.1.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	22,5%	21.731.100	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	22,5%	21.731.100	
8.1.1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	40 entitas	21.731.100	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	40 entitas	21.731.100	

9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	54.483.650	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Sukabumi	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	54.483.650	
----	---	---------------	--	------	------------	---	---------------	--	------	------------	--

9.1.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diverifikasi	100%	54.483.650	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Persentase pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diverifikasi	100%	54.483.650	
9.1.1.	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	9 pengaduan	37.999.900	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	9 pengaduan	37.999.900	
9.1.2.	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	7 perkara	16.483.750	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	7 perkara	16.483.750	
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Sukabumi	Cakupan pengelolaan sampah	99,00%	1.773.117.326	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Sukabumi	Cakupan pengelolaan sampah	99,00%	9.489.538.486	
10.1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kota Sukabumi	Persentase penanganan sampah	71%	1.773.117.326	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kota Sukabumi	Persentase penanganan sampah	71%	9.489.538.486	
			Persentase pengurangan sampah	28%				Persentase pengurangan sampah	28%		
			Jumlah sampah yang masuk ke TPA	64.500 ton/ tahun				Jumlah sampah yang masuk ke TPA	64.500 ton/ tahun		

10.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Sukabumi	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2 kelompok	300.722.500	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Sukabumi	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2 kelompok	300.722.500	
10.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	5 unit	625.015.926	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	5 unit	8.341.437.086	
10.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	90.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	90.000.000	
10.1.4	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Kota Sukabumi	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	66.564,70 Ton	500.000.000	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Kota Sukabumi	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	66.564,70 Ton	500.000.000	
10.1.5	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Kota Sukabumi	Jumlah sampah yang terdaur ulang	18.638,12 Ton	257.378.900	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Kota Sukabumi	Jumlah sampah yang terdaur ulang	18.638,12 Ton	257.378.900	

Pada Tabel 2.10 (T.C. 31.) menjelaskan bahwa perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan adanya penambahan anggaran yaitu Rp. 30.782.065.257,00 dengan 10 (sepuluh) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan menjadi Rp. 38.999.362.767,00 dengan 10 (sepuluh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Penambahan pagu anggaran ini dialokasikan untuk:

1. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) *Capacity Building*;
2. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:
 - a. Penambahan insentif PAD;
3. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya:
 - a. Pembelian jas hujan;
4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:
 - a. Penambahan gaji PH;
5. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota:
 - a. Penyusunan dokumen UKL-UPL;
6. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD:
 - a. Penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota:
 - a. Pra DED RDF.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024 ini akan memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total sub kegiatan sebanyak 52 sub kegiatan, terdapat 36 sub kegiatan (69,23%) yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 16 sub kegiatan (30,77%) mengalami perubahan (6 sub kegiatan mengalami penambahan, 9 sub kegiatan mengalami pergeseran, dan 1 usulan sub kegiatan baru) di Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024.

Sejalan dengan adanya perubahan dalam kerangka pendanaan, target indikator program, indikator kegiatan, dan indikator sub kegiatan juga mengalami perubahan agar menyesuaikan dengan anggaran yang ada, yaitu:

1. Dari total 10 indikator program, tidak terdapat indikator program yang mengalami perubahan target.
2. Dari total 26 indikator kegiatan tidak terdapat perubahan target;
3. Dari total 52 indikator sub kegiatan, sebanyak 23 indikator sub kegiatan (44,23%) mengalami perubahan target.

Adapun rincian kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Kegiatan/sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan/sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan target kinerja dan/atau pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 37 sub kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3. 1
Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2024		(bertambah/ berkurang)
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	457.390.750	457.390.750	0
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.998.800	134.998.800	0
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.999.900	30.999.900	0
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.700	499.700	0
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.900	499.900	0
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	499.700	499.700	0
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	499.600	499.600	0
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.000.000	102.000.000	0
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	899.450	899.450	0
1.2.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	399.950	399.950	0
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	499.500	499.500	0
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.220.500	88.220.500	0
1.3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	0
1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.446.500	38.446.500	0
1.3.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.742.000	10.742.000	0
1.3.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.032.000	14.032.000	0
1.3.5.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.000.000	15.000.000	0

1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.770.000	12.770.000	0
1.4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.770.000	12.770.000	0
1.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.502.000	220.502.000	0
1.5.1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.570.000	20.570.000	0
1.5.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.932.000	199.932.000	0
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	196.918.550	196.918.550	0
2.1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	61.393.800	61.393.800	0
2.1.1.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	61.393.800	61.393.800	0
2.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	135.524.750	135.524.750	0
2.2.1.	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	135.524.750	135.524.750	0
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.637.489.400	1.637.489.400	0
3.1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.611.032.900	1.611.032.900	0
3.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.570.422.900	1.570.422.900	0
3.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40.610.000	40.610.000	0
3.2.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	26.456.500	26.456.500	0
3.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	21.241.500	21.241.500	0
3.2.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	5.215.000	5.215.000	0

4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	237.703.450	237.703.450	0
4.1.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	237.703.450	237.703.450	0
4.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10.000.000	10.000.000	0
4.1.2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.703.600	2.703.600	0
4.1.3.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	224.999.850	224.999.850	0
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	23.980.000	23.980.000	0
5.1.	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	23.980.000	23.980.000	0
5.1.1.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23.980.000	23.980.000	0
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	41.263.100	41.263.100	0
6.1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.263.100	41.263.100	0
6.1.1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	26.645.350	26.645.350	0
6.1.2.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	14.617.750	14.617.750	0
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	43.500.000	43.500.000	0

	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
7.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.500.000	43.500.000	0
7.1.1.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	43.500.000	43.500.000	0
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	21.731.100	21.731.100	0
8.1.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.731.100	21.731.100	0
6.1.1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	21.731.100	21.731.100	0
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	54.483.650	54.483.650	0
9.1.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	54.483.650	54.483.650	0
9.1.1.	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	37.999.900	37.999.900	0
9.1.2.	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.483.750	16.483.750	0
10.	Program Pengelolaan Persampahan	1.148.101.400	1.148.101.400	0
10.1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	1.148.101.400	1.148.101.400	0
10.1.1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.722.500	300.722.500	0
10.1.2.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	0
10.1.3.	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	500.000.000	500.000.000	0
10.1.4.	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	257.378.900	257.378.900	0

2. Kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan/sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan/atau pagu indikatif sebanyak 6 sub kegiatan. Penambahan pagu anggaran ini dialokasikan untuk:

- a. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) *Capacity Building*;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:
 - 1) *Penambahan insentif PAD*;
- c. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya:
 - 1) *Pembelian jas hujan*;
- d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:
 - 1) *Penambahan gaji PH*;
- e. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota:
 - 1) *Penyusunan dokumen UKL-UPL*;
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota:
 - 1) *Pra DED RDF*.

Tabel 3. 2
Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif 2024			(bertambah/ berkurang)
		Murni	Parsial	Sesudah Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.731.319.481	10.731.319.481	10.807.315.331	75.995.850
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	54.649.850	50.649.850
1.1.1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	54.649.850	50.649.850
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.063.175.481	10.063.175.481	10.073.175.481	10.000.000
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.063.175.481	10.063.175.481	10.073.175.481	10.000.000
1.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.500.000	212.500.000	219.850.000	7.350.000

1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	212.500.000	212.500.000	219.850.000	7.350.000
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	451.644.000	451.644.000	459.640.000	7.996.000
1.4.1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.644.000	451.644.000	459.640.000	7.996.000
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	117.277.000	117.277.000	267.276.900	149.999.900
2.1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	117.277.000	117.277.000	267.276.900	149.999.900
2.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	117.277.000	117.277.000	267.276.900	149.999.900
3.	Program Pengelolaan Persampahan	625.015.926	8.261.437.286	8.341.437.286	79.999.800
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	625.015.926	8.261.437.286	8.341.437.286	79.999.800
3.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	625.015.926	8.261.437.286	8.341.437.286	79.999.800

3. Kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran pagu anggaran

Kegiatan/sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang mengalami pergeseran pagu antar kegiatan sebanyak 8 sub kegiatan. Kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3
Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mengalami Pergeseran Pagu Anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2024		(bertambah/ berkurang)
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15.445.891.450	15.445.772.150	(199.300)
1.1.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.325.000	129.325.000	(100.000)
1.1.1.	Pengadaan Mebel	31.145.000	32.545.000	1.400.000
1.1.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.180.000	96.680.0000	(1.500.000)

1.2.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.722.676.950	5.648.060.950	(74.616.000)
1.2.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.690.000	362.200.000	(32.490.000)
1.2.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.327.986.950	5.285.860.950	(42.126.000)
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.292.200	311.396.900	74.104.700
1.3.1.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.333.200	56.332.900	(300)
1.3.2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.990.000	65.105.000	34.115.000
1.3.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.969.000	189.959.000	39.990.000
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.356.597.300	9.357.089.300	492.000
1.4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.619.300	163.119.300	500.000
1.4.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.193.978.000	9.193.970.000	(8.000)

4. Kegiatan/sub kegiatan baru di Perubahan Renja Tahun 2024

Kegiatan/sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan/sub kegiatan yang tidak ada dalam dalam APBD Penetapan Tahun 2024 namun diusulkan di Perubahan Renja Tahun 2024 yaitu Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, alasan diusulkannya sub kegiatan tersebut adalah untuk penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Kegiatan/sub kegiatan yang baru dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3. 4
Usulan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2024		(bertambah/ berkurang)
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	149.999.900	149.999.900
1.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	0	149.999.900	149.999.900
1.1.1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0	149.999.900	149.999.900

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja 2024 dapat dilihat pada berikut ini:

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang mulai dirumuskan dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2024;
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi berkewajiban untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024;
- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

I. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dimana setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi memiliki kedudukan yang sangat strategis.

Kedudukan strategis ini dapat dilihat dari posisi tugas pokoknya yaitu harus melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah. Ketiga urusan pemerintah ini pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi sendiri dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada kehidupan sehari-hari yang menyangkut pembangunan infrastruktur, yaitu:

- a. Urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi penggajian untuk ASN dan Non ASN, penyediaan dan pengelolaan barang milik daerah dan jasa penunjang urusan pemerintahan, pengelolaan SDA, pengelolaan dan pengembangan SPAM, pengelolaan dan pengembangan air limbah, pengelolaan drainase lingkungan, penataan bangunan gedung dan lingkungannya, peningkatan dan pemeliharaan jalan kota, pengembangan jasa konstruksi, dan penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pengembangan perumahan dan rumah korban bencana, peremajaan permukiman kumuh, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- c. Urusan pemerintah bidang pertanahan yang meliputi penatagunaan tanah.

Selanjutnya untuk memenuhi kewajiban atau tugas-tugas dimaksud diperlukan suatu perencanaan kegiatan bagi dinas itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 144 Tahun 2022, dimana Kepala Dinas ditugaskan untuk membuat Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Untuk pencapaian target dari kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan langkah awal SKPD untuk mendesain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
31. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
32. Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
33. Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

34. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.
35. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.
36. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi tahun 2024 - 2026 dan memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (RPD) 2024 – 2026 dimana dalam Dokumen RPD memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, dan kinerja pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang aspiratif dengan skala prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas Pemerintah Kota Sukabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini dibagi kedalam 5 (lima) Bab seperti berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, meliputi:

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,

- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab IV ini berisi rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2024

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap PD yang bersangkutan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2023 didasarkan pada ketersediaan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah, dimana pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi memperoleh alokasi belanja sebesar Rp.103.557.095.235,- dan pendapatan sebesar Rp.502.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Belanja Operasi	Rp.	52.737.863.335,-
	Belanja Modal	Rp.	50.819.231.900,-
	Total Belanja	Rp.	103.557.095.235,-
2.	Pendapatan UPTD Pemakaman	Rp.	47.000.000,-
	Pendapatan UPTD Rusunawa	Rp.	335.000.000,-
	Pendapatan UPTD IPLT	Rp.	-
	Hasil Penjualan Tanaman	Rp.	50.000.000,-
	Pendapatan UPTD Alat Berat & Lab.	Rp.	36.000.000,-
	Total Pendapatan	Rp.	34.000.000,-
			502.000.000,-

Untuk kegiatan tahun 2023, realisasi keuangan yang terserap sampai akhir tahun adalah sebesar Rp.102.632.300.139,- (99,11%) dengan demikian terdapat selisih sisa anggaran sebesar Rp.924.795.096,- (0,89%).

Sementara untuk pendapatan pada tahun 2023, realisasi yang tercapai sebesar Rp.511.285.000,- (101,85%) dengan demikian terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp.9.285.000,- (1,85%).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai salah satu Dinas penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) memperoleh pendapatannya dari Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/ Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari Retribusi Sewa Hunian Rusunawa Cikundul dan Rusunawa Sukakarya, Retribusi Sewa Mobil Tinja dan Retribusi Jasa Sewa Mesin Gilas. Target dan realisasi tersebut dapat dilihat dari Tabel dibawah ini.

Tabel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	502.000.000	511.285.000	101,85%

4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	382.000.000	382.150.000	100,04%
4.1.02.01	RETRIBUSI JASA UMUM	47.000.000	47.075.000	100,16%
4.1.02.01.03	Pelayanan Penguburan/ Pemakaman dan Daftar Ulang Pelayanan Pemakaman	47.000.000	47.075.000	100,16%
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	47.000.000	47.075.000	100,16%
4.1.02.02	RETRIBUSI JASA USAHA	335.000.000	335.075.000	100,02%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	335.000.000	335.075.000	100,02%
	Rusunawa Sukakarya	198.300.000	212.825.000	107,32%
	Rusunawa Cikundul	136.700.000	122.250.000	89,43%
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	120.000.000	129.135.000	107,61%
4.1.04.01	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	36.000.000	36.000.000	100,00%
4.1.02.01.03	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	36.000.000	36.000.000	100,00%
	Hasil Penjualan Tanaman	36.000.000	36.000.000	100,00%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	84.000.000	93.135.000	110,87%
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	84.000.000	93.135.000	110,87%
	Sewa Mobil Tinja	50.000.000	50.110.000	100,22%
	Sewa Mesin Gilas	34.000.000	43.025.000	126,54%
	JUMLAH	502.000.000	511.255.000	101,84%

Secara fisik pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.

Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai 14 program yang menjadi tugas pokoknya, adapun realisasi dari 14 program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan ada 14 program 23 Kegiatan 56 Sub Kegiatan, dimana faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja diantaranya adalah:
 - a. Komitmen pelaksanaan kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin atau kegiatan pokok operasional dinas.

2. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya adalah:
 - a. Mempengaruhi target capaian kinerja dalam renstra dinas.
 - b. Harus dilakukan review perencanaan untuk menentukan kembali target capaian program.
 - c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya adalah:
 - Meningkatkan pengawasan.
 - Melakukan sosialisasi kepada stakeholder sebelum dilaksanakan pembangunan dan atau pelaksanaan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC.29 dibawah ini.

TABEL 1 T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	90%	98,90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah						100%	100%	100%
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5 Laporan	5 Laporan	100%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	1 Laporan	100%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	100%	100%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	85 Orang	76 Orang	76 Orang	100%	72 Orang	72 Orang	100%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100%
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100%
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Target Renstra s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Standar						100%	100%	100%
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	1 Paket	100%
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1 Orang	1 Orang	100%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						100%	100%	100%
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	9 Jenis	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Jenis	57 Jenis	44 Paket	50 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	2 Jenis				1 Paket	1 Paket	100%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 jenis cetakan	13 jenis cetakan	14 Paket	14 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 buah	25 buah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat	2600 dus	1610 dus	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 HOK	367 HOK	2000 Laporan	2000 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan						100%	100%	100%
1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	100%
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						3 Unit	3 Unit	100%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan						100%	100%	100%
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 lembar	63 Lembar	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 rekening	4 rekening	4 Laporan	4 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Orang	109 orang 23 unit	3 Laporan	3 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 orang	8 orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar						100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	16 Unit	20 unit	20 unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						2 Unit	2 Unit	100%
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Turap/ Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik/ Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	9 unit 1500 M	9 unit 3247,73 M	9 unit 1500 M	12 unit 3026,7 M	100%			
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota						57,43%	57,43%	100%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dilengkapi dengan Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik						0,20 km	0,20 km	100%
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi						4 unit	4 unit	100%
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun						1 unit	1 unit	100%
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun						4 unit	4 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Damau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.03.02.2.01.0046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20 DI	20 DI	1,5 KM	1,75 KM	100%	1 km	1 km	100%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan dalam Kondisi Baik						0,30 km	0,30 km	100%
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun						0,1 Km	0,1 Km	100%
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun						1 Bendung	1 Bendung	100%
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan						0,1 Km	0,1 Km	100%
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1500 m	1525,64 m 9 Bendung	2 Km	1,8767 Km	94%	0,1 Km	0,1 Km	100%
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi						1 Bendung	1 Bendung	100%
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	660 m	1722,09 m	1 Km	1,15 Km	100%	20 Km	20 Km	100%
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara						12 Bendung	12 Bendung	100%
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum yang layak Persentase KK Akses Air minum aman	100%	100%	100% 99,99%	100% 99,99%	100%			
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman						100%	100%	100%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum yang layak Persentase KK Akses Air minum aman						100%	100%	100%
		Jumlah Penambahan Sambungan Rumah dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu						500 SR	500 SR	100%
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	20 Buah	20 Buah	50 SR	0	-	1 Liter/detik	1 Liter/detik	100%
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						35 orang	35 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3826 meter 500 SR	3826 meter 500 SR	450 SR	450 SR	100%	500 SR	500 SR	100%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga mengakses sanitasi Persentase KK lumpur tinja yang terlayani	73%	73%	74%	74%	100%	57,95%	57,95%	100%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga mengakses sanitasi Persentase KK lumpur Jumlah Dokumen Pengawasan Air Limbah Jumlah sistem pengelolaan Air Limbah untuk sarana prasarana sanitasi warga yang baik Pengembangan pelayanan publik lumpur tinja yang terlayani								
		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah						67.056 RT	67.056 RT	100%
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	5 Unit (250 SR)	5 Unit (250 SR)	570 RT	570 RT	100%	60 RT	60 RT	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	80 Unit	80 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	150 Unit	150 Unit	100%
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	100%	100%	100%	100%	100%	8 m3/Hari	8 m3/Hari	100%
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun						0,8 M³/Hari	0,8 M³/Hari	100%
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja						20 RT	20 RT	100%
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	100%
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar						7 RT	7 RT	100%
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik						42,46%	42,46%	100%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik						57.267 m'	57.267 m'	100%
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun						250 M	250 M	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi						500 M	500 M	100%
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	46%	46%	47%	47%	100%			
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan lingkungan baik								
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 DED 1 Paket 1000 m	1 DED 1 Paket 1000 m	7 Sistem Jaringan	7 Sistem Jaringan	100%			
		Panjang jalan lingkungan dan drainase yang terbangun			2000 m2	2000 m2	100%			
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket 2 Paket 8000 m	2 Paket 2 Paket 8000 m	7 Sistem Jaringan	7 Sistem Jaringan	100%			
		Panjang jalan lingkungan yang terpelihara di kawasan permukiman			7900 m2	7900 m2	100%			
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Paket 200	15 Paket 200	7 Sistem Jaringan	7 Sistem Jaringan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
		Penanganan kerusakan jalan dan penanganan kerusakan jaringan drainase di wilayah perumahan dan permukiman			14 Paket	14 Paket	100%			
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan (DED) pembangunan dan rehab jalan lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			10 Orang	10 Orang	100%			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang terbangun	20%	20%	20%	20%	100%	9,38%	9,38%	100%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar						2 Gedung	2 Gedung	100%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendaftaran Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.08.2.01.02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11 gedung	11 gedung	11 gedung	11 gedung	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	7 gedung	7 gedung	7 gedung	7 gedung	100%	7 gedung	7 gedung	100%
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						7 Gedung	7 Gedung	100%
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						20 Dokumen	20 Dokumen	100%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Kondisi Taman yang baik	80,10%	80,10%	80,20%	80,20%	100%	78,95%	78,95%	100%
1.03.09.2.01		Persentase Jumlah Kondisi Taman yang baik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Taman dalam Kondisi baik						2 Kawasan	2 Kawasan	100%
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	3 Lokasi Penataan taman	3 Lokasi Penataan taman	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9 TPU	9 TPU	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 jenis	3 jenis	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9.6 Ha	9.6 Ha	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata						1 Kawasan	1 Kawasan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan						1 Kawasan	1 Kawasan	100%
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang jalan kota kondisi yang Mantap	82,85%	82,85%	83,21%	86,87%	100%	85,15%	85,15%	100%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap						100,30 Km	100,30 Km	100%
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	138.3 m 1 Ruas Jalan 6 Ruas Jalan 1 Ruas Jalan 1 Unit 45 unit 1 Ruas Jalan 1 Ruas Jalan 484 m2	138.3 m 1 Ruas Jalan 6 Ruas Jalan 1 Ruas Jalan 1 Unit 45 unit 1 Ruas Jalan 1 Ruas Jalan 484 m2	7,18 Km	8,38 Km	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana/Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	23.000 m2	12.744 m2	3,31 km	3,31 km	100,00%	3,63 Km	3,63 Km	100%
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	4 Ruas Jalan	4 Ruas Jalan				0,001 Km	0,001 Km	100%
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	6 Ruas Jalan	6 Ruas Jalan				1,191 km	1,191 km	100%
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin						5 m	5 m	100%
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	661,68 m 127,08 m 2,67 km 27881 m2	661,68 m 127,08 m 2,67 km 27881 m2	12 km	12,83 km	100%	12 km	12 km	100%
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	61.500 Kg 2200 Liter	61.500 Kg 2200 Liter	1 km	1,8 km	100%	0,9 Km	0,9 Km	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian jumlah pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	80 orang	25 Orang	40%	27,20%	68%			
		Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan						38,01%	38,01%	100%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 orang	25 Orang	50 Orang	34 Orang	68%	15 Orang	15 Orang	100%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	80%	80%	80%	80%	100%			
		Persentase Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang						70%	70%	100%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						4 Dok	4 Dok	100%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	50 Orang	30 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						15 Dokumen	15 Dokumen	100%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	55%	55%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%			
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	98,61%	98,61%	98.90%	98.90%	100%	100%	100%	100%
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						2 Orang	2 Orang	100%
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih						2 Orang	2 Orang	100%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						2 Unit	2 Unit	100%
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi						1 Unit	1 Unit	100%
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun						1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rusun						1 Laporan	1 Laporan	100%
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rusun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun						1 Laporan	1 Laporan	100%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Luasan kawasan kumuh	98,61% 0,07%	98,61% 0,07%	98,9% 0,02%	98,9% 0,02%	100%			
		Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh						10 Ha	10 Ha	100%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Pemutakhiran pemetaan kawasan kumuh di kota Sukabumi								
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	5 kelurahan	5 kelurahan	100%			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki Jumlah Dokumen Monitoring Rehabilitasi RT/RL Kota Sukabumi Jumlah Kelurahan yang terkoordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran								
		Luas Permukiman Kumuh yang ditangani						10 Ha	10 Ha	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	320 unit	320 unit				12 Unit	12 Unit	100%
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Kelurahan	3 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan						10 Ha	10 Ha	100%
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar						10 Ha	10 Ha	100%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	98,61%	98,61%	98.90%	98.90%	100%	1,37%	1,37%	100%
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						2 Unit	2 Unit	100%
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Kegiatan	2 Kegiatan	24 Unit	30 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						2 Unit	2 Unit	100%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	98.61%	98.61%	98.90%	98.90%	100%	11,38%	11,38%	100%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Peningkatan Pemeliharaan Penyelenggaraan PSU Perumahan						2 Lokasi	2 Lokasi	100%
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						2 Lokasi	2 Lokasi	100%
1.04.05.2.01.0003	Kordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan Kegiatan inventarisasi PSU Perumahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang						1 Laporan	1 Laporan	100%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang						11,38%	11,38%	100%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah						2 Lokasi	2 Lokasi	100%
2.10.10.2.01.0001	Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						1 Laporan	1 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tentunya tidak terlepas dari tampilan kinerja pelayanan aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang itu sendiri. Secara fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi telah mengacu pada Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, dimana dalam peraturan walikota tersebut telah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi baik yang bersifat pelaksanaan tugas internal maupun bentuk pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya analisis terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.30 dibawah ini.

TABEL 2 T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM/ Standar Na- sional	IKK	Target Renstra Dinas				Realisasi Capaian			Proyeksi		Cata- tan Pent- ing
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90%	90%	-	-	100%	100%	-	-	-	
2	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi			-	-	57,57	58,37	-	-	-	57,57	58,37	
3	Persentase Turap/ Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik			9 unit	5 unit	-	-	100%	12 Unit	-	-	-	
4	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik			1500 m'	1500 m'	-	-	100%	3026,70 m'	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Na- sional	IKK	Target Renstra Dinas				Realisasi Capaian			Proyeksi		Cata- tan Pent- ing
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Persentase Prasarana, Sa- rana dan Utilitas Umum yang Sesuai Standar			-	-	52,95%	53,53%	-	-	-	52,95%	53,53%	
6	Persentase penduduk be- raksas air minum yang layak	100%		100%	100%	-	-	100%	100,00%	-	-	-	
7	Persentase KK Akses Air mi- num aman	15,00%		98,99%	99,99%	-	-	100%	99,99%	-	-	-	
8	Persentase warga mengakses sanitasi	90,00%		73,20%	74,00%	-	-	100%	71,32%	-	-	-	
9	Persentase KK lumpur tinja yang terlayani			35,00%	38,00%	-	-	100%	38,00%	-	-	-	
10	Persentase kondisi jalan ling- kungan baik			46,00%	47,00%	-	-	100%	47,00%	-	-	-	
11	Persentase Jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang terbangun			20%	20%	-	-	100%	20%	-	-	-	
12	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Berkualitas			-	-	42,11%	47,00%	-	-	-	42,11%	47,00%	
13	Persentase Jumlah Kondisi Taman yang baik			86,22%	86,24%	-	-	100%	86,24%	-	-	-	
14	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	65,00%	82,85%	82,85%	83,21%	85,15%	85,30%	100%	86,87%	-	85,15%	85,30%	
15	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian jumlah			40 orang	40 orang	-	-	62,50%	34 Orang	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Na- sional	IKK	Target Renstra Dinas				Realisasi Capaian			Proyeksi		Cata- tan Pent- ing
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	pelaku sektor jasa kon- struksi di Kota Sukabumi												
16	Persentase Kegiatan Peneta- pan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			80%	80%	-	-	100%	80%	-	-	-	
17	Persentase Kegiatan Koordi- nasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota			80%	80%	-	-	100%	80%	-	-	-	
18	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			80%	80%	-	-	100%	80%	-	-	-	
19	Persentase Kegiatan Koordi- nasi dan sinkronisasi Pem- anfaatan Ruang Daerah Kab/Kota			80%	80%	-	-	100%	80%	-	-	-	
20	Persentase Kegiatan Koordi- nasi dan Sinkronisasi Pen- gendalian Pemanfaatan Ru- ang Daerah Kab/Kota			60%	55%	-	-	100%	55%	-	-	-	
21	Persentase Hunian yang Layak di Kota	60,60%		98,61%	98,90%	98,63%	98,64%	100%	98,90%	-	98,63%	98,64%	
22	Persentase Penanganan Ru- mah Tidak Layak Huni			-	-	1,07%	2,22%	-	-	-	1,07%	2,22%	
23	Persentase Kawasan Per- mukiman yang Siap Siaga dari Bencana Banjir dan Longsor			-	-	96,82%	96,82%	-	-	-	96,82%	96,82%	

No	Indikator	SPM/ Standar Na- sional	IKK	Target Renstra Dinas				Realisasi Capaian			Proyeksi		Cata- tan Pent- ing
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Luasan Kawasan Per- mukiman Tanpa Banjir dan Longsor			-	-	2673,2 Ha	2673,3 Ha	-	-	-	2673,2 Ha	2673,3 Ha	
25	Persentase kawasan kumuh			-	0,02%	-	-	-	0,02%	-	-	-	
26	Persentase Kawasan Per- mukiman Tanpa Kumuh			-	-	91,64%	92,04%	-	-	-	91,64%	92,04%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya melaksanakan dan mencapai tujuan serta sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, dimana munculnya beberapa isu strategis diantaranya:

- a. Perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas;
- b. Perlu adanya percepatan penurunan stunting kota melalui penyediaan infrastruktur permukiman diantaranya penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah serta hunian yang layak;
- c. Perlu adanya pengurangan resiko bencana banjir dan longsor dilakukan melalui kesiapsiagaan kawasan permukiman dari bencana banjir dan longsor;
- d. Reformasi birokrasi yang perlu terus dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan implementasi reformasi birokrasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dari perbandingan antara rancangan awal dengan rancangan akhir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi yang meliputi program/kegiatan/sub kegiatan belanja operasi dan belanja modal.

Perbandingan program/kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang berbeda, diantaranya:

- a. Pagu anggaran rancangan awal RKPD 2024 sebesar Rp.64.785.784.690 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 Rp.68.805.784.690.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.15.544.528.085 dan hasil analisis kebutuhan 2024 sebesar Rp.15.559.528.085.
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.8.460.427.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp. 8.560.427.000.
- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.8.460.427.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp. 8.560.427.000.

- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.4.028.889.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.4.128.889.000.
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.4.043.700.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.4.443.700.000.
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.4.141.034.200 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.5.471.034.200.
- h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.3.079.772.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.3.279.772.000.
- i. Program Penyelenggaraan Jalan, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.14.902.809.015 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.16.727.809.015.
- j. Program Pengembangan Perumahan, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp. 476.000.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp. 726.000.000.
- k. Program Kawasan Permukiman, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.4.308.000.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.4.608.000.000.
- l. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp.1.050.000.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp.500.000.000.
- m. Program Penatagunaan Tanah, dimana dalam rancangan awal RKPD 2024 direncanakan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebesar Rp. 80.000.000.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel T-C.31 dibawah ini.

TABEL 3 T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Sukabumi

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				64.785.784.690		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				68.805.784.690		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA- YANAN DASAR				64.755.784.690		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA- YANAN DASAR				68.725.784.690		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKER- JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				58.570.424.690		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKER- JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				62.540.424.690		
1.03.01	PROGRAM PENUN- JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU- PATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keu- angan Tepat Waktu	100%	15.544.528.085		PROGRAM PENUN- JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU- PATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keu- angan Tepat Waktu	100%	15.559.528.085		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	40.000.000		Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	38.100.000		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dae- rah	1 Doku- men	20.000.000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dae- rah	1 Doku- men	18.100.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun- an Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun- an Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun- an Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun- an Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku- men	3.500.000	PAD	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real- isasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capa- ian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.150.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real- isasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capa- ian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.150.000	PAD	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	850.000	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	850.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.02	Administrasi Keu- angan Perangkat Dae- rah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keu- angan Perangkat Daerah	100,00%	8.913.921.145		Administrasi Keu- angan Perangkat Dae- rah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keu- angan Perangkat Daerah	100%	8.913.921.145		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUTR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjan- gan ASN	69 Orang/bu- lan	8.908.921.145	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUTR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjan- gan ASN	69 Orang/bu- lan	8.908.921.145	PAD	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keu- angan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keu- angan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	PAD	
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Peny- iapan Bahan Tangga- pan Pemeriksaan	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Doku- men	1.000.000	PAD	Pengelolaan dan Peny- iapan Bahan Tangga- pan Pemeriksaan	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Doku- men	1.000.000	PAD	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu- lanaan/ Semes- teran SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se- mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu- angan Bulanan/ Triwu- lanaan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.000.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu- lanaan/ Semes- teran SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se- mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu- angan Bulanan/ Triwu- lanaan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.000.000	PAD	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Real- isasi Anggaran	1 Doku- men	500.000	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Real- isasi Anggaran	1 Doku- men	500.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Bar- ang Milik Daerah	100,00%	600.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Bar- ang Milik Daerah	100%	600.000		
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000	PAD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000	PAD	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepega- waian Perangkat Dae- rah		Persentase Ketersediaan Sa- rana Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Standar	100,00%	250.750.000		Administrasi Kepega- waian Perangkat Dae- rah		Persentase Ketersediaan Sa- rana Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Standar	100%	246.950.000		
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Di- nas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PUTR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	PAD	Pengadaan Pakaian Di- nas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PUTR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	PAD	
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Monitor- ing, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku- men	750.000	PAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Monitor- ing, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku- men	750.000	PAD	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Imple- mentasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PUTR	Jumlah Orang yang Mengi- kuti Bimbingan Teknis Imple- mentasi Peraturan Perun- dang-Undangan	82 Orang	100.000.000	PAD	Bimbingan Teknis Imple- mentasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PUTR	Jumlah Orang yang Mengi- kuti Bimbingan Teknis Imple- mentasi Peraturan Perun- dang-Undangan	82 Orang	96.200.000	PAD	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	545.290.800		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	570.006.800		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.500.000	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.570.000	PAD	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.130.800	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.130.800	PAD	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PUTR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PUTR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.646.000	PAD	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PUTR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	PAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PUTR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	PAD	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.500.000	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.500.000	PAD	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	30.000.000	PAD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	30.000.000	PAD	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	351.660.000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	366.660.000	PAD	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000	PAD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PUTR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000	PAD	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	100,00%	895.316.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	880.800.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PUTR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	368.246.000	PAD	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PUTR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	348.030.000	PAD	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Dinas PUTR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	250.000.000	PAD	Pengadaan Mebel	Dinas PUTR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	250.000.000	PAD	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUTR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	277.070.000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUTR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	282.770.000	PAD	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan	100,00%	4.342.764.900		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan	100%	4.353.264.900		
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.700.000	PAD	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	347.729.500	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	357.729.500	PAD	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.729.762.000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.729.762.000	PAD	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.264.073.400	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PUTR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.264.073.400	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Ba- rang Milik Daerah Sesuai Standar	100,00%	555.885.240		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Ba- rang Milik Daerah Sesuai Standar	100%	555.885.240		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kend- araan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUTR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizi- nannya	16 Unit	285.965.240	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kend- araan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUTR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizi- nannya	16 Unit	285.965.240	PAD	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Per- izinan Alat Besar	Dinas PUTR	Jumlah Alat Besar yang Di- pelihara dan dibayarkan Per- izinannya	2 Unit	250.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Per- izinan Alat Besar	Dinas PUTR	Jumlah Alat Besar yang Di- pelihara dan dibayarkan Per- izinannya	2 Unit	250.000.000	PAD	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUTR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	19.920.000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUTR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	19.920.000	PAD	
1.03.02	PROGRAM PENGEL- OLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rasio luas kawasan per- mukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi in- frastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	57,37%	8.460.427.000		PROGRAM PENGEL- OLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rasio luas kawasan per- mukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi in- frastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	57,37%	8.560.427.000		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabu- paten/Kota		Panjang Sungai yang Dilengkapi dengan Pengen- dali Banjir dalam Kondisi Baik	0,20 km	6.444.327.000		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabu- paten/Kota		Panjang Sungai yang Dilengkapi dengan Pengen- dali Banjir dalam Kondisi Baik	0,20 km	6.448.327.000		
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengen- dali Banjir	Kota Suka- bumi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	304.000.000	PAD	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengen- dali Banjir	Kota Suka- bumi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	304.000.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Pol- der/Kolam Retensi	Kota Suka- bumi	Jumlah Polder/Kolam Re- tensi yang Dibangun	1 unit	5.576.327.000	-	Pembangunan Pol- der/Kolam Retensi	Kota Suka- bumi	Jumlah Polder/Kolam Re- tensi yang Dibangun	1 unit	5.580.327.000	PAD dan Bankeu	
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengen- dali Banjir	Kota Suka- bumi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	4 unit	164.000.000	PAD	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengen- dali Banjir	Kota Suka- bumi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	4 unit	164.000.000	PAD	
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup un- tuk Konstruksi Ben- dungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Ling- kungan Hidup untuk Kon- struksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Doku- men	400.000.000	PAD	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup un- tuk Konstruksi Ben- dungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Ling- kungan Hidup untuk Kon- struksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Doku- men	400.000.000	PAD	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Iri- gasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha da- lam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Jaringan Irigasi Per- mukaan dalam Kondisi Baik	0,30 Km	2.016.100.000		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Iri- gasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha da- lam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Jaringan Irigasi Per- mukaan dalam Kondisi Baik	0,30 Km	2.112.100.000		
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka- bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per- mukaan yang Dibangun	0,10 Km	100.000.000	PAD	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka- bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per- mukaan yang Dibangun	0,10 Km	125.000.000	PAD	
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Ben- dung Irigasi	Kota Suka- bumi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	100.000.000	PAD	Pembangunan Ben- dung Irigasi	Kota Suka- bumi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	96.000.000	PAD	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka- bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per- mukaan yang Ditingkatkan	0,10 Km	100.000.000	PAD	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka- bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per- mukaan yang Ditingkatkan	0,10 Km	100.000.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka-bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per-mukaan yang Direhabilitasi	0,10 Km	350.000.000	PAD	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka-bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per-mukaan yang Direhabilitasi	0,10 Km	400.000.000	PAD	
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kota Suka-bumi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	100.000.000	PAD	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kota Suka-bumi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	125.000.000	PAD	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeli-haraan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka-bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per-mukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Km	353.080.000	PAD	Operasi dan Pemeli-haraan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Suka-bumi	Panjang Jaringan Irigasi Per-mukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Km	353.080.000	PAD	
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeli-haraan Bendung Irigasi	Kota Suka-bumi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Di-pelihara	12 Ben-dung	420.020.000	PAD	Operasi dan Pemeli-haraan Bendung Irigasi	Kota Suka-bumi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Di-pelihara	12 Ben-dung	420.020.000	PAD	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Ling-kungan Hidup untuk Kon-struksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Doku-men	493.000.000	PAD	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Ling-kungan Hidup untuk Kon-struksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Doku-men	493.000.000	PAD	
1.03.03	PROGRAM PENGEL-OLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYE-DIAAN AIR MINUM		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman	100,00%	3.577.766.310		PROGRAM PENGEL-OLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYE-DIAAN AIR MINUM		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman	100,00%	3.577.766.310		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Ka-bupaten/Kota		Jumlah Penambahan Sam-bungan Rumah dengan Penambahan Jaringan Perpi-paan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500 SR	3.577.766.310		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Ka-bupaten/Kota		Jumlah Penambahan Sam-bungan Rumah dengan Penambahan Jaringan Perpi-paan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500 SR	3.577.766.310		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pem- berdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Suka- bumi	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan da- lam Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	35 Orang	50.000.000	PAD	Pembinaan dan Pem- berdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Suka- bumi	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan da- lam Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	35 Orang	50.000.000	PAD	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyede- dian Air Minum (SPAM)	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Doku- men	55.437.310	PAD	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyede- dian Air Minum (SPAM)	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Doku- men	135.437.310	PAD	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Per- pipaan	Kota Suka- bumi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perlu- asan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	3.472.329.000	PAD dan DAK Fisik Bi- dang Air Minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Per- pipaan	Kota Suka- bumi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perlu- asan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	3.392.329.000	PAD dan DAK Fisik Bi- dang Air Minum	
1.03.05	PROGRAM PENGEL- OLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Peng- olahan Air Limbah Domes- tik	57,95%	4.028.889.000		PROGRAM PENGEL- OLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Peng- olahan Air Limbah Domes- tik	57,95%	4.128.889.000		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabu- paten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sistem Pengel- olaan Air Limbah	67.056 RT	4.028.889.000		Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabu- paten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sistem Pengel- olaan Air Limbah	67.056 RT	4.128.889.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kota Suka-bumi	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0,8 M ³ /Hari	3.249.340.000	PAD dan DAK Fisik Bi-dang Sanitasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kota Suka-bumi	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0,8 M ³ /Hari	3.249.340.000	PAD dan DAK Fisik Bi-dang Sanitasi	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Suka-bumi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20 RT	250.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Suka-bumi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20 RT	250.000.000	PAD	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Suka-bumi	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Dise-diaikan	1 Unit	100.000.000	PAD	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Suka-bumi	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Dise-diaikan	1 Unit	100.000.000	PAD	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Suka-bumi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	7 RT	347.500.000	PAD	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Suka-bumi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 RT	447.500.000	PAD	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	82.049.000	PAD	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	82.049.000	PAD	
1.03.06	PROGRAM PENGEL- OLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	42,46%	4.043.700.000		PROGRAM PENGEL- OLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	42,46%	4.443.700.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase Ling- kungan dalam Kondisi Baik	57.267 m'	4.043.700.000		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase Ling- kungan dalam Kondisi Baik	57.267 m'	4.443.700.000		
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Suka- bumi	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	250 Meter	2.661.700.000	PAD	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Suka- bumi	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	250 Meter	2.661.700.000	PAD	
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Kota Suka- bumi	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimal- isasi	158,6 Me- ter	1.307.000.000	PAD	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Kota Suka- bumi	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimal- isasi	158,6 Me- ter	1.707.000.000	PAD	
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drain- ase Lingkungan	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Doku- men	75.000.000	PAD	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drain- ase Lingkungan	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Doku- men	75.000.000	PAD	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	10,00%	4.141.034.200		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	10,00%	5.471.034.200		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	2 Bangunan Gedung	4.141.034.200		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	2 Bangunan Gedung	5.471.034.200		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	7 Bangunan Gedung	2.577.768.800	PAD	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	7 Bangunan Gedung	3.562.768.800	PAD	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	575.000.000	PAD	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	575.000.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Sukabumi	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20 Dokumen	988.265.400	PAD	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Sukabumi	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20 Dokumen	1.333.265.400	PAD	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase RTHKP dalam Kondisi baik	78,95%	3.079.772.000		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase RTHKP dalam Kondisi baik	78,95%	3.279.772.000		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Taman dalam Kondisi baik	2 Kawasan	3.079.772.000		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Taman dalam Kondisi baik	2 Kawasan	3.279.772.000		
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1.895.000.000	PAD	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	2.095.000.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Suka-bumi	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	245.372.000	PAD	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Suka-bumi	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	245.372.000	PAD	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	939.400.000	PAD	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	939.400.000	PAD	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	85,15%	14.902.809.015		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	85,15%	16.727.809.015		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	100,30 Km	14.902.809.015		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	100,30 Km	16.727.809.015		
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.000.000	PAD	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.000.000	PAD	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	565.806.670	PAD	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	565.806.670	PAD	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,35 KM	5.366.677.000	DAK Bidang Jalan	Rekonstruksi Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,35 KM	5.366.677.000	DAK Bidang Jalan	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Dipeli-hara Secara Berkala	1,191 KM	1.263.606.728	PAD	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Dipeli-hara Secara Berkala	1,191 KM	2.263.606.728	PAD	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Suka-bumi	Jumlah Jembatan yang Di-pelihara Secara Rutin	1 Jem-batan	500.000.000	PAD	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Suka-bumi	Jumlah Jembatan yang Di-pelihara Secara Rutin	1 Jem-batan	500.000.000	PAD	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Direha-bilitasi	12 Km	3.540.857.122	PAD	Rehabilitasi Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Direha-bilitasi	12 Km	4.065.857.122	PAD	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Dipeli-hara Secara Rutin	0,91 KM	3.664.861.495	PAD	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Suka-bumi	Panjang Jalan yang Dipeli-hara Secara Rutin	0,91 KM	3.964.861.495	PAD	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	38,01%	97.500.000		Program Pengem-bangan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	38,01%	97.500.000		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Dokumen Penye-lenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Doku-men	97.500.000		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Dokumen Penye-lenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Doku-men	97.500.000		
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Suka-bumi	Jumlah Tenaga Kerja Kon-struksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Ana-lis yang Dilatih	15 Orang	97.500.000	PAD	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Suka-bumi	Jumlah Tenaga Kerja Kon-struksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Ana-lis yang Dilatih	15 Orang	97.500.000	PAD	
1.03.12	PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PE-NATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pen-gendalian Pemanfaatan Ru-ang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	70,00%	693.999.080		PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PE-NATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pen-gendalian Pemanfaatan Ru-ang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	70,00%	693.999.080		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabu- paten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wila- yah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1 Doku- men	514.999.080		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabu- paten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wila- yah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1 Doku- men	528.499.080		
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Ka- bupaten/Kota	Kota Suka- bumi	Jumlah Perkada RDTR Ka- bupaten/Kota	1 Doku- men	499.999.080	PAD	Penetapan RDTR Ka- bupaten/Kota	Kota Suka- bumi	Jumlah Perkada RDTR Ka- bupaten/Kota	1 Doku- men	499.999.080	PAD	
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kota Suka- bumi	Jumlah pemangku kepent- ingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	20 Orang	15.000.000	PAD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kota Suka- bumi	Jumlah pemangku kepent- ingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	40 Orang	28.500.000	PAD	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sink- ronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordi- nasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku- men	105.000.000		Koordinasi dan Sink- ronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordi- nasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku- men	105.000.000		
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sink- ronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Koordi- nasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabu- paten/Kota	2 Doku- men	100.000.000	PAD	Koordinasi dan Sink- ronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Koordi- nasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabu- paten/Kota	2 Doku- men	100.000.000	PAD	
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pe- nataan Ruang	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Pening- katan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Doku- men	5.000.000	PAD	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pe- nataan Ruang	Kota Suka- bumi	Jumlah Dokumen Pening- katan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Doku- men	5.000.000	PAD	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sink- ronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabu- paten/Kota		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ke- tentuan waktu yang berlaku	10 Layanan	65.000.000		Koordinasi dan Sink- ronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabu- paten/Kota		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ke- tentuan waktu yang berlaku	10 Layanan	36.500.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pem-anfaatan Ruang	Kota Suka-bumi	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaat-an ruang	1 Doku-men	45.000.000	PAD	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pem-anfaatan Ruang	Kota Suka-bumi	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaat-an ruang	1 Doku-men	30.000.000	PAD	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Suka-bumi	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Doku-men	20.000.000	PAD	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Suka-bumi	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Doku-men	6.500.000	PAD	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabu-paten/Kota		Jumlah Dokumen Koordi-nasi dan Sinkronisasi Pen-gendalian Pemanfaatan Ru-ang Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku-men	9.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabu-paten/Kota		Jumlah Dokumen Koordi-nasi dan Sinkronisasi Pen-gendalian Pemanfaatan Ru-ang Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku-men	24.000.000		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksa-naan Penataan Ruang	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Koordi-nasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Doku-men	9.000.000	PAD	Koordinasi Pelaksa-naan Penataan Ruang	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Koordi-nasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Doku-men	24.000.000	PAD	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PE-RUMAHAN DAN KAWASAN PER-MUKIMAN				6.185.360.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PE-RUMAHAN DAN KAWASAN PER-MUKIMAN				6.185.360.000		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	100,00%	476.000.000		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	100,00%	726.000.000		
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1 Doku-men	10.000.000		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1 Doku-men	10.000.000		
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabu-paten/Kota	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabu-paten/Kota yang Terverifikasi	1 Doku-men	10.000.000	PAD	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabu-paten/Kota	Kota Suka-bumi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabu-paten/Kota yang Terverifikasi	1 Doku-men	10.000.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Per- siapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabu- upaten/Kota		Jumlah Orang Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relo- kasi Program Kabu- upaten/Kota	4 Orang	12.000.000		Sosialisasi dan Per- siapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabu- upaten/Kota		Jumlah Orang Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relo- kasi Program Kabu- upaten/Kota	4 Orang	12.000.000		
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Suka- bumi	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Ter- bentuk dan Terlatih	4 Orang	12.000.000	PAD	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Suka- bumi	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Ter- bentuk dan Terlatih	1 Orang	12.000.000	PAD	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Re- habilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabu- upaten/Kota		Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pro- gram Kabupaten/Kota	11 Unit	279.000.000		Pembangunan dan Re- habilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabu- upaten/Kota		Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pro- gram Kabupaten/Kota	11 Unit	529.000.000		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Suka- bumi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	7 Unit Ru- mah	139.000.000	PAD	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Suka- bumi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	289.000.000	PAD	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kota Suka- bumi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Ru- mah	140.000.000	PAD	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kota Suka- bumi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 Unit Ru- mah	240.000.000	PAD	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengel- olaan Rumah Susun Umum dan/atau Ru- mah Khusus		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengel- olaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rusun	1 Laporan	175.000.000		Pembinaan Pengel- olaan Rumah Susun Umum dan/atau Ru- mah Khusus		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengel- olaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rusun	1 Laporan	175.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Suka- bumi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	175.000.000	PAD	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Suka- bumi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	175.000.000	PAD	
1.04.03	PROGRAM KAWA- SAN PERMUKIMAN		Luasan Pengurangan Kawas- san Kumuh	10 Ha	4.308.000.000		PROGRAM KAWA- SAN PERMUKIMAN		Luasan Pengurangan Kawas- san Kumuh	10 Ha	4.608.000.000		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Luas Permukiman Kumuh yang ditangani	10 Ha	4.308.000.000		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Luas Permukiman Kumuh yang ditangani	10 Ha	4.608.000.000		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Suka- bumi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	500.000.000	PAD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Suka- bumi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	500.000.000	PAD	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Suka- bumi	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	2.560.000.000	Bankeu	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Suka- bumi	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	2.560.000.000	Bankeu	
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Suka- bumi	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	1.248.000.000	PAD dan Bankeu	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Suka- bumi	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	1.548.000.000	PAD dan Bankeu	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	1,37%	1.050.000.000		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	1,37%	500.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.04.2.01	Pencegahan Pe- rumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabu- paten/Kota		Jumlah Rumah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	31 Unit	1.050.000.000		Pencegahan Pe- rumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabu- paten/Kota		Jumlah Rumah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	31 Unit	500.000.000		
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni un- tuk Pencegahan Ter- hadap Tumbuh dan Berkem- bangnya Permukiman Per- mukiman Kumuh di Luar Kawasan Per- mukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Suka- bumi	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Ter- hadap Tumbuh dan Berkem- bangnya Permukiman Ku- muh di Luar Kawasan Per- mukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	31 Unit	1.050.000.000	PAD	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni un- tuk Pencegahan Ter- hadap Tumbuh dan Berkem- bangnya Permukiman Per- mukiman Kumuh di Luar Kawasan Per- mukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Suka- bumi	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Ter- hadap Tumbuh dan Berkem- bangnya Permukiman Ku- muh di Luar Kawasan Per- mukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	17 Unit Rumah	500.000.000	PAD	
1.04.05	PROGRAM PENING- KATAN PRASA- RANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	11,38%	351.360.000		PROGRAM PENING- KATAN PRASA- RANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	11,38%	351.360.000		
1.04.05.2.01	Usuran Penyeleng- garaan PSU Pe- rumahan		Jumlah Peningkatan Pemeli- haraan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2 Lokasi	351.360.000		Usuran Penyeleng- garaan PSU Pe- rumahan		Jumlah Peningkatan Pemeli- haraan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2 Lokasi	351.360.000		
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Suka- bumi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hu- nian	2 Lokasi	331.893.000	PAD	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Suka- bumi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hu- nian	2 Lokasi	331.893.000	PAD	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Suka-bumi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	12.978.000	PAD	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Suka-bumi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	12.978.000	PAD	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penye- rahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Suka- bumi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	6.489.000	PAD	Verifikasi dan Penye- rahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Suka- bumi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	6.489.000	PAD	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA- YANAN DASAR				30.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA- YANAN DASAR				80.000.000		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PER- TANAHAN				30.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PER- TANAHAN				80.000.000		
2.10.10	PROGRAM PENATA- GUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	70,00%	30.000.000		PROGRAM PENATA- GUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	70,00%	80.000.000		
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penggunaan Tanah	4 Laporan	30.000.000		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penggunaan Tanah	4 Laporan	80.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE REKEN- ING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LO- KASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDI- KATIF 2024 PROGRAM KEGIATAN	SUM- BER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000	PAD	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	80.000.000	PAD	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG RANCANGAN AWAL RKPD 2024					64.785.784.690		JUMLAH BELANJA LANGSUNG HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SKPD 2024					68.805.784.690	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi sebagai salah satu SKPD yang mempunyai urusan pembangunan dibidang infrastruktur perkotaan yaitu:

- a. Urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman
- c. Urusan pemerintah bidang pertanahan

Dimana tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan infrastruktur kota dan penataan ruang dilakukan dengan menginventarisasi usulan masyarakat dengan cara menyerap aspirasi/usulan atau masukan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya baik melalui proses musrenbang maupun usulan yang ditujukan langsung kepada SKPD.

Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dianalisa secara teknis maupun kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bidang teknis terkait yang kemudian disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan dilanjutkan dengan penyusunan skala prioritas sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi tahun 2024 – 2026. Sebagai hasil akhir usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagai stakeholder dapat dilihat dalam Tabel T-C.32 di bawah ini.

TABEL 4 T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
1	<i>Pengerukan Kali Kelurahan Gunungpuyuh</i>	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	<i>(Gg Pesantren RT 01 RW 06 Kelurahan Gunungpuyuh, Gunung Puyuh, Kec. Gunungpuyuh)</i>	<i>1.800 (M2)</i>	<i>150.000.000</i>	
2	<i>Perbaikan Pintu Air</i>	<i>Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi</i>	<i>(RT 003 RW 005 KELURAHAN BENTENG, Benteng, Kec. Warudoyong)</i>	<i>1 (Paket)</i>	<i>19.100.000</i>	
3	<i>Pondasi Irigasi</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	<i>(Tanjung RT. 003 RW. 003, Baros, Kec. Baros)</i>	<i>200 (Meter)</i>	<i>100.000.000</i>	
4	<i>Perbaikan Talud bantaran Sungai Gg. Masjid (Kelurahan Kebonjati)</i>	<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi</i>	<i>(Gg. Masjid RT. 005 RW. 007, Kebonjati, Kec. Cikole)</i>	<i>106,3 (M3)</i>	<i>80.000.000</i>	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
5	<i>Saluran Irigasi</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	<i>(Lokasi Berada Di Wilayah RW. 001 s/d RW. 008 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Situmekar, Kec. Lembursitu)</i>	<i>1 (M3)</i>	<i>200.000.000</i>	
6	<i>PEMBANGUNAN BENDUNGAN KELURAHAN WARUDOYONG</i>	<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun</i>	<i>(Jalan Dwikora RT 03 RW 03 Kelurahan Warudoyong, Warudoyong, Kec. Warudoyong)</i>	<i>1 (Paket)</i>	<i>75.000.000</i>	
7	<i>Pembangunan Sanitasi Lingkungan Kel. Cikundul</i>	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>(Pembangunan Sanitasi Lingkungan Sarana Air Bersih di RW 06, 07 dan 09 Kelurahan Cikundul, Cikundul, Kec. Lembursitu)</i>	<i>3 (Unit)</i>	<i>150.000.000</i>	
8	<i>SAB</i>	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>(RW.003 & 004, Tipar, Kec. Citamiang)</i>	<i>1 (Paket)</i>	<i>300.000.000</i>	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
9	Sarana Air Bersih/ SAB Kelurahan Cikondang	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	(Pembuatan Sarana Air Bersih Di Wilayah RT.001 RW.001 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 (Unit)	50.000.000	
10	PEMBANGUNAN SEPTTANK KOMUNAL	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(Rw 03 Rt 02,04 Dengan Volume 3 X 1.5 M Rw 07 Rt 02 Dengan Volume 3 X 1.5 M, Sukakarya, Kec. Warudoyong)	2 (Unit)	200.000.000	
11	PEMBUATAN SEPTICTANK KEL. NANGGELENG	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(RW 01,02,03,04,09,10 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	8,33 (Unit)	500.000.000	
12	SEPTICKTANK Kelurahan Cipanengah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(RW. 01,02,04,06,07 dan 08 Kel. Cipanengah, Cipanengah, Kec. Lembursitu)	20 (Paket)	150.000.000	
13	Pembangunan Sanitasi Lingkungan Kel. Cikundul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(Pembangunan 6 unit Septiktank Komunal Biofil di RW 06, 08, 09, dan 10 Kel. Cikundul, Cikundul, Kec. Lembursitu)	3 (Unit)	150.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
14	PEMBANGUNAN SEPTITANK KOMUNAL	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(Kel.cibeureum hilir, Cibeureum Hilir, Kec. Cibeureum)	15 (Unit)	80.000.000	
15	Renovasi MCK (Kelurahan Kebonjati)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	(Kota Paris Timur RT. 006 RW. 008, Kebonjati, Kec. Cikole)	8 (M2)	150.000.000	
16	SEPTICTANK KELURAHAN CISARUA	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(RW.013-014 KELURAHAN CISARUA KECAMATAN CIKOLE KOTA SUKABUMI, Cisarua, Kec. Cikole)	60 (Unit)	150.000.000	
17	Septiktank - Kelurahan Sudajaya-hilir	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	(Wilayah RW 01 sampai dengan 08, Sudajaya Hilir, Kec. Baros)	25 (Unit)	100.000.000	
18	Pelebaran Drainase Kelurahan Gunungpuyuh	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Jl. Gotong Royong RT 001 RW 011 kelurahan Gunungpuyuh, Gunung Puyuh, Kec. Gunungpuyuh)	110 (M2)	80.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
19	PEMASANGAN TPT (PENYANGGA TEBING) KELURAHAN KARAMAT	Panjang Sistem Drainase Ling- kungan yang Dioptimalisasi	(JL KOPENG RT.003 RW.002, Karamat, Kec. Gunungpuyuh)	52 (Meter)	80.000.000	
20	Pembangunan Drainase	Panjang Saluran Drainase Ling- kungan yang Dibangun	(Jl. Nilam Raya Perum Baros RT. 002 dan RT. 003 RW. 015, Baros, Kec. Baros)	350 (Meter)	42.000.000	
21	Pembangunan Gorong-gorong Batas Kota	Panjang Saluran Drainase Ling- kungan yang Dibangun	(Sukasari RT. 002 RW. 007, Baros, Kec. Baros)	400 (Meter)	80.000.000	
22	Pembangunan TPT Kelurahan Baros	Panjang Saluran Drainase Ling- kungan yang Dibangun	(Legok Caringin RT. 003 RW. 018, Baros, Kec. Baros)	35 (Meter kubik)	75.250.000	
23	Pembangunan TPT RW 004 Kel. Ba- bakan	Panjang Saluran Drainase Ling- kungan yang Dibangun	(Jl. Gebang Kelurahan Babakan Kota Sukabumi, Babakan, Kec. Cibeureum)	1 (Unit)	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
24	Pembangunan TPT RW 008 Kel. Babakan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	(Jl. kebon Kalapa Kelurahan Babakan Kota Sukabumi, Babakan, Kec. Cibeureum)	1 (Paket)	53.450.000	
25	PEMBUATAN SODETAN	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RT. 007, RT. 008 RW. 008, Nyomplong, Kec. Warudoyong)	100 (Meter)	30.000.000	
26	DRAINASE	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW 01, 04, 05, 08, 10, 11 KELURAHAN LIMUSNUNGGAL, Limusnunggal, Kec. Cibeureum)	1 (Paket)	150.000.000	
27	Drainase	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Jl. Letda T Asmita RT 003 RW 002 Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 (Paket)	80.000.000	
28	Drainase Kelurahan Cikondang	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Perbaikan Drainase dengan Volume 400 M Di wilayah Keseluruhan RW.003 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 (Paket)	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
29	DRAINASE Kelurahan Cipanengah	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW. 01,02,05,06,07 dan 08 Kel. Cipanengah, Cipanengah, Kec. Lembursitu)	585 (Meter)	200.000.000	
30	DRAINASE TERTUTUP KELURAHAN CISARUA	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW.001-019 KELURAHAN CISARUA KECAMATAN CIKOLE KOTA SUKABUMI, Cisarua, Kec. Cikole)	270 (M ³)	100.000.000	
31	Dreinaase Pembuangan Air Kelurahan Sriwidari	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW.08,9,10,11,13, Sriwidari, Kec. Gunungpuyuh)	1 (Paket)	75.000.000	
32	Gorong-gorong (Kelurahan Selabatu)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW 004 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Selabatu, Kec. Cikole)	1 (Paket)	80.000.000	
33	Pek. Gorong-gorong / Drainase, (Kelurahan Kebonjati)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Sekitaran Gg. Maksudi dan Gg. H. Marjuji IV RT. 03, 04 dan 06 RW. 06, Kebonjati, Kec. Cikole)	1 (Paket)	50.000.000	
34	Perbaikan Drainase JLTB Abdullah (Kelurahan Selabatu)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW 008 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Selabatu, Kec. Cikole)	1 (Paket)	50.000.000	
35	Perbaikan Saluran Air	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Kp. Kota Baru RW 01 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 (Paket)	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
36	Pondasi Selokan (Keluarahan Selabatu)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW 003 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Selabatu, Kec. Cikole)	80 (Meter)	75.000.000	
37	REHABILITASI DRAINASE KEL. NANGGELENG	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW 06,07,08,11 KEL. NANGGELENG KEC.CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	300 (Meter)	200.000.000	
38	Saluran Air Kelurahan Karangtengah	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Kelurahan Karangtengah RW 08, 12, 14 dan 15, Karang Tengah, Kec. Gunungpuyuh)	1 (Paket)	200.000.000	
39	Talud (Kelurahan Cikole)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(Gg. Yakub RT. 001 RW. 002, Cikole, Kec. Cikole)	300 (M ³)	80.000.000	
40	TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT) Kelurahan Cipanengah	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW. 01,02,03,06 dan 08 Kel. Cipanengah, Cipanengah, Kec. Lembursitu)	400 (Meter)	200.000.000	
41	PERBAIKAN GORONG-GORONG	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	(RW. 008, Nyomplong, Kec. Warudoyong)	600 (Meter)	180.000.000	
42	SUMUR ARTESIS KELURAHAN KARAMAT	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	(JL Kabandungan RT.004 RW.008, Karamat, Kec. Gunungpuyuh)	1 (Titik)	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Besaran	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
43	<i>Pengecoran Jalan Perana dan Perbaikan Saluran air (Kelurahan Cikole)</i>	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	<i>(Jl. Perana RT. 005 RW. 005, Cikole, Kec. Cikole)</i>	<i>70 (M²)</i>	<i>505.050.000</i>	
44	<i>Rumah Tidak Layak Huni/Rutilahu Kelurahan Gunungparang</i>	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	<i>(RW.01 - 09 Kelurahan Gunungparang, Gunungparang, Kec. Cikole)</i>	<i>21 (Unit)</i>	<i>250.000.000</i>	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melakukan sinkronisasi integritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi telah membuat rencana kerja yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Adapun rencana kerja tersebut meliputi penyusunan program dan kegiatan yang terdapat dalam 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
dan
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

Selanjutnya dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi ini selalu berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi sebagai bentuk penjabaran dari ketentuan yang dimuat dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sebagai tindak lanjut juga dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi diantaranya:

1. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
2. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
4. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
5. Konektivitas Jalan

Kegiatan pembangunan sebagaimana telah disebutkan diatas tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud penyusunan renja ini adalah untuk mewujudkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dan memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, dimana dalam RPD ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, dan kinerja pemerintahan daerah.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dalam melaksanakan pembangunan dengan bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berada pada 3 (tiga) urusan tersebut selama kurun waktu Tahun 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi tahun 2024-2026 dijelaskan bahwa pada tahun 2024 ada beberapa perubahan dalam cara pengelompokan kegiatan dan sub kegiatan, salah satunya disebabkan adanya peraturan baru yang harus diikuti. Sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi mendukung terhadap Tujuan 3 dan Tujuan 4 RPD, yang artinya mempunyai peran untuk mewujudkan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Pernyataan Tujuan 3 dan Tujuan 4 RPD tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. Menciptakan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Menciptakan rasa aman dan kesiapsiagaan bencana; dan
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis.

Disebutkan dalam Renstra bahwa tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diantaranya:

1. Terciptanya Infrastruktur Kota yang Berkualitas;
2. Terciptanya Kota dengan Hunian yang Layak;

3. Terciptanya Kesiapsiagaan Kawasan Permukiman dari Bencana Banjir dan Longsor; dan
4. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel.

Adapun sasaran rencana kerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diantaranya:

1. Terwujudnya Jalan Kota yang Berkualitas;
2. Terwujudnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Sesuai Standar;
3. Terwujudnya Kota Tanpa Permukiman Kumuh;
4. Terwujudnya Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Berkualitas;
5. Terwujudnya Tata Ruang Kota yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang;
6. Terwujudnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat;
7. Terwujudnya Kawasan Permukiman Tanpa Banjir dan Longsor; dan
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi telah menyusun beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan kepada ke tiga urusan yaitu 15 (lima belas) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, dan 90 (sembilan puluh sembilan) sub kegiatan. Untuk Jelasnya diuraikan berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 2.1.2. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 2.1.3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 2.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.2.2. Pembangunan Bendung Irigasi
 - 2.2.3. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.2.4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.2.5. Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 2.2.6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.2.7. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 - 2.2.8. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 3.1.2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 3.1.3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
 - 4.1.2. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

- 4.1.3. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- 4.1.4. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- 4.1.5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - 5.1.2. Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
 - 5.1.3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
- 6. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 6.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 6.1.1. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.3. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- 7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 7.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 - 7.1.2. Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 - 7.1.3. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 8.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 8.1.1. Pengelolaan Leger Jalan
 - 8.1.2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 8.1.3. Rekonstruksi Jalan
 - 8.1.4. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 8.1.5. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - 8.1.6. Rehabilitasi Jalan
 - 8.1.7. Pemeliharaan Rutin Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 9.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 9.1.1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 10.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 10.1.1. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
 - 10.1.2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 - 10.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 10.2.2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 10.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.3.1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - 10.3.2. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
 - 10.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.4.1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
11. Program Pengembangan Perumahan
 - 11.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 11.1.1. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- 11.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 11.2.1. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
- 11.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 11.3.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 11.3.2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
- 11.4. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - 11.4.1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- 12. Program Kawasan Permukiman
 - 12.1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 12.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - 12.1.2. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 12.1.3. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
- 13. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 13.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 13.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 14.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 14.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 14.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - 14.1.3. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
- 15. Program Penatagunaan Tanah
 - 15.1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - 15.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan untuk Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi maupun Kota Sukabumi yang akan diuraikan dalam bab ini. Rencana pada tahun 2024 seperti yang sudah dijelaskan bahwa rencana anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak Rp. 68.805.784.690,-. Secara otomatis untuk kebutuhan lainnya yang terkait dengan pelayanan terhadap internal dinas juga masih memerlukan penambahan anggaran.

Rencana anggaran pendapatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 418.000.000. Dan rencana kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi diperkirakan sebesar Rp. 54.531.072.330,- angka tersebut didapat dari hasil proyeksi tahun 2025.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2024 berikut.

Tabel 5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								40.221.023.237	55.217.039.010	68.805.784.690	28.584.761.453						54.531.072.330	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.191.023.237	55.187.039.010	68.725.784.690	28.534.761.453							54.510.072.330	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							38.330.663.237	52.309.679.010	62.540.424.690	24.209.761.453							48.962.910.641	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	15.284.175.832	15.505.109.405	15.559.528.085	-543.584.528							14.740.591.304	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAIPAIN RENJATA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterse-diaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah				-	1	26.850.000	40.000.000	38.100.000	11.250.000			-	-	Dinas PUPTR		34.460.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	18.100.000	-1.900.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-			1.375.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI- KATOR PRO- GRAM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RG ET AK HIR PE RI- OD E RE NS TR A OP D	RE- ALIS ASI CA- PAIA N RENJ A OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRA AN CA- PAIA N TAR- GET RENJ A OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE- LO MP OK SA SA- RA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PE- NANG- UNG JA- WAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber- tambah/Berku- rang (10-12)	LO- KASI	SUM- BER DAN A	PRIORI- TAS			T A R G E T	PAGU INDI- KATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU- BAHAN 2024				NA- SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Hasil Koordi- nasi Penyusu- nan Dokumen RKA- SKPD										Semua Kel/Des a	DAE- RAH (PAD)						TATA RUANG
	1.03.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Peru- bah RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordi- nasi Penyusu- nan Dokumen Peru- bah RKA- SKPD				1 Doku- men	1 Doku- men	1.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	PEN- DAP ATAN ASLI DAE- RAH (PAD)	-	-			1.375.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan				1 Doku- men	1 Doku- men	1.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan,	PEN- DA- PA- TAN ASLI	-	-			1.375.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DAN A	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	4 Laporan	2.000.000	5.150.000	5.150.000	3.150.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.025.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	850.000	850.000	850.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			935.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAP OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAP OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1	9.844.681.832	8.874.502.465	8.913.921.145	-930.760.687			-	-	-		9.488.740.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	69 Orang/bulan	9.841.781.832	8.869.502.465	8.908.921.145	-932.860.687	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.485.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAIPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAIPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				1 Laporan	3 Laporan	900.000	2.000.000	2.000.000	1.100.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			990.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			880.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2_03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	600.000	600.000	600.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			660.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DAN A	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterseediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Standar				-	1	250.750.000	250.750.000	246.950.000	-3.800.000			-	-	-		3.025.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	750.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			825.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAIPAJNRENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAJN TARGETRENJA OPDTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDAN A	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.500.000	15.500.000	17.570.000	2.070.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.050.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	65.000.000	66.130.800	66.130.800	1.130.800	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang				1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	27.646.000	7.646.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			16.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAIPAJAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAJAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dise-dikan										Kel/Des a	(PAD)						
	1.03.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Peng-gandaan yang Dise-dikan				2 Pa-ket	1 Pa-ket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kota Suka-bumi, Semua Keca-matan, Semua Kel/Des a	PEN-DAP ATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			11.000.000	DINAS PEKER-JAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Doku-men Ba-han Bacaan dan Per-aturan Perun-dang-Un-dangan yang				1 Doku-men	1 Doku-men	9.500.000	9.500.000	9.500.000	-	Kota Suka-bumi, Semua Keca-matan, Semua Kel/Des a	PEN-DAP ATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			10.450.000	DINAS PEKER-JAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAP OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAP OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pen-tausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.750.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan				-	1	370.000.000	895.316.000	880.800.000	510.800.000			-	-	-		310.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	270.000.000	368.246.000	348.030.000	78.030.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI- KATOR PRO- GRAM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RG ET AK HIR PE RI- OD E RE NS TR A OP D	RE- ALIS ASI CA- PAIA N RENJ A OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRA AN CA- PAIA N TAR- GET RENJ A OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PE- NANGG UNG JA- WAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber- tambah/Berku- rang (10-12)	LO- KASI	SUM- BER DAN A	PRIORI- TAS		KE- LO MP OK SA RA- N	T A R G E T		PAGU INDI- KATIF (Rp)
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU- BAHAN 2024				NA- SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penye- diaan Jasa Su- rat Me- nyurat				1 Lapor an	1 Lapor an	1.200.000	1.200.000	1.700.000	500.000	Kota Suka- bumi, Semua Kecaa- matan, Semua Kel/Des a	PEN- DAP ATAN ASLI DAE- RAH (PAD)	-	- -			1.320.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penye- diaan Jasa Komu- nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise- diakan				5 Lapor an	5 Lapor an	400.000.000	347.729.500	357.729.500	-42.270.500	Kota Suka- bumi, Semua Kecaa- matan, Semua Kel/Des a	PEN- DAP ATAN ASLI DAE- RAH (PAD)	-	- -			412.500.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penye- diaan Jasa Peralata n dan Per-				2 Lapor an	2 Lapor an	2.730.244.000	2.729.762.000	2.729.762.000	-482.000	Kota Suka- bumi, Semua Kecaa- matan, Semua Kel/Des a	PEN- DAP ATAN ASLI DAE- RAH (PAD)	-	- -			3.003.268.400	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAIPAIA N RENJ A OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIA N TARGET RENJ A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDAN A	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	899.100.000	304.000.000	304.000.000	-595.100.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				-	1 Unit	-	-	5.580.327.000	5.580.327.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Optimisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			5.311.327.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI- KATOR PRO- GRAM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RG ET AK HIR PE RI- OD E RE NS TR A OP D	RE- ALIS ASI CA- PAIA N RENJ A OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRA AN CA- PAIA N TAR- GET RENJ A OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PE- NANGG UNG JA- WAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber- tambah/Berku- rang (10-12)	LO- KASI	SUM- BER DAN A	PRIORI- TAS		KE- LO MP OK SA RA- N	T A R G E T		PAGU INDI- KATIF (Rp)
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU- BAHAN 2024				NA- SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2 .01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Ben- dung Pengen- dali Ban- jir yang Dibangu n				4 Unit	4 Unit	80.000.000	164.000.000	164.000.000	84.000.000	Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	PEN- DAP ATAN ASLI DAE- RAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2 .01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Doku- men Rencana Teknis dan Doku- men Ling- kungan Hidup untuk Kon- struksi Ben- dungan, Danau dan Banguna n Pen- ampung Air				1 Doku- men	3 Doku- men	300.000.000	400.000.000	400.000.000	100.000.000	Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	PEN- DAP ATAN ASLI DAE- RAH (PAD)	-	-			900.000.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				0 Bendung	1 Bendung	100.000.000	100.000.000	96.000.000	-4.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0.1 KM	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang				0.10 KM	0.1 KM	430.000.000	350.000.000	400.000.000	-30.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-			1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Direhabilitasi										Semua Kel/Des a Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Situmekar Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Kebonjati	DAERAH (PAD)						TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				0 Bendung	1 Bendung	175.000.000	100.000.000	125.000.000	-50.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAIPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIAN TARGET RENJATAH OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DAN A	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diope-rasikan dan Di-pelihara				0 KM	20 KM	100.000.000	353.080.000	353.080.000	253.080.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Diope-rasikan dan Di-pelihara				0 Bendung	12 Bendung	100.000.000	420.020.000	420.020.000	320.020.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan				0 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	493.000.000	493.000.000	193.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAE-RAH	-	-			900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI-KATOR PRO-GRAM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RG ET AK HIR PE RI-OD E RE NS TR A OP D	RE-ALIS ASI CA-PAIA N RENJ A OPD TA-HUN 2022	PRA-KIRA AN CA-PAIA N TAR-GET RENJ A OPD TA-HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE-LO MP OK SA SA-RA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PE-NANGG UNG JA-WAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkur-ang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			T A R G E T	PAGU INDI-KATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU-BAHAN 2024				NA-SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Doku- men Ling- kungan Hidup untuk Kon- struksi Irigasi dan Rawa yang Disusun										Kel/Des a	(PAD)						
3	1.03.03	PROGRAM PENGEL-OLAAN DAN PENGEM-BANGAN SISTEM PENYE-DIAAN AIR MINUM	-				-	-	789.437.310	3.577.766.310	3.577.766.310	-512.462.514							276.974.796	
	1.03.03.2.01	Pengel-olaan dan Pengem-bangan Sis-tem Penye-diaan Air Mi-num (SPAM) di Daerah Ka-bu-paten/Kota	Jumlah Penam-bahan Sam-bungan Rumah dengan Penam-bahan Jaringan Perpi-paan pada SPAM IKK/Perk				-	500 SR	789.437.310	3.577.766.310	3.577.766.310	2.788.329.000			-	-	-		276.974.796	DINAS PEKER-JAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Sams- bungan Rumah yang ter- layani oleh per- luasan Sistem Penye- diaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpi- paan				10 SR	500 SR	684.000.000	3.472.329.00 0	3.392.329.000	2.708.329.000	Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Tipar Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Cikondang Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Cipanengah Kota Suka- bumi, Semua Keca- matan, Cikundul	PEN- DAP ATA N ASLI DAE- RAH (PAD) DAN A TRA NSFE R KHU- SUS- DAN A ALO- KASI KHU- SUS FISIK	-	-			102.000.000	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG		
4	1.03.05	PROGRAM PENGEL- OLAAAN DAN PENGEM- BANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-			-	-		2.061.549.90 5	4.028.889.00 0	4.128.889.000	-826.670.007									1.234.879.89 8	
	1.03.05.2 .01	Pengel- olaan dan Pengem- bangan Sis- tem Air Limbah Do- mestik da- lam Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sistem Pengel- olaan Air Limbah			-	6704 3 RT		2.061.549.90 5	4.028.889.00 0	4.128.889.000	2.067.339.095			-	-	-				1.234.879.89 8	DINAS PEKER- JAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kabupaten/Kota																		
	1.03.05.2 01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0 M ³ /H ari	0,8 M ³ /H ari	850.000.000	3.249.340.000	3.249.340.000	2.399.340.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Nanggaleng Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Sukakarya Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAIPAIA N RENJ A OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIA N TARGET RENJ A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDAN A	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Cipang-gah Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Situmekar							
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAD	REALISASI CAPAIAN RENJADTAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJADTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	639.500.000	100.000.000	100.000.000	-539.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Kebonjati Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Cisarua Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Cikundul Kota Sukabumi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAP OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAP OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kecamatan, Cibeureum Hilir							
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				30 Rumah Tangga	7 Rumah Tangga	250.000.000	347.500.000	447.500.000	197.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI- KATOR PRO- GRAM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RG ET AK HIR PE RI- OD E RE NS TR A OP D	RE- ALIS ASI CA- PAIA N RENJ A OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRA AN CA- PAIA N TAR- GET RENJ A OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE- LO MP OK SA RA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PE- NANGG- UNG JA- WAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber- tambah/Berkur- ang (10-12)	LO- KASI	SUM- BER DAN A	PRIORI- TAS			T A R G E T	PAGU INDI- KATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU- BAHAN 2024				NA- SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				250 M	250 M	640.700.000	2.661.700.000	2.661.700.000	2.021.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Gunung Puyuh Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Karamat Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Nyomplong Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAL OPD	REALISASI CAIPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berku-rang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS		KE-LO MP OK SA SA-RA N	T A R G E T	PAGU INDI-KATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU-BAHAN 2024				NA-SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	180.000.000	-	-	-180.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Nyomplong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000	-	-	-50.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kel/Desa	(PAD)						
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun					0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000	-	-	-100.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Karamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-					-	-	2.762.296.175	4.141.034.200	5.471.034.200	418.274.455						3.180.570.630	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar					-	2 Gedung	2.762.296.175	4.141.034.200	5.471.034.200	2.708.738.025			-	-	-	3.180.570.630	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP 2022	REALISASI CAPAIAN RENJAP OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAP OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Bangunan Gedung																		
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				7 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	1.737.769.025	2.577.768.800	3.562.768.800	1.824.999.775	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.072.590.765	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRANSKRASIONAL	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis				20 Dokumen	20 Dokumen	784.527.150	988.265.400	1.333.265.400	548.738.250	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			862.979.865	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			PAGU INDI-KATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1.00 Kawasan	1 Kawasan	1.445.000.000	1.895.000.000	2.095.000.000	650.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.001.193.320	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawa-				1.00 Dokumen	1 Dokumen	245.372.000	245.372.000	245.372.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			296.900.120	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			san Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan																	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	639.400.000	939.400.000	939.400.000	300.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.674.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRANSKRANSI	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDI-KATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	565.806.670	565.806.670	565.806.670	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			594.097.004	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0.00 KM	0,35 KM	1.000.000	5.366.677.000	5.366.677.000	5.365.677.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A TRANSFER KHUSUS-DAN	-	-			1.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				12.00 KM	12 KM	3.340.857.122	3.540.857.122	4.065.857.122	725.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.902.643.497	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0.90 KM	0,91 KM	3.019.861.495	3.019.861.495	3.964.861.495	945.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Cikole	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			461.999.827	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	47.500.000	97.500.000	97.500.000	5.000.000							52.500.000	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan				-	1 Dokumen	47.500.000	97.500.000	97.500.000	50.000.000			-	-	-		52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAIPA IN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPA IN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS		KE-LOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																	TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				1 Orang	15 Orang	47.500.000	97.500.000	97.500.000	50.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	694.000.000	693.999.080	693.999.080	-383.199.164							310.800.836	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				-	1 Dokumen	515.000.000	514.999.080	528.499.080	13.499.080			-	-	-		20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAP OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAP OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(RRTR) Kabupaten/Kota	dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	499.999.080	499.999.080	-920	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				2 Orang	20 Orang	15.000.000	15.000.000	28.500.000	13.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAH OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAH OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				-	10 Layanan	65.000.000	65.000.000	36.500.000	-28.500.000			-	-	Kota Sukabumi		75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				12 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	45.000.000	30.000.000	-15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAIPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				3 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	6.500.000	-13.500.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pem-anfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pem-anfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	24.000.000	15.000.000			-	-	-		6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi				2 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	24.000.000	15.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-			6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAIPAJAN RENJATA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAJAN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.291.689	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				-	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-			-	-	-		12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim				2 Orang	4 Orang	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-			12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI-KATOR PRO-GRAM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RGET AK HIR PE RI-OD E REN STR A OP D	RE-ALIS ASI CA-PAIA N RENJ A OPD TA-HUN 2022	PRA-KIRA AN CA-PAIA N TAR-GET RENJ A OPD TA-HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANG KAT DAERAH PE-NANGG UNG JA-WAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkur-ang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS		KE-LO MP OK SA RA N	T A R G E T	PAGU INDI-KATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SES UDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERU-BAHAN 2024				NA-SIO NAL	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih										Semua Kel/Des a	DAE-RAH (PAD)						TATA RUANG
	1.04.02.2 .03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	11 Unit Rumah	79.000.000	279.000.000	529.000.000	450.000.000			-	-	-		79.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.02.2 .03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	7 Unit Rumah	39.000.000	139.000.000	289.000.000	250.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAE-RAH (PAD)	-	-			39.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	4.608.000.000	4.351.570.000							5.351.570.000	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh Yang Berkurang Yang Mendapatkan Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar				-	10 Ha	1.000.000.000	1.000.000.000	4.608.000.000	3.608.000.000			-	-	Wilayah Yang Masuk Wilayah		5.351.570.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPAD	REALISASI CAIPAIA RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAIPAIA N TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	-500.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				-	10 Ha	-	-	2.560.000.000	2.560.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			2.560.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														DAERAH PROVINSI		Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa				
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				10.00 Ha	10.00 Ha	-	500.000.000	1.548.000.000	1.548.000.000	#####	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH	-	-			2.791.570.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Per-mukiman Kumuh di Luar Kawasan Per-mukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				2 Unit Rumah	31 Unit Rumah	500.000.000	1.050.000.000	500.000.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Gunungparang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	84.360.000	351.360.000	351.360.000	-84.360.000							-	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAP OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber-tambah/Berkurang (10-12)	LO-KASI	SUM-BER DAN A	PRIORI-TAS		KE-LOMPOK SARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan	1 Laporan	12.978.000	12.978.000	12.978.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				0 Laporan	1 Laporan	6.489.000	6.489.000	6.489.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

BAB V PENUTUP

Dokumen rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun untuk digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk satu tahun kedepan selama Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Renja ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi serta memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi, dimana dalam RPD ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas termasuk kerangka pendanaan dan program perangkat daerah serta kinerja pemerintahan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2024 ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 yang juga tertuang dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dan sekaligus sebagai salah satu dasar untuk melaksanakan kegiatan pada waktu tahun berjalan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2024 memprioritaskan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi program prioritas/unggulan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi penyesuaian anggaran, maka yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan adalah program unggulan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan untuk program dan kegiatan lainnya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Sebagai dasar penentuan program prioritas Dinas, telah dibuat cascading sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Didalam dokumen Renstra telah ditetapkan indikator kinerja beserta target yang harus dicapai untuk setiap kurun waktu. Sehingga untuk melihat kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat diperoleh dari capaian kinerja setiap tahun dibandingkan dengan target yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra. Tindak lanjut dari pencapaian target Renstra dan Renja Tahun 2024 adalah dilaksanakannya evaluasi melalui penyampaian laporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan setiap Triwulan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan, semoga Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan didalam pelaksanaan anggaran pada Tahun 2024. Besar harapan kami apa yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik.

J. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat Program dan Kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara umum Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan realisasi oleh karena itu dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja ini akan mencantumkan program dan kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Secara umum Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan memuat antara lain:

1. Sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran;
2. Target pencapaian kinerja dan anggaran;
3. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai;

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi dilakukan dengan:

1. Memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Sukabumi dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode Tahun 2018-2023;
2. Memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
3. Menganalisis Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan);
4. Menganalisis Kinerja Pelayanan Tahun 2024;
5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024;
6. Merumuskan Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Aplikasi SIPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi, meliputi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerjam Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64;
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;

18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang
20. Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;
22. Perwal Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Tujuan disusunnya Renja Perubahan:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah; dan
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan antara Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Berisi tentang capaian anggaran maupun kinerja hingga triwulan I tahun 2024 beserta penjabarannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I (semester I) tahun berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II/Semester I tahun berjalan, pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi matrik renja sesuai SIPD, berikan penjelasan point-point penting anggaran perubahannya

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (semester II) Tahun Berkenaan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II (semester I) Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi dalam penyerapan anggaran dan realisasi indikator kinerja pada Triwulan II Tahun 2024.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (semester II) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	8.432.767.872	24,93	4.453.293.199	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	%	100	17.499.550	50,00	15.130.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	APBD Kota
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.499.550	-	130.000	APBD Kota
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	7.354.733.362	50,00	4.012.949.467	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	52	7.353.733.362	52	4.011.954.467	APBD Kota
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.000.000	1	995.000	APBD Kota
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	%	100	101.700.000	25,00	16.200.000	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	101.700.000	1	16.200.000	APBD Kota
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	125.080.300	25,99	78.927.300	APBD Kota

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	3.997.250	5	2.675.000	APBD Kota
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	32.368.000	5	18.317.300	APBD Kota
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	9.194.500	2	5.400.000	APBD Kota
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.785.550	-	-	APBD Kota
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.940.000	6	2.040.000	APBD Kota
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.360.000	6	4.000.000	APBD Kota
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	58.435.000	6	46.495.000	APBD Kota
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	58.855.000	0,00	16.500.000	APBD Kota
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	10.780.000	-	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	48.075.000	2	16.500.000	APBD Kota
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	702.815.660	19,50	280.287.432	APBD Kota
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	710.000	6	710.000	APBD Kota
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	162.542.060	6	61.273.519	APBD Kota

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	104.760.000	6	48.000.000	APBD Kota
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	434.803.600	6	170.303.913	APBD Kota
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	72.084.000	14,33	33.299.000	APBD Kota
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	52.630.000	13	28.029.000	APBD Kota
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	4.970.000	1	1.410.000	APBD Kota
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	14.484.000	1	3.860.000	APBD Kota
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	11,33	19.000.000	0,00	17.600.000	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	100	19.000.000	0,00	17.600.000	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	12	19.000.000	-	17.600.000	APBD Kota

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Fasilitas Pemenuhan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Orang	20		20		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	6,80	35.010.000	0,00	18.850.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten/ Kota	%	100	35.010.000	100	18.850.000	
2.17.03.2.01.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	12	35.010.000	24	18.850.000	APBD Kota
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	64,00	20.000.000	0,28	1.400.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Sehatnya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	5,67	20.000.000	0,00	1.400.000	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	24	10.000.000	-	-	APBD Kota
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	3	10.000.000	-	1.400.000	APBD Kota
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pelatihan	%	19,83	203.704.250	0,00	76.400.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	19,83	203.704.250	0,00	76.400.000	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	54	203.704.250	29	76.400.000	DAK Non Fisik
2.17.06	PROGRAM PEMBERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	19,83	81.400.000	0,00	21.584.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang difasilitasi melalui Pemberdayaan dan Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	81.400.000	0,00	21.584.000	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	30	81.400.000	-	21.584.000	APBD Kota
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,01	2.066.717.450	0,00	457.877.189	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro, yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	100	2.066.717.450	0,00	457.877.189	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	67.639.850	30	13.284.000	APBD Kota
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	80	80.359.950	-	30.579.189	APBD Kota

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Inkubator Bisnis)	Unit Usaha	30	485.000.000	30	342.741.000	APBD Kota
		Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam Kegiatan Culinary Night	UMKM	30		30		
		Jumlah Pameran yang di ikuti	Kali	1		1		
		Jumlah Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Orang	30		-		
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Unit Usaha	60	1.057.503.000	-	16.073.000	APBD Kota
		Jumlah Pemberian Bantuan Hibah berupa uang	Lembaga	1		-		
		Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	Kelompok	48		-		
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	40	39.999.900	-	-	APBD Kota
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	80	336.214.750	-	55.200.000	DAK Non Fisik
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	0,47	350.000.000	0,00	313.875.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala Mikro	%	0,47	350.000.000	0,00	313.875.000	

KODE	Ururan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150	350.000.000	150	313.875.000	DBHCHT
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	%	100	35.250.000	60,00	6.780.000	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	%	100	12.750.000	60,00	1.055.000	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	10	12.750.000	6	1.055.000	APBD Kota
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PersentasePengawasan Penyimpanan Bahan berbahaya	%	100	4.800.000		585.000	
3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	4	4.800.000	-	585.000	APBD Kota
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%	100	17.700.000	50,00	5.140.000	
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	12	17.700.000	6	5.140.000	APBD Kota
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	%	60,00	1.315.501.150		140.335.400	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	1.257.131.250	100,00	114.810.900	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Pelaksanaan Bazar Menjelang Ramadhan)	Kecamatan	7	106.201.250	7	91.866.250	APBD Kota
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang diperbaiki (Ruko, Kior, Los)	Unit	1	1.150.930.000	-	22.944.650	APBD Kota
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait Nilai Sewa Kios/Los/Ruko untuk Para Pedagang Pasar	Kegiatan	1		-		
		Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	Kelompok	49		-		
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	%	100	58.369.900	-	25.524.500	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	38.370.000	-	14.990.000	APBD Kota
		Jumlah Kegiatan Pendataan Minimarket/Pasar Modern di Kota Sukabumi	Kegiatan	1		-		
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	19.999.900	1	10.534.500	APBD Kota
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pedagang	Orang	20		20		
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jenis	12		6		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5,88	80.050.500	0,00	16.374.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	%	100	80.050.500	0,00	16.374.000	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	80.050.500	6	16.374.000	APBD Kota
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	22.396.225,21	47.790.000	0,00	0	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	47.790.000	0,00	0	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	47.790.000	-	-	APBD Kota
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	28,57	130.980.000	6,76	89.765.350	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	%	100	130.980.000	30,00	89.765.350	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit UTTP	300	94.980.000	71	55.590.850	APBD Kota
		Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukur	Sampel Produk	700		721		
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	50	36.000.000	50	34.174.500	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	%	100	75.470.000	0,00	150.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	100	75.470.000	0,00	150.000	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	10	75.470.000	-	150.000	APBD Kota
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	3,55	1.084.516.000	0,00	149.481.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terselaksannya Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	%	100	1.084.516.000	0,00	149.481.000	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1.054.101.000	1	149.481.000	APBD Kota
		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan Produk	Peserta	20		20		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kelompok Penerima Bansos	Kelompok	50		-		
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	30.415.000	-	-	APBD Kota
		Jumlah Peserta Pelatihan P2W-IK di Lokasi P2W-KSS	Peserta	20		-		
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	%	100	56.392.000		18.124.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Legalitas Usaha untuk Industri Kecil Menengah	%	100	56.392.000	-	18.124.000	
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	56.392.000	-	18.124.000	APBD Kota
		Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Honorarium Petugas Pelayanan Gerai Dekranasda	Orang/Bulan	3/6		3/6		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II		Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	%	100	616.246.000	0,00	567.992.316	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Industri Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap Total populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	%	100	616.246.000	-	567.992.316	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	616.246.000	1	567.992.316	APBD Kota
		Jumlah Pameran Luar Negeri yang di ikuti	Kegiatan	1		1		
		Jumlah Pameran Dalam Negeri yang di ikuti	Kegiatan	1		1		
		Jumlah Pelaksanaan HUT Dekranasda	Kegiatan	1		1		
		Jumlah Pelaksanaan RakoNas DekraNas	Kegiatan	1		-		
					14.650.795.222	43,34%	6.349.881.454	

Pada Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II (semester I) Tahun 2024 dapat terlihat capaian penyerapan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.650.795.222,- dapat terealisasi pada Triwulan II sebesar Rp, 6.349.881.454,- dengan persentasi sebesar 43,34%

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024
Kota Sukabumi

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	58 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	60 Orang	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 5.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	3 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.2..17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Perkoperasian	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2..17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	-	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	100%	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Dokumen yang difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	UMKM Naik Kelas	30 Usaha Mikro	25 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	25 Usaha Mikro	83,33%	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	100%
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan	100 UMK	55 UMK	100 UMK	70 UMK	70,00%	100 UMK	55 UMK	55,00%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro, yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah MOU Little Sukabumi	2 MOU	2 MOU	2 MOU	1 MOU	50,00%	2 MOU	1 MOU	50,00%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	-	-	-		30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Laik Hygiene	30 Orang	-	60 Orang	60 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Mindset dan Managerial Bisnis (Inkubator Bisnis)	30 Orang	-	-	-		30 Orang	30 Orang	100%
		Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan	30 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja di era Digital (Jumlah Vokasi)	850 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	850 Orang	850 Orang	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pemberian Bantuan Hibah berupa uang	2 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
		Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	129 Kelompok	145 Kelompok	150 Kelompok	126 Kelompok	84,00%	111 Kelompok	96 Kelompok	74,42%
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (sosialisasi Fasilitasi Permodalan)	55 Orang	55 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	55 Orang	55 Orang	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	700 Orang	60 Orang	700 Orang	700 Orang	100%	700 Orang	700 Orang	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala Mikro	50,00%	13,07%	50,00%	2,19%	4,38%	50,00%	50,00%	100%
2.17.3.31.3.30.07.2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja di Era Pasar Digital	700 Orang	60 Orang	700 Orang	700 Orang	100%	700 Orang	700 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan	2 Unit	1 Unit	-	-		1 Unit	-	0,00%
		Persentase Pengawasan dan Pembangunan Pasar	100%	100%	-	-		100%	100%	100%
		Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Bazar Menjelang Ramadhan	7 Kecamatan	1 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	130 Kelompok	83 Kelompok	117 Kelompok	106 Kelompok	90,60%	130 Kelompok	129 Kelompok	99,23%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pengawasan Pasar di Kota Sukabumi	5 Pasar	75 Orang	662 Pedagang	662 Pedagang	100%	5 Pasar	5 Pasar	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Kegiatan Pendataan PKL di Kota Sukabumi	1 Kegiatan	1 Unit	25 Peserta	25 Peserta	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemanfaatan Profil, Prognosa, Informasi Harga dan Pengawasan Barang Penting/Strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Infomasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
		Jumlah Pengawasan Barang Penting/Strategis/ Barang Beredar	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Kali	24 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Penyampaian Informasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat	96 Kali	96 Kali	96 Kali	96 Kali	100%	96 Kali	96 Kali	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2.390.882,83 US\$	-	2.298.925,80 US\$	2.298.925,80 US\$	22.396.225, 21 US\$	2.390.882, 83 US\$	15.340.696, 67 US\$	641,63%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	-	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100%	20 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	75,00%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	29,00%	26,80%	27,00%	208,75%	773,15%	29,00%	80,89%	278,93%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera/TeraUlang dalam Tahun Berjalan	29,00%	26,80%	27,00%	208,75%	773,15%	29,00%	80,89%	278,93%
2.17.3.31.3.30.07.3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit UTTP	268 Unit UTTP	400 Unit UTTP	835 Unit UTTP	208,75%	500 Unit UTTP	728 Unit UTTP	145,60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukur	900 Sampel	-	400 Sampel	905 Sampel	226,25%	500 Sampel	713 Sampel	79,22%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Metrologi Legal	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	0,60%	0,42%	0,50%	3,19%	638,00%	0,60%	2,21%	368,33%
		Cakupan bina kelompok pengrajin	2,86%	12,50%	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	2,50%	87,41%
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi RAPERDA	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Kelompok Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	100 Kelompok	24 Kelompok	54 Kelompok	48 Kelompok	88,89%	118 Kelompok	95 Kelompok	95,00%
		Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100%	-	-	0,00%
		Jumlah Pelatihan Kesehatan untuk Pelaku IKM	20 Orang	-	-	-	0,00%	20 Orang	20 Orang	100%
		Jumlah Pelatihan Wirausaha mandiri Milenial	20 Orang	-	-	-	0,00%	20 Orang	20 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah Pelatihan Wirausaha UP2K	20 Orang	-	-	-	0,00%	20 Orang	20 Orang	100%
		Jumlah Peserta Pembentukan Forum Peduli IKM	50 Orang	-	-	-	0,00%	50 Orang	50 Orang	100%
		Jumlah Pelatihan Kemasan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.3.31.3.30.07.3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Legalitas Usaha untuk Industri Kecil Menengah	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.3.31.3.30.07.3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Pameran yang akan diikuti	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja Perangkat Daerah pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai Perangkat Daerah Pelayanan publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari Perangkat daerah Pelayanan Publik. Dalam mengukur kualitas layanan, hal pertama yang menjadi poin penting adalah bagaimana pegawai yang memberikan pelayanan paham akan tugasnya masing-masing, agar tercipta layanan yang sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu Berdasarkan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi telah berupaya melakukan pelayanan yang maksimal sesuai aturan yang ada. Dan mengenai kepuasan masyarakat secara umum dapat dikatakan cukup baik.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi tahun 2018-2023 yaitu: "Terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera"

Kinerja Pelayanan Dinas disampaikan sebagai hasil analisa keberhasilan pelayanan secara kumulatif sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- 14 (empat belas) capaian indikator kinerja lainnya merupakan indikator dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2022, terealisasi sebagai berikut:
 - Persentase Koperasi Aktif terealisasi pada Tahun 2022 sebanyak 225 Koperasi (63,74%), target 63,00% dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 222 Koperasi dengan capaian kinerja 101,17%;
 - Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas terealisasi RAT pada Tahun 2022 sebanyak 67 koperasi (18,98%) target 17,00% dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 60 koperasi dengan capaian kinerja 111,65%;
 - Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha terealisasi pada Tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%;
 - UMKM Naik Kelas terealisasi pada Tahun 2022 sebanyak 25 Usaha Mikro, target 30 Usaha Mikro dengan capaian kinerja 83,33%;
 - Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan terealisasi pada Tahun 2022 sebanyak 70 UMK dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 100 UMK, dengan capaian kinerja 70,00%;
 - Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE terealisasi pada Tahun 2022 sebanyak 700 Orang

dari jumlah yang ditergetkan sebanyak 600 dengan capaian kinerja 116,67%

- Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan tidak ada realisasi pada Tahun 2022, dengan capaian kinerja 0,00%;
- Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita tidak ada realisasi pada Tahun 2022 dikarenakan pasar pelita sudah terbangun, sehingga capaian kinerja 0,00%
- Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang terealisasi pada Tahun 2022 sebanyak 1 Kawasan dari jumlah yang ditergetkan sebanyak 1 Kawasan dengan capaian kinerja 100% (Berkoordinasi dengan Satpol PP Penataan Kawasan pusat jajanan Sukabumi Dago Jl. Ir. H. Juanda, karena kurang memperindah tempat pendestrian maka Kawasan pusat jajanan Sukabumi Dago di pindah ke Kawasan Dewi Sartika);
- Persentase Pemanfaatan Profil, Informasi Harga dan Pengawasan Barang Penting/Strategis terealisasi pada Tahun 2022 sebesar 100%, target 100% dengan capaian kinerja 100,00% (melakukan monitoring harga Bahan Pokok Penting di Pasar Tradisional);
- Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku terealisasi Tahun 2022 sebanyak 835 UTTP dari jumlah yang ditergetkan sebanyak 900 UTTP (dari jumlah potensi Tera/Tera Ulang UTTP di Kota Sukabumi) dengan capaian kinerja 92,78%.
- Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota terealisasi sebanyak 84 unit (3,19%) dari jumlah yang ditargetkan sebanyak (0,50%) dengan capaian kinerja 638,00%;
- Cakupan bina kelompok pengrajin tidak ada realisasi pada Tahun 2022.
- Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini terealisasi di Tahun 2022;
- Ekspor Bersih Perdagangan pada Tahun 2022, Realisasi Ekspor sebesar 22.396.225.21 US\$ dari target sebesar 2.298.925,80 US\$, dengan capaian kinerja sebesar 974,20%.

Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan ditindaklanjuti dengan pembinaan secara rutin sehingga mendorong tercapainya 2 sasaran yang terdapat pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah ditentukan yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas

Iklim Usaha dan Investasi, (2) Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar.

Faktor-faktor terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program/kegiatan pada tahun 2022 disebabkan adanya dukungan:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, yang mampu melakukan Tupoksinya dalam pencapaian target program kerja;
- Sumber pendanaan yang baik yang berjalan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan;
- Target pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan.

2.2.1. Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;
2. Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar.

Pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian sasaran ditetapkan sangat baik apabila persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran sebesar diatas 95%, baik apabila persentase pencapaian sebesar 75% - 95%, cukup baik apabila persentase pencapaian sebesar 50%-75%.
- b. Persentase capaian sasaran merupakan kumulatif dari capaian program-program yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran yang bersangkutan Analisis capaian kinerja pelayanan Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi.

Pada pembahasan sub-sub ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD, dengan Tabel TC.30 sebagai berikut:

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Proyeksi			Catatan Analisa
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
					(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n+2)	(Tahun n)	Tahun n+1)	(Tahun n+2)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase usaha mikro yang naik kelas	-	Jumlah Usaha Mikro dengan Omzet diatas dua Milyar/Tahun -----x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	0,01	0,02	0,03	0,01	0,02	0,03	
7	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha -----x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	0,47	0,63	0,78	0,47	0,63	0,78	
8	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	-	Jumlah target Dokumen Perizinan dan Perusahaan yang difasilitasi -----x 100% Jumlah Dokumen Perizinan yang ada	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	-	Jumlah Pasar yang diperbaiki -----x 100% Jumlah Pasar yang ada	%	60,00	80,00	100	60,00	80,00	100	
10	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	-	Cukup Jelas	%	5,88	6,38	6,88	5,88	6,38	6,88	
11	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	-	Realisasi Ekspor	US\$	22.396.225,21	22.396.225,21	22.396.225,21	22.396.225,21	22.396.225,21	22.396.225,21	
12	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan -----x 100%	%	28,57	33,33	38,10	28,57	33,33	38,10	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Proyeksi			Catatan Analisa
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
					(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n+2)	(Tahun n)	Tahun n+1)	(Tahun n+2)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	(UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab/Kota								
13	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	-	Jumlah Pameran yang dilaksanakan -----x 100% Jumlah Target Pameran	%	100	100	100	100	100	100	
14	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	-	Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n - Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1 -----x 100% Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1	%	3,55	4,05	4,55	3,55	4,05	4,55	
15	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	-	Cukup Jelas	%	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	-	Cukup Jelas	%	100	100	100	100	100	100	

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Tahun anggaran 2024 hingga triwulan II belum semua indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena waktu pelaksanaan kegiatan ada yang ditetapkan di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga realisasi capaian pun beberapa indikator belum tercapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi dapat dilihat dari tingkat kinerja pelayanan dan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas

Tingkat kinerja pelayanan Dinas sangat dipengaruhi oleh antara lain :

- a. Tingkat kesadaran dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing;
- b. Skill dan kreativitas pegawai dalam menghadapi perkembangan dan dinamika masyarakat;
- c. Komitmen yang kuat antara pimpinan dengan bawahan yang senantiasa harus terjaga;
- d. Keterbukaan menerima perubahan teknologi dan sains yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan

- a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi dirasakan masih kurang dibandingkan dengan frekuensi dan kapasitas pembinaan yang dibutuhkan;
- b. Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara profesional sebagian koperasi dikelola paruh waktu atau sisa pekerjaan lainnya;
- c. Masih rendahnya Persentase Jumlah Koperasi yang aktif dibandingkan jumlah koperasi secara keseluruhan dan belum semuanya melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT);
- d. Sebagian besar pelaku usaha di Kota Sukabumi berada pada kondisi sebagai pengusaha berskala Usaha Mikro Kecil (UMK), dan belum seluruhnya memiliki legalitas usaha;
- e. Pola Kemitraan dan kerjasama antara Koperasi, Usaha Mikro Kecil dengan Pengusaha Besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran;

- f. Masih adanya *image* yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari Pemerintah yang merupakan bantuan pinjaman modal usaha dianggap hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan bagi KUMKM;
- g. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana produk yang dihasilkan belum dapat bersaing di pasar global;
- h. Belum seluruhnya IKM di Kota Sukabumi merupakan IKM Produktif baru hal ini disebabkan masih banyaknya IKM yang memproduksi secara musiman atau sewaktu-waktu apabila ada pesanan;
- i. Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas para pelaku usaha dalam berinovasi;
- j. Pengaruh Globalisasi menyebabkan tantangan peningkatan daya saing produk IKM dan mekanisme pasar;
- k. Sarana dan prasarana perdagangan sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Utara Kota Sukabumi, sehingga perlu pengembangan di wilayah lainnya;
- l. Kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang strategis dan refresentatif;
- m. Masih rendahnya frekwensi dan kualitas promosi produk KUMKM sehingga sulit menembus pangsa pasar di dalam dan luar negeri/ekspor;
- n. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga;
- o. Belum optimal tingkat kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak Pemerintah, Cq. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

3. Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan SDM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi;
- b. Merekrut karyawan yang profesional untuk mengelola Koperasi dan bukan dikelola paruh waktu;
- c. Dilakukan pelatihan dan bimtek pelatihan Perkoperasian;

- d. Memfasilitasi UMKM di Kota Sukabumi untuk memiliki legalitas usaha seperti PIRT, Halal, HAKI, Laik Hygene;
- e. Memfasilitasi alat produksi dan kemasan bagi Industri Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi;
- f. Memfasilitasi promosi produk UMKM dengan melakukan pameran diluar Kota Sukabumi;
- g. Difasilitasi lokasi untuk tempat penampungan bagi para PKL di Kota Sukabumi;
- h. Sosialisasi kepada para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga.

Tabel 2.2 (TC.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	8.370.020.021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	10.199.171.900	
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.499.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	35.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.499.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.114.543.961	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.257.907.680	
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	7.113.543.961	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	8.254.907.680	
2.17.3.31.3.30.07.2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	100%	60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar	100%	70.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	60.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	70.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	351.342.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		644.164.220	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.997.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.997.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.095.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.499.920	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.196.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	26.186.500	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.785.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.609.800	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	247 Dokumen	4.940.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	495 Dokumen	9.900.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.360.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.971.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	284.968.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	500.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.05.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	26.930.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	78.300.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	10.850.000	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	27.850.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16.080.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.450.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	736.575.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100%	798.800.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.598.560	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.800.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	458.577.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	63.128.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	100%	315.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	44.908.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	3.670.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	15.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	14.550.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	200.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	11,27%	19.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	11,27%	25.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 2.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	19.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	25.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 2.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	19.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	25.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	6.80%	10.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	6.80%	30.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten/ Kota	6.80%	10.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten/ Kota	6.80%	30.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 3.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	10.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	30.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	64,00%	20.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI		Persentase Dokumen yang difasilitasi	100%	70.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 4.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Sehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,67%	20.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Sehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	70.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 4.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha	10.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	30.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 4.2.01.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Kesehatan	3 Unit Usaha	10.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Kesehatan	3 Koperasi	40.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan	19,83%	60.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan	19,83%	120.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 5.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19,83%	30.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19,83%	60.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 5.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	30.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 5.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan untuk Daerah Kabupaten/Kota	6,48%	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan untuk Daerah Kabupaten/Kota	6,48%	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 5.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	85 Peserta	30.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	85 Peserta	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	19,83%	81.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	19,83%	85.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 6.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang difasilitasi melalui Pemberdayaan dan Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	81.400.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang difasilitasi melalui Pemberdayaan dan Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	85.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 6.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	81.400.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	85.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,01%	1.459.000.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,01%	1.541.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro, yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	1.459.000.100	Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro, yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	1.541.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Unit Usah	40.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Unit Usah	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	67.640.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	70.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	80.360.100	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	100.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	60.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	70.000.000	
		Luar Kota Sukabumi	Jumlah Pameran yang di ikuti	1 Kali	100.000.000		Luar Kota Sukabumi	Jumlah Pameran yang di ikuti	1 Kali	120.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 7.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Sukabumi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	60.000.000	
			Jumlah Pemberian Bantuan Hibah berupa uang	1 Lembaga	50.000.000			Jumlah Pemberian Bantuan Hibah berupa uang	1 Lembaga	50.000.000	
			Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	43 Kelompok	1.011.000.000			Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	43 Kelompok	1.011.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	100%	441.275.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	100%	450.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala Mikro	0,47%	441.275.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala Mikro	0,47%	450.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.2.17.0 8.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	441.275.000	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	450.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	100%	18.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	100%	22.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 2.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Pengawasan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100%	9.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Pengawasan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100%	10.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 2.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	9.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3.30.07.3.30.02.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PersentasePengawasan Penyimpanan Bahan berbahaya	100%	3.000.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PersentasePengawasan Penyimpanan Bahan berbahaya	100%	5.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.02.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	3.000.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	5.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.02.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	6.000.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	7.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.02.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Dokumen	7.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	60,00%	1.434.011.250	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	1 Unit	1.440.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	1.373.081.250	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	1.370.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Bazar Menjelang BulanRamadhan)	3 Kegiatan	103.081.250	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Bazar Menjelang BulanRamadhan)	3 Kegiatan	110.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	150.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	200.000.000	
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	12 Jenis	20.000.000			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	12 Jenis	30.000.000	UPT Pasar
			Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	79 Kelompok	1.100.000.000			Jumlah Pemberian Bantuan Sosial berupa uang	79 Kelompok	1.030.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	60.930.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	70.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	23.900.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	30.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	37.030.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	40.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,88%	5.050.563	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,88%	6.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	5.050.563	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	6.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 4.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Infomasi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	5.050.563	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Infomasi Perdagangan	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	6.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	22.396.22 5,21US\$	40.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	22.396.22 5,21US\$	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 5.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	40.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 5.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Peserta Pembinaan Lapangan Calon Pelaku Usaha Ekspor	20 Pelaku Usaha	20.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Peserta Pembinaan Lapangan Calon Pelaku Usaha Ekspor	20 Pelaku Usaha	30.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 5.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kota Sukabumi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	20.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kota Sukabumi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	30.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	28,57%	96.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	28,57%	110.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.30.0 6.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	96.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	110.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3.30.07.3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Sukabumi	Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTPP yang terlayani	300 Unit	60.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Sukabumi	Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTPP yang terlayani	300 Unit	70.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Sukabumi	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Pelaku Usaha	36.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Sukabumi	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Pelaku Usaha	40.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	100%	70.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	100%	100.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Fasilitas Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	70.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Fasilitas Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Luar Kota Sukabumi	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kali	70.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Luar Kota Sukabumi	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kali	100.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	3,55%	1.256.626.267	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	3,55%	1.289.351.267	
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Terselaksannya Dokumen Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	1.256.626.267	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Terselaksannya Dokumen Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	1.289.351.267	
2.17.3.31.3.30.07.3.31.02.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	180.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	200.000.000	
			Jumlah Kelompok Penerima Bansos	54 Kelompok	1.049.351.267			Jumlah Kelompok Penerima Bansos	54 Kelompok	1.049.351.267	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3. 30.07.3.31.0 2.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	27.275.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.31.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	100%	49.832.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	100%	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.31.0 3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Legalitas Usaha untuk Industri Kecil Menengah	100%	49.832.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Legalitas Usaha untuk Industri Kecil Menengah	100%	60.000.000	
2.17.3.31.3. 30.07.3.31.0 3.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	49.832.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	60.000.000	
			Jumlah Kegiatan Perlombaan TTG Tingkat Kota	1 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Perlombaan TTG Tingkat Kota	1 Kegiatan		

Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.17.3.31.3.30.07.3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	1 Buku	36.378.600	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	1 Buku	50.000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan Industri Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap Total populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahan Kawasan Industri di Kabupaten/ Kota	100%	36.378.600	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Perusahaan Industri Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap Total populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahan Kawasan Industri di Kabupaten/ Kota	100%	50. 000.000	
2.17.3.31.3.30.07.3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	36.378.600	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	50.000.000	
			Jumlah Pameran yang di ikuti	3 Kegiatan				Jumlah Pameran yang di ikuti	3 Kegiatan		
	JUMLAH				13.466.593.801					15.657.523.167	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengembalikan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya sebagai berikut :

Tabel TC.31
Matrik Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokume n	1 Dokum en	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			18.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .201.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	1 Laporan	2.499.800,00	2.499.550,00	2.499.550,00	-250,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			3.000.000,0 0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya a Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	-	90 %	7.114.543.961,00	7.354.733.362, 00	7.354.733.362,00	240.189.401 ,00			-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustria n dan Perdagangan		7.615.543.9 61,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kreatif & Inovatif				
	2.17.01 2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/b ulan	57 Orang/ bulan	7.113.543.961,00	7.353.733.362,00	7.353.733.362,00	240.189.401,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIB USI JASA USAHA RETRIB USI PERIZINAN TERKAIT DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			7.613.543.961,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			2.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	5.785.800,00	5.785.550,00	5.785.550,00	-250,00	Kota Suka bumi, Semu a Kecamat an, Semu a Kel/D esa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Kecamat an, Semu a Kel/D esa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			6.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	12 Laporan	10.360.000,00	10.360.000,00	10.860.000,00	500.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Kecamat an, Semu a Kel/D esa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			12.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01 .206.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	0 Laporan	12 Laporan	284.968.000,00	58.435.000,00	95.355.000,00	- 189.613.000 ,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpenuhi nya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan</i>	-	90 %	26.930.000,00	58.855.000,00	64.855.000,00	37.925.000, 00			-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustria n dan Perdagangan		35.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .207.0 005	Pengadaan Mebel															
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Unit	6 Unit	10.850.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	-70.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan			15.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0 Laporan	12 Laporan	600.000,00	710.000,00	1.420.000,00	820.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.000.000,0 0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .208.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	0 Laporan	12 Laporan	179.598.560,00	162.542.060,0 0	162.542.060,00	17.056.500, 00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			182.598.560 ,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .208.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	12 Laporan	97.800.000,00	104.760.000,0 0	97.350.000,00	-450.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan			100.000.000 ,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznanny a</i>	0 Unit	21 Unit	44.908.000,00	52.630.000,00	80.070.000,00	35.162.000, 00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			80.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .209.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	0 Unit	3 Unit	3.670.000,00	4.970.000,00	6.430.000,00	2.760.000,0 0	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			10.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .209.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si</i>	0 Unit	3 Unit	14.550.000,00	14.484.000,00	14.484.000,00	-66.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan			30.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
2,	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	-	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	11.000.000, 00							30.000.000, 00	
	2.17.02 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	90 %	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Koperasi di Kota Sukabumi		30.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02 .2.01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	12 Unit Usaha	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	0 Unit Usaha	24 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.201.003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan															
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	60.000.000,00	203.704.250,00	203.704.250,00	203.703.750,00							263.703.750,00	
	2.17.05.201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	-	90 %	60.000.000,00	203.704.250,00	203.704.250,00	143.704.250,00			-	Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa	Koperasi di Kota Sukabumi		263.703.750,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.201.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi															
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	0 Orang	54 Orang	60.000.000,00	203.704.250,00	203.704.250,00	143.704.250,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a	DANA TRANSFER KHUSU S-DANA ALOKA SI KHUSU S NON FISIK	-	Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagangan an dan Jasa			263.703.750,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Kel/D esa							
6,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	81.400.000,00	81.400.000,00	81.400.000,00	8.600.000,0 0							90.000.000, 00	
	2.17.06 .201	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksanan ya Kegiatan Pemberdaya an dan Perlindunga n Koperasi</i>	-	90 %	81.400.000,00	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00			-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa	Koperasi di Kota Sukabumi		90.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06 .201.0 009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Koperasi dengan Keanggotaa n Daerah Kabupaten/ Kota</i>	0 Unit Usaha	30 Unit Usaha	81.400.000,00	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			90.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-	1.459.000.100,00	2.066.717.450, 00	2.066.717.450,00	418.214.650 ,00							1.877.214.7 50,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07 .201	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tertindakannya Kegiatan Pemberdayaan an Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-	90 %	1.459.000.100,00	2.066.717.450,00	2.066.717.450,00	607.717.350,00			-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa	Usaha Mikro di Kota Sukabumi		1.877.214.750,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 .201.002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro															
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanak an Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	30 Unit Usaha	67.640.000,00	67.639.850,00	67.639.850,00	-150,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa			70.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 .201.003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro															
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatka n Perizinan	0 Unit Usaha	70 Unit Usaha	80.360.100,00	80.359.950,00	80.359.950,00	-150,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa			90.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 .201.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro															
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	70 Unit Usaha	160.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	325.000.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa			180.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Sriwi dari Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Selab atu							
	2.17.07 2.01.0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro															
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya an Usaha Mikro	0 Orang	60 Orang	1.111.000.000,00	1.057.503.000, 00	1.057.503.000,00	- 53.497.000, 00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			1.141.000.0 00,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 2.01.0 014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro															
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdapa	0 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40.000.000,00	39.999.900,00	39.999.900,00	-100,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kota Suka bumi,	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			60.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Semu a Keca mata n, Tipar							
	2.17.07 .201.0 015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan															
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahua n Usaha Mikro dan Kewirausah aan	-	80 Orang	0,00	336.214.750.0 0	336.214.750,00	336.214.750 ,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER KHUSU S-DANA ALOKA SI KHUSU S NON FISIK	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			336.214.750 ,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-	441.275.000,00	350.000.000,0 0	440.200.000,00	91.275.000, 00							350.000.000 ,00	
	2.17.08 .201	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksanan ya Kegiatan Pengemban gan UMKM	-	90 %	441.275.000,00	350.000.000,0 0	440.200.000,00	1.075.000,0 0			-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa	Usaha Mikro di Kota Sukabumi		350.000.000 ,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08 .201.0 006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi															
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatka n Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha	150 Unit Usaha	441.275.000,00	350.000.000,0 0	440.200.000,00	1.075.000,0 0	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			350.000.000 ,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SERELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05 .201	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ekspor	-	90 %	40.000.000,00	47.790.000,00	47.790.000,00	7.790.000,00			-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa	Pelaku Usaha di Kota Sukabumi		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05 .201.004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan															
			Jumlah Pelaku Usaha yang Dfasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	40.000.000,00	47.790.000,00	47.790.000,00	7.790.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	-	96.000.000,00	130.980.000,00	145.980.000,00	29.000.000,00							125.000.000,00	
	3.30.06 .201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	90 %	96.000.000,00	130.980.000,00	145.980.000,00	49.980.000,00			-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa	Pelaku Usaha Pengguna alat UTPP		125.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <u>no</u>
	3.30.06 .201.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang															
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkap an Di tera Ulang	0 Unit	300 Unit	60.000.000,00	94.980.000,00	104.980.000,00	44.980.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa Optimalisasi si Sektor Perdagangan an dan Jasa			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SERELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06 .201.0 002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal															
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	0 Orang	50 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	41.000.000,00	5.000.000,0 0	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6,	3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	70.000.000,00	75.470.000,00	75.470.000,00	10.000.000,00							80.000.000,00	
	3.30.07 .201	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Terlaksanaan ya Kegiatan Pelaksanaa n Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	-	90 %	70.000.000,00	75.470.000,00	75.470.000,00	5.470.000,0 0			-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa	Pelaku Usaha di Kota Sukabumi		80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07 .201.0 005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	0 UMKM	10 UMKM	70.000.000,00	75.470.000,00	75.470.000,00	5.470.000,0 0	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.342.836.867,00	1.757.154.000,00	1.836.124.000,00	493.287.133,00							1.400.351.267,00	
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	1.256.626.267,00	1.084.516.000,00	1.033.516.000,00	3.725.000,0 0							1.260.351.267,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02 .2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tertaksanan ya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangun an Industri	-	90 %	1.256.626.267,00	1.084.516.000, 00	1.033.516.000,00	223.110.267 ,00	-		-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa	IKM di Kota Sukabumi		1.260.351.2 67,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02 .2.01.0 003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan pelaksanaa n Pembangun an Sumber Daya Industri	0 Dokume n	1 Dokum en	1.229.351.267,00	1.054.101.000, 00	1.003.101.000,00	226.250.267 ,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Cikol e	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			1.260.351.2 67,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02 .2.01.0 005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokume n	0 Dokum en	27.275.000,00	30.415.000,00	30.415.000,00	3.140.000,0 0	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kota Suka bumi, Semu a Keca	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										mata n, Cikol e Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Cipan enga h							
2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-	49.832.000,00	56.392.000,00	56.392.000,00	10.168.000,00							60.000.000,00	
	3.31.03 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri	-	90 %	49.832.000,00	56.392.000,00	56.392.000,00	6.560.000,00			-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	IKM di Kota Sukabumi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03 .2.01.004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)															
		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	0 Dokumen	1 Dokumen	49.832.000,00	56.392.000,00	56.392.000,00	6.560.000,00	Kota Suka bumi, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SiWnas</i>	0 Dokume n	1 Dokum en	36.378.600,00	616.246.000,0 0	746.216.000,00	709.837.400 ,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa Optimalisa si Sektor Perdagang an dan Jasa			80.000.000, 00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		J U M L A H				1.039.260.049,16 2,00	1.272.828.818, 997,00	1.337.805.497,36 3,00	298.545.448 201,00							349.459.904 .296,00	

BAB V PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun sebagai komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Tahapan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan diharapkan dapat mewujudkan Capaian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sekaligus mendorong tercapainya RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yang tertuang dalam RPD Kota Sukabumi 2024-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi 2024-2026, wajib menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Renja menjadi pedoman operasional bagi semua Unit Kerja lingkup Dinas dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024, baik yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi, maupun APBN.
2. Penetapan Indikator tolok ukur program/kegiatan yang mencakup indikator *output*, *outcome* dan *benefit*, harus mengacu dan memperhatikan IKU (Indikator Kinerja Utama) masing-masing unit kerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen *Cascading* Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi 2024-2026.
3. Partisipasi aktif pelaku UMKM yang ada di Kota Sukabumi bersama-sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi melakukan Program dan Kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemasaran produk UMKM menjadi salah satu pilar pembangunan Kota Sukabumi.
4. Sistem monitoring dan evaluasi internal diperlukan agar kesalahan awal seperti semua potensi hambatan dan masalah dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar dan bisa mendapatkan solusinya. Tim Satuan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satlak SPIP) yang sudah dibentuk, harus

bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing.

Menindaklanjuti sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, Dokumen Renja, Dokumen LKJIP, LPPD dan LKPJ, serta pengentryan usulan Anggaran untuk Tahun selanjutnya ke Aplikasi SIPD.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Kerja ini dapat terlaksana sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Sukabumi dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Amiin.

K. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sementara itu untuk perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2024 menyusun Perubahan Renja SKPD yang berjangka waktu 3 (Tahun) tahun guna mengoperasionalkan Perubahan RKPD tahun 2024 yang disertai dengan melakukan upaya-upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi 2024-2026 seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisikan indikasi program Kerja Perubahan berikut perkiraan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun ke tiga

RPD 2024-2026. Dokumen ini disusun mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun 2024-2026 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan penjabaran Perubahan Renstra 2024 - 2026 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 yang penyusunannya dilakukan dengan melihat hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu Strategis Perubahan yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja). memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD yang menjadi tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. Proses Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2024 telah mempertimbangkan capaian evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Tahun 2026 telah mempertimbangkan capaian evaluasi kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II (semester I) dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan tahun ke-1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Strategis Perubahan Tahun Strategis Perubahan 2019 Strategis Perubahan tentang Strategis Perubahan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 310)

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
24. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perubahan Kementerian Strategis Perubahan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Strategis 2011- 2031 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perubahan Dinas Daerah Kota Sukabumi;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023;
31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata;
33. Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi;
34. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 86 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
35. Peraturan Walikota Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026;
36. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerinta Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun 2024 merupakan dokumen operasional perencanaan SKPD untuk jangka waktu/periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kota Sukabumi, Perubahan RKPD Kota Sukabumi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun 2024 adalah sebagai landasan operasional untuk menjabarkan Rencana Perubahan Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun 2024 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 sampai dengan triwulan II (semester I). Dengan demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Perubahan Renja Perangkat Daerah dan

Surat Edaran Wali Kota Sukabumi Nomor
KU.01.01.01/959/IV/1/BAPPEDA/2024 tentang
Penyusunan Usulan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3.4 BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.3.5 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPd, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBD.

1.3.6 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3.7 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.3.8 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

1.3.9 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAIDENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

1.3.9.1 Evaluasi Pelaksanaa Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Tiwulan II
Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan tiwulan II (semester I). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II (semester I). Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C.29.

1.3.9.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan format Tabel T-C.30.

1.3.9.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan:
Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan, hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas, permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, formulasi isu-isu

penting.

1.3.10 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja yang dituangkan kedalam Program, Kegiatan besar Pagu Anggaran dan Sumber Dana. Tabel TC. 34 (Matriks Renja)

1.3.11 BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup dan bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tiwulan II (Semester I) dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Tahun 2024 Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dukungan dana APBD tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja tidak langsung, *pendapatan, dan belanja langsung sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Alokasi dana untuk belanja Operasi adalah Rp11.593.731.782 dengan realisasi sebesar Rp. 7.005.852.760 atau 60,43%.

2. Belanja Modal

Alokasi dana untuk belanja langsung adalah Rp2.513.445.000 dengan realisasi sebesar Rp281.673.392 atau 11,21%;

3. Pendapatan

Target untuk Pendapatan adalah Rp. 205.000.000 Realisasi sebesar Rp. 161.423.000 atau 78,74%. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk lebih jelasnya Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Strategis Perubahan Tahun Strategis Perubahan Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel T-C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

Kode						Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
								Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1						2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
						Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah												
						Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel												
2	19	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.356.500.582	60,27	60,27	3.468.924.507	54,57	APBD		
2	19	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu dan berkualitas	Persen	100	28.409.400	57,14	57,14	26.100.700	91,87	APBD		
2	19	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	23.530.200	6	100,00	23.530.200	100,00	APBD		
2	19	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	18	494.000	18	100,00	494.000	100,00	APBD		
2	19	01	2.01	03			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	18	420.500	0	0,00	105.000	24,97	APBD		

2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	484.200	0	0,00	0	0,00	APBD			
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	18	494.000	18	100,00	494.000	100,00	APBD			
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	494.000	0	0,00	0	0,00	APBD			
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2.492.500	2	100,00	1.477.500	59,28	APBD			
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	4.609.056.332	50,00	50,00	2.479.305.568	53,79	APBD			
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang/Bulan	45	4.606.057.082	45	100,00	2.478.305.818	53,81	APBD			
Kode					Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
1							Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
2					3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	999.750	1	100,00	999.750	100,00	APBD			
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	1	999.750	-	0,00	-	0,00	APBD			
2	19	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	999.750	-	0,00	-	0,00	APBD			

2	19	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100	467.138.700	44,72	44,72	216.153.080	46,27	APBD		
2	19	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	3.297.100	7	100,00	2.040.000	61,87	APBD		
2	19	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	134.936.100	2	10,00	17.269.165	12,80	APBD		
2	19	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	26.583.500	4	33,33	9.479.562	35,66	APBD		
2	19	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	18	5.470.000	3	16,67	2.350.000	42,96	APBD		
2	19	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	14.251.000	7	58,33	13.392.932	93,98	APBD		
2	19	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	282.601.000	6	50,00	171.621.421	60,73	APBD		
2	19	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	894.826.150	80,36	80,36	458.654.532	51,26	APBD		
2	19	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	1.032.000	100	100,00	1.000.000	96,90	APBD		
2	19	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	123.984.700	2	50,00	57.694.293	46,53	APBD		
2	19	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	42	355.920.250	38	90,48	190.300.000	53,47	APBD		

Kode					Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
							Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1					2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
2	19	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	21	413.889.200	17	80,95	209.660.239	50,66	APBD		
2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	357.070.000	69,11	69,11	288.710.627	80,86	APBD		
2	19	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	74.666.000	4	30,77	51.339.627	68,76	APBD		
2	19	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	8.810.000	49	76,56	8.294.500	94,15	APBD		
2	19	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	273.594.000	1	100,00	229.076.500	83,73	APBD		
						Meningkatkan Peran Pemuda Yang Aktif Dalam Pembangunan, masyarakat berolahraga dan Prestasi Olahraga											
						Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan											
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan prestasi olahraga daerah											
2	19	02				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Diberdayakan	%	80	906.225.000	89,38	100,00	644.440.500	71,11	APBD		

2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat kesadaran , keberdayaan dan daya saing dalam kepeloporan, kewirausahaan pemuda pemula, kepemimpinan, kesukarelawan, kapasitas, fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan	Kegiatan	7	284.215.000	93,75	100,00	166.977.000	58,75	APBD			
2	19	02	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	40	34.215.000	35	87,50	28.695.000	83,87	APBD			
2	19	02	2.01	09		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	40	250.000.000	40	100,00	138.282.000	55,31	DBHCHT			
Kode				Tujuan/Sasaran		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)		Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
							Indikator	Satuan	Target			Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1				2		3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	
2	19	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OKP	20	622.010.000	85,00	100,00	477.463.500	76,76				
2	19	02	2.02	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	30	126.010.000	30	100,00	73.447.000	58,29	APBD			
2	19	02	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	10	496.000.000	7	70,00	404.016.500	81,45	APBD			
2	19	03				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan Medali Pada Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Medali	120	2.560.176.700	66,00	55,00	2.062.703.005	80,57	APBD			

[illegible]

Kode					Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
							Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1					2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
					Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya di bidang ekonomi kreatif												
3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	85	3.788.779.000	33,33	39,22	465.887.625	12,30			
3	26	02	2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah K,egoitian	Kegiatan	2	320.316.000	50,00	100,00	320.316.000	100,00			
3	26	02	2.01	08		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	80	320.316.000	80	100,00	320.316.000	100,00	DAK NON FISIK		
3	26	02	2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	3.143.143.000	0,00	0,00	0	0,00			
3	26	02	2.02	04		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	2.340.459.000	0	0,00	0	0,00	DAK FISIK		
3	26	02	2.02	08		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	200	802.684.000	0	0,00	0	0,00	DAK NON FISIK		
3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terperiharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Unit	2	325.320.000	50,00	100,00	145.571.625	44,75			
3	26	02	2.03	04		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	325.320.000	1	50,00	145.571.625	44,75	APBD		
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Event	4	161.835.500	2	50,00	107.535.500	66,45			

3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Sukabumi	Orang	107386	161.835.500	45776	42,63	107.535.500	66,45	APBD		
3	26	03	2.01	02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	3	161.835.500	1	33,33	107.535.500	66,45	APBD		
3	26	04				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	%	100	66.947.500	100,00	100,00	4.347.500	6,49			
3	26	04	2.01			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana ruang kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	Unit	2	66.947.500	100,00	100,00	4.347.500	6,49			
Kode				Tujuan/Sasaran		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
						Indikator	Satuan	Target	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%				
1				2		3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
3	26	04	2.01	01		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	66.947.500	1	100,00	4.347.500	6,49	APBD		
3	26	05				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Orang	350	266.712.500	51,00	14,57	86.335.000	32,37			
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Event pengembangan ekonomi kreatif	Event	2	216.712.500	2,00	100,00	36.335.000	16,77			
3	26	05	2.01	06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi kreatif	Orang	300	216.712.500	6	2,00	36.335.000	16,77	APBD		

3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kegiatan	1	50.000.000	100,00	100,00	50.000.000	100,00			
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	30	50.000.000	30	100,00	50.000.000	100,00	APBD		
TOTAL									14.107.176.782	57	59,86	6.840.173.637	48,49	APBD		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi berdasarkan indikator kinerja Strategis Perubahan utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel T-C.30 sebagai berikut:

Secara umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2024 telah Strategis Perubahan dapat Strategis Perubahan melaksanakan Strategis Perubahan Tugas, Strategis Perubahan Pokok dan Fungsi dalam rangka mencapai 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

T-C. 30
Laporan pencapaian kinerja pelayanan (Target Renstra 2024-2026)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					2024	2025	2026	2023	2023	2023	2024	
					(tn n)	(tn n+1)	(tn n+2)			(tn n+1)	(tn n+2)	
13	Kepemudaan dan Olahraga											
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif			Persen	28	31	35	35		31	35	
	Jumlah Pemuda berprestasi/pelopor			Orang	8	10	10	4		10	10	
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga			Persen								
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi			Persen	85	90	100	90		90	100	
13.5.	Jumlah pembinaan atlet muda			Persen	25	50	100	0		50	100	
13.6.	Jumlah atlet berprestasi			orang	105	105	105	9		105	105	
13.7.	Jumlah prestasi olahraga			Cabor	27	27	27	2		27	27	
	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)			Lokasi	1	1	1	1		1	1	
	Lapangan olahraga .			Lokasi	1	1	1	1		1	1	
Layanan Urusan Pilihan												
1	Pariwisata											
1.2.	Lama kunjungan Wisata			hari	2	2	2	2		2	2	
1.3.	PAD sektor pariwisata											

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi

Isu Strategis Perubahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang cukup signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan untuk masing-masing urusan pada Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan Keolahragaan, Kepemudaan, Kepariwisata, Sarana Dan Prasarana. menyelenggarakan urusan Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di Daerah;
2. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif;
3. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha pemuda produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing guna mengurangi angka pengangguran;
4. Belum optimalnya peran serta keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
5. Masih minimnya jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi;
6. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
7. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi bagi atlet dan sarana olahraga bagi masyarakat;

8. Belum optimalnya pengembangan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata;
9. Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
10. Masih minimnya keikutsertaan dan jumlah penyelenggaraan pagelaran seni budaya berskala regional, nasional dan internasional.

2.3.2 Dampaknya terhadap Strategis Perubahan pencapaian Strategis Perubahan visi Strategis Perubahan dan Strategis Perubahan misi Strategis Perubahan Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

1. Melaksanakan urusan Kepemudaan melalui:
 - a. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Optimalisasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda, Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan;
 - b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dengan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda;
 - c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan kegiatan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narko Bagi Pemuda.
2. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui :
 - a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk penyandang cacat, Pengembangan Olahraga Rekreasi, Kerja Perubahansama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya, Partisipasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga;
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

dengan kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

3. Melaksanakan urusan pariwisata melalui :
 - a. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan obyek wisata unggulan
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Peningkatan Kerja Perubahansama pelaku ekonomi kreatif.
4. Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan telah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia seringkali terkait dengan fakta, bahwa prestasi pembangunan manusia Kota Sukabumi yang dipresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif masih kurang baik dibandingkan daerah tetangga di lingkup Jawa Barat. Pembangunan sumber daya manusia menempati posisi prioritas utama dan sangat Strategis Perubahan dalam pembangunan Nasional. Pemuda merupakan aset ekonomi yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga Kerja Perubahan, akan tetapi menyangkut pula sejauh mana kualitasnya.

Dengan demikian, pemuda dalam kategori ekonomi (*economic category*) memiliki potensi kekuatan besar yang tampak dengan jelas dalam pembangunan perekonomian daerah. Bahkan di beberapa negara maju yang memiliki struktur penduduk piramida terbalik, dimana jumlah

pemudanya lebih kecil dibandingkan usia tua menimbulkan kekhawatiran karena semakin besar rasio ketergantungan yang harus dipikul oleh usia produktif. Dengan demikian, posisi pemuda tidak hanya semata-mata sumberdaya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga Kerja Perubahan, tetapi juga merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu daerah. Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahanyang dimiliki golonganStrategis Perubahan usia ini. Pemuda merupakan ujung tombak setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan nasional pada era-era perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankannya di awal-awal kemerdekaan, sebagian besar tokohnya adalah kaum muda. Era kepemimpinan dan ketokohan pemuda dalam gerakan sosial dan politik di Indonesia era '98 juga dipelopori oleh para pemuda. Dengan demikian, pemuda dalam kategori sosial memainkan peran kepeloporan yang relatif signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Kepeloporan pemuda tidak hanya berupa gerakan dalam konteks politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam gerakan sosial keswadayaan sebagai socialworkers, penumbuhan modal sosial, pengembangan seni dan budaya, kegiatan ekonomi Strategis Perubahan kreatif, serta kegiatan olahraga. Potensi pemuda lain yang dapat menjadi kebanggaan bangsa adalah kepeloporan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. PerananStrategis Perubahanpemuda dalam bidang iptek dapat diwujudkan dalam kepeloporan penemuan dan pemanfaatan Iptek. Kepeloporan Iptek diwujudkan dalam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan. MelaluiStrategis Perubahankepeloporan Iptek, peran pemuda semakin kokoh sebagai pembaru dan pelopor kemajuan peradaban manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam penguasaan Iptek di masa depan akan menjadi salah satu penentu keunggulan bersaing dalam percaturan negara di dunia, disamping kekuatan ekonomi dan militer.

Pembangunan Keolahragaan

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olah raga prestasi. Ketiga lingkup olah raga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemasaran dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan daerah sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Fokus pembangunan keolahragaan pada kurun waktu tahun 2024-2026 adalah:

Pembangunan Bidang Olahraga

1. Pembangunan Sukabumi Sport Center di tiap Kelurahan;
2. Pembentukan PPLPD ditingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama;
3. Pembinaan Atlet-atlet dan pelatih berprestasi;
4. Peningkatan sarana dan prasana olahraga.

Pembangunan Kepariwisata

1. Pembangunan kepariwisataan mencakup Keterbatasan Kualitas dan Efisiensi Sistem Pelayanan Wisata

Pariwisata merupakan sektor yang tidak Strategis Perubahannya. Strategis Perubahan menjual daya tarik berupa fisik saja, melainkan juga merupakan sektor yang menjual jasa atau pelayanan. Saat ini pelayanan baik yang diberikan di sejumlah pengelola objek wisata maupun usaha pariwisata lainnya di Kota Sukabumi dinilai masih kurang memuaskan. Rendahnya kualitas dan efisiensi sistem pelayanan wisata juga terlihat dari keluhan wisatawan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan.

2. Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang Belum Optimal

Jumlah penduduk Kota Sukabumi yang semakin bertambah, arus globalisasi, dan liberalisasi yang menguat menjadikan perubahan situasi dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga semakin cepat dan dinamis. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Sukabumi pun semakin kompleks, sehingga diperlukan kecepatan, ketepatan, dan keefektifan pengelolaan pemerintahan agar tidak tertinggal dari daerah-daerah lain. Sampai saat ini, Pemerintah Kota Sukabumi masih mendominasi peran sebagai regulator tunggal dalam pembangunan

kepariwisataan di Kota Sukabumi. Pemikiran tentang kegiatan kepariwisataan belum mengarah pada Kerja Perubahan sama dengan badan-badan kepariwisataan nasional, non- pemerintahan, dan pihak-pihak swasta lainnya.

2.3.4 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Tabel
Isu-isu Strategis Perubahan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA			
MISI I : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Peran Pemuda yang berdaya saing tinggi dan mandiri 2. Meningkatkan Prestasi Olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional	1. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder <i>pentahelix</i> dalam pengembangan kota kreatif 2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga	1. Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal 2. Meningkatkan kreasi masyarakat 3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga 4. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan
MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Sektor Pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar	Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata 2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar 3. Meningkatkan koordinasi, integasi, sinkronisasi, kolaborasi dan harmonisasi dengan	1. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata 2. Meningkatkan promosi pariwisata unggulan daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 3. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital 4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas ekonomi kreatif 5. Meningkatkan peran ABCGM (<i>Academic, Bisnis, Community, Gaverment</i> and <i>Media</i>) Bisnis dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah

		akademisi, dunia usaha, komunitas kreatif, pemerintahan dan media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah	
--	--	---	--

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program Kerja Perubahan, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel. Dengan Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Pelaksanaan Tupoksi merupakan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah, dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja, strategi, kebijakan, program Kerja Perubahan, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024		

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																		
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1	
							Tahun - 1	Tahun N					Setelah					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertinggi	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertinggi	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	19	01	2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 487.138.700					Rp. 487.138.700			Rp. 486.240.400			
2	19	01	2.05	0001 Penyediaan Komponen Indeks Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 3.297.100					Rp. 3.297.100			Rp. 3.297.100			
2	19	01	2.05	0002 Penyediaan Pesutan dan Peninggalan Kantor	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 134.936.100					Rp. 134.936.100			Rp. 134.936.100			
2	19	01	2.05	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 26.583.500					Rp. 26.583.500			Rp. 26.583.500			
2	19	01	2.05	0006 Penyediaan Bahan Gacok dan Peraturan Peninggalan Untaian	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 5.470.000					Rp. 5.470.000			Rp. 5.470.000			
2	19	01	2.08	0008 Fasilitas Kumpulan Tami	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 14.251.000					Rp. 14.251.000			Rp. 23.452.700			
2	19	01	2.08	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsumsi SKPD	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 262.851.000					Rp. 262.851.000			Rp. 312.501.000			
2	19	01	3.07	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Usulan Pemertan Daerah								Rp. 9.910.000	Rp. 00.080.000		Rp. 99.890.000			
2	19	01	3.07	0005 Pengadaan Mbel	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa						Rp. 9.910.000	Rp. 00.080.000		Rp. 99.990.000			
2	19	01	2.07	0006 Pengadaan Pesutan dan Mbel Lainnya	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa						Rp. 9.910.000	Rp. 00.080.000		Rp. 99.990.000			
2	19	01	2.08	Pemediaan Jasa Penunjang Usulan Pemertan Daerah			Rp. 894.626.100					Rp. 894.626.100			Rp. 914.042.700			
2	19	01	3.08	0001 Pemediaan Jasa Surat Mengural	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 1.032.000					Rp. 1.032.000			Rp. 2.032.000			
2	19	01	2.08	0002 Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 123.984.700					Rp. 123.984.700			Rp. 132.399.700			
2	19	01	2.05	0005 Pemediaan Jasa Perawatan dan Peninggalan Kantor	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 355.925.250					Rp. 355.925.250			Rp. 401.725.250			
2	19	01	2.08	0004 Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 413.889.200					Rp. 413.889.200			Rp. 377.896.800			
2	19	01	2.09	Pemertahan Barang Mlik Daerah Penunjang Usulan Pemertan Daerah			Rp. 357.070.000					Rp. 357.070.000			Rp. 379.984.500			
2	19	01	2.09	0002 Pemediaan Jasa Pemertahan Biaya Pemertahan, Pagi dan Perbaikan Kebutuhan Dana Otonomi atau Lapangan	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 74.696.000					Rp. 74.696.000			Rp. 85.640.500			
2	19	01	2.09	0006 Pemertahan Pesutan dan Mbel Lainnya	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 8.810.000					Rp. 8.810.000			Rp. 19.730.000			
2	19	01	3.09	0009 PemertahanRanabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 273.094.000					Rp. 273.094.000			Rp. 273.094.000			
2	19	02		PROGRAM PENCEMBAHAN KAPASITAS DAYA SAUD KEMUDARAN			Rp. 906.225.000					Rp. 906.225.000			Rp. 1.226.221.800			
2	19	02	2.01	Pemediaan, Peninggalan, dan Pengembangan Pemuda dan Perempuan Terpadu Pemuda Pelopor KabupatenKota, Wuswusa Mula Pemuda, dan Pemuda Kader KabupatenKota			Rp. 284.215.000					Rp. 284.215.000			Rp. 584.211.800			
2	19	02	2.01	0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saug Pemuda Pelopor	- PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	Rp. 34.215.000					Rp. 34.215.000			Rp. 34.215.000			

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah									
					Tahun N					Tahun N + 1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertinggi	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertinggi	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan (Sara Seng Wira Jajaja Pemas)	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000			Rp. 500.000.000
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemasnakan Tidak Implementasi Rencana Aksi Daerah/TKD Tingkat Kabupaten/Kota	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes							
2	19	02	2.01	0006	Peningkatan Kepemasnakan, Kependidikan dan Kerkurikulum Pemas	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes							
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemasnakan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 622.010.000	Rp. 642.010.000				Rp. 642.010.000
2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemas atau Organisasi Kepemasnakan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 126.010.000	Rp. 126.010.000				Rp. 126.010.000
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemas dan Organisasi Kepemasnakan Kabupaten/Kota	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 496.000.000	Rp. 516.000.000				Rp. 516.000.000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGULAH/ROKAM				Rp. 2.333.076.700	Rp. 227.100.000				Rp. 3.209.176.700
2	19	03	2.01		Pembiayaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jaring Pendidikan yang Mendukung Kewirausahaan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 2.960.176.700	Rp. 2.962.076.900			Rp. 100.000.000.00
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengembangan Pusat Pembiayaan dan Fasilitas Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Berorientasi pada Masyarakat dan Dunia Usaha	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes							
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 144.800.000	Rp. 215.800.000				Rp. 215.800.000
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 144.800.000	Rp. 144.800.000				Rp. 144.800.000
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Kegiatan	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-			Rp. 51.000.000				Rp. 100.000.000.00
2	19	03	2.03		Pembiayaan dan Pengembangan Olahraga Pemas Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 368.932.000	Rp. 368.932.000				Rp. 368.932.000
2	19	03	2.03	0002	Pembiayaan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes							
2	19	03	2.03	0003	Pembiayaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 227.968.500	Rp. 227.968.500				Rp. 227.968.500
2	19	03	2.03	0004	Pembiayaan Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 140.933.500	Rp. 140.933.500				Rp. 140.933.500
2	19	03	2.04		Pembiayaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Rp. 1.203.000.000	Rp. 1.099.000.000				Rp. 1.099.000.000
2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemasnakan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Tertinggi	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 1.203.000.000	Rp. 1.099.000.000				Rp. 1.099.000.000
2	19	03	2.05		Pembiayaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Rp. 618.344.700	Rp. 738.344.600				Rp. 1.025.444.800
2	19	03	2.05	0001	Peningkatan, Pengembangan dan Pembiayaan Festival dan Olahraga Rekreasi	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 360.714.700	Rp. 571.714.600				Rp. 571.714.600
2	19	03	2.05	0003	Pembiayaan, Pengembangan dan Pembiayaan Sana dan Pemas Olahraga Rekreasi	-PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	- Kota Sukabumi, Sensus Kecamatan, Sensus KelDes		Rp. 226.630.000	Rp. 226.630.000				Rp. 453.730.000
2	19	03			URUSAN PEMERINTAHAN PELHAN				Rp. 1.967.028.500	Rp. 2.266.945.000				Rp. 4.284.274.500

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah									
					Tahun N					Tahun N + 1				
					Sebelum					Setelah				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
3	26				Rp. 1.997.929.500	Rp. 2.288.345.000			Rp. 4.286.274.500	Rp. 2.128.576.750	Rp. 2.254.945.000			Rp. 4.383.521.750
3	26	02			Rp. 1.513.934.500	Rp. 2.274.943.500			Rp. 3.788.878.000	Rp. 1.563.631.250	Rp. 2.254.945.000			Rp. 3.818.576.250
3	26	02	2.01		Rp. 320.316.000				Rp. 320.316.000	Rp. 320.316.000				Rp. 320.316.000
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengkaji Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota				Rp. 320.316.000	Rp. 320.316.000				Rp. 320.316.000
3	26	02	2.02		Rp. 987.143.000	Rp. 2.156.000.000			Rp. 3.143.143.000	Rp. 987.143.000	Rp. 2.156.000.000			Rp. 3.143.143.000
3	26	02	2.02	0004	Pengembangan Fasilitas dan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Kota				Rp. 2.340.456.000	Rp. 184.456.000	Rp. 2.156.000.000			Rp. 2.340.456.000
3	26	02	2.02	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Pengkaji Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota				Rp. 802.684.000	Rp. 802.684.000				Rp. 802.684.000
3	26	02	2.03		Rp. 206.375.000	Rp. 118.945.000			Rp. 325.320.000	Rp. 256.372.250	Rp. 88.945.000			Rp. 355.317.250
3	26	02	2.03	0004	Pengembangan Fasilitas dan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota				Rp. 325.320.000	Rp. 256.372.250	Rp. 88.945.000			Rp. 355.317.250
3	26	02	2.04											
3	26	02	2.04	0011	Penelitian Tindakan Tindakan Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota									
3	26	03			Rp. 161.835.500				Rp. 161.835.500	Rp. 166.835.500				Rp. 166.835.500
3	26	03	2.01		Rp. 161.835.500				Rp. 161.835.500	Rp. 166.835.500				Rp. 166.835.500
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata dalam dan Luar Negeri				Rp. 161.835.500	Rp. 166.835.500				Rp. 166.835.500
3	26	03	2.01	0006	Fasilitas Kegiatan Pariwisata Pariwisata dan Destinasi dalam dan Luar Negeri Kabupaten Kota				Rp. 161.835.500	Rp. 166.835.500				Rp. 166.835.500
3	26	04			Rp. 55.547.500	Rp. 11.400.000			Rp. 66.947.500	Rp. 44.197.500	Rp. 0			Rp. 44.197.500
3	26	04	2.01		Rp. 55.547.500	Rp. 11.400.000			Rp. 66.947.500	Rp. 44.197.500	Rp. 0			Rp. 44.197.500
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Riset dan Riset Pariwisata Kota Wisata				Rp. 55.547.500	Rp. 44.197.500	Rp. 0			Rp. 44.197.500
3	26	04	2.02											
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sisi dan Sisi Pariwisata									
3	26	04	2.02	0022	Fasilitas Peningkatan Fasilitas Fasilitas									
3	26	05			Rp. 266.712.500				Rp. 266.712.500	Rp. 351.712.500				Rp. 351.712.500
3	26	05	2.01		Rp. 216.712.500				Rp. 216.712.500	Rp. 301.712.500				Rp. 301.712.500

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N											
									Sebelum				Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
3	26	05	2.01	0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukadumi, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten		Rp. 216.712.500				Rp. 216.712.500	Rp. 301.712.500				Rp. 301.712.500		
3	26	05	2.03		Pengembangan Kapasitas Petaku Ekonomi Kreatif				Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000		
3	26	05	2.03	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Sukadumi, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000		
Jumlah									Rp. 11.593.731.782	Rp. 2.513.445.000				Rp. 14.107.176.782	Rp. 12.466.257.480	Rp. 2.572.125.000			Rp. 15.636.362.400	Rp. 123.536.359,00
Kota Sukadumi, Kepala Dinas Kependidikan, Olahraga dan Pariwisata																				
Tepi Comba Nugroho AP, M.T NIP. 197505021960511002																				

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi merupakan Program Kerja Perubahan yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan perlu dipahami secara komprehensif. Rencana program yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional ke dalam perencanaan Kerja Perubahan tahunan.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan profesionalitas unsur pemuda, tenaga keolahragaan dan pelaku kepariwisataan terus ditingkatkan sehingga semangat profesionalisme yang dikembangkan dapat memperlancar pembangunan pemuda, olahraga dan pariwisata di Kota Sukabumi.

Diharapkan pada Tahun 2024, sesuai dengan program/Kegiatan yang sudah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2024 akan ada penambahan dana yang dapat meningkatkan dan memajukan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

L. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission* – OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanaman modal, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Renja Perubahan DPMPTSP Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Renja SKPD yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dalam penyusunannya harus mengakomodir penyesuaian Program dan Kegiatan sesuai dengan kondisi terkini dalam memperhatikan target kinerja yang terdapat di dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 beserta perubahannya, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga memperhatikan kebijakan-kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun berkenaan sebagai penyesuaian atas program dan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 mengakomodir dalam pelaksanaan kegiatan pada DPMPSTSP Kota Sukabumi khususnya selama bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 (semester 1) dan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2024

1.2 Landasan Hukum

Dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
- j. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
- k. Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 50);

- l. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 147 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 148);
- m. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
- n. Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 33);
- o. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Renja Perubahan DPMPSTP Kota Sukabumi adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

1.3.2 Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

- Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi
- 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi, DPMPTSP Kota Sukabumi melaksanakan pelayanan bidang perizinan sebanyak 6 perizinan dan 3 non perizinan yang diatur dalam. Adapun izin yang dilimpahkan kepada DPMPTSP yaitu :

a. Pelayanan Perizinan :

1. Izin Reklame;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Trayek;
4. Izin Penurunan Trotoar;
5. Izin Parkir;
6. Izin Penebangan Pohon.

b. Pelayanan Non Perizinan :

1. Pembatalan / pencabutan perizinan penanaman modal;
2. Kebijakan penanaman modal dan investasi;
3. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Tabel 2.1.1
Laporan Perkembangan Investasi dan Perusahaan PMDN (s.d
Bulan Juni 2024)

No	URAIAN	PERKEMBANGAN PENAMBAHAN/BULAN						
		MIKRO	PK	PM	PB	JML	NAKER	JUMLAH INVESTASI
			7	8	9	10	11	12
	JUMLAH 2024		-	-	-	-	-	-
1	JANUARI' 24	550	76	1	12	639	1.735	110,203,548,792
2	PEBRUARI	533	75	7	5	620	1.821	178,625,819,919
3	MARET	2227	73	1	11	2.312	3.362	72,012,498,809
4	APRIL	520	47	-	5	572	1.361	59,177,999,998
5	MEI	709	80	-	20	809	2.435	88,522,575,998
6	JUNI	621	73	3	1	698	1.583	61,545,603,630
JUMLAH S/D BULAN LAPORAN		5.160	424	12	54	5.650	12.297	570,088,047,146

Realisasi investasi PMA/PMDN di Kota Sukabumi pada
Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II mencapai
Rp. 570,088,047,146

Sedangkan pencapaian target pendapatan yang diperoleh dari
retribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Jumlah Retribusi (s.d Bulan Juni 2024)

No.	Jenis Izin	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	PBG	867.982.600,00	405.347.592,00	45,90
2.	Penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	16.000.000,00	0	0

Rekapitulasi jumlah retribusi sampai dengan triwulan II untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) realisasi sebesar Rp. 405.347.592,00 atau sebesar 45.90% dari target Rp. 867.982.600,00. Untuk Penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum mencapai target yaitu sebesar dari target Rp. 16.000.000,00

Program Prioritas yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Program Promosi Penanaman Modal;
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tabel 2.1.3
Evaluasi Rencana Kerja s/d Triwulan II

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	5.094.632.865	0	2.940.886.817
2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	%	100	7.025.000	60	6.460.000
2.18.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	dokumen	5	7.025.000	1	6.460.000
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	3.563.125.085	1	2.015.289.271
2.18.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	3.563.125.085	25	2.015.289.271
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	%	90	348.257.030	0	188.689.641

2.18.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	10.000.000	1	5.090.000
2.18.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	29.999.780	1	11.908.400
2.18.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.000.000	1	964.000
2.18.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	40.711.250	1	13.786.400
2.18.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	26.000.000	6	13.700.000
2.18.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	236.546.000	6	143.240.841
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	90	296.970.250	100	294.100.000
2.18.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	6	296.970.250	1	294.100.000
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	%	100	551.619.000	1	239.676.277
2.18.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	1.500.000	12	1.300.000
2.18.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	182.513.600	12	46.220.559
2.18.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	42.000.000	6	17.000.000
2.18.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	325.605.400	6	175.155.718
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	%	90	327.636.500	1	196.671.628
2.18.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	238.348.500	15	137.690.200
2.18.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	34.310.000	5	5.220.000
2.18.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	54.978.000	1	53.761.428
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	%	10	64.999.950	1	51.977.700
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi	%	80	64.999.950	50	51.977.700
2.18.03.2.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	64.999.950	1	51.977.700
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	80	463.488.150	100	303.615.800

2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Dikeuarkan	izin	1000	463.488.150	2.549	303.615.800
2.18.04.2.01.01		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	1.000	349.999.650	2.549	239.011.400
2.18.04.2.01.02		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	10	42.500.000	4	29.650.000
2.18.04.2.01.03		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	40	70.988.500	64	34.954.400
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	%	10	628.116.450	1	168.265.000
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Penanaman Modal	pelaku usaha	80	628.116.450	0	168.265.000
2.18.05.2.01.01		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	12	94.216.850	20	0
2.18.05.2.01.02		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	200	345.465.700	200	143.940.000
2.18.05.2.01.03		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	kegiatan usaha	20	188.433.900	20	24.325.000
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal oleh penerima data	%	100	109.688.500	100	61.514.441
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD/masyarakat/peng usaha/stakeholder yang menerima data dan informasi perizinan	%	50	109.688.500	20	61.514.441
2.18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	60	109.688.500	15	61.514.441

Pada tabel 2.1.3 tentang Evaluasi Rencana Kerja s/d Triwulan II dapat terlihat capaian penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi dari total Pagu anggaran Sebesar Rp. 6.360.925.915 telah terserap sebesar Rp. 3.526.259.758 dengan persentasi 55,43%, secara perhitungan target penyerapan belum tercapai dibawah 44,56%.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu :

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

d. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, terdiri atas :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran murni Rp. 64.999.950,- dengan penyerapan di semester I sebesar Rp. 51.977.700,-
- 2) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terselenggaranya koordinasi antar lembaga pelaksanaan pelayanan perizinan, menggunakan dana APBD Kota Sukabumi sebesar Rp. 349.999.650,- dengan realisasi Rp. 239.011.400,-
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dana APBD Kota Sukabumi dengan pagu sebesar Rp. 42.500.000,- dengan realisasi Rp. 29.650.000,-
- 4) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp.109.688.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 61.514.441,-

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Sukabumi Tahun 2024 yaitu :

Tabel T.C-29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPSTP) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMPSTP) (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	80	90	0		80	97,63	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100	80	80	100	100%	80	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	5	5	5	5	100%	5	5	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	80	80	100%	80	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	11	19	19	100%	21	21	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	90	92,45	80	100	100%	80	85,81	100

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10	10	10	100%	10	10	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12	42	42	100%	2	2	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	15	15	15	100%	2	2	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	34	34	34	100%	34	32	94,12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	200	50	20	40%	200	199	99,5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	20	200	102	51%	400	398	99,5
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	90	0	80	100	100%	100	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	1	1	100%	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100	85,27	80	100	100%	80	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	63	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4	4	4	100%	4	4	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	12	12	100%	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	14	14	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	90	92	80	80	100%	80	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	15	8	4	4	100%	5	5	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	5	3	60%	5	5	100

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	1	1	100%	1	1	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	10	0	0	0	0%	10	-2,60	-26
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi	80	0	0	0	0%	2	1	50
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran potensi investasi dalam atau luar provinsi	2	0	0	0	0%	2	1	50
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80	80	100	100	100%	80	100	100
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Dikeluarkan	1000	1000	1585	100	100%	1000	7360	100
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Masyarakat dan pelaku usaha yang mengajukan perizinan secara online	1000	700	772	100%	100%	300	6695	100
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Buku Laporan Persentase Pengaduan yang tertangani	1	0	0	0	100%	2	2	100
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Buku Evaluasi Triwulan, Semester & Akhir Tahun	7	0	0%	0%	100%	60	100	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	220.000.000	618.886.992.677	215.000.000	3.411.037.717.214	100%	210.000.000.000	3.322.374.962.365	100
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	12	0	0	0	0%	15	15	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Buku LKPM	7	1	0	0	0%	7	3	42,85

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bimbingan Teknis	1	0	1	1	100%	1	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil menengah dan pengembangan potensi produk unggul UKM	60	0	60	60	100%	7	7	100
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya pengetahuan tentang informasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi bagi pengusaha/masyarakat milenial yg memiliki NIB	60	0	60	42	70%	60	40	66,67
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang Terinformasikan untuk Investasi	400	0	150	150	100	400	70	17,5
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buletin	80	0	150	150	100%	80	80	100

Terdapat 5 program, 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang di laksanakan pada tahun anggaran 2021. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada program, kegiatan dan sub kegiatan hampir dapat terpenuhi semuanya. Secara tingkat capaian realisasi target renstra pun hampir semuanya berkinerja baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Sukabumi

Analisis kinerja pelayanan DPMPSTSP adalah pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi. Analisis tersebut digambarkan pada berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN	Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	
					(thn n-1)	(Tahun n)	Tahun n+1	Triwulan II	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Nilai SAKIP DPMPSTSP		LHE Inspektorat	Nilai	63,3	63,86	65,72	Akhir tahun	Akhir tahun
2	Nilai Indeks SKM Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan		Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan	Nilai	80	80	80,5	Akhir tahun	Akhir tahun

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah :

a. Perizinan *online*

Perizinan online adalah Sebuah sistem yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan. Dengan aplikasi perizinan online masyarakat tidak lagi direpotkan untuk datang ke kantor perizinan untuk mengetahui persyaratan perizinan dan status permohonan perizinan yang diajukan

b. Integrasi aplikasi yang menunjang perizinan

Memanfaatkan teknologi informasi melalui perizinan *online* disebut sebagai salah satu cara untuk kian mempercepat pengurusan izin. Hal ini secara khusus dapat memotong rantai perizinan dari daerah ke pusat dengan adanya perizinan *online*. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan perekonomian di daerah pun bisa lebih cepat dengan masuknya investasi.

Untuk itu, proses perizinan *online* yang dikembangkan hendaknya menggunakan model administrasi yang lebih modern dan cepat dengan sistem data yang terintegrasi.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja :

1. Dengan adanya perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mempergunakan aplikasi SIMBG dalam pengeluaran SK nya, banyak pengajuan izin nya menjadi lebih lama dari SOP sebelumnya. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kecewa atas proses PBG yang membutuhkan waktu lebih lama dan persyaratan yang lebih rumit;
2. Para pengusaha membutuhkan lahan yang lebih besar untuk investasinya, tetapi kota sukabumi masih belum bisa menyediakan lahan tersebut, karena luasan kota sukabumi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala :

1. Dibuatkan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bisa berupa Peraturan Wali Kota yang berfungsi untuk mengatur klasifikasi pembangunan (tempat usaha yang besar, menengah dan kecil, dan rumah tinggal dan tempat usaha) harus dibedakan persyaratan pengajuannya;
2. Memanfaatkan tanah-tanah/lahan-lahan Pemerintah Daerah yang sudah tidak berfungsi, bisa dijadikan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa;

Tabel (T.C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024								
KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI*	INDIKATOR KINERJA *	TARGET CAPAIAN *	PAGU INDIKATIF 2024* PROGRAM KEGIATAN		SUMBER DANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF 2024* PROGRAM KEGIATAN		SUMBER DANA	CATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	5.094.632.865			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	5.164.402.865			
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100	7.025.000			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100	7.025.000			
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	5		7.025.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	5		7.025.000		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.563.125.085			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		3.563.125.085			
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		3.563.125.085		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan		3.563.125.085		

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.700.000			
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24		14.700.000		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	90	348.257.030			2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	90	381.444.530		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		10.000.000		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		10.000.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		29.999.780		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		29.999.780	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		5.000.000		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		5.000.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		40.711.250		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		41.898.750	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		26.000.000		2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		29.500.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12		236.546.000		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12		265.046.000	

			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD					
2.18.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		##### ##			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		350.245.2 50,00			
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Pengadaan Mebeler	1 paket		-		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeler	1 paket		26.036.0 00		
2.18.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			296.970. 250		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			324.209. 250		
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100	551.619.0 00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100	498.139.0 00			
2.18.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		1.500.00 0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		1.500.00 0		
2.18.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		182.513. 600		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		123.513. 600		
2.18.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		42.000.0 00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		47.520.0 00		

2.18.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		325.605.400		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		325.605.400		
2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	90	327.636.500			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	90	364.424.000			
2.18.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15		238.348.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15		242.802.000		
2.18.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5		34.310.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5		34.310.000		
2.18.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		54.978.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		87.312.000		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	10	64.999.950,00			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	10	122.598.950,00			

2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi	80	64.999.950,00		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi	80	122.598.950,00			
2.18.03.2.0 1.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	64.999.950		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	122.598.950			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80	463.488.150,00		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80	553.762.150,00			
2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Izin yang Dikeluarkan	1000	463.488.150,00		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Izin yang Dikeluarkan	1000	553.762.150,00			
2.18.04.2.0 1.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1.000	349.999.650		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1.000	386.095.650			

			secara Elektronik						secara Elektronik					
2.18.04.2.0 1.02	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10		42.500.000		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10		66.678.000		
2.18.04.2.0 1.03	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40		70.988.500		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40		100.988.500		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	10	628.116.450,00			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	10	628.116.450,00			

2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	80	628.116.450,00			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	80	628.116.450,00			
2.18.05.2.0 1.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12		94.216.850		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12		94.216.850		
2.18.05.2.0 1.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200		345.465.700		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200		345.465.700		
2.18.05.2.0 1.03	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan	20		188.433.900		Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan	20		188.433.900		

[illegible]

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja perubahan DPMPTSP Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan DPMPTSP tahunan daerah yang berlandaskan perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Sukabumi. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi DPMPTSP Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renja perubahan DPMPTSP dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Tahun 2018-2023. Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DPMPTSP Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Program dan Kegiatan Renja DPMPSTSP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel TC.31

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

[illegible]

		ITAN DENG AN PELAY ANAN DASAR																	
	2.18	URUSA N PEME RINTA HAN BIDAN G PENAN AMAN MODA L						4.985.7 09.215, 00	6.360.9 25.915, 00	6.607. 583.41 5,00	1.621.874. 200,00							60.500 .000,0 0	
1,	2.18.0 1	PROG RAM PENUN JANG URUSA N PEME RINTA HAN DAERA H KABUP ATEN/ KOTA	-				-	-	4.507.0 09.215, 00	5.094.6 32.865, 00	5.179. 102.86 5,00	- 4.446.509. 215,00						60.500 .000,0 0	
	2.18.0 1.2.01	Perenc anaan, Pengan ggaran, dan Evalua si Kinerja Perang kat Daerah	Persenta se Ketersed iaan Dokume n Perenca naan, Evaluasi Kinerja dan Laporan				-	100 %	5.475.0 00,00	7.025.0 00,00	7.025. 000,00	1.550.000, 00			-	- -	DPMP TSP Kota Sukab umi	0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP

			Kinerja Perangkat at Daerah																	ADU SATU PINT U
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat at Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.475.000,00	7.025.000,00	7.025.000,00	1.550.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT U
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perang kat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perang kat Daerah				-	100 %	3.396.739.831,00	3.563.125.085,00	3.563.125.085,00	166.385.254,00			-	--	DPMP TSP KotaSukabumi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT U

	2.18.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10.00 Oran g/bula n	10.00 Oran g/bulan	3.396.7 39.831, 00	3.563.1 25.085, 00	3.563. 125.08 5,00	166.385.2 54,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-				0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD				3.00 Lapor an	3.00 Lapora n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-				0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan a n/Semester an SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
	2.18.0 1.2.02 .0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	42 0	0,00	0,00	14.700 .000,0 0	14.700.00 0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			25.000 .000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
	2.18.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat				-	100 %	402.636 .600,00	348.257 .030,00	381.44 4.530, 00	- 21.192.07 0,00			-	-	DPMP TSP Kota Sukabumi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

			at Daerah																		PELAYAN TERPADU SATUPINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	10.000. 000,00	10.000. 000,00	10.000. .000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATUPINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	30.000. 000,00	29.999. 780,00	29.999. .780,00	-220,00	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATUPINTU

																			PINTU	
	2.18.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27.00 Paket	27.00P aket	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000. 000,00	0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	--			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	40.711. 600,00	40.711. 250,00	41.898 .750,00	1.187.150, 00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU

																			PINTU	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan				16.00 Dokumen	16.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	29.500.000,00	3.500.000.000	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																			PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12.00 Laporan	12.00 Laporan	290.925.000,00	236.546.000,00	265.046.000,00	- 25.879.000,00	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan</i>				-	90 %	58.000.000,00	296.970.250,00	350.245.250,00	292.245.250,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	DPMP TSP Kota Sukabumi	35.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																gkata n Kualit as Pelay anan Publik Denga n Pengu atan Buday a Kreatif & Inovati f					
	2.18.0 1.2.07 .0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	26.036 .000,0 0	26.036.00 0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Penin gkata n Kualit as Pelay anan Publik Denga n Pengu atan Buday a Kreatif & Inovati f Penin gkata n Kualit as Pelay				35.500 .000,0 0	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINT U

																an Publik Denga n Pengu atan Buday a Kreatif & Inovati f					
	2.18.0 1.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediaki an				2.00 Unit	2.00 Unit	58.000. 000,00	296.970 .250,00	324.20 9.250, 00	266.209.2 50,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU	
	2.18.0 1.2.08	Penyed iaan Jasa Penunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	Persenta se penyedi aan jasa penunja ng sesuai kebutuh an				-	100 %	429.838 .784,00	551.619 .000,00	498.13 9.000, 00	68.300.21 6,00			-	- -	DPMP TSP Kota Sukab umi		0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU	

																				SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyedi- aan Jasa Surat Menyura t				1.00 Lapor- an	1.00 Lapora- n	1.500.0 00,00	1.500.0 00,00	1.500. 000,00	0,00	Kota Sukabu- mi, Semua Kecama- tan, Semua Kel/Des- a	PENDA- PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyedi- aan Jasa Komunik- asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak- an				0 Lapor- an	0 Lapora- n	82.513. 984,00	182.513 .600,00	123.51 3.600, 00	40.999.61 6,00	Kota Sukabu- mi, Semua Kecama- tan, Semua Kel/Des- a	PENDA- PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	--			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU

																				PINTU	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	24.975.000,00	42.000.000,00	47.520.000,00	22.545.000,00	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14.00 Laporan	14.00 Laporan	320.849.800,00	325.605.400,00	325.605.400,00	4.755.600,00	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																			PINTU	
	2.18.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar				-	100 %	214.319 .000,00	327.636 .500,00	364.42 4.000,00	150.105.0 00,00			-	- -	DPMP TSP Kota Sukabumi		0,00	DINAS PENA NAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	125.000 .000,00	238.348 .500,00	242.80 2.000,00	117.802.0 00,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENA NAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.0 1.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	34.320.000,00	34.310.000,00	34.310.000,00	-10.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	54.999.000,00	54.978.000,00	87.312.000,00	32.313.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	--			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	2.18.02	PROGRAM PEMBANGUNAN IKLIM	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	

		PENAN AMAN MODA L																		
	2.18.0 2.2.01	Peneta pan Pember ian Fasilita s/Insent if Dibidan g Penana man Modal yang Menjadi Kewen angan Daerah Kabupa ten/Kot a	Jumlah Laporan Penetap an Pemberi an Fasilitas/ Insentif di bidang Penana man Modal yang Menjadi Kewena ngan Daerah Kabupat en/Kota				-	1 Dokum en	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	DPMP TSP Kota Sukab umi		0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU
	2.18.0 2.2.01 .0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah rekomen dasi kebijaka n sektor usaha yang regulasi nya diharmo nisasi terkait Perizina n Berusah a				1.00 Doku men	1.00 Dokum en	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINTU

			<i>Berbasis Resiko</i>																
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	20.000.000,00	64.999.950,00	122.598.950,00	-20.000.000,00						0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi</i>				-	80 %	20.000.000,00	64.999.950,00	122.598.950,00	102.598.950,00			-	-	DPMP TSP Kota Sukabumi	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	64.999.950,00	122.598.950,00	102.598.950,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

																				N TERP ADU SATU PINT U
	2.18.0 3.2.01 .0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokume n strategi Promosi Penana man Modal Kab/Kot a				0.00D okume n	0.00Do kumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	--			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINT U
4,	2.18.0 4	PROG RAM PELAY ANAN PENAN AMAN MODA L	-				-	-	84.000. 000,00	463.488 .150,00	553.76 2.150, 00	- 84.000.00 0,00							0,00	
	2.18.0 4.2.01	Pelaya nan Perizin an dan Non Perizin an Secara Terpad u Satu	Jumlah Izin yang Dikeluar kan				-	1000 Dokum en	84.000. 000,00	463.488 .150,00	553.76 2.150, 00	469.762.1 50,00			-	- -	DPMP TSP Kota Sukab umi		0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA

[illegible]

			Jumlah Pelaku usaha yang Memper oleh Layanan Konsulta si Perizina n Berusah a melalui Sistem Perizina n Berusah a Berbasis Risiko Terintegr asi secara Elektroni k				10.00 Pelak u Usaha	10.00 Pelaku Usaha	20.000. 000,00	42.500. 000,00	66.678 .000,0 0	46.678.00 0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINT U
	2.18.0 4.2.01 .0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendap at pemanta uan, analisis, evaluasi, dan pelapora n di bidang perizina n				40.00 Kegiat an Usaha	40.00 Kegiat an Usaha	30.000. 000,00	70.988. 500,00	100.98 8.500, 00	70.988.50 0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINT U

			<i>berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>																
5.	2.18.05	PROGRAM PENGEANDALAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	354.700.000,00	628.116.450,00	628.116.450,00	-354.700.000,00						0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal</i>				-	10 Pelaku Usaha	354.700.000,00	628.116.450,00	628.116.450,00	273.416.450,00			-	--	DPMP TSP Kota Sukabumi	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.0 5.2.01 .0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyele saian Permasa lahan dan Hambat an yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealis asikan Kegiatan Usahany a				200.0 0 Kegiat an Usaha	200.00 Kegiat an Usaha.	24.610. 000,00	94.216. 850,00	94.216 .850,0 0	69.606.85 0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAK NON FISIK- FASIL TASI PENAN AMAN MODAL	-	-			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINT U
	2.18.0 5.2.01 .0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengiku ti Bimbing an Teknis/ Sosialisa si Impleme ntasi Perizina n Berusah a Berbasis Risiko dan Pengaw				200.0 0 Pelak u Usaha	200.00 Pelaku Usaha	308.290 .000,00	345.465 .700,00	345.46 5.700, 00	37.175.70 0,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAK NON FISIK- FASIL TASI PENAN AMAN MODAL	-	-			0,00	DINA S PENA NAMA N MOD AL DAN PELA YANA N TERP ADU SATU PINT U

			asan Perizina n Berusah a Berbasis Risiko																		
	2.18.0 5.2.01 .0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis a dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi ; Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan				15.00 Kegiatan Usaha	15.00 Kegiatan Usaha	21.800. 000,00	188.433 .900,00	188.43 3.900, 00	166.633.9 00,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	- -				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

			<i>Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>																
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	20.000.000,00	109.688.500,00	124.003.000,00	-20.000.000,00						0,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	<i>Jumlah PD/mas yarakat/ peng usaha/st akeholder yang menerima data dan informasi perijinan</i>				-	50 %	20.000.000,00	109.688.500,00	124.003.000,00	104.003.000,00			-	-	DPMP TSP Kota Sukabumi	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		ten/Kota																	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				60.00 Dokumen	60.00Dokumen	20.000.000,00	109.688.500,00	124.003.000,00	104.003.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	--			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH							1.039.260.049.162,00	1.272.828.818.997,00	1.337.805.497.363,00	298.545.448.201,00							349.459.904.296,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi tahun 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan semester I (pertama) tahun 2024.

Dengan ditetapkanya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPPA-SKPD) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun anggaran 2024.

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan

Dalam Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026. Selain itu Renja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Renja menjadi pedoman operasional bagi semua unit kerja lingkup Dinas dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024, baik yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi, maupun APBN;
2. Penetapan indikator tolak ukur program/kegiatan yang mencakup indikator *output*, *outcome* dan *benefit* harus mengacu dan memperhatikan IKU (Indikator Kinerja utama) masing-masing unit kerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026;
3. Revolusi mental para aparatur dinas harus terus diintensifkan dalam berbagai kebijakan dan strategi dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari;
4. Sistem monitoring dan evaluasi internal harus ditingkatkan kualitasnya sehingga semua potensi hambatan dan masalah bisa terdeteksi secara dini dan dapat segera dicarikan solusinya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Kota Sukabumi selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Sukabumi. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPMPTSP Kota Sukabumi Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Perubahan DPMPTSP Kota Sukabumi juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Akhirnya, Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

M. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN
SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Rencana Kerja Pemerintah 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan *perubahan* karena dalam perjalanannya mengalami perubahan penambahan dan pergeseran dalam anggaran tahun 2024 untuk itu Dokumen Perubahan Rencana Kerja berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni Tahun berkenaan.

Perumusan Renja Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan Sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan bulan Juli tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah; dan
- d. Penutup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian unsur Pemerintah di bidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara 3762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 148 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 149);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 34);
22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25);
23. Surat Edaran Wali Kota Sukabumi Nomor KU.01.01.01/959/IV/1/BAPPEDA/2024 Tentang Penyusunan Usulan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi disusun dimaksudkan

karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan bulan Agustus adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah ;

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan SKPD yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni Tahun berkenaan

Bab ini memuat kajian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja sampai dengan semester 1 tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi Program/kegiatan yang *tidak memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/kegiatan yang *telah memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi Program/kegiatan yang *melebihi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel Matrik pengendalian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

1. sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan matrik renja sesuai SIPD, berikan penjelasan point-point penting anggaran perubahannya program, kegiatan dan sub kegiatan apa yang berubah dan berikan alasannya.

Tabel TC 34 (Matrik Renja)

Disesuaikan dengan print out matriks renja SIPD

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana Tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester 1 Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dalam pasal 360 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam matrik pengendalian di dalam urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan memiliki 5 Program yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Mempunyai target sebesar Rp. 6.116.923.883,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 3.535.886.274,- dengan tingkat prosentase sebesar 57,80% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah

- a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
- e. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- b. Pengadaan Mebel;
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- G. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
- Mempunyai target sebesar Rp. 300.665.600,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 230.010.000,- dengan tingkat prosentase sebesar 76,50% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi;
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
- Mempunyai target sebesar Rp. 72.265.500,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 42.925.000,- dengan tingkat prosentase sebesar 59,40% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan;
 - b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Mempunyai target sebesar Rp. 126.722.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 54.974.000,- dengan tingkat prosentase sebesar 43,38% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- A. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan data
 - a. Pengelolaan dan penyajian dan kependudukan;
- B. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
 - b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Mempunyai target sebesar Rp. 8.850.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 8.850.000,- dengan tingkat prosentase sebesar 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Matrik Pengendalian Tahun Anggaran 2024																		
Perangkat Daerah		DISDUKCAPIL																
Triwulan		II (dua)																
Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.12.01	Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Ketertediaan Laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	%	100	6.116.923.883	47,42	47,42	5.952.130.643	25,37	73,23	73,23	3.535.431.276	57,86	APBD			
2.12.01.2.01		Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	persentase ketertediaan dokumen perencanaan evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100	30.282.100	0,00	0,00	4.072.050	13,45	53,18	53,18	17.727.150	58,54	APBD			
2.12.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	16.490.100	0	0,00		0,00	3	100,00	13.655.100	82,81	APBD			
2.12.01.2.01.03		Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	821.800	0	0,00	770.000	93,70	2	66,67	770.000	93,70	APBD			
2.12.01.2.01.04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	499.800	0	0,00		0,00	2	66,67	-	0,00	APBD			
2.12.01.2.01.05		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	499.800	0	0,00		0,00	2	66,67	-	0,00	APBD			
2.12.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan tingkat realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tingkat Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tingkat Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	22	5.962.050	0	0,00	1.797.050	30,14	2	9,09	1.797.050	30,14	APBD			
2.12.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	6.008.550	0	0,00	1.505.000	25,05	1	10,00	1.505.000	25,05	APBD			

2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen administratif keuangan perangkat daerah	%	100	1.466.973.004	25,00	25,00	1.623.955.117	28,44	40,00	25,00	1.920.120.349	33,32	APBD		
2.12.01.2.02.01		Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	3.999.204.806	22	100,00	1.623.920.117	28,44	22	100,00	1.919.665.395	33,34	APBD		
2.12.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	679.000	-	0,00	0,00	0,00	1	20,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	526.750	-	0,00	455.000	86,38	1	20,00	455.000	86,38	APBD		
2.12.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Dokumen	1	562.450	-	0,00	0,00	0,00	1	100,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	%	100	1.999.400	0,00	0,00	455.000	22,75	100,00	100,00	455.000	22,75	APBD		
2.12.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	999.950	-	0,00	0,00	0,00	1	100,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.03.03		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	999.950	-	0,00	455.000	45,50	1	100,00	455.000	45,50	APBD		
2.12.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan administratif kepegawaian sesuai standar	%	100	34.999.850	0,00	0,00	-	0,00	100,00	100,00	0	0,00	APBD		
2.12.01.2.05.10		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	33	34.999.850	-	0,00	0,00	0,00	33	100,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen administratif umum perangkat daerah	%	100	802.081.500	54,35	54,35	143.077.100	15,46	79,35	79,35	718.431.207	79,64	APBD		
2.12.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	32.842.400	1	100,00	29.700.000	90,99	1	100,00	32.342.400	99,08	APBD		
2.12.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	399.999.750	1	100,00	34.200.000	8,55	1	100,00	393.053.650	98,26	APBD		
2.12.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	59.998.350	-	0,00	24.166.000	40,28	4	100,00	35.722.100	59,54	APBD		
2.12.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	169.998.000	24	100,00	10.044.000	5,91	24	100,00	149.665.200	87,45	APBD		
2.12.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.480.000	-	0,00	75.000	5,07	2	50,00	475.000	32,09	APBD		
2.12.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	402	237.963.000	105	26,12	44.892.100	18,87	105	26,12	108.172.857	45,46	APBD		

2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	123.468.837	100,00	100,00	64.520.000	52,26	100,00	100,00	94.970.000	76,92	APBD		
2.12.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	1	98.640.000	1	100,00	64.520.000	65,41	1	100,00	94.970.000	96,28	APBD		
2.12.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	3	24.828.837	3	100,00	8.573.500	34,53	3	100,00		0,00	APBD		
2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	%	100	1.078.376.760	100,00	100,00	248.287.996	23,02	100,00	100,00	547.019.242	50,73	APBD		
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	800.000	1	100,00		0,00	1	100,00	800.000	100,00	APBD		
2.12.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	285.133.460	1	100,00	74.884.279	26,26	1	100,00	143.481.317	50,32	APBD		
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	792.443.300	1	100,00	173.403.717	21,88	1	100,00	402.737.925	50,82	APBD		
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	344.741.930	100,00	100,00	68.218.400	19,79	93,33	93,33	237.163.280	68,79	APBD		
2.12.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	200.000.000	17	100,00	60.073.400	30,04	17	100,00	101.274.900	50,64	APBD		
2.12.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	24.891.930	25	100,00	8.145.000	32,72	20	80,00	16.718.500	67,16	APBD		
2.12.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	119.850.000	1	100,00		0,00	1	100,00	119.169.880	99,43	APBD		

II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	100	300.665.600	17,50	17,50	116.890.000	38,88	37,50	37,50	230.010.000	76,50	APBD		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, Cakupan Kepemilikan KTP, Cakupan Kepemilikan KIA, dan Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen	%	100	300.665.600	17,50	17,50	116.890.000	38,88	37,50	37,50	230.010.000	76,50	APBD		
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	7.663.650	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	APBD		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	20	293.001.950	7	35,00	116.890.000	39,89	15	75,00	230.010.000	78,50	APBD		
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	72.265.500	100,00	100,00	1.950.000	2,70	100,00	100,00	42.925.000	59,40	APBD		
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian.	%	100	72.265.500	100,00	100,00	1.950.000	2,70	100,00	100,00	42.925.000	59,40	APBD		
Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	9000	41.765.800	9.000	100,00	1.950.000	4,67	9.000	100,00	39.870.000	95,46	APBD		
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	Layanan	1	30.499.700	1	100,00	-	0,00	1	100,00	3.055.000	10,02	APBD		

2.12.04		IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	126.722.000	100,00	100,00	33.715.000	26,61	100,00	100,00	54.974.000	43,38	APBD		
2.12.04.2.01		Pengumpulan data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data	%	100	19.575.000	100,00	100,00	9.240.000	47,20	100,00	100,00	10.410.000	53,18	APBD		
2.12.04.2.01.01		Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	100	19.575.000	100	100,00	9.240.000	47,20	100	100,00	10.410.000	53,18	APBD		
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	%	100	107.147.000	100,00	100,00	24.475.000	22,84	100,00	100,00	44.564.000	41,59	APBD		
2.12.04.2.05		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	107.147.000	1,00	100,00	24.475.000	22,84	3,00	100,00	44.564.000	41,59	APBD		
2.12.05		V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	%	100	8.850.000	0,00	0,00	8.200.000	92,66	0,00	0,00	8.850.000	100,00	APBD		
2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Keteselesaian Data Kependudukan	%	100	8.850.000	0,00	0,00	8.200.000	92,66	0,00	0,00	8.850.000	100,00	APBD		
2.12.05.2.01.02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyekti kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	25	8.850.000		0,00	8.200.000	92,66	0,00	0,00	8.850.000	100,00	APBD		
Jumlah						6.623.426.983	52,98	52,98	1.712.885.663	25,85	62,13	62,13	3.872.190.274	58,44	APBD		

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program, kegiatan dan subkegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (n-1) s.d triwulan I	
					Target Renja Tahun 2022 (N-2)	Realisasi Renja Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) s.d triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) triwulan I
1	2	3	4	5	6	7	8=6/3*100%	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100		
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		
2.12.2.12.0.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
2.12.2.12.0.001.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	3	3	3	100,00	3	2	66,67
2.12.2.12.0.001.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	3	3	3	100,00	3	-	-
2.12.2.12.0.001.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	3	3	3	100,00	3	-	-
2.12.2.12.0.001.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	4	4	100,00	4	2	50,00
2.12.2.12.0.001.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		
2.12.2.12.0.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	22	22	22	22	100,00	22	22	100,00
2.12.2.12.0.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100,00
2.12.2.12.0.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100,00
2.12.2.12.0.001.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	1	1	1	100	1	1	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1					1		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1					1		
2.12.2.12.0.001.2.05.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	100	100	100	100	100	100		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	53	53	53	53	100	53		
2.12.2.12.0.001.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100		
2.12.2.12.0.001.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100,00
2.12.2.12.0.001.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100,00
2.12.2.12.0.001.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4	4	4	4	100	4	2	50,00
2.12.2.12.0.001.2.06.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	4	4	4	100	1		
2.12.2.12.0.001.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	4			-	3		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	402	192	401	401	209	402	200	49,75

2.12.2.12.0.001. 2.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	50	50,00
2.12.2.12.0.001. 2.07.06	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan	3	3	10	10	333	3	-	-
2.12.2.12.0.001. 2.08.01	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.12.0.001. 2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	75	75	75	100	80	80	100
2.12.2.12.0.001. 2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
2.12.2.12.0.001. 2.09.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan barang Milik daerah sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	50	50,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	17	17	100	17	9	53
2.12.2.12.0.001. 2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatandan mesin yang dipelihara	25	10	10	10	100	25	20	80,00
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100,00
	II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Dokumen Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.12.0.002. 2.01.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.12.0.002. 2.01.04	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1	1	1	1	100	1	-	-
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20	20	20	20	100	20	15	75,00

	III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.12.0.003.2.01.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Prosentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100					100		
2.12.2.12.0.003.2.01.02	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.	9000	9000	9000	9000	100	9000	5.000	55,56
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	1	1	1	1	100	1		-
	IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100		
2.12.2.12.0.004.2.01.01	Pengumpulan data Kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	Prosentase Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan data	100	100	100	100	100	100		
	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	1	1	1	1	100	1		
2.12.2.12.0.004.2.03.05	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Prosentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	100	100	100	100	100	100		
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1					1		
	V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.12.0.005.2.01.02	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	25	25	25	25	100	25	25	100,00

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024									
Perangkat Daerah Triwulan	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI : II (Dua)								
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi triwulan II		%	KETERANGAN TIDAK MEMENUHI TARGET, TELAH MEMENUHI TARGET DAN MELEBIHI TARGET
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Rp		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA LANGSUNG				6.625.426.983		3.872.645.274	58,45	MEMENUHI TARGET
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	%	100	6.116.923.883	150	3.535.886.274	57,80	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100	30.282.100	90,38	17.727.150	58,54	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	16.490.100	3	13.655.100	82,81	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	821.800	2	770.000	93,70	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	499.800	0		0	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	3	499.800	0		0,0	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	22	5.962.050	9	1.797.050	30,14	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	6.008.550	1	1.505.000	25,05	TIDAK MEMENUHI TARGET

2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	3.600.973.006	53	1.920.120.395	53,32	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	3.599.204.806	22	1.919.665.395	53,34	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	679.000	0	-	0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	526.750	1	455.000	86,38	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	562.450	0	-	0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	%	100	1.999.900	23	455.000	22,75	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	999.950	0	-	0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	999.950	1	455.000	45,50	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi kepegawalan sesuai standar	%	100	34.999.850	0	-	0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	53	34.999.850	0	-	0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	%	100	902.081.500	1	718.431.207	79,64	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	32.642.400	1	32.342.400	99,08	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	399.999.750	1	393.053.650	98,26	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	59.998.350	4	35.722.100	59,54	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	169.998.000	4	148.665.200	87,45	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.480.000	2	475.000	32,09	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	402	237.963.000	105	108.172.857	45,46	TIDAK MEMENUHI TARGET

2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	123.468.837		94.970.000	77	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	1	98.640.000	1	94.970.000	96,28	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	3	24.828.837			0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	%	100	1.078.376.760	31	547.019.242	50,73	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	800.000	1	800.000	100,00	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	285.133.460	7	143.481.317	50,32	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	792.443.300	1	402.737.925	50,82	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	344.741.930		237.163.280	68,79	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	200.000.000	17	101.274.900	50,64	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	24.891.930	20	16.718.500	67,16	MEMENUHI TARGET
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	119.850.000	1	119.169.880	99,43	MEMENUHI TARGET
2.12.02	II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	100	300.665.600	15	230.010.000	76,50	MEMENUHI TARGET
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, Cakupan Kepemilikan KTP, Cakupan Perakaman KTP, Cakupan Kepemilikan KIA, dan Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen	%	100	300.665.600	15	230.010.000	76,50	MEMENUHI TARGET
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	7.663.650			0,00	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	20	293.001.950	15	230.010.000	78,50	MEMENUHI TARGET

2.12.03	III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	72.265.500	9.001	42.925.000	59.3990217	MEMENUHI TARGET
2.12.03.2.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian.	%	100	72.265.500	9.000	39.870.000	55,17	MEMENUHI TARGET
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	9000	41.765.800	9000	39.870.000	95,46	MEMENUHI TARGET
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	Layanan	1	30.499.700	1	3.055.000	10,02	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.04	IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	126.722.000	3	54.974.000	43,38	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.04.2.01	Pengumpulan data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data	%	100	19.575.000	1	10.410.000	53,18	MEMENUHI TARGET
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	100	19.575.000	1	10.410.000	53,18	MEMENUHI TARGET
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	%	100	107.147.000	1	44.564.000	41,59	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.04.2.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	107.147.000	1	44.564.000	41,59	TIDAK MEMENUHI TARGET
2.12.05	V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	%	100	8.850.000	25	8.850.000	100,00	MEMENUHI TARGET
2.12.05.2.01	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	%	100	8.850.000	25	8.850.000	100,00	MEMENUHI TARGET
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	25	8.850.000	25	8.850.000	100,00	MEMENUHI TARGET
					6.625.426.983		3.872.645.274		

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II yaitu di targetkan hingga semester satu tahun 2024 sebesar 50%, namun dalam perjalanan anggaran ada yang tidak memenuhi target, yang memenuhi target dan melebihi target yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi Program/kegiatan yang *tidak memenuhi target pada triwulan 2* kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain:
 - a. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebesar 0 % dari dengan alasan tidak tercapainya karena akan digunakan pada penyusunan DPA Tahun Anggaran 2025 jadi digunakan sekita bulan Nopember 2024;
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebesar 0 % dengan alasan tidak tercapainya karena anggaran akan di realisasikan pada bulan Agustus;
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 30,14% dengan alasan tidak tercapainya karena digunakan pada bulan Juli;
 - d. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 25,05 dengan alasan anggaran ini di realisasikan pada bulan agustus dengan adanya penyusunan SPIP;
 - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 0 % dengan alasan anggaran ini akan di realisasikan pada bulan Desember;
 - f. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran sebesar 0 % dengan alasan anggaran ini akan direalisasikan pada bulan Juli;
 - g. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebesar 0% dengan alasan anggaran ini akan di realisasi kan pada bulan agustus;
 - h. Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 45,50% dengan alasan anggaran ini baru di gunakan untuk semester 1, akan di realisasikan Kembali pada akhir tahun di semester 2;
 - i. Subkegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar 0% dengan alasan subkegiatan ini belum digunakan karena akan dilakukan pergeseran pada perubahan anggaran;
 - j. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 32,09 % dengan alasan anggaran ini akan direalisasikan pada bulan September;

- k. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 45,46% dengan alasan anggaran ini akan banyak di realisasikan pada bulan Nopember;
 - l. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 0 % dengan alasan anggaran ini akan dilakukan pergeseran pada perubahan anggaran;
 - m. Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi sebesar 0% dengan alasan anggaran akan digunakan pada triwulan IV;
2. Realisasi Program/kegiatan yang *telah memenuhi target pada triwulan 2* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 82,81% sudah memenuhi target karena anggaran ini adalah anggaran yang di gunakan untuk penyusunan Renja;
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar 93,70% sudah memenuhi target karena di gunakan untuk penyusunan Perubahan RKA;
 - c. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 53,34% sudah memenuhi target;
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD sebesar 86,38%;
 - e. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 99,08;
 - f. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 98,26%;
 - g. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 59,54%;
 - h. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 87,45%;
 - i. Subkegiatan Pengadaan Mebel sebesar 96,28%
 - j. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 100%;
 - k. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 507%;
 - l. Subkegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 50,82%;
 - m. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 50,64%;
 - n. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar 67,16%;

- o. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya sebesar 99,43%;
- p. Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar 78,50%;
- q. Subkegiatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting sebesar 95,46%
- r. Subkegiatan Pengolahan dan Penyediaan data kependudukan sebesar 53,18%
- s. Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya sebesar 100%.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah diantaranya sebagai berikut:

- Di dalam pembelanjaan di harapkan PPTK dan bendahara memperhatikan anggaran kas yang telah disusun;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah												
kota Sukabumi												
No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK outcome	IKK output	Target Rencana Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
					(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	per maret (thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				81	82	83	91,43	93,48	91,43	91,43	
2	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan				100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan				100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga				100	100	100	99,86	99,86	100	100	
5	Cakupan Perekaman KTP-el		Perekaman KTP Elektronik		99,6	99,7	99,8		98,51	99,7	99,8	
6	Cakupan Kepemilikan KTP-el				100	100	100	99,44	98,65	100	100	
7	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		60	70	80	61,25	65,39	60	70	
8	Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen				100	100	100		-	100	100	
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		Kepemilikan Akta Kelahiran		100	100	100		98,20	100	100	
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian			Penerbitan Akta Kematian	100	100	100		100	100	100	
11	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan			Penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100		70,17	100	100	
12	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian			Penerbitan Akta Perceraian	100	100	100		100	100	100	

CAPALAH RPJMD KOTA SUKABUMI TAHUN 2024									
Perangkat Daerah:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi								
Trisulan:	II (Dua)								
TUJUAN	SASARAN				INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024 triw 1	KETERANGAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81%	93,48	
	1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1.1			Cakupan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Presentase			
			1.1.1.1		Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan		100%	100	
			1.1.1.2		Cakupan Profil Perimbangan Kependudukan		100%	100	
			1.1.1.3		Cakupan Dokumen Administrasi Kependudukan				
			1.1.1.1		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Presentase	100%	99,86	
			1.1.1.2		Cakupan Pendaftaran KTP-el	Presentase	99,6%	98,31	
					Cakupan Kepemilikan KTP-el		100%	98,65	
			1.1.1.3		Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Presentase	60%	63,39	
					Cakupan Laporan Pendahulu Non Permanen		100%	0,00	
			1.1.1.4		Cakupan dokumen Pencatatan Sipil				
			1.1.1.4.1		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	Presentase	100%	98,20	
			1.1.1.4.2		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Presentase	100%	100	
			1.1.1.4.3		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Presentase	100%	70,17	
			1.1.1.4.4		Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	Presentase	100%	100	
2. Tereguknya pemerintahan yang akuntabel	2.1 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.1.1			Produk SAKIP Dinas	Presentase	BB	BB	
					Nilai Selap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		77	77,31	
			2.1.2		Presentase keterlaksanaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Presentase	100%	100	

2.3 isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Isu isu yang di tuangkan dalam Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Isu isu yang di tuangkan dalam Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK

Bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu ukurannya adalah pelayanan publik harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap unit pelayanan publik harus dapat memvalidasi masyarakat yang dilayaninya tersebut tercatat sah secara administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Selain dari pada itu, validasi data kependudukan dimaksudkan juga untuk menghindari adanya perbuatan melanggar hukum dari masyarakat yang mengajukan pelayanan publik.

Pemanfaatan data kependudukan untuk proses validasi dilakukan dengan cara memadankan data kependudukan yang tersimpan dalam database Dukcapil Kemendagri dengan dokumen kependudukan yang dibawa oleh pemohon ke tempat pelayanan publik. Pemadanan data ini berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan;

2. Pemenuhan perjanjian Kerjasama.

2. Digitalisasi Administrasi Kependudukan

Saat ini pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah bertransformasi dari bentuk manual menjadi bentuk digital. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah berubah dengan diterapkannya tanda tangan elektronik berupa QRCode untuk setiap cetakan dalam bentuk kertas. Selain dalam bentuk cetakan, dokumen-dokumen tersebut juga dapat dimiliki oleh penduduk berupa file digital.

Kemudian untuk mengintegrasikan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara digital, Dukcapil Kemendagri sedang mengembangkan *super apps* dengan nama Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setiap penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD akan dapat memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk digital. Yang mana nanti penduduk tersebut dapat menggunakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pelayanan publik melalui mekanisme otentikasi yang telah ditentukan.

Namun demikian, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat yang multi kultural dari berbagai segmen untuk mendapatkan manfaat dari program digitalisasi administrasi kependudukan ini sehingga seluruh penduduk merasa lebih

mudah, lebih cepat dan lebih aman dalam memiliki dan menggunakan dokumen kependudukan yang dimilikinya.

Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk kota sukabumi (Jempol IKD)

3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Inovasi pelayanan di bidang administasi kependudukan adalah mutlak dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan dirasakan semakin cepat dan mudah oleh penduduk yang memerlukan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat dilaksanakan sampai ke pintu rumah setiap penduduk sehingga penduduk tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil ataupun titik-titik pelayanan reguler lainnya. Namun demikian, pelayanan yang cepat dan mudah tetap harus memenuhi pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Merpercepat penerbitan akte kematian melalui buku pokok pemakaman;
2. Inovasi meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan (GERCEP) Mobil Keliling (JEMPOL)

4. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 merupakan ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena akan diselenggarakan secara serentak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa penduduk yang memiliki hak pilih adalah penduduk yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia di sistem Dukcapil.

Beberapa hal yang menjadi target Disdukcapil untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 adalah :

- a. Pemenuhan kepemilikan KTP-el bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;

- b. Penerbitan akta kematian bagi seluruh penduduk yang meninggal agar pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 penduduk yang meninggal tersebut tidak lagi tercantum sebagai pemilih.
- c. Pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan untuk perubahan-perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
- d. Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Jemput Bola Pelayanan (JEMPOL)

Isu Strategis Disdukcapil yang tertuang dalam Renstra sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK Bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu ukurannya adalah pelayanan publik harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap unit pelayanan publik harus dapat memvalidasi masyarakat yang dilayaninya tersebut tercatat sah secara administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Selain dari pada itu, validasi data kependudukan dimaksudkan juga untuk menghindari adanya perbuatan melanggar hukum dari masyarakat yang mengajukan pelayanan publik. Pemanfaatan data kependudukan untuk proses validasi dilakukan dengan cara memadankan data kependudukan yang tersimpan dalam database Dukcapil Kemendagri dengan dokumen kependudukan yang dibawa oleh pemohon ke tempat pelayanan publik. Pemadanan data ini berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Digitalisasi Administrasi Kependudukan Saat ini pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah bertransformasi dari bentuk manual menjadi bentuk digital. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah berubah dengan diterapkannya tanda tangan elektronik berupa QRCode untuk setiap cetakan dalam bentuk kertas. Selain dalam bentuk cetakan, dokumen-dokumen tersebut juga dapat dimiliki oleh penduduk berupa file digital.

Kemudian untuk mengintegrasikan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara digital, Dukcapil Kemendagri sedang mengembangkan super apps dengan nama Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setiap penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD akan dapat

memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk digital. Yang mana nanti penduduk tersebut dapat menggunakan dokumen tersebut di tempat pelayanan publik melalui mekanisme otentikasi yang telah ditentukan. Namun demikian, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat yang multi kultural dari berbagai segmen untuk mendapatkan manfaat dari program digitalisasi administrasi kependudukan ini sehingga seluruh penduduk merasa lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman dalam memiliki dan menggunakan dokumen kependudukan yang dimilikinya.

3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Inovasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan adalah mutlak dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan dirasakan semakin cepat dan mudah oleh penduduk yang memerlukan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat dilaksanakan sampai ke pintu rumah setiap penduduk sehingga penduduk tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil ataupun titik-titik pelayanan reguler lainnya. Namun demikian, pelayanan yang cepat dan mudah tetap harus memenuhi pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
4. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 merupakan ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena akan diselenggarakan secara serentak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa penduduk yang memiliki hak pilih adalah penduduk yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia di sistem Dukcapil. Beberapa hal yang menjadi target Disdukcapil untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 adalah:
 - a. Pemenuhan kepemilikan KTP-el bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
 - b. Penerbitan akta kematian bagi seluruh penduduk yang meninggal agar pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 penduduk yang meninggal tersebut tidak lagi tercatat sebagai pemilih.
 - c. Pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan untuk perubahan-perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 - a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 - a. Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan;
 - b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 - a. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
 - b. Sosialisasi terkait pengelolalan informasi admnistrasi kependudukan.
4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mencerminkan Rencana Kegiatan, Program dan Sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai, target kinerja yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Program yang akan dilakukan dimasa mendatang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebanyak 5 (lima) Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Memiliki 7 kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memiliki 6 sub kegiatan yaitu:
 - a). Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah, anggaran Rp. 16.490.100,-;
 - b). Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD, anggaran Rp. 821.800,-;
 - c). Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD, anggaran Rp. 499.800,-;
 - d). Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD, anggaran Rp. 499.800,-;
 - e). Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran Rp. 5.962.050,-
 - f). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran Rp. 1.008.850,-;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki 4 subkegiatan yaitu:
 - a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran semula Rp. 3.599.204.806,- menjadi Rp.,,-;

- b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 679.000,-;
 - c). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, anggaran Rp. 526.750,-;
 - d). Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, Rp. 562.450,-;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki 2 subkegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 999.950,-;
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran Rp. 999.950,-.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, memiliki 1 subkegiatan yaitu:
- a). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 34.999.850,- menjadi Rp. 79.080.000,-
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki 6 subkegiatan Yaitu:
- a). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, anggaran sebesar semula Rp. 32.642.400,- menjadi Rp. 37.619.400,-
 - b). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 399.999.750,- menjadi Rp. 398.899.750,-
 - c). Penyediaan Bahan Logistik kantor, anggaran semula Rp. 56.766.440,- menjadi Rp. 60.852.350,-;
 - d). Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, anggaran ini semula sebesar Rp. 169.998.000,- menjadi Rp. 173.8650.550,-;
 - e). Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan, anggaran Rp. 1.480.000,-;
 - f). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sebesar semula Rp. 237.963.000,- menjadi Rp. 193.743.000,-
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- a). Pengadaan Mebel, anggaran ini sebesar Rp.98.640.000,- menjadi 98.850.000;

- b). Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, anggaran ini semula sebesar Rp. 24.828.837.000,- menjadi sebesar Rp. 13.000.000,-
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar semula Rp. 800.000,-
 - b). Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, anggaran ini semula sebesar Rp. 285.133.460,- ;
 - c). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran semula Rp. 792.443.300,-;
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas, atau kendaraan jabatan, anggaran Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 198.900.000,-
 - b). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, anggaran Rp. 24.891.930,- menjadi Rp. 29.161.930,-
 - b). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, anggaran Rp. 119.850.000,- . menjadi Rp. 169.830.000,-;
- 2. Program Pendaftaran Penduduk;
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a). Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan, anggaran Rp. 7.863.650,-
 - b). Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anggaran semula Rp. 293.001.950,- menjadi Rp. 343.001.550,-;
- 3. Program Pencatatan Sipil;
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a). Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, anggaran Rp. 41.765.800,-;
 - b). Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, anggaran Rp. 30.499.700,- menjadi Rp. 50.499.700;
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - a. Kegiatan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database kependudukan
 - a). Pengelolaan dan penyajian data kependudukan, anggaran Rp. 19.575.000,- menjadi Rp. 29.558.000;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

- a). Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi administrasi kependudukan, anggaran sebesar Rp. 107.147.000,-;
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lainnya, anggaran sebesar Rp. 8.850.000,-;

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENKA OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENUA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENUA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						6.442.070.680,00	6.551.177.073,00	6.775.394.546,00							22.000.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.442.070.680,00	6.551.177.073,00	6.775.394.546,00							22.000.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.442.070.680,00	6.551.177.073,00	6.775.394.546,00							22.000.000,00		
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.968.494.867,00	6.042.673.973,00	6.186.908.746,00							22.000.000,00		
	2	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	50.282.150,00	50.282.100,00	50.282.100,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen	16.490.150,00	16.490.100,00	16.490.100,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	621.800,00	621.800,00	621.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0,00 Dokumen	0,00 Dokumen	499.800,00	499.800,00	499.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	499.800,00	499.800,00	499.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

2	12	01	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	5.962.150,00	5.962.050,00	5.962.050,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	6.008.850,00	6.008.550,00	6.008.550,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun	-		-	5 buku		5.330.810.240,00	5.536.723.096,00	5.536.723.096,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.319.042.049,00	3.534.954.896,00	3.599.204.806,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	679.000,00	679.000,00	679.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	536.750,00	536.750,00	536.750,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	562.450,00	562.450,00	562.450,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	-		-	1 dokumen		2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.03	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	999.950,00	999.950,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	999.950,00	999.950,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				53 orang	55.000.000,00	54.999.850,00	54.999.850,00					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 Paket	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
2	12	01			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang	0 Orang	55.000.000,00	54.999.850,00	54.999.850,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			53 paket		592.038.500,00	592.081.500,00	592.081.500,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	2.558.500,00	32.642.400,00	37.619.400,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	400.000.000,00	389.999.750,00	388.899.750,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	60.000.000,00	59.998.350,00	60.852.350,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	170.000.000,00	169.998.000,00	178.860.550,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0 Dokumen	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	236.000.000,00	237.963.000,00	235.743.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perakatan dan Mesin	-				36 Unit	123.705.533,00	123.468.837,00	123.468.837,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0003 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	58.705.533,00	58.640.000,00	58.850.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0006 Pengadaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perakatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	24.828.837,00	13.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	Penyelesaian Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah TH, Satpam, dan Petugas Kebersihan				-	35 orang	1.209.660.035,00	1.078.376.760,00	1.078.376.760,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0001 Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002 Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	308.860.035,00	285.133.460,00	285.133.460,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004 Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	900.000.000,00	792.443.300,00	792.443.300,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor				-	1 Unit	375.000.000,00	344.741.590,00	344.741.590,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0001 Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	198.900.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006 Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	24.828.837,00	29.161.930,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	119.850.000,00	168.830.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								300.665.999,00	300.665.600,00	300.665.300,00							0,00	
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jemput Bola Pelayanan Penduduk					-	30 kali	300.665.999,00	300.665.600,00	300.665.600,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.02	0003	Pendaftaran Penduduk Non Pemanan dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Pemanan dan Rentan Administrasi Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	7.663.989,00	7.663.650,00	7.663.650,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0 Laporan	593.002.000,00	593.001.950,00	593.001.650,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL								72.266.070,00	72.265.500,00	62.265.500,00						0,00		
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penetapan Izatth Nikah dari Pengadilan Agama					-	20 pasangan	72.266.070,00	72.265.500,00	72.265.500,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.02	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen	0 Dokumen	41.766.070,00	41.765.800,00	41.765.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.03	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3000,00 Layanan	3000,00 Layanan	30.500.000,00	30.499.700,00	30.499.700,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	12	04		PROGRAM PENGELOAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								91.737.500,00	126.722.000,00	136.705.000,00						0,00		
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan					-	31 buku	19.587.000,00	19.575.000,00	19.575.000,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.02	0003	Pengalihan dan Penyejian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dialih dan Disajikan				0 Dokumen	0 Dokumen	19.587.000,00	19.575.000,00	19.558.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0004	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	3 laporan	107.147.000,00	107.147.000,00	107.147.000,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.04	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	107.147.000,00	107.147.000,00	107.147.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	12	05		PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								8.806.250,00	8.850.000,00	8.850.000,00						0,00		
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Data Kependudukan					-	25 buku	8.806.250,00	8.850.000,00	8.850.000,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	05	2.02	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	8.806.250,00	8.850.000,00	8.850.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
												JUMLAH	6.442.070.680,00	6.551.177.073,00	6.775.394.546,00						22.000,000	

Rencana Pagu Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 6.551.177.073,00 ,- menjadi Rp. 6.775.394.546,- bertambah sebesar Rp. 224.217.473,- dengan rincian Perubahan/Pergeseran sebagai berikut:

1. Di tambahkan Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membiayai Pakaian Dinas Batik Sukabumi;
2. Pada Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan yang semula sebesar Rp. 34.999.850,00,- dilakukan pergeseran anggaran, sehingga anggaran menjadi Rp. 79.080.000,00
3. Pada Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang semula sebesar Rp. 32.642.400,00,- dilakukan pergeseran anggaran sehingga menjadi sebesar Rp. 37.619.400,00;
4. Pada Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang semula anggaran sebesar Rp. 399.999.750,- dilakukan pergeseran anggaran untuk sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 398.899.750,-
5. Pada Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang semula anggaran sebesar Rp. 59.998.350,- dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp. sehingga menjadi sebesar Rp. 60.852.350,-
6. Pada Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang semula anggaran sebesar Rp. 169.998.000,00 dilakukan pergeseran anggaran sebesar sehingga menjadi sebesar Rp. 173.860.550,-
7. ada Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang semula anggaran sebesar Rp. 237.963.000,- dilakukan pergeseran anggaran sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 193.743.000,-;
8. Pada Subkegiatan Pengadaan Mebel yang semula anggaran sebesar Rp. 98.640.000,- dilakukan pergeseran anggaran sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 98.850.000,00
9. Pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang semula anggaran sebesar Rp. 24.828.837,- dilakukan pergeseran anggaran sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 13.000.000,-;
10. Pada Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang semula anggaran sebesar Rp. 119.850.000,- dilakukan sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 169.830.000,- ;
11. Pada Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang semula anggaran sebesar Rp. 293.001.950,00,- dilakukan perubahan anggaran sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 343.001.650,- ‘

12. Pada Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil yang semula anggaran sebesar Rp. 30.499.700,- dilakukan perubahan anggaran sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 50.499.700,-;
13. Pada Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang semula anggaran sebesar Rp. 19.575.000,- dilakukan perubahan anggaran sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 29.558.000,00,-.

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Perubahan RKPD Pemerintah Kota Sukabumi. Dengan mengacu pada Perubahan RKPD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian triwulan II Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2024 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah. Dengan demikian tingkat keberhasilan Perubahan Renja Tahun 2024 akan menentukan keberhasilan serta berkesinambungan pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renja Perubahan Tahun 2024 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ini sangat bergantung pada komitmen penyelenggara itu sendiri, Untuk itu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi,

perubahan anggaran ini diantaranya adalah untuk kegiatan Jemput Bola Pelayanan sebagai berikut:

1. Jempol Disabilitas;
2. Jempol Sekolah;
3. Jempol Pemukiman.

Untuk Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk diberikan tambahan anggaran yang akan di gunakan untuk pelayanan jemput bola, ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menjelang Pilkada Tahun 2024, perekaman wajib KTP yang diharapkan dapat direkam usia 16 tahun yang pada saatnya nanti di tahun 2024 berusia 17 Tahun sehingga pada tahun 2024 sudah memiliki KTP-el. Dan juga untuk masyarakat yang wajib KTP-el yang tidak bisa datang ke tempat pelayanan karena berkebutuhan khusus atau yang berusia lanjut, atau karena sakit dll, Tim Jempol akan datang untuk melakukan Perekaman Ktp-el.

Subkegiatan Untuk subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan tambahan anggaran perubahan sebesar Rp. 20.000.000 akan di gunakan untuk jemput bola pelayanan untuk mendaftarkan akta kematian.

Untuk Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan diberikan tambahan anggaran perubahan sebesar Rp. 10.000.000,- akan digunakan untuk pembuatan buku agregat.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelayanan administrasi kependudukan mulai bertransformasi dari sistem manual kesistem digital manfaat yang diharapkan adalah pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah dan lebih cepat.

Harus ada upaya yang kuat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar masyarakat dapat beradaptasi terhadap sistem pelayanan digital ini. Namun demikian, masyarakat yang tidak dapat di sentuh sistem digital harus tetap mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya.

Pelayanan administrasi kependudukan yang prima adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi agar masyarakat pemohon dokumen administrasi kependudukan merasakan kebahagiaan saat mendapat pelayanan dari

Dukcapil. Pelayanan prima ini dapat terlaksana apabila seluruh komponen dapat terpenuhi, mulai dari manajemen, sistem pelayanan ataupun sarana dan prasarana pelayanan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ini sangat bergantung pada komitmen penyelenggara itu sendiri. Sehingga dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, untuk kegiatan yang belum terealisasi pada tahun ini akan di rencanakan kembali pada tahun anggaran 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPPA-SKPD) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini semoga bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah.

N. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mesti dilakukan agar lebih mempermudah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, karena Perencanaan Kinerja digunakan untuk melihat masa depan dengan memaksimalkan kinerja yang akan datang, bukan menganalisis masa lalu.

Pada pelaksanaannya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) perlu disesuaikan guna menyikapi perubahan Pagu Anggaran baik Penyesuaian Penambahan Pagu Anggaran maupun Pergeseran Anggaran yang terjadi pada tahun berjalan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 149 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024, masih tetap terintegrasi dan merupakan bagian dari perwujudan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi tahun 2024-2026, yang diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung lingkup tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dalam urusan wajib non-pelayanan dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Di samping itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024 juga merupakan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan yang tentunya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi tahun 2024-2026.

Selanjutnya dalam kaitan dengan Sistem Keuangan Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sebagai penjabaran Renstra ke dalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi yang selanjutnya menjadi Dokumen Perubahan Program dan Anggaran (DPPA). Sedangkan program disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi perlu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, diantaranya Arah Kebijakan Program Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
 18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 149 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 150);
 19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
 20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan karena adanya pergeseran dan penambahan anggaran serta penyesuaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi triwulan II (semester I) Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA-PD adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan Perubahan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah agar subtransi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

Berisi tentang capaian anggaran maupun kinerja hingga triwulan I tahun 2024 beserta penjabarannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Semester 1) Tahun berkenaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi matrik renja sesuai SIPD, penjelasan mengenai point-point penting anggaran perubahan. Alasan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Semester 1) Tahun berkenaan.

Penyelenggaraan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi di Tahun 2024 secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan penetapan *time schedule* (penjadwalan) yang berpatokan pada anggaran kas, dimana penyelenggaraan kegiatan tentu didukung dengan ketersediaan dana yang tersedia.

Dapat disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang target kinerjanya dan Pagu Anggarannya belum tercapai, diantaranya sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan III.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan III.
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan III.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan IV (Akhir Tahun).
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan IV (Akhir Tahun).
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara umum berjalan sesuai rencana, namun adanya penyesuaian Anggaran dan output Indikator Kinerja yang akan disesuaikan di Anggaran Perubahan.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara umum berjalan sesuai rencana, namun adanya penyesuaian Anggaran dan output Indikator Kinerja yang akan disesuaikan di Anggaran Perubahan.
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, targetan indikator kinerja akan disesuaikan kembali di perubahan anggaran.
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, masih ada yang belum direalisasikan rencana dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.
17. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, masih ada yang belum direalisasikan rencana dilaksanakan pada Triwulan III. direalisasikan pada Triwulan III.
18. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, namun adanya penambahan dan penyesuaian output Indikator Kinerja yang akan disesuaikan di Anggaran Perubahan.
19. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan masih belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan III.
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas masih belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

21. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE masih ada yang belum direalisasikan, rencana dilaksanakan pada Triwulan III.
22. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral belum direalisasikan, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut rencana dilaksanakan pada Triwulan III.
23. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur secara umum berjalan sesuai rencana, namun adanya penyesuaian Anggaran dan output Indikator Kinerja yang akan disesuaikan di Anggaran Perubahan.

Dapat disampaikan gambaran umum pencapaian kinerja kegiatan dan keuangan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja (Renja) s/d Triwulan II
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.16.01.		Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	5.616.104.731	50,47	3.002.063.998
2.16.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	80	21.400.000	58,10	15.650.000
2.16.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	12.500.000	1	11.650.000
			Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD)	Kegiatan	1		1	
			Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi	Kegiatan	7		5	
2.16.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	1.300.000	1	1.300.000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		1	
2.16.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.400.000	0	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		0	
2.16.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.300.000	1	1.300.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		1	
2.16.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.300.000	0	
			Kegiatan Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		0	
2.16.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.400.000	1	1.400.000
			Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1		1	
2.16.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2.200.000	0	
			Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		0	
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	3.876.918.781	22,77	2.094.774.240
2.16.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	3.872.318.781	23	2.093.767.240
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	Orang/Bulan	322		184	
2.16.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.400.000	0	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1		0	
2.16.01.2.02.07.		koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	2.000.000	0	1.007.000
			Kegiatan Laporan Keuangan Pertriwulan	Laporan	4		1	
2.16.01.2.02.08.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.200.000	0	
			Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)	Laporan	1		0	
2.16.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	persen	80	320.572.950	41,12	186.149.034
2.16.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	11.332.000	3	5.945.000
			Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Buah	92		29	
2.16.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	30.854.450	3	22.505.250
			Penyediaan perlengkapan kantor	Jenis	29		16	
2.16.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	129	45.220.000	17	24.925.000
			Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Kegiatan	84		17	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Kegiatan	45		0	
			Jumlah Persediaan Minuman Ruangan	Bulan	12		6	
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	30.736.500	3	25.390.000
			Penyediaan Barang Cetak Kantor	Jenis	4		3	
			Cetak Spanduk Kegiatan	Meter	52		0	
2.16.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	13.240.000	6	2.320.000
			Belanja Surat Kabar	Bulan	12		6	
			Belanja Pemuatan Publikasi Kinerja	Kali	9		0	
2.16.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	189.190.000	6	105.063.784
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Undangan Luar Daerah	Kali	200		137	
			Koordinasi, undangan dan liputan Dalam Daerah	Kali	444		246	
2.16.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Persen	80	1.174.185.000	53,09	598.332.224
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000
			Penyediaan Material	Buah	100		100	
2.16.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	628.480.000	6	314.589.975
			Pembayaran Telepon Kantor	Bulan	12		6	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Pembayaran Listrik Kantor	Bulan	12		6	
			Pembayaran Hosting www.sukabumikota.go.id	Bulan	4		0	
			Pembayaran Pemuatan Publikasi Kinerja	Kali	48		47	
			Biaya Pemasangan Instalasi	Kali	1		0	
			Pembayaran Internet	Bulan	12		6	
2.16.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	178.800.000	6	89.800.000
			Pembayaran Jasa Petugas Penyalir	Bulan	12		6	
			Pembayaran Tenaga Kebersihan	Bulan	12		6	
			Pembayaran Admin Super, e-lapor	Bulan	12		6	
			Pembayaran Pengelola web server	Bulan	12		6	
			Pembayaran Pengelola Jaringan	Bulan	12		6	
2.16.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	365.905.000	7	192.942.249
			Pembayaran Tenaga Harian Lepas	Bulan	13		7	
			Pembayaran Jasa Premi Asuransi Lainnya	Bulan	12		6	
2.16.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	223.028.000	77,27	107.158.500
2.16.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	216	173.206.000	108	68.558.500

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 2 Diskominfo	Bulan	12		6	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 4 Diskominfo	Bulan	12		6	
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	28.640.000	24	17.420.000
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	33		24	
2.16.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.120.000	1	7.120.000
			Penyekatan Ruangan dan Perbaikan Atap Kantor	Bangunan Gedung	1		1	
2.16.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.062.000	1	14.060.000
			Pengecatan Gedung Kantor	Bangunan Gedung	1		1	
2.16.02.		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	Persen	90	481.674.250	29,19	335.244.750
2.16.02.2.01.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	Persen	90	481.674.250	29,19	335.244.750
2.16.02.2.01.02.		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	4	6.298.750	2	103.750
			Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	Dokumen	4		2	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Award Pengelolaan Pengaduan Lapor Super	Kegiatan	1		0	
2.16.02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	23.120.000	0	22.869.000
			Pengelolaan Konten Media Komunikasi Publik Pemerintah daerah (Dokumen)	Dokumen	1		0	
			Sosialisasi Pengelolaan Konten Untuk Admin Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi	Kegiatan	1		0	
2.16.02.2.01.06.		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	3	34.936.000	0	5.079.000
			Sosialisasi PPID	Kegiatan	2		0	
			Koordinasi PPID	Kali	9		0	
2.16.02.2.01.07.		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	312	351.331.000	202	281.322.000
			Layanan Jasa Pemberitaan dan Iklan di Media	Layanan	312		202	
			Hibah Berupa Uang	Lembaga	3		0	
2.16.02.2.01.08.		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	25.740.000	6	12.525.000
			Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12		6	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.16.02.2.01.12.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	6	40.248.500	4	13.346.000
			Kegiatan coffee Morning bersama media	Kali	4		0	
			Sosialisasi KIM	Kegiatan	1		1	
2.16.03.		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	Persen	93	373.239.000	79,17	359.449.000
2.16.03.2.01.		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sistem jaringan Pemerintah Daerah	Persen	93	299.239.000	100,00	298.039.000
2.16.03.2.01.03.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	18	299.239.000	18	298.039.000
			Fasilitasi peralatan penunjang command center	Unit	18		18	
2.16.03.2.02.		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	Persen	93	74.000.000	58,33	61.410.000
2.16.03.2.02.01.		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	27.000.000	1	25.410.000
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	Dokumen	1		1	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)					
2.16.03.2.02.06.		Koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	1	41.000.000	1	33.375.000
			Bintek Smart City Tahun 2024	Kegiatan	1		1	
			Rapat Smart City	Kegiatan	3		2	
			Sewa Boots Smart City	Kegiatan	1		0	
2.16.03.2.02.12.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	6.000.000	0	2.625.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (Dokumen)	Dokumen	1		0	
2.20.02.		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persen	60	29.658.000	27,02	12.850.000
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	Persen	60	29.658.000	27,02	12.850.000
2.20.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	10.500.000	1	9.450.000
			Rapat Pengumpulan dan Verval Data Statistik Sektoral	Kali	4		3	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Buku Data Statistik Sektoral Daerah 2024	Buku	18		18	
2.20.02.2.01.03.		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	16	11.500.000	0	155.000
			Rapat Evaluasi Metadata Kegiatan, Variabel dan Indikator	Kali	3		0	
			Buku Metadata Statistik Sektoral 2024	Buku	16		0	
2.20.02.2.01.05.		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	6.500.000	0	3.245.000
			Rapat Pengembangan Infrastruktur	Kali	9		2	
			Buku Panduan Website Geospasial	Buku	10		0	
2.20.02.2.01.06.		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik yang Dihimpun	Dokumen	1	1.158.000	0	
			Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Kali	1		0	
2.21.02.		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	60	125.041.450	96,43	108.485.890
2.21.02.2.01.		penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	106.267.050	92,86	89.711.490
2.21.02.2.01.02.		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.723.000	1	323.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Rapat Pendataan Sumber Daya Kemanan Informasi	Kegiatan	1		1	
2.21.02.2.01.04.		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1	104.544.050	1	89.388.490
			Pengembangan Aplikasi Simponi	Paket	1		1	
			Pembelian Software Pendukung Aplikasi Simponi	Kali	1		1	
			Belanja Modal Sarana Pendukung E-office	Unit	3		3	
			Sosialisasi dan Penilaian Aplikasi	Kegiatan	2		1	
2.21.02.2.02.		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah	Persen	60	18.774.400	100,00	18.774.400
2.21.02.2.02.01.		Oprasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Jaring Komunikasi Sandi yang terbangun yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	31	18.774.400	31	18.774.400
			Perpanjangan kerjasama sistem sertifikat elektronik pemerintah daerah kota sukabumi dengan bssn	Perangkat Daerah	31		31	
Jumlah						6.625.717.431	56,45	3.818.093.638

Pada tabel 2.1 tentang Evaluasi Renja s/d Triwulan II dapat terlihat capaian penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan informatika Kota Sukabumi dari total Pagu anggaran Sebesar Rp. 6.625.717.431 telah terserap sebesar Rp. 3.818.093.638 dengan persentasi 57.63%, secara perhitungan target penyerapan anggaran sudah melebihi 50%.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target dapat di lihat dalam tabel berikut :
Program/Kegiatan pada tahun 2024 triwulan II semua telah sesuai target.
2. Realisai Program/Kegiatan yang memenuhi target antara lain :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang memenuhi target

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.16.01.		Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	5.616.104.731	50,47	3.002.063.998
2.16.01.2.01.		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	80	21.400.000	58,10	15.650.000
2.16.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	12.500.000	1	11.650.000
			Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD)	Kegiatan	1		1	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi	Kegiatan	7		5	
2.16.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	1.300.000	1	1.300.000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		1	
2.16.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.300.000	1	1.300.000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		1	
2.16.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.400.000	1	1.400.000
			Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1		1	
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	3.876.918.781	22,77	2.094.774.240
2.16.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	3.872.318.781	23	2.093.767.240
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	Orang/Bulan	322		184	
2.16.01.2.02.07.		koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	2.000.000	0	1.007.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Laporan Keuangan Pertriwulan	Laporan	4		2	
2.16.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	persen	80	320.572.950	41,12	186.149.034
2.16.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	11.332.000	3	5.945.000
			Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Buah	92		29	
2.16.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	30.854.450	3	22.505.250
			Penyediaan perlengkapan kantor	Jenis	29		16	
2.16.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	129	45.220.000	17	24.925.000
			Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Kegiatan	84		17	
			Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Kegiatan	45		0	
			Jumlah Persediaan Minuman Ruangan	Bulan	12		6	
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	30.736.500	3	25.390.000
			Penyediaan Barang Cetak Kantor	Jenis	4		3	
			Cetak Spanduk Kegiatan	Meter	52		0	
2.16.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	13.240.000	6	2.320.000
			Belanja Surat Kabar	Bulan	12		6	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Belanja Pemuatan Publikasi Kinerja	Kali	9		0	
2.16.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	189.190.000	6	105.063.784
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Undangan Luar Daerah	Kali	200		137	
			Koordinasi, undangan dan liputan Dalam Daerah	Kali	444		246	
2.16.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jaa penunjang sesuai kebutuhan	Persen	80	1.174.185.000	53,09	598.332.224
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000
			Penyediaan Materi	Buah	100		100	
2.16.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	628.480.000	6	314.589.975
			Pembayaran Telepon Kantor	Bulan	12		6	
			Pembayaran Listrik Kantor	Bulan	12		6	
			Pembayaran Hosting www.sukabumikota.go.id	Bulan	4		0	
			Pembayaran Pemuatan Publikasi Kinerja	Kali	48		47	
			Biaya Pemasangan Instalasi	Kali	1		0	
			Pembayaran Internet	Bulan	12		6	
2.16.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	178.800.000	6	89.800.000
			Pembayaran Jasa Petugas Penyi	Bulan	12		6	
			Pembayaran Tenaga Kebersihan	Bulan	12		6	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Pembayaran Admin Super, e-lapor	Bulan	12		6	
			Pembayaran Pengelola web server	Bulan	12		6	
			Pembayaran Pengelola Jaringan	Bulan	12		6	
2.16.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	365.905.000	7	192.942.249
			Pembayaran Tenaga Harian Lepas	Bulan	13		7	
			Pembayaran Jasa Premi Asuransi Lainnya	Bulan	12		6	
2.16.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	223.028.000	77,27	107.158.500
2.16.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	216	173.206.000	108	68.558.500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 2 Diskominfo	Bulan	12		6	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 4 Diskominfo	Bulan	12		6	
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	28.640.000	24	17.420.000
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	33		24	
2.16.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.120.000	1	7.120.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Penyekatan Ruang dan Perbaikan Atap Kantor	Bangunan Gedung	1		1	
2.16.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.062.000	1	14.060.000
			Pengecetan Gedung Kantor	Bangunan Gedung	1		1	
2.16.02.		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	Persen	90	481.674.250	29,19	335.244.750
2.16.02.2.01.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	Persen	90	481.674.250	29,19	335.244.750
2.16.02.2.01.02.		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	4	6.298.750	2	103.750
			Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	Dokumen	4		2	
			Kegiatan Award Pengelolaan Pengaduan Lapor Super	Kegiatan	1		0	
2.16.02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	23.120.000	1	22.869.000
			Pengelolaan Konten Media Komunikasi Publik Pemerintah daerah (Dokumen)	Dokumen	1		1	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Sosialisasi Pengelolaan Konten Untuk Admin Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi	Kegiatan	1		1	
2.16.02.2.01.06.		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	3	34.936.000	1	5.079.000
			Sosialisasi PPID	Kegiatan	2		0	
			Koordinasi PPID	Kali	9		0	
2.16.02.2.01.07.		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	312	351.331.000	202	281.322.000
			Layanan Jasa Pemberitaan dan Iklan di Media	Layanan	312		202	
			Hibah Berupa Uang	Lembaga	3		0	
2.16.02.2.01.08.		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	25.740.000	6	12.525.000
			Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12		6	
2.16.02.2.01.12.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	6	40.248.500	4	13.346.000
			Kegiatan coffee Morning bersama media	Kali	4		0	
			Sosialisasi KIM	Kegiatan	1		1	
2.16.03.		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	Persen	93	373.239.000	79,17	359.449.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.16.03.2.01.		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sistem jaringan Pemerintah Daerah	Persen	93	299.239.000	100,00	298.039.000
2.16.03.2.01.03.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	18	299.239.000	18	298.039.000
			Fasilitasi peralatan penunjang command center	Unit	18		18	
2.16.03.2.02.		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	Persen	93	74.000.000	58,33	61.410.000
2.16.03.2.02.01.		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	27.000.000	1	25.410.000
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1		1	
2.16.03.2.02.06.		Koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	1	41.000.000	1	33.375.000
			Bintek Smart City Tahun 2024	Kegiatan	1		1	
			Rapat Smart City	Kegiatan	3		2	
			Sewa Boots Smart City	Kegiatan	1		0	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.20.02.		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persen	60	29.658.000	27,02	12.850.000
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	Persen	60	29.658.000	27,02	12.850.000
2.20.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	10.500.000	1	9.450.000
			Rapat Pengumpulan dan Verval Data Statistik Sektoral	Kali	4		3	
			Buku Data Statistik Sektoral Daerah 2024	Buku	18		18	
2.20.02.2.01.05.		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	6.500.000	0	3.245.000
			Rapat Pengembangan Infrastruktur	Kali	9		2	
			Buku Panduan Website Geospasial	Buku	10		0	
2.21.02.		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	60	125.041.450	96,43	108.485.890
2.21.02.2.01.		penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	106.267.050	92,86	89.711.490
2.21.02.2.01.02.		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.723.000	1	323.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
		Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			Rapat Pendataan Sumber Daya Kemanan Informasi	Kegiatan	1		1	
2.21.02.2.01.04.		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1	104.544.050	1	89.388.490
			Pengembangan Aplikasi Simponi	Paket	1		1	
			Pembelian Software Pendukung Aplikasi Simponi	Kali	1		1	
			Belanja Modal Sarana Pendukung E-office	Unit	3		3	
			Sosialisasi dan Penilaian Aplikasi	Kegiatan	2		1	
2.21.02.2.02.		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah	Persen	60	18.774.400	100,00	18.774.400
2.21.02.2.02.01.		Opresinalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Jaring Komunikasi Sandi yang terbangun yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	31	18.774.400	31	18.774.400
			Perpanjangan kerjasama sistem sertifikat elektronik pemerintah darrah kota sukabumi dengan bssn	Perangkat Daerah	31		31	
Jumlah						6.625.717.431	56,45	3.818.093.638

Berdasarkan uraian tabel Program/Kegiatan yang memenuhi target diatas dapat di lihat bahwa pencapaian target kinerja pada umumnya sudah tercapai yang terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

3. Program/Kegiatan yang belum terlaksana antara lain :

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang belum terlaksana

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.16.01.		Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	5.616.104.731	50,47	3.002.063.998
2.16.01.2.01.		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	80	21.400.000	58,10	15.650.000
2.16.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.400.000	0	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		0	
2.16.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.300.000	0	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo	Dokumen	1		0	
2.16.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2.200.000	0	
			Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		0	
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	3.876.918.781	22,77	2.094.774.240
2.16.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.400.000	0	
			Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1		0	
2.16.01.2.02.07.		koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	2.000.000	0	1.007.000
			Kegiatan Laporan Keuangan Pertriwulan	Laporan	4		1	
2.16.01.2.02.08.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.200.000	0	

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
			Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)	Laporan	1		0	
2.16.02.		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	Persen	90	481.674.250	29,19	335.244.750
2.16.02.2.01.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	Persen	90	481.674.250	29,19	335.244.750
2.16.02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	23.120.000	0	22.869.000
			Pengelolaan Konten Media Komunikasi Publik Pemerintah daerah (Dokumen)	Dokumen	1		0	
			Sosialisasi Pengelolaan Konten Untuk Admin Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi	Kegiatan	1		0	
2.16.02.2.01.06.		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	3	34.936.000	0	5.079.000
			Sosialisasi PPID	Kegiatan	2		0	
			Koordinasi PPID	Kali	9		0	
2.16.03.		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	Persen	93	373.239.000	79,17	359.449.000
2.16.03.2.02.		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	Persen	93	74.000.000	58,33	61.410.000

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II	
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	14
2.16.03.2.02.12.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	6.000.000	0	2.625.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (Dokumen)	Dokumen	1		0	
2.20.02.		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persen	60	29.658.000	27,02	12.850.000
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	Persen	60	29.658.000	27,02	12.850.000
2.20.02.2.01.03.		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	16	11.500.000	0	155.000
			Rapat Evaluasi Metadata Kegiatan, Variabel dan Indikator	Kali	3		0	
			Buku Metadata Statistik Sektoral 2024	Buku	16		0	
2.20.02.2.01.05.		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	6.500.000	0	3.245.000
			Rapat Pengembangan Infrastruktur	Kali	9		2	
			Buku Panduan Website Geospasial	Buku	10		0	
2.20.02.2.01.06.		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik yang Dihimpun	Dokumen	1	1.158.000	0	
			Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Kali	1		0	

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat di lihat bahwa terdapat 12 sub kegiatan belum terlaksana, penyebab belum terlaksananya kegiatan tersebut di karenakan pelaksanaan kegiatannya akan di laksanakan di triwulan ke III tahun anggaran 2024, maka dari itu kegiatan di atas tabel tersebut belum dapat di laksanakan.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Sukabumi

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika									
2.16.01.	Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	80%	80%	100%	100%	80%	50,47%	63,09%
2.16.01.2.01.	Perencanaan,Penganggaran,dan,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	80%	80%	100%	100%	80%	58,10%	72,62%
2.16.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Renstra Tahun 2024 - 2026	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Renstra	1 Buku	1 Buku						

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat tahun 2023	Realisasi renja perangkat tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD)	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi						7 Kegiatan	5 Kegiatan	71,43%
2.16.01.2.01.02.	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfo						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.03.	koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	0	0,00
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfo						1 Dokumen	0	0,00
2.16.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.05.	koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	0	0,00
		Kegiatan Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo						1 Dokumen	0	0,00
2.16.01.2.01.06.	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Bahan LPPD Dinas	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%			
		Jumlah Dokumen LKJIP	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100%
		Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi SPIP OPD	1 Buku	0	1 Buku	1 Buku	100%	1 Laporan	0	0,00
		Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Dokumen	0	0,00
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	80%	80%	100%	100%	80%	22,77%	28,46%
2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang/Bulan	22 Orang /bulan	100%	23 Orang/bulan	23 Orang/Bulan	100%
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Buku	100%	322 Orang/Bulan	184 Orang/Bulan	57,14%
2.16.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Laporan	0	0,00
		Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)						1 Laporan	0	0,00

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.02.07.	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Laporan	0	0,00
		Kegiatan Laporan Keuangan Pertriwulan						4 Laporan	1 Laporan	25%
2.16.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	0	0,00
		Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)						1 Laporan	0	0,00
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	80%	80%	80%	100%	100%	80%	41,12%	51,40%
2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	5 Paket	3 Paket	60%
		Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor						92 Buah	29 Buah	31,52%
2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Jenis	38 Jenis	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	3 Paket	60%
		Penyediaan perlengkapan kantor	12 Jenis	12 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	29 Jenis	16 Jenis	55,17%
2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	100%	129 Paket	17 Paket	13,18%
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1039 Dus	780 Dus	1153 Porsi	1153 Porsi	100%	84 Kegiatan	17 Paket	20,24%
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30 Dus	30 Dus	72 Porsi	72 Porsi	100%	45 Kegiatan	0	0,00
		Jumlah Persediaan Minuman Ruangan	241 Galon	241 Galon	240 Galon	240 Galon	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2.16.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Jenis	14 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%	5 Paket	3 Paket	60%
		Penyediaan Barang Cetak Kantor						4 Jenis	3 Paket	75%
		Cetak Spanduk Kegiatan						52 Meter	0	0,00

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Bulan	6 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Paket	50%
		Belanja Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	6 Paket	50%
		Belanja Pemuatan Publikasi Kinerja						9 Kali	0	0,00
2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	6 Paket	50%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Undangan Luar Daerah	162 Kali	329 Kali	230 Kali	230 Kali	100%	200 Kali	137 Kali	68,50%
		Koordinasi, undangan dan liputan Dalam Daerah	93 kali	93 Kali	267 Kali	267 Kali	100%	444 KALI	246 Kali	55,41%
		Jasa Konsultasi	3 Kali	3 Kali						
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	80%						
2.16.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Plastik	2 Buah	2 Buah						
		Jumlah Kursi Rapat	1 Buah	1 Buah						
2.16.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Keyboard PC	6 Buah	6 Buah						
		Jumlah Mouse Wirelles	7 Buah	7 Buah						
		Jumlah Laptop	1 Unit	1 Unit						
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	80%	80%	100%	100%	80%	53,09%	66,36%
2.16.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Kali	1 Kali	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Penyediaan Materi	60 Lembar	60 Lembar	50 Buah	50 Buah	100%	100 Buah	100 Buah	100%
2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			5 Laporan	5 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
		Pembayaran Telepon Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Hosting www.sukabumikota.go.id	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	100%	4 Bulan	0	0,00

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembayaran Pemuatan Publikasi Kinerja	48 Pertayang	48 Pertayang	100,00%	176 Tayang	100%	48 Kali	47 Kali	97,92%
		Biaya Pemasangan Instalasi						1 Kali	0	0,00
		Pembayaran Internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2.16.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
		Pembayaran Jasa Petugas Penyiar			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Tenaga Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Admin Super, e-lapor			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Pengelola web server			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Pengelola Jaringan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	100%	13 Laporan	7 Laporan	53,85%
		Pembayaran Tenaga Harian Lepas	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	100%	13 Bulan	7 Laporan	53,85%
		Pembayaran Jasa Premi Asuransi Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Pembayaran Asuransi Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan						
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	80%	80%	100%	100%	80%	77,27%	96,59%
2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	216 Unit	108 Unit	50%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 2 Diskominfo	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 4 Diskominfo	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2.16.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	33 Unit	24 Unit	72,73%
		Pemeliharaan Peralatan Kantor						33 Unit	24 Unit	72,73%
2.16.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyekatan Ruangan dan Perbaikan Atap Kantor						1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	100%
2.16.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sasaran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100,00	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengecetan Gedung Kantor						1 Bangunan Gedung	1 Unit	100%
2.16.02.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	90%	90%	90%	90%	100%	90%	29,19%	32,43%
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	90%	90%	90%	90%	100%	90%	29,19%	32,43%
2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Teknis	1 Kali	1 Kali						
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Pengelola Pengaduan	18 Buku	18 Buku						
		Evaluasi Pengelolaan Pengaduan LAPOR dan SUPER	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Pembayaran Honorarium Admin SUPER dan LAPOR	12 Bulan	12 Bulan						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
		Laporan Pengelolaan Pengaduan			10 Buku	10 Buku	100%			
		Rapat Evaluasi			6 Kali	6 Kali	100%			
		Sosialisasi Aplikasi Pengaduan Kota Sukabumi Pada Masyarakat			12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)						4 Dokumen	2 Dokumen	50%
		Kegiatan Award Pengelolaan Pengaduan Lapor Super						1 Kegiatan	0	0,00
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Koordinasi dengan Admin Medsos Seluruh SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kali	1 Kali	100%			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhinya Alat Penunjang Peliputan	4 Unit	4 Unit						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			4 Buku	4 Buku	100%	1 Dokumen	0	0,00
		Pengelolaan Konten Media Komunikasi Publik Pemerintah daerah (Dokumen)						1 Dokumen	0	0,00
		Sosialisasi Pengelolaan Konten Untuk Admin Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi						1 Kegiatan	0	0,00
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pembayaran Jasa Tenaga Penyiar Swara Perintis	12 Bulan	12 Bulan						
		Pembayaran IPP	1 Kali	1 Kali						
		Pembayaran ISR	1 Kali	1 Kali						
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Laporan PPID	4 Buku	4 Buku						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0,00
		Sosialisasi Kepada PPID Pembantu Perangkat Daerah			1 Kali	1 Kali	100%	2 Kegiatan	0	0,00
		Koordinasi PPID						9 Kali	0	0,00
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jasa Kerjasama Pemberitaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Kerjasama dengan Media Lokal dan Regional (Cetak dan Online)	5 Media	10 Media	10 Media	10 Media	100%			
		Pemberian Hibah Berupa Uang	2 Lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	3 Lembaga	0	0,00
		Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang	1 Lembaga	1 Lembaga						
		Jumlah Layanan Hubungan Media			2 Layanan	2 Layanan	100%	312 Layanan	202 Layanan	64,74%
		Layanan Jasa Pemberitaan dan Iklan di Media						312 Layanan	202 Layanan	64,74%
2.16.02.2.01.08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	10 Buku	10 Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
		Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						12 Dokumen	6 Dokumen	50%

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Kelompok Kepentingan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.09.	Manajemen Komunikasi Krisis	Rapat pembahasan penyelesaian sengketa	1 Kali	1 Kali						
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rapat koordinasi dengan penegelola media komunikasi perangkat daerah	4 Kegiatan	6 Kegiatan						
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			30 Orang	30 Orang	100%			
		Rekor pengelola medsos SKPD			3 Kali	3 Kali	100%			
2.16.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Laporan kegiatan tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Laporan Kegiatan	1 Buku	1 Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Rapat Koordinasi Pembentukan KIM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kali	1 Kali	100%			
		Terbentuknya kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	1 Kelompok	3 Kelompok	1 Kelompok	4 Kelompok	100%			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarkat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan						6 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
		Kegiatan coffee Morning bersama media						4 Kali	0	0,00
		Sosialisasi KIM						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	90%	90%	90%	100%	100%	93%	79,17%	85,13%
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerntah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	90%	90%	90%	100%	100%	93%	100%	100%
2.16.03.2.01.01.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rapat Pendataan Domain SKPD	2 Kali	2 Kali						

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			1 Domain	1 Domain	100%			
2.16.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Sinkronisasi Nama Domain dan Sub Domain OPD	1 Kali	1 Kali						
		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pembelian Sarana Prasarana Jaringan Internet	1 Paket	1 Paket						
		Pembelian Alat Studio untuk Zoom Meet	2 Unit	2 Unit						
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1 Unit	1 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	100%
		Fasilitasi peralatan penunjang command center						18 Unit	18 Unit	100%
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	90%	90%	80%	100%	100%	93%	0,58%	62,72%
2.16.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Penetalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/ Kab	1 Kali	1 Kali						
		Jumlah Dokumen Hasil Penetalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rapat Pendataan Data Hosting SKPD	2 Kali	2 Kali						
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelola			1 Unit	1 Unit	100%			
2.16.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Kali	1 Kali						
2.16.03.2.02.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Kali	2 Kali						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Kali	1 Kali						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
		Bintek Smart City Tahun 2024						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Rapat Smart City						3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67%
		Sewa Boots Smart City						1 Kegiatan	0	0,00
2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembayaran Tenaga Ahli Pengelola Jaringan	12 Bulan	12 Bulan						
		Pembayaran Tenaga Ahli Pengelola Web Server	12 Bulan	12 Bulan						
		Pengembangan Aplikasi SUPER	1 Paket	1 Paket						
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Kali	1 Kali						

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100%			
2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rapat Koordinasi smart city	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	1 Kali	1 Kali						
2.16.03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rapat Koordinasi Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Kali	1 Kali						
2.16.03.2.02.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE						1 Dokumen	0	0,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (Dokumen)						1 Dokumen	0	0,00
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Termanfaatkannya Data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah	60%	60%	60%	100%	100%	60%	27,02%	45,03%
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Termanfaatkannya Data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah	60%	60%	60%	100%	100%	60%	27,07%	45,03%
2.20.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul	20 Dokumen	20 Dokumen						
		Jumlah data statistik sektoral yang terolah dan teranalisis	20 Dokumen	20 Dokumen						
		Jumlah diseminasi data statistik sektoral	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi data statistik sektoral	5 Kali	5 Kali						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1.17 Buku/copy	1.17 Buku/copy	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Rapat Pengumpulan dan Verval Data Statistik Sektoral						4 Kali	3 Kali	75%
		Buku Data Statistik Sektoral Daerah 2024						18 Buku	18 Buku	100%
2.20.02.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Bimbingan Teknis yang terselenggara	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Jumlah kelompok produsen data yang terbentuk	20 Unit Kerja	20 Unit Kerja						
2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Mekanisme Penghimpunan Metadata Statistik terkait Kegiatan, Indikator dan Variabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1.14 Buku/copy	1.14 Buku/copy	100%			
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun						16 Dokumen	0	0,00
		Rapat Evaluasi Metadata Kegiatan, Variabel dan Indikator						3 Kali	0	0,00
		Buku Metadata Statistik Sektoral 2024						16 Buku	0	0,00
2.20.02.2.01.04.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Regulasi Tata Kelola Statistik Sektoral (Perda dan Perwal)	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah rapat Koordinasi pembahasan perda dan perwal	5 Kali	5 Kali						
2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah portal/open data statistik daerah Pemerintah Kota Sukabumi yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi						

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laptop	1 Unit	1 Unit						
		Jumlah Buku Panduan Admin Open Data			20 Buku	20 Buku	100%			
		Rapat penambahan dan revisi konten pada Website open data			3 Kali	3 Kali	100%			
		Rapat Pertemuan Tim IT			4 Kali	4 Kali	100%			
		Rapat Tim Teknis Admin Open Data			2 Kali	2 Kali	100%			
		Jumlah Infrastruktur Statistik						1 Unit	0	0,00
		Rapat Pengembangan Infrastruktur						9 Kali	2 Kali	22,22%
		Buku Panduan Website Geospasial						10 Buku	0	0,00
2.20.02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah rapat koordinasi terkait otorisasi statistik sektoral	1 Kali	1 Kali						
		Jumlah Data Statistik yang Dihimpun						1 Dokumen	0	0,00
		Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral						1 Kali	0	0,00
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	60%	60%	60%	100%	100%	60%	96,42%	100%
2.21.02.2.01.	penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	60%	60%	60%	100%	100%	60%	92,86%	100%
2.21.02.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi Tata Kelola Persandian keamanan informasi dan jaring komunikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rapat Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan						3 Kali	3 Kali	100%
2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana peningkatan keamanan yang terpantau	30 Unit Kerja	30 Unit Kerja						
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Kali	1 Kali	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Rapat Pendataan Sumber Daya Kemanan Informasi						1 Kegiatan	1 Laporan	100%
2.21.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Inventarisasi unit kerja yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi email Sanapati	60%	60%						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Kali	1 Kali	100%			
		Jumlah Unit Kerja yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi email Sanapati			31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%			
2.21.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan sistem informasi yang terinventarisir	60 Layanan	60 Layanan	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%			
		Jumlah layanan sistem informasi yang terpelihara	11 Unit	11 Unit						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah) renstra tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rapat Penyediaan Layanan Keamanan Informasi			5 Kali	5 Kali	100%			
		Pengembangan Aplikasi Simponi						1 Paket	1 Paket	100%
		Pembelian Software Pendukung Aplikasi Simponi						1 Kali	1 Kali	100%
		Belanja Modal Sarana Pendukung E-office						3 Unit	3 Unit	100%
		Sosialisasi dan Penilaian Aplikasi						2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	60%	60%	60%	100%	100%	60%	100%	100%
2.21.02.2.02.01.	Oprasinalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi yang terbangun	30 Unit Kerja	30 Unit Kerja						
		Jumlah Tanda Tangan Sertifikat Elektronik yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Jaring Komunikasi Sandi yang terbangun yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			31 Perangkat Daerah	31 Perangkat daerah	100%			
		Jumlah Tanda Tangan Sertifikat Elektronik yang terfasilitasi			15000 Orang	1500 Orang	100%			
		Perpanjangan kerjasama sistem sertifikat elektronik pemerintah daerah kota sukabumi dengan bssn						31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%

Sumber : Diolah oleh Diskominfo

Tabel TC. 29 menjelaskan tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022 dan 2023, serta tahun 2024 yang sedang berjalan. Terdapat beberapa perubahan indikator kinerja, target

indikator kinerja setiap tahunnya sesuai dengan arah dan kebijakan yang ada. Disamping itu ada juga beberapa sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ada beberapa sub kegiatan yang berubah sehingga tidak ada target dan realisasi yang tidak ada. Namun demikian, meskipun dengan keterbatasan anggaran tingkat realisasi kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selalu mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Pasal 35 huruf b pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah, dan yang spesifik lagi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, mempunyai tugas “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika”.

Dapat disampaikan bahwa pencapaian kinerja Pelayanan yang telah diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	Angka	2,4	2,5	3,00	3,01	0	2,98	3,00	3,01	
2	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-	-	Persen	75	80	-	-	100	75	-	-	
3	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	Persen	35	35	40	50	74,19	35	40	50	
4	Indeks keamanan informasi daerah	-	-	Persen	20	21	20	25	63,41	30	20	25	
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Indeks	55	65	-	-	75	90,96	-	-	
6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	-	-	kelompok	1	3	-	-	3	4	-	-	
7	Persentase tindakan lanjut pengaduan	-	-	Persen	94	96	-	-	100	100	-	-	
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi - 1326 - ndica, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah kab/kota	-	-	Persen	62	64	65	65	65	65	65	65	
9	Nilai SAKIP Dinas	-	-	Persen	70	70	72	74	71,96	72,11	72	74	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16
10	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien	-	-	Persen	70	70	-	-	70	70	-	-	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	Indeks	85	85	-	-	86,025	88,01	-	-	
12	Persentase OPD yang terhubung dgn akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	-	-	Persen	35	35	40	50	9,68	35	40	50	
13	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan evaluasi pembangunan daerah	-	-	Persen	50	50	55	60	55	51	55	60	
14	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi PD	-	-	Persen	50	50	55	60	55	51	55	60	
15	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	-	-	Persen	-	-	60	70	-	-	60	70	

Sumber : Diolah oleh DiskominfoTabel

Tabel TC. 30 menjelaskan tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022, 2023, 2024 dan proyeksi tahun 2025. Terdapat 15 indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dijelaskan juga realisasi dan proyeksi indicator kinerja berdasarkan tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Target indikator kinerja ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan arah dan kebijakan yang ada. Meskipun dengan keterbatasan anggaran tingkat realisasi indicator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selalu mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan.

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Dinas Kominfo menjadi *back-bone* penyebaran informasi dan terus berupaya melakukan *counter-attack* terhadap sebaran informasi hoax yang semakin merebak. Disamping itu, fasilitasi pelayanan internet dan infrastruktur penyediaan jaringan terus dioptimalisasikan dengan meningkatnya permintaan dari beberapa dinas/instansi.

Dinas kominfo telah menyediakan program magang bagi mahasiswa/siswa jurusan IT dan praktek kerja perguruan tinggi. Disamping itu juga dirintis kerjasama dengan pihak swasta yang kredibel dan memiliki pengalaman tinggi dibidang IT.

Namun dari beberapa kelebihan yang dimiliki ada juga kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kominfo diantaranya yaitu minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (tingkat literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT sehingga tidak banyak mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government. Selain itu perlu kiranya memberikan tambahan dukungan logistik kepada para petugas lapangan yang selalu siaga di lokasi pra maupun pasca kegiatan.

Dinas dalam memberikan pelayanan belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat, walaupun upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sudah dilakukan, namun peningkatan pelayanan sebagaimana diharapkan masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal dan disesuaikan dengan kemampuan jajaran satuan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Belum tersedianya data center
2. Masih terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
3. Belum optimalnya pengelolaan, penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral

4. Tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/perangkat daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah
5. Belum optimalnya pengamanan informasi
6. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam menangani peredaran berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*hoax*) yang berperan di ranah komunikasi dan informatika.

Permasalahan tersebut yang dapat diidentifikasi terkait dengan kinerja pelayanan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika. Kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi suatu keharusan karena akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang adil yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak secara sinergis dalam mengembangkan arus informasi yang lebih baik.

Secara kelembagaan, Dinas Kominfo idealnya mendapatkan porsi yang besar dari segi anggaran, mengingat teknologi industri 4.0 telah digaungkan oleh Pemerintah Pusat yang harus diantisipasi oleh daerah, disamping perkembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika baik di masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah, mendorong agar setiap lembaga khususnya pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar menyesuaikan dengan kondisi yang berubah dengan cepat.

Dalam urusan statistik dan persandian, kearah digital, perangkat infrastruktur dalam rangka pengamanan persandian dan penyediaan data statis Teknologi Komunikasi dan Informatika sectoral yang terintegrasi harus tersedia dengan paradigma pengelolaan data secara digital, yaitu pengelolaan data melalui sistem informasi yang membutuhkan sarana dan prasarana serta infrastruktur, baik hardware, software, instalansi jaringan, dan lainnya harus sudah terinventarisir disertai anggaran yang memadai.

Berdasarkan Perubahan Target Indikator Kinerja dan penyesuaian Pagu Anggaran baik itu Penambahan Pagu Anggaran maupun Pergeseran Anggaran yang mengharuskan adanya penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, dapat disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Indikator Kinerja

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah 5 jenis alat tulis kantor ada volume penambahan setiap jenis nya dan jumlah perjalanan dinas dalam kota bertambah sebelumnya 20 HOK menjadi 36 HOK menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut:

- Jumlah 7 jenis alat tulis kantor ada volume penambahan setiap jenis nya dan bertambahnya makan dan minum sebelumnya 20 porsi menjadi 51 porsi menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah makan dan minum rapat sebelumnya 32 porsi menjadi 52 porsi menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.

1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut:

- Jumlah Belanja Bahan-bahan lainnya terdapat 2 jenis yang bertambah volumenya menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.
- Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor terdapat 5 jenis yang bertambah volumenya menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.
- Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer terdapat 1 jenis yang bertambah sebelumnya 57 buah menjadi 72 buah menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.
- Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya terdapat 4 jenis yang bertambah sebelumnya menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.

1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut:

- Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang sebelumnya 924 Porsi menjadi 1155 Porsi menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.

1.6 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut:

- Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor sebelumnya tidak ada bertambah menjadi 5 buku menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir.

- Jumlah cetak spanduk sebelumnya 52 M2 berkurang menjadi 25 M2.

1.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan untuk rincian Pemuatan Publikasi Kinerja Media Cetak dan Online Lokal menjadi tidak disediakan.

1.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Pejabat Eselon II sebelumnya 8 orang/hari menjadi 10 orang/hari.
- Jumlah Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Pejabat Eselon III sebelumnya 11 orang/hari menjadi 20 orang/hari.
- Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Biasa BBM sebelumnya 12 pp menjadi 22 pp.
- Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Biasa Uang Harian sebelumnya 192 orang/hari menjadi 284 orang/hari.
- Sewa Kendaraan bertambah menjadi 2 perhari menyesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir tahun.

1.9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah materai yang sebelumnya 100 lembar menjadi 300 lembar.

1.10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah Biaya Pemasangan Listrik Baru menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.
- Jumlah Pemuatan Publikasi Kinerja sebelumnya 48 per tayang menjadi 96 per tayang

1.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah Pemeliharaan pendingin ruangan sebelumnya 11/tahun unit menjadi 14 unit/tahun.
- Jumlah Pemeliharaan komputer Notebook sebelumnya 11 unit/tahun menjadi 12 unit/tahun
- Jumlah Pemeliharaan printer sebelumnya 10 unit/tahun menjadi 16 unit/tahun
- Jumlah Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebelumnya 0 unit/tahun menjadi 1 unit/tahun semua disesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir tahun.

1.12 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah Pembayaran IPP/ISR sebelumnya 0 menjadi 2 Kali.

1.13 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah Layanan Hubungan Media yang sebelumnya 9 Layanan menjadi 12 Layanan.

1.14 Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur mengalami perubahan rincian objek untuk memenuhi Target Indikator Kinerja adapun perubahannya sebagai berikut :

- Jumlah Pertambahan Belanja Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Biasa.

2. Perubahan Pagu Indikatif

- 2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 1.675.000,- dari Pagu Awal Rp. 12.500.000,- menjadi Rp. 14.175.000,-
- 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- dari Pagu Awal Rp. 1.400.000,- menjadi Rp. 3.600.000,-
- 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp. 700.000,- dari Pagu Awal Rp. 2.700.000,- menjadi Rp. 2.000.000,-
- 2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 5.620.500,- dari Pagu Awal Rp. 30.854.450,- menjadi Rp. 36.474.350,-
- 2.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 8.085.000,- dari Pagu Awal Rp. 45.220.000,- menjadi Rp. 53.305.000,-
- 2.6 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 8.085.000,- dari Pagu Awal Rp. 30.736.500,- menjadi Rp. 38.821.500,-

- 2.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pengalihan Anggaraan sebesar Rp. 8.200.000,- dari Pagu Awal Rp. 13.240.000,- menjadi Rp. 5.040.000,-
- 2.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 69.780.000,- dari Pagu Awal Rp. 189.190.000,- menjadi Rp. 258.970.000,-000,-
- 2.9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 2.000.000,- dari Pagu Awal Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,-000,-
- 2.10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 23.004.500,- dari Pagu Awal Rp. 628.480.000,- menjadi Rp. 651.484.500,-
- 2.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 11.675.000,- dari Pagu Awal Rp. 26.640.000,- menjadi Rp. 40.315.000,-
- 2.12 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 6.000.000,- dari Pagu Awal Rp. 23.120.000,- menjadi Rp. 29.120.000,-
- 2.13 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 60.000.000,- dari Pagu Awal Rp. 351.331.000,- menjadi Rp. 411.331.000,-
- 2.14 Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur mengalami Penambahan Anggaraan sebesar Rp. 50.000.000,- dari Pagu Awal Rp. 6.500.000,- menjadi Rp. 56.500.000,-

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Anggaran Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024,
secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C. 31a

Tabel T-C. 31a

Tabel T-C. 31a
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program,kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program,kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.598.230.582	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.916.342.431	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.598.230.582	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.916.342.431	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.543.531.132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.711.642.981	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Persen	5.122.698.182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Persen	5.740.729.731	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	80 Persen	21.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	80 Persen	23.075.000	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.175.000	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.400.000	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.200.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	80 Persen	3.558.668.650	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	80 Persen	3.879.818.781	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/b ulan	3.554.068.650	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/b ulan	3.872.318.781	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.700.000	
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	80 Persen	225.340.550	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	80 Persen	403.943.450	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.732.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.332.000	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	13.913.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	36.474.950	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.094.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.305.000	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	19.960.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	38.821.500	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.040.000	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	142.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	258.970.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	80 Persen	1.136.323.982	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	80 Persen	1.199.189.500	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	534.333.982	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	651.484.500	
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	211.390.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	178.800.000	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	390.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	365.905.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program,kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program,kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	80 Persen	180.965.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	80 Persen	234.703.000	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	139.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	173.206.000	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	21.640.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	40.315.000	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.225.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.120.000	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.062.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo	Indeks KIP	90 Persen	367.593.250	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo	Indeks KIP	90 Persen	597.674.250	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	90 Persen	367.593.250	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	90 Persen	597.674.250	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	6.298.750	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	10.903.750	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	3.120.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	31.135.000	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	855.000	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	28.301.000	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	312 Layanan	351.331.000	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	312 Layanan	461.331.000	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8 Dokumen	740.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8 Dokumen	25.740.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	5.248.500	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	40.263.500	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	93 Persen	53.239.700	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	93 Persen	373.239.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sistem jaringan Pemerintah Daerah	93 Persen	20.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sistem jaringan Pemerintah Daerah	93 Persen	299.239.000	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	20.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	299.239.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	93 Persen	33.239.700	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	93 Persen	74.000.000	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.700.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.000.000	
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Perangkat Daerah	13.664.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Perangkat Daerah	41.000.000	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	9.875.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	6.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo			29.658.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo			79.658.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	60 Persen	29.658.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	60 Persen	79.658.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	60 Persen	29.658.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	60 Persen	79.658.000	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	18 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	18 Dokumen	10.500.000	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	16 Dokumen	11.500.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	16 Dokumen	11.500.000	
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	6.500.000	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	56.500.000	
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1.158.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1.158.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo			25.041.450	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo			125.041.450	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	60 Persen	25.041.450	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	60 Persen	125.041.450	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	15.441.450	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	106.267.050	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	6.750.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	-	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif 2024	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.723.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.723.000	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan	2.424.400	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan	-	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	4.544.050	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	104.544.050	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah	31 Perangkat Daerah	9.600.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah	31 Perangkat Daerah	18.774.400	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	9.600.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	18.774.400	
J U M L A H					1.039.260.049.162					1.337.805.497.363	

Sumber : Diolah oleh Diskominfo

Tabel T-C. 31b
Matrik Rencana Kerja (Renja) sesuai SIPD
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Sukabumi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rkurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								5.598.230.582	6.625.717.431	6.916.342.431	1.318.111.849						5.973.872.355	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.598.230.582	6.625.717.431	6.916.342.431	1.318.111.849							5.973.872.355	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5.543.531.132	6.471.017.981	6.711.642.981	1.168.111.849							5.886.202.960	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	-				-	-	5.122.698.182	5.616.104.731	5.740.729.731	704.941.878							5.827.640.060	
	2.16.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah				-	80 Persen n	21.400.000	21.400.000	23.075.000	1.675.000			Memperku a Stabilitas Politikhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	- -	iskomi nfo		23.540.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be kurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Doku men	1 Doku men	12.500.000	12.500.000	14.175.000	1.675.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	- -			13.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				0 Doku men	1 Doku men	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Doku men	1 Doku men	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.540.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Lapor an	1 Lapor an	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	Kota Sukabu ni, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Pohukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.540.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Lapor an	1 Lapor an	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	Kota Sukabu ni, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Pohukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			2.420.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Doku men	1 Doku men	13.240.000	13.240.000	5.040.000	-8.200.000	Kota Sukabu ni, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Pohukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			14.564.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Lapor an	1 Lapor an	142.400.000	189.190.000	258.970.000	116.570.000	Kota Sukabu ni, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			208.109.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	6.225.000	7.120.000	7.120.000	895.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			7.832.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	13.350.000	14.062.000	14.062.000	712.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			15.468.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	367.593.250	481.674.250	597.674.250	-367.593.250							-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.02.2.0.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik				-	90 Persen	367.593.250	481.674.250	597.674.250	230.081.000			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Masyarakat Kota Sukabumi			-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.0.1.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				0 Dokumen	4 Dokumen	6.298.750	6.298.750	10.903.750	4.605.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.0.1.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				0 Doku men	18 Doku men	10.500.000	10.500.000	10.500.000		- Kota Sukabu mi, Semua ASLI DAER Kecamat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polihukhank am Dan Transforma si Pelayan an Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			11.550.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.0 1.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				0 Doku men	16 Doku men	11.500.000	11.500.000	11.500.000		- Kota Sukabu mi, Semua ASLI DAER Kecamat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polihukhank am Dan Transforma si Pelayan an Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			12.650.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.0 1.0005	Pengembangan Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	25.041.450	125.041.450	125.041.450	30.004.145							55.045.595	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Laporan	15.441.450	106.267.050	106.267.050	90.825.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Peran giat Daerah		34.393.755	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.750.000	-	-	-6.750.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	1 Laporan	1.723.000	1.723.000	1.723.000	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan			1.895.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif				
2.21.02.2.0 1.0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Lapor an	0 Lapor an	2.424.400	-	-	-2.424.400	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	- -			7.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.0 1.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Peran gkat Daera h	1 Peran gkat Daera h	4.544.050	104.544.050	104.544.050	100.000.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			4.998.455	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be kurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah				-	31 Peran gkat Daera h	9.600.000	18.774.400	18.774.400	9.174.400			Memperkua t Stabilitas Pelayanan Publik Dengan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pema rnfaata n Sertifi kat Elekt ronik		20.651.840	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.0 2.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				0 Peran gkat Daera h	31 Peran gkat Daera h	9.600.000	18.774.400	18.774.400	9.174.400	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Poluhkhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			20.651.840	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	JUMLAH								1.039.260.049 .162	1.272.828.818 .997	1.337.805.497 .363	298.545.448.2 01							349.459.904.296	

Sumber : diambil dari aplikasi SIPD

**ANALISA RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN BERJALAN**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.625.717.431	6.916.342.431	290.625.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.471.017.981	6.711.642.981	240.625.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.471.017.981	6.711.642.981	240.625.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Persen	80 Persen	5.616.104.731	5.740.729.731	124.625.000	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	21.400.000	23.075.000	1.675.000	

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	14.175.000	1.675.000	Penambahan Anggaran Mamin Rapat dan Koordinasi DD Renja Perubahan dan Renja 2025
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	-	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000	1.400.000	-	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	-	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	-	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.400.000	1.400.000	-	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000	2.200.000	-	

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	3.876.918.781	3.879.818.781	2.900.000	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.872.318.781	3.872.318.781	-	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.400.000	3.600.000	2.200.000	Penambahan Anggaran Aksi Perubahan, Mamin Rapat dan Cetak Dokumen
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.700.000	700.000	Penambahan Anggaran Mamin Rapat SIPEKA
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	320.572.950	403.943.450	83.370.500	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.332.000	11.332.000	-	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.854.450	36.474.950	5.620.500	Penambahan Anggaran Belanja ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.220.000	53.305.000	8.085.000	Penambahan Anggaran mamin rapat rutin Diskominfo
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.736.500	38.821.500	8.085.000	Penambahan Anggaran Barang Cetak
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.240.000	5.040.000	-8.200.000	Penyesuaian Anggaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	189.190.000	258.970.000	69.780.000	Penambahan Anggaran Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	80 Persen	80 Persen	1.174.185.000	1.199.189.500	25.004.500	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	3.000.000	2.000.000	Penambahan Anggaran Pembelian Materi
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	628.480.000	651.484.500	23.004.500	Penambahan Anggaran Pemasangan Instalasi Listrik baru dan Kekurangan bayar Kerjasama media
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	178.800.000	178.800.000	-	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	365.905.000	365.905.000	-	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	80 Persen	80 Persen	223.028.000	234.703.000	11.675.000	

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	173.206.000	173.206.000	-	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	28.640.000	40.315.000	11.675.000	Penambahan Anggaran Pemeliharaan Laptop dan Komputer Server
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7.120.000	7.120.000	-	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	14.062.000	14.062.000	-	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks KIP	Indeks KIP	90 Persen	90 Persen	481.674.250	597.674.250	116.000.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Untuk Publik	90 Persen	90 Persen	481.674.250	597.674.250	116.000.000	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	6.298.750	10.903.750	4.605.000	Penyesuaian Anggaran Kegiatan
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	23.120.000	31.135.000	8.015.000	Penambahan Anggaran Pembayaran IPP dan ISR Radio Swara Perintis
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	34.936.000	28.301.000	-6.635.000	Penyesuaian Anggaran Kegiatan
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	312 Layanan	312 Layanan	351.331.000	461.331.000	110.000.000	Penambahan Anggaran Kekurangan Bayar kerjasama media 3 Bulan dan Penambahan Hibah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8 Dokumen	8 Dokumen	25.740.000	25.740.000	-	
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	6 Dokumen	40.248.500	40.263.500	15.000	Penyesuaian Anggaran Kegiatan
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintahan Daerah	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintahan Daerah	93 Persen	93 Persen	373.239.000	373.239.000	-	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sistem jaringan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sistem jaringan Pemerintah Daerah	93 Persen	93 Persen	299.239.000	299.239.000	-	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	299.239.000	299.239.000	-	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	93 Persen	93 Persen	74.000.000	74.000.000	-	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000	27.000.000	-	

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	41.000.000	41.000.000	-	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	-	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					29.658.000	79.658.000	50.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	60 Persen	60 Persen	29.658.000	79.658.000	50.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	Persentase penyediaan data statistik sektoral dan publikasinya	60 Persen	60 Persen	29.658.000	79.658.000	50.000.000	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	18 Dokumen	18 Dokumen	10.500.000	10.500.000	-	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	16 Dokumen	16 Dokumen	11.500.000	11.500.000	-	
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	6.500.000	56.500.000	50.000.000	Pengembangan spatial
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.158.000	1.158.000	-	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					125.041.450	125.041.450	-	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	60 Persen	60 Persen	125.041.450	125.041.450	-	

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyediakan perubahan pagu)
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	106.267.050	106.267.050	-	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.723.000	1.723.000	-	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	104.544.050	104.544.050	-	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah	Persentase penggunaan jaring komunikasi sandi inter/intra/antar perangkat daerah	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	18.774.400	18.774.400	-	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	18.774.400	18.774.400	-	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu bentuk responsibilitas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dan perkembangan asumsi. Selain itu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi serta stakeholder terkait.

Semoga melalui Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2024 ini, keberhasilan pencapaian Kinerja Pemerintahan secara umum dapat dicapai dengan lebih baik, terutama di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi.

O. PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemerintah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat inovatif dan respek terhadap aturan-aturan yang ditentukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk diimplementasikan, termasuk dalam tatanan proses perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun ke-1 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2026, yang telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengalami perubahan seiring dengan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap mengacu kepada bentuk dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas dan tanggung jawab sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang tersebut meletakkan otonomi seluas-luasnya pada Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah Kota Sukabumi. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi di bidang Keamanan dan ketertiban umum masyarakat, ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi sebagai dasar hukum dan kerangka acuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi dalam menentukan arah dan kebijakan Pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kota Sukabumi.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan renja perangkat daerah tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 dimulai dari penyusunan rancangan awal perubahan renja perangkat daerah yang akan menjadi dasar bagi rancangan perubahan RKPD Kota Sukabumi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan walikota, maka rancangan perubahan renja perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari walikota.

Perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.2 Landasan hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi ini adalah ;

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerjam Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64;

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi;
18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (lembar daerah kota sukabumi tahun 2023 nomor 16);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah; dan
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPKD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta alasan melakukan perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi tentang capaian anggaran maupun kinerja hingga triwulan I tahun 2024 beserta penjabarannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I (semester I) tahun berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II/Semester I tahun berjalan, pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ;

Berisi matrik renja sesuai SIPD, berikan penjelasan point-point penting anggaran perubahannya.

BAB IV PENUTUP.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja s/d Triwulan II

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.494.483.912	51	5.702.950.990
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	%	100	16.020.000	26,7	7.600.000
1.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	7.865.000	-	1.750.000
1.05.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	6.040.000	4	5.850.000
1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2.115.000	-	-

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	6.861.216.712	25	3.767.016.545
1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54	6.858.831.712	54	3.767.016.545
1.05.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	795.000		-
1.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	795.000		-
1.05.01.2.02.08		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	795.000		-
1.05.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah Sesuai standar	%	100	1.495.000	-	700.000
1.05.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barnag Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.495.000	-	700.000
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	10.000.000	100	9.545.000
1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	10.000.000	10	9.545.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	%	100	253.802.700	87,71	158.456.267
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.397.000	1	1.180.000
1.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.724.500	1	18.284.767
1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.094.200	1	1.830.500
1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.100.000	1	500.000
1.05.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	62	33.495.000	40	25.465.000
1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	68	179.992.000	42	111.196.000
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	1.794.000	34	220.000
1.05.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	-	-
1.05.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	794.000	1	220.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	2.794.697.800	50	1.451.410.059
1.05.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.400.000	6	1.000.000
1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	71.677.500	6	36.064.057
1.05.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	39.200.000	6	19.400.000
1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.682.420.300	6	1.394.946.002
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	555.457.700	81,8	308.003.119
1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	537.481.700	34	293.268.119
1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	7.790.000	5	4.575.000
1.05.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedug Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10.186.000	3	10.160.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02	Meningkatnya Pelayanan Kamtibmas dan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang dapat diselesaikan	%	100	3.087.424.500	100	1.170.607.000
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kot	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan	%	100	1.598.425.000	100	846.117.000
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	350.000.000		206.283.000
1.05.02.2.01.015		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	365	1.198.475.000	182	624.234.000
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	13	39.950.000	6	15.600.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.01.17		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	10.000.000		-
1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	1.488.999.500	100	324.490.000
1.05.02.2.02.0011		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	45	768.210.000	26	167.880.000
1.05.02.2.02.0012		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	33	720.789.500	3	156.610.000
1.05.04	Meningkatnya Pelayanan Kamtibmas dan Pemadam Kebakaran yang	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu tanggap (response time)	%	100	175.999.250	100	124.208.825

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/B idang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04.2.01	sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	161.624.250	100	118.813.825
1.05.04.2.01.0003		Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dok	1	137.182.250		107.353.575
1.05.04.2.01.017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	11	24.442.000	3	11.460.250
1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	%	100	14.375.000		5.395.000
1.05.04.2.04.0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	14.375.000		5.395.000
TOTAL						13.757.907.662		6.997.766.815

Sumber : Diolah oleh Satuan

Pada tabel 2.1 tentang Evaluasi Renja s/d Triwulan II dapat terlihat capaian penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi dari total Pagu anggaran Sebesar Rp. 13.757.907.662 telah terserap sebesar Rp. 6.997.766.815 dengan persentasi 24,6%, secara perhitungan target penyerapan belum tercapai dibawah 50,86%.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang belum memenuhi target

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.494.483.912	51	5.702.950.990
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	%	100	16.020.000	26,7	7.600.000
1.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	7.865.000	-	1.750.000
1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2.115.000	-	-
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	6.861.216.712	25	3.767.016.545

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	795.000		-
1.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	795.000		-
1.05.01.2.02.08		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	795.000		-
1.05.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah Sesuai standar	%	100	1.495.000	-	700.000
1.05.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barnag Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.495.000	-	700.000
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	1.794.000	34	220.000
1.05.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	-	-
1.05.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	794.000	1	220.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02	Meningkatnya Pelayanan Kamtibmas dan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang dapat diselesaikan	%	100	3.087.424.500	100	1.170.607.000
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kot	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan	%	100	1.598.425.000	100	846.117.000
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	350.000.000		206.283.000
1.05.02.2.01.17		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	10.000.000		-
1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	1.488.999.500	100	324.490.000
1.05.02.2.02.0012		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	33	720.789.500	3	156.610.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/B idang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04	Meningkat nya Pelaya nan Kamtram tibmas dan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu tanggap (response time)	%	100	175.999.250	100	124.208.825
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	161.624.250	100	118.813.825
1.05.04.2.01.0003		Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dok	1	137.182.250		107.353.575
1.05.04.2.01.017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	11	24.442.000	3	11.460.250
1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	%	100	14.375.000		5.395.000
1.05.04.2.04.0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	14.375.000		5.395.000
TOTAL						13.757.907.662		6.997.766.815

Sumber : diolah oleh Satuan

Pada tabel matriks diatas dapat terlihat ada 14 sub kegiatan yang belum memenuhi target, hal ini dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan tersebut di laksanakan pada triwulan III dan IV sehingga secara kinerja terlihat belum tercapai. Secara anggaran dari 14 sub kegiatan sudah ada yang terserap hingga 50% dan beberapa masih belum terserap mengikuti pelaksanaan sub kegiatan sesuai waktu yang di tetapkan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target antara lain :

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang memenuhi target

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.494.483.912	51	5.702.950.990
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	%	100	16.020.000	26,7	7.600.000
1.05.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	6.040.000	4	5.850.000
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	6.861.216.712	25	3.767.016.545
1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54	6.858.831.712	54	3.767.016.545

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	2.794.697.800	50	1.451.410.059
1.05.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.400.000	6	1.000.000
1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	71.677.500	6	36.064.057
1.05.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	39.200.000	6	19.400.000
1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.682.420.300	6	1.394.946.002
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	555.457.700	81,8	308.003.119
1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	537.481.700	34	293.268.119
1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	7.790.000	5	4.575.000
1.05.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10.186.000	3	10.160.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/B idang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02	Meningkatnya Pelayanan Kamtram tibmas dan Pemadam	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	%	100	3.087.424.500	100	1.170.607.000
1.05.02.2.01	Kebakaran yang sesuai standar	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kot	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan	%	100	1.598.425.000	100	846.117.000
1.05.02.2.01.015		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	365	1.198.475.000	182	624.234.000
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	13	39.950.000	6	15.600.000
TOTAL						13.757.907.662		6.997.766.815

Sumber : Diolah oleh Satuan

Berdasarkan uraian tabel diatas terdapat 11 sub kegiatan yang telah memenuhi target secara kinerja, adapun secara anggaran pada umumnya telah terserap lebih dari 50%.

3. Program/Kegiatan yang belum terlaksana antara lain :

Tabel 2.4
Program/Kegiatan yang melebihi Target

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.494.483.912	51	5.702.950.990
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	10.000.000	100	9.545.000
1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	10.000.000	10	9.545.000
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	%	100	253.802.700	87,71	158.456.267
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.397000	1	1.180.000
1.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.724.500	1	18.284.767
1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.094.200	1	1.830.500
1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.100.000	1	500.000

Kode Rekening	Sasaran	Urusan/B idang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)			Anggaran	Realisasi	
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	62	33.495.000	40	25.465.000
1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	68	179.992.000	42	111.196.000
1.05.02	Meningkatnya Pelayanan Kamtibmas dan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	%	100	3.087.424.500	100	1.170.607.000
1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	1.488.999.500	100	324.490.000
1.05.02.2.02.0011		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	45	768.210.000	26	167.880.000
TOTAL						13.757.907.662		6.997.766.815

Sumber : Diolah oleh Satuan

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat di lihat bahwa terdapat 8 sub kegiatan melebihi target yang telah di tetapkan, adapun secara penyerapan anggaran telah terserap hingga 50% beberapa bahkan melebihi 50%. melebihi target kinerja ini di sebabkan karena adanya penumpukan kegiatan pada triwulan I dan II akibat dari pelaksanaan/kebutuhan di lapangan sehingga menyebabkan kinerja dapat melebihi apa yang telah di tetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan
Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024
Kota Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	6 buku	4 Buku	8 Buku	8 Buku	100%	2 Buku	14 Buku	233%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku LAKIP, LPPD, LKPJ dan SPM	4 Buku	4 Buku	12 Buku	12 Buku	100%	4 Buku	21 Buku	525%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan SPIP	1 Buku		2 Buku	2 Buku	100%	1 Buku	4 Buku	400%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	55 Org	54 Orang	54 Orang	54 Orang	100%	54 Orang	162 Orang	295%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan akhir tahun	1 buku		1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	200%
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah buku laporan semesteran	1 buku		1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	200%
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku laporan prognosis anggaran	1 buku		1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	165 Buah	165 Buah	215 Buah	215 Buah	100%	165 Buah	410 Buah	248%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen untuk penerangan kantor	22 Item	4 Item	3 Item	3 Item	100%	10 Item	11 Item	50%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat-alat kebersihan - Jumlah Alat Tulis Kantor	63 Item	9 Item 40 Item	11 Item 36 Item	11 Item 36 Item	100%	40 Item	143	227%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	8 Item	5 Item	5 Item	100%	5 Jenis	18 Jenis	360%
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	8 Koran	7 Koran	7 Koran	7 Koran	100%	3 Koran	15 Koran	188%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman jamuan rapat kantor dan jamuan tamu	4400 Dus	2869 Dus	2.532 Dus	2.532 Dus	100%	810 Dus	6.211 Dus	141%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pendaan untuk perjalanan dinas	1250 HOK	928 HOK	1.901 HOK	1.901 HOK	100%	2.067 HOK	4.896 HOK	392%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meublair kebutuhan kantor	20 Buah	11 Buah	3 Buah	3 Buah	100%	10 Buah	24 Buah	120%
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlalatan, Perlengkapan dan Alat Studio Komunikasi	65 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	29 Unit	37 Unit	57%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	320 Lembar	64 Buah	84 Buah	84 Buah	100%	54 Buah	202 Buah	63%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah jasa iklan - Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan 60 Bulan	12 Bulan 60 Bulan	12 Bulan 60 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKK dan THL	130 Orang	112 Orang	109 Orang	109 Orang	100%	109 Orang	330 Orang	254%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional	34 Unit	34 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	34 Unit	98 Unit	288%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	40 Unit	11 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	11 Unit	36 Unit	90%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana yang diperbaiki	2 Gedung	1 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Gedung	7 Gedung	350%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kota	Cakupan Pengendalian Keamanan Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	Jumlah Penataan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran	1 Tahun	365 Hari	365 Hari	365 Hari	100%	365 Hari	1095 Hari	300%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tk. Kab/Kota	Jumlah Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa di Kota Sukabumi	50 Keg	45 Kegiatan	16 Kegiatan	43 Kegiatan	268,8%	13 Keg.	101 Keg.	202%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Anggota linmas yang terlatih	820 Orang		66 Orang	66 Orang	100%	40 Orang	106 Orang	13%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	95%	90%	90%	100%	111,1%	90%	280%	295%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegaitan	10 Keg.		33 Kegiatan	33 Kegiatan	100%	8 Keg.	41 Keg.	410%
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi yustisi dan Kegiatan Tipiring yang dilaksanakan	12 Keg.	45 Kegiatan	45 Kegiatan	38 Kegiatan	84,4%	24 Keg.	107 Keg.	892%
1.05.04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	100%	90%	100%	111,1%	100%	311,1%	311%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	90%	90%	90%	90%	100%	90%	270,00%	300%
1.05.04.2.01.01	pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kot	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	4 Dok.	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	300%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kot	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Pemadam Kebakaran	12 Item	1 Item	1 Item	1 Item	100%	-	2 Item	17%

Sumber : Diolah oleh Satuan

Terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang di laksanakan pada tahun anggaran 2021. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan hampir dapat terpenuhi semuanya, ada beberapa yang tidak terpenuhi karena kendala di lapangan. Secara tingkat capaian realisasi target renstra pun hampir semuanya berkinerja baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 dan 121 tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang Pencapaian dan Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (T.C. 30)

Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
					(thn n- 2)	(thn n- 1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(thn n- 2)	(thn n- 1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan		Permendagri 18 tahun 2020	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		Permendagri 18 tahun 2020	%	90	100	95	95	90	90	95	95	
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Permendagri 18 tahun 2020	%	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran		Permendagri 18 tahun 2020	%	90	100	90	90	90	90	90	90	
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Permendagri 121 tahun 2020		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Permendagri 114 tahun 2020		%	90	90	100	100	90	90	100	100	

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
					(thn n-2)	(thn n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Pelayanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Permendagri 114 tahun 2020		%	90	90	90	90	90	90	90	90	

Sumber : Diolah oleh Satuan

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Tahun anggaran 2024 hingga triwulan I belum semua indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini di akibatkan karena waktu pelaksanaan kegiatan ada yang di tetapkan di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga realisasi capaian pun beberapa indikator belum tercapai.

Dari hasil rapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi memberikan rekomendasi kegiatan yaitu :

“Kota Sukabumi telah memiliki Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, diantaranya Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, lalu Perda Nomor 1 tahun 2014 yang dirubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DPRD Kota Sukabumi mendorong Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui perangkat penegak Perda untuk dapat lebih tegas lagi dalam pengawasan dan penegakan perda-perda tersebut”.

Hal tersebut kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi tindak lanjuti sebagai berikut :

“Dalam penegakan perda terkait trantibum ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakannya se tegas mungkin, di mulai dari pengawasan serta himbauan kepada pelanggar perda hingga di berikan siding tipiring bagi pelanggar yang mengulang kesalahan yang sama. Siding tipiring ini di lakukan baik di tempat ataupun di pengadilan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pelanggar perda”

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi serta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 150 Tahun 2022 tentang tugas dan

fungsi Pokok satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi, maka dapat terlihat dan terukur kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi secara baik dan signifikan.

Dampak dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Sukabumi adalah patuh dan taat terhadap Peraturan daerah dan peraturan walikota sehingga membantu pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan khususnya dalam menjaga stabilitas trantibumas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kota sukabumi. Pada tahun 2022 masih banyak kendala terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi, hal tersebut berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi adalah perlunya Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi bahwa tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran teridentifikasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sekarang masih belum efektif dan belum sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
2. Kondisi SDM, sarana dan prasarana damkar yg belum sesuai;
3. Keanggotaan perlindungan masyarakat yang masih minim *skill* dan *reward*;

Dalam rangka meningkatkan Kinerja serta Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka diharapkan Pemerintah Kota Sukabumi dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi.

Tabel 2.4 (T.C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.5.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	12.706.074.528	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	10.781.953.912	
01.5.01.2:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	32.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	16.020.000	
01.5.01.2:01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SATP3K	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok.	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SATP3K	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok.	7.865.000	APBD
01.5.01.2:01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.040.000	APBD
01.5.01.2:01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SATP3K	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SATP3K	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.115.000	APBD

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.5.01.2:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.110.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.861.216.712	
01.5.01.2:02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SATP3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	7.100.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SATP3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	6.858.831.712	APBD
01.5.01.2:02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	795.000	APBD
01.5.01.2:02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	795.000	APBD
01.5.01.2:02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SATP3K	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	3.500.000	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SATP3K	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	795.000	APBD
1.05.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang milik daerah Sesuai standar	100%	15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang milik daerah Sesuai standar	100%	1.495.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.495.000	
01.5.01.2:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	40.250.000	
01.5.01.2:05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SATP3K	Jumlah pakaian seragam Polisi Pamong Praja beserta perlengkapan-nya dan Pakaian Kerja Lapangan	165 Paket	180.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SATP3K	Jumlah pakaian seragam Polisi Pamong Praja beserta perlengkapan-nya dan Pakaian Kerja Lapangan	10 Paket	40.250.000	APBD
01.5.01.2:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	456.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	324.202.700	
01.5.01.2:06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SATP3K	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SATP3K	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.397.000	APBD
01.5.01.2:06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATP3K	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATP3K	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	38.224.500	APBD

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.5.01.2:06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SATP3K	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SATP3K	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.594.200	APBD
01.5.01.2:06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SATP3K	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dok.	4.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SATP3K	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok.	1.200.000	APBD
01.5.01.2:06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SATP3K	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SATP3K	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	45.495.000	APBD
01.5.01.2:06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SATP3K	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	229.292.000	APBD
01.5.01.2:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	87.250.000	
01.5.01.2:07.05	Pengadaan Mebel	SATP3K	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Pengadaan Mebel	SATP3K	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	APBD
01.5.01.2:07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SATP3K	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SATP3K	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.250.000	APBD

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.5.01.2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.976.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.803.497.800	
01.5.01.2:08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.400.000	APBD
01.5.01.2:08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.677.500	APBD
01.5.01.2:08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.200.000	APBD
01.5.01.2:08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.800.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SATP3K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.682.420.300	APBD
01.5.01.2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	690.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	648.021.700	
01.5.01.2:09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	SATP3K	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	SATP3K	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	603.545.700	APBD

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.5.01.2:09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SATP3K	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SATP3K	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	16.290.000	APBD
01.5.01.2:09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SATP3K	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Gedung	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SATP3K	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Gedung	28.186.000	APBD
1.5.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100%	2.625.000.000	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100%	3.009.761.750	
1.5.02.2:01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kot		Persentase pengendalian keamanan lingkungan	100%	1.325.000.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kot		Persentase pengendalian keamanan lingkungan	100%	1.550.955.000	
1.5.02.2:01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	550.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	350.000.000	APBD
1.5.02.2:01.015	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	Kota Sukabumi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	200 Kasus	400.000.000	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	Kota Sukabumi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	200 Kasus	801.157.000	APBD

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
1.5.02.2:01.016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Sukabumi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Kasus	250.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Kasus	39.950.000	
1.05.02.2.01.017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	125.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	22.380.000	
1.5.02.2:02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	90%	1.300.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	90%	1.458.806.750	
1.5.02.2:02.011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	450.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	618.210.000	APBD

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.02.2:02.012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Laporan	850.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	840.596.750	
1.5.04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Waktu tanggap (response time)	100%	575.000.000	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Waktu tanggap (response time)	100%	215.999.250	
1.5.04.2:01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	500.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	201.624.250	
1.5.04.2:01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dok	200.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dok	177.182.250	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah 2024					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif 2024	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.04.2:01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Sukabumi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Paket	300.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Sukabumi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Paket	24.442.000	APBD
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	100%	75.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	100%	31.250.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	330 Orang	75.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	33 Orang	14.375.000	
	Jumlah Pagu				15.906.074.528	Jumlah Pagu				14.007.714.912	
	Jumlah Program				3	Jumlah Program				3	
	Jumlah Kegiatan				12	Jumlah Kegiatan				12	
	Jumlah Sub Kegiatan				33	Jumlah Sub Kegiatan				33	
	Jumlah Output				33	Jumlah Output				33	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengembalikan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya sebagai berikut :

- 1425 -

Tabel 3.1
Matriks Renja Perubahan 2024

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	6.569.012.234	6.858.831.712	6.858.831.712	289.819.478	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	1.000.000	795.000	795.000	(205.000)	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	1.000.000	795.000	795.000	(205.000)	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	795.000	795.000	(205.000)	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.05.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.500.000	1.495.000	1.495.000	(5.000)			-	- -	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	1.500.000	1.495.000	1.495.000	(5.000)	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	10.000.000	40.250.000	30.250.000			-	- -	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	0 Paket	0 Paket	10.000.000	10.000.000	40.250.000	30.250.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	-	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	RAN
	1.05.01. 2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Nyomplong	-	-	-	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	281.589.800	253.802.700	324.202.700	42.612.900			-	-	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0 Paket	1.397.000	1.397.000	3.397.000	2.000.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Nyomplong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01. 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0 Paket	32.698.400	32.724.500	38.224.500	5.526.100	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Nyomplong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	202.800.000	179.992.000	229.292.000	26.492.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.850.000	1.794.000	87.250.000	85.400.000			-	- -	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit		-	-	-	-	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	-	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit		-	-	-	-	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	-	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor															
		<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit		-	-	-	-	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyemplo ng	-	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA

NO	KODE	URUSAN / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	RAN
	1.05.01. 2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	1.000.000	1.000.000	12.000.000	11.000.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	850.000	794.000	75.250.000	74.400.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.771.600.000	2.794.697.800	2.803.497.800	31.897.800			-	- -	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01. 2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0 Laporan	0 Laporan	1.400.000	1.400.000	2.400.000	1.000.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Nyomplo ng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000	39.950.000	39.950.000	(10.050.000)	Kota Sukabu mi, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKA RAN
	1.05.02. 2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i> <i>jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>	0 Laporan	0 Laporan	20.000.000	10.000.000	22.380.000	2.380.000	Kota Sukabu mi, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKA RAN
	1.05.02. 2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>	0 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kota Sukabu mi, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKA RAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.05.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	368.236.000	989.025.500	1.458.806.750	1.090.570.750			-	- -	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02. 2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02. 2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	0 Laporan	0 Laporan	218.236.000	268.236.000	618.210.000	399.974.000	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02. 2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0 Laporan	100.000.000	720.789.500	840.596.750	740.596.750	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Dokumen NSPM Penyelesaian/Pengulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	0 Dokumen	0 Dokumen	74.999.650	-	-	(74.999.650)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000	137.182.250	177.182.250	175.682.250	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000	-	-	(1.500.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000	-	-	(2.500.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	1.500.000	-	-	(1.500.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	-	2.000.000	-	-	(2.000.000)			-	-	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran															
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000	-	-	(2.000.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.05.04. 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	31.250.000	14.375.000	14.375.000	(16.875.000)			-	- -	-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat															
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 Orang	0 Orang	20.000.000	14.375.000	14.375.000	(5.625.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran															
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 Desa/ Kelurahan	0 Desa/ Kelurahan	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana															
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	0 Dokumen	0 Dokumen	1.250.000	-	-	(1.250.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF F (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal</i>	0 Laporan	0 Laporan	1.250.000	-	-	(1.250.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04. 2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis</i>	0 Unit	0 Unit	1.250.000	-	-	(1.250.000)	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H					1.039.260.049.16 ₂	1.272.828.818.99 ₇	1.337.805.497.36 ₃	298.545.448.201								

Sumber : diolah oleh Satuan

Tabel 3.2

ANALISA RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
BERJALAN

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Satuan	Target		Anggaran			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	10.494.483.912	10.781.953.912	287.470.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	%	100	100	16.020.000	16.020.000	-	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	7.865.000	7.865.000	-	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	6.040.000	6.040.000	-	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.115.000	2.115.000	-	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	6.861.216.712	6.861.216.712	-	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54	54	6.858.831.712	6.858.831.712	-	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	795.000	795.000	-	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	795.000	795.000	-	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	795.000	795.000	-	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Satuan	Target		Anggaran			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah Sesuai standar	Persentase Barang milik daerah Sesuai standar	%	100	100	1.495.000	1.495.000	-	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barnag Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barnag Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.495.000	1.495.000	-	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	100	10.000.000	40.250.000	30.250.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	165	10.000.000	40.250.000	30.250.000	Penambahan pembelian Rompi Lapangan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	253.802.700	324.202.700	70.400.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.397.000	3.397.000	2.000.000	Penambahan komponen listrik
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	32.724.500	38.224.500	5.500.000	Penambahan Peralatan dan perlengkapan kantor
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	3.094.200	6.594.200	3.500.000	Penambahan Barang Cetak dan Penggandaan
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	3.100.000	1.200.000	(1.900.000)	Pengurangan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	62	85	33.495.000	45.495.000	12.000.000	Penambahan Makin dan snack rapat
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	68	95	179.992.000	229.292.000	49.300.000	Penambahan perjalanan dinas
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	100	1.794.000	87.250.000	85.456.000	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Satuan	Target		Anggaran			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10	1.000.000	12.000.000	11.000.000	Penambahan mebel
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10	794.000	75.250.000	74.456.000	Penambahan peralatan dan mesin
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	2.794.697.800	2.803.497.800	8.800.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.400.000	2.400.000	1.000.000	Penambahan pembelian perangko
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	71.677.500	74.677.500	3.000.000	Penambahan pembayaran listrik dan internet
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	39.200.000	44.000.000	4.800.000	Penambahan belanja TKS Damkar
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.682.420.300	2.682.420.300	-	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	555.457.700	648.021.700	92.564.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	34	537.481.700	603.545.700	66.064.000	Penambahan biaya belanja bahan bakar dan service kendaraan
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	20	7.790.000	16.290.000	8.500.000	Penambahan pemeliharaan peralatan dan mesin
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	10.186.000	28.186.000	18.000.000	Penambahan anggaran untuk perbaikan kanopi yang rusak parah
1.05.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtrantibmas yang dapat diselesaikan	Persentase Gangguan Kamtrantibmas yang dapat diselesaikan	%	100	100	3.087.424.500	3.009.761.750	(77.662.750)	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kot	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kot	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan	%	100	100	1.598.425.000	1.550.955.000	(47.470.000)	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Satuan	Target		Anggaran			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	350.000.000	350.000.000	-	
1.05.02.2.01.015	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	365	365	1.198.475.000	1.138.625.000	(59.850.000)	pergeseran anggaran dari apbd dan mamin
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	13	13	39.950.000	39.950.000	-	
1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	1	10.000.000	22.380.000	12.380.000	penambahan untuk kegiatan SPM Trantibum
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Perda dan Perkada yang ditegakan	Cakupan Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	100	1.488.999.500	1.458.806.750	(30.192.750)	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	45	45	768.210.000	618.210.000	(150.000.000)	pergeseran biaya bahan bakar kendaraan dan honor instansi vertikal
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	29	35	720.789.500	840.596.750	119.807.250	penambahan kegiatan DBHCHT
1.05.04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu tanggap (response time)	Persentase Waktu tanggap (response time)	%	100	100	175.999.250	215.999.250	40.000.000	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Satuan	Target		Anggaran			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	161.624.250	201.624.250	40.000.000	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan non kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dok	1	1	137.182.250	177.182.250	40.000.000	penambahan kegiatan damkar dalam rangak SPM Damkar
1.05.04.2.01.017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	11	11	24.442.000	24.442.000	-	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	%	100	100	14.375.000	14.375.000	-	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	30	14.375.000	14.375.000	-	
TOTAL								13.757.907.662	14.007.714.912	249.807.250	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dalam mengantisipasi berbagai perubahan situasi dan kondisi serta tuntutan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Adapun permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Damkar saat ini, yaitu:

1. SDM satpol PP dan Damkar yang perlu di tingkatkan
2. Sarana dan prasarana yang harus di perbaharui dan di tingkatkan
3. Peningkatan peran serta anggota linmas dalam menjaga trantibum di wilayah kota sukabumi

Tindak lanjut dalam pemecahan permasalahan tersebut yaitu :

1. Melaksanakan Diklat bagi pemadam kebakaran pada diklat pemadam I untuk 2 Orang;
2. Melaksanakan Diklat PPNS bagi anggota Satpol PP yang sudah sesuai;
3. Melakakukan pergeseran anggaran guna memenuhi pengadaan sarana dan prasarana agar sesuai walaupun masih berbanding jauh dengan kondisi;
4. Mengusulkan kepada setiap kecamatan agar dapat melaksanakan pelatihan untuk anggota linmas di tiap kelurahan.

Semoga melalui Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Tahun 2024 ini, keberhasilan pencapaian Kinerja Pemerintahan secara umum dapat dicapai dengan lebih baik, terutama pada urusan bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Sukabumi.

P. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah. Padahal hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “*Good Governance*” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan professional dalam masing-masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*Civilized Society*) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah.

Dalam hal ini untuk mengakomodir kepentingan masyarakat tersebut, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merencanakan program

kerja yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimana termasuk dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025.

Sebagai bahan acuan dokumen Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, rencana kerja perubahan ini bertujuan sebagai arah kebijakan alokasi anggaran dalam 1 (satu) periode tertentu. Selain itu, Renja ini dibuat sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi. Maka renja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi serta RKPD dan RPJMD saling berkesinambungan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 dimulai dari penyusunan rancangan awal perubahan renja perangkat

daerah yang akan menjadi dasar bagi rancangan perubahan RKPD Kota Sukabumi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali kota, maka rancangan perubahan renja perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari walikota.

Perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dengan Trayek;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan

- Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dengan Trayek;
22. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Minimal Penyebrangan
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
26. Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Indikator Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD 2013-2018;
27. Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 151 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 152);
28. Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 55);
29. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 25).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi

anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah untuk penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan Lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah; dan
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Perhubungan disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024, berisi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renja Provinsi, Renja K/L, Renstra K/L, Renstra SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2024 perencanaan dan penganggaran SKPD. Serta undang-undang yang terkait dengan perhubungan.

1.3. Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD sesuai visi misi daerah.

1.4. Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD sesuai visi misi daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Reviu hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Realisai Renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Pokok- pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

- a. Sejauh mana tingkat kinerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilaksanakan).

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, terdiri dari jumlah program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Renja s/d Triwulan II

Kode	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi		Sumb er Penda naan	Perma salaha n	Altern atif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Rp19.086.530.828		Rp10.189.356.861			
2.15.2. 15.0.00 1.2.02. 01.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/Progr am Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Orang/B ulan	76	Rp 8.759.343.120	76 Oran g/Bu lan	Rp 4.502.545.773	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1.2.02. 01.5.1. 01.01.0 1.0001.		Belanja Gaji Pokok PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Tahun	1	Rp 3.198.697.256	3 Bula n	Rp 1.883.072.270	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.2.02. 01.5.1. 01.01.0 2.0001.		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Tahun	1	Rp 336.736.899	3 Bula n	Rp 186.298.688	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 1.03.00 01.		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Tahun	1	Rp 167.649.000	3 Bula n	Rp 92.960.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji	Tahun	1	Rp 24.850.000	3 Bula n	Rp 14.200.000	APBD KOTA		

1.04.00 01.			dan tunjangan nya								
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 1.05.00 01.		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjangan nya	Tahun	1	Rp 118.909.994	3 Bulan	Rp 62.505.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 1.06.00 01.		Belanja Tunjangan Beras PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjangan nya	Tahun	1	Rp 209.831.520	3 Bulan	Rp 108.919.680	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 1.07.00 01.		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjangan nya	Tahun	1	Rp 24.382.148	3 Bulan	Rp 22.842.069	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 1.08.00 01.		Belanja Pembulatan Gaji PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Tahun	1	Rp 2.041.776	3 Bula n	Rp 28.005	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 2.01.00 01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Bulan	13	Rp 4.599.700.000	3 Bula n	Rp 2.121.126.846	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 3.02.00 04.		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji dan tunjanga nnya	Tahun	1	Rp 73.920.277	3 Bula n	Rp 10.311.879	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2.02 .0001.5		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat	Jumlah orang dan bulan yang terbayark an gaji	Tahun	1	Rp 607.500	3 Bula n	Rp -	APBD KOTA		

.1.01.0 3.02.03 6		Kegiatan Usaha berupa Pasar, Glosir, Pertokoan, dan tempat kegiatan lainnya	dan tunjangan								
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.01 .5.1.01. 0 3.02.00 38.		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa usaha retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Tahun	1	Rp 2.016.750	3 Bulan	Rp 281.336	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 16.312.680.996		Rp 4.112.008.793			
2.15.2. 15.0.00 1.2.01.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 53.400.000		Rp 45.000.000			

2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Rentra	Dok	1	Rp 1.092.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	2	30.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Jumlah jenis Bahan Cetak	0	0	222.0000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.02.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	-	840.000	-	Rp -	APBD KOTA		

0 1.01.00 52.											
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.02 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja dan Rentra	Dok	3	Rp 992.000	3 Dok	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .00.0 1.01.5. 1.02.04 .01.002 5.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover	Jumlah jenis ATK	Jenis	2	Rp 222.000	2	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.02 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	22	Rp 770.000	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1.2.01. 03.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANGURUSA N PEMERINTAHANDA ERAH KABUPATEN/KOTA/ Koordinasi danPenyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyeleng garaan SPIP OPD	Dok	6	Rp 948.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.03 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	1	Rp 26.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.03 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas cover	Jumlah Penjilidan dan Penggand aan	Lembar	90	Rp 222.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.03		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	20	Rp 700.000	-	Rp -	APBD KOTA		

.5.1.02.0 1.01.00 52.											
2.15.2.15.0.00 1. 2.01.04 .5.1.02.0 1.01.00 24.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	Dok	6	Rp 740.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 1. 2.01.04 .5.1.02.0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	2	Rp 28.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 1. 2.01.04 .5.1.02.0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas cover	Jumlah Penjilidan dan Penggandaan	Dok	2	Rp 222.000	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.04 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	25	Rp 490.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.05 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	Dok	6	Rp 848.000	0 Dok	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.05 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas cover	Jumlah penjilidan	dok	2	Rp 498.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.05 .5.1.02. 0		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	10	Rp 350.000	-	Rp -	APBD KOTA		

1.01.00 52.											
2.15.2. 15.0.00 1.2.01. 06.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANGURUSA N PEMERINTAHANDA ERAH KABUPATEN/KOTA/ Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Dokumen Penyeleng garaan SPIP OPD	Dok	5	Rp 48.046.000	5 Dok	Rp 45.000.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.06 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	1	Rp 1.1891.000	1,00	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.06 .5.1.02. 0 1.01.00		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas cover	Jumlah Penjilidan dan Penggand aan	dok	3	Rp 1.155.000	1273	Rp -	APBD KOTA		

25.											
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.06 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	150	Rp 45.000.000	150 Dus	Rp 45.000.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.07 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	Dok	6	Rp 734.000	0 Dok	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.07 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	1	Rp 7.500	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Jumlah Kertas dan	Jenis	-	Rp 166.500	-				

2.01.07 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Kertas dan Cover	Pengcover an								
2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.07 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	-	Rp 560.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.2.02.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANGURUSA N PEMERINTAHANDA ERAH KABUPATEN/KOTA/ Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD				Rp 486.500		Rp 3.988.420.507			
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.05 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	2	Rp 259.000	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.01.07 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Jumlah Kertas dan Pengcoveran	Jenis	-	Rp 227.500	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.07 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dok	1	Rp 471.750	0,00	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.07 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	1	Rp 249.750	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.02.07 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Jumlah Kertas dan Pengcover an	Jenis	-	Rp 222.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.01. 2. 05.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Administrasai Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 101.440.000		Rp 94.220.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.01. 2. 05.000 2.5.1.0 2.0.1.0 1.0012		Belanja Bahan Lainnya	Jumlah Pakaian Dinas PDH, PDL, Pakaian Olahraga, Beserta Atribut Lainnya	Steel	20	Rp 9.240.000		Rp 9.020.000			
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.01. 2. 05.000 2.5.1.0 2.0.1.0		Belanja Pakaian Dinas KDH	Jumlah Pakaian Dinas PDH, PDL, Pakaian Olahraga, Beserta Atribut	Steel	20	Rp 7.000.000					

1.0059			Lainnya								
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.01. 2. 05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya PDL	Jumlah Pakaian Dinas PDH, PDL, Pakaian Olahraga, Beserta Atribut Lainnya	Steel	200	Rp 63.900.000	200 Steel	Rp 63.900.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.01. 2. 05.02.5 .1.02.0 1. 01.007 5		Belanja Pakaian Batik Tradisional	Jumlah Pakaian Batik	pcs	20	Rp 4.500.000	20 Pcs	Rp 4.500.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.01. 2.		Belanja Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Dinas PDH, PDL, Pakaian	pcs	20	16.800.000	20 Pcs	Rp 16.800.000	APBD KOTA		

05.02.5 .1.02.0 1. 01.007 6			Olahraga, Beserta Atribut Lainnya								
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 05.11.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Honorari um Kegiatan Pelatihan		1	Rp 14.800.000	1	Rp 2.250.000	APBD KOTA		
00.01.0 000.01. 2. 05.11.5 .1.02.0 2.0 1.0003		Honorarium Narsum Pembahas,Moderato r,Pembawa acara dan panitia	Jumlah Tim Pelatihan	Orang/Ha ri	5	Rp 14.800.000	2	Rp 2.250.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.2.15. 2.15.0. 001. 2.06.01 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kompone n intalasi listrik	Jenis	6	Rp 14.086.000	6 Jenis	Rp 14.002.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.06.01 .5.1.02. 0 1.01.00 31.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	6	Rp 14.086.000	6 Jenis	Rp 14.086.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.06.02 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian peralatan kebersihan kantor dan ATK	Tahun	1	Rp 36.269.500	3 Bulan	Rp 22.370.800	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.06.02 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	23	13.632.000	13	Rp 7.132.800	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 06.02.5 .1.02.0		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Jumlah Kertas dan Pengcoveran	Jenis	10	RP 5.927.500	10	Rp	APBD KOTA		

1. 01.002 5.											
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 06.02.5 .1.02.0 1. 01.003 6		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		jenis	1	3.370.000	1	Rp 2.056.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 06.02.5 .1.02.0 1. 01.002 0		Belanja Peralatan dan Mesin alat kantor rumah tangga alat pembersih		jenis	4	13.340.000	4	Rp 13.182.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.06.05 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Barang	Jumlah Bahan Cetak	Jenis	12	Rp 14.320.000	12 Jenis	Rp 6.604.850	APBD KOTA		

		Cetakan dan Penggandaan									
2.15.2. 15.0.00 1. 2.06.05 .5.1.02. 0 1.01.00 25		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover	Jumlah Bahan Cetak	Jenis	8	Rp 4.020.000	6	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 06.05.5 .1.02.0 1. 01.003 6.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Bahan Lainnya	Jenis	12	Rp 10.300.000	6	Rp 6.604.850	APBD KOTA		

2.15.2.15.0.001.2.06.06.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Jenis	32	Rp 19.492.000	28 Jenis	Rp 10.930.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.0062.		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Jumlah Surat Kabar	Jenis	32	Rp 19.492.000	29	Rp 10.930.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.07.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Paket	3	Rp 16.230.000	1 Paket	Rp 7.095.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.07		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Jumlah Bahan Kontruksi	Jenis	11	Rp 8.155.000	-	Rp -	APBD KOTA		

.5.1.02.01.001.											
2.15.2.15.0.001.2.06.07.5.1.02.02.01.0029.		Belanja Jasa Tenaga Ahli	Upah Pekerja Bangunan	Orang/Hari	40	Rp 8.075.000	40 Orang/Hari	Rp 7.095.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.08.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum	Jenis	3	Rp 25.305.000	3 Jenis	Rp 24.015.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.0053.		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Jamuan Tamu	Dus	407	Rp 25.305.000	200 Dus	Rp 24.015.000	APBD KOTA		

2.15.2.15.0.001.2.06.09.001.5.1.02.04.01.0001	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	Jenis	3	Rp 386.435.000	3 Jenis	Rp 201.875.164	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.09.001.5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Orang/Hari	309	Rp 187.575.000	309 Orang/Hari	Rp 90.050.164	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.06.09.001.5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang/Hari	1282	Rp 198.860.000	1282 Orang/Hari	Rp 111.825.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.05 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pengadaan Mebel	Pengadaa n Mebel	Paket	2	Rp 47.005.000	1 Pake t	Rp 41.360.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .000.0 1.0000. 01.2. 07.05.5 .2.02.0 5. 02.000 1.		Belanja Modal Mebel	Jumlah Belanja Modal	Jenis	4	Rp 44.505.000	1	Rp 41.360.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.2.02. 07.5.1. 02.01.0 1.0000 5		Belanja Modal alat Kesehatan umum lainnya	Jumlah belanja modal	kegiatan	1	Rp 2.500.000	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Hardware Komputer	Unit	12	Rp 253.845.000	5 Unit	Rp 253.380.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06 .5.1.02. 0 1.01.00 29.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	Jumlah Belanja bahan computer	Jenis	3	Rp 8.000.000	-	Rp 8.000.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06 .5.2.02. 0 5.01.00 05.		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Jumlah Belanja Alat Kantor Lainnya	Unit	1	Rp 180.000	1	Rp 180.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06 .5.2.02. 0		Belanja Modal alat kantor lainmnya	Jumlah alat kantor lainnya	Unit	5	Rp 191.500.000	-	Rp 191.100.000	APBD KOTA		

5.02.00 05.											
2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06 .5.2.02. 0 5.02.00 05.		Belanja modal alat rumah tangga lainnya	Jumlah Belanja Alat rumah ta ngga lainnya	Jenis	1	Rp 6.500.000	-	Rp 6.500.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06 .5.2.02. 0 5.02.00 06.		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jumlah Belanja Home Use	Jenis	1	Rp 510.000	1	Rp 500.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 07.06.5 .2.02.0 6. 01.000 1.		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Jumlah Peralatan	Jenis	1	Rp 8.520.000		Rp 8.500.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 07.06.5 .2.02.1 0. 01.000 1.		Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Jumlah Personal telephone	Unit	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.475.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 07.06.5 .2.02.1 0. 02.000 3.		Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Jumlah Peralatan Computer	Jenis	2	Rp 17.500.000	1	Rp 17.500.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.07.06 .5.2.02. 1 0.02.00 05.		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Jumlah Belanja Peralatan Computer /PC	Unit	2	Rp 18.635.000	-	Rp 18.625.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 4.780.314.740		Rp 3.298.165.825	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.2.08. 01.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANGURUSA N PEMERINTAHANDA ERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Belanja Materai	Lembar	970	Rp 970.000	970L emb ar	Rp 612.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.01 .5.1.02. 0 1.01.00 27.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Jumlah Belanja Materai @10000	Lembar	970	Rp 970.000	970 lemb ar	Rp 970.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.02 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayar an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 3.442.114.940	6 Bula n	Rp 1.629.971.765	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.02 .5.1.02. 0 2.01.00 55.		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pemuatan Publikasi Kinerja di Media Cetak Lokal Spesifikas i : Media Cetak Lokal	Per Tayang	50	Rp 30.000.000	10 Per Taya ng	Rp 15.000.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.02 .5.1.02. 0 2.01.00 59.		Belanja Tagihan Telepon	Belanja jasa telepon Spesifikas i : Jastel SL JJ	Per Detik	241	Rp 4.967.440	-	Rp 376.314	APBD KOTA		

2.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0061.		Belanja Tagihan Listrik	Belanja jasa listrik Spesifikasi : PLN (Siaran Pers No : 004.Pers/04/SJI/2020, Tgl 2 Jan 2020)	Kwh	1936091,36	Rp 3.251.347.500	1585316,36	Rp 1.540.597.107	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0063.		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Belanja jasa internet Spesifikasi : Paket (Place market rata-rata 100 mbps)	Per Bulan	168	Rp 155.800.000	6 Bulan	Rp 73.998.344	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.08.03.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran TKS	Bulan	12	Rp 1.613.880.000	6 Bulan	Rp 812.120.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.03 .5.1.02. 01. 01.002 8.		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jumlah Pembayar an TKS	org	103	Rp 613.875.200	-	Rp 386.868.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.2.08. 03.5.1. 02.02.0 1.0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Honorari um Pengelola Jasa Administra si Keuangan dan Pelaporan Spesifikas i : Non PNS	Orang/Ha ri	12736	Rp 68,640.000	8482 Oran g/Ha ri	Rp 25.020.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.03 .5.1.02. 0 2.01.00 30.		Belanja Jasa Tenaga kebersihan	Jasa kebersiha n kantor	Orang/Ha ri	4339	Rp 69.480.000	430 Oran g/Ha ri	Rp 60.720.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.08.04 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayar an Asuransi dan Upah THL	Bulan	12	Rp 811.850.200	6 Bula n	Rp 472.640.211	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .00.0 1.0000. 01.2. 08.04.5 .1.02.0 2. 01.002 6.		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Belanja Jasa	Bulan	12	Rp 631.875.200	6 bln	Rp 368.868.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .00.0 1.0000. 01.2. 08.04.5 .1.02.0 2. 01.007 7.		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	Jumlah Jasa Pelayana n	Bulan	12	Rp 156.000.000	12	Rp 74.828.160	APBD KOTA		

2.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.02.02.02.0006.		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Jumlah Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan NON PNS	Bulan	12	Rp 23.975.000	6 Bulan	Rp 10.944.051	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.09.02.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas	Unit	38	Rp 535.929.000	22 Unit	Rp 347.822.200	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.000.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Servis/ Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	Unit/Tahun	22	Rp 304.871.000	22 Unit/Tahun	Rp 142.091.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 09.02.5 .1.02.0 3. 02.003 7		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Barang	Servis/Pe meliharaa n Kendaraa n Bermotor Barang	Unit/Tah un	22	Rp 151.198.000	22 Unit /Tah un	Rp 142.597.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 09.02.5 .1.02.0 3. 02.003 8.		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Servis/Pe meliharaa n Kendaraa n Bermotor Beroda Dua	Unit/Tah un	22	Rp 79.860.000	22 Unit /Tah un	Rp 63.134.200	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.09.06 .	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjuta n	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	48	Rp 24.810.000	32 Unit	Rp 9.090.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 1. 2.09.06 .5.1.02. 0 3.02.01 17.		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-peralatan unmit peralatan komputer	Pemeliharaan peralatan komputer	Unit/Tahun	10	Rp 6.900.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.09.06 .5.1.02. 0 3.02.01 21.		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC ruangan	Unit/Tahun	12	Rp 9.150.000	12 Unit /Tahun	Rp 3.840.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.09.06 .5.1.02. 0 3.02.04 05.		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Pemeliharaan Komputer PC/Notebook	Unit/Tahun	10	Rp 8.760.000	5	Rp 5.250.000	APBD KOTA		

2.15.2.15.0.001.2.09.09.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi kantor dinas perhubungan	kegiatan	2	Rp 90.277.956	2 kegiatan	Rp 89.633.305	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.02.03.03.001.		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Biaya pemeliharaan gedung kantor	kegiatan	2	Rp 90.277.956	1 Paket	Rp 89.633.305	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.001.2.09.11.	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Non Urusan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAEERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Komunikasi dan CCTV	Paket	2	Rp 49.920.000	1 Paket	Rp 27.628.500	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 09.11.5 .1.02.0 2.0 1.0028.		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jumlah Jasa Tenaga pelayana n	kegiatan	2	Rp 49.800.000	1	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1. 2.09.11 .5.1.02. 01.0 1.0029		Belanja Tenaga Ahli	Belanja tenaga kegiatan	kegiatan	1	Rp 120.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 1.	Tercapainya Kwalitas Pelayanan Angkutan Umum dan Terpenuhiya Kwalitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp 3.926.813.227		Rp 1.574.802.293			

2.15.2. 15.0.00 2. 2.01.01 .	Terpenuhi a Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksana an Peyusuna n Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dok	1	Rp 36.538.750	1 Dok	Rp 25.701.900	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.01.01 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	7	Rp 160.000	7 Jenis	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .00.0 1.0000. 02.2. 01.01.5 .1.02.0 1. 01.002 5.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Kertas dan Pengcover an	Jenis	2	Rp 1.462.000	-	Rp 676.900			

2.15.2. 15.0.00 2. 2.01.01 .5.1.02. 0 1.01.00 32.		Belanja Alat bahan untuk perlengkapan dinas	Jumlah bahan untuk perlengka pan kantor	jenis	2	Rp 7.175.000	-	Rp 7.125.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2.08 .01.5.1. 02.01.0 1.0036.		Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Bahan Lainnya	Jenis	1	Rp 3.641.750	1 Jenis	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.01.01 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman lapangan	Snacklap angan	Dus	302	Rp 6.160.000	302 Dus	Rp 4.193.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 09.02.5 .1.02.0 3. 02.003		Belanja Modal Peralatan Studio video dan film	Belanja Modal Peralatan Studio video dan film	unit	7	Rp 17.940.000	7 unit	Rp 17,,900.000	APBD KOTA		

6											
2.15.2.15.0.002.02.01.	Terpenuhi a Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pembanguna n Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembang unan Prasarana Jalan di Jalan Kabupate n/ kota	Jenis	1	Rp 271.533.400	1 Jenis	Rp 35.331.502	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00.01.000.02.2.02.01.5.1.02.01.01.002.9.		Belanja tenaga ahli	Belanja tenaga ahli	kegiatan	1	Rp 30.000.000	-	Rp 17.500.658	APBD KOTA		
.15.2.15.0.00.0.00.01.000.02.		Belanja modal alat rumah tangga lainnya	Belanja modal alat rumah tangga	kegiatan	1	Rp 2.700.000	-	Rp			

2. 02.01.5 .1.02.0 1. 01.000 6			lainnya								
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.01 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	13	Rp 2.912.000	-	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.01 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Kertas dan Pengcover an	Jenis	3	Rp 1.010.000	-	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.01 .5.1.02. 0 1.01.00 27.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Materai tempel Spesifikas i : bea @10000	Lembar	35	Rp 350.000	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 02.01.5 .1.02.0 1. 01.003 1.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Jumlah jenis alat listrik	Jenis	5	Rp 212.300.000	-	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 01.2. 08.01.5 .1.02.0 1. 01.003 6.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Bahan Lainnya	Jenis	1	Rp 3.561.400	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.01 .5.2.02. 1 8.01.00 01.		Belanja Modal Rambu lalu lintas	Belanja Modal Rambu lalu lintas	Unit	4	Rp 18.700.000	-	Rp 17.830.844	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2.2.02. 02.	Terpenuhi a Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Penyediaan PerlengkapanJalan di JalanKabupaten/Ko ta	Penyediaa n Perlengka pan Jalan di Kabupate n/ Kota	Jenis	4	Rp 1.790.464.500	1 Jenis	Rp 388.450.220	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.02 .5.1.02. 0 1.01.00 02.		Belanja Bahan- bahan bangunan kontruksi	Belanja Bahan- bahan bangunan kontruksi	kegiatan	5	Rp 236.204.500	4	Rp 234.890.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 02.02.5 .1.02.0 1. 01.001 0.		Belanja Bahan-isi tabung gas	Jumlah Penyediaa n isi tabung gas	unit	5	Rp 2.100.000	10	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.02		Belanja Alat/Bahan lain nya	Jumlah bahan lainnya	Jenis	5	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	APBD KOTA		

.5.1.02.0 1.01.00 12.											
2.15.2.15.0.00 2. 2.02.01 .5.1.02.0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor	Jumlah atk	Jenis	3	Rp 1.956.400	1	Rp 1.866.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 2. 2.02.02 .5.1.02.0 1.01.00 26.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas	Jumlah kertas cover	kegiatan	2	Rp 1.013.000	2	Rp 1.003.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 2. 2.02.02 .5.1.02.0 1.01.00 27.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Materai tempel Spesifikasi : bea @10000	Lembar	12	Rp 120.000	12	Rp 120.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Peralatan Komputer	Jenis	1	Rp 1.500.000		Rp 1.300.000	APBD KOTA		

02.02.5 .1.02.0 1. 01.002 9.											
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 02.02.5 .1.02.0 1. 01.003 0.		Belanja Alat/kegiatan kantor lainnya	Kegiatan kantor lainnya	Jenis	2	Rp 1.442.200	2	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 02.02.5 .1.02.0 1. 01.003 6.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat kantor Lainnya	Jenis	2	Rp 1.549.300	-	Rp 710.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 02.02.5 .1.02.0		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Jumlah jenis perlengka pan dinas	Jenis	5	Rp 4.800.000	-	Rp 4.770.000	APBD KOTA		

1. 01.003 2											
2.15.2. 15.0.00 .000.01 .0000.0 2.2. .02.02. 5.1.02. 01. 01.006 4.		Belanja makanan dan minuman	Makan dan minum	dus	1000	Rp 35.665.000	-	Rp 10.430.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 02.02.5 .2.02.0 1. 03.000 6.		Belanja Modal Mesin Bor	Jumlah mesin bor	Unit	2	Rp 21.850.000	-	Rp 16.850.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 02.02.5		Belanja Modalkomponen rambu rambu	Jumlah kompone n rambu	Unit	5	Rp 39.740.000	-	Rp 39.407.220	APBD KOTA		

2.02.03.01.0008.											
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.02.18.01.0006.		Honorarium penyuluhan atau pendampingan	Honorarium penyuluhan atau pendampingan	kegiatan	2	Rp 24.000.000	1	Rp 12.000.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.02.18.01.0022.		Belanja jasa tenaga perhubungan	Belanja jasa tenaga perhubungan	kegiatan	2	25.014.000	2	24.794.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.002.2.02.03.	Terpenuhi a Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persen	30	Rp 54.503.500	25 Persen	Rp 4.666.000	APBD KOTA		

		Jalan									
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 02.03.5 .1.02.0 1. 01.000 1. 2.02.03 .5.1.02. 0 1.01.00 04.		Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi	Jumlah jenis bahan kontruksi	Jenis	5	Rp 6.745.000	4	Rp 3.085.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.03 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	14	Rp 169.000	4	Rp 157.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.03 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Alat Cover	Jenis	5	Rp 227.500	5	Rp 224.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.03 .5.1.02. 0 1.01.00 58.		Belanja Makanan dan minuman	Makan dan minuman	dus	320	Rp 11.200.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.02.03 .5.1.02. 0 1.01.02 9.		Belanja Tenaga Ahli	Tenaga ahli	kegiatan	2	Rp 6.600.000	1	Rp 1.200.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 02.03.5 .2.02.1 8.		Belanja Pemeliharaan 1 Rambu Bersuar	Belanja Pemelihar aan Rambu Bersuar	Unit	4	Rp 29.562.000	-	Rp -	APBD KOTA		

01.000 1.											
2.15.2. 15.0.00 2. 2.03.04 .	Terpenuhi a Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rehabilita si dan Pemelihara aan Terminal (Fasilitas Utama dan Penduku ng)	Persen	80	Rp 24.360.250	28,8 Perse n	Rp 5.601.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 03.04.5 .1.02.0 1. 01.002 4.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	6	Rp 1.545.750	6	Rp 1.492.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 03.04.5 .1.02.0 1. 01.002 5.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Alat Cover	Jenis	2	Rp 4.468.500	-	Rp 1.309.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 03.04.5 .1.02.0 1. 01.002 7.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Materai tempelSp esifikasi : bea @10000	Lembar	72	Rp 720.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 03.04.5 .1.02.0 1. 01.003 1.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Jumlah Alat Kantor Listrik	Jenis	8	Rp 4.000.000	8	Rp 3.200.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 03.04.5 .1.02.0 3. 03.000 1		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung	M2/Tahun	-	Rp 11.076.000	-	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 03.04.5 .1.02.0 3. 03.000 1		Belanja mebel	kursi	6	unit	3.000.000		2.800.000			
2.15.2. 15.0.00 2.2.03. 05.	Terpenuhi nya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Peningkatan Kapasitas SDMPengelola Terminal Tipe C	Peningkat an Kapasitas SDMPeng elola Terminal Tipe C	Kawasan	1	Rp 38.554.700	1 Kaw asan	Rp 15.039.950	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.03.05 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	13	Rp 4.482.800		Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 03.05.5 .1.02.0 1. 01.003 6.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Alat/Bah an Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	1	Rp 7.116.900	1	Rp 6.714.950	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 00.01.0 000.02. 2. 03.05.5 .1.02.0 1. 01.005 8.		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Belanja Makan dan Minum	Dus	100	Rp 14.490.000	81	Rp 7.140.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.03.05 .5.1.02. 0 3.02.00 35.		Belanja Peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya	Belanja Peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya	jenis	4	Rp 1.785.000	3	Rp 1.185.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2.2.04. 02.	Tercapainya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Koordinasi danSinkronisasi PengawasanPelaksa naan IzinPenyelenggaraan danPembangunan FasilitasParkir KewenanganKabupa ten/Kota	Pengelola an parkir di tepi jalan umumnya ng teratur, nyaman dan aman	Lokasi	32	Rp 180.408.000	32Lo kasi	Rp 73.980.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.04.02 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	3	Rp 719.500	3 Jenis	Rp 204.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.04.02 .5.1.02. 0 1.01.00 26.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover	Kegiatan Kantor- kertas dan cover	Buku	-	Rp 938.500	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.04.02 .5.1.02. 0 1.01.00 36.		Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Belanja Alat/baha n untuk kegiatan kantor lainnya	kegiatan	1	Rp 74.000.000	1	73.980.000			
2.15.2. 15.0.00 2. 2.04.02 .5.1.02. 0 1.01.00 09.		Belanja modal asset personal computer	komputer	unit	1	Rp 8.750.000					
2.15.2. 15.0.00 2. 2.04.02 .5.1.02. 0 1.01.00 09.		Belanja Modal asset tidak berwujud lainnya	Belanja Modal asset tidak berwujud lainnya	kegiatan	1	96.000.000					

2.15.2. 15.0.00 2.2.05. 01.	Tercapainya Kwalitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Penyediaan Sarana danPrasarana PengujianBerkala KendaraanBermotor	Penyedia prasarana PKB	Paket	2	Rp 466.198.750	1 Pake t	Rp 304.535.483	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.01.5 .1.02.0 1. 01.000 9.		Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Isi Tabung	Jenis	1	Rp 1.800.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .1.02.0 1. 01.001 2.		Belanja Bahan- Bahan Lainnya	Gordyn	Meter	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.01 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	13	Rp 2.572.000	13 Jenis	Rp 2.500.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .1.02.0 1. 01.002 6.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Penjilidan dan Penggand aan	Lembar	100	Rp 75.640.000	100	Rp 75.400.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.01.5 .1.02.0 1. 01.002 7.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Jumlah Alat/Bah an Benda Pos	Jenis	3	Rp 408.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.01		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rapat Snack Rapat	Dus	10	Rp 5.320.000	5	Rp 4.440.000	APBD KOTA		

.5.1.02.0 1.01.00 52.											
2.15.2.15.0.00.00.01.000.02.2.05.01.5.1.02.01.01.0064.		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jumlah Pakaian PDL	Steel	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00.01.000.02.2.05.01.5.1.02.02.01.0035.		Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Pemindahan alat uji	Kegiatan	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00.01.000.02.2.05.01.5		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Sertifikasi ISO	Kali	1	Rp 357.000	-	Rp -	APBD KOTA		

.1.02.0 2. 01.003 6.											
2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.01 .5.1.02. 0 2.01.00 41.		Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Belanja tambah daya listrik	Kwh	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .1.02.0 2. 01.004 6		Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Pemelihara aan dan Pengemba ngan Aplikasi	Paket	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .1.02.0 2.		Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi	Kegiatan	1	Rp 77.500.000	-	Rp -	APBD KOTA		

01.0050.											
2.15.2.15.0.00.01.0000.02.2.05.01.51.02.02.08.0009.		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jumlah Belanja Jasa Konsultasi	Paket	1	Rp 20.000.000	1,00	Rp 20.000.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00.01.0000.02.2.05.01.51.02.02.01.0063.		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Belanja internet gedung PKB Baros	Kegiatan	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00.01.0000.02.2.05.01.51.02.02.01.0063.		Belanja Jasa KonsultansiPengawasan Rekayasa-JasaPengawas PekerjaanKonstruksi Bangunan Gedung	Belanja jasa konsultasi gedung pkb	Pengawasan	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

02.08.0 019.											
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .2.02.0 3. 02.000 5.		Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	Belanja alat perkakas kantor pkb	Unit	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .2.02.0 3. 03.000 1.		Belanja Modal Alat Ukur Universal	Alat Uji PKB	Unit	1	Rp 125.122.500	-	Rp 124.400.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2.		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	CCTV, Mesin, Sound	Paket	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

05.01.5 .2.02.0 5. 01.000 5.											
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .2.02.0 5. 02.000 1.		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Perjalana n Dinas	Orang/ha ri	20	Rp 12.480.000	4	Rp 2.420.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.01.5 .2.02.0 1. 03.000 7.		Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	Jumlah Modal Pemelihar aan	Jenis	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.01.5 .2.02.0		Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Jumlah Modal Perkakas Bengkel	Jenis	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	APBD KOTA		

3. 01.000 3.											
2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.01 .5.2.02. 0 5.01.00 05.		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Jenis Alat Kantor Lainnya	Unit	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.01.5 .2.04.0 2. 01.000 4.		Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	Irigasi PKB	Kegiatan	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.04 .	Tercapainya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan	Penyedia bukti lulus uji	Paket	2	Rp 466.198.750	1 pake t	Rp 304.535.483	APBD KOTA		

		Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.04 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	19	Rp 6.088.000	6	Rp 2.450.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.05.04 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover	Jumlah Penjilidan dan Penggand aan	kegiatan	2	Rp 3.222.000	1610 0 Lem bar	Rp 3.600.000	APBD KOTA		
00.01.0 000.02. 2. 05.04.5 .1.02.0 1. 01.003 6.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Alat/Bah an Cetak	Jenis	3	Rp 11.936.850.00 0	1	Rp 6.000.000	APBD KOTA		

00.01.0 000.02. 2. 05.04.5 .2.02.1 0. 01.000 2.		Belanja makan minum	Belanja makan minum	dus		Rp 11.400.000	-	Rp 2.800.000	APBD KOTA		
00.01.0 000.02. 2. 05.04.5 .2.02.1 0. 02.000 3.		Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Jumlah Belanja Modal Peralatan Computer	Unit	1	Rp 11.500.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.04.5 .1.02.0 1. 01.004 3.		Belanja Natura dan Pakan-Natura	Penyediaa n Air Mineral Galon	Galon	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2.2.05. 07.	Tercapainya Kwalitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Pemeliharaa n Sarana danPrasarana PengujianBerkala KendaraanBermotor	Persentas e alat yang terkalibra si dan pemelihar aanperala tan PKB Mekanik	Persen	100	Rp 37.645.000	90,3 5	Rp 26.350.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.07.5 .1.02.0 1. 01.005 2.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Belanja Makan dan Minum			Rp 1.925.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.07.5 .1.02.0 1. 01.005 8.		Belanja pakaian dinas PDL	Jumlah pakaian pdl	stell	22	Rp 11.520.000	-	Rp 11.480.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 05.07.5 .2.02.1 0. 01.000 2.		Belanja Modal Peralatan Computer	Jumlah Belanja Modal peralatan komputer			Rp 7.300.000	-	Rp 12.900.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 05.07.5 .1.02.0 1. 01.002 4.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	-	Rp 225.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .	Terpenuhi nya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Pengadaa n, Pemasang an, Perbaikan dan Pemelihara aan Perlengka pan Jalan dalam	Kegiatan	4	Rp 282.794.400	3 Kegi atan	Rp 127.600.900	APBD KOTA		

		Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								
2.15.2.15.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.004.		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan bakar kendaraan bermesin Spesifikasi : mesin bensin	Liter	1390	Rp 236.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.0024.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	5	Rp 607.600	5 Jenis	Rp 607.600	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.001.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Jumlah Alat/Bahan Cover	Jenis	1	Rp 546.000	-	Rp 546.000	APBD KOTA		

25.											
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 1.01.00 26.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Penggandaan/Fotocopy Spanduk	Lembar, M2	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 1.01.00 27.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Jumlah Belanja Alat/Bahan Kantor-Benda Pos	Jenis	1	Rp 192.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 1.01.00 29.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Jumlah Belanja Alat/Bahan Komputer	Jenis	1	Rp 1.612.800	1	Rp 1.612.800	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	Jumlah Belanja Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	10	Rp 11.490.000	1	Rp 1.083.000	APBD KOTA		

0 1.01.00 36.		Kantor Lainnya									
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack Rapat	Dus	600	Rp 9.310.000	302	Rp 4.690.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 1.01.00 53.		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Makan / Prasmana n VIP	Porsi	90	Rp 9.100.000	-	Rp 975.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 2.01.00 04.		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorari um Forum Kerukuna n Umat Beragama (FKUB) : Keagama an/Keper cayaan Masyarak at di Kota	Orang/Ke giatan	26	Rp 35.540.000	-	Rp 35.540.000	APBD KOTA		

			Sukabumi Spesifikasi : Anggota Honorarium Pengurus DEKRAN ASDA Spesifikasi : Pengurus : Ketua Harian								
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.02 .5.1.02. 0 2.02.00 04.		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Jumlah Honorarium	Orang/Kegiatan	13	Rp 17.000.000	-	Rp 3.300.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .1.02.0 2. 01.002		Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Konsultasi Pendataan Kinerja Jalan	Orang/Paket/Pekerjaan	1	Rp 90.000.000	-	Rp -	APBD KOTA		

9.											
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .1.02.0 2. 01.003 1.		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamana n	Paket	1	Rp 1.000.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .1.02.0 2. 01.005 5.		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Jumlah Belanja Jasa Iklan/Rek lame			Rp 4.000.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2.		Belanja Sewa Hotel	staf Golongan III/Golon gan II/KK/TH L	Per Kamar	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

06.02.5 .1.02.0 2. 05.004 3.			Spesifikasi : Superior								
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .1.02.0 3. 02.003 6.		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	Servis Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .1.02.0 3. 02.003 8.		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Roda Dua	Servis Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 (enam)	Unit/Tahun		Rp 14.560.000		Rp 6.000.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .2.02.1 8. 01.000 2		Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	Rambu standar portabel	Unit	15	Rp 75.000.000	-	Rp 73.246.500	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 06.02.5 .2.02.0 4. 01.000 1.		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalana n Dinas	Orang/Ha ri	20	Rp 12.600.000	-	Rp -	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.06.04 .	Terpenuhi nya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pengawasan dan Pengendalian	Pengawas an dan Pengenda lianEfekti vitas Pelaksana anKebijak an untuk Jalan Provinsi	Kegiatan	1	Rp 15.384.000	1 Kegi atan	Rp 7.700.000	APBD KOTA		

		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1.02.01.01.0024.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	7	Rp 197.500	-	Rp -	APBD KOTA		
00.01.000.02.2.06.04.5.1.02.01.01.0025.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Jumlah Alat/Bahan Cover	Jenis	1	Rp 1.046.500	-	Rp -	APBD KOTA		
00.01.000.02.2.06.04.5.1.02.01.01.005		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Jumlah Makan dan Minum	Dus	30	Rp 14.140.000	15	Rp 7.700.000	APBD KOTA		

8.											
2.15.2. 15.0.00 2.2.08. 01.	Tercapainya Kwalitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Pengadaan dan pemasangan perlengkaopan jalan	Pengadaa n dan pemasang an perlengka opan jalan	Kegiatan	1	Rp 268.794.100	1 Kegi atan	Rp 117.111.400	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.01 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	11	Rp 2.425.800	11 jenis	Rp 2.408.400	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.01 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Alat/Bah an Cover	Jenis	2	Rp 1.925.000	1	Rp 1.873.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.01		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- benda pos	Benda pos	Lembar	20	Rp 200.000	5278	Rp 200.000	APBD KOTA		

.5.1.02.0 1.01.00 26.											
2.15.2.15.0.00 2. 2.08.01 .5.1.02.0 1.01.00 29.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Jumlah Alat/Bahan Komputer	Unit	2	Rp 2.800.000	2	Rp 2.800.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 2. 2.08.01 .5.1.02.0 1.01.00 32.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Jumlah Alat/Bahan Perlengkapan Dinas	Jenis	4	Rp 8.250.000	-	Rp 8.250.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 2. 2.08.01 .5.1.02.0 1.01.00 35.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Jumlah Cendera Mata	Jenis	4	Rp 800.000	-	Rp 800.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00 .0. 00.01.0 000.02.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	Jumlah Belanja Alat/Bahan Kegiatan	Unit/Tahun	1	Rp 5.690.000	-	Rp 3.690.000	APBD KOTA		

2. 08.01.5 .1.02.0 3. 02.003 6.		Kantor Lainnya	Kantor Lainnya								
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.01 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rapat Snack Rapat	Dus	10	Rp 8.400.000	10,0 0	Rp 8.400.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0.00.0 1.0000. 02.2. 08.01.5 .1.02.0 1. 01.005 8.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan dan Minum	Dus	40	Rp 20.090.000	32	Rp 16.100.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 .0. 00.01.0 000.02. 2. 08.01.5 .1.02.0 2.		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Paket Kegiatan Rapat/Pe rtemuan di Luar Kantor	Orang/Pa ket	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

05.0009											
2.15.2.15.0.00.00.01.000.02.2.08.01.51.02.02.12.0002.		Belanja Sosialisasi	toolkit seminar/ sosialisasi /pelatihan Spesifikasi : skala kecil	Paket	2	Rp 5.950.000	-	Rp 5.950.000	APBD KOTA		
2.15.2.15.0.00.2.2.08.04.	Tercapainya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAMPENYELENGGA RAAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)/Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota	SAUM	Kegiatan	4	Rp 37.152.700	2 Kegiatan	Rp 13.243.600	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	8	Rp 3.622.500	-	Rp 2.440.600	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Alat/Bah an Cover	Jenis		Rp 694.400		Rp 694.400	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 1.01.00 26.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Penggand aan/Foto copy Spanduk	Lembar	-	Rp 4.182.500	-	Rp 3.893.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 1.01.00 29.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan kantor lainnya	Jumlah Alat/Bah an Kegiatan kanror lainnya	Unit	2	Rp 6.397.700	1	Rp 3.893.000	APBD KOTA		

2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 1.01.00 52.		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack Rapat	Dus	500	Rp 12.950.000	296	Rp 3.675.000	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 3.02.00 36.		Belanja Hibah uang kepada badan	Belanja Hibah uang kepada badan	kegiatan	1	Rp 10.000.000	1	Rp	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.14.02 .	Tercapainya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan/Dinas Perhubungan/PROG RAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Pengawas an Pelaksana an izin Peyelengg araan Angkutan dan Pelaksana n Uji Petik Kendaraa n	Kegiatan	1	Rp 7.102.400	1 Kegi atan	Rp 6.122.000	APBD KOTA		

		Kabupaten/Kota									
2.15.2. 15.0.00 2. 2.14.02 .5.1.02. 0 1.01.00 24.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	3	Rp 1.305.600	-	Rp 1.290.500	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.08.04 .5.1.02. 0 1.01.00 25.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Jumlah Alat/Bahan Cover	Jenis	3	Rp 914.500	-	Rp 907.500	APBD KOTA		
2.15.2. 15.0.00 2. 2.14.02 .5.1.02.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Buku Tilang Spesifikasi : Perhubun	Lembar	-	Rp -	-	Rp -	APBD KOTA		

0 1.01.00 26.			gan Penggand aan/Foto copy Spanduk sticker Larangan Parkir liar								
2.15.2. 15.0.00 2. 2.14.02 .5.1.02. 0 1.01.00 36.		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Alat/Bah an Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	3	Rp 4.882.300	-	Rp 3.924.000	APBD KOTA		

Sumber: analisis

Pada tabel 2.1 tentang Evaluasi Renja s/d Triwulan II dapat terlihat capaian penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dari total Pagu anggaran Sebesar Rp. 19.086.530.828 telah terserap sebesar Rp. 10.189.356.861 dengan persentasi 53%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024– 2026 yang dituangkan kedalam dokumen-dokumen perencanaan SKPD dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, dan sekarang di rencana strategis 2024-2026 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi telah memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan.

Capaian indikator Kinerja Utama diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, berikut Target dan tingkat capaian IKU tahun 2024 :

(T.C. 30)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n)	(thn n+1)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													14
1	Persentase Fasilitas Perlengkapan jalan	PM Perhubungan No 44 th 2019	Persentase fasilitas perlengkapan jalan : Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL siap ATCS, Cermin Tikungan	85%	85%	85%	85%	100%	21%	85%	85%	85%	
	a. Rambu			100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	
	b. Marka Jalan			100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	
	c. APILL/ATCS			100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	
	d. Cermin Tikungan			88%	88%	88%	88%	100%	25%	88%	88%	88%	
	e. Pagar Pengaman			23%	23%	23%	23%	100%	25%	23%	23%	23%	
	f. PJU			97%	97%	97%	97%	100%	0	97%	97%	97%	
2	Kawasan Off Street Parkirng		Terciptanya Peningkatan Pelayanan Perparkiran Tepi Jalan	-	-	1 Gedung	-	-	-	100%	100%	100%	
3	SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)	PM Perhubungan No 44 th 2019	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Jalan	-	-	-	-	1 Koridor	-	100%	100%	100%	

Sumber : Hasil Analisis

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-Isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi diantaranya:

- a. Perlunya pengembangan SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) di Sukabumi.
- b. Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, yang mengakibatkan bercampurnya lalu lintas menerus dan lalu lintas lokal.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam Kota.
- d. Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan *demand*, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan.
- e. Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
- f. Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan kota lama dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan.

Dalam menemukan isu-isu strategis itu sendiri diperlukannya solusi yang dapat menindaklanjuti penanganan isu-isu tersebut antara lain:

1. Pembangunan SAUM sudah termasuk ke dalam target RPJMD Kota Sukabumi tahun 2021 akan dilakukan perencanaan pembangunan halte BRT dan Implementasi di tahun 2021.
2. Kebijakan Tol Bocimi. Salah satu pendukung Program Nasional dalam pembangunan Transportasi yaitu dengan adanya pembebasan lahan di wilayah Kota Sukabumi.
3. Sosialisasi dengan pengguna jalan atau masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas.

4. Perubahan jaringan Trayek atau Re-routing, belum dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan adanya perilaku dari Operator angkutan (Organda/ supir dan pengguna).
5. Pengawasan secara bertahap terhadap fasilitas Lalu Lintas (dengan adanya pengecekan langsung secara rutin dan pemantauan dari CCTV).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengembalikan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya.

Pada anggaran perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 337,956,750,- (Tiga Ratus Tiga Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah) apabila anggaran dari murni 2024 sebesar Rp. 20.239.494.193 (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari pagu murni 2024.

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE LOMPO K SASAR AN	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TA RGE T	PAG U INDIK ATIF (Rp)	
							2024	SEBEL UM	SESU DAH	RKP D 2024	APB D 2024				RKPD PERUBAHA N 2024	N ASION AL				DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN								16,719,289, 897.00	18,851,474, 828.00	20,577,450, 943.00	3,858,161,046. 00							
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16,719,289, 897.00	18,851,474, 828.00	20,577,450, 943.00	3,858,161,046. 00							0.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNG AN							16,719,289, 897.00	18,851,474, 828.00	20,577,450, 943.00	3,858,161,046. 00							0.00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	14,090,528, 697.00	16,312,680, 966.00	16,128,418, 966.00	14,090,528,69 7.00							0.00	
	2.15.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8,615,300.0 0	53,400,000. 00	53,400,000. 00	44,784,700.00			-	- -	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Doku men	1 Doku men	1,095,000.0 0	1,092,000.0 0	1,092,000.0 0	-3,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0.00	DINAS PERHUBU NGAN

[illegible]

			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	3 Paket	92,250,000.00	101,440,000.00	101,440,000.00	9,190,000.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0 Orang	10,000,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00	4,800,000.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	407,998,850.00	512,137,500.00	522,637,500.00	114,638,650.00			-	-	-		0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	9,098,500.00	14,086,000.00	14,086,000.00	4,987,500.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	36,271,900.00	36,269,500.00	36,269,500.00	-2,400.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	14,320,950.00	14,320,000.00	14,320,000.00	-950.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	19,492,500.00	19,492,000.00	19,492,000.00	-500.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material																	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,260,000. 00	16,230,000. 00	16,230,000. 00	4,970,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Lapora n	1 Lapora n	25,305,000. 00	25,305,000. 00	35,805,000. 00	10,500,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lapora n	1 Lapora n	292,250,000 .00	386,435,000 .00	386,435,000 .00	94,185,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	102,890,000 .00	300,850,000 .00	350,850,000 .00	247,960,000.0 0			-	-	-	0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	37,040,000. 00	47,005,000. 00	47,005,000. 00	9,965,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	65,850,000. 00	253,845,000 .00	303,845,000 .00	237,995,000.0 0	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Nyomplon g	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN

[illegible]

			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLA/ Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	31,541,600.00	36,538,750.00	36,538,750.00	4,997,150.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	887,278,750.00	1,282,319,312.00	2,935,335,627.00	2,048,056,877.00			-	-	-		0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun</i>				20 Unit	20 Unit	41,853,400.00	271,533,400.00	271,533,400.00	229,680,000.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Gunungparang Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Subangjaya Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Tipar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>				30 Unit	30 Unit	221,805,800.00	402,445,100.00	1,840,464,415.00	1,618,658,615.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	-			0.00	DINAS PERHUBUNGAN

			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Lapora n	1 Lapora n	340,408,000 .00	180,408,000 .00	180,408,000 .00	160,000,000.0 0	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	472,470,700 .00	572,469,650 .00	572,469,650 .00	99,998,950.00			-	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 5.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	366,199,500 .00	466,198,750 .00	466,198,750 .00	99,999,250.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 5.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Doku men	1 Doku men	68,626,000. 00	68,625,900. 00	68,625,900. 00	-100.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 5.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				0 Unit	0 Unit	37,645,200. 00	37,645,000. 00	37,645,000. 00	-200.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota	-				-	-	344,179,400 .00	284,178,100 .00	299,178,100 .00	45,001,300.00			-	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN

	2.15.02.2.0 6.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota				1 Lapora n	1 Lapora n	61,385,000. 00	15,384,000. 00	20,384,000. 00	- 41,001,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 6.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Doku men	1 Doku men	282,794,400 .00	268,794,100 .00	278,794,100 .00	-4,000,300.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	152,864,450 .00	112,862,700 .00	178,088,500 .00	25,224,050.00			-	-	-		0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 8.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraa n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota				1 Lapora n	1 Lapora n	97,154,450. 00	37,152,700. 00	92,152,500. 00	-5,001,950.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN
	2.15.02.2.0 8.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																		
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	55,710,000. 00	75,710,000. 00	85,936,000. 00	30,226,000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS PERHUBU NGAN

	2.15.02.2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	37,102,700.00	7,102,400.00	7,102,400.00	- 30,000,300.00			-	-	-		0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.1 4.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	37,102,700.00	7,102,400.00	7,102,400.00	- 30,000,300.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								16,719,289.897.00	18,851,474.828.00	20,577,450.943.00	3,858,161,046.00							0.00	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengantisipasi berbagai perubahan situasi dan kondisi serta tuntutan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Dengan adanya Perubahan Rencana Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi serta stakeholder terkait.

Semoga melalui Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2024 ini, keberhasilan pencapaian Kinerja Pemerintahan secara umum dapat dicapai dengan lebih baik, terutama pada urusan bidang Perhubungan di Kota Sukabumi.

Q. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemerintah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat inovatif dan respek terhadap aturan-aturan yang ditentukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk diimplementasikan, termasuk dalam tatanan proses perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun pertama dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, yang telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025.

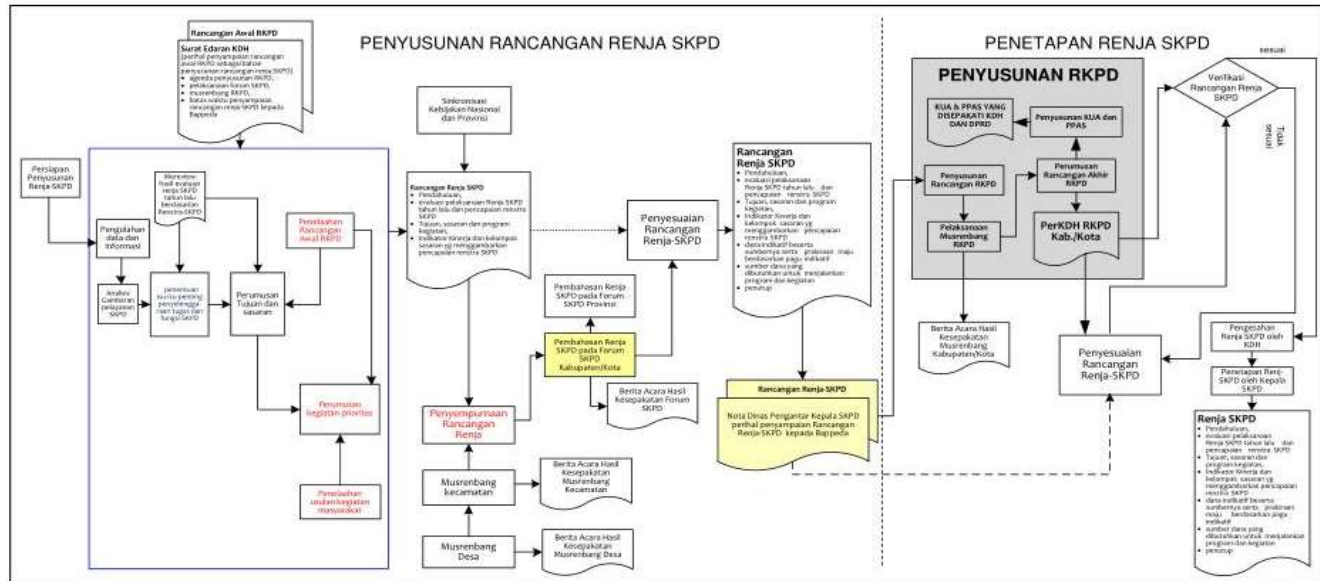
Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengalami perubahan seiring dengan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap mengacu kepada bentuk dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas dan tanggung jawab sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang tersebut meletakkan otonomi seluas-luasnya pada Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 150 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara

berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan sehingga perlu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagai tindak lanjut dari RPD Tahun 2024-2026 dan dokumen RKPD.

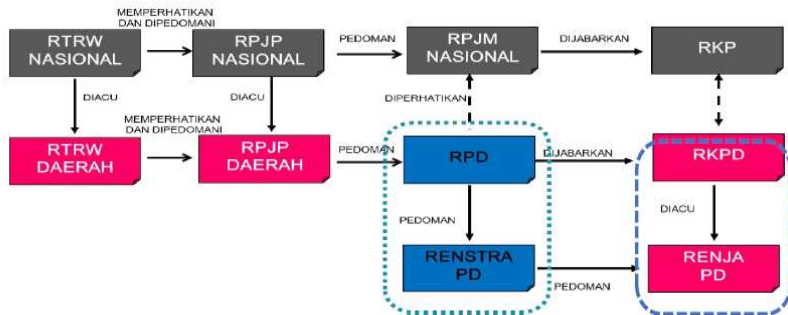
Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial tahun 2024 memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun anggaran, Rencana kerja ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial serta sebagai alat pengukur keberhasilan Dinas dalam mencapai tujuan serta output Kinerja dinas yang telah ditetapkan di awal tahun perencanaan.

Adapun bagan alir penyusunan Renja Dinas Sosial yang di mulai dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial sampai dengan penetapan Renja Dinas Sosial dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :



Sedangkan hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Bagan Alir Keterkaitan antara Renstra OPD dengan RPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 153);
22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
23. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 38);
24. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi tahun 2024 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra;
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial;

4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Sukabumi tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dengan Triwulan II Tahun 2024 (Semester 1) Tahun berkenaan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan

- 3.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2024

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Sasaran pelayanan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok, atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome. Sedangkan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro. Evaluasi dan analisis pencapaian target indikator sasaran kinerja Tahun 2024 sampai dengan semester I yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan target indikator sasaran yang tercantum dalam target kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

Realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kota Sukabumi
Tahun Anggaran 2024 sampai Semester I, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran di Dinas Sosial Kota Sukabumi
Semester I Tahun 2024

NO	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISA SI (%)
1	URUSAN WAJIB PELAYAN AN DASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.927.645.731	2.661.617.006	41,9
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.320.000	30.027.400	51,2
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.404.900,0	97,6
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	1.050.000,0	21,0
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000	2.450.000,0	22,3
6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.320.000	2.122.500,0	63,9
7		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.358.773.581	1.877.193.329	26,9
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.348.656.081	1.875.796.829,0	56,0
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.495.900	-	-
10		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.773.750	1.396.500,0	78,7
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.051.900	-	-
12		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.795.950	-	-
13		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.310.850	2.800.000	65,5
14		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.299.850	1.050.000,0	80,8

NO	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISA SI (%)
15		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.064.000	-	-
16		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.064.000	875.000,0	82,2
17		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	883.000	875.000,0	99,1
18		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.682.000	79.805.000	67,9
19		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.127.000	2.000.000,0	94,0
20		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	58.800.000,0	98,0
21		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	161.555.000	19.005.000,0	11,8
22		Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.531.350	133.446.750	49,0
23		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.561.700	1.920.000,0	34,5
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.445.500	30.831.000,0	52,8
25		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.920.000	8.426.000,0	94,5
26		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.061.650	-	-
27		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.693.000	360.000,0	21,3
28		Penyediaan Bahan/Material	4.000.000	3.999.750,0	100,0
29		Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.890.000	32.445.000,0	59,1
30		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.959.500	55.465.000,0	29,8
31		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.800.000	166.372.000	99,4
32		Pengadaan Mebel	147.500.000	147.272.000,0	99,8
33		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.300.000	19.100.000,0	99,0
34		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.217.800	234.870.597	44,0
35		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.848.000	1.150.000,0	62,2
36		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.298.000	34.869.010,0	22,2
37		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.808.400	81.516.587,0	42,1
38		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.263.400	117.335.000,0	49,7
39		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.010.150	137.101.930	60,8
40		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	121.600.000	54.355.600,0	44,7

NO	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISA SI (%)
		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
41		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	-	-
42		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.572.200	73.408.680,0	98,4
43		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.337.950	9.337.650,0	100,0
44		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.116.090.000	813.160.000	1,37
45		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.190.000	18.710.000	68,8
46		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	27.190.000	18.710.000,0	68,8
47		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.088.900.000	794.450.000	33,7
48		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280.200.000	145.200.000,0	51,8
49		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.200.000	27.250.000,0	49,4
50		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19.600.000	-	-
51		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	713.400.000	603.200.000,0	84,6
52		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.500.000	18.800.000,0	91,7
53		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000		-
54		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	1.500.000		-

NO	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISA SI (%)
		Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
55		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.500.000	-	-
56		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	387.876.000	198.119.000	1,96
57		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	286.685.000	162.984.000	52,6
58		Penyediaan Permakanan	84.255.000	44.830.000,0	53,2
59		Penyediaan Sandang	55.080.000	46.350.000,0	84,2
60		Penyediaan Alat Bantu	13.780.000	13.390.000,0	97,2
61		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.200.000	1.085.000,0	8,2
62		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	75.000.000	28.520.000,0	38,0
63		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	5.850.000	5.850.000,0	100,0
64		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.460.000	975.000,0	17,9
65		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.500.000	14.500.000,0	100,0
66		Pemberian Layanan Kedaruratan	4.680.000	1.165.000,0	24,9
67		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.560.000	130.000,0	8,3
68		Pemberian Layanan Rujukan	13.320.000	6.189.000,0	46,5
69		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	101.191.000	35.135.000	25,1
70		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.060.000	-	-
71		Pemberian Layanan Kedaruratan	2.617.000	-	-
72		Penyediaan Permakanan	24.250.000	7.400.000,0	30,5
73		Penyediaan Sandang	6.750.000	6.600.000,0	97,8
74		Penyediaan Alat Bantu	16.370.000	15.855.000,0	96,9
75		Penyediaan Perbekalan	3.000.000	2.280.000,0	76,0

NO	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISA SI (%)
		Kesehatan di Luar Panti			
76		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	17.172.000	-	-
77		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.125.000	-	-
78		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.057.000	-	-
79		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	3.000.000,0	50,0
80		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.230.000	-	-
81		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.875.000	-	-
82		Pemberian Layanan Rujukan	7.235.000	-	-
83		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.450.000	-	-
84		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	599.458.850	213.579.550	28,6
85		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	8.380.100	1.643.800	13,8
86		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3.974.800	1.643.800,0	41,4
87		Rujukan Anak-Anak Terlantar	937.100	-	-
88		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	3.468.200	-	-
89		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	591.078.750	211.935.750	43,3
90		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	276.860.000	52.167.000,0	18,8
91		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	269.000.000	146.550.000,0	54,5
92		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	32.000.000	-	-
93		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.218.750	13.218.750,0	100,0
94		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	338.070.420	135.587.000	28
95		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	58.308.420	23.200.000	34,4

NO	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISA SI (%)
		Kabupaten/Kota			
96		Penyediaan Makanan	17.680.220	8.000.000,0	45,2
97		Penyediaan Sandang	10.312.200	-	-
98		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	15.635.000	5.000.000,0	32,0
99		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.744.000	10.200.000,0	94,9
100		Pelayanan Dukungan Psikososial	3.937.000	-	-
101		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	279.762.000	112.387.000	22,0
102		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	24.875.000	-	-
103		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	254.887.000	112.387.000,0	44,1
104		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.915.000	6.975.000	14
105		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.915.000	6.975.000	13,7
106		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.975.000	-	-
107		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	17.000.000	6.975.000,0	41,0
108		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.940.000	-	-
TOTAL			7.396.556.001	4.029.037.556	54,47

(Sumber:Laporan Matrik Pengendalian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2024)

Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024 serapan anggaran program dan kegiatan mencapai Rp. 4.029.037.556,00 sekitar 54,47 % dari total anggaran yang mencapai Rp 7.396.556.001,00

Capaian serapan sampai Triwulan II cukup baik sesuai dengan perencanaan penggunaan anggraan dan pelaksanaan program /kegiatan.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) sd. Juni 2024

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100		100	100	100%	100	34,6	41,9
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan program berkualitas dan tepat waktu	Buku	6		6	6	100	100	36,4	51,2
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Renstra	Buku	15		5	5	100%	1	1,0	97,6
		2. Jumlah Dokumen Renja	Buku	15		5	5	100%			
		3. Jumlah Dokumen RKA	Buku	15		5	5	100%			
		4. Jumlah Dokumen DPA	Buku	15		5	5	100%			
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	Buku	9		3	3	100%	2	1,0	21,0

		Jumlah Dokumen RDPPA	Buku	9		3	3	100%			
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Laporan SPM	Buku	15		5	5	100%	6	6,0	22,3
		2. Jumlah Dokumen LKPJ	Buku	15		5	5	100%			
		3. Jumlah Dokumen LPPD	Buku	15		5	5	100%			
		4. Dokumen LKIP	Buku	15		5	5	100%			
		5. Jumlah Dokumen TAPKIN	Buku	15		5	5	100%			
		6. Jumlah Dokumen RB	Buku	12		4	4	100%			
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan SPIP	Buku	15		5	5	100%	2	2,0	63,9
		2. Jumlah Pertemuan Evaluasi Kinerja di Dinas Sosial	kali	12		4	4	100%			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100		100	100	100%	100	27,6	26,9
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	OB	96		32	32	100%	294	166,0	56,0
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	12		4	4	100%	4	-	-
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Buku	12		4	4	100%	18	9,0	-
2.7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Doku men	12		4	2	50%	2	2,0	78,7
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Keuangan	Buku	12		4	4	100%	1	1,0	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	persen	100		100	100	100%	100	100,0	65,5
3.1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Buku	12		4	4	100%	1	1,0	80,8
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BEMD yang diamankan	Buku	78		26	26	100%	1	1,0	-
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	Buku	78		5	5	100%	1	1,0	82,2

3.4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	Buah	15		26	26	100%	1	1,0	99,1
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100		100	100	100%	100	11,1	67,9
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1. Jumlah ID card Pegawai	Buah	120		40	40	100%	1	1,0	94,0
		2. Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	Buah	3		1	1	100%	40	40,0	98,0
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	120		40	40	100%	40	8,0	11,8
4.3	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Orang	240		80	80	100%	100	11,1	67,9
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100		100	100	100%	100	34,3	49,0
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia dalam setahun	Jenis	105		30	30	100%	1	1,0	34,5
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	165		50	50	100%	1	1,0	52,8
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	100		35	35	100%	1	1,0	94,5
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Item	30		8	8	100%	1	1,0	-
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan kantor/surat kabar dan majalah yang tersedia dalam setahun	Jenis	6		6	6	100%	12	6,0	21,3
5.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	10		8	8	100%	1	1,0	100,0
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Jumlah Jamuan Mamin & Snack Rapat	Dus	200		400	100	25%	6	1,0	59,1
		2. Jumlah Jamuan Mamin & Snack Tamu	Paket	130		40	40	50%			
		3. Jumlah Air Kemasan yang tersedia	Dus	900		300	300	100%			
		4. Jumlah Air Galon yang tersedia	Galon	420		140	140	100%			

		5. Jumlah Jamuan Minuman (kopi, susu, teh dll) yang tersedia	Jenis	3		3	3	100%			
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	HOK	450		400	400	100%	12	6,0	29,8
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	persen	100		100	100	100%	100	-	99,4
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket pengadaan Mebel	Buah	16		12	12	100%	12	12,0	99,8
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan mesin	Unit	14		10	10	100%	3	3,0	99,0
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana gedung kantor yang tersedia	Unit	1		10	10	100%			
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana gedung kantor yang tersedia	Unit	15		10	10	100%			
6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Sarana & Prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	Item	12		8	8	100%			
		2. Jumlah Sarana & Prasarana pendukung pelayanan gedung SLRT yang tersedia	Item	14		10	10	100%			
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100		100	100	100%	100	31,3	44,0
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Rp 10.000,- yang tersedia	Lembar	450		425	425	100%	12	6,0	62,2
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening: Listrik, Telepon, Air dan Internet/TV Berbayar	Bulan	12		12	12	100%	12	6,0	22,2
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah petugas keamanan yang tersedia	Orang	3		3	3	100%	12	6,0	42,1
		2. Jumlah petugas kebersihan yang tersedia	Orang	3		3	3	100%			
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga THL/Non ASN	Orang	10		8	8	100%	12	6,0	49,7
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah;	persen	100		100	100	100%	100	36,4	60,8

8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas	Unit	10		10	10	100%	13	7,0	44,7
8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket	8		6	6	100%			
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Paket	10		10	10	100%	5	-	-
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki	Unit	1		1	1	100%	3	3,0	98,4
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diperbaiki	Unit	2		2	2	100%	1	1,0	100,0
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi (pemeliharaan taman, sumur bor dan lainnya)	Paket	2		2	1	50%	5	-	-
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	persen	40		40	40	100%	50	40,5	-
		2. Persentase PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	persen	35		35	35	100%	45	45,7	-
		3. Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial.	persen	15		15	18	120%	25	13,3	-
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang diterbitkan terkait Undian Gratis Berhadiah an Pengumpulan Uang atau Barang	persen	100		100	100	100%	100	33,3	68,8

1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin yang diterbitkan terkait Undian Gratis Berhadiah an Pengumpulan Uang atau Barang	Doku men	6		2	2	100%	3	1,0	68,8
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Presentase PSKS perorangan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	persen	60		50	50	100%	70	18,3	33,7
		2. Presentase PSKS kelembagaan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	persen	30		25	25	100%	35	27,1	88,1
		3. Persentase kenaikan partisipasi masyarakat dalam program Uduan Online dari tahun sebelumnya	persen	30		20	20	100%			
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial masyarakat (PSM) kewenangan Kota Sukabumi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	140		70	70	100%	35	35,0	51,8
1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kewenangan Kota Sukabumi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	8		8	8	100%	7	1,0	49,4
1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan sumber ksejahteraan keluarga kewenangan Kota Sukabumi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	orang	41		41	41	100%	100	-	-
1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	1. Jumlah PSKS Kelembagaan kewenangan Kota Sukabumi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Lemba ga	35		35	35	100%	35	33,0	84,6
		2. Jumlah Puskessos yang dibina	Lemba ga	23		16	16	100%			
		3. Jumlah Forum Silih Asah Silih Asuh yang dibina	Forum	1		1	1	100%			
		4. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penanaman & pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan dan K3RS	Orang	250		150	270	100%			

		5. Jumlah kasus Sosial yang difasilitasi melalui program unggulan Uduan Online	Kasus	60		20	21	150%			
		6. Jumlah Prekuensi transaksi yang masuk dalam program uduan online	Kali	800		600	1.912	318,67%			
1.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	200		100	100	100%	13	13,0	91,7
		2. Jumlah LK3 yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Lemba ga	1		1	1	100%			
C	PROGRAM PENANGANA WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	persen	100		100	100	100%	100	-	-
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	persen	100		100	100	100%	100	-	-
1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke Kelurahan dari Titik Debarkasi Kota Sukabum disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	<5		<5	<5	100%	5	-	-
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100		100	100	100%	100	27,8	
		2. Persentase PMKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100		100	100	100%	100	16,3	25,1

1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Sesuai Standar	persen	100		100	100	100%	100	39,3	52,6
1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anakterlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	240		80	80	100%	156	110,0	53,2
1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	600		200	200	100%	181	35,0	84,2
1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	90		30	30	100%	15	6,0	97,2
1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	36		12	12	100%	7	4,0	8,2
1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	450		150	150	100%	175	118,0	38,0
		2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	450		150	150	100%			
1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Orang	300		100	100	100%	150	112,0	100,0

1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	180		60	60	100%			
1.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	180		60	60	100%	60	4,0	17,9
1.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jenis	2		2	2	100%	15	46,0	100,0
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jenis	10		8	8	100%			
1.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim	1		1	1	100%	24	7,0	24,9
		2. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit	3		2	2	100%			
		3. Jumlah rumah singgah/shelter / tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit	1		1	1	100%			
		4. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Item	6		2	2	100%			
		5. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Orang	1		1	1	100%			
		6. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Paket	3		1	1	100%			
		7. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan;	Orang	72		24	24	100%			

1.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	36		12	12	100%	12	4,0	8,3
1.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	108		36	36	100%	12	6,0	46,5
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS/PPKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai standar	persen	100		100	100	100%	100	16,3	25,1
2.1	Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	122		40	12	30%	18	12,0	-
2.2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemberian layanan kedaruratan	Orang	240		80	65	81,25%	36	9,0	-
2.3	Penyediaan permakanan	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	600		200	200	100%	112	37,0	30,5
2.4	penyediaan sandang	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan paket sandang	Orang	600		200	200	100%	22	-	97,8
2.5	Penyediaan alat bantu	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaatkan alat bantu	Orang	30		10	10	100%	23	10,0	96,9
2.6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	1. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Item	30		10	10	100%	5	1,0	76,0

		2. Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Orang	75		25	25	100%			
2.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada PMKS Lainnya	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	450		150	150	100%	50	-	-
2.8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan korban HIV AIDS/NAPZA	Jumlah keluarga PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	175		50	50	100%	50	-	-
2.9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	36		12	8	66,67%	13	5,0	-
2.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Orang	72		24	6	25%	10	3,0	50,0
2.11	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	36		12	7	58,33%	20	7,0	-
2.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan Reunifikasi keluarga	Orang	36		12	12	100%	12	8,0	-
2.13	Pemberian layanan rujukan	1. Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	Orang	72		24	24	100%	6	5,0	-

		2. Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaatkan pelayanan Rumah Singgah di Bandung	Orang	1.240		400	411	102,75%			
		3. Jumlah PMKS/PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaatkan pelayanan Ambulance Rumah Singgah di Bandung	Frekuensi	2500		3.800	3.822	100,58%			
2.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang terbentuk terkait pelayanan Rehabilitasi Sosial di Kota Sukabumi	Dokumen	18		6	6	100%	4	1,0	-
E	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan layanan Perlindungan Sosial	persen	100		100	100	100%	100	44,3	28,6
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	persen	100		100	100	100%	100	22,2	13,8
1.1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijangkau	Orang	240		25	25	100%	24	10,0	41,4
1.2	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Orang	240		25	6	24%	6	-	-
1.3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pemantauan pemeliharaan	Orang	240		25	25	100%	15	-	-
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola	persen	82		100	82	82%	75	66,3	43,3
2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pengelola Data yang difasilitasi	Tim	8		8	8	100%	60000	40.000,0	18,8
2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan validasi	persen	70		65	73	112,31%	50	38,0	54,5
2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1. Persentase Keluarga Fakir Miskin Cakupan Kota yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bantuan Reguler)	persen	60		55	55	100%	400	-	-
		2. Jumlah KPM Penerima bantuan program RASTRADA	KPM	1.200		400	16.222	4055,50%			

2.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan pengembangan perekonomian (Melalui KuBe/UEP)	KPM	50		20	20	100%	5	50,0	100,0
F	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	persen	100		100	100	100%	100	23,3	28
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana	persen	100		100	100	100%	100	46,6	34,4
1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan penyediaan makanan	KK	420		140	140	100%	200	136,0	45,2
1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	KK	420		140	140	100%	15	35,0	-
1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Lokasi	8		8	8	100%	5	1,0	32,0
1.4	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	1. Jumlah Kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	Kelompok	2		2	2	100%	25	34,0	94,9
		2. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	KK	75		25	25	100%			
1.5	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	KK	420		140	140	100%	38	-	-
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase KSB yang menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana	persen	100		100	100	100%	100	-	22,0
2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk	Buah	3		1	1	100	3	-	-
2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah MoU kerjasama tagana dengan lintas sektor yang terbentukJumlah MoU kerjasama tagana dengan lintas sektor yang terbentuk	MoU	3		1	1	100	40	8,0	44,1
G	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	persen	100		100	100	100%	100	33,3	14

1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan	m2	5.845		5.845	5.845	100%	5845,25	33,3	13,7
1.1	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Kota Sukabumi	Jumlah Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi yang direhab	Unit	8		4	4	100%	1	-	-
1.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi	kali	18		6	6	100%	1	1,0	41,0
1.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi yang mendapatkan pelayanan pengamanan	Unit	3		1	1	100%	1	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Capaian Kinerja Dinas Sosial sampai semester I secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian pelayanan SPM pada semester I mencapai pada rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis sebesar 54.66%, serta pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial sebesar 44,7%.

Laporan pencapaian kinerja pelayanan yang merupakan target renstra 2019-2024 kota sukabumi dapat dianalisis sebagai berikut :

Tabel 2.3
Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kota Sukabumi s.d Juni 2024

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	(13)
1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)		IKU	47.5	51.3	55	58.75	48.3	51.6	55	58	
a	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS);			40	45	50	55	40	46	50	55	
b	Persentase PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS);			35	40	45	50	35	40	45	50	

[illegible]

[illegible]

2)	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
3)	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
4)	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
5)	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
6)	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
7)	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
8)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah;		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Pelayanan Sosial di UPT SLRT Repeh Rapih		3800	4000	-	-	3600	10620	-	-	
a	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	-	-	-	-	-	-	
1)	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100	100	-	-	-	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026, diharapkan semua kepentingan Masyarakat yang memiliki latar belakang Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi agar dapat diakomodasi dengan fokus untuk mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Maju dan Terdepan.

Dalam setiap tahunnya diharapkan kinerja Dinas Sosial Kota Sukabumi lebih Responsif, Kreatif dan Inovatif dalam menangani permasalahan Sosial, baik ditingkat Lokal, Regional maupun Nasional.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Sukabumi hendaknya memperhatikan Potensi, Peluang dan Permasalahan serta Isu-isu yang sedang dihadapi Masyarakat Kota Sukabumi, sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk jangka waktu menengah selama lima tahun kedepan, seiring dengan perubahan Lingkungan Strategis yang cepat, dapat disimpulkan beberapa Isu Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi kedepan yaitu :

1. Cukup Tingginya Tingkat kemiskinan.
2. Cukup Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bertitik tolak dari Isu-isu Strategis yang terjadi tersebut diatas, maka dalam rangka tertib dan suksesnya pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan di Kota Sukabumi, maka terdapat juga permasalahan yang ada pada Dinas Sosial Kota Sukabumi yaitu :

1. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Dinas Sosial Kota Sukabumi
2. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Organisasi satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Sosial.
3. Belum Optimalnya Komitmen akan Pelayanan Sosial, sesuai Renstra, Renja dengan mengacu kepada RPJMD.
4. Belum Opimalnya Koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah dalam Penanganan Masalah Sosial,.
5. Kurangnya Komitmen Penganggaran dalam Penanganan Masalah Sosial.

Bertitik tolak dari permasalahan pada Dinas Sosial Kota Sukabumi tersebut diatas, maka muncul Isu-isu strategis antara lain :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan sosial oleh Dinas Sosial
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dalam Peningkatan Pelayanan masalah Sosial,.
- c. Keterbatasan anggaran pada Dinas Sosial untuk Penanggulangan / Pemberdayaan PMKS dan PSKS.

2.4. Review Terhadap Rancangan akhir Perubahan RKPD

Proses penyusunan Renja didasarkan kepada Rancangan awal RKPD Kota Sukabumi, namun pada pelaksanaan program/kegiatannya sering terjadi perubahan-perubahan program/kegiatan yang baru maupun pengurangan (penundaan) program/kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja juga sering terjadi perubahan pada perjalanan tahun anggaran, ada kegiatan yang bersifat tanggap darurat/ kejadian luar biasa yang tidak direncanakan pada awal rancangan Renja.

Adapun review rancangan awal Rencana kerja terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

SKPD : Dinas Sosial

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100	5.689.645.731	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Nilai SAKIP perangkat daerah (angka)	100	5.689.645.731		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu dan Berkualitas (%)	100	69.320.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu dan Berkualitas (%)	100	69.320.000		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	50.000.000		
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000		

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	11.000.000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	3.320.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	3.320.000	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.426.773.581	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.426.773.581	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	384	3.416.656.081	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	384	3.416.656.081	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	3.495.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	3.495.900	
10	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	1.773.750	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	1.773.750	

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	3.051.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	3.051.900	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.795.950	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.795.950	
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	4.310.850	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	4.310.850	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1.299.850	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1.299.850	
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1.064.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1.064.000	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1.064.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1.064.000	
17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	883.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	883.000	
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	253.682.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	253.682.000	

19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	40	2.127.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	40	2.127.000	
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	60.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	60.000.000	
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	191.555.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	191.555.000	
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	381.531.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	381.531.350	
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.561.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.561.700	
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	58.445.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	58.445.500	
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	18.920.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	18.920.000	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.061.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.061.650	

27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.693.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.693.000	
28	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000	
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	99.890.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	99.890.000	
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	185.959.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	185.959.500	
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100	306.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100	306.800.000	
32	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	227.500.000	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	227.500.000	
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	79.300.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	79.300.000	
34	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			

35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			
37	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	733.217.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	733.217.800	
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.848.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.848.000	
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	157.298.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	157.298.000	
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	337.808.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	337.808.400	
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	236.263.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	236.263.400	
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	514.010.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	514.010.150	

43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	221.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	221.600.000	
44	Pemeliharaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			Pemeliharaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			
45	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	8.500.000	
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	174.572.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	174.572.200	
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	109.337.950	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	109.337.950	
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	55	1.346.090.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	55	1.346.090.000	

50			PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	45				PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	45		
51			Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	25				Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	25		
52	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang berizin (%)	100	27.190.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang berizin (%)	100	27.190.000	
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	2	27.190.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	2	27.190.000	
54	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Presentase PSKS perorangan yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)	"1. 80 2. 40"	1.318.900.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Presentase PSKS perorangan yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)	"1. 80 2. 40"	1.318.900.000	
55	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	280.200.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	280.200.000	

56	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	55.200.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	55.200.000	
57	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	41	19.600.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	41	19.600.000	
58	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	35	878.400.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	35	878.400.000	
59	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	13	85.500.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	13	85.500.000	
60	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	100	16.500.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	100	16.500.000	

61	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani(%)	100	16.500.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani(%)	100	16.500.000	
62	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	16.500.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	16.500.000	
63	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar(%)	100	1.175.076.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar(%)	100	1.175.076.000	
64	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Sesuai Standar; (%)	100	580.885.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Sesuai Standar; (%)	100	580.885.000	

65	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	164.255.000	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	164.255.000	
66	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	100.080.000	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	100.080.000	
67	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	25.780.000	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	25.780.000	
68	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	13.200.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	13.200.000	
69	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	175.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	175.000.000	

70	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	5.850.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	5.850.000	
71	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	5.460.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	5.460.000	
72	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	65.500.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	65.500.000	
73	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26	4.680.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26	4.680.000	
74	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	5.060.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	5.060.000	

75	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	15.020.000	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	15.020.000	
76	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantI Sosial	Dinas Sosial	Persentase PMKS/PPKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar pantI yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai (%)	100	594.191.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantI Sosial	Dinas Sosial	Persentase PMKS/PPKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar pantI yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai (%)	100	594.191.000	
77	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	2.060.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	2.060.000	
78	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26	2.617.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26	2.617.000	
79	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	24.250.000	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	24.250.000	
80	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	6.750.000	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	6.750.000	

81	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	16.370.000	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	16.370.000	
82	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	3.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	3.000.000	
83	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	130.172.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	130.172.000	
84	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinas Sosial	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	7.125.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinas Sosial	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	7.125.000	

85	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	2.057.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	2.057.000	
86	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	6.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	6.000.000	
87	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	2.230.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	2.230.000	
88	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	1.875.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	1.875.000	
89	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	367.235.000	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	367.235.000	

90	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	22.450.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	22.450.000	
91	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	100	1.554.116.850	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	100	1.554.116.850	
92	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	100	12.680.100	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	100	12.680.100	
93	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24	5.074.800	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24	5.074.800	
94	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	2.537.100	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	2.537.100	
95	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	5.068.200	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	5.068.200	
96	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola	82	1.193.890.750	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola	82	1.193.890.750	
97	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	50000	347.546.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	50000	347.546.000	

98	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	82	488.672.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	82	488.672.000	
99	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	250	632.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	250	632.000.000	
100	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	73.218.750	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	73.218.750	
101	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	100	664.170.420	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	100	664.170.420	
102	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana	100	237.408.420	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana	100	237.408.420	
103	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	60.680.220	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	60.680.220	

104	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	30.312.200	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	30.312.200	
105	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinas Sosial	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	5	90.635.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinas Sosial	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	5	90.635.000	
106	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	50.744.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	50.744.000	
107	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	5.037.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	5.037.000	
108	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	100	426.762.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	100	426.762.000	
109	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	3	125.875.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	3	125.875.000	

110	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	300.887.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	300.887.000	
111	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola (Persen)	100	217.915.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola (Persen)	100	217.915.000	
112	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan(M2)	5845,25		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan(M2)	5845,25		
113	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	198.975.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	198.975.000	
114	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	5845,25	17.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	5845,25	17.000.000	
115	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.940.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.940.000	

Tabel 2.5
Analisa Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

SKPD : Dinas Sosial

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		SEBELUM	PAGU SESUDAH	SELISIH	KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100	100				
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100				
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	25.000.000	25.000.000	-	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	5.000.000	-	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	11.000.000	11.000.000	-	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.320.000	3.320.000	-	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100			-	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	294	294	3.348.656.081	3.348.656.081	-	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	4	3.495.900	3.495.900	-	

		Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)							
1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	1.773.750	1.773.750	-		
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	3.051.900	3.051.900	-		
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.795.950	1.795.950	-		
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100			-		
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.299.850	1.299.850	-		
1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.064.000	1.064.000	-		
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.064.000	1.064.000	-		
1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	883.000	883.000	-		
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100			-		
1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	2.127.000	2.127.000	-		
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	40	60.000.000	60.000.000	-		
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	161.555.000	208.955.000	47.400.000		Sertifikasi ISO 27001

1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	100			-	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.561.700	5.561.700	-	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	58.445.500	58.445.500	-	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	8.920.000	8.920.000	-	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.061.650	7.061.650	-	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48	1.693.000	1.693.000	-	
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000	4.000.000	-	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	6	54.890.000	77.490.000	22.600.000	Penambahan mamin tamu
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	185.959.500	145.945.500	-40.014.000	Efisiensi Pejalan Dinas
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100	100			-	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	28	147.500.000	172.500.000	25.000.000	Pengadaan Kursi Rapat
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	19.300.000	19.300.000	-	
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0			-	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	-	28.000.000	28.000.000	Pengadaan Sarana keamanan Kantor

		(Unit)						
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	-	-	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100			-	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.848.000	1.848.000	-	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	157.298.000	125.900.000	-31.398.000	Efisiensi Listrik dan Internet
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	193.808.400	202.808.400	9.000.000	Pengadaan Tenaga Kebersihan
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	236.263.400	236.263.400	-	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah;	100	100			-	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	121.600.000	121.600.000	-	
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	-	-	-	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	16	8.500.000	16.530.000	8.030.000	Servis Peralatan Komputer
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	74.572.200	74.572.200	-	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9.337.950	9.337.950	-	

1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	-	-	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	50	50			-	
		PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	45	45			-	
		Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	25	25			-	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang berizin (%)	100	100			-	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	3	3	27.190.000	27.190.000	-	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS perorangan yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)	70	70			-	
		Persentase PSKS kelembagaan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	35	35			-	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	35	280.200.000	280.200.000	-	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	7	7	55.200.000	55.200.000	-	

	Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)						
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	100	100	19.600.000	19.600.000	-	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	35	35	713.400.000	724.400.000	11.000.000	Hibah Relawan Indonesia dan DKM At-Tadhlomin Efisiensi SPPD
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	13	13	20.500.000	20.500.000	-	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	100	100			-	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100	100			-	
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	1.500.000	1.500.000	-	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	100	100			-	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Sesuai	100	100			-	

		Standar;						
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	156	156	84.255.000	84.255.000	-	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	181	181	55.080.000	55.080.000	-	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	13.780.000	13.780.000	-	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	7	13.200.000	13.200.000	-	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	175	75.000.000	75.000.000	-	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	150	5.850.000	5.850.000	-	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	5.460.000	5.460.000	-	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	14.500.000	14.500.000	-	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	24	4.680.000	4.680.000	-	

		(Orang)						
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	12	1.560.000	1.560.000	-	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	12	13.320.000	13.320.000	-	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS/PPKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai (%)	100	100			-	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18	18	2.060.000	2.060.000	-	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	36	36	2.617.000	2.617.000	-	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	112	112	24.250.000	24.250.000	-	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	22	6.750.000	6.750.000	-	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23	23	16.370.000	16.370.000	-	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	3.000.000	3.000.000	-	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,	50	50	17.172.000	17.172.000	-	

	Mental, Spiritual, dan Sosial	Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)						
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	7.125.000	7.125.000	-	
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13	13	2.057.000	2.057.000	-	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	6.000.000	6.000.000	-	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	2.230.000	2.230.000	-	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	12	1.875.000	1.875.000	-	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	6	7.235.000	7.235.000	-	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	2.450.000	2.450.000	-	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan	100	100			-	

		Sosial yang bermutu						
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	100	100			-	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24	24	3.974.800	3.974.800	-	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	6	937.100	937.100	-	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	3.468.200	3.468.200	-	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola	75	75			-	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	60000	60000	276.860.000	333.860.000	57.000.000	Penambahan operasional Puskesmas
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	269.000.000	269.000.000	-	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	400	0	32.000.000	-	-32.000.000	Penghapusan Rastrada
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	13.218.750	13.218.750	-	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	100	100			-	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana	100	100			-	

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	17.680.220	17.680.220	-	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	10.312.200	10.312.200	-	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	5	5	15.635.000	15.635.000	-	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	10.744.000	10.744.000	-	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	38	3.937.000	3.937.000	-	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	100	100			-	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Kampung)	3	3	24.875.000	24.875.000	-	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	40	40	254.887.000	254.887.000	-	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	100			-	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan	5845,25	5845,25			-	

1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	6.975.000	6.975.000	-	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	17.000.000	23.000.000	6.000.000	Biaya pemeliharaan makam
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1.940.000	1.940.000	-	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan yang menunjang pemenuhan Visi dan misi walikota sukabumi mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pendanaan perangkat Daerah

3.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi
Tahun 2024

[illegible]

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	0 Laporan	4 Laporan	3.495.900,00	3.495.900,00	3.495.900,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	0 Dokumen	2 Dokumen	1.773.750,00	1.773.750,00	1.773.750,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	0 Laporan	18 Laporan	3.051.900,00	3.051.900,00	3.051.900,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	0 Dokumen	1 Dokumen	1.795.950,00	1.795.950,00	1.795.950,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	4.310.850,00	4.310.850,00	4.310.850,00	0,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	0 Dokumen	1 Dokumen	1.299.850,00	1.299.850,00	1.299.850,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	0 Orang	40 Orang	8.375.000,00	161.555.000,00	208.955.000,00	200.580.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	224.046.600,00	326.531.350,00	309.117.350,00	85.070.750,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	1 Paket	5.561.700,00	5.561.700,00	5.561.700,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	1 Paket	17.225.250,00	58.445.500,00	58.445.500,00	41.220.250,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	0 Paket	1 Paket	4.420.000,00	8.920.000,00	8.920.000,00	4.500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	0 Paket	1 Paket	7.061.650,00	7.061.650,00	7.061.650,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	0 Dokumen	48 Dokumen	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	1.420.800,00	0,00	0,00	-1.420.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	1 Unit	3.759.600,00	0,00	28.000.000,00	24.240.400,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	514.093.950,00	589.217.800,00	566.819.800,00	52.725.850,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0 Laporan	12 Laporan	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	0 Laporan	12 Laporan	120.698.000,00	157.298.000,00	125.900.000,00	5.202.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	0 Unit	3 Unit	200.000.000,00	74.572.200,00	74.572.200,00	125.427.800,00	-	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	0 Unit	1 Unit	9.337.950,00	9.337.950,00	9.337.950,00	0,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	0 Unit	0 Unit	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS SOSIAL
2,	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	1.845.577.200,00	1.116.090.000,00	1.127.090.000,00	1.845.577.200,00	-				0,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pesentase undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau bayang yang berizin</i>	-	100 %	2.700.000,00	27.190.000,00	27.190.000,00	24.490.000,00					0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	0 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	27.190.000,00	27.190.000,00	24.490.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Presentase PSKS perorangan yang mendapatkan pengembangan kompetensi; 2. Presentase PSKS kelembagaan yang mendapatkan pengembangan kompetensi;	-	1. 70 2. 35 %	1.842.877.200,00	1.088.900.000,00	1.099.900.000,00	- 742.977.200,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	35 Orang	296.437.500,00	280.200.000,00	280.200.000,00	-16.237.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	7 Orang	69.912.500,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-14.712.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	41 Keluarga	439.200.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	- 419.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	35 Lembaga	1.030.600.000,00	713.400.000,00	724.400.000,00	- 306.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sukabumi, Semua Kecamatan,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

										Gunung Puyuh				
	1.06.02.2.03 .0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)												
			<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Sertifikat	13 Sertifikat	6.727.200,00	20.500.000,00	20.500.000,00	13.772.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
3,	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00				0,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani</i>	-	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01 .0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	5 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	24 Orang	12.140.600,00	4.680.000,00	4.680.000,00	-7.460.600,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01 .0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	12 Orang	3.750.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-2.190.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01 .0012	Pemberian Layanan Rujukan												
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	12 Orang	2.250.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	11.070.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	<i>Persentase PMKS/ PPKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai standar</i>	-	100 %	1.212.531.100,00	101.191.000,00	101.191.000,00	-1.111.340.100,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02 .0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan												
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	18 Orang	2.062.500,00	2.060.000,00	2.060.000,00	-2.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02 .0002	Pemberian Layanan Kedaruratan												
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	36 Orang	2.625.000,00	2.617.000,00	2.617.000,00	-8.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

			<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	6 Orang	937.100,00	937.100,00	937.100,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar												
			<i>Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	15 Orang	3.468.200,00	3.468.200,00	3.468.200,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola</i>	-	80 %	208.573.750,00	591.078.750,00	616.078.750,00	407.505.000,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota												
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata</i>	0 Orang	60000 Orang	42.100.000,00	276.860.000,00	333.860.000,00	291.760.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota												
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota</i>	0 Keluarga	26000 Keluarga	36.630.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00	232.370.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga												
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Keluarga	246 Keluarga	116.625.000,00	32.000.000,00	0,00	116.625.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat												

			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	5 Orang	13.218.750,00	13.218.750,00	13.218.750,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
6,	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	93.845.060,00	338.070.420,00	338.070.420,00	-93.845.060,00				0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana</i>	-	100 %	55.252.020,00	58.308.420,00	58.308.420,00	3.056.400,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01 .0001	Penyediaan Makanan												
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	200 Orang	17.680.220,00	17.680.220,00	17.680.220,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01 .0002	Penyediaan Sandang												
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	15 Orang	10.312.200,00	10.312.200,00	10.312.200,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01 .0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi												
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Unit	5 Unit	15.637.400,00	15.635.000,00	15.635.000,00	-2.400,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.2.01 .0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan												
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	25 Orang	7.685.200,00	10.744.000,00	10.744.000,00	3.058.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01 .0005	Pelayanan Dukungan Psikososial												
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	38 Orang	3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana keuwenangan kabupaten/ kota</i>	-	100 %	38.593.040,00	279.762.000,00	279.762.000,00	241.168.960,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02 .0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana												
			<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Kampung	3 Kampung	24.905.600,00	24.875.000,00	24.875.000,00	-30.600,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02 .0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana												
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Keuwenangan Kabupaten/ Kota</i>	0 Orang	40 Orang	13.687.440,00	254.887.000,00	254.887.000,00	241.199.560,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
7,	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	-	14.615.000,00	25.915.000,00	31.915.000,00	-14.615.000,00				0,00	

	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan</i>	-	5845,3 M2	14.615.000,00	25.915.000,00	31.915.000,00	17.300.000,00				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>	0 Dokumen	1 Dokumen	6.975.000,00	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota</i>	0 Makam	1 Makam	5.700.000,00	17.000.000,00	23.000.000,00	17.300.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>	0 Laporan	1 Laporan	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H					1.039.260.049.162,00	1.272.828.818.997,00	1.337.805.497.363,00	298.545.448.201,00				349.459.904.296,00	

BAB IV PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan Dokumen perencanaan yang disusun atas dasar hasil masukan dari setiap unit kerja, dengan menggunakan pola bottom up planning sehingga diharapkan program yang akan dilaksanakan dapat mengakomodir semua kegiatan unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 (semester 1), berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial.

Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

4.1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2024 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPD Kota Sukabumi dan Renstra Dinas Sosial Kota Sukabumi.
2. Di dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Demikian Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2024 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Sosial di tahun anggaran 2024. Dengan Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut dan dapat mencapai target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2024 akan melandasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024, dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

R. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SUKABUMI TAHUN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi dilatar belakangi Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan sebagai pedoman kerja selama tahun berkenaan serta berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD perubahan dan Renstra Perangkat Daerah yang sifatnya lebih operasional.

Adapun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun berkenaan sebagai penyesuaian atas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 sampai dengan Juli 2024 (Semester 1).

1.2 Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Caera Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
 21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
 22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2042;

23. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
24. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
25. Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi yang dilaksanakan Tanggal 11 Febuari 2023.
26. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
27. Perwal Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Perubahan 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah.
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan diatasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggara

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Bab IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Tahun Berkenaan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.2.07.3.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3,702,300,139	3,739,854,511	3,739,854,511	12,350,000	3.354.407.080	3.327.947.876	99,21
2.07.2.07.3.32.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	100	11,920,000	11,920,000	11,920,000	-	12.500.000	12.500.000	100
2.07.3.301.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja	Buku	3	8,620,000.00	8,620,000.00	8,620,000.00	-	8.620.000	8.620.000	100
		Dokumen pelaksanaan FPD	orang	45				-			
2.07.3.301.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	buku	3	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550.000	550.000	100
2.07.3.301.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	buku	4	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550.000	550.000	100
2.07.3.301.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	buku	4	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550.000	550.000	100
2.07.3.301.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	buku	3	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550.000	550.000	100

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.3.301.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	buku	6	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,130,000	1,130,000	100
2.07.3.301.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	buku	2	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550.000	550.000	100
2.07.3.301.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	3.152.131.289	3.152.131.289	3.152.131.289	12,350,000	2.802.946.260	2.794.137.989	99,69
2.07.3.301.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang	23	3.152.131.289	3.152.131.289	3.152.131.289	12,350,000	2.801.936.260	2.793.127.989	99,69
2.07.3.301.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	buku	4	500,000	500,000	500,000	-	540.000	540.000	100
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Buku	4	400,000	400,000	400,000				
2.07.3.301.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	buku	4	400,000	400,000	400,000	-	470.000	470.000	100
2.07.3.301.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	%	100	10,000,000	15.872.000	15.872.000	5,872,000	11,250,000.00	11,250,000.00	100

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	29	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000			
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	29	-	-	-				
2.07.3.301.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis : Administrasi Kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, Pelayanan Publik	orang	29	10,000,000	8,872,000	8,872,000	- 1.128.000	11.245.000	11.245.000	100
2.07.3.301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana	%	100	162.299.150	179.987.150	179.987.150	17,688,000	189.160.050	189.106.710	99,97
2.07.3.301.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	15	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2.603.550	2.602.500	99,96
2.07.3.301.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	Jenis	10	26,999,250	26,999,250	26,999,250	-	30.286.500	30.286.500	100
		Jumlah ATK yang Menunjang Pelayanan di dinas		40							
2.07.3.301.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tiang umbul-umbul,baner, bendera merah putih, spanduk, Refill Tabung Gas	Jenis	5	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	2,950,000	2,950,000	100
2.07.3.301.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang menunjang Pelayanan di dinas	Jenis	12	15,499,900	18,499,900	18,499,900	3,000,000	22.373.000	22.338.250	99,84
		Jumlah penggandaan yang menunjang Pelayanan di dinas	Lembar	18374							

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.3.301.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	koran	5	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6.320.000	6.320.000	100
		Jumlah Iklan	Iklan	4							
2.07.3.301.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah aqua galon yang tersedia	Galon	154	13,300,000	17,988,000	17,988,000	4,688,000	16.770.000	16.770.000	100
		Jumlah dus air mineral	Dus	50							
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Dus	600							
2.07.3.301.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Kali	61	95,000,000	105,000,000	105,000,000	10,000,000	107.857.000	107.839.460	99,98
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kali	171							
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan penunjang	%	100	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	33.980.000	33.980.000	100
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	-	-	-	-			
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	-	-	-	-			
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel		3	10,000,000	-	-	- 10.000.000	9.100.000	9.100.000	100
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000	24.880.000	24.880.000	100

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer,AC,mesin jahit	Jenis	5	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	4.790.000	4.790.000	100
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, BLK dan eks PPTG yang Diperbaiki	Gedung	3	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	46.730.000	46.713.223	99,96
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	17.999.700	17.999.700	17.999.700	-	-	-	-
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	9.999.800	9.999.800	9.999.800	-	-	-	-
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase Rencana Tenaga Kerja Makro	%	100	20.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000	20,000,000	-	0
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Rencana Tenaga Kerja Makro	%	100	20.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000	20,000,000	-	0
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	3	20.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000	20,000,000	-	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	%	80	440.000.000	460.000.000	460.000.000	20.000.000	429.700.000	288.490.000	67,14

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang berkompotensi dan siap bekerja	%	70	410.000.000	430.000.000	430.000.000	20.000.000	399.700.000	258.490.000	64,67
2.07.03.2.01.0001	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang berkompotensi dan ditempatkan	orang	101	370.000.000	370.000.000	370.000.000	-	399.700.000	258.490.000	64,67
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	15	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	20.000.000	40.000.000	40.000.000	20.000.000	-	-	-
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persen	70%	-	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Orang	35	-	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	65	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30.000.000	30.000.000	100

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.03.2.03.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bimtek bagi HRD perusahaan mengenai kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di perusahaan	orang	100	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	100
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	%	90	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	43,975,000.00	41,000,000.00	93
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi pasar kerja kepada pencari kerja	%	90	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	43,975,000.00	41,000,000.00	93
2.07.04.2.03.03	Job fair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dalam bursa kerja/job fair	orang	300	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	28.000.000	27.937.500	99,78
		Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair	perusahaan	10							
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	%	90	75,149,800	133,649,900	133,649,900	58,500,100	69.149.900	68.349.900	98,84
2.07.05.2,01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu daerah kab/kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	85	21,499,900	21,499,900	21,499,900	-	21.499.900	21.499.900	100

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
2.07.05.2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	3	21,499,900	50,000,000	50,000,000	28,500,100	21,499,900.00	21.499.900	100
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan di Daerah kab/kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelenggaraan verifikasi perusahaan dan pelaksanaan operasional Lembaga Tripartit	%	100	53,649,900	83,649,900	83,649,900	30,000,000	47.650.000	46.850.000	98,32
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	17,090,000	17,090,000	17,090,000	-	17.090.000	17.090.000	100
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	30	9.999.900	39.999.900	39.999.900	30.000.000	-	-	-
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	12.000.000	11.200.000	93,33

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
	Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
2.07.05.2.02.0004	pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20	18.560.000	18.560.000	18.560.000	-	18.560.000	18.560.000	100
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	%	90%	87,000,000	60,000,000	60,000,000	- 27,000,000	36.099.500	36.001.000	99,73
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persebaran penduduk ke wilayah transmigrasi	%	70	87,000,000	60,000,000	60,000,000	- 27,000,000	36.099.500	36.001.000	99,73
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	5,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000			
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000		-		-
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	2	20.000.000	-	-	- 20.000.000	-		-

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang	Targer Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		
		Indikator	Satuan	Target	Murni	Parsial	Sesudah		Anggaran	Realisasi S/D Triwulan IV	Realisasi (%)
	Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	2	10.000.000	-	-	- 10.000.000	-		-
3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000				
3.32.03.2.01.0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK	2	5.000.000	-	-	- 5.000.000			
3.32.03.2.01.0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK	2	2.000.000	-	-	- 2.000.000			
3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK	2	10.000.000	-	-	- 10.000.000			
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket	2	10.000.000	-	-	- 10.000.000			
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1	5.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Dapat disampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi khususnya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenagakerjaan mengalami beberapa kendala teknis untuk pemenuhan target RPJMD. Namun demikian dengan upaya yang sungguh-sungguh serta memanfaatkan potensi yang ada serta didukung oleh semua pihak, kami berusaha sedemikian rupa untuk melaksanakan tupoksi dengan sebaik-baiknya.

Berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 (Target Renstra 2024-2026).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi
Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persen	80%	9,47%	
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdaftar dalam IPK Online	Orang	4000	181	kondisi hingga Bulan Agustus
3	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha (K3)	Kali	6 kali	6 Kali	
4	Fasilitasi calon transmigran Kota Sukabumi	Persen	100%	-	Belum dilaksanakan
5	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Poin	72	-	Belum ada Penilaian

Dapat disampaikan pula pencapaian Kinerja Keuangan dan Kegiatan hingga Triwulan II (dua) Tahun 2024 sebagai berikut :

MATRIK PENGENDALIAN TRIWULAN II
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
2.07.2.07.3.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.702.300.139	61%	2.007.573.617	
2.07.2.07.3.32.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	100	11.920.000	83%	8.670.000	
2.07.3.301.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja	Dokumen	4	8.620.000,00	4 Dokumen	5.920.000,00	
2.07.3.301.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	4	550.000,00	4 Dokumen	550.000,00	
2.07.3.301.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	4	550.000,00	4 Dokumen	550.000,00	
2.07.3.301.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	4	550.000,00	4 Buku	550.000,00	
2.07.3.301.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	5	550.000,00	-	-	
2.07.3.301.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Dokumen	6	1.100.000,00	6 Dokumen	1.100.000,00	
2.07.3.301.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	3.153.431.289	50%	1.729.036.962	
2.07.3.301.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang	19	3.152.131.289	19 orang (6 bulan)	1.728.636.962	

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
2.07.3.301.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	4	500.000	0	-	
2.07.3.301.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	4	400.000	4 Dokumen	400.000	
2.07.3.301.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	400.000	0	-	
2.07.3.301.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	%	100	10.000.000	100%	8.032.000	
2.07.3.301.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis : Administrasi Kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, Pelayanan Publik	orang	27	10.000.000	27 Orang	8.032.000	
2.07.3.301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana	%	100	162.299.150	41%	95.934.625	
2.07.3.301.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Paket	5	2.500.000	0	1.335.000	
2.07.3.301.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	Paket	2	26.999.250	0	12.488.625	
2.07.3.301.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tiang umbul-umbul,baner, bendera merah putih, spanduk, Refill Tabung Gas	Paket	2	3.000.000	0	160.000	
2.07.3.301.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang menunjang Pelayanan di dinas	Jenis	5	15.499.900	2 Jenis	7.000.000	
		Jumlah penggandaan yang menunjang Pelayanan di dinas	Lembar	18374		1050 Lembar		

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
2.07.3.301.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	koran	1	6.000.000	1 Koran (6 bulan)	4.130.000	
		Jumlah Iklan	Iklan	1		0		
2.07.3.301.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah aqua galon yang tersedia	Galon	190	13.300.000	30 Galon	6.295.000	
		Jumlah dus air mineral	Dus	24		4 Dus		
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Dus	430		16 Dus		
2.07.3.301.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Kali	61	95.000.000	20 Kali	64.526.000	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kali	171		20 Kali		
2.07.3.301.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan penunjang	%	100	50.000.000	75%	39.755.000	
2.07.3.301.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Jenis	3	10.000.000	0	-	
2.07.3.301.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jenis	7	20.000.000	7 Jenis	19.950.000	
2.07.3.301.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jenis	4	10.000.000	4	9.805.000	
2.07.3.301.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jenis	4	10.000.000	4	10.000.000	
2.07.3.301.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan dinas	%	100	179.650.200	45%	79.978.730	
2.07.3.301.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai @ 10.000	Lembar	75	-	0	-	
2.07.3.301.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet	Rekening	3	50.000.000	1 Rekening (3 bulan)	17.470.964	
2.07.3.301.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan kemandirian/TKS yang Dibiayai	orang	5	66.822.000	5 orang (6 bulan)	27.833.195	

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
2.07.3.301.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah THL	orang	4	62.828.200	3 orang (6 bulan)	34.674.571	
2.07.3.301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas layak fungsi	%	100	134.999.500	34%	46.166.300	
2.07.3.301.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	Roda Empat/Unit	2	72.500.000	1 Unit	34.419.300	
			Roda Dua/Unit	4		2 Unit		
2.07.3.301.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer, AC, mesin jahit	Jenis	5	4.500.000	4 Jenis	3.410.000	
2.07.3.301.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, BLK dan eks PPTG yang Diperbaiki	Gedung	1	30.000.000	1 Gedung	3.000.000	
2.07.3.301.2.09.09	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, BLK dan eks PPTG yang Diperbaiki	Gedung	1	17.999.700	1 Gedung	2.007.000	
2.07.3.301.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, BLK dan eks PPTG yang Diperbaiki	Gedung	1	9.999.800	1 Gedung	3.330.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	%	80	20.000.000	0%	-	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	%	70	20.000.000	0%	-	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	20.000.000	0	-	

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	%	80	440.000.000	0%	31.754.200	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang berkompentensi dan siap bekerja	%	70	410.000.000	0%	5.850.000	
2.07.03.2.01.01	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang berkompentensi dan ditempatkan	orang	104	370.000.000	Orang	-	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga		20.000.000	lembaga	5.850.000	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	unit		20.000.000	Unit	-	
2.07.03.2.03	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	Persentase perizinan dan pendaftaran LPK	persen	70%	-	0%	-	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah akreditasi LPK	LPK	22	-	0	-	
		Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan	LPK	25		0	-	
2.07.03.2.03	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	80	30.000.000	0%	25.904.200	

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
2.07.03.2.03.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bimtek bagi HRD perusahaan mengenai kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di perusahaan	Orang	30	30.000.000	30 Orang	25.904.200	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	%	80	30.000.000	16%	2.023.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi pasar kerja kepada pencari kerja	%	100	30.000.000	16%	2.023.000	
2.07.04.2.03.03	Job fair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dalam bursa kerja/job fair	orang	300	30.000.000	6	2.023.000	
		Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair	perusahaan	22		0		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	%	75	75.149.800	1%	43.791.900	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu daerah kab/kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	0	21.499.900	0%	-	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Jumlah perusahaan yang di data	perusahaan	48	21.499.900		-	
		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMK	orang	35				

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
	Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan penerapan terkait UMK (Desiminasi penetapan UMK)	dok	3				
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan di Daerah Kab/kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelenggaraan verifikasi peusahaan dan pelaksanaan operasional Lembaga Tripartit	%	70	53.649.900	48%	43.791.900	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/kota	Terlaksananya peringatan hari buruh	Kegiatan	1	17.090.000	1 Kegiatan	17.090.000	
		Laporan akhir kegiatan hari buruh	Dokumen	1		1 Dokumen		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah penyelenggaraan verifikasi serikat pekerja/buruh	Kegiatan	1	9.999.900	1 Kegiatan	4.544.900	
		Jumlah peserta sosialisasi	Orang	50	8.000.000	40 Orang	6.222.500	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah kab/kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan	dok	1	18.560.000	1 Dokumen	15.934.500	
		Jumlah pembentukan tata kerja dan susunan organisasi LKS Tripartit	Kegiatan	1		1 Kegiatan		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	%	90%	87.000.000	0%	9.296.000	

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persebaran penduduk ke wilayah transmigrasi	%	70	87.000.000	0%	9.296.000	
3.32.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigrasi terkirim ke wilayah transmigrasi	Laporan	1	5.000.000	0	4.723.000	
3.32.03.2.01	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Dokumen	1	5.000.000	0	4.573.000	
3.32.03.2.01	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		KK	2	20.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	Penyuluhan Transmigrasi		KK	2	10.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran		Lokasi	1	15.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota		KK	2	5.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	Cek Kesehatan Calon Transmigran		KK	2	2.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi		KK	2	10.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)		Paket	2	10.000.000	0	-	
3.32.03.2.01	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transm		Lokasi	1	5.000.000	0	-	
TOTAL					4.354.449.939		2.094.438.717	

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi		Permasalahan
		Indikator	Satuan	Target		K	Rp	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
JUMLAH BTL					3.152.131.289		1.728.636.962	
JUMLAH BL					1.202.318.650		365.801.755	
Persentase (%)							48,10	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan. Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering disoroti masyarakat menjadi faktor penentu yang penting dari penurunan minat investasi. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah dalam berbagai

Jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronik. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Acuan pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih sederhana dan aktual.

Perlunya SPM dimaksudkan untuk :

1. Memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Beberapa pelayanan yang harus dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi,

- a) Urusan Ketenagakerjaan

1. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa pelaksanaan pelatihan kerja.
2. Penempatan tenaga kerja.
Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa :
 - a. Pelayanan informasi pasar kerja;
 - b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri;
 - c. Penempatan tenaga kerja luar negeri.
3. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa :
 - a. Pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
 - b. Pemerantaraan/mediasi perselisihan hubungan industrial.

b) Urusan Transmigrasi

1. Pemberian fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran;
2. Pembinaan/pelatihan calon transmigran sesuai dengan tingkat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Prioritas penganggaran urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah pelayanan ketenagakerjaan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk itu, maka Dinas Tenaga Kerja menetapkan beberapa program kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Program Penempatan kerja
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan Sub kegiatan Job Fair
2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi
3. Program Hubungan Industrial
Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan Pelaksanaan kerja sama antar Wilayah Transmigrasi dan Terkirimnya ke wilayah Transmigrasi

Adapun Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja untuk tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Pagu Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15
2.07.2.07.3.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	3,702,300,139	3,739,854,511	Kota Sukabumi
2.07.2.07.3.32.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	100%	100%	100%	100%	11,920,000	11,920,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja	Buku			3	3	8,620,000.00	8,620,000.00	Kota Sukabumi
		Dokumen pelaksanaan FPD	orang			45	45			
2.07.3.301.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	buku			3	3	550,000.00	550,000.00	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	buku			4	4	550,000.00	550,000.00	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	buku			4	4	550,000.00	550,000.00	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	buku			3	3	550,000.00	550,000.00	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	buku			6	6	1,100,000.00	1,100,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	buku			2	2	550,000.00	550,000.00	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2.07.3.301.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100%	100%	100%	100%	3.152.131.289	3.152.131.289	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang			23	23	3.152.131.289	3.152.131.289	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	buku			4	4	500,000	500,000	Kota Sukabumi
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Buku			4	4	400,000	400,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	buku			4	4	400,000	400,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	%	100%	100%	100%	100%	10,000,000	15.872.000	Kota Sukabumi
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			27	29	-	7,000,000	Kota Sukabumi
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket			27	29	-	-	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
		Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			
Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2.07.3.301.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis : Administrasi Kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, Pelayanan Publik	orang			27	29	10,000,000	8,872,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana	%	100%	100%	100%	100%	162.299.150	179.987.150	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Jenis			8	15	2,500,000	2,500,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	Jenis			10	10	15,499,900	18,499,900	Kota Sukabumi
		Jumlah ATK yang Menunjang Pelayanan di dinas				40	40			
2.07.3.301.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tiang umbul-umbul,baner, bendera merah putih, spanduk, Refill Tabung Gas	Jenis			3	3	3,000,000	3,000,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang menunjang Pelayanan di dinas	Jenis			12	12	15,873,150	15,873,150	Kota Sukabumi
		Jumlah penggandaan yang menunjang Pelayanan di dinas	Lembar			18374	18374			
2.07.3.301.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	koran			5	5	6,000,000	6,000,000	Kota Sukabumi
		Jumlah Iklan	Iklan			4	4			
2.07.3.301.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah aqua galon yang tersedia	Galon			154	154	13,300,000	17,988,000	Kota Sukabumi
		Jumlah dus air mineral	Dus			45	50			

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Dus			430	600			
2.07.3.301.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Kali			61	61	95,000,000	105,000,000	Kota Sukabumi
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kali			171	171			
2.07.3.301.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan penunjang	%	100%	100%	100%	100%	33,985,000	33,985,000	Kota Sukabumi
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			5	5	-	-	
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			3	3	-	-	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				3	3	10,000,000	-	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			3	3	20,000,000	30,000,000	
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			3	3	10,000,000	10,000,000	Kota Sukabumi
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			3	3	10,000,000	10,000,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan dinas	%	100%	100%	100%	100%	179,650,200	197,204,572	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet	Rekening			3	3	50,000,000	43,000,000	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2.07.3.301.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan kemandan/TKS yang Dibiayai	orang			5	5	66,822,000	66,822,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah THL	orang			4	5	62,828,200	87,382,572	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas layak fungsi	%	100%	100%	100%	100%	134.999.500	131.439.500	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	Roda Empat/Unit			2	2	72.500.000	68.940.000	Kota Sukabumi
			Roda Dua/Unit			4	4			
2.07.3.301.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer,AC,mesin jahit	Jenis			5	5	4,500,000	4,500,000	Kota Sukabumi
2.07.3.301.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, BLK dan eks PPTG yang Diperbaiki	Gedung			3	3	30,000,000	30,000,000	Kota Sukabumi
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	3	17.999.700	17.999.700	Kota Sukabumi
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	3	9.999.800	9.999.800	Kota Sukabumi
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase Rencana Tenaga Kerja Makro	%	100	100	100	100	20.000.000	70.000.000	Kota Sukabumi
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Rencana Tenaga Kerja Makro	%	100	100	100	100	20.000.000	70.000.000	Kota Sukabumi
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	3	3	3	3	20.000.000	70.000.000	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
		Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan						
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	%	80%	80%	80%	80%	440.000.000	460.000.000	Kota Sukabumi
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang berkompetensi dan siap bekerja	%	70%	70%	70%	70%	410.000.000	430.000.000	Kota Sukabumi
2.07.03.2.01.01	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang berkompetensi dan ditempatkan	orang	101	101	101	101	399,700,000	399,700,000	Kota Sukabumi
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	15	15	15	15	20.000.000	20.000.000	Kota Sukabumi
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	2	2	2	20.000.000	40.000.000	Kota Sukabumi
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persen	70%	70%	70%	70%	-	-	Kota Sukabumi
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Orang	35	35	35	35	-	-	Kota Sukabumi
2.07.03.2.03	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	65%	65%	65%	65%	30,000,000	30,000,000	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2.07.03.2.03.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bimtek bagi HRD perusahaan mengenai kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di perusahaan	orang	100	100	100	100	30,000,000	30,000,000	Kota Sukabumi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	%	80%	80%	80%	80%	30,000,000	30,000,000	Kota Sukabumi
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi pasar kerja kepada pencari kerja	%	100%	100%	100%	100%	30,000,000	30,000,000	Kota Sukabumi
2.07.04.2.03.03	Job fair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dalam bursa kerja/job fair	orang	300	300	300	300	30,000,000	30,000,000	Kota Sukabumi
		Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair	perusahaan	10	10	10	10			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	%	90	90	90	90	75,149,800	133,649,900	Kota Sukabumi
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu daerah kab/kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	75%	75%	75%	75%	21,499,900	21,499,900	Kota Sukabumi
2.07.05.2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	3	3	3	3	21,499,900	50,000,000	Kota Sukabumi
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan di Daerah kab/kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelenggaraan verifikasi perusahaan dan pelaksanaan operasional Lembaga Tripartit	%	100	100	100	100	53,649,900	83,649,900	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara			30	30	17,090,000	17,090,000	Kota Sukabumi
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara			30	30	9.999.900	39.999.900	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi	1	1	1	1	8.000.000	8.000.000	Kota Sukabumi
2.07.05.2.02.0004	pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20	20	20	20	18,560,000	18,560,000	Kota Sukabumi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	%	90%	90%	90%	90%	87,000,000	60,000,000	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persebaran penduduk ke wilayah transmigrasi	%	70%	70%	70%	70%	87,000,000	60,000,000	Kota Sukabumi

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Keluaran Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Lokasi Output Kegiatan
				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		
				Program/Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	5,000,000	10,000,000	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	1	1	1	1	5.000.000	5.000.000	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	2	2	2	2	20.000.000	-	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	2	2	2	2	10.000.000	-	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	1	1	1	1	15.000.000	15.000.000	Gorontalo
3.32.03.2.01.0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK	2	2	2	2	5.000.000	-	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK	2	2	2	2	2.000.000	-	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK					10.000.000	-	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket	2	2	2	2	10.000.000	-	Kota Sukabumi
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1	1	1	1	5.000.000	30.000.000	Gorontalo

BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPPA-SKPD) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun anggaran 2024.

S. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan sebagai dokumen rencana perubahan tahunan. Rencana kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam tujuan Dinas dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan yang disusun dengan berpedoman pada rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan yang dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan, merupakan dokumen kerja organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun, Renja dapat dikatakan sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi sebagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah penanggung jawab. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi sebagai salah satu Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian eksistensi keberadaan Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah menjadi suatu keharusan sebagai lembaga penyedia informasi bagi pengguna dalam mengakses informasi. Adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Perubahan Rencana kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategi (renstra) sesuai arahan operasional dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan
 - b. Perubahan Rencana kerja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program kegiatan serta pagu anggaran ke dalam
-

aplikasi e planning RKPD perubahan dan KUA PPAS serta bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) perubahan tahun 2024.

- c. Perubahan Rencana kerja merupakan salah satu instrument untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja perangkat daerah serta capaian dan realisasi rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang tercapai.

Perubahan Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumberdananya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
-

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024-2026;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 113);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksudnya adalah :

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan dan Arsip Daerah selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2024.

1.3.2. Tujuannya adalah :

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran periode satu tahun;
3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban Renstra Tahun 2024 - 2026 terutama dalam tugas urusan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.
4. Diimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah.

1.1.Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

Bab ini menjelaskan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah triwulan II semester I tahun (n) berjalan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3.Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Riveu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPd

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Matrik Perubahan Pencana Kerja Sesuai SIPD, dengan Perubahannya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra mencakup telaahan terhadap hasil (outcome) masing-masing program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Tahun lalu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas, dengan pengukuran tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 154 Tahun 2022, yang memiliki Tugas dan Fungsi yakni melaksanakan pembinaan, layanan, dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan penataan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian bahan Pustaka dan Arsip Daerah serta mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang Perpustakaan, maka untuk mengukur tingkat capaian atas berbagai program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan adalah Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi. Terkait Cascading Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, evaluasi terhadap rencana kerja tahun lalu dilakukan pada aspek pelayanan publik, adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Keg.sub.keg (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2018- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	2	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	55,44	100
			Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100	100	100	100	100	88,88	100
			Sub. Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra	5	10	10	100	3	3	12
				Jumlah peserta FGD	80	60	60	100			
			Sub. Keg. Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ, SPIP	20	20	20	100	0	0	12

			Sub. Keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD					10	10	15
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	68,47	100
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang per Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	14	14	14	100	378	216	378
			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5	5	5	100	5	0	5
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	90	90	100	100	63,33	100
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	18	16	16	100	11	6	15
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	27	15	15	100	30	15	30
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ATK yang tersedia	56	15	15	100		-	-
				Jumlah umbul-umbul dan bendera	3	3	3	100		-	-
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					160	82	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Galon, Air Mineral Dus	500	500	500	100	200	129	250

					Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	275	275	275	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	15	16	16	100	8	6	10
					Jumlah Penggandaan	20000	2500	2500	100		1500	10000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah yang tersedia	32	20	20	100	100	50	100
				sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	175	91	91	100		100	100
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					223	137	250
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	100	90	100	100	100	30	100
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	1	1 pkt	1	100	26	-	10
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Kantor	1	1 pkt	1	100	2	-	4
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	90	100	100	100	50,36	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai @ 10.000	100	100	100	100	50	50	100
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet	12	100	12	100	12	6	12
				Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan	12	12	12	100	12	6	12

			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pembayaran Upah THL	13	13	13	100	13	7	13
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemeliharaan Barang milik daerah	100	90	100	100	100	77,78	100
			Penyediaan jasa Pemeliharaan; Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	10	10	10	100	8	6	10
				Jumlah BBM kendaraan dalam satu tahun	5000	2200	2200	100	-	-	
				Jumlah STNK dalam satu tahun	10	10	10	100	8	5	10
			Pemeliharaan mebel	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diperbaiki	5	3	3	100	8	8	10
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki , komputer, laptop, printer AC	4	4	4	100	4	3	6
			Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah server, jaringan aplikasi yang terpelihara	2	4	4	100	2	1	2
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki	2	2	2	100	2	1	2
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	59	58	70,10	100	72	33,74	72
			Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan sesuai standar	A	A	96	100	142	48	142

			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	3	1	1	100	-	-	-
				Profil Perpustakaan Se-Kota Sukabumi	5	5	5	100	-	-	-
				Jumlah perpustakaan yang dibina	20	20	20	100	-	-	-
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota *****	Jumlah pengunjung perpustakaan rujukan (perpustakaan umum, storry telling, parenting, puskel)	75.000	75.000 org	217766	100	-	-	-
				Media center literasi	1	1 unit	1	100		-	-
				Jumlah sarana Pojok Baca	10	10 bh	10	100			
				Jumlah layanan perpustakaan rujukan yg dikembangkan	-	-	-	-	13	7	13
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi	6.000	913 Eks	1167	120	152	2	2000
				Jumlah koleksi yang dilestarikan	500	500 Eks	500	100			
			Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah komunitas penggerak literasi	65	65	35	50	65	40	65
			Sub. Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	-	-	-	-	7	4	7
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba festival literasi	7	5 jenis	8	100	-	-	-
				Jumlah karya literasi siswa	300	300	150	50			

					Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan budaya gemar membaca					18	0	18
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan inklusi sosial	13	12 lembaga	12	100	13	7	13
2	23	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	85	72,50	70	90	63,50	33,15	100
2	23	2										
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	75	75%	67%	100	60%	45	60
				Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah pendampingan pengelolaan arsip di SKPD/Pencipta arsip	33	15	33	100	-	-	-
					Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan					200	100	200
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip aktif yang terpelihara	33	-	33	100	-	-	-
					Jmh SKPD yang telah meakanakan penyusutan arsip inaktif	5	-	5	100	-	-	-
					Jmh naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan		-	-	-	600	500	600
					Jumlah Tenaga profesional Arsip	10	10	4	40	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Prosentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	75	60	60	100	60	20,63	60

			Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kab/kota					31	10	31
			Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip statis	Terduplikasinya arsip statis mantan kepala daerah Kota Sukabumi	10	5 kepala Daerah	2	20	-	-	-
				Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisis pengolahan preservasi dan akses arsip statis	-	-	-	-	1	1	2
			Kegiatan Pengolahan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kota /kab	Prosentase jumlah arsip yang dimasukan dalam sikn dan jikn	1.5	1.8		100	2	1,11	2
			Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Jumlah arsiparis dan karyawan kearsipan untuk mengikuti praktek khusus pengelolaan kearsipan	4	4 orang		100	-	-	-
				Jumlah peserta workshop, bintek bagi pengelola kearsipan	50	50 org		120	-	-	-
				Jumlah laporan embayaan kapasitas unit kearsipan					4	3	4
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah.					66,80	40,01	68
			Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Jumlah arsip yang dilakukan restorasi		8			5	3	5

				Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana					5	3	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi pada tabel diatas, adanya indikator program dan kegiatan yang masih belum tercapai sehingga masih dibutuhkan untuk penambahan anggaran perubahan, Untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi adanya alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 293.000.000 untuk kegiatan sebagai berikut yaitu kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 38.000.000,- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Rp. 29.300.000,- kegiatan penyediaan jasa Rp. 41.000.000,- kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang daerah Rp. 157.500.000,- kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota Rp. 20.000.000,- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota 7.200.000,- dengan total anggaran Dinas sebesar Rp. 10.425.564.574,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah bahwa penyelenggraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut terdapat urusan pemerintahan yang konkuren yang diserahkan kepada daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan Perpustakaan dan urusan Keasrian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar.

Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terus berupaya untuk memberikan kinerja

pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lain yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan, yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Sukabumi

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			• Persentase Capaian			Catatan alasan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasa masyarakat			3,45	3,5	-	4,12	4	-	119	114	-	
2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat			55,5	55,75	-	96,85	82,15	-	175	147	-	
3	Persentasi OPD yang sudah menerapkan arsip secara baku			90	95		90	95	-	100	100	-	
4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			-	-	72	-	-	-	-	-	-	

5	Jumlah penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar nasional	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	
6	Masyarakat yang berkunjung ke Depo Arsip dan mengakses SIKN/JIKN	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	
7	Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi kearsipan dinamis terintegrasi	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 154 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, bahwa Dinas menyelenggarakan Pemerintahan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026, yang memuat Tujuan dan sasaran Dinas, dimana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan.

Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi yang jelas dalam pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta adanya Rencana Strategis tersebut telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isunya Kota Sukabumi yang literat dan penataan arsip yang lebih baik, walaupun dalam pelaksanaan tidak terlepas adanya permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

- a. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan fungsi yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.
Dilihat dari kedudukan saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi menghadapi kondisi lingkungan eksternal, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, sesuai dengan fungsinya bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah pelayanan terhadap masyarakat, yaitu melayani masyarakat pengunjung perpustakaan dan pengguna arsip.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi untuk level jabatan struktural dan Jabatan Fungsional dimana untuk Jabatan Fungsional tanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dan untuk jabatan struktural tanggungjawab sesuai dengan penjenjangan.

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi adalah keterbatasan jumlah SDM dan pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural kondisinya belum merata, akibat kondisi tersebut tingkat pengendalian kinerja menjadi tanggungjawab para pejabat struktural sehingga menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja.

- Permasalahan Urusan Perpustakaan

- a. Terdapat kekurangan sumberdaya manusia yang menangani teknologi informasi dibidang perpustakaan;
 - b. Gedung perpustakaan umum Kota sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di wilayah Kota Sukabumi masih terdapat kekurangan dengan terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan baik layanan utama maupun layanan ekstensi. Sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas dengan kondisi sebanyak 7 (Tujuh) tenaga pustakawan terdiri 3 (tiga) Pustakawan Trampil, 1 (satu) Pustakawan Ahli Utama dan 4 (empat) Pustakawan ahli muda, dan dalam pelaksanaan layanan dibantu oleh 8 orang staf/pelaksana, dan 1 orang Kepala Bidang Sedangkan sumber daya manusia pengelola perpustakaan di luar perpustakaan umum kota masih sangat kekurangan terutama dalam kompetensi dan kualifikasi yang linear;
 - c. Sarana prasarana perpustakaan perlu peningkatan kualitas berdasarkan standar perpustakaan nasional (ruang layanan, komputer, *scanner*, ruangan pengolahan, ruang deposit dan preservasi);
 - d. Perpustakaan di Kota Sukabumi yang mengacu kepada standar Unicef pada saat ini masih terdapat 4 (empat) perpustakaan untuk 100.000 penduduk sedangkan idealnya 10 (sepuluh) perpustakaan untuk 100.000 penduduk atau 1 (satu) kelurahan memiliki 1 (satu) perpustakaan;
 - e. Perlunya pembinaan perpustakaan dalam rangka peningkatan perpustakaan berstandar nasional.
 - f. Perlunya Peningkatan pembinaan budaya literasi masyarakat
-

- g. Merubah persepsi masyarakat terhadap lembaga perpustakaan yang hanya sebagai tempat membaca dan gudang buku menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Permasalahan Urusan Kearsipan

- Kurangnya kesadaran perangkat daerah terhadap pengelolaan arsip;
 - Sumber daya manusia yang dimiliki di bidang kearsipan masih kurang, jumlah tenaga arsiparis saat ini hanya sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang arsiparis ahli madya, 3 (tiga) orang arsiparis ahli muda dan 2 (dua) orang arsiparis penyelia, kepala Bidang 1 orang 3 orang staf sedangkan arsiparis yang dibutuhkan untuk lembaga kearsipan daerah (LKD) adalah 10 (sepuluh) orang. Untuk jumlah arsiparis yang dibutuhkan di Perangkat Daerah sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) orang terdiri dari arsiparis Perangkat Daerah eselon II sebanyak 33 orang, di puskesmas 17 (tujuh belas) orang dan sekolah jenjang SMPN sebanyak 16 (enam belas) orang dan Kelurahan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dibidangnya;
 - Gedung depo arsip yang dimiliki saat ini belum sesuai dengan PERKA ANRI (Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 2015 tentang pembentukan Depo Arsip;
 - Sedang diusulkannya bantuan Keuangan untuk Pembangunan Depo Arsip.
 - Perlunya merubah persepsi mengenai arsip yang dipandang sebelah mata dan dianggap tidak penting menjadi arsip sebagai dokumen Negara dan menjadi memori kolektif bangsa.
 -
- b. Tantangan dan peluang Peningkatan Kinerja Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.
- a. Bahwa perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan
-

tentunya akan maju apabila didukung oleh perpustakaan yang baik dan dapat diandalkan. Presentasi tingkat minat baca untuk semua kalangan masyarakat tentunya menjadi tugas perpustakaan untuk lebih baik memberikan pelayanan, oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan harus terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan teknologi untuk pendidikan karena kedepannya semua akan bersifat teknologi sehingga pentingnya juga literasi digital.

- b. Bahwa arsip sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang terbit oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.
- c. Tantangan untuk bidang perpustakaan dan kearsipan adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan baik dibidang perpustakaan maupun kearsipan.
- d. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Terhadap Capaian Program Nasional.

Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi 2024-2026 bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi mempunyai Tujuan 1. Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif dan Tujuan 2. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik dan inovatif dengan Tujuan Dinas Yaitu :

- 1. Meningkatkan Pemerintahan yang akuntel.
- 2. Meningkatkan budaya literasi.
- 3. Meningkatnya nilai audit kearsipan perangkat Daerah dan akses masyarakat terhadap arsip statis dan dinamis.

Berkaitan dengan hal tersebut yang mana telah dijabarkan kedalam cascading Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPd

Bahwa untuk rancangan akhir perubahan Renja Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 adanya pergeseran anggaran dan

penambahan anggaran untuk penambahan kegiatan adalah sebagai berikut Untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi adanya alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 293.000.000 dalam kegiatan sebagai berikut: kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 38.000.000,-Kegiatan penyediaan jasa 41.000.000,-Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Rp. 29.300.000,- kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang daerah Rp.157.500.000,- untuk DED Pembangunan Gedung Depo Arsip, kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota Rp. 20.000.000,- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota sebesar 7.200.000,- dengan total anggaran Dinas sebesar Rp.10.425.564.574,- akan tetapi untuk review kebutuhan kegiatan dinas yang dapat dilihat dalam tabel.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota sukabumi

Dinas Perpustakaan Dan
Arsip Daerah Kota Sukabumi

Lembar dari ..

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Sukabumi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	5.137.282.234	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Sukabumi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah	100	5.434.610.724	
	Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100	18.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100	18.500.000	
	Sub. Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen renja	5	16.500.000	Sub. Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	16.500.000	

			Jumlah peserta FGD	50							
	Sub. Keg. Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ,	15	2.000.000	Sub. Keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	15	2.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	4.259.645.234	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	4.559.794.578	
	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	14	4.258.445.234	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang / Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	378	4.558.794.578	
	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	600.000	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	600.000	
	Sub. Keg. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis		Jumlah Dokumen Laporan Prognosis	5	600.000	Sub. Keg. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah laporan dokumen dan analisis prognosis	5	600.000	

	realisasi anggaran		Realisasi Anggaran					realisasi anggaran			
					1.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah	90	1.500.000	
	Sub keg. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah		Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil penilaian barang milik daerah SKPD		1.500.000	Sub keg. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah		Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil penilaian barang milik daerah SKPD	3	1.500.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	44.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	155.000.000	
	Sub keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	8	6.000.000	Sub keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	6.000.000	
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	13	25.000.000	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disedia	30	25.000.000	

			Jumlah ATK yang tersedia	30							
	Sub Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jmh isi ulang gas	24	6.000.000	Sub Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	160	5.000.000	
			Agua galon	216							
	Sub Keg. Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	450	8.000.000	Sub Keg. Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik yang disedia	200	16.000.000	
			Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	171							
	Seb keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak	11	19.000.000	Seb keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disedia	8	219.000.000	
			Jumlah Penggandaan	15205							
	Sub. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah yang tersedia	10	5.000.000	Sub. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	800,00	6.000.000	

	sub. Keg Penyelenggaraa n Rapat Koodinasi dan Konsultan SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	183	87.000.000	sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultan SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	223	117.000.000	
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	160							
	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	187.900.000	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	187.900.000	
	Sub. Keg Pengadaan Mebeleur		Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	5	9.900.000	Sub. Keg Pengadaan Mebeleur		Jumlah Paket mebel yang disediakan	26	19.900000	
	Sub. Keg Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Kantor	7	178.000.000	Sub. Keg Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	30.000.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	432.232.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	436.232.000	

	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Meterai @ 10.000	97	1.000.000	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100	2.000.000	
	Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet	12	115.0000.000	Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah lapran penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	12	175.000.000	
	Sub. Keg Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor		Jumlah tenaga keamanan	14	16.400.000	Sub. Keg Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa	12	24.000.000	
	Sub. Keg Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Pembayaran Upah THL	13	303.832.000	Sub. Keg Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Pembayaran Upah THL	13	303.832.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	52.755.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	52.755.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	7	44.975.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	64.975.000	

			Jumlah BBM kendaraan dalam satu tahun								
			Jumlah STNK dalam satu tahun								
	Sub Keg Pemeliharaan mebel		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diperbaiki	10	800.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	800.000	
	Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki , komputer, leptop, printer, AC	5	6.980.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	14.450.000	
	Sub Keg Pemeliharaan aset tak berwujud		Jumlah server, jaringan aplikasi yang terpelihara	2	11.250.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	11.250.000	
	Sub Keg Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki	2	15.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	145.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72	4.808.712.700	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72	4.835.912.700	
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota		Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar	33	4.482.082.000	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar	33	4.482.082.000	

	Sub. Keg Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di TK daerah kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub. Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota		Jumlah layanan perpustakaan rujukan yanag dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	13	4.482.082.000	Sub. Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota		Jumlah layanan perpustakaan rujukan yanag dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	13	4.412.082.000	-
			Jumlah layanan puskel								
			Jumlah tayangan dan cerita dongeng on line								
	Sub. Keg Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	152	70.000.000	Sub. Keg Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	152	90.000.000	
	Kegiatan Pembudayaan		Jumlah komunitas	65	369.894.900	Kegiatan Pembudayaan		Jumlah Komunitas	65	326.630.700	

	Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota		penggerak budaya literasi			Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota		Penggerak budaya gemar membaca			
	Sub. Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar pendidikan khusus serta masyarakat		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7	45.400.000	Sub. Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar pendidikan khusus serta masyarakat		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7	52.000.000	
	Sub. Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan budaya gemar membaca Tingkat Kabupaten / Kota	18	71.404.000	Sub. Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan budaya gemar membaca Tingkat Kabupaten / Kota	18	108.034.000	
	Sub. Keg Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	13	209.826.700	Sub. Keg Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	13	342.625.700	

	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	63,35	126.541.150	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	63.53	323.865.050	
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60	53.001.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60	53.001.000	
	Sub. Keg Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	200	10.559.700	Sub. Keg Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	200	10.559.700	
	Sub Keg. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	600	42.441.300	Sub Keg. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	600	42.441.300	
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota		Prosentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60	35.663.200	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60	35.663.200	
	Sub Keg. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kab/Kota		Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis	31	13.412.950	Sub Keg. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kab/Kota		Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis	31	13.412.950	

			kewenangan kab/kota				kewenangan kab/kota			
	Sub. Keg Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1	22.250.250	Sub. Keg Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1	22.250.250	
	Kegiatan Pengolahan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kota /kab		Prosentase jumlah arsip yang dimasukan dalam sikon dan jikon	2	37.876.950	Kegiatan Pengolahan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kota /kab	Prosentase jumlah arsip yang dimasukan dalam sikon dan jikon	2	37.876.950	
	Sub. Keg Penyediaan informasi akses dan Layanan Kearsipan Tk. Kabupaten /Kota Melalui JIKN		Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan TK Kab/kota melalui JIKN	5	10.000.000	Sub. Keg Penyediaan informasi akses dan Layanan Kearsipan Tk. Kabupaten /Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan TK Kab/kota melalui JIKN	5	10.000.000	
	Sub. Keg Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah		Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota	4	27.876.950	Sub. Keg Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota	4	27.876.950	

	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN PENYELAMATA N		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjaw aban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah.	66,80	28.500.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjaw aban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah.	66,80	21.500.000	
	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kab/kota		Jumlah arsip yang dilakukan restorasi	5	28.500.000	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kab/kota		Jumlah arsip yang dilakukan restorasi	5	21.500.000	
	Sub. Keg Pemulihan dan penyimp[anan arsip akibat bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5	28.500.000	Sub. Keg Pemulihan dan penyimp[anan arsip akibat bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5	21.500.000	
	JUMLAH TOTAL				10.132.564.574					10.425.564.574	

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada renstra perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel TC.31

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SUKABUMI

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Rens tra OPD	Realisi Capaian REN JA OPD Tahun 2023	Pra kiran Capaian Targ et REN JA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kel om po k Sa sar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perang kat Daerah Penang gung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indi katif (Rp)				
											Sebel um	Sesud ah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							5.039.797.131,00	10.101.036.084,00	10.425.564.574,00							0,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.039.797.131,00	10.101.036.084,00	10.425.564.574,00							0,00			
	2	2	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4.884.755.326,00	9.945.994.934,00	10.270.523.424,00							0,00			
1	2	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.488.124.626,00	5.137.282.234,00	5.434.610.724,00							0,00			
	2	2	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00			-	-	-		0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah		
	2	2	0	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	00	01	

[illegible]

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	23	21	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	0 Laporan	65.000.000,00	87.000.000,00	117.000.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	23	21	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00			-	-	-			0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	23	21	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	23	21	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	178.000.000,00	207.300.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	23	21	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	414.668.000,00	436.232.000,00	436.232.000,00			-	-	-			0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit	0 Unit	45.000.000,00	44.975.000,00	64.975.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel																				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit	7.000.000,00	6.980.000,00	14.450.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																				
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit	11.285.550,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					0 Unit	0 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	145.000.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah

2	2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA AN	-					-	-	396.630.700,00	4.808.712.700,00	4.835.912.700,00								0,00	
	2	2	0	2.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/ Kabupaten/ Kota	-	-				-	-	90.000.000,00	4.482.082.000,00	4.482.082.000,00			-	-	-			0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	2	2	0	2.	00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berdasarkan ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)					0 Layanan	0 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00		Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	2	2	0	2.	00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi					-	2 Layanan	0,00	4.412.082.000,00	4.412.082.000,00		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- Perpustakaan Daerah	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah

	2	3	0	2.	00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																				
				01	09		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					0 Ekse mplar	0 Ekse mplar	70.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	3	0	2.		Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-				-	-	306.630.700,00	326.630.700,00	326.630.700,00			-	-	-				0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	3	0	2.	00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																				
				02	01		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					0 Lokus	0 Lokus	45.400.000,00	45.400.000,00	52.600.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	3	0	2.	00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																				
				02	03		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					0 Orang	0 Orang	71.404.000,00	71.404.000,00	71.404.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah
	2	3	0	2.	00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																				
				02	04		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					0 Perpu staka an	0 Perpu staka an	189.826.700,00	209.826.700,00	209.826.700,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-					0,00	Dinas Perpusta kaan dan arsip Daerah

	2	2	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								155.041.805,00	155.041.150,00	155.041.150,00							0,00			
3	2	2	4	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-					-	-	126.541.805,00	126.541.150,00	126.541.150,00							0,00		
	2	2	4	0	2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	-		-			-	-	52.414.300,00	66.413.950,00	66.413.950,00				-	-	-	0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah	
	2	2	4	0	2	2.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
								Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					0 Berkas	0 Berkas	10.559.850,00	10.559.700,00	10.559.700,00	Kota Sukabumi, Cibeureum, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	2	2	4	0	2	2.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
								Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					0 Berkas	0 Berkas	28.441.450,00	42.441.300,00	42.441.300,00	Kota Sukabumi, Cibeureum, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	2	2	4	0	2	2.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Laporan	0 Laporan	13.413.000,00	13.412.950,00	13.412.950,00	Kota Sukabumi, Cibeureum, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	2	2	4	0	2	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	-		-			-	-	22.250.505,00	22.250.250,00	22.250.250,00				-	-	-	0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah	
	2	2	4	0	2	2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			

[illegible]

- 1740 -

	24302					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00			-	-	-			0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
	243020002					Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana					0 Arsip	0 Arsip	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kota Sukabumi, Cibeureum, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah
J U M L A H													5.039.797.131,00	10.101.036.084,00	10.425.564.574,00						0,00			

BAB. IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 merupakan rencana perubahan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Tahun 2024-2026. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2024 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan yang di sesuaikan dengan pagu anggaran yang di terima Dinas.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2024 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja Dinas sebesar Rp. 10.425.564.574,- yang dikelompokan kedalam program penungjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp. 5.434.610.724,- (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), Program urusan bidang Perpustakaan sebesar Rp. 4.835.912.700,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan program urusan Kearsipan sebesar Rp.155.041.150,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Diharapkan anggaran perubahan dapat memenuhi semua pembiayaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.

Demikian Renja Kerja (Renja) perubahan ini dibuat Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran Dinas.

T. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/209/2020;
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);

20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024;
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Bappeda Kota Sukabumi selama tahun 2024;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN BERJALAN

Bab ini memuat Hasil Evaluasi Pelaksanaan sampai dengan semester I Tahun berjalan dan Analisa Kinerja Pelayanan.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappeda.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.3. Issue Strategis yang penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA BAPPEDA

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Catatan penting kaidah pelaksanaan Rancangan Awal serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bappeda Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran pada Tahun 2024 dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari PAD Kota Sukabumi sebesar Rp. 17.268.790.873,00 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Dalam penyelenggaraan Renja 2024 sampai dengan semester I bulan Juni baru terealisasi sebesar Rp. 8.419.253.450,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sekitar 48,75%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kota Sukabumi sampai dengan Semester I Tahun 2024, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Adapun kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2024 dan pencapaian Renstra dapat di lihat pada tabel TC.29. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Kota Sukabumi dan Pencapaian Renstra sampai dengan pertengahan tahun 2024. (format terlampir)

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

Nama SKPD : Bappeda

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
										Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.740.706.288	8.445.915.054	8.445.915.054	8.016.321.353	94,91	10.203.794.925	11.004.116.945	9,40
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenatse pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu dan berkualitas	181.538.500	318.015.027	318.015.027	318.015.027	96,86	670.433.200	65.848.341	36,27
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1. Jumlah Pelaksanaan FPD 2. Jumlah Dok. Renja Murni 3. Jumlah Dok. Renja Perubahan	65.514.850	100.946.000	103.296.000	100.946.000	97,72	128.932.250	17.212.600	26,27
5	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	998.000	-	-	-	0,00	998.000	997.500	99,95
5	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	998.000	-	-	-	0,00	998.000	-	0,00

5	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	998.000	-	-	-	0,00	998.000	997.500	99,95
5	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	950.000	-	-	-	0,00	950.000	-	0,00
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD dan LKPJ	75.008.200	225.036.000	225.036.000	217.069.027	96,46	533.585.500	45.199.341	60,26
5	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Buku Laporan SPIP SKPD	37.071.450	-	-	-	0,00	3.971.450	1.441.400	3,89
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.634.922.553	5.415.753.734	5.415.753.734	5.146.131.150	95,02	5.016.607.255	2.897.324.940	51,42
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	5.627.614.453	5.413.053.734	5.413.053.734	5.143.501.150	95,02	5.009.299.155	2.895.937.840	51,46
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.869.400	210.000	210.000	210.000	100	1.869.400	-	0,00
5	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Tindakanjuti Hasil Pemeriksaan	1.699.900	-	-	-	0,00	1.699.900	656.500	38,62
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	1.699.900	210.000	210.000	210.000	100	1.869.400	424.100	22,69
5	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis	1.869.400	2.280.000	2.280.000	2.210.000	96,93	1.869.400	306.500	16,40
5	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	15.000.000	-	-	-	0,00	28.400.000	6.828.400	45,52
5	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Penyusunan RKBMD	5.000.000	-	-	-	0,00	5.000.000	2.078.600	41,57

5	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD	5.000.000	-	-	-	0,00	13.400.000	2.800.000	56,00
5	01	01	2	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang dimanfaatkan	5.000.000	-	-	-	0,00	10.000.000	1.949.800	39,00
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.489.950	254.346.000	254.346.000	237.381.109	93,33	228.894.950	205.840.100	59,93
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kaos Olahraga, Pakaian Kerja Lapangan dan Batik	73.500.000	39.750.000	39.750.000	39.465.736	99,28	78.400.000	66.083.600	89,91
5	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	119.989.950	214.596.000	214.596.000	197.915.373	92,23	20.494.950	-	0,00
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	-	-	-	0,00	130.000.000	139.756.500	93,17
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	712.972.500	427.933.100	427.933.100	412.202.689	96,32	1.123.849.500	425.695.130	59,71
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat listrik dan Penerangan	25.000.000	23.390.000	23.390.000	23.326.737	99,73	20.000.000	5.190.500	20,76
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, Umbul-umbul dan Perlengkapan HUT RI, Peralatan Kebersihan Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor)	60.792.000	44.539.500	44.539.500	42.624.969	95,70	50.000.000	32.061.400	52,74
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	38.520.000	25.195.000	25.195.000	24.197.360	96,04	44.520.000	30.860.000	80,11
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan cetakan dan Penggandaan	54.404.600	57.654.600	57.654.600	56.193.757	97,47	59.404.600	22.909.046	42,11

5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah	16.500.000	18.164.000	18.164.000	10.015.000	55,14	16.500.000	7.760.000	47,03
5	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan bahan/material	3.960.000	-	-	-	0,00	3.960.000	-	0,00
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makan dan Minum Rapat/Tamu	233.545.900	146.180.000	146.180.000	143.250.670	98,00	188.489.900	75.524.800	32,34
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	280.250.000	112.810.000	112.810.000	112.594.146	99,81	740.975.000	251.389.384	89,70
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	895.505.000	1.011.575.000	1.011.575.000	1.003.609.174	99,21	918.400.000	611.641.680	71,16
5	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
5	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Mebeulair	18.600.000	17.975.000	17.975.000	17.897.677	99,57	42.000.000	-	0,00
5	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	420.905.000	393.600.000	393.600.000	391.194.497	99,39	456.400.000	414.400.000	98,45
5	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor	210.000.000	225.000.000	225.000.000	223.036.000	99,13	210.000.000	223.036.000	96,71
5	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	210.000.000	375.000.000	375.000.000	371.481.000	99,06	210.000.000	197.2416.80	93,92
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.490.354.620	749.785.220	749.785.220	658.757.286	87,86	1.560.340.020	696.199.982	46,71

5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100	2.000.000	2.000.000	100,00
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telephone dan kawat/internet selama 12 bulan	880.541.820	397.541.820	397.541.820	325.267.353	81,82	988.841.820	418.688.510	47,55
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas dan Keamanan	309.650.000	197.850.000	197.850.000	191.670.000	96,88	289.500.000	121.160.000	39,13
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perakntoran (THL) dan Jumlah Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	298.162.800	152.693.400	152.693.400	140.119.933	91,77	279.998.200	154.351.472	51,77
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	524.870.000	258.190.000	258.190.000	240.224.918	93,04	656.870.000	184.435.231	35,14
5	01	01	2	09	02	Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	271.650.000	163.524.000	163.524.000	159.458.148	97,51	313.650.000	140.546.231	51,74
5	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang diperbaiki	25.000.000	14.000.000	14.000.000	5.800.000	41,43	25.000.000	-	0,00
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja (Komputer/Laptop ,Printer, Genset dan AC)	76.700.000	41.700.000	41.700.000	36.007.000	86,35	71.480.000	42.869.000	55,89
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	80.910.000	38.966.000	38.966.000	38.959.770	99,98	80.910.000	1.020.000	1,26
5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diperbaiki	4.780.000	-	-	-	-	-	-	0,00
5	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan taman, sumur bor dan lainnya	65.830.000	-	-	-	-	165.830.000	-	0,00

5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	2.276.582.850	940.333.500	940.333.500	937.349.530	99,68	1.950.711.950	1.493.465.835	65,60
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sukabumi	1.344.958.050	557.763.900	557.763.900	556.239.976	99,73	1.394.428.050	893.314.510	66,42
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	518.505.650	6.045.000	6.045.000	6.045.000	100	812.891.650	204.325.752	39,41
5	01	02	2	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4.490.000	12.065.000	12.065.000	11.960.000	99,13	4.490.000	4.420.000	98,44
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	44.691.000	26.500.500	26.500.500	26.500.000	100	41.591.000	33.891.000	75,83
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	10.615.000	10.115.000	10.115.000	10.105.000	99,90	6.475.000	9.620.000	90,63
5	01	03	2	05	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	405.356.400	31.1608.400	31.1608.400	310.403.550	99,61	342.930.400	374.658.700	92,43
5	01	03	2	05	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi Kecamatan	5.900.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100	23.750.000	3.820.000	64,75
5	01	03	2	05	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM D/RKPD)	355.400.000	16.9430.000	16.9430.000	169.226.426	99,88	162.300.000	26.2579.058	73,88
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan satu data Indonesia	255.888.250	172.668.500	172.668.500	171.532.650	100	219.705.250	126.738.850	49,53

5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	11.516.500	36.086.900	36.086.900	36.080.350	99,98	8.016.500	8.337.900	72,40
5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	96.971.750	21.501.600	21.501.600	21.001.500	97,67	68.888.750	7.420.000	7,65
5	01	02	2	02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	147.400.000	115.080.000	115.080.000	114.450.800	99,45	142.800.000	110.980.950	75,29
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	597.936.550	209.901.100	209.901.100	209.576.904	99,85	267.293.650	429.827.475	71,89
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	201.674.050	69.800.000	69.800.000	69.782.900	99,98	99.724.050	161.017.000	79,84
5	01	02	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	120.000.000	-	-	-	-	12.950.000	99.998.000	83,33
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	276.262.500	140.101.100	140.101.100	139.794.004	99,78	154.619.600	168.812.475	61,11
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Bidang Pembangunan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	77.800.000	209.901.100	209.901.100	209.576.904	99,85	69.285.000	43.585.000	56,02
5	01	02	2	04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	27.800.000	-	-	-	-	22.850.000	1.365.000	4,91
5	01	02	2	04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.000.000	-	-	-	-	46.435.000	42.220.000	84,44

5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	4.259.757.900	2.330.314.450	2.330.314.450	2.260.435.255	97,00	2.726.577.150	1.676.515.331	39,36
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang PPM	1.291.459.850	937.373.900	937.373.900	931.078.049	99,85	863.785.100	586.616.252	45,42
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.875.525	74.784.000	74.784.000	74.618.600	99,33	43.875.650	37.349.500	31,42
5	01	03	2	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.224.900	61.688.800	61.688.800	61.648.700	99,93	38.224.900	20.108.000	52,60
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	270.843.950	197.892.000	197.892.000	196.101.750	99,10	320.843.950	45.643.600	16,85
5	01	03	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	14.999.600	23.016.000	23.016.000	23.005.800	99,96	14.999.600	3.294.150	21,96
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.061.725	241.449.100	241.449.100	23.9384.650	99,14	57.061.850	143.766.400	39,71
5	01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.677.300	23.020.000	23.020.000	23.019.750	100,00	19.677.300	2.112.500	10,74
5	01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	311.980.500	197.199.000	197.199.000	195.829.000	99,31	331.980.500	233.300.528	71,58

							Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	154.796.350	11.8325.000	11.8325.000	117.469.799	99,28	37.121.350	111.041.574	71,73		
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang PSDA	1.751.776.350	560.335.000	560.335.000	553.148.949	98,72	774.259.200	760.888.549	43,44		
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang diakomodir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	195.462.500	239.452.000	239.452.000	234.874.800	98,09	153.360.000	165.822.050	84,84		
5	01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	25.295.000	50.020.000	50.020.000	49.745.549	99,45	4.620.000	12.312.500	48,68		
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	539.169.100	160.863.000	160.863.000	159.430.600	99,11	98.278.000	29.415.000	5,46		
5	01	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	638.974.800	50.000.000	50.000.000	49.720.000	99,44	453.651.700	364.854.251	57,10		
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	62.292.600	-	-	-	-	5.530.000	52.137.100	83,70		
5	01	03	2	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA penyusunannya	174.412.350	-	-	-	-	22.649.750	42.526.048	24,38		

							(RPJPD, RPJMD, dan RKPJMD)								
5	01	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang SDA	116.170.000	60.000.000	60.000.000	59.378.000	98,96	6.169.750	93.821.600	80,76
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur	1.216.521.700	832.605.550	832.605.550	776.208.257	93,23	1.118.532.850	329.010.530	27,05
5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	381.642.550	294.882.400	294.882.400	242.701.340	82,30	473.652.925	88.645.800	23,23
5	01	03	2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	12.324.900	19.637.500	19.637.500	18.966.310	96,58	12.325.000	5.446.900	44,19
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	27.330.000	19.492.200	19.492.200	19.193.279	98,47	27.330.000	14.260.000	52,18
5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	761.954.250	478.654.450	478.654.450	475.604.328	99,36	571.954.925	202.665.330	26,60
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	12.325.000	5.869.000	5.869.000	5.863.000	99,90	12,325.000	5.027.000	40,79
5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	20.945.000	14.070.000	14.070.000	13.880.000	98,65	20.945.000	12.965.500	61,90
5	02	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	969.797.000	676.945.800		673.478.800	99,49	1.209.698.400	155.458.480	16,03

5	02	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentase dokumen kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	490.362.600	228.424.200		227.109.200	99,42	689.433.500	62.591.600	12,76
5	02	02	2	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	186.646.000	37.278.600		32.278.600	100,00	182.768.700	44.582.000	23,89
5	02	02	2	01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	303.716.600	191.145.600		189.145.600	99,31	506.664.800	18.009.600	5,93
5	02	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase laporan kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	479.434.400	27.583.000		27.548.000	99,87	520.264.900	92.866.880	19,37
5	02	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	479.434.400	27.583.000		27.548.000	99,87	520.264.900	92.866.880	19,37

2.2. Analisis Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada di wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kota Sukabumi. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Bappeda Kota Sukabumi selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kota. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas, Bappeda Kota Sukabumi selaku lembaga teknis di bidang perencanaan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kota dalam rangka, antara lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas *“Membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan”*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi : Jabatan Fungsional Perencana
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi : Jabatan Fungsional Perencana
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi : Jabatan Fungsional Perencana
- f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi : Jabatan Fungsional Perencana
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 1. Kasubbid Litbang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 2. Kasubbid Litbang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- h. UPT Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Renstra Bappeda Tahun 2024 – 2026 serta Renja ada 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dan harus dicapai yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah;

Indikator sasarannya :

- 1.1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan;
- 1.2. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Indikator sasarannya :

- 2.1. Nilai SAKIP Bappeda

3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang Berinovasi.

Indikator sasarannya :

3.1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %	Interprestasi Pencapaian
			Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2023, RKT 2023, dan PK Bappeda 2023

Berdasarkan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 5 (lima) indikator sasaran. Berdasarkan tabel di atas dapat

disampaikan bahwa 5 (lima) indikator sasaran indikator sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Sukabumi tahun 2023 ada 5 (lima) sasaran indikator yang interpretasi capaiannya (SANGAT TINGGI).

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Bappeda didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.3 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Sukabumi

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisi	
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)		(thn n+1)
					(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n)	(thn n+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien			Persen	100	100			100	100							
2	Persentase Integrasi Pembangunan Daerah			Persen	100	100			100	100							
3	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah			Persen	100	100			100	100							
4	Persentase Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persen	100	100			100	100							
5	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi			Persen	97	100			97	100							
6	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan			Angka			26,50	27,00			26,50	27,00					
7	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja			Angka			20,50	21,00			20,50	21,00					
8	Nilai SAKIP Bappeda			Persen			65	67			65	67					
9	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi			Persen			100	100			100	100					

2.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kota Sukabumi, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

Dengan kedudukan dan fungsinya yang diselenggarakan, Bappeda Kota Sukabumi memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappeda Kota Sukabumi memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda Kota Sukabumi memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan serta menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Sukabumi menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Perubahan regulasi:

Tujuan dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah agar segala aktivitas yang dilakukan bisa berjalan lancar dan ada hukum yang berlaku jika tidak menaatinya. Perubahan regulasi baik di bidang perencanaan maupun di bidang teknis sangat strategis dampaknya pada proses perencanaan pembangunan terutama dalam penentuan fokus atau prioritas pembangunan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana:

SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagai konsekuensi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah maka ASN di lingkungan Bappeda pun menyesuaikan terhadap kebijakan tersebut.

Penyetaraan jabatan administrasi eselon IV di lingkungan Bappeda adalah Jabatan Fungsional Perencana yang dalam implementasinya masih menemukan banyak kendala terutama di dalam proses penyesuaian kompetensi, penilaian kinerja dan kenaikan pangkat.

3. SIPD versi baru:

Konsekuensi dari penerapan *e-government* di era digitalisasi tentunya sangat dirasakan di semua elemen pemerintahan. Bappeda sebagai institusi perencana di dalam proses perencanaannya sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) disebutkan bahwa SIPD adalah sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dari mulai diluncurkan sampai dengan sekarang mengalami perkembangan dan proses yang sangat dinamis dengan beberapa kali perubahan versi sehingga cukup menyulitkan daerah dalam implementasinya, namun demikian Bappeda tetap berupaya untuk bisa mengimplentasikan kebijakan tersebut dengan baik.

4. Pendanaan Pemilu dan Pilkada serentak:

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan serentak tahun 2024. Salah satu Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah kesiapan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pemilu dan pilkada serentak yang anggarannya menyedot pendanaan yang sangat besar dimulai dari proses persiapan (n-2) sampai dengan pelaksanaannya.

5. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek:

Dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) Kota Sukabumi akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2025, sedangkan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) akan berakhir tahun 2023 seiring berakhirnya periode masa jabatan kepala daerah terpilih. Dengan demikian pada waktu yang beriringan Bappeda mempunyai tugas yang cukup berat untuk menyusun dokumen- dokumen tersebut.

Selain dua dokumen tersebut Bappeda juga harus menyusun dokumen perencanaan jangka pendek (RKPD) setiap tahunnya baik periode murni, parsial maupun perubahan.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tusi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tusi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan teknologi, software serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap.

Permasalahan dan hambatan dalam Pelaksanaan Program Kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Namun demikian sudah merupakan komitmen seluruh Aparat Bappeda untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD-P Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan. Berikut tabel review terhadap rancangan awal RKPD-P tahun 2024 Kota Sukabumi:

Tabel TC.31
Review terhadap Rancangan awal RKPD-P tahun 2024
Kota Sukabumi

Nama SKPD : Bappeda

NO	Rancangan Awal RKPD-P Tahun 2024						Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah tahun 2024					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bappeda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.856.121.453	PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bappeda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.856.121.453	PAD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	581.538.500	PAD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	581.538.500	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1. Jumlah Dokumen Renja 2. Jumlah Dokumen Renstra	1. 5 Buku 2. 5 Buku	65.514.850	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1. Jumlah Dokumen Renja 2. Jumlah Dokumen Renstra	1. 5 Buku 2. 5 Buku	65.514.850	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	4 Buku	998.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	4 Buku	998.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	4 Buku	998.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	4 Buku	998.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	4 Buku	998.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	4 Buku	998.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	4 Buku	950.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	4 Buku	950.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		1. Jumlah Dokumen LKIP 2. Jumlah Dokumen LPPD	1. 5 Buku 2. 5 Buku 3. 5 Buku	475.008.200	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		1. Jumlah Dokumen LKIP 2. Jumlah Dokumen LPPD	1. 5 Buku 2. 5 Buku 3. 5 Buku	475.008.200	PAD

	Ikhtisar Realisasi Kinerja		3. Jumlah Dokumen LKPJ				Ikhtisar Realisasi Kinerja		3. Jumlah Dokumen LKPJ			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	5 Buku	15.171.450	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	5 Buku	15.171.450	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.634.922.553	PAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.634.922.553	PAD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	5.627.614.453	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	5.627.614.453	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Buku	1.869.400	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Buku	1.869.400	PAD
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Tanggapan Tindakanjult Hasil Pemeriksaan	4 Buku	1.699.900	PAD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Tanggapan Tindakanjult Hasil Pemeriksaan	4 Buku	1.699.900	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeteran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Buku	1.869.400	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeteran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Buku	1.869.400	PAD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Prognosis	4 Buku	1.869.400	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Prognosis	4 Buku	1.869.400	PAD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	22.500.000	PAD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	22.500.000	PAD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Kegiatan Penyusunan RKBMD	4 Kali	5.000.000	PAD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Kegiatan Penyusunan RKBMD	4 Kali	5.000.000	PAD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah SKPD	10 Unit	12.500.000	PAD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah SKPD	10 Unit	12.500.000	PAD
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah SKPD yang dimanfaatkan	10 Unit	5.000.000	PAD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah SKPD yang dimanfaatkan	10 Unit	5.000.000	PAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	342.539.950	PAD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	342.539.950	PAD

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit	70.300.000	PAD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit	70.300.000	PAD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	129.689.950	PAD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	129.689.950	PAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	150.000.000	PAD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Org	150.000.000	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	790.010.100	PAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	790.010.100	PAD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20.000.000	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20.000.000	PAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1. Jumlah Alat Tulis Kantor 2. Jumlah Penyediaan peralatan kebersihan 3. Jasa kebersihan kantor	1. 20 Jenis 2. 20 Jenis 3. 5 Orang	66.367.000	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1. Jumlah Alat Tulis Kantor 2. Jumlah Penyediaan peralatan kebersihan 3. Jasa kebersihan kantor	1. 20 Jenis 2. 20 Jenis 3. 5 Orang	66.367.000	PAD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	50 Jenis	38.520.000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	50 Jenis	38.520.000	PAD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1. Jumlah Barang Cetakan 2. Jumlah Penggandaan	1. 6 Jenis 2. 30.000 Lembar	59.184.600	PAD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1. Jumlah Barang Cetakan 2. Jumlah Penggandaan	1. 6 Jenis 2. 30.000 Lembar	59.184.600	PAD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah	12 Bulan	17.400.000	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah	12 Bulan	17.400.000	PAD
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	3.960.000	PAD	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	3.960.000	PAD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	204.328.500	PAD	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	204.328.500	PAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	886 Hok	380.250.000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	886 Hok	380.250.000	PAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	1.158.262.400	PAD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	1.158.262.400	PAD

	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebeulair	17 Buah	0	PAD	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebeulair	17 Buah	0	PAD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	728.262.400	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	728.262.400	PAD
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	230.000.000	PAD	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	230.000.000	PAD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.505.534.620	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.505.534.620	PAD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai 10.000	150 Lembar	2.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai 10.000	150 Lembar	2.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telephone dan kawat/internet selama 12 bulan	12 Bulan	906.141.820	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telephone dan kawat/internet selama 12 bulan	12 Bulan	906.141.820	PAD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1. Jumlah petugas keamanan 2. Jumlah petugas kebersihan	1. 12 Bulan 2. 12 Bulan	299.230.000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1. Jumlah petugas keamanan 2. Jumlah petugas kebersihan	1. 12 Bulan 2. 12 Bulan	299.230.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	298.162.800	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	298.162.800	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	893.615.000	PAD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	893.615.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	15 Unit	280.035.000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	15 Unit	280.035.000	PAD
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang diperbaiki	1 Paket	0	PAD	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang diperbaiki	1 Paket	0	PAD

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8 Unit	102.180.000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8 Unit	102.180.000	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki	1 Unit	51.400.000	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki	1 Unit	51.400.000	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diperbaiki	1 Unit	460.000.000	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diperbaiki	1 Unit	460.000.000	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan taman, sumur bor dan lainnya	1 Paket	0	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan taman, sumur bor dan lainnya	1 Paket	0	PAD
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	1. 100% 2. 100%	2.379.682.850	PAD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	1. 100% 2. 100%	2.379.682.850	PAD
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sukabumi	33 Dokumen	1.327.922.300	PAD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sukabumi	33 Dokumen	1.327.922.300	PAD
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	503.896.400	PAD	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	503.896.400	PAD
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	4.490.000	PAD	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	4.490.000	PAD
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	33.891.000	PAD	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	33.891.000	PAD
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	32 Dokumen	198.537.500	PAD	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	32 Dokumen	198.537.500	PAD

	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)				Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah pelaksanaan updating satu data Indonesia	2 Kali	214.632.650	PAD	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah pelaksanaan updating satu data Indonesia	2 Kali	214.632.650	PAD
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	8.337.900	PAD	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	8.337.900	PAD
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	62 Orang	92.951.750	PAD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	62 Orang	92.951.750	PAD
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	113.343.000	PAD	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	113.343.000	PAD
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	765.277.900	PAD	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	765.277.900	PAD
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	303.501.050	PAD	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	303.501.050	PAD
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja sama	142.086.000	PAD	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja sama	142.086.000	PAD
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Laporan	319.690.850	PAD	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Laporan	319.690.850	PAD

	Pembangunan Daerah											
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase ketersediaan dokumen Bidang Pembangunan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	71.850.000	PAD	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase ketersediaan dokumen Bidang Pembangunan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	71.850.000	PAD
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	26.050.000	PAD	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	26.050.000	PAD
	Penerapan Sistem Informasi Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	45.800.000	PAD	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	45.800.000	PAD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	1. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam 2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. 100% 2. 100% 3. 100%	4.942.577.900	PAD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	1. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam 2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. 100% 2. 100% 3. 100%	4.942.577.900	PAD

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	Persentase sinergitas perencanaan bidang PPM	100%	1.474.279.850	PAD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	Persentase sinergitas perencanaan bidang PPM	100%	1.474.279.850	PAD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	198.875.525	PAD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	198.875.525	PAD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	38.224.900	PAD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	38.224.900	PAD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	248.843.950	PAD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	248.843.950	PAD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	64.999.600	PAD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	64.999.600	PAD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	386.881.725	PAD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	386.881.725	PAD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 laporan	19.677.300	PAD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 laporan	19.677.300	PAD

	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Bidang Pembangunan Manusia		Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	311.980.500	PAD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	311.980.500	PAD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	204.796.350	PAD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	204.796.350	PAD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang PSDA	100%	2.001.776.350	PAD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	Persentase sinergitas perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	2.001.776.350	PAD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	241.329.500	PAD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	241.329.500	PAD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.295.000	PAD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.295.000	PAD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	579.993.850	PAD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	579.993.850	PAD

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	657.418.050	PAD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	657.418.050	PAD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	62.292.600	PAD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	62.292.600	PAD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	174.412.350	PAD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	174.412.350	PAD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	261.035.000	PAD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	261.035.000	PAD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDA	Persentase sinergitas perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	1.466.521.700	PAD	Persentase sinergitas perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	BAPPEDA	Persentase sinergitas perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	1.466.521.700	PAD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 laporan	474.472.050	PAD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 laporan	474.472.050	PAD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	2 Laporan	12.324.900	PAD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	2 Laporan	12.324.900	PAD

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	27.330.000	PAD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	27.330.000	PAD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	919.124.750	PAD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	919.124.750	PAD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	12.325.000	PAD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	12.325.000	PAD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	20.945.000	PAD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	20.945.000	PAD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi 2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi 3. Predikat IGA 4. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	1. 35% 2. 60% 3.Terinovatif 4. 95%	969.797.000	PAD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi 2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi 3. Predikat IGA 4. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	1. 35% 2. 60% 3.Terinovatif 4. 95%	969.797.000	PAD

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BAPPEDA	Presentase dokumen kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	490.362.600	PAD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BAPPEDA	Presentase dokumen kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	490.362.600	PAD
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	186.646.000	PAD	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	186.646.000	PAD
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	303.716.600	PAD	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	303.716.600	PAD
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPEDA	Persentase laporan kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	479.434.400	PAD	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPEDA	Persentase laporan kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	479.434.400	PAD
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	479.434.400	PAD	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	479.434.400	PAD
JUMLAH				18.784.210.873		JUMLAH				18.784.210.873	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun hasil pendataan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

TABEL 3.1 (TC.31)
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							14.749.491.00 3,00	17.268.790.87 3,00	18.784.210.87 3,00	4.034.719.870,0 0							16.512.261.72 9,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.749.491.00 3,00	17.268.790.87 3,00	18.784.210.87 3,00	4.034.719.870,0 0							16.512.261.72 9,00	
	5.01	PERENCANAAN							13.622.580.50 3,00	16.298.993.87 3,00	17.814.413.87 3,00	4.191.833.370,0 0							15.374.961.72 8,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.856.121.453 ,00	9.762.653.123 ,00	10.492.153.12 3,00	1.675.871.604,0 0							11.531.993.05 7,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	581.538.500,0 0	181.538.500,0 0	144.768.500,0 0	-436.770.000,00			-	-	-		436.800.684,0 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	65.514.850,00	65.514.850,00	50.644.850,00	-14.870.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			79.272.969,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	998.000,00	998.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.207.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	998.000,00	998.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.207.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	998.000,00	998.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.207.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.149.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				3 Laporan	3 Laporan	475.008.200,00	75.008.200,00	75.008.200,00	-400.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			307.899.020,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	37.071.450,00	37.071.450,00	15.171.450,00	-21.900.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.856.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-		5.449.433.483,00	5.634.922.553,00	5.634.922.553,00	185.489.070,00			-	-	-		6.668.604.614,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.442.125.383,00	5.627.614.453,00	5.627.614.453,00	185.489.070,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.659.761.813,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.869.400,00	1.869.400,00	1.869.400,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.261.974,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.699.900,00	1.699.900,00	1.699.900,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.056.879,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV P E N U T U P

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya terasa kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tusi dan sasaran Program Bappeda Kota Sukabumi.

Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi tahun 2024 selain menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Sukabumi. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Sukabumi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

A. Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 berfungsi sebagai bahan penyusunan Perubahan RKA/DPPA pada APBD-P Tahun 2024, dan juga sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang

sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024, yang telah diverifikasi oleh Bappeda Kota Sukabumi.

B. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional serta dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja Bappeda;
2. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKA/DPPA Bappeda serta pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja Bappeda Kota Sukabumi dengan memperhatikan evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Akhir kata, semoga Renja Perubahan Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat menjadi titik awal perencanaan pembangunan yang lebih baik, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024-2026.

U. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan Lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi No 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perubahan dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta RKPD Kota Sukabumi, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang disusun dalam Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Sehingga diharapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan dokumen perencanaan untuk tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap perangkat daerah

untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perubahan perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut pada pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan perangkat daerah di Kota Sukabumi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 156 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi sehingga pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perubahan mutlak diperlukan yaitu sebagai pedoman di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RKPD). Oleh karena itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perubahan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan *Plafond* Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perubahan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Perubahan
 - Orientasi mengenai Renja Perubahan
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja Perubahan
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi. Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja Perubahan

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi
- Telaah terhadap rancangan awal perubahan RKPd
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi;
- Penyempurnaan rancangan kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi;
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja Perubahan.

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPd.

f. Penetapan Renja Perubahan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen rencana yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi harus memperhatikan

seluruh perubahan sosial, politik dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Sehingga di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) memuat program dan kegiatan lebih menekankan kepada pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud dari kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi pada Tahun 2024, yang tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi terwujud sebagai manifestasi dari materi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementrian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi Tahun 2024. Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui

Perda Nomor 7 Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyusun dokumen Renja Perubahan 2024. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi membuat Renja Perubahan yang merupakan rencana kegiatan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi berawal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024-2026, yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dituangkan pada Rencana Kerja Perubahan yang dikumpulkan dan disusun menjadi RPD Kota Sukabumi dan tentunya sejalan dengan RPJMD Kota Sukabumi. RKPD inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS, untuk diturunkan kembali menjadi RKA pada masing-masing Perangkat Daerah. Begitupun alur tahapan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, yang merupakan penjabaran dari sasaran pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Selain itu penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi tidak lepas dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, tahun berjalan serta analisis kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Usulan program dan kegiatan sebagai hasil musrenbang juga dihimpun dan dianalisis untuk dijadikan bahan yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- d. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Serie E);
- m. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12;
- n. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 156 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi;
- o. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
- p. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.
- q. Peraturan Wali Kota Sukabumi No 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah pedoman, acuan dan dokumen perencanaan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Sukabumi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator kinerja tahun yang akan datang didalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen Bersama.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Dokumen untuk mewujudkan sasaran – sasaran dalam dokumen Perubahan Rencana Stategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
2. Menjadi alat untuk mengukur Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dengan pembandingan Renja tahun sebelumnya maupun tahun yang akan datang;
3. Pedoman dalam menyusun Dokumen Rencana, Agenda, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2024;
4. Penetapan Pelaksanaan program kegiatan Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun 2024.
5. Memperbaiki sasaran, tujuan dan target capaian kinerja BPKPD Kota Sukabumi tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 terdiri dari:

Bab I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN (BPKPD) KOTA
SUKABUMI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Semester 1
Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kota Sukabumi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi

Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA SUKABUMI

Bab IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Semester 1 Tahun 2024 dan Capaian Renstra (BPKPD) Kota Sukabumi

Hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dapat diukur secara akuntabel melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yang menjadi barometer dan tindak lanjut tahun berikutnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan yang terlampir, dengan pencapaian rata-rata masih dalam nilai toleransi persentasi dari harapan. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian sasaran program dan kegiatan secara keseluruhan dilaksanakan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi selama tahun 2024 dengan perbandingan realisasi belanja dari tahun 2021 s.d. 2023 dan realisasi belanja Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

NO	PROGRAM	Pencapaian Kinerja Semester I Tahun 2024
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	43,45
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	29,89
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	27,88
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	52,28

Tabel 2.1.2

NO	PROGRAM	Pencapaian Kinerja Tahun 2023
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,41
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	97,46
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	85,91
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	98,76

NO	PROGRAM	Pencapaian Kinerja Tahun 2022
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,77
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	96,48
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	99,96

NO	PROGRAM	Pencapaian Kinerja Tahun 2021
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92,08
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	98,16
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	80,93
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	98,86

Adapun Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

-	-	-

Tabel 2.1.4

Realisasi kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang di rencanakan :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100%

Secara umum Belanja Daerah dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut azas proporsional, efisien dan efektif namun dalam perjalanannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa permasalahan antara lain :

- a. Pengalokasian anggaran masih ada yang tumpang tindih akibat tupoksi yang belum sempurna serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan belum optimal;
- b. Penerapan alokasi belanja masih berbasis output belum sepenuhnya menghasilkan outcome.
- c. Seringnya Perubahan Regulasi
- d. Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan pasca bencana alam, bencana sosial dan penanganan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n- 1) (2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (n-2) (2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (n-2) (2023)	TINGKAT REALISASI(%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (tahun n-1) (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.02.	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan, dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang berdisiplin (%)	90%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan barang penunjang yang memadai (%)	90%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi (%)	90%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang memadai (%)	90%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah (%)	90%	100%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	97,33%	90%	90%	90%	100%	96,67%	100%	96,67%

		Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90%	92%	90%	90%	100%	92%	100%	92%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan barang milik daerah (%)	90%	92%	90%	90%	100%	90%	100%	90%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian pajak daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak (%)	60%	60%	60%	60%	100%	60%	100%	60%
		Persentase peningkatan pajak daerah (Persentase)	5%	5%	5%	5%	100%	5%	100%	5%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel TC-29 sebagai hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dapat diukur secara akuntabel melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yang menjadi barometer dan tindak lanjut tahun berikutnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan yang terlampir, dengan pencapaian rata-rata masih dalam nilai toleransi persentasi dari harapan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi yang telah tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2024-2026.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dilihat dari kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan membandingkan penyerapan anggaran kegiatan dengan dana yang tersedia. Adapun kinerja yang sudah dilaksanakan berdasarkan sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra meliputi :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas APBD yang berorientasi pada kepentingan publik;
2. Meningkatnya optimalisasi potensi pendapatan daerah;
3. Meningkatnya manajemen barang milik daerah yang kredibel.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Sukabumi

No	Indikator	IKK	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	29,25	Persen	29,25	29,54	30,27	31	31
3	Rasio PAD	2,73	Persen	2,73	2,82	2,96	3,11	3,11
4	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	86,61	Persen	86,61	87	88,00	89	89
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3,92	Persen	3,92	4	5	6	6
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1	Persen	1	1,5	2	3	3
7	Manajemen aset	90	Persen	90	90	90	90	90
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9	Persen	9	9	8	7	7
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	Persen	100	100	100	100	100
10	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	96,67	Persen	96,67	97,33	97.66	98	98

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dalam kegiatannya sejauh ini telah sesuai dengan target yang diharapkan walaupun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Namun kendala yang ada dapat diatasi dengan baik. Adapun kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai perangkat daerah pengelola keuangan daerah diantaranya :

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi di dalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kota Sukabumi menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1. Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*Virtual*).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan masyarakat yang dinamis telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah dengan membuat beberapa sistem yang sekiranya bisa mendongkrak pendapatan daerah juga pelayanan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Smart Elok dan aplikasi lain yang tertuang dalam beberapa program yang dilaksanakan dalam tahun 2024.

c. Isu Strategis

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi telah sesuai dengan target yang diharapkan walaupun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Namun kendala yang ada dapat diatasi dengan baik. Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan sistem informasi pada Potensi Meningkatnya Pendapatan;
2. Kualitas Data;
3. Kompetensi SDM;

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) jika dilihat dari peta jabatan yang dibutuhkan jumlah pegawai masih minim.
2. Tempat kantor yang digunakan saat ini sangat strategis, akan tetapi tidak mencukupi ruang dalam pelayanan masyarakat dan juga tempat arsiparis yang minim sehingga sangat membatasi ruang gerak pelayanan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi adalah dengan *tapping box* yang sekiranya bisa mendongkrak pendapatan daerah juga pelayanan terhadap masyarakat dengan program sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi Pantas yang memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak
2. Belum maksimalnya penggunaan SIPD karena baru sampai pada tahap penganggaran sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya bisa dilaksanakan.

Beberapa isu strategis yang harus diantisipasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi agar tidak menjadi permasalahan ke depan diantaranya:

1. Arah kebijakan dan perkembangan aplikasi SIPD-RI sebagai aplikasi satu-satunya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan keuangan yang sampai saat ini dalam pelaksanaannya di Kota Sukabumi baru pada modul perencanaan dan penganggaran.
2. Kebijakan tentang besaran anggaran Belanja Pegawai sebesar maksimal 30% dari total APBD.
3. Pengalokasian kebutuhan gaji P3K.
4. Pemenuhan anggaran BPJS Kesehatan untuk pemenuhan *Universal Healthy Coverage (UHC)*.
5. Perubahan aturan tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.
6. Perubahan kebijakan Kepala Daerah Periode 2024-2029.
7. Pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD).

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang selanjutnya dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi meliputi:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Ketepatan waktu dalam penyampaian RAPBD
3. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
4. Persentase Capaian Pajak Daerah
 - a. Persentase Peningkatan Pajak Daerah
 - b. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Realisasi Pendapatan Kota Sukabumi sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.650.386.398.371,00 atau 50,67% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.283.490.212.312,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.415.861.936.061,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp.852.691.526.251,00 dan lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp.14.936.750.000,00 dari target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi selengkapnya dapat dilihat pada sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	U R A I T A N	Reff	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	PROGNOSIS
1	PENDAPATAN	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	66.635.783.945,00	36.507.596.335,00	54,79	66.635.783.945,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	35.279.411.072,00	16.063.716.511,00	45,53	35.384.029.110,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	4.753.064.486,00	3.917.911.099,00	82,43	4.634.050.148,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4	309.193.676.558,00	148.783.888.613,00	48,12	296.761.738.931,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		415.861.936.061,00	205.273.112.558,00	49,36	403.415.602.134,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1				
10	Dana Bagi Hasil		57.578.708.490,00	46.861.649.450,00	81,39	78.317.173.490,00
11	Dana Alokasi Umum		507.104.171.000,00	278.041.198.850,00	54,83	507.104.171.000,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik		34.308.668.648,00	1.319.544.750,00	3,85	34.308.668.648,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		134.904.484.000,00	71.005.690.861,00	52,63	132.992.480.478,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		733.896.032.138,00	397.228.083.911,00	54,13	752.722.493.616,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.b.2				
16	Insentif Fiskal		7.583.943.000,00	3.791.971.500,00	-	7.583.943.000,00
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
19	Dana Desa		-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		7.583.943.000,00	3.791.971.500,00	-	7.583.943.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH	5.1.1.b.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil		81.309.253.875,00	29.497.554.194,00	36,28	81.309.253.875,00
21	Bantuan Keuangan		29.902.297.238,00	6.671.729.800,00	22,31	29.902.297.238,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		111.211.551.113,00	36.169.283.994,00	32,52	111.211.551.113,00
23	Total Pendapatan Transfer		852.691.526.251,00	437.189.339.405,00	51,27	871.517.987.729,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c				
25	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya		14.936.750.000,00	7.923.946.408,00	53,05	14.936.750.000,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		14.936.750.000,00	7.923.946.408,00	53,05	14.936.750.000,00
29	JUMLAH PENDAPATAN		1.283.490.212.312,00	650.386.398.371,00	50,67	1.289.870.339.863,00

(dalam rupiah)

No.	U R A I A N		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	PROGNOSIS
30	BELANJA	5.1.2				
31	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	564.590.396.626,00	291.218.316.084,00	51,58	572.047.937.428,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	554.634.709.104,00	281.173.777.739,00	50,70	554.634.709.104,00
34	Belanja Bunga		-	-	-	-
35	Belanja Subsidi		-	-	-	-
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	71.665.890.809,00	23.691.871.025,00	33,06	71.665.890.809,00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	3.302.500.000,00	468.000.000,00	14,17	3.302.500.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi		1.194.193.496.539,00	596.551.964.848,00	49,95	1.201.651.037.341,00
39	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
40	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	-	-	-	-
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	49.797.423.749,00	9.843.028.970,00	19,77	49.797.423.749,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	30.358.019.758,00	2.416.699.994,00	7,96	30.358.019.758,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	15.990.648.980,00	2.510.363.827,00	15,70	15.990.648.980,00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.586.768.880,00	990.793.998,00	27,62	3.586.768.880,00
45	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	1.962.000.000,00	31.335.300,00	1,60	1.962.000.000,00
46	Jumlah Belanja Modal		101.694.861.367,00	15.792.222.089,00	15,53	101.694.861.367,00
48	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga		9.052.690.329,00	2.398.929.000,00	26,50	9.052.690.329,00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		9.052.690.329,00	2.398.929.000,00	26,50	9.052.690.329,00
51	JUMLAH BELANJA		1.304.941.048.235,00	614.743.115.937,00	47,11	1.312.398.589.037,00
52	TRANSFER					
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
54	Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
55	Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	-
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		-	-	-	-
58	SURPLUS / DEFISIT	5.1.3	(21.450.835.923,00)	35.643.282.434,00	(166,16)	(22.528.249.174,00)

(dalam rupiah)

No.	U R A I A N		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	PROGNOSIS
59	PEMBIAYAAN	5.1.4.				
60	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
61	Penggunaan SILPA		23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	219,88	51.564.237.117,00
62	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
63	Penerimaan kembali pinjaman - Dana Bergulir		-	-	-	-
64	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
65	Penarikan Investasi Jk. Pendek		-	-	-	-
66	Pengembalian Dana Kemitraan		-	-	-	-
67	Jumlah Penerimaan		23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	219,88	51.564.237.117,00
68	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.b				
69	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
71	Pembayaran utang jangka panjang		-	-	-	-
72	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
73	Jumlah Pengeluaran		2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
74	Pembiayaan Neto		21.450.835.923,00	51.564.237.117,00	240,38	49.564.237.117,00
75	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5.	-	87.207.519.551,00	-	27.035.987.943,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, Juli 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI


KUSMANA HARTADJI

Dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Sukabumi sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 50,67%. Sedangkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sukabumi mencapai 49,95% yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 51,58%, belanja barang dan jasa 50,70%; belanja hibah sebesar 33,06%; serta belanja bansos sebesar 14,17% adapun realisasi belanja modal sebesar 15,53%.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.709.360.342.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.709.360.342.00	
	KEUANGAN				57.709.360.342.00	KEUANGAN				57.709.360.342.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100	38.764.749.407.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100	38.764.749.407.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pemenuhan, dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	230.132.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pemenuhan, dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	230.132.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	20.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	20.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	185.132.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	185.132.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	25.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	25.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	30.888.742.187,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	30.888.742.187,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	30.858.742.187,0 0		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	30.858.742.187,0 0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	5.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	5.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8	19.995.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8	19.995.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	5.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	5.000.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	5.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	5.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase aparatur yang berdisiplin (%)	90	324.790.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase aparatur yang berdisiplin (%)	90	324.790.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	64.790.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	64.790.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	107	200.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	107	200.000.000,00

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	107	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	107	25.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase penyediaan barang penunjang yang memadai (%)	90	1.884.577.825,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase penyediaan barang penunjang yang memadai (%)	90	1.884.577.825,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	65.400.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	65.400.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	763.802.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	763.802.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	231.250.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	231.250.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	116.740.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	116.740.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	124.640.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	124.640.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	40.000.000,00	

Penyediaan Bahan/Material	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	46.246.995,00	Penyediaan Bahan/Material	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	46.246.995,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	150.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	150.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	268.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	268.000.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	179.375.325,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	179.375.325,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi (%)	90	1.716.246.995,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi (%)	90	1.716.246.995,00	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24	690.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24	690.000.000,00	
Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	200.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	200.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	920.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	920.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	100.000.000,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	100.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase penyediaan jasa penunjang yang memadai (%)	90	1.921.539.400,00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase penyediaan jasa penunjang yang memadai (%)	90	1.921.539.400,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	420	12.000.000.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	420	12.000.000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	590.292.000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	590.292.000.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	383.440.000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	383.440.000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	941.196.400.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	941.196.400.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase terpeliharanya barang milik daerah (%)	90	1,179.090.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase terpeliharanya barang milik daerah (%)	90	1,179.090.000.00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	433.267.000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	433.267.000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	130.440.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	130.440.000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	920.000.000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	920.000.000.00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	96,67	13.068.286.005,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	96,67	13.068.286.005,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan APBD (%)	90	1,289,965,400.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan APBD (%)	90	1,289,965,400.00	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	98,955,650.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	98,955,650.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	85,261,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	85,261,500.00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	224,299,800.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	224,299,800.00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	66,743,500.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	66,743,500.00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	153,728,800.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	153,728,800.00	

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	86.767.200.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	86.767.200.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	147,192,100.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	147,192,100.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	234.851.450.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	234.851.450.00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	256,829,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	256,829,400.00

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pelayanan perbendaharaan perangkat daerah (%)	100	936.128.500.00	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pelayanan perbendaharaan perangkat daerah (%)	100	936.128.500.00		
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	100	119.400.000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	100	119.400.000.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	100	196.308.000.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	100	196.308.000.00
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	100	127.520.500.00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	100	127.520.500.00
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	100	107.300.000.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	100	107.300.000.00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	100	117.800.000.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	100	117.800.000.00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	327.800.000.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	327.800.000.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					

	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase ketepatan waktu penyampaian raperd pertanggungjawaban APBD (Persentase)	100	975.581.150.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase ketepatan waktu penyampaian raperd pertanggungjawaban APBD (Persentase)	100	975.581.150.00	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (PD, Bulan, Laporan)	31 X 12	139.759.250.00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (PD, Bulan, Laporan)	31 X 12	139.759.250.00	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (PD, Bulan, Dokumen)	10 X 12	93.186.500.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (PD, Bulan, Dokumen)	10 X 12	93.186.500.00	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Buku, Salinan, Laporan)	2 X 60	298.682.000.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Buku, Salinan, Laporan)	2 X 60	298.682.000.00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	384	103.654.000.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	384	103.654.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	165.143.500.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	165.143.500.00	

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	40	89.152.000.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	40	89.152.000.00	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	4	213.439.500.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	4	213.439.500.00	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (Laporan)	1	12.507.549.579.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (Laporan)	1	12.507.549.579.00	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	9.554.511.355.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	9.554.511.355.00	

3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90	1.580.757.350.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90	1.580.757.350.00	-
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan barang milik daerah (%)	90	1.440.257.350.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan barang milik daerah (%)	90	1.440.257.350.00	
	Penyusunan Standar Harga	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	93	270.000.000.00	Penyusunan Standar Harga	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	93	270.000.000.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	31	145.040.000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	31	145.040.000.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	31	112.604.650.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	31	112.604.650.00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah					Inventarisasi Barang Milik Daerah					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	31	139.690.000.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	31	139.690.000.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	95	267.000.000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	95	267.000.000.00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	115.243.000.00	Penilaian Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	115.243.000.00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	31	131.280.000.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	31	131.280.000.00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	31	259.899.700.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	31	259.899.700.00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					

		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	140.000.000.00		(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	140.000.000.00	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase capaian pajak daerah (%)	100	4.295.567.580.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase capaian pajak daerah (%)	100	4.295.567.580.00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	5	3.845.035.080.00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	5	3.845.035.080.00	
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah Terpenuhinya Jumlah Objek Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	60				Persentase Peningkatan Pajak Daerah Terpenuhinya Jumlah Objek Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	60		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	9	221.456.400.00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	9	221.456.400.00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4	216.247.500.00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4	216.247.500.00	

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	7	247.642.400.00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	7	247.642.400.00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	47	473.067.230.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	47	473.067.230.00	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	105.604.200.00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	105.604.200.00	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	137.590.800.00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	137.590.800.00	

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	85000	799.974.500.00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	85000	799.974.500.00	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	288.256.000.00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	288.256.000.00	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	135.013.600.00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	135.013.600.00	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5	675.501.250.00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5	675.501.250.00	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	224.445.400.00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	224.445.400.00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan					Pengendalian, Pemeriksaan dan					

Pengawasan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	296.105.600.00	Pengawasan Pajak Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	296.105.600.00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3	225.662.700.00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3	225.662.700.00	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	250.000.000.00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	(BPKPD KOTA SUKABUMI)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	250.000.000.00	
				57.709.360.342,00					57.709.360.342,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
KOTA SUKABUMI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana Operasional 2022	Realisasi Capaian Target Rencana Operasional Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Rencana Operasional Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah								50.173.037.810,00	59.139.635.466,00	57.709.360.342,00						66.787.954.031,00		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								50.173.037.810,00	59.139.635.466,00	57.709.360.342,00						66.787.954.031,00		
	5	02			KEUANGAN								50.173.037.810,00	59.139.635.466,00	57.709.360.342,00						66.787.954.031,00		
1	5	02	01		PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUP ATEN/K OTA	-					-	-	32.878.409.168,00	38.145.118.407,00	38.764.749.407,00							36.128.588.274,00	
	5	02	01	201	Perenc anaan, Pengan ggaran, dan Evaluas i	Persentase pemenuhan, dokumen perencanaan, penganggara n, dan evaluasi	-				-	100 Pers en	75.000.000,00	230.132.000,00	230.132.000,00			Meni ngkat kan Sumb er Daya Manu	Peni ngka tan Kuali tas Pela yana	BPK PD Kota Suk abu mi		318.000.000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN

						Kinerja Perang kat Daerah	kinerja perangkat daerah										sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	n Publi k Deng an Peng uata n Buda ya Krea tif & Inov atif					DAN PEND APAT AN DAER AH	
	5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Doku men	3 Doku men	20.000. 000,00	20.000. 000,00	20.000. 000,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Meni ngkat kan Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan	Peni ngka tan Kuali tas Pela yana n Publi k Deng an			80.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN	

													Kel/ Desa		Berda ya Saing	Peng uata n Buda ya Krea tif & Inov atif				DAER AH
	50201	0001	20002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Meni ngkat kan Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Peni ngka tan Kuali tas Pela yana n Publi k Deng an Peng uata n Buda ya		30.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Lapo ran	3 Lapo ran	30.000. 000,00	185.13 2.000,0 0	185.13 2.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-				88.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH	
	5 2	0 1	0 1	2 0 0 1	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Lapo ran	1 Lapo ran	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	25.000. 000,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an,	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-				30.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Oran g/bul an	70 Oran g/bul an	27.976. 528.49 8,00	30.858. 742.18 7,00	30.858. 742.18 7,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Pajak Hotel Pajak Resto ran Pajak Hibur an Pajak Rekla me Pajak Pener anga n Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tana h Pajak	-	-			27.210. 562.86 1,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	---	---	---	--	--	---------------------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Lapo ran	4 Lapo ran	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			40.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0 2	0 1	2 .	0 0 2	0 0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Doku men	2 Doku men	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			30.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH

5	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
2	1	.	0	0		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Lapo ran	4 Lapo ran	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			32.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
2	1	.	0	0		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Doku men	4 Doku men	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			30.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN

															mat an, Sem ua Kel/ Desa								DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2		Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah	Persentase Aparatur Yang Berdisiplin	-			-	90 Pers en	90.000. 000,00	324.79 0.000,0 0	324.79 0.000,0 0			-	-	BPK PD Kot a Suk abu mi		378.80 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	20.000. 000,00	64.790. 000,00	64.790. 000,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			33.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				05	09																			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					107 Orang	107 Orang	10.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			176.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	52	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Barang Penunjang Yang Memadai	-			-	90 Persen	1.077.590.270,00	1.884.577.825,00	1.884.577.825,00			-	-	BPKPD Kota Sukabumi		2.223.018.765,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	52	01	01	200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

				06	01																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.126.000,00	57.900.000,00	65.400.000,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.394.340,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	52	01	02	2006	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	433.849.270,00	663.802.500,00	763.802.500,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamatan, Semua	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.538.000,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					15 Dokumen	15 Dokumen	25.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				35.915.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	20	00	06	Penyediaan Bahan/Material																		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	46.246.995,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
2	1	.	0	0																		
6			8			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2900 Lapo ran	2900 Lapo ran	106.37 0.000,0 0	100.00 0.000,0 0	150.00 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			117.00 7.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
2	1	.	0	0																		
6			9			Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Lapo ran	50 Lapo ran	210.00 0.000,0 0	268.00 0.000,0 0	268.00 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an,	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			312.30 1.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Pemerintah n Berbasis Elektronik pada SKPD									ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	AH (PAD)							KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2		Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Layak Fungsi	-			-	90 Pers en	1.090.0 00.000, 00	1.716.2 46.995, 00	1.716.2 46.995, 00			-	-	BPK PD Kota Suk abu mi		2.807.5 00.000, 00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	2	1		0	0		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau				24 Unit	24 Unit	200.00 0.000,0 0	690.00 0.000,0 0	690.00 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem	PEND APAT AN ASLI DAER	-	-			1.687.5 00.000, 00	BADA N PENG ELOLA AN

[illegible]

						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	460.00 0.000,00	690.00 0.000,00	920.00 0.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				690.00 0.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	20	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
											1 Unit	1 Unit	230.00 0.000,00	136.24 6.995,00	100.00 0.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				230.00 0.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

	5	0	0	2		Penyedi	Persentase	-		-	90	1.378.0	1.921.5	1.921.5			-	-	BPK	1.460.1	BADA
		2	1	.		aan	Penyediaan				Pers	67.900,	39.400,	39.400,					PD	72.098,	N
				0		Jasa	Jasa				en	00	00	00					Kot	00	PENG
				8		Penunj	Penunjang												a		ELOLA
						ang	Yang												Suk		AN
						Urusan	Memadai												abu		KEUA
						Pemeri													mi		NGAN
						ntahan															DAN
						Daerah															PEND
																					APAT
																					AN
																					DAER
																					AH
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
		2	1	.	0																
				0	0																
				8	1																
						Jumlah				420	420	50.278.	12.000.	12.000.	Kota	PEND	-	-		55.305.	BADA
						Laporan				Lapo	Lapo	000,00	000,00	000,00	Suka	APAT				800,00	N
						Penyediaan				ran	ran				bum	AN					PENG
						Jasa Surat									i,	ASLI					ELOLA
						Menyurat									Sem	DAER					AN
															ua	AH					KEUA
															Keca	(PAD)					NGAN
															mat						DAN
															an,						PEND
															Sem						APAT
															ua						AN
															Kel/						DAER
															Desa						AH

5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
2	1	.	0	0																			
0	0	0	8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	293.02 7.500,0 0	580.29 2.000,0 0	590.29 2.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-				322.33 0.250,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
2	1	.	0	0																			
0	0	0	8	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Lapo ran	2 Lapo ran	338.48 0.000,0 0	450.32 0.000,0 0	383.44 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an,	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-				372.32 8.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND

															Sem ua Kel/ Desa							APAT AN DAER AH
	5	0 2	0 1	2 . 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lapo ran	2 Lapo ran	696.28 2.400,0 0	878.92 7.400,0 0	941.19 6.400,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			710.20 8.048,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0 2	0 1	2 . 0 9		Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer	Persentase Terpeliharany a Barang Milik Daerah	-		-	90 Pers en	1.161.2 22.500, 00	1.179.0 90.000, 00	1.179.0 90.000, 00			-	-	BPK PD Kota Suk abu mi		1.526.5 34.550, 00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND

					ntahan Daerah															APAT AN DAERAH				
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		2	1		0																			
				0	0																			
				9	2																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	391.22 2.500,00	383.40 0.000,00	433.26 7.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				506.53 4.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		2	1		0																			
				0	0																			
				9	6																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	105.69 0.000,00	130.44 0.000,00	Kota Sukabumi, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-				81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN

[illegible]

					GAN DAERA H																		
5	0	0	2	2	. 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Kesesuaian program/kegiatan/sub kegiatan Dalam Dokumen Perencanaan dengan APBD	-			-	90 Pers en	1.073.6 45.350, 00	1.289.9 65.400, 00	1.289.9 65.400, 00			-	-	BPK PD Kota Suk abu mi		1.605.9 18.897, 00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	2	. 0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Doku men	2 Doku men	99.089. 700,00	98.955. 650,00	98.955. 650,00	Kota Suka bumi, Semua Kecamat an, Sem	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			119.89 8.537,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Doku men	31 Doku men	131.82 5.900,0 0	153.72 8.800,0 0	153.72 8.800,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			159.50 9.339,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0 2	0 2	2 . 0 1	0 0 0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Doku men	31 Doku men	83.190. 000,00	91.013. 200,00	86.767. 200,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			156.45 9.900,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
2	2		0	0					2	2	91.890.	147.19	147.19	Kota	PEND	-	-			116.24	BADA
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Doku men	Doku men	000,00	2.100,0 0	2.100,0 0	Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	APAT AN ASLI DAER AH (PAD)					0.850,0 0	N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
2	2		0	0					2	2	195.33	165.94	234.85	Kota	PEND	-	-			341.10	BADA
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah			Doku men	Doku men	0.300,0 0	1.450,0 0	1.450,0 0	Suka bum i, Sem ua Keca mat an,	APAT AN ASLI DAER AH (PAD)					6.496,0 0	N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND

						tentang Penjabaran Perubahan APBD									Sem ua Kel/ Desa							APAT AN DAER AH	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
2	2	2	0	0	1	9					1 Doku men	1 Doku men	122.65 5.100,0 0	256.82 9.400,0 0	256.82 9.400,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			141.66 6.640,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Perangkat Daerah	-		-	100 Pers en	635.72 8.500,0 0	936.12 8.500,0 0	936.12 8.500,0 0			-	-	BPK PD Kota Suk abumi		1.015.000.000,00	BADAN PENG ELOLAN KEUANGAN		

					an Daerah															DAN PEND APAT AN DAER AH		
5	02	02	2.	002	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	49.000.000,00	99.400.000,00	119.400.000,00	Kota Sukabumi, Semarang, Kota/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			85.000.000,00	BADAN PENG ELOLAN KEUANGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	02	02	2.	002	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
						Jumlah Dokumen Hasil				100 Dokumen	100 Dokumen	196.308.000,00	196.308.000,00	196.308.000,00	Kota Sukabumi	PEND APAT AN	-	-			250.000.000,00	BADAN PENG

						Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	ASLI DAER AH (PAD)						ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH	
	5	0	0	2	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																	
		2	2	.	0																		
				2	4		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa n Pembiayaan Daerah				100 Doku men	100 Doku men	127.52 0.500,0 0	127.52 0.500,0 0	127.52 0.500,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			230.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
		2	2	.	0																		

				0 2	0 5																					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					100 Doku men	100 Doku men	107.30 0.000,0 0	107.30 0.000,0 0	107.30 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					200.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5 2	0 2	0 2	2 . 0 2	0 0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																				
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran					100 Doku men	100 Doku men	77.800. 000,00	77.800. 000,00	177.80 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-					100.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN

						Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									an, Sem ua Kel/ Desa						PEND APAT AN DAER AH	
	5	0	0	2	0	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
		2	2	.	0																	
				2	1																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Oran g	100 Oran g	77.800.000,00	327.800.000,00	327.800.000,00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH

5	0	0	2	0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Serta Sesuai SAP dan Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu Serta Sesuai SAP dan Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	-			-	100 Persen	845.18 1.950,00	975.58 1.150,00	975.58 1.150,00			-	-	BPK PD Kota Sukabumi	1.252.336.050,00	BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				32 Laporan	31 PD X 12 Bulan Laporan	151.90 6.600,00	129.75 9.250,00	139.75 9.250,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			191.394.000,00	BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

[illegible]

						Jumlah Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					3 Lapo ran	2 Buku x 60 Salin an Lapo ran	255.49 0.600,0 0	282.42 2.000,0 0	298.68 2.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Meni ngkat kan Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	-				301.01 6.100,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0 2	0 2	2 . 0 0 3	0 0 0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas i					384 Lapo ran	384 Lapo ran	103.33 6.200,0 0	103.65 4.000,0 0	103.65 4.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-				137.27 5.950,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN

													Kel/ Desa							DAER AH	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
	2	2	. 0 3	0 0 5																	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD				4 Doku men	4 Doku men	159.96 6.400,0 0	155.14 3.500,0 0	165.14 3.500,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			228.90 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH

[illegible]

				03	11																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pemerintah Kabupaten/K ota				4 Oran g	4 Oran g	68.872. 450,00	164.33 9.500,0 0	213.43 9.500,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			189.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	52	02	02	204		Penunj ang Urusan Kewena ngan Pengel olaan Keuang an Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-			-	1 Lapo ran	10.000. 000.00 0,00	12.507. 549.57 9,00	12.507. 549.57 9,00			-	-	BPK PD Kot a Suk abu mi		20.000. 000.00 0,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	52	02	02	200	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		

				0 4	0 9																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Lapo ran	1 Lapo ran	10.000. 000.00 0,00	12.507. 549.57 9,00	9.554.5 11.355, 00	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			20.000. 000.00 0,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
3	5	0 2	0 3			PROGR AM PENGEL OLAAN BARAN G MILIK DAERA H	-				-	-	1.413.6 57.350, 00	1.440.2 57.350, 00	1.580.7 57.350, 00							1.682.6 44.000, 00	
	5	0 2	0 3	2 . 0 1		Pengel olaan Barang Milik Daerah	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan	-			-	90 Pers en	1.413.6 57.350, 00	1.440.2 57.350, 00	1.440.2 57.350, 00			-	-	BPK PD Kot a Suk abu mi		1.682.6 44.000, 00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN

						Barang Milik Daerah														DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	0	Penyusunan Standar Harga															
		2	3		0																
				0	0																
				1	1																
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				93 Dokumen	93 Dokumen	320.809.650,00	250.000.000,00	270.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		385.891.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
		2	3		0																
				0	0																
				1	3																
						Jumlah Rencana Kebutuhan				31 Dokumen	31 Dokumen	120.000.000,00	145.040.000,00	145.040.000,00	Kota Sukabumi	PENDAPATAN	-	-		143.000.000,00	BADAN PENG

						Barang Milik Daerah									i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	ASLI DAER AH (PAD)						ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah																
		2	3		0																	
				0	0																	
				1	5																	
						Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah				31 Lapo ran	31 Lapo ran	73.300. 000,00	112.60 4.650,0 0	112.60 4.650,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			164.25 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah																
		2	3		0																	

				01	06																		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	200.00 0.000,00	139.69 0.000,00	139.69 0.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.00 0.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	52	03	02	001	007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				95 Laporan	95 Laporan	250.00 0.000,00	247.00 0.000,00	267.00 0.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.00 0.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	Kota Sukabumi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			-	-	3.326.415.492,00	3.845.035.080,00	4.295.567.580,00							5.103.466.810,00	
	5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persentase Peningkatan Pajak Daerah Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang	-		-	5 Persen 60 Persen	3.326.415.492,00	3.845.035.080,00	3.845.035.080,00			-	-	BPKPD Kota Sukabumi		5.103.466.810,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEND

						disesuaikan NJOP nya													APAT AN DAER AH			
	5	0 2	0 4	2 . 0 0 1	0 0 0 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				9 Doku men	9 Doku men	164.65 2.792,0 0	221.45 6.400,0 0	221.45 6.400,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			245.61 8.000,0 0	BADA N PEND ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0 2	0 4	2 . 0 0 1	0 0 0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																

						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	366.908.500,00	241.047.500,00	216.247.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					372.712.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	502	04	2001	003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					7 Laporan	7 Laporan	164.572.200,00	222.842.400,00	247.642.400,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					261.735.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	0	0	2	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
	2	4	.	0					47	47	420.99	453.06	473.06	Kota	PEND	-	-			533.36	BADA
				0		Jumlah			Unit	Unit	7.000,0	7.230,0	7.230,0	Suka	APAT					4.000,0	N
				0		Prasarana								i,	AN						PENG
				1	4	Pengelolaan								Sem	ASLI						ELOLA
						Pajak Daerah								ua	DAER						AN
														mat	AH						KEUA
														an,	(PAD)						NGAN
														Sem							DAN
														ua							PEND
														Kel/							APAT
														Desa							AN
																					DAER
																					AH
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
	2	4	.	0																	
				0																	
				0																	
				1	5																
						Jumlah			1	1	88.003.	88.003.	105.60	Kota	PEND	-	-			201.70	BADA
						Laporan Hasil			Lapo	Lapo	500,00	500,00	4.200,0	Suka	APAT					3.000,0	N
						Pendataan			ran	ran			0	bum	AN						PENG
						dan								i,	ASLI						ELOLA
						Pendaftaran								Sem	DAER						AN
						Objek Pajak								ua	AH						KEUA
						Daerah,								Keca	(PAD)						NGAN
						Subjek Pajak								mat							DAN
														an,							PEND

						dan Wajib Pajak Daerah								Sem ua Kel/ Desa						APAT AN DAER AH	
5	0	0	2	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																
	2	4	.	0																	
			0	0					1	1	64.659.	114.65	137.59	Kota	PEND	-	-			168.88	BADA
			1	6		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Lapo ran	Lapo ran	000,00	9.000,0	0.800,0	Suma bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	APAT AN ASLI DAER AH (PAD)				0.800,0	N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH	
5	0	0	2	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
	2	4	.	0																	
			0	0																	
			1	7																	
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			8500	8500	549.97	749.97	799.97	Kota	PEND	-	-			808.28	BADA
									0	0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	Suma bum i, Sem	APAT AN ASLI DAER				0.000,0	N PENG ELOLA AN	
									Obye	Obye	0	0	0						0		
									Pajak	Pajak											

[illegible]

						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layan an	1 Laya nan	135.01 3.600,0 0	135.01 3.600,0 0	135.01 3.600,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			189.74 4.500,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0 2	0 4	2 . 0 1	0 0 1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Doku men	5 Doku men	475.68 1.000,0 0	655.50 1.250,0 0	675.50 1.250,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			575.57 4.010,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH

5	0	0	2	0	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
	2	4	.	0						1	1	180.04	224.44	224.44	Kota	PEND	-	-		310.64	BADA
				1		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				Doku men	Doku men	5.400,0	5.400,0	5.400,0	Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	APAT AN ASLI DAER AH (PAD)				5.500,0	N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
	2	4	.	0																	
				1																	
				3		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1	1	332.05	295.10	295.10	Kota	PEND	-	-		334.02	BADA
										Doku men	Doku men	2.000,0	5.600,0	5.600,0	Suka bum i, Sem ua Keca mat an,	APAT AN ASLI DAER AH (PAD)				2.000,0	N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND

													Sem ua Kel/ Desa							APAT AN DAER AH		
5	0 2	0 4	2 . 0 1	0 0 1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Lapo ran	3 Lapo ran	165.60 0.000,0 0	225.66 2.700,0 0	225.66 2.700,0 0	Kota Suka bum i, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			530.37 6.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0 2	0 4	2 . 0 1	0 0 1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Perkembanga n Elektronifikas				-	2 Lapo ran	0,00	0,00	250.00 0.000,0 0	Kota Suka bum i, Sem	PEND APAT AN ASLI DAER	-	Peni ngka tan Kuali tas			275.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN

							i Transaksi Pemerintah Daerah							ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	AH (PAD)		Pela yana n Publi k Deng an Peng uata n Buda ya Krea tif & Inov atif					KEUA NGAN DAN PEND APAT AN DAER AH	
	J U M L A H												50.173. 037.81 0,00	59.139. 635.46 6,00	57.709. 360.34 2,00							66.787. 954.03 1,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan. Usulan berdasarkan rencana awal, hasil analisis kebutuhan dihimpun dan dianalisis untuk dijadikan bahan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) tahun 2024.

Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Road Show Milenial Pajak Daerah
2. Penyampaian Informasi Pajak Daerah Melalui Cetak, Elektronik dan Door To Door
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Dengan Pemerintah Prov. Jawa Barat
4. Kader Penggiat Taat Pajak
5. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak
6. Melaksanakan kerjasama dengan koperasi untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan PBB
7. Sosialisasi ke Kelurahan kepada RT/RW di wilayah Kota Sukabumi
8. Kajian Potensi Pajak Daerah
9. Penyampaian Informasi Pajak Daerah Melalui Media Sosial
10. Koordinasi dengan Bank Sami untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB
11. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas & kualitas serta profesionalisme SDM (Sumber Daya Manusia).
2. Memperluas basis penerimaan pajak daerah.
3. Memperkuat proses pemungutan.
4. Meningkatkan pengawasan Perpajakan Daerah.
5. Mengembangkan koordinasi & komunikasi antar sumberdaya aparatur dan antar unit kerja (instansi) terkait.
6. Perbaikan kualitas pelayanan.
7. Meningkatkan efisiensi Administrasi Perpajakan dan menekan Biaya Pemungutan.
8. Meningkatkan kapasitas penerimaan Pajak Daerah.

Rencana Kerja yang diusulkan untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil evaluasi dan analisis kebutuhan, dimana alokasi anggaran di setiap anggaran telah direncanakan dan dilaksanakan di Tahun 2024. Adapun tindak lanjut jika rencana kerja tersebut tidak dapat sepenuhnya disahkan oleh KUA-PPAS untuk dilaksanakan di tahun 2024, maka pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang disahkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Rencana Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 masih jauh dari sempurna namun mudah-mudahan dapat terwujud sesuai harapan dan bermanfaat serta senantiasa ALLAH SWT meridhoi setiap langkah yang kita laksanakan.

V. RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.

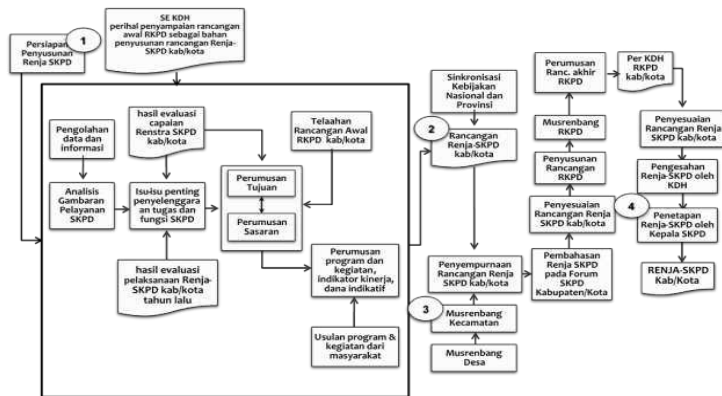
BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja BPBD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan BPBD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja BPBD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja BPBD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja BPBD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja BPBD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja BPBD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja BPBD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan BPBD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja BPBD tahun lalu berdasarkan Renstra BPBD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Renja BPBD sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Sukabumi dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab BPBD, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Tahun 2024. Proses penyusunan Renja dapat digambarkan pada bagan sebagaimana berikut:

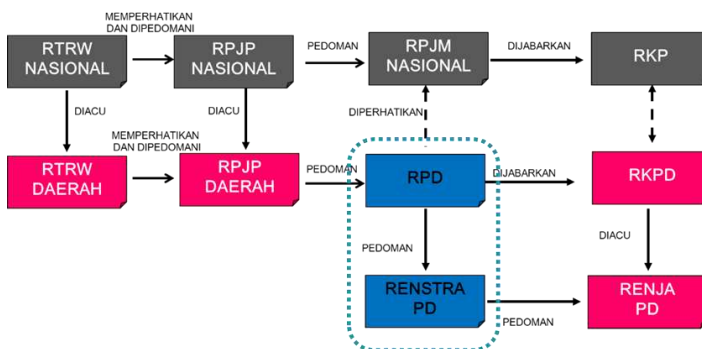


Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Renja BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional:



Gambar 1.2
Hubungan RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja BPBD, adalah sebagai berikut:

- Berpedoman pada Renstra BPBD Tahun 2024-2026 dan mengacu pada rancangan awal RKPd 2024;
- Rumusan program/kegiatan di dalam Renja BPBD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing BPBD;
- Penyusunan Renja BPBD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPd 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam Renja BPBD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif BPBD;
- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja BPBD dengan dokumen RKPd dan Renstra BPBD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja BPBD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RKPd, Renstra BPBD. Renja BPBD merupakan masukan utama bagi penyusunan RPD, Renstra BPBD, dan RKPd, bagi RKA BPBD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Risiko Bencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
35. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renja BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II – HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA, berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan akhir Perubahan RKPD.

BAB III – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi Rencana Kerja Perangkat Daerah berikut dengan Pendanaannya.

BAB IV – PENUTUP, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Semester I Tahun 2024 dan Capaian Program Renstra BPBD

Penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan BPBD Kota Sukabumi selama Tahun berjalan 2024 sampai dengan Triwulan II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 mengacu pada persentase capaian kinerja sampai dengan Triwulan II berdasarkan sasaran dan indikator kinerja pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Pada Tahun Anggaran 2024, BPBD Kota Sukabumi melaksanakan 9 Kegiatan yang diembannya terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penanggulanagan Bencana guna tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana, dengan input anggaran Rp 4.085.263.009 yang terdiri dari Belanja Program Urusan Pemerintahan Daerah Rp 3.610.312.309 dan Belanja Program Penanggulangan Bencana Rp 474.950.700 dengan Rincian di bawah ini :

Tabel 2.1
Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2024 s.d. TR II

PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.515.750	5.515.750	4.515.900	81.87
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.811.619.684	1.811.619.684	988.759.242	54.58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.369.415	512.369.415	311.630.630	60.82
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.575.160	965.575.160	502.070.157	52,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.232.300	315.232.300	242.108.300	76.80
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	4.575.400	13.07
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	195.732.000	195.732.000	44.385.500	22.68
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	158.218.900	158.218.900	127.766.500	80.75
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	85.999.800	85.999.800	17.118.300	19.91
TOTAL		4.085.263.009	4.085.263.009	2.242.929.929	55,00

Total anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN dan belanja langsung yang dikelola BPBD Kota Sukabumi sebesar Rp. 4.085.263.009,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.242.929.929,- (55 %), dengan rincian 2 Program dan 9 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah total anggaran Rp. 5.515.750,- dengan realisasi Rp. 4.515.900,- (81,87 %)
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah total anggaran Rp. 1.811.619.684,- dengan realisasi Rp. 988.759.242,- (54.58 %)
 - c. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah total anggaran Rp. 512.369.415,- dengan realisasi Rp. 311.630.630,- (60.82 %)
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah total anggaran Rp. 965.575.160,- dengan realisasi Rp. 502.070.157,- (52 %)
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah total anggaran Rp. 315.232.300,- dengan realisasi Rp. 242.108.300,- (76.80 %)
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota total anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.575.400,- (13.07 %)
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana total anggaran Rp. 195.732.000,- dengan realisasi Rp. 44.385.500,- (22.68 %)
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana total anggaran Rp. 158.218.900,- dengan realisasi Rp. 127.766.500,- (80.75 %)
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana total anggaran Rp. 85.999.800,- dengan realisasi Rp. 17.118.300,- (19.91 %)

Adapun untuk melihat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dapat dilihat melalui Tabel TC.29 dibawah ini.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN 2024	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terinformasikannya peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	30 Org	30 Org	77,94	3 Org	3 Org	0,00
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,00	1,00	1,00	99,82	99,82	100,00	77,62	77,62
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik	1 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00	5 Jenis	5 Jenis	100,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	99,79	1 Unit	1 Unit	34,43
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	92,35	3 Unit	3 Unit	72,90

[illegible]

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN 2024	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	REALISAS I RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISAS I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISAS I TARGET RENSTRA (%)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	1,00	1,00	1,00	97,40	97,40	1,00	41,64	41,64
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mebeleur	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	12 Unit	0 Unit	0,00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Alat Komunikasi	1 Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	93,75	3 Unit	3 Unit	100,00
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.09	Pengadaaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN 2024	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI I TARGET RENSTRA (%)
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 UPT	1 UPT	9 UPT	9 UPT	94,36	9 UPT	9 UPT	70,60
1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	95,56	29 Org/ Hari	29 Org/ Hari	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terperuhnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	98,30	38 Unit	38 Unit	67,69
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terperuhnya Pemeliharaan Sapras Pendukung Gedung Kantor	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN 2024	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	0,51	0,51	0,53	0,53	100,00	0,54	0,54	1,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Informasi Bencana	92,00	92,00	93,00	99,82	99,82	94,00	79,12	79,12
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Laporan Informasi Data Bencana	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	107,33	1 Dok	1 Dok	79,12
		Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan KIE	40 Org	40 Org	175 Org	175 Org	25 Org	25 Org		
		Tersedianya dan Papan Informasi Publik	0,00	0,00	27 Bh	27 Bh	0,00	0,00		
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	92,00	92,00	0,93	99,87	99,87	94,00	69,52	69,52
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	107,53	1 Dok	1 Dok	10,54
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat dan Aparat yang Mendapatkan Pelatihan Bencana	75 Org	0 Org	100 Org	30 Org	107,25	25 Org	30 Org	99,98
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Aksi Hari Kesiapsiagaan Bencana	1 Keg	1 Keg	1 Event	1 Event	107,53	1 Dok	1 Dok	99,73
		Jumlah Aksi Siaga Bencana dan Sarana Prasarannya	1 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN 2024	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	REALISAS I RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISAS I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISAS I TARGET RENSTRA (%)
1.05.03.2.02. 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Alat-Alat Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60 Paket	60 Paket	70 Paket	70 Paket	107,53	45 Bh	45 Bh	100,00
1.05.03.2.02. 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aksi Pengurangan Risiko Bencana dan Bulan Bhakti Pengurangan Risiko Bencana	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	107,49	1 Dok	1 Dok	49,77
1.05.03.2.02. 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Terlatihnya Relawan Bencana Kecamatan/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pembinaan Zona Tangguh Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lomba Kebencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02. 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	7 Org	7 Org	10 Org	30 Org	103,51	10 Org	25 Org	100,00
1.05.03.2.02. 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Rencana Kontijensi Per Jenis Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02. 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Simulasi Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02. 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Gladi Lapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02. 12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Keluarga yang Mendapat Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,94	0,94	0,93	99,02	99,02	94,00	66,24	66,24

[illegible]

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN 2024	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,94	0,93	0,93	98,28	98,28	94,00	100,00	100,00
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Terbitnya Regulasi Penanggulangan Bencana	1 Dok	1 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Standar Teknis PB Tersedianya Data Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1 Dok	1 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Rakor Bidang Kebencanaan Tingkat Kota	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	107,53	18 Org	30 Org	100,00
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan Sistem Elektronik Informasi Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis	110 Dok	75 Dok	1 Keg DaLA		102,56	0,00	0,00	0,00
		Bimbingan Teknis	0,00	0,00	1 Trauma Healing			0,00	0,00	0,00
		Jumlah Penanganan Kerusakan/ Kerugian Pasca Bencana	0,00	0,00	110 Dok			0,00	0,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tentunya tidak terlepas dari tampilan kinerja pelayanan aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi itu sendiri. Secara fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi telah mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, dimana dalam peraturan wali kota tersebut telah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi baik yang bersifat pelaksanaan tugas internal maupun bentuk pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya analisis terhadap kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam *Tabel T-C.30* dibawah ini.

- 1933 -

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Permendagri No 101 Tahun 2018	92%	94%	94%	95%	92%	94%	94%	95%	96%
2	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Permendagri No 101 Tahun 2018	92%	94%	94%	95%	92%	94%	94%	95%	96%
3	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Permendagri No 101 Tahun 2018	92%	94%	94%	95%	92%	94%	94%	95%	96%

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUKABUMI

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, maka dapat terlihat dan terukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi secara baik dan signifikan.

Dampak dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota Sukabumi sebagai pelayan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan khususnya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kota Sukabumi.

Seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pengalaman/pelajaran yang sangat berharga bagi BPBD untuk terus meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2024 ini BPBD Kota Sukabumi merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan terus dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah teridentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dan juga instansi vertikal yang ada di wilayah hukum Kota Sukabumi dalam membantu Wali Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui rapat-rapat koordinasi antar lintas instansi serta membangun kerja sama Penanggulangan Bencana;
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya dalam bidang kebencanaan bagi pegawai BPBD dengan pelatihan secara rutin berkala serta mengirimkan peserta bila ada yang difasilitasi BNPB sesuai dengan standar yang dibutuhkan di lapangan;
3. Mengusulkan anggaran tambahan operasional kegiatan prioritas layanan pokok dan layanan langsung bagi masyarakat di rawan bencana dan korban bencana;
4. Mendorong ke tim anggaran agar pembangunan gedung kantor BPBD dianggarkan pada tahun berikutnya dari sumber pembiayaan APBD Tingkat II dan tidak mengandalkan APBD Provinsi atau APBN serta usulan menyediakan perlengkapan dan peralatan pendukung

penyelenggaraan penanggulangan bencana bertahap yang terstandar serta menyewa Gudang penyimpanannya melalui sistem sewa tahunan;

5. Memperkuat kelembagaan BPBD selaku koordinator, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengusulkan agar lembaga ini ditingkatkan kelasnya atau masuk katagori lembaga yang setara dengan Dinas (eselon II). Saat ini BPBD sebagai unit otonom yang diberikan mandat dalam penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat bencana dan pasca bencana adalah badan yang kedudukannya kelas eselon III;
6. Mempercepat dan memperkuat layanan data dan informasi bencana berbasis situs/digital yang mudah diakses melalui penerapan aplikasi Elektronik Data Bencana (EDAN) dan membuat grup di media sosial dengan wilayah dan komunitas bencana agar kualitas informasi bencana lebih *real time* diketahui/digali oleh wilayah;
7. Melakukan pembenahan dan *upgrade* terhadap ketersediaan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pencapaian indikator yang telah ditetapkan melalui pemberdayaan relawan bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, *capacity building* Bimbingan teknis Pelatihan aparatur yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi, BNPB ataupun oleh instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
8. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ke semua pemangku kepentingan baik ke pemerintah, swasta dan masyarakat dengan melalui sosialisasi regulasi penanggulangan bencana yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Tetap terus terus menggiatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana kepada masyarakat dari elemen Aparat/petugas, Mahasiswa/i, Sibat, Siswa/i, Pengelola wisata, serta partai politik dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan;
10. Tetap menggelar Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April dimeriahkan Lomba Simulasi Mandiri Bencana yang diikuti oleh SKPD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
11. Penyebarluasan informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat serta mengsiagakan personil Satuan Tugas dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana untukantisipasi laporan aduan yang masuk, serta penyebaran *booklet* buku saku bencana serta mencetak dan memasang rambu papan informasi pada titik rawan kejadian;

12. Melakukan rapat-rapat penguatan dan kemitraan dalam penanggulangan bencana dengan masyarakat dan komunitas serta *workshop* indikator kapasitas daerah dan kemitraan dan kerjasama dalam penanggulangan bencana bersama masyarakat dan Komunitas Tata Kota Sukabumi;
13. Fasilitasi pemasangan tenda dalam giat sentra Vaksinasi yang diselenggarakan Dinas, TNI/POLRI maupun fasilitasi Pemasangan Tenda bagi aktivitas komunitas;
14. Menampung korban yang terdampak bencana di Rumah Tesa (Tempat Evakuasi Sementara) yang disediakan BPBD Kota Sukabumi;
15. Pemutahiran data penduduk Kota Sukabumi dengan kelurahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana prioritas, serta menetapkan dan membentuk dua kelurahan Tangguh Bencana;
16. Memberikan stimulan bantuan kebutuhan dasar sandang dan material bagi korban terdampak bencana.

BPBD Kota Sukabumi berdiri sejak akhir tahun 2012 dan efektif beroperasi pada awal tahun 2013 tentunya bila diibaratkan manusia masih dalam masa usia dini maka tentu banyak kekurangan yang ada dibandingkan dengan SKPD yang sudah lama berdiri. Tentunya kekurangan dalam lembaga ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui juga pada tahun 2018 juga telah dilakukan penataan lembaga dan perubahan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, namun posisi BPBD tetap tidak mengalami perubahan (amanat PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah).

Pada Akhir Tahun 2020 dilakukan penataan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan diturunkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perubahan tersebut melepaskan fungsi Kebakaran ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya ada di BPBD sekaligus mempertahankan lembaga BPBD sebagai Lembaga eselon III. Hal ini berbeda dengan Hasil Rekomendasi Kajian Risiko Bencana Tahun 2020 yang menyarankan dalam upaya Tata Kelola dalam Pengurangan Risiko Bencana sebagai upaya mitigasi bencana yang diusulkan terkait governance dalam pengurangan risiko bencana agar BPBD Kota Sukabumi ditingkatkan tipe/status nya dari

B menjadi A (Eselon II), sehingga bagian bagian dari organisasi yang diperlukan dapat ditangani oleh penanggung jawab sendiri.

Pada sisi lain tuntutan masyarakat lebih kepada bagaimana mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga pada akhirnya tercipta pemerintahan yang bersih, baik dan mampu memberikan pelayanan publik (*publik goods and services*). Agar harapan-harapan dimaksud menjadi kenyataan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi penciptaan *good governance* yang efektif. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Demikian pula halnya dengan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang Tanggap, Tangkas, Tangguh dan Terpercaya dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana tentu sangat diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai aspek, misalnya mitigasi bencana berupa Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang didasarkan pada kajian risiko bencana secara mendalam, Penyusunan rencana kontinjensi untuk setiap jenis bencana berdasarkan prioritas tingkat bencana, perlengkapan dan peralatan kerja, implementasi DED Pembangunan gedung BPBD yang sudah dibuat berkali-kali, penambahan mobilitas dan kebijakan alokasi anggaran yang cukup memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana-dalam arti seimbang dengan porsi APBD-sekurang-kurangnya mendekati 1% untuk dialokasikan pada belanja BPBD, personil/pegawai yang cakap dan terampil, cukup memadai dengan status pegawai negeri sipil (ASN/PNS) ditandai dengan sertifikasi bagi petugas penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang handal serta tersedianya mobilitas/kendaraan lapangan yang setara dengan SKPD yang sudah *wellestablished* terlebih dahulu sesuai SOP dan demikian juga kesejahteraan pegawai/petugas yang cukup agar adanya ketenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas kemanusiaan.

Isu Penanganan Perubahan Iklim

Membahas tentang perubahan iklim, hal tersebut berkaitan langsung terhadap isu-isu global yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagai pemegang mandat pembangunan dalam

mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat, sehingga berhubungan erat terhadap penanganan dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Dimana tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan.

Adapun kerugian rata-rata tahunan akibat gempa bumi, tsunami, badai tropis dan banjir terhitung sekitar ratusan miliar dolar, dan ini membutuhkan investasi besar sebesar per tahunnya untuk biaya pengelolaan risiko bencana saja.

Untuk itu diperlukan penguatan, kegigihan dan kapasitas adaptasi wilayah-wilayah yang lebih rentan, seperti negara-negara di tengah benua dan negara kepulauan, dan harus berjalan beriringan dengan usaha meningkatkan kesadaran dan memasukkan langkah-langkahnya pada kebijakan dan strategi nasional. Dengan adanya kehendak politik dan penggunaan langkah teknologi secara luas, masih mungkin bagi kita untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata secara global pada dua derajat Celcius di atas level masa pra-industri. Ini membutuhkan tindakan bersama baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Menyadari perubahan iklim adalah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan dengan melakukan beberapa hal, diantaranya :

1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara;
2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim
4. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas PB

Sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak bencana dalam skala nasional, Presiden Joko Widodo memberikan butir-butir arahan kepada seluruh komponen pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dan Jumat (2-3/2). Beberapa amanat arahan Presiden yang disampaikan adalah :

1. Sistem peringatan dini dapat dimaksimalkan dan sampai diterima oleh masyarakat sebelum terjadinya bencana. Sehingga melalui peringatan dini yang baik, masyarakat dapat mengetahui dan mengambil tindakan cepat dalam antisipasi bencana;
2. Edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana harus dilakukan. Sebagai negara yang dilalui dua lempeng aktif dan berada pada zona khatulistiwa beriklim tropis membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi;
3. Tata ruang dan konstruksi bangunan maupun lokasinya diperhitungkan dengan matang dan mencakup aspek ketahanan dari potensi risiko bencana. Dalam hal ini Presiden menitikberatkan urusan tersebut pada komponen yang terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Daerah maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur lainnya agar selalu berkoordinasi dalam pengelolaan tata ruang;
4. Penyesuaian anggaran dalam penanggulangan bencana dapat disiapkan dan ditingkatkan. Khususnya bagi pemerintah daerah, agar memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya;
5. Pemerintah daerah harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan daerah dan memetakan rencana investasi wilayah yang jelas, dimana tempat yang boleh dibangun dan tempat yang mana gak boleh dibangun;
6. Penggunaan dana bencana dapat diprioritaskan untuk masyarakat. Dalam konsep penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus diutamakan. Sebab, keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi.

7. Berikutnya, Presiden meminta agar pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah dapat menyederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
8. Seluruh pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan selalu dikontrol. Tidak hanya dalam pelaksanaan anggaran, namun juga bagaimana seluruh sistem mulai dari pra bencana, tanggap darurat hingga pascabencana dapat dimonitor dengan baik sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja BPBD Kota Sukabumi Tahun 2024 ini akan memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BPBD Kota Sukabumi pada Anggaran Murni Tahun 2024 melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dengan total anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN dan belanja langsung yang dikelola BPBD Kota Sukabumi sebesar Rp. 4.085.263.009,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.242.929.929,- (55 %). Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								7.105.223.355	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.769.172.655	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.515.750	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen		3.516.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen		999.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen laporan sistem pengendalian intern pemerintah (SIPI)		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen		999.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.781.706.000	

1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan yang terbayarkan		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 orang		1.777.956.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen		1.249.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan BPBD Secara Periodik		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen		1.249.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen		1.249.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								69.896.000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 Stel		17.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan		Kota Sukabumi	100 Persen	50 Orang		51.946.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								568.099.415	

1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 %		1.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Komunikasi SDA dan Listrik		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 %		137.766.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 %		565.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Terpenuhinya Kebutuhan Keuangan Pegawai Tidak Tetap		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 % 100 %		285.229.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							354.380.300		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 %		186.266.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 %			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 %		168.114.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								3.336.050.700	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								33.600.000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	layanan informasi rawan bencana	Jumlah Laporan Informasi Data Bencana Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan KIE Kendaraan KIE Bencana Tersedianya dan Terpasangnya Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	1 dokumen 175 Orang 1 Unit 78 Unit	93 %	33.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								3.026.432.000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2.845.000.000	BKK APBD I
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota	Prosentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	1 dokumen	93 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten / Kota	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Masyarakat dan Aparat yang Mendapatkan Pelatihan Bencana Pengiriman Diklat PB	Prosentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	100 Orang 5 Orang	93 %	10.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Aksi Hari Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Aksi Siaga Bencana dan Sarana Prasarananya Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	1 Event 4 Kegiatan 1 Paket	93 %	56.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Alat-Alat Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	70 Paket	93 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aksi Pengurangan Risiko Bencana dan Bulan Bhakti Pengurangan Risiko Bencana	Prosentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	1 Tahun	93 %	106.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Prosentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	75 Orang	93 %	8.158.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							202.518.900		
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prakiraan Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Terhadap Kejadian Bencana Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 Persen	199 Kejadian 5 Unit	93 %	87.744.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tersedianya Bantuan Stimulan Material Korban Bencana Tersedianya Kebutuhan Dasar (Sandang, Natura dan Obat-Obatan) Bagi Korban Bencana Alam	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 Persen	7 Jenis 7 Jenis	93 %	114.774.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							73.499.500	
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.04	013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Peningkatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.499.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan penanggulangan bencana pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan dinilai masih belum berpihak terutama anggaran dan dana perimbangan. Hal ini teramati masih belum memadainya alokasi anggaran penanggulangan bencana yang disediakan pemerintah daerah, dimana dari rasio anggaran diterima BPBD Kota Sukabumi terhadap APBD masih di bawah setengah persen (0,33%), padahal kebencanaan merupakan bagian dari pelayanan Wajib Dasar (Yansar) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal seperti halnya dengan urusan pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu BPBD sejak beroperasi tahun 2013 hingga saat ini, belum memiliki gedung kantor yang representative dengan kantor yang ada di lingkungan pemerintah kota Sukabumi dan juga perlengkapan, peralatan yang terstandar masih kurang memadai.

Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi pada perencanaan tahun 2024, BPBD fokus mengusulkan alokasi kegiatan yang meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana di kota Sukabumi. Adapun kebijakan pembangunan daerah sektor kebencanaan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 prioritasnya pada terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana yang program prioritasnya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), serta Penanggulangan Bencana dan Program Penanganan Bencana sehingga secara bertahap dapat terwujud Kota Sukabumi Tangguh Bencana.

W. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi dalam rancangan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional tahun 2010-2025 pada Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan pencapaian salah satu Tujuan RPD Kota Sukabumi 2024-2026 yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan inovatif (tujuan ke-4), melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi diantaranya meliputi jumlah PNS yang proposional, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur sehingga mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, diharapkan ada beberapa area perubahan yang diantaranya meliputi struktur organisasi (harus sesuai fungsi), efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, perizinan yang efisien, bisnis proses, serta peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah Bidang Kepegawaian dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Sukabumi tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Sukabumi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh

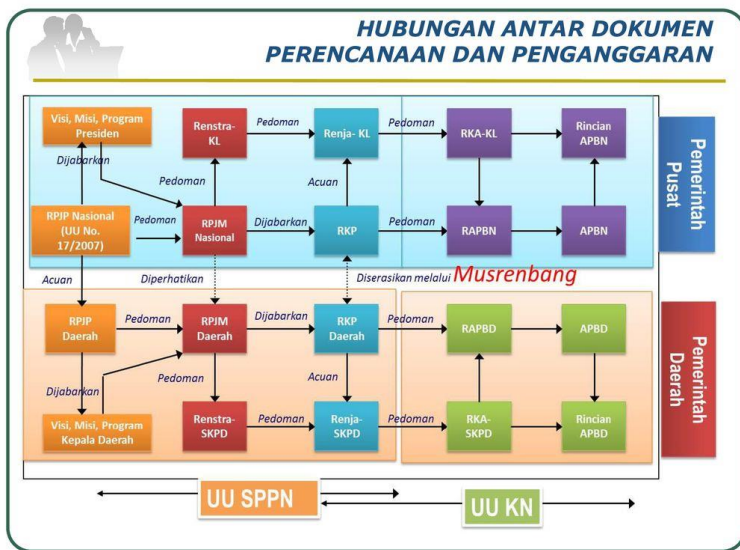
pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Renja perangkat daerah merupakan perencanaan yang fundamental pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah karena memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra perangkat daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan rancangan Renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Sukabumi 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2024, dan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan APBD Perubahan tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, penyusunan perencanaan di Kota Sukabumi diawali penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi tahun 2024-2026. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJPD dan RPD tersebut, setiap perangkat daerah harus menyusun Renstra perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Untuk selanjutnya diturunkan ke dalam Renja Perangkat daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

Selanjutnya, terkait dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja BKPSDM Kota Sukabumi akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk mengetahui lebih lanjut gambaran tentang hubungan antara Renja BKPSDM Kota Sukabumi dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan historisnya, pembentukan BKPSDM Kota Sukabumi sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Sukabumi, telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nomenklatur sebagai berikut:

- 1) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

- 2) Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 Nomor 6);
- 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2020.

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, maka kejelasan tugas, fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020.

Dalam peraturan Wali Kota tersebut dijelaskan bidang tugas unsur BKPSDM menurut alur struktur organisasi adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan program kerja di lingkungan Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 4) memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan;
- 5) mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Badan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;

- 7) melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 8) menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 9) membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah;
- 10) mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 11) memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang akan ditetapkan oleh Wali Kota;
- 12) mempertanggungjawabkan tugas Badan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- 13) mempertanggungjawabkan tugas Badan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal pelaksanaan fungsi:

- 1) penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;
- 3) penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- 4) pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Badan secara terpadu;
- 5) penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Badan;

- 6) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Badan;
 - 7) pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 8) pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
 - 9) penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
 - 10) pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - 11) pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
 - 12) pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Badan;
 - 13) pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 14) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
 - 15) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- C. Kepala Bidang Kepegawaian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal pelaksanaan fungsi:
- 1) penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang kepegawaian berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
 - 3) penyelenggaraan manajemen kepegawaian, meliputi urusan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, pangkat dan jabatan, penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan;
 - 4) penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian yang meliputi pendataan pegawai, pemetaan pegawai, dan penyajian informasi

kepegawaian;

- 5) penyelenggaraan pembinaan kepegawaian pada unit kerja;
- 6) penyelenggaraan usaha dan kegiatan dalam rangka kesejahteraan pegawai;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang kepegawaian; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

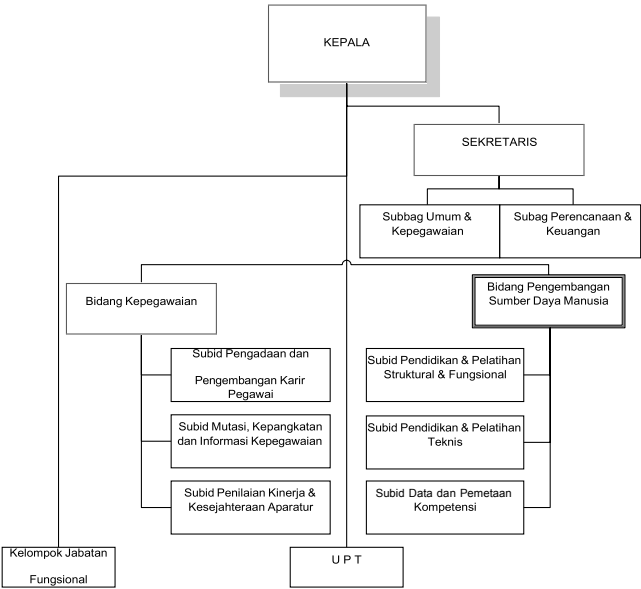
D. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal pelaksanaan fungsi:

- 1) penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pengembangan sumber daya manusia berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- 3) penyusunan petunjuk teknis pedoman pembinaan pengembangan sumber daya manusia;
- 4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, serta penugasan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 5) pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak urusan pendidikan dan pelatihan;
- 6) pelaksanaan analisa dan pengkajian data kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan;
- 7) penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian yang meliputi pendataan dan pemetaan kompetensi pegawai;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

- 9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagan struktur organisasi BKPSDM dijelaskan dalam Gambar 2. Berdasarkan bagan struktur tersebut, BKPSDM terdiri dari Sekretariat yang membawahi 2 (dua) subbagian serta 2 (dua) bidang yang membawahi 3 (tiga) subbidang.



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Sukabumi

Tim Penyusun Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JABATAN DALAM
----	--------	------------------

		TIM RENJA
1	Kepala BKPSDM	Penanggung Jawab
2	Sekretaris BKPSDM	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang PSDM	Anggota
5	Kepala Bidang Kepegawaian	Anggota
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Pelaksana BKPSDM	Anggota

1.2. Landasan Hukum

- A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- E. 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);

- G. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- M. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- N. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- O. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
- P. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah:

- 1) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi;
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran;

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah menjadi acuan kerja resmi bagi BKPSDM Kota Sukabumi dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi serta mendukung terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Sukabumi

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan tingkat kinerja pelayanan, kordinasi dan sinergitas dengan program dan perangkat daerah lain, permasalahan, dampak, tantangan, peluang dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA SUKABUMI

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA SUKABUMI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Sukabumi

Keberhasilan pencapaian kinerja BKPSDM tahun 2024 dapat diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Renja tahun bersangkutan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja organisasi kurang mencapai target kinerja, memenuhi target kinerja, atau melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Semester I tahun 2024 sebagai dasar awal dalam penyusunan Perubahan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran 2024 mencapai 48.03 %.

Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi serta pencapaian Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2024 menurut indikator program dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel (T-C. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan Triwulan I 2024 BKPSDM Kota Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.3.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100	48.11	48.11
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100	33.33	33.33
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	1	1	100
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	27.50	27.50
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	33	82.50
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0	0
5.03.01.2.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0
5.03.01.2.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0
5.03.01.2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0
5.03.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	0	0
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	96	96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	48	96
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100	8.02	8.02
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	3	20
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	3	0	0
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	0	0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	4	1	25
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	9	1	11.11
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	0	0
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	100	20	20
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10	2	20
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000	1	1	100
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100	100	100
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	100
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	100
		Indeks Profesionalitas ASN	50.3	71.98	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Pengembangan Karir Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	62,5 60	10 10	25.93
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	90	25	27.78
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	4	0	0
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	4	0	0
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	3	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	90	33.33	37.04
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	1	0	0
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen kenaikan pangkat ASN	4	3	75
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4	1	25
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Meningkatnya Kinerja ASN	90	28.31	31.46
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1	0	0
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	212	0	0
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	750	637	84.93

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	7.9	4.8	61.08
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Meningkatnya Kompetensi Teknis ASN	100	76.61	76.61
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kopetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kopetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	1	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	186	99	53.23
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3	2	66.67
5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1	1	100
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Antar Lembaga	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Program Realisasi Target
1	2	3	4	5	6
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	0	0
Jumlah Capaian Target Kinerja					48.03

Dari tabel Tabel T-C.29 dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi dan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menurut indikator program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota tahun 2023 target anggaran kinerja 100%,- pada triwulan II 2024 ini baru terealisasi sebesar Rp 48%.
- B. Program Kepegawaian Daerah pada triwulan II 2024 ini baru terealisasi sebesar 25.93% dari target.
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 target kinerja sebesar 7.9% pada triwulan II 2024 ini baru terealisasi sebesar 4.8%,- atau 61%.
- D. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Secara umum pelaksanaan kegiatan belum dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang mencapai target namun hal tersebut belum memenuhi pencapaian program-program di BKPSDM secara target Renstra maupun Renja dapat terealisasi dengan sangat baik.

Dari 3 program yang dilaksanakan BKPSDM pada tahun 2024 yang berjalan, Seluruhnya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh akurasi penyesuaian/penetapan ulang target kinerja program belum bisa dilakukan karena adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah.

Beberapa Sub Kegiatan yang tidak mampu mencapai target diantaranya adalah:

- 1. Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - e. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
 - h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - l. Penyediaan Bahan logistik Kantor
 - m. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - o. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Sub Kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah yaitu :
- a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Pengelolaan Data Kepegawaian
 - d. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - e. Pengelolaan Promosi ASN
 - f. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - g. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - h. Pembinaan Disiplin ASN
3. Sub Kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :
- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

E. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Adanya Efisiensi, yaitu memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan. Pada saat kebutuhan sudah terpenuhi sementara anggaran masih ada maka hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya target yang ditetapkan.
2. Faktor eksternal, yaitu kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada jumlah pengajuan administrasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketika jumlah pengajuan tidak sesuai target yang ditetapkan maka berdampak realisasi target yang tidak mencapai 100%. Namun pada prinsipnya seluruh pengajuan pelayanan administrasi sudah dapat terealisasi dengan baik.
3. Ketersediaan anggaran, yaitu besarnya anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan terhadap ASN di Kota Sukabumi sehingga hak-haknya sebagai pegawai dapat terpenuhi. Sejauh ini ketersediaan anggaran masih belum dapat memenuhi target Renja dalam beberapa tahun terakhir, dan diharapkan ketersediaan anggaran ini masih bisa ditambah untuk pencapaian target Renstra hingga akhir periode (2024-2026).

G. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Program prioritas BKPSDM berhubungan dengan peningkatan kompetensi pegawai yang juga merupakan hak-hak yang harus diberikan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketika alokasi anggaran yang tidak mencukupi, secara tidak langsung pelayanan BKPSDM dalam memenuhi hak-hak ASN tidak dapat terpenuhi.

H. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut:

Perencanaan penganggaran kegiatan harus benar-benar bertujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Terbatasnya anggaran jangan sampai dialokasikan untuk membiayai hal-hal yang tidak penting namun harus diefisienkan sesuai dengan target outcome yang diharapkan.

Selain itu, adanya beberapa program yang mampu merealisasikan kinerjanya diatas target akan menjadi catatan bagi tim perencana apakah perlu untuk merubah persentase target pada Renja dan Renstra atau tetap dipertahankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada BKPSDM Kota Sukabumi, dapat dapat diidentifikasi permasalahan terhadap kinerja pelayanan yang terjadi. Permasalahan tersebut merupakan hambatan yang mengganggu peningkatan kinerja berdasarkan indikator sasaran (Renstra 2024-2026) di bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 1 Matriks pemetaan masalah/isu penting dan penetapan indikator

NO	MASALAHPOKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Pengembangan Karir ASN dan Manajemen Kinerja ASN	1) Belum adanya pemerataan aparatur profesional di setiap organisasi	a. Rendahnya kuantitas pengadaan PNS dibandingkandengan jumlah kebutuhan pegawai
			b. Belum optimalnya pemetaan pegawai di setiap organisasi
			C. belum adanya manajemen Talent Pool dan assesment center

NO	MASALAHPOKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		2) Masih adanya aparat yang melanggar aturan dan berkinerja buruk	a. Belum tegasnya aturan <i>reward and punishment</i>
2	Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan kepegawaian	1) Masih rendahnya pengelolaan pegawai yang cepat, akurat dan tepat waktu	a. SIMPEG yang belum stabil b. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi kepegawaian
3	Masih rendahnya tingkat kompetensi aparat	1) Masih rendahnya penyelenggaraan diklat kompetensi	a. Terbatasnya anggaran sehingga sulit menyelenggarakan seluruh kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi
4	Masih Belum Idealnya Jumlah ASN di Kota Sukabumi	1) Perbandingan jumlah Pengadaan Pegawai dengan Pegawai yang pensiun yang belum proporsional	a. Pengangkatan Pegawai masih terfokus pada tenaga kesehatan dan Guru
5	Penghapusan Tenaga Honor	1) Terganggunya Operasional Kinerja Organisasi	a. Belum adanya pengangkatan Pegawai dari Jalur teknis dan umum

BKPSDM adalah perangkat daerah yang termasuk penunjang urusan bidang kepegawaian serta bidang pengembangan sumber daya manusia dengan 5 (lima) buah Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah (IKK) periode 2021-2023. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan (IKK) pada BKPSDM, seluruh indikator hingga akhir tahun 2023 ada 2 (dua) indikator yang tidak tercapai, yaitu a) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dan b) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Faktor utama tidak tercapainya target karena keterbatasan anggaran dalam melaksanakan berbagai macam diklat, yang dalam hal ini adalah diklat manajerial dan diklat struktural.

Sementara untuk pencapaian tahun 2024 realisasi IKK masih masih cukup rendah, hal ini disebabkan tahun anggaran 2024 masih berjalan dan belum semua kegiatan yang mendukung IKK terlaksanakan.

Gambaran lengkap mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM pada tahun 2024 ditampilkan dalam tabel 3.

Tabel (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM Kota Sukabumi

	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN		SPM/Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi		Proyeksi		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
NO	/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14
	c) Kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)														
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen			215	220			283,7	76,06			226	BKPSDM	PMDN 18/2020
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen			4	5			9,85	7,8			5	BKPSDM	PMDN 18/2020
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak	Persen			84	86			84,74	37,6			87	BKPSDM	PMDN 18/2020

	termasuk guru dan tenaga Kesehatan														
4	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang profesional	Persen			90	90			139	110			90	BKPSDM	IKK PD
5	Prosentase meningkatnya kompetensi ASN	Persen			90	90			158	100			90	BKPSDM	IKK PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan potensi, permasalahan pembangunan, dan isu strategis sesuai konteksnya, maka isu strategis aktual Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
2. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya
3. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan
4. Kualitas sumber daya manusia
5. Inovasi di pemerintahan

Hasil capaian kinerja tahun 2024-2026 menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum dapat sepenuhnya mewujudkan visi pembangunan Kota Sukabumi karena beberapa permasalahan. Secara organisasi, permasalahan umum yang juga merupakan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Aspek Organisasi

- 1) Kurangnya sarana memadai yang mendukung pelayanan berbasis ISO, mencakup ruangan yang representatif, aplikasi, dan kelengkapan kantor lainnya;
- 2) Kapasitas dan kapabilitas pengorganisasian di BKPSDM Kota Sukabumi belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal;
- 3) Kurangnya anggaran yang mendukung optimalisasi pelayanan.

B. Aspek Kinerja

- 1) Belum terimplementasikannya Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN;
- 2) Belum semua PNS mendapatkan haknya dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan;
- 3) PNS yang sudah mendapatkan hak pengembangan kompetensi belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam pencapaian *World Class Government* (aparatur berkelas dunia);
- 4) Belum optimalnya realisasi reformasi birokrasi terutama dari peningkatan parameter kepegawaian.

Dari berbagai isu penting yang juga merupakan permasalahan yang dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Sukabumi, maka BKPSDM Kota Sukabumi memiliki beberapa tantangan yang harus segera dilaksanakan agar berbagai hambatan diatas dapat diatasi.

Adapun Tantangan (*Treaths*) yang harus dihadapi BKPSDM Kota Sukabumi, diantaranya :

- 1) Penyusunan regulasi tentang pengembangan aparatur sebagai pedoman pembinaan dan peningkatan profesionalisme aparatur berkelas dunia;
- 2) Pemberian *reward and punishment* untuk peningkatan kinerja yang lebih baik;
- 3) Penyusunan dan penerapan Sistem ISO dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk seluruh pelayanan administrasi kepegawaian agar terwujudnya pelayanan yang cepat dan akurat.
- 4) Pelayanan Diklat yang memadai untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang dapat mendukung prioritas pembangunan Kota Sukabumi.

Disamping tantangan, BKPSDM Kota Sukabumi memiliki peluang-peluang (*Opportunities*) yang dapat di manfaatkan untuk mengatasi berbagai isu permasalahan diatas, yaitu:

- 1) Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Banyaknya aparatur yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ASN profesional berkelas dunia;
- 3) Adanya tunjangan kinerja sebagai salah satu wujud *reward and punishment*;
- 4) Adanya aplikasi SIMPEG dan SIAP dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 5) Pengembangan Aplikasi Talent Pool untuk mendukung Manajemen Talenta dan Sistem Merit.
- 6) Adanya kerjasama yang baik dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dan lembaga lainnya dalam pengembangan model Diklat peningkatan kompetensi aparatur.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Sukabumi, maka dirumuskan kebijakan dan strategi BKPSDM Kota Sukabumi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan strategi dan kebijakan. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai mengatasi permasalahan Pemerintah Kota Sukabumi di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan.

Adapun strategi, kebijakan dan program yang diarahkan dalam arah kebijakan pembangunan, dirumuskan seperti pada tabel 4.

Tabel 2 Kebijakan, Strategi dan Program dalam mengatasi permasalahan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan keuangan	Melakukan penguatan implementasi standar akuntabilitas kinerja dan keuangan
2	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang profesional dan handal	Meningkatnya manajemen ASN dan profesionalitas ASN	Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	menetapkan SKJ untuk JPT, JA dan JF
			Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	profiling pegawai berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi untuk JPT, JA dan JF
			Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Membuat Perwal manajemen Talenta. Agar menyusun Talent pool untuk pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi
			Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar	Memetakan rencana suksesi yang disusun berdasarkan talent pool, dan menysasar pada

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	jabatan target dan/atau perumpunan jabatan serta mempertimbangkan kebijakan pola karier instans
			Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	Aplikasi CDNA menyediakan informasi kesenjangan kompetensi didapat berdasarkan hasil self assessment. Selanjutnya dapat menganalisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang didasarkan dari hasil assessment
			Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	Menyusun laporan hasil analisis kesenjangan kinerja pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi
			Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang dan sudah masuk dalam Renstra BKPSDM
			Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Melakukan program diklat untuk memenuhi kewajiban 20 JP per tahun untuk setiap pegawai
			Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	Mengakselerasi pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui magang dan praktik kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	Melaksanakan Kegiatan coaching dan mentoring secara terjadwal dan telah di evaluasi
			Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Mengunggah PK dan SKP BKPSDM
			Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	- Mengunggah SE pemberlakuan Sicantik dan Pengumpulan SKP - Mengunggah Manual Book Pengisian
			Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Mengunggah hasil penilaian kinerja di Sicantik (sampel 3 bulan berturut-turut) untuk setiap level jabatan - Mengunggah bukti dukung pelaksanaan dialog kinerja
			Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	- Menyusun kategorisasi hasil kinerja pegawai (untuk mengetahui pegawai/pegawai yang terindikasi memiliki masalah kinerja) - Melakukan pendekatan pada pegawai tersebut (menganalisis sebab permasalahan dan menyusun strategi penyelesaian masalah) -
			Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Perwal Manajemen Talenta - Data Pemetaan Talenta - Persyaratan Layanan Kepegawaian

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BKPSDM bukanlah organisasi yang melayani masyarakat secara langsung, namun dalam tupoksinya lebih menitikberatkan pada pelayanan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Sehingga dalam menyusun Perubahan Renja 2024, BKPSDM juga berusaha mengakomodir berbagai usulan yang disampaikan oleh beberapa instansi terkait yang notabene memiliki pegawai dan perlu dikelola oleh BKPSDM.

Berdasarkan hasil pengumpulan usulan, diperoleh usulan yang diklasifikasikan dalam 3 program dan 9 sub kegiatan, dengan besaran tambahan anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 246.158.188,-. Adapun usulan tersebut tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Perubahan Renja Tahun 2024

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7,578,031,830	7,824,189,948	246,158,118	
5	03				KEPEGAWAIAN						6,502,710,746	6,765,268,864	262,558,118	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,032,165,251	6,240,016,051	207,850,800	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36,452,100	36,452,100	-	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	24,317,800	24,317,800	-	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	3 Laporan	5,749,450	5,749,450	-	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	6,384,850	6,384,850	-	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,725,308,401	4,725,308,401	-	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4,722,434,051	4,722,434,051	-	

KODE REK						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5	03	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1,274,600	1,274,600	-	
5	03	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1,599,750	1,599,750	-	
5	03	01	2.03			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7,000,000	7,000,000	-	
5	03	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	-	
5	03	01	2.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	-	
5	03	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	-	
5	03	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	-	
5	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8,950,000	20,595,000	11,645,000	
5	03	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50 Paket	100 Paket	8,950,000	20,595,000	11,645,000	Belanja 50 Pakaian Batik Khas Kota Sukabumi Betum dianggarkan pada anggaran murni
5	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						438,722,950	546,513,950	107,791,000	

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 Paket	15 Paket	6,034,500	6,034,500	-	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	19,134,200	19,134,200	-	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	7,244,500	7,244,500	-	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	16,675,000	22,075,000	5,400,000	Penambahan 160 dus Mamin Rapat karena telah habis pada triwulan II
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	10,204,750	10,204,750	-	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		9 Dokumen	9 Dokumen	8,240,000	10,640,000	2,400,000	Penambahan 4 tayanagan untuk belanja advetorial/ucapan pada hari hari besar
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 Laporan	3 Laporan	371,190,000	471,181,000	99,991,000	Penambahan untuk uang harian dan akomodasi panitia seleksi pengadaan CASN
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						117,785,000	117,785,000	-	
5	03	01	2.07	5	Pengadaan Mebel						-	-	-	

KODE REK						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	10 Unit	117,785,000	117,785,000	-	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							466,847,600	460,327,600	(6,520,000)	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1 Laporan	996,000	1,596,000	600,000	Penambahan untuk 60 (enam puluh) material
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	3 Laporan	61,950,000	58,450,000	(3,500,000)	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	2 Laporan	67,670,000	64,050,000	(3,620,000)	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	2 Laporan	336,231,600	336,231,600	-	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							231,099,200	326,034,000	94,934,800	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0.00 Unit	0.00 Unit	128,780,000	135,000,000	6,220,000	Untuk perbaikan Pengecetan Kendaraan Kabid PSDM
5	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	-	-	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		2.00 Unit	2.00 Unit	102,319,200	191,034,000	88,714,800	Rencana Rehab Lobby Kantor BKSPDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							470,545,495	525,252,813	54,707,318	

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						253,624,945	308,332,263	54,707,318	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	1 Dokumen	7,584,400	7,584,400	-	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	120,115,700	135,115,700	15,000,000	Untuk Sewa Kendaraan 2 (dua) kegiatan Seleksi Pengadaan CASN
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen	75,999,845	115,707,163	39,707,318	Pengembangan Aplikasi baru untuk Sistem Absensi yang Error
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	49,925,000	49,925,000	-	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						181,399,550	181,399,550	-	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	39,999,750	39,999,750	-	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		4 Dokumen	4 Dokumen	89,999,900	89,999,900	-	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		4 Dokumen	4 Dokumen	51,399,900	51,399,900	-	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						35,521,000	35,521,000	-	

KODE REK						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5	03	02	2.04	01		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	1 Dokumen	10,214,000	10,214,000	-	
5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		212 Orang	212 Orang	17,807,000	17,807,000	-	
5	03	02	2.04	07		Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		750 Orang	750 Orang	7,500,000	7,500,000	-	
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,075,321,084	1,058,921,084	(16,400,000)	
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1,075,321,084	1,058,921,084	(16,400,000)	
5	04	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis						214,999,750	276,535,350	61,535,600	
5	04	02	2.01	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		2 Dokumen	2 Dokumen	99,999,750	99,999,750	-	
5	04	02	2.01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		186 Orang	186 Orang	115,000,000	176,535,600	61,535,600	Rencana Sosialisasi untuk para Kasubag Umpeg sekota di luar kota
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						860,321,334	782,385,734	(77,935,600)	

KODE REK						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)/SUB KEGIATAN(SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN (Aktifitas yang menyebabkan perubahan pagu)
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
5	04	02	2.02	04		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	-	
5	04	02	2.02	05		Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	55,134,400	(4,865,600)	
5	04	02	2.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	1 Laporan	795,321,334	722,251,334	(73,070,000)	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA SUKABUMI

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Perubahan Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rancana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan APBD. Renja merupakan bagian yang utuh dari RPJMD dan Renstra. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja.

Rumusan Perubahan Renja dan pendanaan tahun 2024 tercantum dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN N REJNA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET REJNA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOM POK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	D 2024	RKPD	D 2024	APB	RKPD PERUBAHA N 2024				NAL	NASIO					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								7,314,186.67 3.00	7,495,509.69 0.00	7,824,189.94 8.00	510,003,275.00							9,168,312.78 8.00			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN							7,314,186.67 3.00	7,495,509.69 0.00	7,824,189.94 8.00	510,003,275.00								9,168,312.78 8.00			
	5.03	KEPEGAWAIA N							6,071,983.38 8.00	6,420,188.60 6.00	6,765,268.86 4.00	693,295,498.00								7,542,512.78 8.00			
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATENK OTA	-				-	-	5,564,263.32 6.00	5,949,643.11 1.00	6,240,016.05 1.00	1,338,740,833.00								6,903,004.15 9.00			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	36,452,250.0 0	36,452,100.0 0	36,452,100.0 0	-150.00			-	-	-			40,097,475.0 0	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokume n	1.00 Dokume n	24,317,800.0 0	24,317,800.0 0	24,317,800.0 0	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua KariDesa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				26,749,580.0 0	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN N REJEN A OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET REJEN A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024	NASIO NAL				DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,749,450.00	5,749,450.00	5,749,450.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6,324,395.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,385,000.00	6,384,850.00	6,384,850.00	-150.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7,023,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4,485,667,14 6.00	4,642,786,26 1.00	4,725,308,40 1.00	239,641,255.00			-	-	-		5,471,913,86 1.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4,482,792,79 6.00	4,639,911,91 1.00	4,722,434,05 1.00	239,641,255.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5,468,752,07 6.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE 1 AKHIR PERIO DE RENTS RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	D 2024	RKPD	D 2024	APB				RKPD PERUBAHA N 2024					NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,274,600.00	1,274,600.00	1,274,600.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,402,060.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,599,750.00	1,599,750.00	1,599,750.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,759,725.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			-	-	-		7,700,000.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	

- 2000 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE 1 AKHIR PERIO DE RENET RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN N RENA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024	NASIO				DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.03. 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1,400,000.00	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAJPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1,100,000.00	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2,200,000.00	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	18,350,000.00	8,950,000.00	20,595,000.00	2,245,000.00			-	- -	-		20,185,000.00	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	

- 2001 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE 1 AKHIR PERIO DE RENEST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENEJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENEJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024	NAL				NASIO					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	18.350.000,0 0	8.950.000,00	20.595.000,0 0	2.245.000,00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.185.000,0 0	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	422.415.530, 00	438.722.950, 00	546.513.950, 00	124.098.420,08			-	-	-		575.636.083, 00	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.036.700,00	6.034.500,00	6.034.500,00	-2.200,00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.640.370,00	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.134.450,0 0	19.134.200,0 0	19.134.200,0 0	-250,00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.047.895,0 0	BADAN KEPEGAWAJA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	

[illegible]

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENEST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN N RENAJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENAJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RPJ D 2024	APB D 2024	RPJPD PERUBAHA N 2024				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				9 Dokume n	9 Dokume n	8.240.000,00	8.240.000,00	10.640.000,00	2.400.000,00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.064.000,00	BADAN KEPEGAWAI A N DAN PENGEEMBA N GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	352.000.000,00	371.190.000,00	471.181.000,00	119.181.000,00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			498.179.000,00	BADAN KEPEGAWAI A N DAN PENGEEMBA N GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	117.785.000,00	117.785.000,00	102.785.000,00			-	- -	-		67.655.500,00	BADAN KEPEGAWAI A N DAN PENGEEMBA N GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	117.785.000,00	117.785.000,00	102.785.000,00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.655.500,00	BADAN KEPEGAWAI A N DAN PENGEEMBA N GAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 2004 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN REJEN A OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAI AN TARGET REJEN A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024				NAL	NASIO DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	446.958.400. 00	466.847.600. 00	460.327.600. 00	13.369.200.00			-	-	-		491.654.240. 00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	996.000.00	996.000.00	1.596.000.00	600.000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.095.600.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	71.458.500.0 0	81.950.000.0 0	58.450.000.0 0	-13.008.500.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.604.350.0 0	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	76.800.000.0 0	67.670.000.0 0	64.050.000.0 0	-12.750.000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		84.480.000.0 0	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 2005 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENSA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENSA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024	NASIO NAL	DAER AH									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	5.03.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	297.703.900. 00	336.231.600. 00	336.231.600. 00	38.527.700.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			327.474.290. 00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	132.420.000. 00	231.099.200. 00	326.034.000. 00	193.614.000.00			-	- -	-		228.162.000. 00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0.00 Unit	0.00 Unit	110.000.000. 00	128.780.000. 00	135.000.000. 00	25.000.000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			176.000.000. 00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.09. 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	7.420.000.00	0.00	0.00	-7.420.000.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.162.000.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 2009 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N REJEN A OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET REJEN A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024	NAL				NASIO					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	25,017,331.00	10,214,000.00	10,214,000.00	-14,803,331.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27,519,064.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				212 Orang	212 Orang	35,000,000.00	17,807,000.00	17,807,000.00	-17,193,000.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38,500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				750 Orang	750 Orang	7,502,500.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-2,500.00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8,252,750.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1,242,203.305.00	1,075,321.084.00	1,058,921.084.00	-183,282,221.00							1,625,800.000.00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	1,242,203.305.00	1,075,321.084.00	1,058,921.084.00	383,596,695.00							1,625,800.000.00		

- 2010 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENS T RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENA JA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENA JA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RP D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	215,000,000.00	214,999,750.00	276,535,350.00	61,535,350.00			-	-	-		418,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun					2.00 Dokume n	2.00 Dokume n	100,000,000.00	99,999,750.00	99,999,750.00	-250.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					186 Orang	186 Orang	115,000,000.00	115,000,000.00	176,535,600.00	61,535,600.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		143,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

- 2012 -

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENU OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIA N TARGET RENU OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHA N 2024				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	942.203.305. 00	795.321.334. 00	722.251.334. 00	-219.951.971.00	Kota Sukabum i, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.081.300.00 0.00	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
J U M L A H									7.314.186.67 3.00	7.495.509.69 0.00	7.824.189.94 8.00	510.003.275.00						9.168.312.78 8.00		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai bentuk rencana implementasi dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026. Berbagai indikasi program dan kegiatan telah disusun sebagai upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan kepegawaian dan pendidikan pelatihan di Kota Sukabumi.

Dengan struktur organisasi dan kekuatan anggaran yang ada, BKPSDM Kota Sukabumi berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan, menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat Kota Sukabumi.

Kami sadar bahwa dokumen Renja ini masih harus dipertajam lagi melalui pembahasan yang komprehensif oleh pihak-pihak yang berkompeten.

X. RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode enam bulan kedepan (semester ke 2) Tahun Anggaran 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja yang disusun merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 triwulan kedua semester 1, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis saat ini dan untuk memperbaiki dan menyempurnakan target kinerja yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai jembatan sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis Badan Kesbangpol. Perubahan Renja Badan Kesbangpol juga mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil dari Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta menjadi acuan bagi penyusunan RKPd Kota Sukabumi tahun berikutnya.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kondefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 159 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi;
9. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 Nomor 24 Tahun 2023;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025;
11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 Semester 2 dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024. Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 agar setiap perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 lebih terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024, yang berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renja SKPD

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan memperhatikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 Triwulan ke 2 semester 1 sebagai bahan acuan, yang terdiri dari:

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan Tahun 2024 Triwulan 2 Semester 1 serta Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Sukabumi.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SEMESTER I

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 semester 1. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan, maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.

Untuk Realisasi Anggaran Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 (Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Semester 1) yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Untuk capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi pada Triwulan II Semester 1 Tahun 2023 ini, baru tercapai 61,17 % , dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar 78,25%
 - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Realisasi mencapai 85,71%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi sebesar 100%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, sebesar 100%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD sebesar 100%
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, sebesar
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, sebesar 100%
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi sebesar 100%
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi 0%
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi 39 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi 17 pegawai 7 bulan sebesar 57,14%

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi sebesar 100%
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran sebesar 0%
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, realisasinya 0%.
- C. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, masih 0%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, realisasi sebesar 0%.
 - b. Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, realisasi sebesar 0%.
- D. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi 96,67%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Besarta atribut kelengkapannya, realisasi sebesar 100%
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan, realisasi sebesar 93,33%
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi sebesar 72,06%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, realisasi sebesar 100%
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , realisasi sebesar 80%
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga, realisasi sebesar 50,00%
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi sebesar 100%
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan, realisasi sebesar 4,17%
 - f. Fasilitas kunjungan tamu, realisasi sebesar 69,23%
 - g. Penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi sebesar 51%
- F. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 33,34 %
 - a. Pengadaan Mebeul Sebesar 0,0 %
 - b. Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi sebesar 66,67 %
- G. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, realisasi sebesar 63,64 %
 - c. Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi sebesar 100%
 - d. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, realisasi sebesar 50%
 - e. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi sebesar 50%
 - f. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, realisasinya 53,85 %

- H. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, realisasi sebesar 63,64%, dengan sub kegiatan sebagai berikut
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Dan Perijinan Kendaraan Operasional/Lapangan, realisasi sebesar 54,55 %
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi sebesar 100 %
 - c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud sebesar 0%
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Kantor realisasi sebesar 100%.

Untuk Program Kegiatan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota secara keseluruhan capaian kinerja telah terlaksana melebihi target yang ditentukan untuk semester 2 tahun berjalan, semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai sekitar 78,25 %, hanya terdapat kekurangan gaji untuk ASN sebesar sekitar 149.496.074,- (berdasarkan perhitungan prognosis bulan Juni 2024).

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, capaian kinerja sebesar 50% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, realisasi sebesar 50,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Program Kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, realisasi sebesar 100 % berupa pemberian hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan
 - b. Perumusan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, realisasi sebesar 50,00 %
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, realisasi sebesar 0 %, berupa pembentukan anggota paskibraka dan akan selesai 100% pada bulan Agustus 2024.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, secara keseluruhan sesuai target yaitu pada semester 1 ini telah tercapai 50%, dikarenakan kegiatan pembentukan paskibraka sedang berjalan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, realisasi sebesar 95% dengan kegiatan :

- Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang, pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemeliharaan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan di bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan

pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemeliharaan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, sebesar 95 %

- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemeliharaan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, sebesar 100 %

Untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik pada semester 1 ini telah direalisasikan 9 partai politik yg mencairkan dan untuk semester 2 ada tambahan 1 partai politik pemenang pemilu sehingga penerima bantuan hibah partai politik menjadi 10 partai.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, realisasi sebesar 60,22%
- a. Penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas asing di daerah, realisasi sebesar 0,00 %
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah, sebesar 80,65 %
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah sebesar 100 %

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, telah mencapai capaian kinerja sesuai dengan target, dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan 100% yaitu penyusunan database ormas yang selesai pada triwulan ke IV Tahun 2024.

5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, capaian kinerja yang telah tercapai sebesar 27,78%. dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, realisasinya sebesar 50 %
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, realisasinya sebesar 0%

- c. Pelaksanaan Koordinasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, realisasinya sebesar 33,33 %

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, secara keseluruhan pada semester 1 belum tercapai sesuai target, dikarenakan kegiatan Dialog Lintas Umat Beragama masih belum dilaksanakan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 sesuai jadwal yang telah direncanakan, dan pencairan hibah kepada lembaga yaitu Kemenag dan Baker Pakem belum melakukan pencairan.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial telah mencapai capaian kinerja sebesar 49,31%, dan mempunyai sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, realisasinya 72,73 %
 - b. Pelaksanaan Kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, realisasinya 50 %
 - c. Pelaksanaan Koordinasi evaluasi dan Pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, realisasinya sebesar 45,94%
 - d. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, realisasinya 28,57 %

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C 29b sebagai berikut :

- 2022 -

TC. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (RPD 2024-2026)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			100%	100%	61,17%	61,17%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	78,25%	78,25%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100 %	100 %	85,71%	85,71%	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku LAKIP,LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Buku laporan SPIP SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	o dokumen	0%	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat	100 %	100 %	39%	39%	
8.01.01.2.02.01	Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang terbayarkan gaji dan tunjangan	238 orang/bulan	238 orang/bulan	136 orang/bulan	57,14%	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan tahunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	-	0%	
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	-	0%	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi barang milik daerah Badang Kesbangpol	100 %	100 %	0%	0%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah buku laporan Administrasi Barang Milik Daerah Bakesbangpol	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKP	Jumlah buku laporan aset barang milik daerah Badan Kesbangpol	1 dokumen	1 buku	0 dokumen	0,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100% %	100% %	96,67%	96,67%	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah terpenuhinya Pakaian Seragam PDH dan Pakaian hari hari	30 buah	30 buah	30 buku	100%	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis impelemntasi perundang undangan	30 orang	30 orang	28 orang	93,33%	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	72,06%	72,06%	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/penerangan bang Kantor	4 paket	4 paket	4 paket	100,00%	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover	15 paket	15 paket	12 paket	80,00%	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 paket	2 paket	1 paket	50,00%	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan	3 paket	3 paket	3 paket	100,00%	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	24 exp	24 exp	1 exp	4,17%	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan jamuan makan dan minum jamuan rapat/jamuan tamu	65 laporan	65 laporan	45 laporan	69,23%	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan	100 laporan	100 laporan	51 laporan	51,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia	100 %	100 %	33,34%	33,34%	
8.01.01.2.07.05	Pengadaam Mebel	Jumlah penyediaan pengadaan mebeleir	1 Unit	1 Unit	-	0,00%	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah penyediaan pengadaan perlatan dan mesin lainnya	3 Unit	3 Unit	2 unit	66,67%	
8.01.01.2.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	63,46%	63,46%	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Tersedianya Materai 10000	100 lembar	100 lembar	66 lembar	100,00%	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi listrik, dan internet	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00%	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Jumlah alat dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00%	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah pegawai THL yang terbayarkan	13 bulan	13 bulan	7 bulan	53,85%	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	63,64%	63,64%	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Dan Perijinan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	11 unit	11 unit	6 unit	54,55%	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara (komputer, laptop,printer)	10 unit	10 unit	10 unit	100,00%	
8.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah peralatan Tak Berwujud Yag Dipelihara	1 unit	1 unit	0	0,00%	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor	1 Unit	1 Unit	1 unit	100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPDP Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terwujudnya wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	50%	50%	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan, bela negara dan terbentuknya karakter kebangsaan yang berdasarkan ideologi pancasila	100 %	100 %	50%	50%	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50%	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	34 orang	34 orang	0	0	pelaksanaan kegiatan pembentukan paskibraka selesai bulan Agustus 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)/Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatannya kehidupan berkualitas melalui penerapan nilai-nilai agama dan wawasan kebangsaan	100 orang	100 orang	95%	95,00%	
8.01.03.2.01.04	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah peserta pendidikan politik kepada masyarakat dan terfasilitasinya koordinasi antar lembaga berupa bantuan hibah uang	100 %	100 %	95%	95,00%	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kenijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan di daerah	9 dokumen	10 dokumen	9 dokumen	90,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan di daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat	100	100	60,22%	60,22%	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar	100 %	100 %	60,22%	60,22%	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	0	0	penyusunan database ormas selesai pada bulan Desember 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	31 dokumen	31 dokumen	25 dokumen	80,65%	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	30 orang	30 orang	30 orang	100%	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga non pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Pekanbaru	100 Lembaga / parpol	100 Lembaga / parpol	27,78%	27,78%	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah dan organisasi	100 %	100 %	27,78%	27,78%	
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di daerah	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di daerah	21 orang	21 orang	0	0%	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di daerah	126 orang	126 orang	42 orang	33,33%	
8.01.06.2.01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Tingkat Kewaspadaan Dini dalam penanganan konflik sosial di masyarakat	100 persen	100 persen	49,31%	49,31%	
8.01.06.2.01.03	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terfasilitasinya rapat koordinasi pengawasan dini penanganan konflik	100 %	100 %	49,31%	49,31%	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	11 dokumen	11 dokumen	8 dokumen	72,73%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (awal RPD)	Target Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2))		CATATAN
					Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n-4)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	240 orang	240 orang	120	50,00%	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah	677 orang	677 orang	311 orang	45,94%	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	7 laporan	7 laporan	2 laporan	28,57%	

2.1. HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II SEMESTER 1 TAHUN 2024

Hasil evaluasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi pada Tahun 2024 (triwulan II semester 1), yaitu :

1. Tahun 2024 adalah tahun politik, tahun dimana diselenggarakannya Pemilu Legislatif, Pemilu presiden dan juga Pilkada serentak, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi menyelenggarakan Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan mengadakan monitoring dan evaluasi kondusivitas keamanan dan ketentraman di Wilayah Kota Sukabumi.
2. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II dan hasil review BPKRI terkait Bantuan Hibah kepada Parpai Politik, Lembaga Vertikal, Lembaga Non Pemerintah dan Organisasi Masyarakat, perlu diadakan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Sukabumi.
3. Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan II semester 1 Tahun 2024 terdapat kekurangan gaji ASN;
4. Berdasarkan evaluasi pada triwulan II semester Tahun 2024, terdapat kekurangan anggaran pada kegiatan pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka(paskibraka);
5. Berdasarkan evaluasi pada triwulan II semester 1 Tahun 2024 terdapat kekurangan Hibah kepada partai Politik dikarenakan ada tambahan suara pemilihan umum dan tambahan partai pemenang pemilu 2024-2029;
6. Dan berdasarkan evaluasi pada triwulan II semester 1 Tahun 2024, terdapat pergeseran anggaran untuk kegiatan yang lebih penting.

2.2. ANALISIS KINERJA PERAYANAN PERANGKAT DARAH

Tolok ukur yang digunakan dalam analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi adalah indikator kinerja yang ditetapkan pada saat menyusun Renstra maupun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi dapat dilihat pada lampiran tabel T-C 30. Jika melihat pada tabel tersebut terdapat 5 indikator, hanya saja indikator tersebut tidak seluruhnya digunakan pada tiap tahunnya, disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun yang bersangkutan.

Tabel T-C 30										
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH										
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
KOTA SUKABUMI										
NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra 2024-2026	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Kinerja	Proyeksi	
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024 (triwulan 2)	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	12	16	17
1	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan		√	100	100	100	100	50%	100%	100%
2	persentase konflik antar inter umat beragama yang terselesaikan		√	100	100	100	100	27,78%	100%	100%
3	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi		√	100	100	100	100	49,31%	100%	100%
4	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik Serta Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu Dan Pilkada 2024		√	100	100	100	100	95%	100%	100%
5	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		√	86	86	86	86	60,22%	90%	90%
Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026										

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi No. 159 Tahun 2021 Tahun tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di pimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi mempunyai tugas pokok membantu Wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi, Program Prioritas Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Politik Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penangan Konflik Sosial.

Dampak dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi terhadap Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, adalah masyarakat menjadi sadar hukum dan taat kepada peraturan daerah yang berlaku, sehingga dapat membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi adalah perlunya mempersiapkan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah:

1. Kota Sukabumi yang menjadi tujuan para migran domestik sehingga berakibat pada kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama. Dari fenomena yang ada perlu adanya tindakan berupa kegiatan yang mampu meningkatkan keharmonisan antar ras/suku/budaya di Kota Sukabumi. Oleh karena itu dibentuklah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Sukabumi yang pengurusnya terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama di Kota Sukabumi.
2. Maraknya tawuran pelajar yang semakin hari semakin sering, perlu dilakukan kegiatan untuk menurunkan tingkat tawuran pelajar tersebut, jika memungkinkan sampai dengan tidak adanya lagi kejadian tawuran pelajar di Kota Sukabumi demi kondusivitas Kota Sukabumi.
3. Penyusunan Data base Ormas, OKP, dan LSM di Kota Sukabumi dilaksanakan setiap tahun, hal ini dikarenakan perkembangan
4. keberadaan Ormas, OKP, dan LSM seiring dengan perkembangan demokrasi relatif semakin banyak. Untuk itu pemutakhiran database ormas OKP dan LSM dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mempermudah pemantauan dan pengendalian stabilitas politik dan kondusivitas masyarakat di Kota Sukabumi.
5. Antisipasi dalam keamanan ketertiban serta kondusivitas Kota Sukabumi sekaitan Tahun 2024 masa masa tahapan Pemilu/Pilkada serentak .
6. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat sejak tahun 2013 dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota Sukabumi. Pembentukan FKDM tingkat Kecamatan secara bertahap di tahun 2019
 - a. Maraknya aksi unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah maupun terhadap situasi politik dalam negeri, tentunya membutuhkan perhatian pula bagi pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan faktor keamanan dan kondusifitas kota. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi memiliki peran pula dalam menciptakan kondusifitas Kota Sukabumi. Kegiatan antisipasi dan penggalangan terhadap berbagai macam Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap kota kiranya dapat dilakukan secara maksimal.
 - b. Isu Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan, akhir akhir ini relatif menjadi isu yang mampu menarik untuk diangkat, yang dapat memicu munculnya konflik di masyarakat. Untuk itu peran Badan Kesbangpol, FPK, FKDM serta FKUB menjadi sangat penting untuk mengantisipasi konflik yang berkaitan dengan isu SARA tersebut.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024											
KOTA SUKABUMI											
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				32.515.238.307	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				32.945.748.792	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				32.515.238.307	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				32.945.748.792	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				32.515.238.307	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				32.945.748.792	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	3.887.625.070	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	3.957.613.270	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Renja dan Renstra	-	17.448.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	17.448.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.848.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.848.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.941.566.310	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.941.566.310	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	2.940.066.310	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	2.940.066.310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	500.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	2 Dokumen	500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Pengamanan	2 Dokumen	500.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	12.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	9.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	30 Paket	16.425.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	3.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	3.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	385.248.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	385.248.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	30.850.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.850.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6.485.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	13.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	8.400.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	320.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65 Laporan	68.040.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65 Laporan	68.040.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	265.053.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	239.593.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	13.470.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	13.470.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	970.000	Pengadaan Mebel	Kota Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	12.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	12.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	279.358.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	279.358.760	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	38.881.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	45.255.960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Laporan	50.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.420.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	188.476.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	188.476.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi	-	-	237.534.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	237.534.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	113.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Sukabumi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	12 Unit	113.530.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	4.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.100.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	118.014.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	182.988.000	

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		-	-	810.136.948	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		-	-	818.636.948	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		-	-	810.136.948	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		-	-	810.136.948	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Dokumen	10.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	100.137.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	98.637.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	34 Orang	699.999.948	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	34 Orang	709.999.948	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		-	-	864.579.239	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		-	-	893.321.524	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		-	-	864.579.239	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		-	-	864.579.239	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	773.204.039	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	9 Dokumen	801.946.324	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	91.375.200	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	91.375.200	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-	-	669.637.250	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-	-	776.517.250	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-	-	669.637.250	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-	-	669.637.250	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	7.837.250	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	7.837.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	37 Dokumen	631.800.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	738.680.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	30.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35 Orang	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		-	-	378.959.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		-	-	405.459.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		-	-	378.959.500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		-	-	378.959.500	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	331.401.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	356.401.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21 Orang	11.887.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21 Orang	11.887.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 orang	35.671.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	126 orang	37.171.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				25.904.300.300					26.094.200.300	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				25.904.300.300					25.904.300.300	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	13 Dokumen	24.307.521.400	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	13 Dokumen	24.307.521.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360 Orang	131.695.100	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360 Orang	301.695.100	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	122 Orang	1.355.083.800	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	122 Orang	1.364.983.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	110.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	120.000.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (permendagri 050 Tahun 2021)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi memiliki Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan terdapat beberapa pergeseran anggaran dan tambahan pagu anggaran di beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Tambahan untuk Belanja Pengadaan pakaian Dinas berupa seragam Batik yang asalnya Rp.9.000.000,- menjadi Rp. 16.500.000,-
2. Tambahan untuk Belanja untuk Pemeliharaan Gedung Kantor disebabkan yang asalnya 118.014.000,- menjadi Rp. 182.588.000,- untuk perbaikan sebagian bangunan kantor yang roboh.
3. Tambahan anggaran untuh hibah pemilu Pemenang Pemilu priode 2024-2029, karena ada tambahan suara pemilih dan tambahan partai baru yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Sukabumi, anggaran bantuan Parpol asalnya Rp. 773.204.039, menjadi 801.946.324,-.
4. Ada tambahan dana untuk ormas yang mendapatkan bantuan hibah di perubahan anggaran 2024, anggaral asa sebesar Rp. 631.800.000,- menjadi 738.680.000,-
5. Dan ada beberapa kode rekening yang mengalami pergeseran dikarenakan ada beberapa anggaran yang telah habis dan masih membutuhkan biaya, sperti pembayaran listrik, alat kebersihan dan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Ada pergeseran untuk belanja honorarium kegiatan pembentukan paskibraka. Seperti dalam TC 31 sesuai SIPD, sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUKABUMI TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAKU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							44.486.666.512,00	32.515.238.307,00	32.945.748.792,00	-11.540.916.520,00							6.325.963.147,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							44.486.666.512,00	32.515.238.307,00	32.945.748.792,00	-11.540.916.520,00							6.325.963.147,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							44.486.666.512,00	32.515.238.307,00	32.945.748.792,00	-11.540.916.520,00							6.325.963.147,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	-	3.663.725.530,00	3.887.823.070,00	3.967.813.270,00	-2.687.216.510,00							566.507.015,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Nengra dan Renstra				-	2 Dokumen	11.100.000,00	17.448.000,00	17.448.000,00	6.348.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mitra Kerja Bekerjasama Kota Sukabumi	15.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,00 Dokumen	8.500.000,00	14.848.000,00	14.848.000,00	6.348.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1,00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1,00 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1,00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1,00 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD						4,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KORIIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUJANG	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	2.932.882.915,00	2.941.566.310,00	2.941.566.310,00	8.663.795,00			-	-	-		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					-	-							-	-	-			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0,00 Orang/bulan	0,00 Orang/bulan	2.931.382.915,00	2.940.066.310,00	2.940.066.310,00	8.663.795,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,00 Laporan	1,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD					2,00 Laporan	2,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	-	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.03.0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD					-	-							-	-	-			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1,00 Laporan	1,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah					-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	19.425.000,00	7.425.000,00			-	-	-		68.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakatan Dinas beserta Anlbu Keterselenggaraan					-	-							-	-	-			
			Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Anlbu Keterselenggaraan				30,00 Paket	30,00 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	16.425.000,00	7.425.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					-	-							-	-	-			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30,00 Orang	30,00 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (18-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	-	294.300.000,00	385.248.000,00	374.203.200,00	79.983.200,00			-	-	-		317.480.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,00 Paket	2,00 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	26.000.000,00	30.850.000,00	35.850.000,00	9.850.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2,00 Paket	2,00 Paket	6.500.000,00	6.485.000,00	13.500.000,00	7.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3,00 Paket	3,00 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	8.400.200,00	900.200,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24,00 Dokumen	24,00 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	320.000,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				65,00 Laporan	65,00 Laporan	47.040.000,00	68.040.000,00	68.040.000,00	21.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,00 Laporan	100,00 Laporan	199.940.000,00	265.053.000,00	239.593.000,00	39.663.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			199.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							138.100.000,00	237.534.000,00	303.618.000,00	165.518.000,00			-	-			166.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan obyek an Pajak dan Perizinannya				5,00 Unit	5,00 Unit	114.000.000,00	113.530.000,00	113.530.000,00	-470.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa				17,00 Unit	17,00 Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	7.100.000,00	2.100.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	9.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Asat Tak Berwujud																			
			Jumlah Asat Tak Berwujud yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	9.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	18.100.000,00	118.014.000,00	182.988.000,00	164.888.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	9.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	-	-	-	710.137.500,00	810.136.948,00	810.636.948,00	110.862.448,00							820.999.948,00		
	9.01.02.2.01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	710.137.500,00	810.136.948,00	810.636.948,00	108.499.448,00			-	-	-		820.999.948,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	9.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan					5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	9.01.02.2.01.0002	Penusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan																			
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.137.500,00	100.137.000,00	98.637.000,00	-1.500.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	9.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan				0.00 Orang	0.00 Orang	600.000.000,00	699.999.948,00	709.999.948,00	109.999.948,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			699.999.948,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENCANA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Berkurang/Berlebih (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	-	-	-	766.064.039,00	864.679.239,00	893.321.524,00	50.000.000,00				-			816.064.039,00		
	8.01.03.2.01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	-	-	-	766.064.039,00	864.679.239,00	893.321.524,00	127.257.485,00				-			816.064.039,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Penusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	766.064.039,00	773.204.039,00	801.948.324,00	35.862.285,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			816.064.039,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					3.00 Laporan	3.00 Laporan	0,00	91.375.200,00	91.375.200,00	91.375.200,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			0,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	
4	8.01.04	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	-	528.987.848,00	669.637.250,00	776.517.250,00	26.000.000,00				-			548.987.848,00		
	8.01.04.2.01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan							528.987.848,00	669.637.250,00	776.517.250,00	247.528.608,00				-			548.987.848,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah					1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.987.848,00	7.837.250,00	7.837.250,00	-3.150.398,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			10.987.848,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (19-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)										
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	9.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah																						
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah yang Disusun				17.00 Dokumen	26 Dokumen	488.000.000,00	631.800.000,00	738.680.000,00	250.680.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				488.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	9.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah				50.00 Orang	26 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
5.	9.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	387.960.000,00	378.959.500,00	405.459.500,00	-500,00								387.959.500,00				
	9.01.05.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					-	-	387.960.000,00	378.959.500,00	405.459.500,00	47.499.500,00								387.959.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	9.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenakutan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenakutan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	311.500.000,00	331.401.000,00	356.401.000,00	44.901.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				310.401.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	9.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenakutan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenakutan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				40.00 Orang	21 Orang	15.000.000,00	11.887.000,00	11.887.000,00	-3.113.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				11.887.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	9.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenakutan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenakutan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				274.00 Orang	120 Orang	31.400.000,00	35.671.500,00	37.171.500,00	5.771.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				35.671.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJAL OPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (19-12)	14	15	16						17	18		19	20	21
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6.	6.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMERDEKAAN NASIONAL, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	-	-	-	38.469.790.598,00	25.904.300.300,00	26.094.200.300,00	-35.644.745.598,00							2.825.045.000,00								
	6.01.06.2.01	Penurunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertajuan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	38.469.790.598,00	25.904.300.300,00	26.094.200.300,00	-12.375.590.298,00							2.825.045.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK							
	6.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Penurunan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				13.00 Dokumen	13.00 Dokumen	38.109.790.598,00	24.307.521.400,00	24.307.521.400,00	-13.802.269.198,00							2.890.045.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK							
	6.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				960.00 Orang	960.00 Orang	180.000.000,00	131.695.100,00	301.695.100,00	151.695.100,00							180.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK							
	6.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				122.00 Orang	122.00 Orang	100.000.000,00	1.356.083.800,00	1.384.983.800,00	1.384.983.800,00							180.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK							
	6.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60.00 Laporan	60.00 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	10.000.000,00							136.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK							
		J U M L A H							44.468.669.912,00	32.515.238.307,00	32.945.748.792,00	-11.548.916.520,00							6.525.963.147,00								

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 (semester 1 triwulan 2), berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesbangpol, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

4.1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol tahun 2024 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPD Kota Sukabumi dan Renstra Bakesbangpol Kota Sukabumi.
2. Di dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud

3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Demikian Perubahan Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Tahun 2024 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun anggaran 2024.

Y. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKOLE KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024, adanya perubahan Rencana Kerja terjadi atas usulan perubahan anggaran, penambahan anggaran dan pergeseran anggaran sehingga akan berdampak pada berubahnya beberapa output indikator kinerja program /kegiatan/subkegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Adapun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dilakukan karena berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan rencana kerja Kecamatan Cikole Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Target yang sudah ditentukan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode tahun berkenaan. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan harus

terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Perubahan Renja Kecamatan Cikole Tahun 2024. Selain itu, dalam proses penyusunannya, harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung.

Dari penjelasan diatas maka Kecamatan Cikole Kota Sukabumi membuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Kota Sukabumi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cikole Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Tambahan Lembaran Daerah kota sukabumi Tahun 2021 Nomor 1;
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042;
26. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.
27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
28. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk mewujudkan Konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Kecamatan Cikole. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II, adanya kondisi renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

1.3.2. Tujuan

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan baik penambahan, pergeseran ataupun pengurangan;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikole disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

Memuat rencana perubahan anggaran program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester 1 Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Renja Kecamatan Cikole Tahun 2024 dan Capaian Renstra Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cikole. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kecamatan Cikole Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Matrik Pengendalian Kecamatan Cikole Tahun 2023

Sumber Data : SPJ Fungsional Bulan Juni 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	9.349.501.410	58,10	58,10	4.879.644.372	52,19	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persen	90	6.898.800	50,00	55,56	5.580.800	80,90	APBD
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	Dokumen	2	1.999.100	2	100,00	2.187.500	109,42	APBD
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	2	999.950	0	0,00	0	0,00	APBD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	2	499.800	0	0,00	0	0,00	APBD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Laporan	4	2.400.000	4	100,00	2.398.800	99,95	APBD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	2	999.950	2	100,00	994.500	99,45	APBD

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90	7.670.891.060	47,62	52,91	3.977.142.862	51,85	APBD
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.668.391.360	6	42,86	3.975.148.412	51,84	APBD
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	2	999.950	2	100,00	999.950	100,00	APBD
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	499.800	0	0,00	0	0,00	APBD
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	999.950	1	100,00	994.500	99,45	APBD
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	90	999.700	0,00	0,00	260.000	0	APBD
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	999.700		0,00	260.000	26,01	APBD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	90	246.239.250	53,57	59,52	137.087.590	55,67	APBD
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Bulan	12	5.791.500	6	50,00	4.314.800	74,50	APBD

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	53.663.000	6	50,00	30.333.000	56,52	APBD
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1.000.000	4	66,67	225.000	22,50	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan dan Kelurahan	Paket	3	3.899.750	3	100,00	1.720.000	44,11	APBD
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	6	1.500.000			0	0,00	APBD
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kecamatan dan Kelurahan: Snack, Makan, Air Mineral Galon, Air Mineral Dus	Bulan	12	95.710.000	6	50,00	41.656.900	43,52	APBD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Laporan	48	82.675.000	28	58,33	58.837.890	71,17	APBD
7.01.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Sewa Web Hosting dan Maintance	OK	4	2.000.000	0	0,00	0	0,00	APBD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	90	37.704.000	100,00	111,11	34.200.000	90,71	APBD
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	37.704.000	2	100,00	34.200.000	90,71	APBD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90	1.190.326.600	65,53	72,82	621.264.520	52,19	APBD

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	174	1.740.000	174	100,00	1.740.000	100,00	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	4	103.174.000	4	100,00	50.972.073	49,40	APBD
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OB	192	168.000.000	75	39,06	84.000.000	50,00	APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	429	917.412.600	99	23,08	484.552.447	52,82	APBD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	90	196.442.000	90,00	100,00	104.108.600	53,00	APBD
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	46.690.000	2	100,00	30.131.900	64,54	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	92.456.000	42	100,00	43.071.700	46,59	APBD
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan & Jasa Peralatan Kerja	UPT	2	7.260.000	2	100,00	4.940.000	68,04	APBD
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Bangunan Kantor	Paket	5	50.036.000	3	60,00	25.965.000	51,89	APBD

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.845.192.200	31,25	31,25	38.721.926	2,10	APBD
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	92	1.842.996.350	62,50	67,93	38.721.926	2,10	APBD
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	4	1.777.545.600	1	25,00	12.040.000	0,68	APBD
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	65.450.750	2	100,00	26.681.926	40,77	APBD
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	90	2.195.850	0,00	0,00	0	0,00	APBD
7.01.02.2.02.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	3	2.195.850	0	0,00	0	0,00	APBD

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	90	2.784.060.600	53,57	59,52	931.197.300	33,45	APBD
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	90	169.300.000	50,00	55,56	81.368.800	48,06	APBD
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pekan OR Kota, Pemberdayaan Posyandu, Kegiatan PKK, Kegiatan Kader, Kegiatan P2WKSS.	Kegiatan	12	169.300.000	6	50,00	81.368.800	48,06	APBD
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	90	2.614.760.600	57,14	63,49	849.828.500	32,50	APBD
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Dokumen dan Peserta Musrenbang Kelurahan	Dokumen	7	83.960.600	1	14,29	29.754.000	35,44	APBD
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	6	2.530.800.000	6	100,00	820.074.500	32,40	APBD
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	100	71.024.700	50,00	50,00	41.634.600	58,62	APBD
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas Aktif	Persen	90	71.024.700	50,00	55,56	41.634.600	58,62	APBD

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	71.024.700	1	50,00	41.634.600	58,62	APBD
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	15.349.550	50,00	50,00	8.959.600	58,37	APBD
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	90	15.349.550	50,00	55,56	8.959.600	58,37	APBD
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	2	3.350.000	1	50,00	1.334.600	39,84	APBD
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	11.999.550	1	50,00	7.625.000	63,54	
Jumlah					14.065.128.460	48,23	49,72	5.900.157.798	41,95	APBD

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	2500
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	2500
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok/ Buku	2	1	7	7	100%	100	36	900
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok/ Buku	2	1	2	2	100%	100	34	858
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						100%	100	33	833

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok/ Buku	2	1	2	2	100%	100	34	858
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	100%	100	33	833
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap / Buku	2	1	2	2	100%	100	34	858
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	-	-	-	100%	100	33	833
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	2500
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	14	100%	100	43	1067
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	2	2	2	100%	100	35	867

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	-	2	2	100%	100	34	850
7	01	01	2	02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	-	-	-	100%	100	33	833
7	01	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		-	-	-	-	0	0	0
7	01	01	2	03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	0	0	0
7	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		-	100	100	100%	0	33	833
7	01	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pcs	-	-	54	54	100%	0	18	450
7	01	01	2	05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	0	0	0
7	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	2500

Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket/ Item/ Bulan	12	4	12	12	100%	100	39	967
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket/ Item/ Bulan	12	43	12	12	100%	100	52	1292
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket/ Item/ Bulan	0	2	-	-	100%	100	34	850
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket/ Item/ Bulan	12	6	12	12	100%	100	39	983
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	100	33	833
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap / Paket /Bulan	12	2	12	12	100%	100	38	950
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap/OH	480	130	480	480	100%	100	237	5917

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	7	4	4	100%	100	37	925
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Buah	.	8	2	2	100%	100	37	917
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5	1	1	100%	100	35	883
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit/buah	.	6	7	7	100%	100	38	942
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Taman	Paket	.	1	.	.	-	100	34	842
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan/Lembar	145	200	75	75	100%	100	125	3125

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah yang Disediakan	Rekening	4	4	4	4	100%	100	36	900
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OB	192	16	192	192	100%	100	103	2567
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	429	28	520	411	79%	100	180	4492
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas Kecamatan dan Kelurahan, Mobil K3, Motor K3 yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	-	41	42	42	100%	100	61	1525
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Unit	-	-	-	-	-	0	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	42	-	-	-	-	0	0	0
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	2	10	10	100%	100	37	933
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	3	5	5	100%	100	36	900
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100%	200	133	33
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lap/Keg	2	1	2	2	100%	100	34	858

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok/Keg	2	1	1	1	100%	100	34	850
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap / Buku	2	1	2	2	100%	100	34	858
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	0
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen/Buku Kegiatan PKK Kec dan Kel	Dok/Keg	7	10	14	14	100%	100	41	1033

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	03	2	01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Buku Hasil Musrenbang dan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang Tk.Kecamatan dan Kelurahan	Buku	2	6	8	8	100%	100	38	950
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikole	Tahun	1	1	1	1	100%	100	34	850
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisarua	Tahun	1	1	1	1	100%	100	34	850
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selabatu	Tahun	1	1	1	1	100%	100	34	850
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungparang	Tahun	1	1	1	1	100%	100	34	850
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati	Tahun	1	1	1	1	100%	100	34	850

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subangjaya	Tahun	1	1	1	1	100%	100	34	850
7	01	03	2	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	-	100	100	100	100%	0	67	1667
7	01	03	2	05	02		Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan	Kel	-	-	6	6	100%	0	6	150
7	01	03	2	05	02		Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan se-Kecamatan Cikole	Keg	-	-	1	1	100%	1	2	50
7	01	04					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	100	100	100	100	100%	100	233	5833
7	01	04	2	01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	100	100	100	100	100%	100	233	5833
7	01	04	2	01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Trantibum dan Perigantan Hari Besar Keagmaan	Lap /Buku	2	1	2	2	100%	1	4	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05	2	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05	2	01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2.1 Matrik Pengendalian diatas dapat kita ketahui Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Cikole Sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi pengendalian Capaian Realisasi Anggaran tersebut, maka kita dapat melihat kemampuan capaian realisasi di setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 9.349.501.410,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 4.879.455.972,- untuk subkegiatan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota hingga triwulan II rata – rata sudah mencapai 58,10% dari target indikator capaian kinerja program 100%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 1.845.192.200,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 38.721.926,-. untuk subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sudah mencapai 31,25% dari target indikator capaian kinerja Program 100%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 2.784.060.600,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 931.197.300,-. untuk subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sudah mencapai 59,52% dari target indikator capaian kinerja Program 100%. Sedikit Rendah capaian Realisasi nya dikarenakan untuk subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu dana Kelurahan karena ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di triw II ini dan mempengaruhi Pencapaian Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakt Desa dan Kelurahan yang relatif rendah.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 71.024.700,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 41.634.600,-. untuk subkegiatan dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Sudah mencapai 50% dari target indikator capaian kinerja Program 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 15.349.550,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 8.959.600,-. untuk subkegiatan dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Sudah mencapai 50% dari target indikator capaian kinerja Program 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cikole didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK. Pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Kecamatan		IKK	74,35	75		74,22		74,35	75		100%
2	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efesien		IKK				95					100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKK				85					100%
4	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan		IKK				100					100%
5	Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan Cikole		IKK				20					100%
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas		IKK				80					100%
7	Predikat SAKIP Kecamatan		IKK	B	B				B	B		100%
8	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kecamatan Cikole		IKK	B	B				B	B		100%

9	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan Cikole		IKK	100	100				100	100		100%
10	Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan		IKK	100	100				100	100		100%
11	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja		IKK	45	75				45	75		100%
12	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan		IKK	100	100				100	100		100%
13	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		IKK	50	75				50	75		100%

Sumber Data : Dokumen Renstra 2024 - 2026

2.3 Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cikole

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa Program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Diantaranya yakni Stunting yang menjadi isu Nasional dan Provinsi serta yang menyangkut aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, Aspek Pemerintahan dan Aspek Penataan Ruang, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta dalam upaya menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kota Sukabumi. Isu strategis tersebut adalah :

- Kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan;
- Infrastruktur dan tata kota;
- Daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- Kualitas lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan,;

Berdasarkan Peraturan Wali kota Sukabumi No 80 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi bahwa kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Camat dalam pelaksanaan tugasnya adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;

- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sudah diatur oleh Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020, namun belum seluruh anggaran kegiatan juga kewenangan yang dlimpahkan oleh Wali Kota bisa dilaksanakan langsung oleh setiap pembuat rencana kegiatan di Tingkat Kecamatan.

Permasalahan dan hambatan dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Namun demikian sudah merupakan komitmen seluruh Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan serta upaya mengatasinya antara lain:

1. Kewenangan Pemerintahan yang diberikan Wali Kota Sukabumi kepada Camat pada dasarnya merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah, namun penyerahan kewenangan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan personel, perlengkapan dan pembiayaannya. Begitu pula dari aspek pembinaan teknis terkait belum dilaksanakan. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan Peraturan Wali Kota Sukabumi No 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tupoksi dan Tata Kerja Kecamatan untuk mengatasi Kepuasan Masyarakat, meningkatkan kualitas SDM yang ada mengoptimalkan pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan mekanisme pelayanan yang jelas dan baku
2. Keterbatasan Anggaran yang diterima Kecamatan Cikole belum seluruhnya dapat menunjang rencana kegiatan yang telah disusun oleh setiap Kepala Seksi upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggali potensi yang sifatnya tidak mengikat.

Tabel (T-C.31)

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

Kota Sukabumi

Nama SKPD : Kecamatan
Cikole

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8.203.343.054	PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8.682.154.436	PAD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	6.900.000	PAD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	6.900.000	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1.000.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	3 Dokumen	1.000.000	PAD

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	500.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	2.400.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	2.400.000	PAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.000.000	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.000.000	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.715.143.284	PAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.133.573.506	PAD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 OB	6.712.643.284	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 OB	7.131.073.506	PAD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1.000.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1.000.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	500.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	500.000	PAD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	1.000.000	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.000.000	PAD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.000.000	PAD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	1.000.000	PAD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1.000.000	PAD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1.000.000	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.000.550	PAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.000.550	PAD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.800.300	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.800.300	PAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	38.285.250	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.285.250	PAD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.000.000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.000.000	PAD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	3.900.000	PAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.900.000	PAD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.500.000	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.500.000	PAD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	37.765.000	PAD	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	37.765.000	PAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	16.750.000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	16.750.000	PAD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	2.000.000	PAD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Cikole	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	2.000.000	PAD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	12.350.000	PAD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	12.350.000	PAD
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	PAD	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	PAD
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.350.000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.350.000	PAD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	PAD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pembuatan Taman	-	-	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pembuatan Taman	-	-	PAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.171.893.220	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.232.274.380	PAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.540.000	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.740.000	PAD

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah yang Disediakan	5 Rekening	123.490.620	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah yang Disediakan	5 Rekening	101.828.480	PAD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	192 OB	192.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	848.862.600	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	429 OB	936.705.900	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	189.056.000	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cikole	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	189.056.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2 Unit	39.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43 Unit	131.751.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38 Unit	92.751.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.260.000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	7.260.000	PAD

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50.045.000	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.045.000	PAD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cikole	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	1.771.351.475	PAD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cikole	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	1.771.351.475	PAD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cikole	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1.769.155.475	PAD	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cikole	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1.769.155.475	PAD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	1.737.067.000	PAD	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	1.737.067.000	PAD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	32.088.475	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	32.088.475	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Cikole	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	2.196.000	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Cikole	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	2.196.000	PAD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	2.196.000	PAD	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Buku	2.196.000	PAD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cikole	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	2.309.767.158	PAD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cikole	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	2.309.767.158	PAD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cikole	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	220.002.600	PAD	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cikole	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	100%	220.002.600	PAD

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	220.002.600	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	220.002.600	PAD
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Cikole	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	2.089.764.558	PAD	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Cikole	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	2.089.764.558	PAD
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Buku Hasil Musrenbang dan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang Tk.Kecamatan dan Kelurahan	5 Lembaga	83.961.250	PAD	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Buku Hasil Musrenbang dan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang Tk.Kecamatan dan Kelurahan	5 Lembaga	83.961.250	PAD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.005.803.308	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	2.005.803.308	PAD
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikole	1 Kelurahan	306.162.000	PAD			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikole	1 Kelurahan	306.162.000	PAD
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisarua	1 Kelurahan	417.561.000	PAD			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisarua	1 Kelurahan	417.561.000	PAD
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selabatu	1 Kelurahan	252.562.000	PAD			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selabatu	1 Kelurahan	252.562.000	PAD
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungparang	1 Kelurahan	316.762.000	PAD			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungparang	1 Kelurahan	316.762.000	PAD

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati	1 Kelurahan	327.562.000	PAD			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati	1 Kelurahan	327.562.000	PAD
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subangjaya	1 Kelurahan	385.194.308	PAD			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subangjaya	1 Kelurahan	385.194.308	PAD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec Cikole	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	71.025.420	PAD	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec Cikole	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	71.025.420	PAD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Cikole	Jumlah Kegiatan Trantibum dan Perigantan Hari Besar Keagmaan	100%	71.025.420	PAD	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Cikole	Jumlah Kegiatan Trantibum dan Perigantan Hari Besar Keagmaan	100%	71.025.420	PAD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	71.025.420	PAD	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	71.025.420	PAD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Cikole	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	15.350.000	PAD	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Cikole	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	15.350.000	PAD

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Cikole	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemeritahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	15.350.000	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Cikole	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemeritahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	15.350.000	PAD	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	3.350.000	PAD	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 laporan	3.350.000	PAD	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	12.000.000	PAD	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Laporan	12.000.000	PAD	
JUMLAH					12.370.837.107		JUMLAH					12.849.648.489	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target kinerja. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target kinerjanya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya penambahan, pengurangan atau pergeseran anggaran. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada Tahun anggaran 2024 ini meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pergeseran dan Penambahan anggaran perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif. Penyajian tabel Perubahan Rencana Kerja secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Anggaran Perubahan Kecamatan Cikole Tahun 2024

No	Unit Organisasi	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
1	Kecamatan Cikole	10.939.286.443	10.826.410.417	(112.876.026)
2	Kelurahan Cikole	306.162.000	256.162.000	(50.000.000)
3	Kelurahan Cisarua	417.561.000	417.561.000	0.00
4	Kelurahan Gunungparang	252.562.000	252.562.000	0.00
5	Kelurahan Kebonjati	356.762.000	316.762.000	(40.000.000)
6	Kelurahan Selabatu	327.562.000	327.562.000	0.00
7	Kelurahan Subangjaya	468.761.000	427.761.000	(41.000.000)
J U M L A H		13.068.656.443	12.824.780.417	(243.876.026)

TABEL 3.1.

KECAMATAN CIKOLE KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasa ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
1					2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					Kecamatan Cikole				11.907.473.800,00								16.039.509.931,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.907.473.800,00								16.039.509.931,00		
7 01					KECAMATAN				11.907.473.800,00								16.039.509.931,00		
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	9.687.684.100,00						100 Persen	11.269.681.302,00		
7 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100Pers en	100 Persen	33.999.950,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Keca matan Cikole	100Pers en	13.700.000,00	
7 01 01 2.01 00 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokum en	6 Dokum en	21.500.000,00		Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Keca matan Cikole	6 Dokume n	2.500.000,00	KECAM ATAN CIKOLE
7 01 01 2.01 00 02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokum en	4 Dokum en	1.500.000,00		Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Keca matan Cikole	3 Dokume n	1.800.000,00	KECAM ATAN CIKOLE

	01	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Doku men	4 Doku men	1.000.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	3 Dokume n	1.800.000,00	KECAMATA N CIKOLE
7	01	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Doku men	4 Doku men	1.500.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	3 Dokume n	1.800.000,00	KECAMATA N CIKOLE
7	01	01	2.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Doku men	4 Doku men	1.000.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	3 Dokume n	1.800.000,00	KECAMATA N CIKOLE
7	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Lapora n	5 Lapora n	4.999.950,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	4 Laporan	3.000.000,00	KECAMATA N CIKOLE
7	01	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lapora n	4 Lapora n	2.500.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	3 Laporan	1.000.000,00	KECAMATA N CIKOLE

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100Per sen	100 Persen	7.473.156.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	100Perse n	8.497.806.888,00	
7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang /bulan	742 Orang /bulan	7.469.157.650,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	714 Orang/bulan	8.493.006.888,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	5 Laporan	1.800.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	5 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4 Dokumen	999.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	5 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN CIKOLE

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100Persen	100Persen	1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	100Person	1.000.000,00	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	6 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100Persen	100Persen	44.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	100Person	32.500.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	4 Paket	39.840.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	4 Paket	17.500.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	30 Orang	4.550.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	30 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN CIKOLE

	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100Per sen	100 Persen	271.737.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	100Perse n	251.261.330,0 0	
7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	10 Paket	13.159.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	10 Paket	8.580.330,00	KECAMATA N CIKOLE	
7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	53.662.500,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	3 Paket	66.000.000,00	KECAMATA N CIKOLE	
7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	990.000,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	5 Paket	1.000.000,00	KECAMATA N CIKOLE	
7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	9 Paket	1.999.800,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	9 Paket	13.200.000,00	KECAMATA N CIKOLE	
7	01	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	13 Laporan	917.402.200,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	13 Laporan	1.038.895.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100Person	100 Person	502.482.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	100Person	377.707.034,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		43 Unit	98.870.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole		159.775.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 Unit	43 Unit	106.676.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	43 Unit	123.701.600,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5 Unit	7.060.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	5 Unit	9.900.000,00	KECAMATAN CIKOLE

	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	8 Unit	289.876.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	8 Unit	84.330.434,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	1.845.192.200,00						100 Persen	1.957.809.525,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100Persen 100Persen	100 Persen	1.842.996.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	100Persen 100Persen	1.954.509.525,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	4 Laporan	1.777.546.000,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	4 Laporan	1.784.009.525,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4 Dokumen	65.450.650,00	Kota Sukabumi, Cikole, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	4 Dokumen	170.500.000,00	KECAMATAN CIKOLE
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase keselarasan data IKM, IPP dan profil di Kecamatan dan kelurahan	100Persen 100Persen	100 Persen	2.195.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan Cikole	100Persen 100Persen	3.300.000,00	

[illegible]

- 2117 -

						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Doku men	2 Doku men	0,00	Kota Sukabu mi, Cikole, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publik dan Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecam atan Cikole	2 Dokume n	15.000.000,00	KECAMATA N CIKOLE
J U M L A H									11.907.473.800,00							16.039.509.93 1,00	

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun anggaran 2024.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Cikole wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cikole Tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cikole tahun berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikole Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Sukabumi . Untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maka peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pembangunan di Kecamatan Cikole.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikole Tahun 2024 ini disusun semoga dapat diimplementasikan dengan baik.

Z. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 60 Tahun 2023, adanya perubahan Rencana Kerja terjadi atas usulan perubahan anggaran, penambahan anggaran dan pergeseran anggaran sehingga akan berdampak pada berubahnya beberapa output indikator kinerja program /kegiatan/subkegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Adapun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dilakukan karena berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan rencana kerja Kecamatan Warudoyong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Target yang sudah ditentukan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode tahun berkenaan. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Perubahan Renja Kecamatan Warudoyong Tahun 2023. Selain itu, dalam proses

penyusunannya, harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung.

Dari penjelasan diatas maka Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi membuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Kota Sukabumi.

1.2. Landasan hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Warudoyong Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At 8. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Tambahan Lembaran Daerah kota sukabumi Tahun 2021 Nomor 1;
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042;
27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023;
28. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
29. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023.
30. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;
31. Surat Edaran Wali Kota Sukabumi Nomor KU.01.01.01/959/IV/1/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Usulan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Warudoyong dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan ditahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024, serta memberikan gambaran tentang perubahan perencanaan program/kegiatan pembangunan, kebijakan serta prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 Kota Sukabumi serta Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan Warudoyong di susun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang perubahan renja kecamatan Warudoyong dan proses penyusunan perubahan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Berisi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Warudoyong.

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan perubahanyang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA WARUDOYONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Kecamatan Warudoyong dalam pengelolaan Anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pada Tahun Anggaran 2024 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp. 12.329.614.579,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome. Sedangkan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Evaluasi dan analisis pencapaian target indikator sasaran kinerja Tahun 2024 yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan target indikator sasaran yang tercantum dalam target kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Kecamatan Warudoyong Tahun 2024-2026.

Dalam Renstra Kecamatan Warudoyong Tahun 2024 – 2026 serta Renja Tahun 2024 ada 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dan harus dicapai yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Warudoyong.

Indikator sasarannya :

Nilai SAKIP Kecamatan Warudoyong.

2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Warudoyong.

Indikator sasarannya :

Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Warudoyong.

3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/Kelurahan.

Indikator sasarannya :

- a. Presentase partisipasi masyarakat melalui LKK dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan/Kelurahan;
- b. Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di wilayah Kelurahan melalui pembentukan posyandu remaja;
- c. Presentase partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan;
- d. Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.

Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan II, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Kecamatan Warudoyong pada Belanja Langsung melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 12.329.614.579,- Realisasi Rencana Kerja Kecamatan Warudoyong pada Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.632.377.937,00,- atau mencapai 45.68%.

secara rinci rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

MATRIK PENGENDALIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Tabel 2.1

Perangkat Daerah : Kecamatan Warudoyong
Triwulan : II

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemangkas Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	8.368.138.049	39,37	39,37	2.308.973.304	27,59	69,36	69,36	4.769.302.687	56,99	APBD		
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persen	100	4.075.000	42,86	42,86	820.000	20,12	71,43	71,43	2.250.000	55,21	APBD		
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	dokumen	2	505.000	2	100,00	0	0,00	2	100,00	175.000	34,65	APBD		
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	2	505.000	2	100,00	505.000	100,00	2	100,00	505.000	100,00	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	2	505.000	2	100,00	315.000	62,38	2	100,00	315.000	62,38	APBD		
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	2	505.000	0	0,00	0	0,00	2	100,00	505.000	100,00	APBD		
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	2	505.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	APBD		
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKJPJ	Dokumen	2	750.000	0	0,00	0	0,00	2	100,00	750.000	100,00	APBD		
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	800.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	APBD		
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.825.982.461	32,44	32,44	1.782.360.925	26,11	39,29	39,29	3.808.987.888	55,80	APBD		
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	672	6.825.402.461	200	29,76	1.782.125.925	26,11	384	57,14	3.808.752.888	55,80	APBD		
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	laporan	1	235.000	1	100,00	235.000	100,00	1	100,00	235.000	100	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	235.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	APBD		
7.01.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	110.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	APBD		
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	4.500.500	33,33	33,33	1.151.000	25,57	66,67	66,67	2.095.500	46,56	APBD		
7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	4.500.500	2	33,33	1.151.000	25,57	4	66,67	2.095.500	46,56	APBD		
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persen	100	52.155.000	66,67	66,67	27.420.000	52,57	66,67	66,67	31.155.000	59,74	APBD		
7.01.01.2.05.02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	98	19.600.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	26.400.000	2	100,00	22.800.000	86,36	2	100,00	26.400.000	100,00	APBD		
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	88	6.155.000	88	100,00	4.620.000	75,06	88	100,00	4.755.000	77,25	APBD		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	205.127.150	62,56	62,56	121.671.040	59,31	77,08	77,08	167.716.640	81,76	APBD		
7.01.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	5.645.000	4	100,00	5.645.000	100,00	4	100,00	5.645.000	100,00	APBD		
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	17	24.144.500	10	58,82	10.546.040	43,68	17	100,00	23.896.640	98,97	APBD		
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	7.110.000	3	100,00	5.350.000	75,25	3	100,00	5.910.000	83,12	APBD		
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	25.773.650	4	100,00	21.240.000	82,41	4	100,00	22.110.000	85,79	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	2.000.000	0	0,00	-	0,00	5	50,00	1.000.000	50	APBD		
7.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	80.640.000	2	100,00	58.030.000	71,96	2	100,00	75.180.000	93,23	APBD		
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	57.814.000	5	41,67	20.860.000	36,08	8	66,67	33.975.000	58,77	APBD		
7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	APBD		
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	170.844.690	25,00	25,00	92.300.000	54,03	100,00	100,00	170.440.563	99,76	APBD		
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	190	92.360.000	190	100,00	92.300.000	99,94	190	100,00	92.300.000	99,94	APBD		
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	6	46.000.000	-	0,00	-	0,00	6	100,00	46.000.000	100,00	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	26.851.200	-	0,00	-	0,00	1	100,00	26.558.113	98,91	APBD		
7.01.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	5.633.490	-	0,00	-	0,00	1	100,00	5.582.450	99,09	APBD		
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	941.951.248	43,75	43,75	261.421.639	27,75	68,75	68,75	478.762.310	50,83	APBD		
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lamporan	12	2.170.000	12	100,00	2.170.000	100,00	12	100,00	2.170.000	100,00	APBD		
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	97.505.448	3	25,00	19.678.946	20,18	6	50,00	38.947.374	39,94	APBD		
7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	192.000.000	3	25,00	48.000.000	25,00	8	66,67	96.000.000	50,00	APBD		
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	650.275.800	3	25,00	191.572.693	29,46	7	58,33	341.644.936	52,54	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	163.502.000	8,33	8,33	21.828.700	13,35	65,00	65,00	107.894.786	65,99	APBD		
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	30	88.949.000	10	33,33	20.828.700	23,42	18	60,00	44.964.510	50,55	APBD		
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	3.530.000	0	0,00	-	0,00	5	100,00	3.530.000	100,00	APBD		
7.01.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	1	12.000.000	0	0,00	1.000.000	8,33	0	0,00	1.000.000	8,33	APBD		
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	59.023.000	0	0,00	-	0,00	3	100,00	58.400.276	98,94	APBD		
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.581.550.400	30,36	30,36	45.271.200	2,86	58,93	58,93	57.894.800	3,66	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.580.285.400	60,71	60,71	45.271.200	2,86	67,86	67,86	57.684.800	3,65	APBD		
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	14	1.508.405.000	3	21,43	3.350.000	0,22	5	35,71	5.050.000	0,33	APBD		
7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	71.880.400	2	100,00	41.921.200	58,32	2	100,00	52.634.800	73,23	APBD		
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	1.265.000	0,00	0,00	0	0,00	50,00	50,00	210.000	16,60	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2.01.01		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	6	1.265.000	-	0,00	-	0,00	3	50,00	210.000	16,60	APBD		
7.01.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	2.284.278.980	42,50	42,50	368642000	16,14	69,17	69,17	757.718.100	33,17	APBD		
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	100	124.729.400	25,00	25,00	30.848.000	24,73	58,33	58,33	64.098.700	51,39	APBD		
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	124.729.400	3	25,00	30.848.000	24,73	7	58,33	64.098.700	51,39	APBD		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	2.159.549.580	60,00	60,00	337.794.600	15,64	80,00	80,00	693.619.400	32,12	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	117.949.600	5	100,00	44.754.600	37,94	5	100,00	44.754.600	37,94	APBD		
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	2.041.599.980	1	20,00	293.040.000	14,35	3	60,00	648.864.800	31,78	APBD		
7.01.04	Meningkatnya kapasitas personil LHMAS Kecamatan Warudoyong	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketertarikan dan Keaktifan wlayah	Persen	100	45.873.150	38,46	38,46	15.508.950	33,81	61,54	61,54	25.072.350	54,66	APBD		
7.01.04.2.01		Koordinasi Penerapan dan Pengkakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase LHMAS Aktif	Persen	100	45.873.150	38,46	38,46	15.508.950	33,81	61,54	61,54	25.072.350	54,66	APBD		
7.01.04.2.01.01		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	13	45.873.150	5	38,46	15.508.950	33,81	8	61,54	25.072.350	54,66	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akurat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	49.774.000	36,19	36,19	14.890.000	29,92	62,49	62,49	22.390.000	44,98	APBD		
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	49.774.000	36,19	36,19	14.890.000	29,92	62,49	62,49	22.390.000	44,98	APBD		
7.01.05.2.01.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	113	17.155.000	53	46,90	7.050.000	41,10	80	70,80	9.150.000	53,34	APBD		
7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antarwuku dan Intrawuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Regional, dan Nasional Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	300	26.045.000	110	36,67	7.440.000	28,57	200	66,67	12.440.000	47,76	APBD		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi
			Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05.2.01.07		pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen/Jumlah kegiatan	dokumen	12	6.574.000	3	25,00	400.000	6,08	6	50,00	800.000	12,17	APBD		
Jumlah						12.329.614.579	37,38	37,38	2.753.286.054	22,33	64,30	64,30	5.632.377.937	45,68	APBD		

Sumber dari : Matrik Pengendalian Semester I

- 2140 -

Tabel T-C.29 (Tabel 2.2)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah
: Kecamatan Warudoyong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=[10/4]
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persentase	100	85	85	85	100%	90	90	100%
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10	10	10	100%	3	3	100%
07.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	100%	3	3	100%

07.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	100%	3	3	100%
07.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	100%	3	3	100%
07.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	100%	3	3	100%
07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Laporan	2	1	1	1	100%	6	6	100%
07.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	100%	7	7	100%
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	672	686	686	686	100%	672	672	100%
07.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
07.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0	0	0	100%	1	1	100%

07.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	1	100%
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase	100	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase	100	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	98	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	88	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	100%	5	5	100%

07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	17	17	17	100%	25	25	100%
07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	100%	3	3	100%
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	100%	4	4	100%
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	10	10	100%	10	10	100%
07.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
07.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	190	6	6	6	100%	6	6	100%
07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	7	7	7	100%	7	7	100%

07.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	100%	1	1	100%
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	100	100%	12	12	100%
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100	100%	12	12	100%
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	19	19	100	100%	19	19	100%
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	17	17	100	100%	17	17	100%
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%

07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	20	20	20	100%	20	20	100%
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	12	12	12	100%	12	12	100%
07.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	100%	0	0	100%
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	7	7	7	100%	7	7	100%
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	persentase	100	83	83	83	100%	85	85	100%
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	14	8	8	8	100%	14	14	100%
7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	1	1	1	100%	2	2	100%

7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase	100	0	0	0	100%	0	0	100%
7.1.2.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	0	0	0	100%	0	0	100%
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.1.3.201.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1	1	1	100%	12	12	100%
7.1.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.1.3.202.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat an	5	5	5	5	100%	5	5	100%
7.1.3.202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7.1.3.202.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	5	5	5	100%	5	5	100%

7.1.3.202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Fasilitas Pos Komando PPKM Kecamatan dan Kelurahan	persen	0	100	100	100	100%	0	0	100%
7.1.3.202.1	Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Posko covid	posko	0	5	5	5	100%	0	0	100%
7.1.3.202.2	Pembinaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Posko covid	posko	0	1	1	1	100%	0	0	100%
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Presentase	100	0	0	0	100%	100	100	100%
7.1.4.202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase	100	0	0	0	100%	100	100	100%
7.1.4.202.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	13	0	0	0	100%	13	13	100%
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%

7.1.5.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.1.5.201.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	113	113	113	113	100%	113	113	100%
7.1.5.201.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	300	300	300	300	100%	300	300	100%
7.1.5.201.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal/KPM	Dokumen	12	0	0	0	100%	0	0	100%

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 8.368.138.049,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 4.769.302.687,- atau sebesar 56,99%.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat Kegiatan-Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut ;

1.1 Belanja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.1.1.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
- 1.1.2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 1.2.3.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- 1.2.4.Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

1.4. Belanja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- 1.4.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.;
- 1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- 1.4.3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

1.5. Belanja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.5.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 1.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5.8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

1.6. Belanja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- 1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;
- 1.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.6.4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.7. Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8. Belanja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 1.581.550.400,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 57.894.800,- atau sebesar 3,66% dikarenakan kegiatan dilaksanakan di triwulan III. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdapat Kegiatan-Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut ;

- 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 2.284.278.980,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 757.718.100,- atau sebesar 33,17%. Dikarenakan kegiatan dilaksanakan di triwulan III. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat Kegiatan-Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut ;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

3.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

3.2.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 45.873.150,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 25.072.350,- atau sebesar 54,66%. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat Kegiatan-Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut ;

4.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 49.774.000,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 22.390.000,- atau sebesar 44,98%. Pada Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdapat Kegiatan-Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut ;

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

5.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional;

5.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Sudah tercapai 45,68% kurang dari target yang ditetapkan dikarenakan ada kegiatan yang mundur pelaksanaannya di triwulan III yaitu di Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Internal Vertikal Terkait.

2.2. Analisis kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK. Sehubungan dengan hal tersebut, Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Warudoyong dapat dilihat pada tabel berikut: (T.c 30)

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2022 - 2026

KOTA SUKABUMI

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13
1	Pedikat SAKIP Kecamatan Warudoyong			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100%
2	Nilai SAKIP Kecamatan Warudoyong			63	63,5	60.61	60.80	60.90	60,56	64	60.61	60.80	60.90	100%
3	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Warudoyong			B-	B-	B-	B	B	B-	B-	B-	B	B	100%
4	Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan					100	100	100			100	100	100	100%

5	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja			78	80	60	65	65	78	100	60	65	65	100%
6	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan					65	70	75			65	70	75	100%
7	Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan					100	100	100			100	100	100	100%
8	Cakupan Pelayanan Publik Di Kecamatan Warudoyong			82,5	83	88.25	88.30	88.35	88,17		88.25	88.30	88.35	100%

Dengan memperhatikan data diatas dapat dilihat bahwa dari indikator yang ada pada Kantor Kecamatan Warudoyong pencapaian kinerja pelayanannya bisa dikatakan berhasil, karena dilihat dari tabel diatas pencapaian indikatornya sudah tercapai 100% sepenuhnya dapat tercapai di semester ke II. Dari tabel diatas ada indikator yg tidak bisa tercapai dikarenakan adanya pergeseran/perubahan kegiatan di semester II.

2.3. Issue Strategis yang penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa Program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2024 yang menyangkut aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, Aspek Pemerintahan dan Aspek Penataan Ruang, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta dalam upaya menjawab isu-isu strategis yang di prediksi akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kota Sukabumi. Issue strategis tersebut adalah :

- Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
- Dampak PSN dan megaprojek lainnya;
- Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan;
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- Inovasi di Pemerintahan;
- Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sudah diatur oleh Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 dan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 184 Tahun 2004, namun belum seluruh anggaran kegiatan juga kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota bisa dilaksanakan langsung oleh setiap pembuat rencana kegiatan di Tingkat Kecamatan.

Permasalahan dan hambatan dalam Pelaksanaan Program Kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Namun demikian sudah

merupakan komitmen seluruh Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan serta upaya mengatasinya antara lain:

Kewenangan Pemerintahan yang diberikan Wali Kota Sukabumi kepada Camat pada dasarnya merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah, namun penyerahan kewenangan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan personel, perlengkapan dan pembiayaannya. Begitu pula dari aspek pembinaan teknis terkait belum dilaksanakan.

Keterbatasan Anggaran yang diterima Kecamatan Warudoyong belum seluruhnya dapat menunjang rencana kegiatan yang telah disusun oleh setiap Kepala Seksi upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggali potensi yang sifatnya tidak mengikat.

Tabel 2.6. (T-C.31)														
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024														
Kota Sukabumi														
Nama SKPD : Kecamatan Warudoyong														
NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024							Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	satuan	Targ et Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	8.368.138.049	PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec warudoyo ng	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	8.454.482.799	PAD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persen	100	4.075.000	PAD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec warudoyo ng	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Present ase	100	4.075.000	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Renja	dokumen	2	505.000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec warudoyo ng	Jumlah Dokumen Renja	Dokumen	2	505.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	2	505.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec warudoyo ng	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	2	505.000	PAD

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	2	505.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	2	505.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	2	505.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	2	505.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	2	505.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	2	505.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec warudoyong	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Dokumen	2	750.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec warudoyong	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Laporan	2	750.000	PAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	800.000	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	800.000	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.825.982.461	PAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100	6.825.982.461	PAD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec warudoyong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	672	6.825.402.461	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec warudoyong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	672	6.825.402.461	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	laporan	1	235.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	235.000	PAD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	235.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	235.000	PAD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	110.000	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	110.000	PAD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec warudoyong	persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	4.500.500	PAD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec warudoyong	persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Presentase	100	4.500.500	PAD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	4.500.500	PAD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	4.500.500	PAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persen	100	52.155.000	PAD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase	100	50.755.000	PAD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec warudoyong	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	98	19.600.000	PAD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec warudoyong	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	98	19.600.000	PAD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec warudoyong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	26.400.000	PAD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec warudoyong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	26.400.000	PAD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec warudoyong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	88	6.155.000	PAD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec warudoyong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	88	4.755.000	PAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	205.127.150	PAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100	297.891.900	PAD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec warudoyong	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	5.645.000	PAD	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec warudoyong	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.665.800	PAD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec warudoyong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	17	24.144.500	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec warudoyong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	42.768.700	PAD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec warudoyong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	7.110.000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec warudoyong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	7.110.000	PAD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec warudoyong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	25.773.650	PAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec warudoyong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	33.573.400	PAD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	2.000.000	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	2.000.000	PAD

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	80.640.000	PAD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	102.550.000	PAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec warudoyong	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	57.814.000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec warudoyong	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	97.224.000	PAD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2.000.000	PAD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	PAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec warudoyong	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	170.844.690	PAD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec warudoyong	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase	100	170.844.690	PAD
	Pengadaan Mebel	Kec warudoyong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	190	92.360.000	PAD	Pengadaan Mebel	Kec warudoyong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	190	92.360.000	PAD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec warudoyong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	6	46.000.000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec warudoyong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	46.000.000	PAD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec warudoyong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	26.851.200	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec warudoyong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	26.851.200	PAD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec warudoyong	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	5.633.490	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec warudoyong	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.633.490	PAD

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	941.951.248	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec warudoyo ng	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Present ase	100	928.451.248	PAD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lampora n	12	2.170.000	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec warudoyo ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	12	2.170.000	PAD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	97.505.448	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec warudoyo ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	12	84.005.448	PAD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	192.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec warudoyo ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	192.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	650.275.800	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec warudoyo ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	650.275.800	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec warudoyong	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	163.502.000	PAD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec warudoyo ng	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Present ase	100	171.982.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec warudoyong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	88.949.000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec warudoyo ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	96.069.000	PAD

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec warudoyong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	3.530.000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec warudoyo ng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	14.890.000	PAD
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec warudoyong	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	1	12.000.000	PAD	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec warudoyo ng	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec warudoyong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	59.023.000	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec warudoyo ng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	59.023.000	PAD
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec warudoyong	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.581.550.400	PAD	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec warudoyo ng	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persentase	100	1.581.550.400	PAD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec warudoyong	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.580.285.400	PAD	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec warudoyo ng	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase	100	1.580.285.400	PAD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	14	1.508.405.000	PAD	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec warudoyo ng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	14	1.508.405.000	PAD

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	71.880.400	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	71.880.400	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec warudoyong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	1.265.000	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec warudoyong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase	100	1.265.000	PAD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	6	1.265.000	PAD	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1.265.000	PAD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec warudoyong	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	2.284.278.980	PAD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec warudoyong	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Presentase	100	2.273.078.980	PAD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec warudoyong	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	100	124.729.400	PAD	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec warudoyong	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase	100	124.729.400	PAD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	124.729.400	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	124.729.400	PAD

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec warudoyong	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	2.159.549.580	PAD	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec warudoyo ng	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Present ase	100	2.148.349.580	PAD
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec warudoyong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembag a Kemasy arak atan	5	117.949.600	PAD	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec warudoyo ng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga Kemas yarakatan	5	106.749.600	PAD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec warudoyong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	2.041.599.980	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec warudoyo ng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Unit	5	2.041.599.980	PAD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec warudoyong	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	100	45.873.150	PAD	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec warudoyo ng	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Pokmas / Ormas	100	70.968.150	PAD
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec warudoyong	Persentase Linmas Aktif	Persen	100	45.873.150	PAD	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec warudoyo ng	Persentase Linmas Aktif	Present ase	100	70.968.150	PAD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec warudoyong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	13	45.873.150	PAD	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec warudoyo ng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Present ase	13	70.968.150	PAD

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec warudoyong	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	49.774.000	PAD	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec warudoyo ng	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Lapora n	100	45.474.000	PAD
	Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec warudoyong	Persentase Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	49.774.000	PAD	Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec warudoyo ng	Persentase Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persent ase	100	45.474.000	PAD
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec warudoyong	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	113	17.155.000	PAD	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec warudoyo ng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Present ase	113	15.755.000	PAD
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec warudoyong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Regional, dan Nasional Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	orang	300	26.045.000	PAD	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec warudoyo ng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Regional, dan Nasional Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Orang	300	24.645.000	PAD
	pelaksanaan Semua Urutan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak	Kec warudoyong	Jumlah Dokumen/ Jumla h kegiatan	dokume n	12	6.574.000	PAD	pelaksanaan Semua Urutan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak	Kec warudoyo ng	Jumlah Dokumen/ Jumlah kegiatan	Orang	12	5.074.000	PAD

- 2168 -

	dilaksanakan oleh intansi vertikal							dilaksanakan oleh intansi vertikal						
JUMLAH						12.329.614.579		JUMLAH						12.425.554.329

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Warudoyong selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan kegiatan Kecamatan Warudoyong perlu adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Warudoyong pada Tahun 2024 setelah dilakukan rasionalisasi anggaran untuk perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 5 Program, 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dapat dilihat di Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Matrik Renja

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POK SARASAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APRIL 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASENA L	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	Kota Sukohumi, Semana Kecamatan, Semana Kel/Desa	PENDAP- ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	Memperkuat Informasi Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif			505.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG	
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	Kota Sukohumi, Semana Kecamatan, Semana Kel/Desa	PENDAP- ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif			1.208.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG	
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	2 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-15.000,00	Kota Sukohumi, Waruduyong, Semana Kel/Desa	PENDAP- ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	- -			1.120.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG	
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Sukohumi, Waruduyong, Semana Kel/Desa	PENDAP- ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	- -			800.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POR SARABAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berk- urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				L	NASKAH					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peningkatan Survei dan Pengukuran Dilipid Pegawai				0 Unit	98 Unit	25.000.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	-5.400.000,00	Kota Sukohumi, Semana Kecamatan, Semana Kc/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG	
7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	98 Paket	21.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	5.400.000,00	Kota Sukohumi, Semana Warudoyong, Semana Kc/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			21.000.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG	
7.01.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	98 Orang	6.150.000,00	6.155.000,00	4.755.000,00	-1.404.000,00	Kota Sukohumi, Semana Kecamatan, Semana Kc/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			13.077.975,00	KECAMATAN WARUDUYONG	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah					-	100 persen	122.850.720,00	205.127.180,00	297.891.900,00	178.041.180,00		-	-	-	kecamatan waruduyong		337.586.800,00	KECAMATAN WARUDUYONG	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / REKAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKAM OPD	REALISASI CAPAIAN REKAM OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKAM OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POR SARABAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Pelayanan Pelayanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	5.637.500,00	5.633.490,00	5.633.490,00	-4.010,00	Kota Sukoharjo, Semana Kecamatan, Semana Kec/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Peningkatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Peningkatan Budaya Kreatif & Inovatif			5.637.500,00	KECAMATAN WARUDAYONG
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	992.069.900,00	941.951.248,00	928.451.248,00	-63.618.652,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Peningkatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Peningkatan Budaya Kreatif & Inovatif	KECAMATAN WARUDAYONG		990.553.900,00	KECAMATAN WARUDAYONG
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Suku Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Jasa Suku Masyarakat				0 Laporan	217 Laporan	744.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	1.426.000,00	Kota Sukoharjo, Semana Kecamatan, Semana Kec/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Peningkatan Budaya Kreatif & InovatifPeningk atan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Peningkatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.230.000,00	KECAMATAN WARUDAYONG

NO	KODE	URUSAN / BIKANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (115-12)	NASIONAL			DAERAH					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
7.01.01.2.0 8.0002			Jumlah Laporan Pengembangan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan				0 Laporan	5 Laporan	104.082.800,00	97.505.448,00	84.005.448,00	-20.077.352,00	Kota Sukohumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			104.082.800,00	KECAMATAN WARUDOPONG	
7.01.01.2.0 8.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Pengembangan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disalurkan				0 Laporan	16 Laporan	228.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Sukohumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			240.000.000,00	KECAMATAN WARUDOPONG	
7.01.01.2.0 8.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Pengembangan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan				0 Laporan	29 Laporan	659.243.100,00	650.275.800,00	650.275.800,00	-8.967.300,00	Kota Sukohumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH H (PAD)	-	-			645.243.100,00	KECAMATAN WARUDOPONG	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024					PAGU INDIKATIF (Rp)						LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RPKD 2024	APBD 2024	RPKD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	L	NASIONAL	DAERAH									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
	2		Jumlah Asat Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	1 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Sukohumi, Semasa Kecamatan, Semasa Kc/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG				
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				0 Unit	3 Unit	53.023.000,00	59.023.000,00	59.023.000,00	6.000.000,00	Kota Sukohumi, Semasa Kecamatan, Semasa Kc/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		53.023.000,00	KECAMATAN WARUDUYONG				
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	1.534.900.843,00	1.581.500.400,00	1.581.500.400,00	113.097.957,00							1.647.998.802,00					
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	100 persen	1.533.612.845,00	1.580.285.400,00	1.580.285.400,00	46.672.555,00		Memperkuat Kelembagaan Ekonomi Untuk Pemertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan waruduyong		1.638.776.360,00	KECAMATAN WARUDUYONG				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				1. NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.0.1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	2 Laporan	1.473.420.000,00	1.508.405.000,00	1.508.405.000,00	34.985.000,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Simas Koti/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.540.324.700,00	KECAMATAN WARUDOPONG		
	7.01.02.2.0.1.0002	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	6 Dokumen	60.192.845,00	71.880.400,00	71.880.400,00	11.687.555,00	Kota Sukohumi, Kecamatan, Simas Koti/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			98.451.660,00	KECAMATAN WARUDOPONG		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / REANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				L	NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kesehatan Antar Siklus dan Antar Siklus, Unit, dan Gabungan Lainnya dalam Menegakkan Misi dan Komitmen Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	0 Orang	28.352.600,00	26.045.000,00	24.645.000,00	-3.707.600,00	Kota Sukoharjo, Warudoyong, Sema Kid/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN WARUDUYONG
	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Mempunyai Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Mempunyai Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0 Dokumen	0 Dokumen	2.058.000,00	6.574.000,00	5.074.000,00	3.016.000,00	Kota Sukoharjo, Warudoyong, Sema Kid/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN WARUDUYONG
		KELURAHAN WARUDUYONG							225.727.976,00	317.000.000,00	317.000.000,00	91.272.024,00								0,00
	7	UNSUR KAWILAYAHAN							225.727.976,00	317.000.000,00	317.000.000,00	91.272.024,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							225.727.976,00	317.000.000,00	317.000.000,00	91.272.024,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMERIKHAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	225.727.976,00	317.000.000,00	317.000.000,00	-225.727.976,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / REKANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / RUH KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / RUH KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POR SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASENOLA				DAERAH					
																	1				2
	2	7.01.03.2.0.2	Registan Pemberdayaan Keturahan	-			-	-	225.727.976,00	317.000.000,00	317.000.000,00	91.272.024,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Keturahan Warudoyong		0,00	KECAMATAN WARUDOTYONG	
	7.01.03.2.0.2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Keturahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Keturahan				0 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	0,00	317.000.000,00	317.000.000,00	317.000.000,00	Kota Sukohumi, Soma Kecamatan, Warudoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ) DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		0,00	KECAMATAN WARUDOTYONG		
		KELURAHAN NYOMPONG							293.527.976,00	384.800.000,00	384.799.993,00	91.272.017,00								0,00	
	7	UNSUB KEMILAYAHAN							293.527.976,00	384.800.000,00	384.799.993,00	91.272.017,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							293.527.976,00	384.800.000,00	384.799.993,00	91.272.017,00							0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	293.527.976,00	384.800.000,00	384.799.993,00	293.527.976,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / REKAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / RUH KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / RUH KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIZIN RESTRITRA OFD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEHANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APRIL 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				BANKA L	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.0 2	Registasi Pemberdayaan Koturahan	Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Koturahan				-	100 persen	293.527.976,00	384.800.000,00	384.799.993,00	91.272.017,00			-	-	Masyarakat di Koturahan Nyomplong			0,00	KECAMATAN WARUDOWONG
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Koturahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Koturahan				0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	384.800.000,00	384.799.993,00	384.799.993,00	Kota Sukoharjo, Sema Kecamatan, Nyomplong	PENDAP- ATAN JALAN DAERAH II (PADA DAI TAMBA HAN JUKUN GAN PENDAN AAN BAGI KEKURAH HAN	-	-			0,00	KECAMATAN WARUDOWONG	
		KEKURAHAN BENTENG								330.728.776,00	422.000.000,00	422.000.000,00	91.271.224,00						0,00		
7		UNIK KULAYAHAN							330.728.776,00	422.000.000,00	422.000.000,00	91.271.224,00						0,00			
	7.01	KECAMATAN							330.728.776,00	422.000.000,00	422.000.000,00	91.271.224,00						0,00			
L	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN	-				-	-	330.728.776,00	422.000.000,00	422.000.000,00	-330.728.776,00						0,00			
	7.01.03.2.0 2	Registasi Pemberdayaan Koturahan	-				-	-	330.728.776,00	422.000.000,00	422.000.000,00	91.271.224,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN WARUDOWONG
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Koturahan																			

NO	KODE	URUSAN / REKAM-URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKAM-URUSAN	REALISASI CAPAIAN REKAM-URUSAN TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKAM-URUSAN TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POK SARASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/ Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	REKAM-URUSAN 2024	APRIL 2024	REKAM-URUSAN PERUBAHAN 2024	L				NASEKAM-URUSAN	DAERAH				
							1	2	3	4	5										6
	2		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	422.000.000,00	422.000.000,00	422.000.000,00	Kota Sukoharjo, Kecamatan, Besteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	KECAMATAN WARUDITYONG
		KELURAHAN DAYEULUHUR								424.928.976,00	516.200.000,00	516.200.000,00	91.271.024,00							0,00	
7		UNSUR KEMILAYAHAN								424.928.976,00	516.200.000,00	516.200.000,00	91.271.024,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN								424.928.976,00	516.200.000,00	516.200.000,00	91.271.024,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMILAYAHAN	-				-	-		424.928.976,00	516.200.000,00	516.200.000,00	-424.928.976,00							0,00	
	7.01.03.2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-		424.928.976,00	516.200.000,00	516.200.000,00	91.271.024,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN WARUDITYONG
	7.01.03.2.0.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	516.200.000,00	516.200.000,00	516.200.000,00	Kota Sukoharjo, Kecamatan, Dayeuluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TAMBAHAN DISKURSIAN PENDANAAN BAGI KEMILAYAHAN	-	-				0,00	KECAMATAN WARUDITYONG

NO	KODE	URUSAN / BEANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE KENYTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APRIL 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				L	NASKAH					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN SURAKARAYA							310.328.976,00	401.599.980,00	401.599.980,00	91.271.004,00							401.600.000,00		
7		UNSUB KEMILAYAHAN							310.328.976,00	401.599.980,00	401.599.980,00	91.271.004,00							401.600.000,00		
	7.01	KECAMATAN							310.328.976,00	401.599.980,00	401.599.980,00	91.271.004,00							401.600.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMERIDYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							310.328.976,00	401.599.980,00	401.599.980,00	91.271.024,00							401.600.000,00		
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							310.328.976,00	401.599.980,00	401.599.980,00	91.271.004,00			-	-	-		401.600.000,00	KECAMATAN WARUDITYONG	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	401.599.980,00	401.599.980,00	401.599.980,00	Kota Sukoharjo, Warudityong, Sukoharjo	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TAMBA HAN DUKUN GAN PENDAN AAN BAGI KEMUDAH AN	-	-			401.600.000,00	KECAMATAN WARUDITYONG	
		J U M L A H							9.752.580.561,00	10.288.014.569,00	10.363.954.349,00	631.861.298,00							3.334.921.207,00		

Sumber Data : Aplikasi SIPD (laporan Renja Perubahan TA.2024)

Pergeseran dan Pengurangan anggaran perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif. Penyajian tabel Perubahan Rencana Kerja secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Anggaran Perubahan Kecamatan Warudoyong
Tahun 2024

No	Unit Organisasi	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah
1	Kecamatan Warudoyong	10.288.014.599	10.383.954.349
2	Kelurahan warudoyong	317.000.000	317.000.000
3	Kelurahan Nyomplong	384.799.993	384.799.993
4	Kelurahan Benteng	422.000.000	422.000.000
5	Kelurahan Sukakarya	401.599.980	401.599.980
6	Kelurahan Dayeuhluhur	516.200.000	516.200.000
J U M L A H		12.329.614.579	12.425.554.329

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Warudoyong Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam upaya akselerasi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maka peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pembangunan di Kecamatan Warudoyong.

Dengan tersusunnya Renja Peubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Warudoyong yang akan dicapai Tahun 2024 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Warudoyong Tahun 2024 ini disusun semoga dapat diimplementasikan dengan baik, Amin Ya Robbal Alamin.

AA. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Lembursitu terletak diantara pusat pertumbuhan kawasan bisnis dan pertanian Kota Sukabumi karena sebagian wilayahnya terbentang di jalur lintasan Jakarta, jalur perbatasan kabupaten sebagai pintu gerbang sebelah selatan Kota Sukabumi. Jarak dari Kota Sukabumi 5 km, cukup dekatnya jarak membuat pergerakan pertumbuhan penduduk sangat cepat terbukti dengan berkembangnya perumahan, perkembangan pendidikan dan perekonomian. Maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi.

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya*

memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Wali Kota untuk menangani urusan otonomi daerah”.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun Untuk menjaga suatu keselarasan pembangunan dengan pemerintah Tingkat Kota maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024,

Terhadap Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Lembursitu dengan RPJMD dan Perubahan RKPD Tingkat Kota harus dijadikan rujukan untuk di selaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu di tahun 2024 .

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 264);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 – 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2024-2028;
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 21)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Kegiatan satu tahun Camat kedepan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Lembursitu tahun 2024-2026 maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan public dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 adalah :

Untuk pedoman dan arah bagi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 sesuai dengan Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi periode 2024-2026 yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan selama satu tahun kedepan;

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Akhir RKPD,

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester 1 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program, kegiatan, sub kegiatan maupun realisasi. Tahun 2024 Kecamatan Lembursitu melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan tahun 2023 dapat terealisasi 98,87%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor : 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Untuk perakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T.C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan tahun 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7							UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						KECAMATAN									
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor	100	90	90	90	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen penganggaran	100	90	90	90	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	4 Dokumen	4 Buku	4 Buku	4 Buku	100	4 Dokumen	4.00	80.00%
7	01	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2 Dokumen	6 Buku	4 Buku	4 Buku	100	3 Dokumen	4.33	216.67%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2		3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	-	6 Buku	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	2 Dokumen	15 Buku	2 Buku	2 Buku	100	8 Dokumen	8.33	119.05%
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	-	15 Buku	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPU	12 Laporan	18 Buku	5 Buku	5 Buku	100	18 Laporan	13.67	105.13%
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	6 Laporan	6 Buku	3 Buku	3 Buku	100	6 Laporan	5.00	83.33%
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	47 Orang/Bulan	41 Orang	47 Orang	47 Orang	100	41 Orang/Bula n	43.00	104.88%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	4 Buku	5 Buku	5 Buku	100	10 Laporan	6.33	211.11%
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	10 Buku	2 Buku	2 Buku	100	4 Laporan	5.33	266.67%
7	01	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4 Buku	2 Buku	2 Buku	100	4 Dokumen	3.33	111.11%
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	01	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis : Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Pelayanan Publik	50 Orang	75 Orang	25 Orang	25 Orang	100	75 Orang	58.33	116.67%
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	90%	90%	90%	90	100	93.33	103.%
7	01	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5 Paket	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100	10 Paket	8.33	166.67%
7	01	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Menunjang Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	57 Paket	57 item	57 item	57 item	100	35 Paket	49.67	87.13%
7	01	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Refill Tabung Gas	4 Paket	12 set 219 buah	12 buah 38 tabung	12 buah 38 tabung	100	12 set 38 Paket	10.00	250%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
							Kecamatan dan Kelurahan, pengadaaan Gordyn, Umbul-umbul								
7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Jumlah Barang Penggandaan 24.730 Paket	6 jenis 40000 lembar	6 jenis 2.728 lembar	6 jenis 2.728 lembar	100	6 jenis 2.728 lembar	10.00	0.04%
7	01	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah yang tersedia di Kecamatan -	3 ekslembar	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	08			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Air Mineal Galon Jumlah Air Mineral Dus Jumlah Snack Jumlah Makan 4 Laporan	416 galon, 240 dus, 1560 dus, 1560 dus	300 galon, 300 dus, 950 dus, 950 dus	300 galon, 300 dus, 950 dus, 950 dus	100	300 galon, 300 dus, 950 dus, 950 dus	10.00	333.33%
7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 4 Laporan	13 orang	7 Orang	7 Orang	100	13 Laporan	11.00	275%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2		3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2.33	116.67%
7	01	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Pemeliharaan Program/Aplikasi	-	1 paket	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai 10000	117 laporan	342 lembar	141 lembar	141 lembar	100	117 laporan	200.00	170.94%
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet/ TV Berbayar	4 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	4 laporan	9.33	233.33%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2		3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan yang Dibiayai	21 laporan	15 orang	21 orang	21 orang	100	21 laporan	19.00	90.48%
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pembayaran Upah THL	23 laporan	15 orang	23 orang	23 orang	100	23 laporan	20.33	88.41%
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas Kecamatan dan Kelurahan, Mobil K3, Motor K3 yang dilakukan pemeliharaan rutin	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	100	31 unit	31.00	100.00%
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer	4 unit	14 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	7.33	183.33%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2		3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang Diperbaiki	4 unit	5 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	5.67	141.67%
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	100 %	90%	90%	90%	90	100	93.33	103.70%
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	90	100	93.33	103.70%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinèrg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	53 Dokumen	53 RW	3 Buku 53 RW	3 Buku 53 RW	100	53 Dokumen	53.00	100.00%
7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberian Hibah Uang Operasional RW, BinteK RT / RW	239 dokumen	53 rw, 184 rt	53 rw, 186 rt	53 rw, 186 rt	100	53 rw, 186 rt	1.00	0.42%
7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan	-	9 buku	-	-	-	-	-	-

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	03	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK , Jumlah Keikutsertaan Peserta dalam Cabor	53 laporan	48 orang	123 orang	123 orang	100	123 laporan	98.00	184.91%
7	01	03	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
701032.0201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah Dokumen dan Peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Dokumen Pra Musrenbang Kelurahan	53 dokumen	15 buku	225 orang	225 orang	100	225 orang	225.00	424.53%
701032.0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	4 pokmas/ormas	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100.00	250%
701032.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase tertanganinya yang terpapar Covid-19	100 %	90%	90%	90%	90		60.00	66.67%
701032.0502	Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19	-	40 paket	40 paket	40 paket	100	-		

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	01	03	2.05	03			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penanganan Covid-19	-	40 paket	250 dus	250 dus	100	-		
7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketertarikan dan ketertiban Wilayah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	04	2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	04	2.02	01			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Jumlah Peserta Sosialisasi Linmas 2. Jumlah peserta Rakor Muspika	5 laporan	-	75 orang	75 orang	100	75 orang	75.00	1500.00%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=[5+7+9)	11=10/4
7	01	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	05	2.01	04			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI); MTQ, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Miraj	250 orang	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	4.00	1.60%

Tabel diatas menjelaskan terkait dengan rekapitulasi renja dari tahun tahun sebelumnya. Terdapat ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak ada pada tahun 2023 namun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut ada pada tahun 2021 dan tahun 2022 seperti halnya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memang pada tahun 2021 dan 2022 indonesia mengalami krisis covid-19.

Sedangkan alokasi dana hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) untuk membantu pembangunan di Tingkat RW dari Pemerintah Kota Sukabumi setiap kelurahan sudah terealisasi 100 % dari 5 (lima) Kelurahan se-Kecamatan Lembursitu. Tujuan digulirkannya dana hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) ini adalah untuk mendorong partisipasi dan Swadaya Murni Masyarakat di Bidang Pembangunan. Besarnya dana hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) se-Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Dana Hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW)
Se-Kecamatan Lembursitu

NO	KELURAHAN	RW	BESARNYA DANA HIBAH	JUMLAH	TOTAL
1	CIPANENGAH	8	Rp 25,000,000	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
2	SITUMEKAR	8	Rp 25,000,000	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
3	LEMBURSITU	21	Rp 25,000,000	Rp 525,000,000	Rp 525,000,000
4	CIKUNDUL	10	Rp 25,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
5	SINDANGSARI	6	Rp 25,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
JUMLAH		53		Rp 1,325,000,000	Rp 1,325,000,000

Sumber : Data Anggaran P2RW pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masy.2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa di Kecamatan Lembursitu terdapat 53 RW. Anggaran P2RW untuk masing-masing RW yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- dengan total jumlah anggaran P2RW sebesar Rp. 1.325.000.000,- .

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Lembursitu menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
- 2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
- 5) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T.C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tahun 2023 dan tahun 2024-2026

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target		Renstra		Perangkat Daerah		Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		✓	Skor	82,5	83	-	-	82,12	83	-	-	-	100%		
2.	Indek Pelayanan Publik		✓	Persen	77%	80%	-	-	82,12	80%	-	-	-	100%		
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		✓	Persen	90%	95%	-	-	100	95%	-	-	-	100%		
4.	Nilai SAKIP Kecamatan		✓	Skor	67	68	-	-	69,03	68	-	-	-	100%		
5.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		✓	Persen	80%	90%	-	-	100	90%	-	-	-	100%		
6.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif		✓	Persen	80%	90%	-	-	80	90%	-	-	-	100%		
7.	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT		✓	Perbandingan	1,68:1	1,70:1	-	-	1,68:1	1,70:1	-	-	-	100%		
8.	Predikat SAKIP Kecamatan Lembursitu		✓	Predikat	-	-	B-	B-	-	-	B-	B-	B-	100%		
9.	nilai SAKIP Kecamatan Lembursitu		✓	Nilai	-	-	68,5	69	-	-	68,5	69	69	100%		
10.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lembursitu		✓	Indeks	-	-	3,4	3,45	-	-	3,4	3,45	3,45	100%		
11.	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan		✓	Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	100	100%		

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
12.	Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan		√	Persen	-	-	90	95	-	-	90	95	100%
13.	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja		√	Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	100%
14.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan		√	Persen	-	-	95	100	-	-	95	100	100%
15.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		√	Persen	-	-	95	100	-	-	95	100	100%

Tabel di atas menggambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu pada tahun 2022 , 2023, 2024 sampai dengan 2025. Terdapat 8 indikator diantaranya yaitu: Predikat SAKIP Kecamatan Lembursitu, nilai SAKIP Kecamatan Lembursitu, Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lembursitu, Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan, Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan, cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan, Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kantor Camat Lembursitu yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Lembursitu.

Kecamatan Lembursitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu antara lain :

- a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Lembursitu.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara

umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karakter Kecamatan

Lembursitu lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Lembursitu cukup signifikan, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

3. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan

kualitas SDM Kecamatan Lembursitu akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

4. Inovasi di Pemerintahan

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Seperi halnya Kecamatan Lembursitu, Dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Lainnya yang dibutuhkan warga masyarakat. Kecamatan Lembursitu meluncurkan Program SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar). Dengan adanya inovasi ini, yaitu SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar) yang mengantarkan secara langsung kepada warga masyarakat yang dalam artian ketika dokumen kependudukan atau surat keterangan lainnya yang ada di Kecamatan selesai dibuat, petugas Kecamatan (SIPINTAR) akan mengantarkan dokumen/berkas berkas yang telah selesai diproses oleh Dinas maupun Kecamatan ke rumah para pemohon yang telah mengajukan permohonan berkas tersebut agar berkas tidak menumpuk di Kecamatan. dan

Kecamatan melayani seluruh warga masyarakat Kecamatan Lembursitu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang tua, atau orang cacat, dll.

5. Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, Kecamatan Lembursitu berkolaborasi dengan Lintas Sektor serta menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut. Perkembangan situasi politik, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik perlu dipantau secara berkala. Tak lupa upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang pemilu dan pilkada 2024 perlu dioptimalkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana Program Tahun Anggaran 2023. Program dan Kegiatan yang belum termuat pada Tahun Anggaran 2023 diusulkan kembali pada Tahun anggaran 2024. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

TABEL 2.5 (T.C 3.1)
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				11.204.826.442				12.325.309.086
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	7.723.055.219			100%	8.495.360.741
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu		100%	13.571.450			100%	14.928.595
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	3.249.350	PAD		5 Dokumen	3.574.285
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	1.999.550	PAD		2 Dokumen	2.199.505

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	-	PAD		2 Dokumen	-
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	999.800	PAD		2 Dokumen	1.099.780
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	7 Dokumen	-	PAD		7 Dokumen	-
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	5.242.300	PAD		12 Laporan	5.766.530
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	6 Laporan	2.080.450	PAD		6 Laporan	2.288.495
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		100%	6.303.300.589			100%	6.933.630.648
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	47 Orang/bulan	6.298.385.639	PAD		47 Orang/bulan	6.928.224.203

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	2.080.700	PAD		5 Laporan	2.288.770
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Laporan	1.527.550	PAD		2 Laporan	1.680.305
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	1.306.700	PAD		2 Dokumen	1.437.370
7 01 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah	Persentase pemenuhan administrasi kebutuhan barang milik daerah		100%	2.070.000			100%	2.277.000
7 01 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	6 Dokumen	2.070.000	PAD		6 Dokumen	2.277.000
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	37.288.650			100%	41.017.515

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan dan Kelurahan	44 Paket	19.800.000	PAD		44 Paket	21.780.000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan dan Kelurahan	50 Orang	17.488.650	PAD		50 Orang	19.237.515
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100%	264.148.350			100%	290.563.185
7 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	5 Paket	1.231.000	PAD		5 Paket	1.354.100
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	57 Paket	64.746.400	PAD		57 Paket	71.221.040
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	4 Paket	4.980.000	PAD		4 Paket	5.478.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	24730 Paket	19.185.950	PAD		24730 Paket	21.104.545
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan dan Kelurahan	3 Laporan	102.300.000	PAD		3 Laporan	112.530.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	4 Laporan	71.705.000	PAD		4 Laporan	78.875.500
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	48.106.100			100%	52.916.710
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	2 Unit	10.556.100	PAD		2 Unit	11.611.710
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	2 Unit	37.550.000	PAD		2 Unit	41.305.000
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	762.185.080			100%	838.403.588
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	117 Laporan	1.400.000	PAD		117 Laporan	1.540.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	4 Laporan	76.958.980	PAD		4 Laporan	84.654.878
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	21 Laporan	235.000.000	PAD		21 Laporan	258.500.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	23 Laporan	448.826.100	PAD		23 Laporan	493.708.710

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	294.455.000			100%	323.900.500
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan dan Kelurahan	31 Unit	101.375.000	PAD		31 Unit	111.512.500
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	4 Unit	2.920.000	PAD		4 Unit	3.212.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	4 Unit	190.160.000	PAD		4 Unit	209.176.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.459.071.300			100%	1.459.071.300
7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100%	1.459.071.300			100%	1.459.071.300
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan dan Kelurahan	53 Laporan	1.391.308.200	PAD		53 Laporan	1.530.439.020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	239 Dokumen	67.763.100	PAD		239 Dokumen	74.539.410
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	1.953.208.323			100%	2.148.529.155
7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	109.629.150			4 Unit	120.592.065
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	53 Laporan	109.629.150	PAD		53 Laporan	120.592.065
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	62.982.050			100%	69.280.255
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	53 Dokumen	62.982.050	PAD		53 Dokumen	69.280.255

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan		100%	1.780.597.123			100%	1.958.656.835
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembursitu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan lembursitu	4 Pokmas / Ormas	489.200.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	538.120.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipanengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipanengah	4 Pokmas / Ormas	335.600.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	369.160.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikundul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cikundul	4 Pokmas / Ormas	343.997.123	PAD		4 Pokmas / Ormas	378.396.835
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Situmekar	4 Pokmas / Ormas	288.200.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	317.020.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situmekar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sindangsari	4 Pokmas / Ormas	323.600.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	355.960.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketertraman dan ketertiban Wilayah	Kecamatan dan Kelurahan	100%	56.121.600			100%	61.733.760
7 01 04 2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase peningkatan ketertraman dan ketertiban Wilayah	Kecamatan dan Kelurahan	100%	56.121.600			100%	61.733.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	56.121.600	PAD		5 Laporan	61.733.760
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	100%	13.370.000			100%	14.707.000
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	100%	13.370.000			100%	14.707.000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	500 Orang	13.370.000	PAD		500 Orang	14.707.000

Tabel di atas menggambarkan reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Kecamatan Lembursitu. Program, kegiatan dan sub kegiatan tidak jauh berbeda dengan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023.

BAB III ...

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 (lima) program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan diuraikan seperti dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Sarang Milik Daerah SKPD				0 Dokume n	6 Dokumen	7.500.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-5.430.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua KelDesa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			8.250.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	18.749.850,00	17.488.650,00	37.288.650,00	18.538.800,00			Memperkaa t Stabilitas Po-bukhunk an Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		83.599.835,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua KelDesa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Po-bukhunk an Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			26.400.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	44 Paket	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua KelDesa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Po-bukhunk an Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			36.575.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	0,00	0,00	10.556.100,00	10.556.100,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			3.080.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	12.350.000,00	18.200.000,00	37.550.000,00	25.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			16.610.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			13.200.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang/Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang/Urutan Pemerintahan Daerah				-	100 %	943.501.900,00	809.827.980,00	762.185.080,00	-181.316.820,00			Memperkuat Stabilitas Publik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		948.217.600,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNJ GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESI DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	53 Laporan	1.341.568.200,00	1.391.255.400,00	1.391.308.200,00	49.740.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			1.387.684.749,00	KECAM ATAN LEMBU RSITU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokume n	239 Dokumen	51.520.208,00	67.763.100,00	67.763.100,00	16.242.892,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			102.788.778,00	KECAM ATAN LEMBU RSITU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		5.263.500,00	KECAM ATAN LEMBU RSITU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pengutan Budaya Kreatif & Inovatif			5.263.500,00	KECAM ATAN LEMBU RSITU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENS TA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Lemburatu, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBU R SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas s/ Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBU R SITU
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	45.525.520,00	46.121.600,00	56.121.600,00	4.474.480,00							50.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		4.474.480,00	KECAMATAN LEMBU R SITU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penggunaan Budaya Kreatif & Inovatif			4.474.480,00	KECAMATAN LEMBU R SITU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	100 %	45.525.520,00	46.121.600,00	56.121.600,00	10.596.080,00			-	- -	Kecamatan dan Kelurahan		45.525.520,00	KECAMATAN LEMBU R SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENS TA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	5 Laporan	45.525.520,00	46.121.600,00	56.121.600,00	10.596.080,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.525.520,00	KECAMATAN LEMBU R SITU		
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	13.395.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	36.605.000,00						50.000.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah				-	100 %	13.395.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	-25.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	KECAMATAN LEMBU R SITU		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	500 Orang	13.395.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	-25.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN LEMBU R SITU		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENS TA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNJ JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN LEMBURSITU							398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	-398.961.982,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00		-	-	-	Kelurahan Lembursitu		0,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	489.200.000,00	489.200.000,00	489.200.000,00	Kota Sukabungti, Semana Kecamatan, Semana KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN LEMBURSITU
		KELURAHAN CIPANENGANG							321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	-321.293.356,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00		-	-	-	Kelurahan Cipanengang		0,00	KECAMATAN LEMBURSITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas s/ Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	335.600.000,00	335.600.000,00	335.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
		KELURAHAN CIKUNDUL							253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	-253.761.500,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00			-	-	Kelurahan Cikundul		0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas s/ Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	343.997.123,00	343.997.123,00	343.997.123,00	Kota Sukabumi, Lemburitu, Cikundul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	273.362.000,00	323.600.000,00	323.600.000,00	50.238.000,00			-	- -	Kelurahan Situmekar		300.698.200,00	KECAM ATAN LEMBU &SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		Jumlah Pokmas dan Ormayang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan					0 Pokma s/ Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	323.600.000,00	323.600.000,00	323.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDAN AAN BAGI KELU'RA HAN	-	- -			300.698.200,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
J U M L A H									1.039.260.049.162,00	1.272.828.818.997,00	1.337.805.497.363,00	298.545.448.201,00							349.459.904.296,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah diperlukan anggaran yang cukup mumpuni agar setiap target bisa terwujud dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) maka diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2022, 2023 dan tahun 202. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untukmeningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh

semua pihak. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing SKPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan , maka diperlukan instrumen pengendalian , monitoring dan evaluasi .

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, Kecamatan Lembursitu akan menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2024.
2. Kecamatan Lembursitu dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, Kecamatan Lembursitu wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024 , Kecamatan Lembursitu wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.

2. Aparatur perencana yang ada saat ini masih menjabat 3 (Tiga) peranan sekaligus sebagai pelaksana dan pelaporan penatausahaan keuangan, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Meningkatkan peran serta kepala seksi selaku PPTK, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2024 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di harapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Lembursitu.

BB. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kota Sukabumi tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Penambahan pagu anggaran 2024 karena adanya kondisi di luar perkiraan perencanaan awal yang menyebabkan adanya penambahan pagu anggaran.
2. Pergeseran pagu anggaran antar kegiatan dikarenakan adanya perkiraan kelebihan pagu anggaran di setiap kegiatan.
3. Penyesuaian kembali target dan capaian setiap kegiatan dan sub kegiatan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
10. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pemutakhiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diterbitkan untuk menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi;
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 –2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
19. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perwal No. 55 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Sukabumi tahun 2024;
20. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 tentang RKPD Kota Sukabumi;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya renja perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II adanya kondisi Renja yang menunjukkan kondisi eksisting, adanya penambahan dan pergeseran pagu anggaran.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya renja perubahan adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pergeseran), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja perubahan Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024, sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN,
berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI KECAMATAN GUNUNGPUYUH
Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Gunungpuyuh
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya;
- BAB V. PENUTUP
menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPUYUH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome. Sedangkan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Evaluasi dan analisis pencapaian target indikator sasaran kinerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan target indikator sasaran yang tercantum dalam target kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026. Berikut kami sampaikan tabel evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

TABEL 2.1
MATRIK PENGENDALIAN

Perangkat : Kecamatan Gunungpuyuh
Daerah
Triwulan : II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II				Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan
		Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	94	6.989.923.487	30	30	1.931.694.892	27,64	44,16	44,16	3.826.997.949	54,75	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	99	4.100.000	32	32	1.450.000	35,37	43	43	1.800.000	43,90	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	800.000	4	100,00	800.000	100,00	4	100,00	800.000	100,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	500.000	2	100,00	500.000	100,00	2	100,00	500.000	100,00	APBD

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	500.000	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	4	500.000	1	25,00	150.000	30,00	4	100,00	500.000	100,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	2	500.000	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	800.000	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	500.000	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.471.309.537	38	38	1.603.841.062	29,31	42	42	2.994.631.184	54,73	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	560	5.468.809.537	160	28,57	1.602.991.062	29,31	280	50,00	2.993.781.184	54,74	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40	500.000	0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	APBD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	500.000	3	100	500.000	100,00	3,00	100,00	500.000	100,00	APBD
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	500.000	1	100	350.000	70,00	1,00	100,00	350.000	70,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	18	500.000	0	0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	APBD
	Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	500.000	0	0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	7.000.000	25,00	25,00	2.000.000		25	25	2.000.000	28,57	APBD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	100	2.000.000		1	100	2.000.000	100,00	APBD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	2.000.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.000.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	39.200.000	58	58	17.080.000		74	74	35.980.000	91,79	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	33.200.000	1	50	12.800.000		2	100	31.700.000	95,48	APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	2.000.000	1	33,33	700.000		1	33,33	700.000	35,00	APBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	4.000.000	27	90	3.580.000		27	90	3.580.000	89,50	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	98	191.144.000	29	29	56.827.000		43,98	43,98	86.392.600	45,20	APBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dokumen	4	3.500.000	1	25	825.000		1	25	2.795.000	79,86	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	4	53.684.000	1	25	18.873.700		1	25	18.873.700	35,16	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dokumen	4	1.260.000	1	25	420.000		1	25	840.000	66,67	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen	4	15.000.000	1	25	1.738.700		1	25	4.488.700	29,92	APBD

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	3	1.000.000	0	0			0	0		0,00	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	77.000.000	3	25	21.309.600		5	41,67	32.320.200	41,97	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	36.700.000	4	33,33	11.660.000		8	66,67	24.200.000	65,94	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2.000.000	2	100	2.000.000		2	100	2.000.000	100,00	APBD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	1.000.000	0	0	0		14	87,50	875.000	87,50	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	21.270.000	0	0	-		33	33	17.250.000	81,10	APBD
	Pengadaan Mebel	Unit	50	2.000.000	0	0	-		0	0	0	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	17.270.000	0	0	0		2	100	17.250.000	99,88	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2.000.000	0	0	-		0	0	0	0,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	98	1.136.399.950	29	29	221.443.130		50,18	50,18	631.727.065	55,59	APBD

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar/ Laporan	250	1.740.000	106	42	740.000		106	42	1.740.000	100,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	105.065.000	2	16,67	19.288.964		4	33,33	38.104.198	36,27	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	311.964.750	1	25	37.200.000		3	75	224.400.000	71,93	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	717.630.200	4	33,33	164.214.166		6	50	367.482.867	51,21	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	119.500.000	30	30	29.053.700		42	42	57.217.100	47,88	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Unit	23	99.500.000	6	26,09	25.033.700		12	52,17	50.357.100	50,61	APBD
	Pemeliharaan Mebel	Unit	35	2.500.000	0	0			0	0		0,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Unit	20	15.000.000	3	15	2.190.000		7	35	5.030.000	33,53	APBD
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Buah	5	2.500.000	4	80	1.830.000		4	80	1.830.000	73,20	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	1.417.679.900	23	23	12.554.800		38	38	22.730.400	1,60	APBD

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	98	1.408.679.900	27	27	9.404.800		35	35	19.580.400	1,39	APBD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1.365.817.500	1	20	700.000		1	20	1.575.000	0,12	APBD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	42.862.400	2	33	8.704.800		3	50	18.005.400	42,01	APBD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	9.000.000	41	41	3.150.000		41	41	3.150.000	35,00	APBD
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	7	3.000.000	4	57	1.575.000		4	57,14	1.575.000	52,50	APBD
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3.000.000	2	67	1.575.000		2	66,67	1.575.000	52,50	APBD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3.000.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	1.841.671.350	8,3	8,3	398.424.100		26	26	721.191.300	39,16	APBD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	99,5	77.985.600	16,67	16,67	15.681.600		50	50	43.684.800	56,02	APBD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	77.985.600	1	50	15.681.600		1	50	43.684.800	56,02	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	99	1.758.960.750	8	8	382.742.500		28	28	677.506.500	38,52	APBD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	88.615.750	0	0	0		2	33,33	31.536.200	35,59	APBD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas	4	1.669.400.000	1	25	382.742.500		2	50	645.970.300	38,69	APBD
	Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	945.000	0	0	-		0	0		0,00	APBD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100	4.725.000	0	0	-		0	0	0	0,00	APBD
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	945.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	5	945.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Unit	6	945.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3	945.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	945.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	66.314.950	8	8	8.348.400		25	25	32.594.800	49,15	APBD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	66.314.950	8	8	8.348.400		25	25	32.594.800	49,15	APBD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	12	65.008.950	2	17	8.348.400		6	50	32.594.800	50,14	APBD
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	1.306.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	47.500.000	32	32	11.905.000		32	32	11.905.000	25,06	APBD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	98	47.500.000	32	32	11.905.000		32	32	11.905.000	25,06	APBD
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	17.500.000	0	0			0	0	0	0,00	APBD
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	40	7.500.000	6	15	1.170.000		6	15	1.170.000	15,60	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intrasku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Orang	50	7.500.000	22	44	3.290.000		22	44	3.290.000	43,87	APBD

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	7.500.000	0	0	-		0	0	0	0,00	APBD
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	3	7.500.000	3	100	7.445.000		3	100	7.445.000	99,27	APBD
Jumlah				10.363.089.687	20,26	20,26	2.362.927.192	22,80	33,00	33,00	4.615.419.449	44,54	APBD

Sumber Data: Matrix Pengendalian 2024

Berdasarkan

Berdasarkan Tabel 2.1 Matrix Pengendalian diatas dapat kita ketahui Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Gunungpuyuh Sampai dengan Triwulan II. Jumlah anggaran keseluruhan yaitu sebesar Rp.10.363.089.687,- dan baru terealisasi sebesar Rp.4.615.419.449,- atau 44,54% dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 jumlah anggaran sebesar Rp.6.989.923.487,- dari target 94% baru terealisasi sebesar Rp.3.826.997.949,- atau 54,75%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2024 jumlah anggaran sebesar Rp.1.417.679.900,- dari target 100% baru terealisasi sebesar Rp.22.730.400,- atau 1,60%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp.1.841.671.350,- dari target 100% baru terealisasi sebesar Rp.721.191.300,- atau 39,16%. Capaian realisasinya masih sangat rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu dana Kelurahan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pada Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp.66.314.950,- dari target 100% baru terealisasi sebesar Rp.32.594.800,- atau 49,15%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp.47.500.000,- dari target 100% baru terealisasi sebesar Rp.11.905.000,- atau 25,06%.

TABEL 2.2

TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Sukabumi

Kecamatan Gunungpuyuh

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	$\frac{8}{(7/6)*100}$	9	$\frac{10}{(5+7+9)/3}$	$\frac{11}{(10/4)*100}$
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	93,46	100	96,90	96,90	94	54,75	58,24
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	Persen	100	95,58	100	100	100	99	43,90	44,35
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	4	3	3	3	100	4	4	100

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
												Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	2	-	-	-	-	2	2	100
7	01	01	2	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	-	-	-	-	4	0	0
7	01	01	2	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	-	-	-	-	4	4	100
7	01	01	2	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	-	-	-	-	2	0	0
7	01	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen/ Laporan	7	3	2	2	100	7	0	0
7	01	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen/ Laporan	1	1	1	1	100	1	1	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	93,15	100	97,44	97,44	100	54,73	54,73
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	40	14	14	13	97,44	40	20	50
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40	-	-	-	-	40	0	0
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan/ Dokumen	3	1	1	1	100	3	3	100
7	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan/ Dokumen	18	1	1	1	100	18	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	100	1	0	0
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	-	-	-	-	100	28,57	28,57
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100
7	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	1	0	0
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	-	-	-	-	4	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-	-	-	-	1	0	0
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	98,43	100	100	100	100	91,79	91,79
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel/Paket	2	-	83	83	100	2	2	100
7	01	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	-	-	-	-	3	1	33,33
7	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	-	-	-	-	30	27	89,50
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	98	97,72	100	99,97	99,97	98	45,20	46,12

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket/ buah/ Dokum en	4	127	1	1	100	4	1	25
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket/ Jenis/ Dokum en	4	3	2	2	100	4	1	25
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket/ buah/ Dokum en	4	6	1	1	100	4	1	25
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket/ Jenis/ Lembar / Dokum en	4	3 17000	2	2	100	4	1	25
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan/ Dokum en	3	-	-	-	-	3	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan/ Dus	12	1000	60	60	100	12	5	41,97
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan/ HOK	12	67	40	40	100	12	8	65,94
7	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	-	-	-	-	2	2	100
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	-	-	-	-	16	14	87,50
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	90	100	99	99	100	81,10	81,10
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket/ unit	50	-	42	42	100	50	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit/ Paket	2	2	4	4	100	2	2	100
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	-	-	-	-	2	0	0
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	98	94,42	100	93,26	93,26	98	55,59	56,72
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan/ Lembar	250	175	12	12	100	250	106	40
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah yang Disediakan	Laporan/ Bulan	12	12	12	12	100	12	4	36,27
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan/ Bulan	4	12	3	3	100	4	3	71,93
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan/ Bulan	12	12	12	11	89,41	12	6	51,21

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	94,91	100	98,87	98,87	100	42	47,88
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Rata - rata service kendaraan bemotor dinas dalam satu tahun	Unit/ Kali	23	6	23	23	100	23	12	50,61
7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35	-	-	-	-	35	0	0
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit/ Kali	20	32	20	20	100	20	7	33,53
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Buah/ Paket	5	2	2	2	100	5	4	73,20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	100	82,89	100	99,99	99,99	100	1,60	1,60
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen / Kegiatan n	98	3	100	99,99	99,99	98	1,39	1,39
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan/ Kegiatan n/RW	5	4	52	52	100	5	1	20
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen/ Kegiatan n/ RT/ RW	6	4	3	3	100	6	3	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kekurahan	Persen	98	-	-	-	-	98	41	35
7	01	02	2	02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	7	-	-	-	-	7	4	52,50
7	01	02	2	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	-	-	-	-	3	2	66,67
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	-	-	-	-	3	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	99,51	32	32	99,62	100	39,16	39,16
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen / Kegiatan	99,5	2	2	2	99,97	99,5	56,02	56,30
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kader/ Laporan/ Orang/ Kegiatan	2	80 / 2	2	2	99,97	2	1	50
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	99	99	32	31	96,51	99	38,52	38,91
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Lembaga Kemasyarakatan	persen	6	4	100	96,51	96,51	6	2	33,33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kegiatan			5	5	100			
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	99	99	100	99,80	99,80	99	38,52	38,91
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	4	4	4	4	100	4	2	50
7	01	03	2	02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	-	-	-	-	2	0	0
7	01	03	2	02		Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kelurahan	-		-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	99,55	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	05	02	Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah wilayah penanganan covid 19	Kelurahan	12	4	-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2	05	02	Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah bulan pembinaan covid 19	Bulan	12	12	-	-	-	-	-	-
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	100	-	60	60	99,37	100	49,15	49,15
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Trantibum dan Perigantan Hari Besar Keagmaan	Persen	100	-	100	99,37	99,37	100	49,15	49,15
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Orang/ OB/ Laporan	12	-	3180	3180	99,37	12	6	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lapoan	3	-	-	-	-	3	0	0
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	97,94	100	100	100	100	25,06	25,06
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemeritahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen	98	97,94	100	100	100	98	25,06	25,57

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	-	-	-	-	50	0	0
7	01	05	2	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan/orang	40	3	25	25	100	40	6	39

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2025	
											Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan/orang	50	4	3	3	100	50	22	44
7	01	05	2	01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Orang/Dokumen	4	-	-	-	-	4	0	0
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	3	-	-	-	-	3	3	100

Sumber Data: Renstra 2018-2023 Perubahan dan Renstra 2024-2026 dan Matrix Pengendalian 2022, 2023, dan 2024.

Berdasarkan matrik Rekapitulasi Evaluasi diatas, kita dapat mengetahui sejauhmana Capaian Target Realisasi di Tahun n-2 atau di Tahun Anggaran 2023, dimana pada Tahun ini adalah Tahun Transisi dari pandemi Covid-19 ke New Normal, yang mengakibatkan sebagian anggaran masih terbatas dan berkurang dibandingkan dengan tahun 2022, dan untuk tahun 2024 adalah dimana tahun pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan untuk dikelola oleh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi periode Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 10.648.992.205, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 10.106.176.766 atau mencapai 94,90 persen dari anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan untuk dikelola oleh Kecamatan GunungPuyuh Kota Sukabumi periode Desember 2023 sebesar Rp 9.785.452.579, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 9.572.300.674 atau mencapai 97,82 persen dari anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan, Kecamatan Gunungpuyuh senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dari berbagai sisi, mulai dari sisi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Produk yang di hasilkan. Banyak sumber daya yang harus kami tingkatkan, dan ini tentunya membutuhkan ide kreatifitas agar kinerja palayanan semakin meningkat dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan target dari renstra dan renja yang telah di terbitkan sebelumnya. Kecamatan Gunungpuyuh juga mencoba senantiasa memberikan pelayanan terbaik agar tumbuh kepercayaan dari setiap stakeholder terhadap kinerja pelayanan yang kami berikan. Berikut kami tampilkan tabel kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh sampai dengan triwulan II atau semester Pertama tahun 2024.

Tabel 2.3
TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2023 - 2024
KOTA SUKABUMI

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n-1)	(thn n)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Nilai SAKIP Kecamatan		Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	71,56	70	72	102,22%
2	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efesien			85	95	93,75	85	95	110,29%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			84.22	85	84.47	84.22	85	100,30%
4	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	36	100	40	100	100	111,11%
5	Persentase pelayanan yang menggunakan aplikasi SiKALEM			70	100	50	70	100	71,43%
6	Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	32,5	33	0	32,5	33	0%
7	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas			55	70	0	55	70	0%

Sumber Data: Dokumen Renstra 2018-2023 dan 2024 -2026

Berdasarkan hasil analisis pada tabel T-C.30 dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Gunungpuyuh mencapai persentase indikator Nilai SAKIP sebesar 102,22%, pada indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai persentase sebesar 100,30%, lalu pada Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efisien mencapai sebesar 110,29%, dan pada Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan mencapai persentase sebesar 111,11%. Namun pada Persentase pelayanan yang menggunakan aplikasi SiKALEM baru mencapai 50% dikarenakan akses pengecekan NIK melalui SiKalem di cabut/ di putus sesuai dengan Permendagri nomor 102 Tahun 2019. Terakhir pada Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan dan Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas capaiannya 0% dikarenakan berkurangnya anggaran sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pada Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belum termanfaatkannya teknologi secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum tercapainya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan apa yang telah ditargetkan;
3. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024;
4. Dampak Pembangunan Ruas Tol Bocimi di wilayah Gunungpuyuh terhadap laju pertumbuhan perekonomian.

Tabel 2.4
TC. 31
Review terhadap Awal RKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi

Kecamatan Gunungpuyuh

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.473.903.067	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.772.923.612	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	4.100.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	4.100.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.003.045.517	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.302.066.062	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 OB	5.000.545.517	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 OB	5.299.566.062	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	500.000	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	500.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1 Dokumen	500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					Tindak Lanjut Pemeriksaan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	500.000	
	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	7.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	7.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.549.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.549.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.459.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.459.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	210.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	210.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.520.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.520.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.770.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.770.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.590.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.590.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	16 Dokumen	1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	16 Dokumen	1.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Berbasis Elektronik pada SKPD					Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	12.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	12.750.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	2.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	2.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	8.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	8.750.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.188.958.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.188.958.550	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lembar/ Laporan	744.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lembar/ Laporan	744.000	
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	142.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	142.000.000	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	393.974.750	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	393.974.750	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	652.239.800	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	652.239.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	134.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	134.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	99.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	99.500.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	2.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	4.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	4.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	6.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	6.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	2.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	4.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	4.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec gunungpuyuh	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	1.388.179.995	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec gunungpuyuh	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	1.388.179.995	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec gunungpuyuh	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1.379.179.995	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec gunungpuyuh	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1.379.179.995	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	1.336.317.595	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	1.336.317.595	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	42.862.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	42.862.400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec gunungpuyuh	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	9.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec gunungpuyuh	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	9.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7 Dokumen	3.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Laporan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Laporan	3.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec gunungpuyuh	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	1.545.719.588	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec gunungpuyuh	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	157.271.688	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec gunungpuyuh	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	62.985.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec gunungpuyuh	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	62.985.600	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	62.985.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	62.985.600	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec gunungpuyuh	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	1.478.008.988	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec gunungpuyuh	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	89.561.088	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakat an	88.616.088	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakat an	88.616.088	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	1.388.447.900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	-	
	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	945.000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evahuasi Kelurahan	2 Laporan	945.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	4.725.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec gunungpuyuh	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	4.725.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyaratan	945.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyaratan	945.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyaratan	945.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyaratan	945.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	945.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	945.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	945.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	945.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	945.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	945.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec gunungpuyuh	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	32.626.800	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec gunungpuyuh	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	32.626.800	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec gunungpuyuh	Jumlah Kegiatan Tranitubum dan Perigantan Hari Besar Keagmaan	100%	32.626.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec gunungpuyuh	Jumlah Kegiatan Tranitubum dan Perigantan Hari Besar Keagmaan	100%	32.626.800	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.320.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.320.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	1.306.800	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	1.306.800	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec gunungpuyuh	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	47.500.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec gunungpuyuh	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	47.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec gunungpuyuh	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	47.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec gunungpuyuh	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	47.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	17.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	17.500.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	7.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	7.500.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	7.500.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	7.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	7.500.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	7.500.000		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	7.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	7.500.000		
JUMLAH					9.487.929.450	JUMLAH					8.398.502.095	

Sumber: Cascading Renstra 2024-2026 dan SIPD

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target kinerja. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target kinerjanya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya penambahan, pengurangan atau pergeseran anggaran. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada Tahun anggaran 2024 ini meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pergeseran dan Penambahan anggaran perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara

kuantitatif. Penyajian tabel Perubahan Rencana Kerja secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Ajuan Pergeseran	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.365.817.500	1.415.817.500	50.000.000	Bertambah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.985.600	112.185.600	34.200.000	Bertambah
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	88.615.750	103.815.750	15.200.000	Bertambah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.200.000	44.300.000	11.100.000	Bertambah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	4.700.000	1.200.000	Bertambah
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.260.000	2.520.000	1.260.000	Bertambah
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.700.000	49.700.000	13.000.000	Bertambah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				

	Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.000.000	11.500.000	9.500.000	Bertambah
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.270.000	26.020.000	8.750.000	Bertambah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	3.240.000	1.500.000	Bertambah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.500.000	113.740.000	14.240.000	Bertambah
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	19.990.000	4.990.000	Bertambah
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.000.000	2.100.000	-900.000	Berkurang
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	2.100.000	-900.000	Berkurang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65.008.950	64.023.950	-985.000	Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000	0	-500.000	Berkurang
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500000	350.000	-150.000	Berkurang

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	3.580.000	-420.000	Berkurang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	0	-1.000.000	Berkurang
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	875.000	-125.000	Berkurang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.065.000	80.785.000	-24.280.000	Berkurang
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.964.750	299.464.750	-12.500.000	Berkurang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	0	-2.500.000	Berkurang
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000	1.840.000	-660.000	Berkurang
	JUMLAH	2.242.627.550	2.362.647.550	120.020.000	Bertambah

Sumber Data: SIPD 2024

Tabel 3.1.
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Sukabumi
Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesuda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20			
						Kecamatan Gunung Puyuh				8.398.502.095,00	8.693.689.687,00	8.813.709.687,00						0,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				8.398.502.095,00	8.693.689.687,00	8.813.709.687,00						0,00				
	7	01				KECAMATAN				8.398.502.095,00	8.693.689.687,00	8.813.709.687,00						0,00				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.772.923.612,00	6.989.923.487,00	7.032.788.487,00						0,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	-	99 persentase	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00		-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen		800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH			
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH			
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	4 Dokumen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH			
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	5.520.000,00	15.000.000,00	15.700.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	12 Laporan	49.770.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12 Laporan	21.590.000,00	36.700.000,00	49.700.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	875.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	-	100 persen	12.750.000,00	21.270.000,00	21.270.000,00			-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	50 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	35 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	19.520.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.840.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	1.388.179.995,00	1.417.679.900,00	1.481.679.900,00						0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	-	98 persentase	1.379.179.995,00	1.408.679.900,00	1.408.679.900,00			-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	5 Laporan	1.336.317.595,00	1.365.817.500,00	1.431.617.500,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	6 Dokumen	42.862.400,00	42.862.400,00	42.862.400,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN AN GUNUNG PUYUH

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0 Laporan	945.000,00	945.000,00	945.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	100 persen	4.725.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00			-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	945.000,00	945.000,00	945.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	945.000,00	945.000,00	945.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	6 Unit	945.000,00	945.000,00	945.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	3 Laporan	945.000,00	945.000,00	945.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

[illegible]

						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	40 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	50 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal												
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	10.080.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
						Kelurahan Gunungpuyuh			332.162.000,00	382.400.000,00	382.400.000,00						382.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			332.162.000,00	382.400.000,00	382.400.000,00						382.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN			332.162.000,00	382.400.000,00	382.400.000,00						382.400.000,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	332.162.000,00	382.400.000,00	382.400.000,00						382.400.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	332.162.000,00	382.400.000,00	382.400.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		382.400.000,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	0,00	382.400.000,00	382.400.000,00	Kota Sukabumi, Gunungpuyuh, Gunung Puyuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		382.400.000,00	KECAMATAN GUNUNG PUYUH

[illegible]

						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	435.800.000,00	435.800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Sriwidari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00	KECAMAT AN GUNUNG PUYUH
	J U M L A H								8.398.502.095,00	8.693.689.687,00	8.813.709.687,00						0,00	

Sumber Data: SIPD 2024 (Laporan Renja Perubahan TA.2024)

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Sukabumi, Rencana Strategis (RENSTRA) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu selama 1 (Satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2024 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada Anggaran Tahun 2024. Selain itu, penyusunan Rencana Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2024, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2024 agar dapat berjalan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2024 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

CC. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CITAMIANG KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat didalamnya memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman.

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik agar keberlangsungan pembangunan agar bisa atau tetap terjaga atau berjalan

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang- Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan. Namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan Perubahan untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pedoman bagi Kecamatan Citamiang untuk mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citamiang. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citamiang adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 3 (Tiga) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam kurun 3 (Tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Citamiang tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Perubahan Renja.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renja dilakukan melalui kegiatan pembentukan Tim Penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja Tim Renja serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renja yang dilaksanakan melalui tahapan perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan Renja;

c. Tahapan penetapan Renja.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renja oleh Camat Citamiang selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja oleh Bappeda Kota Sukabumi.

Perubahan Renja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026. Renja Kecamatan Citamiang menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kota Sukabumi ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Citamiang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Citamiang Tahun 2024-2026 (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Renja Kecamatan Citamiang Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) supaya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2031
 21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);

22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
23. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi tahun 2024-2026;
24. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota No 55 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Sukabumi tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Citamiang tahun 2024 ini adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Citamiang tahun 2024-2026 yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Citamiang dalam mendukung dan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (RPD) Tahun 2024 – 2026 serta Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi periode tahun 2005-2025 yaitu *“Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.”*. Dengan tema Pembangunan Tahun 2024 *“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”*.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen

Penyajian rancangan Renja di susun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN CITAMIANG

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 dan capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Citamiang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Ranwal Renja
- 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*. Sedangkan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Evaluasi dan analisis pencapaian target indikator sasaran kinerja Tahun 2022 yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan target indikator sasaran yang tercantum dalam target kinerja Tahun 2022 dengan Renstra Kecamatan Citamiang Tahun 2018-2023.

Secara umum Kecamatan Citamiang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Renstra Kecamatan Citamiang Tahun 2018 – 2023 serta Renja Tahun 2022 ada 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dan harus dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel.

Indikator sasarannya :

- a. Nilai SAKIP Kecamatan;
- b. Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efisien.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator sasarannya :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan

3. Meningkatnya Kapasitas Personil Linmas Kecamatan

Indikator sasarannya :

- a. Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan;
- b. Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas.

Secara umum Kecamatan Citamiang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Citamiang, maka capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Citamiang pada tahun 2022 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja tersebut.

Tabel TC. 29
Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4

7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi yang tepat waktu berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	6 Buku	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	2 Buku	4,67	117
7.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2	6 Buku	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Buku	4,33	217

		SKPD								
7.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	6 Buku	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Buku	4,33	217
7.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	6 Buku	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Buku	4,33	217

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	6 Buku	6 Dokume n	6 Dokumen	100%	1 Buku	4,33	217

7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD	2	6 Buku	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	2 Buku	4,67	233
7.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5 Buku	5 Laporan	5 Laporan	100%	2 Buku	4,00	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admistrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	38 Orang/B ulan	46 Orang/Bul an	46 Orang/Bulan	100%	46 Orang/Bul an	43,33	94

7.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	6 Buku	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Buku	4,67	233
7.01.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	6 Buku	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Buku	4,67	233

		Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	6 Buku	6 Laporan	6 Laporan	100%	1 Buku	4,33	217
7.01.01.2.02.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			52 Orang	52 Orang	100%			
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan RKBMD di Tingkat Kecamatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+ 9	11=10/ 4
7.01.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
7.01.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								

7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admistrasi umum perangkat daerah		100						
7.01.01.2.05.0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		29 Buah						
7.01.01.2.05.0 5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.05.1 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40 Orang						
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	100	100	100	100	100	100	100	100

		Daerah								
7.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	11 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	1 Laporan	7,33	367
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	39 Jenis & 27 Jenis	21 & 13	21 & 13	100%	12 Laporan	33,67	337
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	72 Kali	45 Paket	45 Paket	100%	12 Laporan	43	717

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	3 Jenis & 12000 lbr	2 & 9600	2 & 9600	100%	4 Laporan	3	25
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		18 lbr						

	undangan	Undangan yang Disediakan								
7.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	160 Dus	120 Dus	120 Dus	100%	12 Laporan	97,33	811
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	103 HOK & 40 HOK	84 & 32	84 & 32	100%	6 Kegiatan	88,33	736

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.06.1 1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Penyediaan jasa keamanan gedung kantor	Terjaganya Keamanan gedung kantor								

7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
7.01.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51	16 Unit	28 Unit	28 Unit	100%	1 Laporan	15	29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								

7.01.01.2.07.1 1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	100 Lbr & 200 Lbr (1 Laporan)	100 & 200	100 & 200 (1 Laporan)	100%	1 Laporan	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12	100
7.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	9 Orang & 8 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	13	108

7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	18 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	14	108
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+ 9	11=10/4
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30 Unit	100%	100%	100%	30 Unit	30	100
7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	41	7 Orang &	100%	100%	100%	8 Unit	8	20

6.	Mesin Lainnya	yang Dipelihara		19 Unit						
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	6 Gedung	100%	100%	100%	3 Unit	9	225
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masrakat	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	2,333333333	19
7.01.02.02.01.02.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	3,333333333	28

[illegible]

7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12	12 Buku	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Laporan	5	42
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Buku						
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di	100	100	100	100	100	33,95	78	78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		Kecamatan dan Kelurahan								
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	19 Kegiatan	6	6
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	6	8 Cabor & 6	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	19 Kegiatan	12	194

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan						
7.01.03.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.03.02.02.01.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	5 Buku	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Buku	5	83

7.01.03.02.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15		20 Pokmas	20 Pokmas	100%	15 Pokmas	12	78
7.01.03.02.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Citamiang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Citamiang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+ 9	11=10/ 4
7.01.03.02.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tipar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tipar								

7.01.03.02.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nanggaleng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nanggaleng								
7.01.03.02.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongpanjang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongpanjang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.03.02.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikondang								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan			100	100				100

	Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan								
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan			5 Laporan	5 Laporan			5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan			5 Laporan	5 Laporan			5	100
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	100	100	30	44	147%	100	81	81

	UMUM	wilayah								
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas aktif	100	100	30	44	146%	100	81	81
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	4,667	39

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan		7 Kegiatan					100	100

	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan								
7.01.05.2.01.0 4.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan da n Ketahanan Nasional		2 Kegiatan					100	100

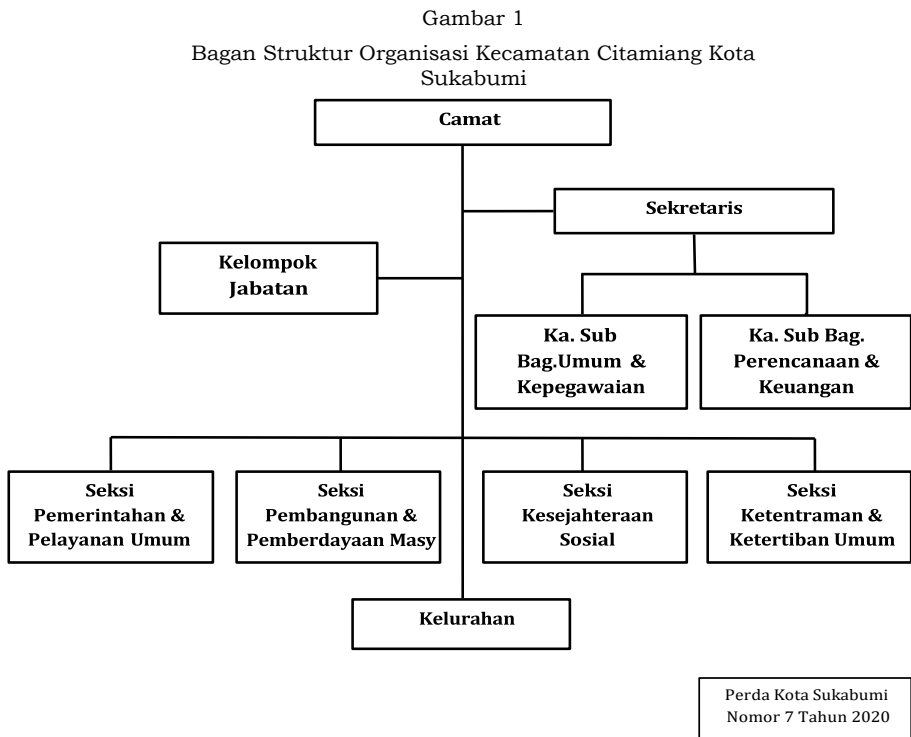
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renstr a
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan	5	12 Bulan	6 Dokume n	6 Dokumen	100%	1 Buku	6,33	127

		oleh Instansi Vertikal								
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Citamiang

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi serta evaluasi guna mendapatkan strategis yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Kecamatan Citamiang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :



Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani. Hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena diatas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Citamiang dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan bertanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Citamiang tahun 2022 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Citamiang Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n Ana lisis
				Thn 202 2	Thn 202 3	Thn 202 4	Thn 2025	Th n 202 2 (%)	Th n 202 3 (%)	Th n 202 4 (%)	Th n 202 5 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Nilai SAKIP Kecamatan			65.2 5 /B	65.9 5 /B	74,9 0 /BB	75,2 0/ BB	74,6 0 /BB	71,9 1 /BB	74,9 0 /BB	75,2 0 /BB	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n Ana lisis
				Thn 202 2	Thn 202 3	Thn 202 4	Thn 2025	Th n 202 2 (%)	Th n 202 3 (%)	Th n 202 4 (%)	Th n 202 5 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
2	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan Efisien			85	90			99,7	99,08 %			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			81	82	A-	A-	96,8	97,5	A-	A-	
4	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang tingkat Kecamatan / Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan diKecamatan /Ke lurahan			80	85	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah			5	5			6,2	5,3			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n Ana lisis
				Thn 202 2	Thn 202 3	Thn 202 4	Thn 2025	Th n 202 2 (%)	Th n 202 3 (%)	Th n 202 4 (%)	Th n 202 5 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
	Kecamatan											
6	Persentase Peningkata n Kapasitas Personil Linmas/Per sent ase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan			30	35	100	100	72, 2	35	100	100	
7	Cakupan Layanan Kesehatan Bagi Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentu kan Posyandu Remaja			-	-	30	40	-	-	30	40	
8	Cakupan Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum di Kecamatan			-	-	100	100	99,4	-	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n Ana lisis
				Thn 202 2	Thn 202 3	Thn 202 4	Thn 2025	Th n 202 2 (%)	Th n 202 3 (%)	Th n 202 4 (%)	Th n 202 5 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
9	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan Citamiang			-	-	97,0	97,3	96,8	-	97,0	97,3	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu aktual yang dihadapi Kecamatan Citamiang, merupakan bagian dari isu strategis dan berpengaruh terhadap situasi di Kecamatan Citamiang. Isu aktual merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Perumusan isu aktual diidentifikasi dari berbagai sumber, seperti :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah;
2. Kondisi terkini tahun 2023;
3. Arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026;
4. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
5. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat;
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah seperti Kejadian Luar

Biasa (KLB), *Recovery* Pandemi *Covid-19*, Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

7. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Citamiang, maka isu penting yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia, tak terkecuali di Kota Sukabumi. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu dan pilkada serentak 2024 akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak. Bagi penyelenggara mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. Tak hanya bagi penyelenggara, pemilu dan pilkada serentak 2024 juga akan menjadi kerja berat bagi partai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, Perkembangan situasi politik, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik perlu dipantau secara berkala. Tak lupa upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamananjelang pemilu dan pilkada 2024 perlu dioptimalkan.

2. Penguatan kelembagaan dan peran serta Linmas

Dengan semakin kompleksnya permasalahan ketentraman dan ketertiban, sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Diperlukan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data yang akurat terkait daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan permasalahannya sehingga dapat ditemukan prioritas penyelesaiannya. Berdasarkan laporan dari Kepolisian, beberapa jenis gangguan ketentraman dan

ketertiban/kriminalitas keamanan yang terjadi di wilayah Kecamatan Citamiang diantaranya tawuran, senjata tajam, penganiayaan/KDRT, pemerasan, perampokan, pencurian kendaraan roda 2, pencurian kendaraan roda 4, pencurian umum, pengrusakan, dan narkoba.

Indikator suksesnya pelatihan linmas adalah meningkatnya kualitas SDM Linmas, menguatnya kelembagaan dan peran serta Linmas, meningkatnya ketahanan masyarakat yang demokratis, meningkatnya kesiap-siagaan satuan Linmas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum dan meningkatnya kualitas pelayanan dan sumber daya pendukungnya dalam perlindungan masyarakat.

Deteksi dini ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan diantaranya melalui pelaporan rutin kegiatan dan laporan kejadian di wilayah kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ketentraman dan ketertiban, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, diantaranya melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi personil Linmas secara berkesinambungan dan meningkatkan intensitas patroli bersama dengan Koramil dan Polsek dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

3. Penerapan nilai-nilai agama dan wawasan kebangsaan

Penerapan nilai-nilai kebangsaan diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter, dapat mendorong keyakinan akan kebenaran nilai-nilai kebangsaan bagi identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa. Nilai-nilai kebangsaan wajib dijadikan pedoman dan arah perjuangan untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan agar dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai kebangsaan selalu hadir dan menjadi *mindset* berfikir, bersikap, bertindak bagi seluruh warga masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penetapan RPD Kota Sukabumi 2024-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 ini sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan RPD merupakan sebuah dokumen yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. RPD ini juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026 dan akan dijabarkan setiap tahunnya dalam rangka penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Sukabumi merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Berikut hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Citamiang Tahun 2024.

Tabel TC 31...

Tabel TC 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Sukabumi

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Dan a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persenta se Pemenu han Kebutuh an Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	100%	7.187.22 6.284	PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8.181.143.8 81	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	6.420.000	PAD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	6.420.000	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.820.000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.820.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Dan a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD	2 Dokumen	475.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	475.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an	2 Dokumen	455.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	455.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Dokumen Perubaha n RKA- SKPD						RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n DPA- SKPD	2 Dokumen	455.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	455.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina	2 Dokumen	445.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	445.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Perubahan DPA-SKPD		si Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD				Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 Laporan	1.385.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.385.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.385.0 00	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.385.000	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persenta se Pemenu han Dokume n Administ rasi Keuanga	100%	5.752.512 .265	PAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.506.445.7 81	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			n Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	5.749.572.265	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	46 Orang/Bulan	6.503.505.781	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	1.000.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	1.000.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Dan a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Penyusun an Laporan									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semeteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwula nan/ an/Semeteran	2 Laporan	970.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semeteran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	970.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da na	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Semestera n SKPD									
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	970.000	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Prognosis	2 Dokumen	970.000	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentas e Pemenuh an Administr	100%	155.791. 563	PAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	222.223.40 0	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			asi Umum Perangkat Daerah						Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/ Peneranga n Bangunan Kantor	1 Paket	2.901.8 00	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.901.800	PAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang	5 Paket	57.857.6 00	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	59.240.400	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da na	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Disediakan									
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.900.000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.900.000	PAD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.891.200	PAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.891.200	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da na	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Laporan	66.590.963	PAD	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Laporan	77.090.000	PAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	200 Laporan	12.650.000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	6 Laporan	67.200.000	PAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase Penuhan Pengad	100%	22.710.000	PAD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase Penuhan Pengadaan Barang Milik	100%	98.723.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			aan Barang Milik Daerah						Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disedia kan	2 Unit	22.710.000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	98.723.000	PAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentas e Pemenuh an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint	100%	1.077.042. 956	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.137.618.7 00	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			ah Daerah						Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Lapora n Penyedi aan Jasa Su rat Menyur at	10 Laporan	996.000	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000	PAD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber	12 Laporan	67.199.000	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	67.199.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da na	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Daya Air dan Listrik yang Disediaka n						yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.00 0	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.00 0	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	768.847.956	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	828.427.700	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	172.749.500	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	209.713.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Dan a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Daerah		Pemerinta han Daerah						Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	37 Unit	127.472.5 00	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	141.106.00 0	PAD

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sumber Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.280.000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	28.610.000	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2 Unit	39.997.000	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	3 Unit	39.997.000	PAD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase Kepuasan Masyarakat	100%	1.165.04	PAD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap	100%	1.231.794.	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		7.653		DAN PELAYANAN PUBLIK		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		500	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	1.127.794.203	PAD	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	1.194.541.150	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.092.672.603	PAD	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.159.419.550	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	35.121.600	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	35.121.600	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Persentase keselarasan data profil di Kecamatan	100%	37.253.450	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	37.253.350	PAD

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sumber Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		n dan kelurahan				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	37.253.450	PAD	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	37.253.350	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentas e Partisipas i Masyarak at dalam Pembang unan di kecamatan dan kelurahan	100%	1.624.856. 155	PAD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	2.093.921.0 50	PAD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kegiatan pemberda yaan masyarak at di wilayah kecamata n	100%	91.347.1 55	PAD	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	117.702.05 0	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	91.347.155	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	117.702.050	PAD
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	1.533.509.000	PAD	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	1.976.219.000	PAD

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sumber Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	40.099.000	PAD	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	96.619.000	PAD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		1.493.410.000	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di		1.879.600.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			di Kelurahan						Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Citamiang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Citamiang	6 Pokmas/O rmas	265.162.000	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Citamiang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Citamiang	3 Pokmas/O rmas	370.400.000	PAD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tipar		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas/O rmas	290.362.000	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tipar		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas/O rmas	380.600.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Dan a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			akan Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n Tipar						Masyarakat di Kelurahan Tipar			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nanggaleng		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan Nanggelen g	6 Pokmas/O rmas	402.362.0 00	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nanggaleng		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nanggaleng	2 Pokmas/O rmas	452.600.00 0	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedong Panjang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedong Panjang	6 Pokmas/Ormas	224.962.000	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedong Panjang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedong Panjang	3 Pokmas/Ormas	315.200.000	PAD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikondang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	6 Pokmas/Ormas	310.562.000	PAD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikondang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikondang	3 Pokmas/Ormas	360.800.000	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da n a	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			at di Kelurahan Cikondan g									
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkat an Ketentram an dan Ketertiban wilayah	100%	46.258.54 0	PAD	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	90.903.350	PAD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persen tase Linmas s aktif	100%	46.258.5 40	PAD	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Linmas aktif	100%	90.903.350	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da na	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.258.540	PAD	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.903.350	PAD

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sumber Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	47.500.000	PAD	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	47.499.950	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	47.500.000	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemeritahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	47.499.950	PAD

N O	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Su mbe r Da na	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sum ber Da na
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan instansi lain	12 Dokumen	47.500.000	PAD	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan instansi lain	12 Dokumen	47.499.950	PAD
JUMLAH					10.070.888.632		JUMLAH				11.645.262.731	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Citamiang Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citamiang Tahun 2024-2026.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk Tahun 2024 dilakukan melalui Tahapan Musrenbang Tahun 2023 yang dimulai dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kota. Musrenbang merupakan salah satu kegiatan musyawarah rutin setiap tahun anggaran pembangunan untuk tahun pelaksanaan pembangunan berikutnya, yang dilakukan bersama masyarakat dalam rangka menjangring aspirasi masyarakat.

Pada forum Musrenbang Kelurahan, masyarakat berperan serta aktif dalam proses perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari swadaya masyarakat. Sehingga *output* dari Musrenbang menghasilkan Dokumen Rencana Tahunan Kelurahan yang berisi daftar kebutuhan masyarakat yang dapat direalisasikan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting serta strategis dalam rangka peningkatan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan. Musrenbang tingkat Kecamatan diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan diantara *stakeholder* dan pemerintah sebagai pelaku pembangunan dalam merencanakan program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Daftar urutan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan Citamiang Tahun 2024 berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan Citamiang Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel TC 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN CITAMIANG

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
KELURAHAN CITAMIANG					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	(RW 01 RW 02 RW 04 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	(RW 03 (RT 05, 06, 07), RW 04 (RT 02, 03, 05, 06), RW 05 (RT 06), RW 06 (RT 06), dan RW 07 (RT 02), Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi., Citamiang, Kec. Citamiang)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	(RW 04 dan RW 06 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Meter	
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	(RW 02 RW 04 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Meter	
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Kegiatan	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Citamiang)			
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1 Kegiatan	
11	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	(RW 04 RW 05 dan RW 06 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
12	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Paket	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kegiatan	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 dan RW 07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Citamiang, Kec. Citamiang)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kegiatan	
KELURAHAN TIPAR					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(RW.001 SAMPAI RW.008 (KESELURUHAN WILAYAH KEL.TIPAR), Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Rw.001 sampai dengan 008 (Keseluruhan Wilayah Kel.Tipar), Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(RW.003 & 006 KEL. TIPAR, Tipar, Kec. Citamia ng)	1 Paket	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(RW.003 & 004, Tipar, Kec. Citamia ng)	1 Paket	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	(RW.003 & 004 KEL. TIPAR, Tipar, Kec. Citamia ng)	1 Paket	
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(RW.004, 007 & 008, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
7	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	(RW.001 SAMPAI DENGAN RW.008, Tipar,	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Citamiang		
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(RW.002, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(RW.001, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	(RW.002, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW. 001, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.004, 005, 006, 007, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW. 002, 005, 008, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW. 002,006,007,008, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001, 005, 006, 008, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.007, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.006, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(PKK & POSREM, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001 SAMPAI RW.008, Tipar, Kec. Citamiang)	1 Paket	
KELURAHAN NANGGELENG					
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01-13 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01,02,03,04,09,10 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	6 Unit	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(RW 04,03,13 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(RW 02,09,10 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(RW 06,07,08,11 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1.200 Meter	
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(RW 01,02,07,09,10 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	2.155 Meter	
7	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	(RW 01-13 KEL. NANGGELENG KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	90 Orang	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten/Kota			
8	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01-13 KEL. NANGGELEN G KEC.CITAMIA NG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	13 Paket	
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01-13 KEL. NANGGELEN G KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(RW 01-13 KEL. NANGGELEN G KEC.CITAMIA NG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	133 Orang	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01-13 KEL. NANGGELEN G KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 05, 13 KEL. NANGGELEN G KEC. CITAMIANG, Nanggeleng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
KELURAHAN GEDONG PANJANG					
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(RW 01 - 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanja	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			ng, Kec. Citamiang)		
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01 - RW 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjanng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01 - RW 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjanng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(RW 01 - 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjanng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Kp. Kota Baru RW 01 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjanng, Kec. Citamiang)	1 Paket	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Lamping RT 003 RW 005, Lamping RT 007 RW 005, Gedongpanjanng, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Jl. Letda T Asmita RT 003 RW 002 Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(20 Unit Rumah Tidak Layak Huni di RT 01 - 06 RW 02 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(Jalan Lamping RW 04 tembusan ke RT 03 RW 05 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(RW 01 - 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 03 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01 - RW 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 05, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01 - RW 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01 - 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01 - RW 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01 - 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW 01 - RW 06 Kelurahan Gedong Panjang, Gedongpanjang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
KELURAHAN CIKONDANG					

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	(Pembuatan Sarana Air Bersih Di Wilayah RT.001 RW.001 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Unit	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Pembuatan TPT di Wilayah RW.002 dengan jumlah 515.000.000 dan di wilayah RW.003 dengan Jumlah 515.000.000 , Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Perbaikan Drainase dengan Volume 400 M Di wilayah Keseluruhan RW.003 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(Rehab Jalan Setapak di wilayah RT.001 RW.002 120m dengan Pagu total 40.000.000 RT.003 RW.002 150m Pagu 60.000.000 RT.005 RW.002 150m Pagu 60.000.000, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(Pemasangan Paving Blok dengan Volume 260m Di wilayah RT.001 RW.001 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	(Anggota Kader PKK Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(Pembangunan Drainase Di wilayah RW.002 Kelurahan Cikondang 60m Dengan Pagu 40.000.000, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(Pengaspalan Jalan Lingkungan RW.002 250m Dengan Pagu 40.000.000, Cikondang, Kec.	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Citamiang)		
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(Pembangunan Musholah dan MCK Taman Kelurahan Cikondang Depan Pustu Lokasi RW.002 Kelurahan Cikondang 250m Dengan Pagu 40.000.000, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Paket	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Citamiang)		
18	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(RW.001 - RW.009 Kelurahan Cikondang, Cikondang, Kec. Citamiang)	1 Kegiatan	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CITAMIANG

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Citamiang tahun 2024 adalah seperti tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Citamiang dan RPD Kota Sukabumi.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Citamiang di tahun 2024 adalah sebanyak 5 (Lima) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dengan pendanaan bersumber dari APBD Kota Sukabumi.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 11.645.262.731. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1...

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan
Citamiang Kota Sukabumi

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU			
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkura ng (10-12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAERA H			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		KECAMATAN CITAMIANG				11.259.0 72.731,0 0	11.630.2 62.731,0 0	11.645.2 62.731,0 0	727.445.71 2,00					9.129.217.019,0 0	
	7	UNSUR KEWILAY AHAN				11.259.0 72.731,0 0	11.630.2 62.731,0 0	11.645.2 62.731,0 0	727.445.71 2,00					9.129.217.019,0 0	
	7.01	KECAMAT AN				11.259.0 72.731,0 0	11.630.2 62.731,0 0	11.645.2 62.731,0 0	727.445.71 2,00					9.129.217.019,0 0	

1,	7.01.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	-	-	-	7.577.96 4.671,00	8.159.35 1.981,00	8.181.14 3.881,00	91.000.000 ,00					7.668.964.671,0 0
	7.01.01. 2.01	Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	<i>Persentas e Pemenuh an Dokumen Perencan aan, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	100 %	6.420.00 0,00	6.420.00 0,00	6.420.00 0,00	0,00		-	- -		6.420.000,00
	7.01.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			<i>Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat</i>	0 Doku men	4 Doku men	1.820.00 0,00	1.820.00 0,00	1.820.00 0,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH	-	- -		1.820.000,00

			Daerah							(PAD)				
	7.01.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025							PRAKIRAAN MAJU			
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokum en RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Dokumen	0 Doku men	2 Doku men	475.000, 00	475.000, 00	475.000, 00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		475.000,00

			RKA-SKPD											
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		455.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0 Dokumen	2 Dokumen	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		455.000,00

			<i>Dokumen DPA-SKPD</i>											
7.01.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Perubaha n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SKPD</i>	<i>0 Doku men</i>	<i>2 Doku men</i>	445.000, 00	445.000, 00	445.000, 00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		445.000,00
7.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>0 Lapor an</i>	<i>2 Lapor an</i>	1.385.00 0,00	1.385.00 0,00	1.385.00 0,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1.385.000,00

			dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	0 Lapor an	2 Lapor an	1.000.00 0,00	1.000.00 0,00	1.000.00 0,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1.000.000,00
7.01.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun</i>	0 Lapor an	2 Lapor an	970.000, 00	970.000, 00	970.000, 00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		970.000,00

			<i>an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semest eran SKPD</i>											
	7.01.01. 2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025							PRAKIRAAN MAJU			
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	0 Doku men	2 Doku men	970.000, 00	970.000, 00	970.000, 00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		970.000,00

7.01.01.2.06	Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	<i>Persenta se Pemenu han Administ rasi Umum Perangk at Daerah</i>	-	100 %	156.391.563,00	214.644.200,00	222.223.400,00	65.831.837,00		-	-		156.391.563,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n</i>	0 Paket	1 Paket	2.901.800,00	2.901.800,00	2.901.800,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		2.901.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan</i>	0 Paket	10 Paket	58.457.600,00	58.461.200,00	59.240.400,00	782.800,00	PEND APATA N ASLI DAER	-	-		58.457.600,00

	2.06.0008													
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	0 Laporan	12 Laporan	66.590.963,00	77.090.000,00	77.090.000,00	10.499.037,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		66.590.963,00
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025										PRAKIRAAN MAJU
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DAERAH	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SEUSAHA	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	0 Laporan	6 Laporan	12.650.000,00	60.400.000,00	67.200.000,00	54.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12.650.000,00

			<i>i SKPD</i>											
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-	100 %	22.710.000,00	56.578.000,00	98.723.000,00	76.013.000,00		-	-		113.710.000,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	66 Unit	22.710.000,00	56.578.000,00	98.723.000,00	76.013.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		113.710.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</i>	-	100 %	1.077.042.956,00	1.179.791.000,00	1.137.618.700,00	60.575.744,00		-	-		1.077.042.956,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<i>Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakh an</i>	0 Lapor an	12 Lapor an	240.000. 000,00	240.000. 000,00	240.000. 000,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		240.000.000,00
	7.01.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			<i>Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan</i>	0 Lapor an	13 Lapor an	768.847. 956,00	871.596. 000,00	828.427. 700,00	59.579.744 ,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		768.847.956,00

			<i>an Umum Kantor yang Disedia kan</i>											
	7.01.01. 2.09	Pemelihara aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	<i>Persentas e Pemeliha aan Barang Milik Daerah</i>	-	100 %	172.149. 500,00	195.473. 000,00	209.713. 000,00	37.563.500 ,00		-	- -		172.149.500,00
	7.01.01. 2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			<i>Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya</i>	0 Unit	34 Unit	126.872. 500,00	126.866. 000,00	141.106. 000,00	14.233.500 ,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		0,00

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	0 Unit	41 Unit	5.280.000,00	28.610.000,00	28.610.000,00	23.330.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.280.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	3 Unit	39.997.000,00	39.997.000,00	39.997.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39.997.000,00
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025										PRAKIRAAN MAJU
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			NASIONAL	DAERAH		

			N					2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	-	-	-	1.165.04 7.653,00	1.234.59 4.500,00	1.231.79 4.500,00	0,00					1.165.047.653,0 0
	7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	<i>Persentas e Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n</i>	-	100 %	1.127.79 4.203,00	1.197.34 1.150,00	1.194.54 1.150,00	66.746.947 ,00		-	- -		1.127.794.203,0 0
	7.01.02. 2.01.000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat</i>	0 Lapor an	12 Lapor an	1.092.67 2.603,00	1.162.21 9.550,00	1.159.41 9.550,00	66.746.947 ,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1.092.672.603,0 0

			<i>Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>											
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	0 Dokumen	12 Dokumen	35.121.600,00	35.121.600,00	35.121.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.121.600,00
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Keselarasan Data Profil di Tingkat Kelurahan /Kecamatan</i>	-	100 %	37.253.450,00	37.253.350,00	37.253.350,00	-100,00		-	-		37.253.450,00

		n												
	7.01.02. 2.02.000 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan												
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	0 Doku men	12 Doku men	37.253.4 50,00	37.253.3 50,00	37.253.3 50,00	-100,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		37.253.450,00
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025										PRAKIRAAN MAJU
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,	7.01.03	PROGRA M PEMBER	-	-	-	201.446. 155,00	201.446. 050,00	214.321. 050,00	0,00					201.446.155,00

		DAYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN												
	7.01.03. 2.01	Koordina si Kegiatan Pemberd ayaan Desa	<i>Jumlah Koordina si Kegiatan Pemberd ayaan di Wilayah Kecamat an</i>	-	100 %	91.347.1 55,00	104.827. 050,00	117.702. 050,00	26.354.895 ,00		-	- -		91.347.155,00
	7.01.03. 2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
			<i>Jumlah Laporan Peningkat an Efektivitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n</i>	0 Lapor an	6 Lapor an	91.347.1 55,00	104.827. 050,00	117.702. 050,00	26.354.895 ,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		91.347.155,00
	7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberda	<i>Persenta se</i>	-	100 %	110.099. 000,00	96.619.0 00,00	96.619.0 00,00	- 13.480.000		-	- -		110.099.000,00

		yaan Keluraha n	Kegiatan Pemberd ayaan Keluraha n							,00					
	7.01.03. 2.02.000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang unan di Keluraha n	0 Lem baga Kem asya ra kata n	6 Lem baga Kem asya ra kata n	110.099. 000,00	96.619.0 00,00	96.619.0 00,00	- 13.480.000 ,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			110.099.000,00
	7.01.03. 2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan	0 Pokm as / Orma s	0 Pokm as / Orma s	0,00	0,00	0,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			0,00

			<i>akan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan</i>											
4,	7.01.04	PROGRA M KOORDIN ASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	-	-	-	46.258.5 40,00	46.258.3 50,00	90.903.3 50,00	0,00					46.258.540,00
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025										PRAKIRAAN MAJU
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.04. 2.01	Koordin asi Upaya Penyele nggaraa	<i>Persenta se Linmas Aktif</i>	-	100 %	46.258.5 40,00	46.258.3 50,00	90.903.3 50,00	44.644.810 ,00		-	- -		46.258.540,00

		n Ketenter aman dan Ketertib an Umum												
	7.01.04. 2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n</i>	0 Lapor an	12 Lapor an	46.258.5 40,00	46.258.3 50,00	90.903.3 50,00	44.644.810 ,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		46.258.540,00
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELE NGGARAA N URUSAN PEMERIN	-	-	-	47.500.0 00,00	47.499.9 50,00	47.499.9 50,00	0,00					47.500.000,00

		TAHAN UMUM												
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	100 %	47.500.000,00	47.499.950,00	47.499.950,00	-50,00		-	-	-		47.500.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak</i>	0 Dokumen	5 Dokumen	47.500.000,00	47.499.950,00	47.499.950,00	-50,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.500.000,00

			Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											
		KELURAHAN CITAMIANG				265.162.000,00	355.400.000,00	370.400.000,00	105.238.000,00					390.940.000,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				265.162.000,00	355.400.000,00	370.400.000,00	105.238.000,00					390.940.000,00
	7.01	KECAMATAN				265.162.000,00	355.400.000,00	370.400.000,00	105.238.000,00					390.940.000,00
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025										PRAKIRAAN MAJU
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	265.162.000,00	355.400.000,00	370.400.000,00	125.778.000,00					390.940.000,00

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	-	100 persen	265.162.000,00	355.400.000,00	370.400.000,00	105.238.000,00		-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya		390.940.000,00
--------------	---------------------------------	--	---	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	---	--	--	----------------

												Kre atif & Ino vati f		
7.01.03. 2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan</i>	0 Pokm as / Orma s	3 Pokm as / Orma s	0,00	355.400. 000,00	370.400. 000,00	370.400.00 0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda ya Kreat if & Inova tif Penin gkata n		390.940.000,00

												Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		
		KELURAHAN TIPAR				290.362.000,00	380.600.000,00	380.600.000,00	90.238.000,00					418.066.000,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				290.362.000,00	380.600.000,00	380.600.000,00	90.238.000,00					418.066.000,00
	7.01	KECAMATAN				290.362.000,00	380.600.000,00	380.600.000,00	90.238.000,00					418.066.000,00
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025										
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SEDANG	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA			NASIONAL	DAERAH		

		KEGIATAN	KEGIATAN					HAN 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	290.362.000,00	380.600.000,00	380.600.000,00	127.704.000,00					418.066.000,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	-	100 Persen	290.362.000,00	380.600.000,00	380.600.000,00	90.238.000,00		-	- -		418.066.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan</i>	0 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	0,00	380.600.000,00	380.600.000,00	380.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA	-	- -		418.066.000,00

			Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan							TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M				
		KELURAHAN GEDONG PANJANG				224.962. 000,00	315.200. 000,00	315.200. 000,00	90.238.000 ,00					346.720.000,00
	7	UNSUR KEWILAY AHAN				224.962. 000,00	315.200. 000,00	315.200. 000,00	90.238.000 ,00					346.720.000,00
	7.01	KECAMAT AN				224.962. 000,00	315.200. 000,00	315.200. 000,00	90.238.000 ,00					346.720.000,00
1,	7.01.03	PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	-	-	-	224.962. 000,00	315.200. 000,00	315.200. 000,00	121.758.00 0,00					346.720.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / /	INDIKATO R PROGRA M /	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU				
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	-	100 Persen	224.962.000,00	315.200.000,00	315.200.000,00	90.238.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		346.720.000,00

												Dengan Peng uatan Buda ya Kreat if & Inovat if		
	7.01.03. 2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan	0 Pokm as / Orma s	3 Pokm as / Orma s	0,00	315.200. 000,00	315.200. 000,00	315.200.00 0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Menin gkatka n Sumbe r Daya Manus ia Yang Berku alitas Dan Berday a Saing	Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda ya Kreat if & Inova tif Penin gkata		346.720.000,00

												n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda ya Kreat if & Inovat if		
		KELURAHAN NANGGELENG				402.362. 000,00	452.600. 000,00	452.600. 000,00	50.238.000 ,00					492.836.200,00
	7	UNSUR KEWILAY AHAN				402.362. 000,00	452.600. 000,00	452.600. 000,00	50.238.000 ,00					492.836.200,00
	7.01	KECAMAT AN				402.362. 000,00	452.600. 000,00	452.600. 000,00	50.238.000 ,00					492.836.200,00
1,	7.01.03	PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	-	-	-	402.362. 000,00	452.600. 000,00	452.600. 000,00	90.474.200 ,00					492.836.200,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku ra ng (10- 12)	SU MB ER DA NA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024			NASIO NAL	DAER AH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n	Persent ase Terlaks ananya Pember dayaan Masyar akat	-	100 %	402.362. 000,00	452.600. 000,00	452.600. 000,00	50.238.000 ,00		-	Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda ya Kreat if & Inova tif Penin gkata		492.836.200,00

												n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda ya Kreat if & Inovat if		
7.01.03. 2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan</i>	0 Pokm as / Orma s	2 Pokm as / Orma s	0,00	452.600. 000,00	452.600. 000,00	452.600.00 0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI	-	Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda		492.836.200,00

										UMU M		ya Kreat if & Inova tif Penin gkata n Kuali tas Pelay anan Publi k Deng an Peng uatan Buda ya Kreat if & Inovat if		
		KELURAHAN CIKONDANG				310.562. 000,00	360.800. 000,00	360.800. 000,00	50.238.000 ,00					0,00
	7	UNSUR KEWILAY AHAN				310.562. 000,00	360.800. 000,00	360.800. 000,00	50.238.000 ,00					0,00
	7.01	KECAMAT AN				310.562. 000,00	360.800. 000,00	360.800. 000,00	50.238.000 ,00					0,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Citamiang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citamiang Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi serta Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi periode tahun 2005-2025 yaitu *“Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.”* Dengan tema Pembangunan Tahun 2024 *“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”*. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Citamiang yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Citamiang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Kecamatan Citamiang pada tahun 2024 merupakan hasil telaahan dan kajian dari data dan informasi serta fakta yang terjadi. Sesuai dengan hakikat pembangunan, maka partisipasi seluruh komponen (*stakeholders*) mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasannya merupakan aspek yang patut menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan di wilayah, sehingga masyarakat dan aparat pemerintah yang berdaya menjadi prasyarat utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati bersama.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Citamiang untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Citamiang dan RPJMD Kota Sukabumi.

4.1. Catatan Penting dalam Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Citamiang Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Kota Sukabumi di Tahun 2024-2026. Renja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Citamiang Tahun 2024.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang produktif, disiplin, serta bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Citamiang Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024. Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat di wilayah. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Penjabaran Renja ke dalam RKA perlu dilakukan dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian program;
2. Renja Kecamatan Citamiang Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu berdasarkan hasil rumusan Musrenbang di tiap-tiap kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
3. Rencana Kerja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi;

4. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan. Dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan;
5. Rencana Kerja Kecamatan Citamiang Tahun 2024, di dalam proses penyusunannya memperhatikan pedoman dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPD Kota Sukabumi dan Renstra Kecamatan Citamiang;

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Dalam pelaksanaannya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan;

4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 ini dapat kami sampaikan, semoga perencanaan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Citamiang Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

DD. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BAROS KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2024, penambahan anggaran dan pergeseran anggaran sehingga akan berdampak pada berubahnya beberapa output indikator kinerja program /kegiatan/subkegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Adapun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baros Kota Sukabumi dilakukan karena berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan rencana kerja Kecamatan Baros Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target yang

sudah ditentukan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode tahun berkenaan. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Perubahan Renja Kecamatan Baros Tahun 2024. Selain itu, dalam proses penyusunannya, harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung.

Dari penjelasan diatas maka Kecamatan Baros Kota Sukabumi membuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Kota Sukabumi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baros Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2024 (Tambahan Lembaran Daerah kota sukabumi Tahun 2021 Nomor 1;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042;
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2024
13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk mewujudkan Konsistensi dan sinergi perencanaan dan

penganggaran Kecamatan Baros. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II, adanya kondisi renja yang menunjukkan ketidak sesuaian dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

1.3.2. Tujuan

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan baik penambahan, pergeseran ataupun pengurangan;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan diatasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baros disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

Memuat rencana perubahan anggaran program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Perubahan Renja Kecamatan Baros Tahun 2024 dan Capaian Renstra Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Baros. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kecamatan Baros Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Matrik Pengendalian Kecamatan Baros Tahun 2024

Perangkat Daerah : KECAMATAN BAROS
Triwulan : TRIWULAN II

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)			ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI		SUMBER PENDANAAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	%
		Indikator	Satuan	Target		K (%)	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.7.01.0.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen	100	6.302.973.891	45,61	3.398.981.672				53,93%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	4.398.150	83,33	3.523.150				80,11%
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.199.100	1	2.324.100	APBD			73%
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	599.700	3	599.700	APBD			100%
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	599.350	1	599.350	APBD			100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase keterseidaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	5.067.810.391	64,71	2.776.840.395				54,79%
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	5.066.313.241	8	2.775.343.245	APBD			54,78%

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)			ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI		SUMBER PENDANAAN	PERMASALAHAN	ALTER NATIF SOLUSI	%
		Indikator	Satuan	Target		K (%)	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	499.050	1	499.050	APBD			100%
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	499.050	1	499.050	APBD			100%
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	499.050	1	499.050	APBD			100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	26.999.800	1,50	14.500.000				53,70%
2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	14.500.000	3	14.500.000	APBD			100,00%
2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	12.499.800	0	0	APBD			0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	168.138.050	66,67	77.659.354				46,19%
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.352.500	6	1.727.500	APBD			51,53%
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	37.796.500	2	24.368.300	APBD			64,47%
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	1.000.000	4	525.000	APBD			52,50%
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	4.874.050	3	2.030.050	APBD			41,65%

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)			ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI		SUMBER PENDANAAN	PERMASALAHAN	ALTER NATIF SOLUSI	%
		Indikator	Satuan	Target		K (%)	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	61.460.000	2	33.915.000	APBD			55,18%
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	59.655.000	0	15.093.504	APBD			25,30%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	82.370.000	0,50	66.000.000				80,13%
2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	APBD			100,00%
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	57.370.000	0	41.000.000	APBD			71,47%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	807.315.500	51,02	403.339.573				49,96%
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.030.000	6	520.000	APBD			50,49%
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.399.900	6	40.607.107	APBD			41,27%
2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan/Ora ng	12	192.000.000	6	96.000.000	APBD			50,00%
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	13	515.885.600	7	266.212.466	APBD			51,60%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	145.942.000	51,52	57.119.200				39,14%
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	117.110.000	12	54.319.200	APBD			46,38%

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)			ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI		SUMBER PENDANAAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	%
		Indikator	Satuan	Target		K (%)	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kali	5	2.800.000	5	2.800.000	APBD			100,00%
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	26.032.000	0	0	APBD			0,00%
7.01.0.00 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	1.148.412.850	50,00	62.239.700				5,42%
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.109.163.800	0,00	22.990.650				2,07%
2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	40	1.059.022.500	0	0	APBD			0,00%
2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	50.141.300	0	22.990.650	APBD			45,85%
7.01.02.2 .02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	39.249.050	100	39.249.050				100,00%
2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	4	33.999.450	4	33.999.450	APBD			100,00%
2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5.249.600	1	5.249.600	APBD			100,00%

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)			ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI		SUMBER PENDANAAN	PERMASALAHAN	ALTER NATIF SOLUSI	%
		Indikator	Satuan	Target		K (%)	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.7.01.0.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persen	100	1.547.548.750	37,50	624.711.698				40,37%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	80.033.150	50,00	40.287.550				50,34%
2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	80.033.150	2	40.287.550	APBD			50,34%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	1.467.515.600	25,00	584.424.148				39,82%
2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	34.515.600	0	0	APBD			0,00%
2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	4	1.433.000.000	2	584.424.148	APBD			40,78%
7.01.7.01.0.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	66.532.950	16,67	27.335.150				41,09%
7.01.04.1.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	8.610.000	33,33	1.645.000				19,11%
2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	8.610.000	1	1.645.000	APBD			19,11%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	57.922.950	0,00	25.690.150				44,35%

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)			ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI		SUMBER PENDANAAN	PERMASALAHAN	ALTER NATIF SOLUSI	%
		Indikator	Satuan	Target		K (%)	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	57.922.950	0	25.690.150	APBD			44,35%
7.01.7.01.0.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	19.616.400	16,67	6.955.300				35,46%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	19.616.400	16,67	6.955.300				
2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	3	7.289.300	0	0	APBD			0,00%
2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	3	12.327.100	1	6.955.300	APBD			56,42%
JUMLAH					9.085.084.841		4.120.223.520				45,35%

Sumber Data : SPJ Fungsional Bulan Juni 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 Matrik Pengendalian diatas dapat diketahui Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Baros sampai Triwulan II tahun 2024. Hasil evaluasi pengendalian Capaian Realisasi Anggaran tersebut, dapat dilihat kemampuan capaian realisasi di setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 6.302.973.891,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 3.398.981.672,- untuk subkegiatan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota hingga triwulan II rata – rata sudah mencapai 53,93% dari target indikator capaian kinerja program 100%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 1.148.412.850,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 62.239.700,-. untuk subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sudah mencapai 5,42% dari target indikator capaian kinerja Program 100% Sedikit Rendah capaian Realisasi nya dikarenakan untuk subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yaitu hibah P2RW karena kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di triwulan II ini dan mempengaruhi Pencapaian Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang relatif rendah.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 1.547.548.750,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 624.711.698,-. untuk subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sudah mencapai 40,37% dari target indikator capaian kinerja Program 100%. Sedikit Rendah capaian Realisasi nya dikarenakan untuk subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu dana Kelurahan karena ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di triwulan II ini dan mempengaruhi Pencapaian Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang relatif rendah.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 66.532.950,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 27.335.150,-. untuk subkegiatan dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum belum mencapai 41,09% target indikator Capaian kinerja program/kegiatan/ subkegiatan dikarenakan adanya kendala teknis perbendaharaan.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 19.616.400,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 6.955.300,-. untuk subkegiatan dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum belum mencapai 35,46%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baros didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK. Pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2023 - 2024
Kota Sukabumi

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP Kecamatan Baros	✓	✓	B	B	B	B	B		B	B	
2	nilai SAKIP Kecamatan Baros	✓	✓	83,35	84	65.35	67	66.26	67,11	65.35	67	Realisasi SAKIP tahun 2022 belum mencapai target (17,09%) karena penentuan target terlalu tinggi
3	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kecamatan Baros	✓	✓	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	✓	✓	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	100	100	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	✓	✓	n/a	n/a	50	60	n/a	n/a	50	60	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	✓	✓	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	100	100	
7	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	✓	✓	n/a	n/a	50	65	n/a	n/a	50	65	
8	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	✓	✓	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	100	100	

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2.2 dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Baros telah mengalami kenaikan dalam persentase indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target sedangkan pencapaian target kinerja pada indikator lainnya telah mencapai target.

2.3 Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Baros

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah Kecamatan yang meliputi: potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Kota Sukabumi;
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima, yaitu pelayanan yang cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum. Dengan pelayanan prima tersebut diharapkan dapat membangun kembali citra PNS yang mahir, terampil, bersih

dan berwibawa sebagai pelayan, pengayom dan pembimbing masyarakat.

- d. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas SDM kecamatan. Aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi. Oleh karenanya, maka dari sisi kuantitas dan kualitas SDM yang ada harus memadai dalam rangka mewujudkan citra PNS dan penyelenggaraan pelayanan yang baik;
- e. Peningkatan kegiatan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/pihak terkait dan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan hanya sebagai koordinator yang berdampak pada terbatasnya kewenangan dan berlanjut kepada kurang maksimalnya perencanaan program dan kegiatan.
- f. Risiko bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Baros seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan atau bencana lainnya harus menjadi bagian dalam perencanaan alokasi anggaran sebagai bagian dari upaya pengendalian dan penanggulangan bencana.
- g. Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Kecamatan Baros dapat mendukung terhadap peningkatan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Wali kota Sukabumi No 80 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi bahwa kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sudah diatur oleh Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 dan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 184 Tahun 2004, namun belum seluruh anggaran kegiatan juga kewenangan yang diimpahkan

oleh Wali Kota bisa dilaksanakan langsung oleh setiap pembuat rencana kegiatan di Tingkat Kecamatan.

Permasalahan dan hambatan dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Namun demikian sudah merupakan komitmen seluruh Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan serta upaya mengatasinya antara lain:

1. Kewenangan Pemerintahan yang diberikan Wali Kota Sukabumi kepada Camat pada dasarnya merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah, namun penyerahan kewenangan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan personel, perlengkapan dan pembiayaannya. Begitu pula dari aspek pembinaan teknis terkait belum dilaksanakan. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan Peraturan Wali Kota Sukabumi No 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tupoksi dan Tata Kerja Kecamatan untuk mengatasi Kepuasan Masyarakat, meningkatkan kualitas SDM yang ada mengoptimalkan pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan mekanisme pelayanan yang jelas dan baku
2. Keterbatasan Anggaran yang diterima Kecamatan Baros belum seluruhnya dapat menunjang rencana kegiatan yang telah disusun oleh setiap Kepala Seksi upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggali potensi yang sifatnya tidak mengikat.

2.4 Review Perubahan RKPD Kecamatan Baros Kota Sukabumi

Review perubahan RKP Kecamatan Baros Kota Sukabumi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel TC. 3.1 dibawah ini:

Tabel TC. 3.1.
Review RKPD Perubahan Kecamatan Baros Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baros

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Baros	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	6.173.556.303	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Baros	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	6.389.197.791	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Baros	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100	4.398.450	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Baros	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100	4.398.150	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3.199.150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3.199.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	599.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	599.750	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	599.550	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	599.550	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Baros	persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	5.109.423.181	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Baros	persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	5.067.810.391	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	5.107.926.031	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	5.066.313.241	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	499.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	499.050	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	499.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	499.050	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	499.050	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	499.050	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Baros	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	27.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Baros	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	49.199.800	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	14.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	36.700.000	Adanya kebijakan untuk penggunaan batik khas Kota Sukabumi
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71	12.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71	12.499.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baros	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	86.215.502	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baros	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	190.107.950	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	3.352.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	3.352.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	28.798.552	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	47.796.400	Peningkatan pelayanan kinerja dan pelaksanaan PILKADA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	1.012.250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	1.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	4.874.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	4.874.200	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	38.493.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	73.430.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	9.685.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	59.655.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Baros	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	22.459.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Baros	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	106.224.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	5.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	35.000.000	Peningkatan pelayanan kinerja dan pelaksanaan PILKADA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	17.459.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	71.224.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baros	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	784.871.620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baros	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	812.315.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.037.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.030.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	98.399.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	103.399.900	Penambahan daya listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	192.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	192.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	493.434.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	515.885.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baros	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	139.188.250	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baros	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	159.142.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	95.253.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	117.110.000	Masih terdapat perlatan danmesin yang belum terpelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	2.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	13,840.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	41.095.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	28,192,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baros	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	100	1.121.113.733	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baros	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	100	1.151.282.850	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baros	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	1.081.864.283	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baros	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	1.112.033.800	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	1.033.722.783	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	1.064.272.500	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	48.141.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	47.761.300	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Baros	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	39.249.450	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Baros	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	39.249.050	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	33.999.750	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	33.999.450	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	5.249.700	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	5.249.600	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baros	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100	1.237.211.823	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baros	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100	1.550.413.150	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baros	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	94.033.423	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baros	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	92.413.150	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	94.033.423	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	92.413.150	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baros	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	1.143.178.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baros	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	1.458.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	47.730.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	34.515.600	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	172	375.162.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	172	470.600.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jayaraksa	120	232.362.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jayaraksa	120	325.400.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jayamekar	137	214.962.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jayamekar	137	335.400.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sudajaya Hilir	40	272.962.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sudajaya Hilir	40	326.600.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baros	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100	39.481.098	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baros	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100	83.557.950	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baros	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	1.627.948	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baros	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	8.610.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	3	1.627.948	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	3	8.610.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baros	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	37.853.150	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baros	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	74.947.950	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	37.853.150	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	74.947.950	Tenggap darurat bencana
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baros	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	16.626.710	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baros	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	19.616.400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baros	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	16.626.710	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baros	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	19.616.400	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	7.289.405	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	7.289.300	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3	9.337.305	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3	12.327.100	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut sebagaimana dijelaskan pada BAB II sebagai bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya realisasi pencapaian target dan anggarannya belum tercapai optimal. Meskipun secara output realisasi program tercapai 100% namun capaian anggaran tidak akan terserap seluruhnya, atau kemungkinan dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target kinerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, agar pencapaian target lebih optimal perlu dilakukan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target kinerjanya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/ kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya penambahan, pengurangan atau pergeseran anggaran. rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2024 setelah dilakukan rasionalisasi anggaran untuk perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan Pergeseran dan Penambahan anggaran perubahan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif. Penyajian tabel Perubahan Rencana Kerja secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Anggaran Perubahan Kecamatan Baros Tahun 2024

No	Unit Organisasi	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
1	Kecamatan Baros	7.652.084.841	7.770.583.741	118.498.900
2	Kelurahan Baros	470.600.000	470.600.000	0.00
3	Kelurahan Jayaraksa	325.400.000	325.400.000	0.00
4	Kelurahan Jayamekar	310.400.000	335.400.000	25.000.000
5	Kelurahan Sudajaya Hilir	326.600.000	326.600.000	0.00
J U M L A H		9.085.084.841	9.228.583.741	143.498.900

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Baros Kota Sukabumi
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Baros
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Baros

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H				
	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	13	1 4	1 5	1 6	1 7	18	1 9	2 0	21
		KECAMATAN BAROS								7.492.541.667,00	7.652.084.841,00	7.770.583.741,00	278.042.074,00						8.214.431.812,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							7.492.541.667,00	7.652.084.841,00	7.770.583.741,00	278.042.074,00							8.214.431.812,00	
7.01		KECAMATAN							7.492.541.667,00	7.652.084.841,00	7.770.583.741,00	278.042.074,00							8.214.431.812,00	
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	6.173.556.303,00	6.302.973.891,00	6.389.197.791,00	616.255.660,00							6.789.811.963,00	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.398.450,00	4.398.150,00	4.398.150,00	-300,00			-	-	Ke ca ma tan		4.838.295,00	KECAMAT AN BAROS
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2 Dokumen	3.199.150,00	3.199.100,00	3.199.100,00	-50,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.519.065,00	KECAMAT AN BAROS

[illegible]

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Juml ah Oran g yang Men erim a Gaji dan Tunj anga n ASN				0 Orang/ bulan	35 Oran g/b ulan	5.107.926.031,00	5.066.313.241,00	5.066.313.241,00	41.612.790,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.618.718.634,00	KECAMAT AN BAROS	
	7.01.01.2. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Lapora n	1 Lapora n	499.050,00	499.050,00	499.050,00	0,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			548.955,00	KECAMAT AN BAROS	
	7.01.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				0 Lapora n	1 Lapora n	499.050,00	499.050,00	499.050,00	0,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			548.955,00	KECAMAT AN BAROS	

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H				
	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	13	1 4	1 5	1 6	1 7	18	1 9	2 0	21
			Bulan/triwula na nSemesteran SKPD																	
	7.01.01.2. 02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokum en	1 Dokum en	499.050,00	499.050,00	499.050,00	0,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			548.955,00	KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	27.000.000,00	26.999.800,00	49.199.800,00	22.199.800,0 0			-	- -	Ke ca ma tan		29.700.000,00	KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	3 Paket	14.500.000,00	14.500.000,00	36.700.000,00	22.200.000,0 0	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			15.950.000,00	KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	71 Orang	12.500.000,00	12.499.800,00	12.499.800,00	-200,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			13.750.000,00	KECAMAT AN BAROS

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAAN CAPAI AN TARG ET RENUA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H					
																					8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Admini strasi Umum Peran gkat Daera h	-				-	-	86.215.502,00	168.138.050,00	190.107.950,00	103.892.448,00		1	5	6	7	Ke ca ma tan		94.837.082,00	KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	12 Paket	3.352.500,00	3.352.500,00	3.352.500,00	0,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			3.687.750,00	KECAMAT AN BAROS	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	3 Paket	28.798.552,00	37.796.500,00	47.796.400,00	18.997.848,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			31.678.407,00	KECAMAT AN BAROS	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n					0 Paket	7 Paket	1.012.250,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-12.250,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			1.113.475,00	KECAMAT AN BAROS	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2022	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	6 Paket	4.874.200,00	4.874.050,00	4.874.050,00	-150,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.361.620,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	4 Laporan	38.493.000,00	61.460.000,00	73.430.000,00	34.937.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.342.300,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	9.685.000,00	59.655.000,00	59.655.000,00	49.970.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.653.530,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.459.300,00	82.370.000,00	106.224.000,00	83.764.700,00			-	-	Kecamatan		30.205.230,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJ A OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJ A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN A TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	5.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	17.459.300,00	57.370.000,00	71.224.000,00	53.764.700,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.205.230,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	784.871.620,00	807.315.500,00	812.315.500,00	27.443.880,00			-	-	Kecamatan		863.358.782,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	12 Laporan	1.037.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-7.000,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.140.700,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan	12 Laporan	98.399.920,00	98.399.900,00	103.399.900,00	4.999.980,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			108.239.912,00	KECAMATAN BAROS	

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NAS ION AL				D A E R A H	
	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	13	1 4	1 5	1 6	1 7	18	1 9	2 0	21
			yang Disediakan																	
	7.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Lapora n	12 Lapora n	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		211.200.000,00		KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Lapora n	13 Lapora n	493.434.700,00	515.885.600,00	515.885.600,00	22.450.900,0 0	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		542.778.170,00		KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	139.188.250,00	145.942.000,00	159.142.000,00	19.953.750,0 0			-	- -	Ke ca ma tan	146.507.075,00		KECAMAT AN BAROS
	7.01.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit	23 Unit	95.253.250,00	117.110.000,00	117.110.000,00	21.856.750,0 0	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		114.678.575,00		KECAMAT AN BAROS

N C	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PER IODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJ A OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU REN CAN A TAH UN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya										a							
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara				0 Unit	5 Unit	2.840.000,00	2.800.000,00	13.840.000,00	11.000.000,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.124.000,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				0 Unit	5 Unit	41.095.000,00	26.032.000,00	28.192.000,00	12.903.000,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.704.500,00	KECAMATAN BAROS
2	7.01.02	PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	1.121.113.733,00	1.148.412.850,00	1.151.282.850,00	103.916.703,00							1.225.030.436,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan di Tingkat	-				-	-	1.081.864.283,00	1.109.163.800,00	1.112.033.800,00	30.169.517,00			-	-	Kecamatan dan Kelurahan		1.187.630.711,00	KECAMATAN BAROS

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NAS ION AL			D A E R A H		
	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	13	1 4	1 5	1 6	1 7	18	1 9	2 0	21
		Kecamatan																		
	7.01.02.2. 01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
		Jumlah Laporan Koordina si/Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerint ahan dengan Perangk at Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Lapora n	4 Lapora n		1.033.722.783,00	1.059.022.500,00	1.064.272.500,00	30.549.717,0 0	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			1.132.475.061, 00	KECAMAT AN BAROS
	7.01.02.2. 01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				0 Dokum en	1 Dokum en		48.141.500,00	50.141.300,00	47.761.300,00	-380.200,00	Kota Sukabu mi, Baros, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	- -			55.155.650,00	KECAMAT AN BAROS

[illegible]

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL		D A E R A H			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	94.033.423,00	80.033.150,00	92.413.150,00	-1.620.273,00			-	-	Kecamatan		88.036.765,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0 Laporan	4 Laporan	94.033.423,00	80.033.150,00	92.413.150,00	-1.620.273,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.036.765,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	47.730.400,00	34.515.600,00	34.515.600,00	13.214.800,00			-	-	Kecamatan dan Kelurahan		42.603.440,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	47.730.400,00	34.515.600,00	34.515.600,00	13.214.800,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.603.440,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N C	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJ A OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJ A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN A TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESAU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	39.481.098,00	66.532.950,00	83.557.950,00	29.468.110,00							68.949.208,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	1.627.948,00	8.610.000,00	8.610.000,00	6.982.052,00			-	-	Kecamatan		9.490.743,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaa n Harmonisas iHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					0 Laporan	3 Laporan	1.627.948,00	8.610.000,00	8.610.000,00	6.982.052,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			9.490.743,00	KECAMATAN BAROS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	-				-	-	37.853.150,00	57.922.950,00	74.947.950,00	37.094.800,00			-	-	Kecamatan		59.458.465,00	KECAMATAN BAROS

[illegible]

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	0 Orang	7.289.405,00	7.289.300,00	7.289.300,00	-105,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN BAROS	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	0 Orang	9.337.305,00	12.327.100,00	12.327.100,00	2.989.795,00	Kota Sukabumi, Baros, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN BAROS	
		KELURAHAN BAROS								375.162.000,00	470.600.000,00	470.600.000,00	95.438.000,00						0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							375.162.000,00	470.600.000,00	470.600.000,00	95.438.000,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							375.162.000,00	470.600.000,00	470.600.000,00	95.438.000,00							0,00		

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												0								
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	375.162.000,00	470.600.000,00	470.600.000,00	375.162.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	Terciptanya Pokmas dan Ormas Yang Mengikuti Pemberdaya an Masyarakatdi Kelurahan				-	100 %	375.162.000,00	470.600.000,00	470.600.000,00	95.438.000,00		-	- -		Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan		0,00	KECAMAT AN BAROS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberdaya an Masyarakatdi Kelurahan				-	4 Pokm as / Orma s	0,00	470.600.000,00	470.600.000,00	470.600.000,00	Kota Sukabu mi, Baros, Baros	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMAT AN BAROS
		KELURAHAN JAYARAKSA							232.362.000,00	325.400.000,00	325.400.000,00	93.038.000,00						0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							232.362.000,00	325.400.000,00	325.400.000,00	93.038.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							232.362.000,00	325.400.000,00	325.400.000,00	93.038.000,00							0,00	

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	232.362.000,00	325.400.000,00	325.400.000,00	232.362.000,00							0,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Pemberdaya an Masyarakatdi Kelurahan				-	100 %	232.362.000,00	325.400.000,00	325.400.000,00	93.038.000,00		-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan		0,00	KECAMAT AN BAROS	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdaya an Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokm as / Orma s	4 Pokm as / Orma s	0,00	325.400.000,00	325.400.000,00	325.400.000,00	Kota Sukabu mi, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan			0,00	KECAMAT AN BAROS

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B ekurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL					D A E R A H
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Budaya Kreatif & Inovatif				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun anggaran 2024.

Kecamatan Baros wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Baros Tahun sebelumnya untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkupnya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baros tahun berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baros Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam upaya akselerasi pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi. Untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maka peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pembangunan di Kecamatan Baros.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baros Tahun 2024 ini disusun semoga dapat diimplementasikan dengan baik.

EE. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIBEUREUM KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dibuat sebagai penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Secara konstitusional penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sampai tingkatan yang terbawah. Sebagai ujung tombak dan lini terdepan Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dalam mewujudkan tujuan dimaksud.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom disetiap daerah memungkinkan untuk berinovasi dalam upaya meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis sebagai upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan agenda Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum berkaitan dengan proses Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024. Kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024 akan menjadi acuan kebijakan penyusunan program dan kegiatan penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Cibeureum di Tahun

2024. Selain itu rencana pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Cibeureum di Tahun 2024-2026 juga menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengintegrasikan Renja Kecamatan Cibeureum yang telah mengakomodir kegiatan usulan masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.

Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 merupakan dari rangkaian proses penyusunan Anggaran Belanja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024, dengan kata lain program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan yang dibuat oleh APBD harus dirumuskan secara jelas dan terukur, baik output maupun outcome-nya.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, yaitu dengan melalui empat (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat

dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada arahan kebijakan yang tercantum dalam Surat Edaran Wali Kota Sukabumi Nomor: KU.01.01.01/959/IV/1/BAPPEDA/2024 Tentang Penyusunan Usulan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perubahan Renja dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. Usulan perubahan ditujukan terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, serta penyesuaian Silpa hasil audit BPK yang mesti dibelanjakan;
3. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan diutamakan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah serta pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
4. Adanya kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya;
5. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2024; dan
6. Pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (Renja) di koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.

Perubahan Rencana Kerja ini berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui,

memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan selama tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan

anggaran Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kecamatan;
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan

II adanya kondisi yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Cibeureum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan di atasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Cibeureum Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 dan Analisis Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cibeureum

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya;

BAB IV Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIBEUREUM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 dan Capaian Renstra Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 - 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Cibeureum, sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Matrik Pengendalian Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Cibeureum

Triwulan : II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II				Sumber Pendanaan
		Indikator	Satuan	Target		Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen	100	7.251.042.664	46	45,79	3.753.789.033	51,77	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	4.574.600	20	20,00	900.000	19,67	APBD
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1.805.000	0	0,00	-	0,00	APBD
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	624.600	0	0,00	-	0,00	APBD

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	730.000	0	0,00	-	0,00	APBD
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	515.000	0	0,00	-	0,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	900.000	5	100,00	900.000	100,00	APBD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	5.856.416.064	50	50,00	3.054.826.595	52,16	APBD
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	5.850.679.564	41	100,00	3.052.406.595	52,17	APBD

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.440.000	5	100,00	2.420.000	99,18	APBD
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	1.811.500	0	0,00	-	0,00	APBD
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	1.485.000	0	0,00	-	0,00	APBD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	159.120.300	73	73,33	53.530.301	33,64	APBD
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	2.064.000	1	100,00	2.064.000	100,00	APBD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	35.859.000	4	66,67	17.476.500	48,74	APBD

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	4.962.300	2	66,67	3.124.801	62,97	APBD
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	81.855.000	1	33,33	17.595.000	21,50	APBD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	34.380.000	2	100,00	13.270.000	38,60	APBD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100.420.000	23	23,08	85.000.000	84,64	APBD
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	85.420.000	6	46,15	85.000.000	99,51	APBD
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	15.000.000	0	0,00	-	0,00	APBD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	931.127.700	75	75,00	471.710.237	50,66	APBD
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	0	0,00	1.500.000	100,00	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	3	79.997.500	3	100,00	33.294.153	41,62	APBD

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	132.000.000	1	100,00	66.000.000	50,00	APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	717.630.200	2	100,00	370.916.084	51,69	APBD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	199.384.000	33	33,33	87.821.900	44,05	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	199.384.000	10	33,33	87.821.900	44,05	APBD
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	80	1.216.914.275	50	62,50	64.738.075	5,32	APBD
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	1.180.037.400	0	0,00	28.146.200	2,39	APBD

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	16	1.128.980.000	0	0,00	13.955.000	1,24	APBD
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	51.057.400	0	0,00	14.191.200	27,79	APBD
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	36.876.875	100	100,00	36.591.875	99,23	APBD
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	3	36.876.875	3	100,00	36.591.875	99,23	APBD
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persen	31	1.667.417.200	5	16,13	599.769.899	35,97	APBD

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	126.390.200	10	100,00	55.373.400	43,81	APBD
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	126.390.200	1	10,00	55.373.400	43,81	APBD
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.541.027.000	0	0,00	544.396.499	35,33	APBD
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pokmas	4	33.627.000	0	0,00	-	0,00	APBD
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	11	1.507.400.000	0	0,00	544.396.499	36,11	APBD
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	75	42.286.400	100	100,00	27.544.400	65,14	APBD
7.01.04.2.01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Linmas Aktif se Kecamatan Cibeureum	Persen	100	42.286.400	100	100,00	27.544.400	65,14	APBD

7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	42.286.400	2	100,00	27.544.400	65,14	APBD
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	30.221.875	17	16,67	9.518.875	31,50	APBD
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	30.221.875	17	16,67	9.518.875	31,50	APBD
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	42	3.784.375	21	50,00	1.894.375	50,06	APBD

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	42	22.800.000	0	0,00	5.999.500	26,31	APBD
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	3.637.500	0	0,00	1.625.000	44,67	APBD
Jumlah					10.207.882.414	43,49	48,22	4.455.360.282	43,65	APBD

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2024
Kota Sukabumi (T-C.29)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024		
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
7	0	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	98,11%	100	100	100	
7	0	1	0	1	2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100	
7	0	1	0	1	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok/ Buku	5	6	5	5	100%	100	37	740
7	0	1	0	1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok/ Buku	5	3	4	4	100%	100	35	700

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024		
												Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
7	0	1	0	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok/ Buku	5	4	5	5	100%	100	35	700
7	0	1	0	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok/ Buku	5	-	-	-	100%	100	33	-
7	0	1	0	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap / Buku	5	10	10	10	100%	100	34	800
7	0	1	0	1	2	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	98,07%	100	100	100
7	0	1	0	1	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	42	40	40	98,07%	100	60	146
7	0	1	0	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	6	6	100%	100	37	740

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
												Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5	3	3	100%	100	36	720
7	0	0	2	0	0		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	5	4	4	100%	100	36	720
7	0	0	2	0	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	0	2	0	0		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	0	2	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100
7	0	0	2	0	0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pcs	-	43	78	54	100%	100	65	-
7	0	0	2	0	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	35	40	40	100	100	58	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Progra m dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwula n II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
										Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaian Progra m dan kegiatan s/d tahun Berjala n 2024	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
701206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	99,91%	100	100	100
7012061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6	2	2	100%	100	35	3500
7012062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	28	31	31	99,91%	100	53	883
7012063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	-	-	-	100%	100	100	-
7012065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	3	3	100%	100	35	1166
7012068	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah dus/Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n/ dus	3	1874	1289	1289	100%	100	38	1166

Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Progra m dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwula n II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024					
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaian Progra m dan kegiatan s/d tahun Berjala n 2024	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)				
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
7	0	1	0	1	2	0	0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap/OH	2	28	160	160	100%	100	237	4800
7	0	1	0	1	2	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	97,55%	100	100	100
7	0	1	0	1	2	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Unit	-	-	1	1	100%	100	100	-
7	0	1	0	1	2	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	3	5	5	96,47%	100	36	276
7	0	1	0	1	2	0	7	0	7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	-	1	1	100%	100	100	-
7	0	1	0	1	2	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	97,45%	100	100	100
7	0	1	0	1	2	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	1	200	12	12	100%	100	125	3125

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah yang Disediakan	Laporan	3	12	12	12	88,50%	100	36	900
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	11	11	11	100%	100	103	2567
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laopran	1	25	25	25	98,07%	100	180	4492
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	99,63%	100	100	100
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas Kecamatan dan Kelurahan, Mobil K3, Motor K3 yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	30	41	26	26	99,94%	100	61	1525

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Progra m dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwula n II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024		
												Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan kegiatan s/d tahun Berjala n 2024	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstra (%)	
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
7	0	1	0	1	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Unit	-	-	10	12	100%	100	36	-
7	0	1	0	1	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Kecamatan, Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang Diperbaiki	Unit	-	-	3	3	99,42%	100	43	-
7	0	1	0	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	80	100	100	100	100%	200	133	33
7	0	1	0	2	2	0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25

Kode							Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024			
												Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
7	0	1	0	2	2	0	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	16	12	12	12	100%	100	34	858
7	0	1	0	2	2	0	0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	217	217	100%	100	34	850
7	0	1	0	2	2	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	25
7	0	1	0	2	2	0	0	3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	3	5	3	3	100%	100	34	858

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
1							2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	0	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	31	100	100	100	99,71%	100	100	0
7	0	0	2	0			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	99,66%	100	100	25
7	0	0	2	0	0	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	6	10	10	99,66%	100	38	950
7	0	0	2	0			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	100	100	100	100	99,72%	100	100	25
7	0	0	2	0	0	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum	Pokmas	4	1	16	16	97,62%	100	34	850
7	0	0	2	0	0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisarua	Kegiatan	11	1	11	11	99,77%	100	34	850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2024	
										Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
70104						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	75	76	100	100	94,53%	100	100	133
70104201						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	85	100	100	94,54%	100	100	100
701042011						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Laporan	2	1	2	2	100%	100	4	100
70105						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100
70105201						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100

[illegible]

Berdasarkan Tabel 2.1 Matrik Pengendalian diatas dapat kita ketahui Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Cibeureum Sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi pengendalian Capaian Realisasi Anggaran tersebut, maka kita dapat melihat kemampuan capaian realisasi di setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 7.251.042.664,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 3.753.789.033,- untuk subkegiatan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota hingga triwulan II rata – rata sudah mencapai 51,77% dari target indikator capaian kinerja program 100%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 1.216.914.275,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 64.738.075,-. untuk subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sudah mencapai 5,32% dari target indikator capaian kinerja Program 80%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 1.667.417.200,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 599.769.899,-. untuk subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sudah mencapai 35,97% dari target indikator capaian kinerja Program 31%. Sedikit Rendah capaian Realisasi nya dikarenakan untuk subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu dana Kelurahan karena ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di triw II ini dan mempengaruhi Pencapaian Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang relatif rendah.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp42.286.400,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 27.544.400,-. untuk

subkegiatan dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Sudah mencapai 65,14% dari target indikator capaian kinerja Program 75%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Pada Anggaran Belanja Langsung Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024 dengan target anggaran sebesar Rp. 30.221.875,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 9.518.875,-. untuk subkegiatan dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Sudah mencapai 50% dari target indikator capaian kinerja Program 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeureum

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cibeureum didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK. Pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2024 – 2026 (T-C.30)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Kecamatan		IKK	63,5	63,7	64	74,61	74,70	75	75	75	100%
2	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efisien		IKK				100	98,58				100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKK				87,69	87,72				100%
4	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan		IKK				100	100				100%
5	Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan Cibeureum		IKK				40	33,3				100%
6	Persentase Peningkatan		IKK				-	100				100%

	Kapasitas Personil Linmas											
7	Predikat SAKIP Kecamatan		IKK	BB	BB	BB			BB	BB	BB	100%
8	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum		IKK	C	C	C			C	C	C	100%
9	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan Cibeureum		IKK	80	80	80			80	80	80	100%
10	Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan		IKK	100	100	100			100	100	100	100%
11	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja		IKK	55	80	100			80	100	100	100%
12	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan		IKK	75	75	75			75	75	75	100%
13	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		IKK	100	100	100			100	100	100	100%

Sumber Data : Dokumen Renstra 2024 - 2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa Program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Diantaranya yakni Stunting yang menjadi isu Nasional dan Provinsi serta yang menyangkut aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, Aspek Pemerintahan dan Aspek Penataan Ruang, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta dalam upaya menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kota Sukabumi. Isu strategis tersebut adalah :

Kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan;
Infrastruktur dan tata kota;
Daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
Kualitas lingkungan hidup;
Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan,;

Berdasarkan Peraturan Wali kota Sukabumi No 80 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi bahwa kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Camat dalam pelaksanaan tugasnya adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
b. merumuskan...
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
 - g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - h. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sudah diatur oleh Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020, namun belum seluruh anggaran kegiatan juga kewenangan yang dlimpahkan oleh Wali Kota bisa dilaksanakan langsung oleh setiap pembuat rencana kegiatan di Tingkat Kecamatan.

Permasalahan dan hambatan dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Namun demikian sudah merupakan komitmen seluruh Aparat Kecamatan

dan Kelurahan untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan serta upaya mengatasinya antara lain:

1. Kewenangan Pemerintahan yang diberikan Wali Kota Sukabumi kepada Camat pada dasarnya merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah, namun penyerahan kewenangan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan personel, perlengkapan dan pembiayaannya. Begitu pula dari aspek pembinaan teknis terkait belum dilaksanakan. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan Peraturan Wali Kota Sukabumi No 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tupoksi dan Tata Kerja Kecamatan untuk mengatasi
Kepuasan Masyarakat, meningkatkan kualitas SDM yang ada mengoptimalkan pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan mekanisme pelayanan yang jelas dan baku
2. Keterbatasan Anggaran yang diterima Kecamatan Cibeureum belum seluruhnya dapat menunjang rencana kegiatan yang telah disusun oleh setiap Kepala Seksi upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggali potensi yang sifatnya tidak mengikat.

Tabel 2.3 (T-C.31) Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kota Sukabumi

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan perangkat daerah Tahun 2024					Sumber Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.298.455.438	PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.749.526.430	PAD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	4.544.600	PAD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	8.114.600	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.950.000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	4 Dokumen	3.600.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	614.600	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	4 Buku	1.069.600	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	515.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	-	-	PAD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	515.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	5 Buku	1.030.000	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	-	-	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	5 Buku	515.000	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	950.000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Dokumen Lakip	5 Laporan	1.900.000	PAD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/Buku Laporan SPIP SKPD	3 Laporan		PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/Buku Laporan SPIP SKPD	3 Laporan		PAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.820.409.338	PAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.571.682.030	PAD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 OB	5.816.345.588	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	42 OB	5.563.885.530	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.637.500	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	3.100.000	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1.191.250	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	5 Laporan	2.461.500	PAD

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1.235.000	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Prognosis	5 Dokumen	2.235.000	PAD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	-	PAD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu	100%	-	PAD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Kegiatan Penyusunan RKBMD	6 Dokumen		PAD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Kegiatan Penyusunan RKBMD	3 Dokumen		PAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45.000.000	PAD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	PAD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 Paket	35.000.000	PAD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Kaos Olahraga, Pakaian Kerja Lapangan dan Batik		-	PAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41 Org	10.000.000	PAD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95.059.500	PAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	86.070.300	PAD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.514.000	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Kebutuhan Alat listrik dan Penerangan	1 Paket	2.064.000	PAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.651.950	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, Umbul-umbul dan Perlengkapan HUT RI, Peralatan Kebersihan Kantor dan Perlengkapan Petugas Mosam)	1 Paket	35.859.000	PAD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Isi Ulang Tabung Gas Kecamatan	4 Kali		PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Isi Ulang Tabung Gas Kecamatan			PAD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.993.550	PAD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Kebutuhan Cetak, Spanduk dan Penggandaan	2 Paket	4.962.300	PAD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	3 Dokume n		PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia			PAD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	31.750.000	PAD	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Jamuan Makan dan Minum Rapat/Tamu	2 Laporan	30.605.000	PAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	17.150.000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Laporan	12.580.000	PAD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Sewa Web Hosting dan Maintance	4 Dokume n		PAD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Cibeureu m	Sewa Web Hosting dan Maintance			PAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec Cibeureu m	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	35.350.000	PAD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec Cibeureu m	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	23.520.000	PAD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	PAD	Pengadaan Mebel		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Mebeulair	2 Unit	-	PAD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17.850.000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Perengkapan Kantor dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	8.520.000	PAD
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	7.500.000		Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	15.000.000	PAD
	Pengadaan Sarana dam Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Unit		PAD	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Unit	-	PAD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		Pembuatan Taman	2 Unit		PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		Pembuatan Taman		-	PAD

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	890.367.000	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	860.139.500	PAD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	PAD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	84.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	79.997.500	PAD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	135.000.000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	132.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perakntoran (THL) dan Jumlah Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	429 OB	670.367.000	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	646.642.000	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	407.725.000	PAD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cibeureum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	208.725.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	9.000.000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja (Komputer/Laptop ,Printer, Genset dan AC)	12 Unit		PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	190.000.000	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor	5 Unit		PAD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cibeureum	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	1.203.480.000	PAD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cibeureum	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	1.173.414.275	PAD

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cibeureum	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1.179.480.000	PAD	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cibeureum	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1.150.537.400	PAD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.099.480.000	PAD	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.099.480.000	PAD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	80.000.000	PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Perlombaan RT dan RW terbaik Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	51.057.400	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Cibeureum	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	24.000.000	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Cibeureum	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan	100%	22.876.875	PAD
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	24.000.000	PAD	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	22.876.875	PAD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Profil dan Pelaksanaan Surey Ikm	-	-	PAD	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Profil dan Pelaksanaan Surey Ikm	1 Buku		PAD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cibeureum	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	1.500.446.000	PAD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cibeureum	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	1.420.120.040	PAD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cibeureum	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	130.000.000	PAD	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cibeureum	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	126.390.200	PAD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	130.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	126.390.200	PAD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan PKK, PORKOT dan PORPEMKOT	3 Laporan		PAD	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan PKK, PORKOT	10 Laporan		PAD
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Cibeureum	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	1.370.446.000	PAD	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Cibeureum	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	1.293.729.840	PAD
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	4 Lembaga	44.000.000	PAD	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	4 Lembaga Kemasyarakatan	42.027.000	PAD

	musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.326.446.000	PAD		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.251.702.840	PAD
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibeureumhilir	1 Kelurahan	PAD				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibeureumhilir	1 Kelurahan	349.162.000	PAD
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan	1 Kelurahan	PAD				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan	1 Kelurahan	329.018.840	PAD
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Limusnunggal	1 Kelurahan	PAD				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Limusnunggal	1 Kelurahan	326.361.000	PAD
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangpalay	1 Kelurahan	PAD				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangpalay	1 Kelurahan	247.161.000	PAD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec Cibeureum	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	-	PAD		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec Cibeureum	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	-	-	PAD
	Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan	4 Kelurahan	PAD		Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan	-	-	PAD
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan se-Kecamatan Cibeureum	Kec	PAD		Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan se-Kecamatan Cibeureum	-	-	PAD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec Cibeureum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	67.500.000	PAD	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec Cibeureum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100%	42.286.400	PAD

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Cibeureum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	17.500.000	PAD	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Cibeureum	Jumlah Kegiatan Tranitubum dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	100%	42.286.400	PAD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Buku/Dokumen laporan Monitoring Pembangunan Bersama Unsus Muspika di Kecamatan dan Kelurahan	7 Laporan		PAD	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2 Laporan			PAD
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	17.500.000	PAD	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan hari-hari Besar Keagamaan di Tingkat kec dan kel	-	-	PAD
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase linmas aktif se kecamatan Cibeureum	85%	50.000.000		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	50.000.000		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		42.286.400	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Cibeureum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	45.000.000	PAD	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Cibeureum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	30.221.875	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Cibeureum	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	45.000.000	PAD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Cibeureum	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	30.221.875	PAD
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	10.000.000	PAD	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Kegiatan Peringatan Hasi Besar Nasional	100 Orang	3.784.375	PAD
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan	60 Orang	30.000.000		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	60 Orang	22.800.000	

	Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10 Dokumen	5.000.000	PAD	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan di instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan instansi lain	10 Dokumen	3.637.500	PAD	
JUMLAH					10.114.881.438		JUMLAH					9.415.569.020	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 adalah untuk Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah, Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan diatasnya sehingga mendapatkan hasil yang optimal serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan prima agar menghasilkan kinerja yang maksimal.

Adapun sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cibeureum
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum
3. Meningkatnya pemberdayaan di Masyarakat dan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 tahun keempat, dimana telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Pada Rencana Kerja Tahun 2024 ini terdapat 5 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi diantaranya sebagai berikut:

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - 1.1.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.2.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.3.4. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 2.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.4.1. Pengadaan Mebel
 - 2.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2.4.3. Pengadaan Aset Tak Terwujud
 - 2.4.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- 3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 3.1.1. Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 3.1.3. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 4.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 4.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 4.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 4.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 4.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
- 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 5.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 5.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 5.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 5.2.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

5.2.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Perubahan pada program dan kegiatan terjadi pada beberapa anggaran dan beberapa indikator kegiatan, baik penambahan maupun penurunan kegiatan-kegiatan tersebut membawa perubahan pada Rencana Kerja, serta pagu indikatif pada tahun berjalan.

Adapun rencana kerja pendanaan program dan kegiatan perubahan Kecamatan Cibeureum Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTRA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	2 Laporan	12.580.000,00	34.380.000,00	42.940.000,00	30.360.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berualitas dan Berdaya Sain	- -			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah				-	100 persen	23.520.000,00	100.420.000,00	145.195.000,00	121.675.000,00			-	-	Kecamatan Cibureum		0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.07.005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Dibekalkan				0 Unit	3 Unit	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.07.006		Pengadaan Peralatan dan Meub Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Meub Lainnya yang Dibekalkan				0 Unit	1 Unit	8.520.000,00	85.420.000,00	118.945.000,00	110.425.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berualitas dan Berdaya Sain	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.07.008		Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Dibekalkan				0 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	2.800.000,00	-12.500.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berualitas dan Berdaya Sain	-	-		0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.07.009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekalkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	-	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	860.139.500,00	931.127.700,00	931.127.700,00	70.988.200,00			-	-	Kecamatan Cibureum		0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.08.001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.08.002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibekalkan				0 Laporan	3 Laporan	79.997.500,00	79.997.500,00	79.997.500,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.08.003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibekalkan				0 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.08.004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibekalkan				0 Laporan	2 Laporan	646.642.000,00	717.630.200,00	717.630.200,00	70.988.200,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.000.000,00	199.384.000,00	199.384.000,00	-616.000,00			-	-	Kecamatan Cibureum		0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.01.2.09.002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertolakan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertolaknya				0 Unit	30 Unit	200.000.000,00	199.384.000,00	199.384.000,00	-616.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					-	-	1.173.414.275,00	1.216.914.275,00	1.229.414.275,00	-1.173.414.275,00							0,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penertase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					-	100 persen	1.190.937.400,00	1.190.937.400,00	1.192.937.400,00	42.000.000,00	-	-	-	Kecamatan Cibureum			0,00	KECAMATAN CIBUREUM	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/energi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
		Jumlah Laporan koordinasi/energi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0 Laporan	16 Laporan	1.099.480.000,00	1.126.980.000,00	1.126.980.000,00	29.500.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBUREUM	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0 Dokumen	2 Dokumen	51.057.400,00	51.057.400,00	63.567.400,00	12.500.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBUREUM	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penertase dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan					-	100 persen	22.876.875,00	36.876.875,00	36.876.875,00	14.000.000,00		-	-	-	Kecamatan Cibureum		0,00	KECAMATAN CIBUREUM	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					0 Dokumen	3 Dokumen	22.876.875,00	36.876.875,00	36.876.875,00	14.000.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBUREUM	
3. 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-					-	-	168.417.200,00	160.917.200,00	160.917.200,00	-168.417.200,00							0,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan					-	1 kegiatan	126.390.200,00	126.390.200,00	111.390.200,00	-15.000.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	-	-	-	Kecamatan Cibureum		0,00	KECAMATAN CIBUREUM
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0 Laporan	10 Laporan	126.390.200,00	126.390.200,00	111.390.200,00	-15.000.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIBUREUM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATIAN / SUB KEGATIAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATIAN / SUB KEGATIAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERAKORAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD 2024		APRO 2024		RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUJAH	10	11	12	13	14	15	16	17						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	7.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan				-	100 persen	42.027.000,00	33.627.000,00	48.627.000,00	6.600.000,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN CIBUREUM				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga kemasya katan	4 Lembaga kemasya katan	42.027.000,00	33.627.000,00	48.627.000,00	6.600.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KewDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omna yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Omnas	0 Pokmas / Omnas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KewDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM			
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	42.286.400,00	42.286.400,00	42.286.400,00	42.286.400,00			-	-	-				8,00				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum				-	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM			
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KewDesa	-	-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase Imbas antr se kecamatan Cibureum				-	80 persen	42.286.400,00	42.286.400,00	42.286.400,00	0,00			Meningkatkan Sumbar Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertanya Saling	-	-	-	kecamatan Cibureum			0,00	KECAMATAN CIBUREUM		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolitan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolitan Negara Republik Indonesia				0 Laporan	2 Laporan	42.286.400,00	42.286.400,00	42.286.400,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KewDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumbar Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertanya Saling	-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM		
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	30.221.875,00	30.221.875,00	13.421.875,00	-30.221.875,00			-	-	-				8,00				
	7.01.05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah				-	100 persen	30.221.875,00	30.221.875,00	13.421.875,00	-16.800.000,00			-	-	-	kecamatan Cibureum				0,00	KECAMATAN CIBUREUM		
	7.01.05.2.01.0002	Pasifikasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pasifikasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	42 Orang	3.784.375,00	3.784.375,00	3.784.375,00	0,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KewDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM			
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,				0 Orang	42 Orang	22.800.000,00	22.800.000,00	6.000.000,00	-16.800.000,00	Kota Sukabumi, Cibureum, Semua KewDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				0,00	KECAMATAN CIBUREUM			

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APRO 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	4 Pokmas / Omas	0,00	374.000.000,00	374.000.000,00	374.000.000,00	Kota Sukabumi, Cibinuruk, Babakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBEUREUM
		KELURAHAN SRIDANGPALAY							247.161.000,00	337.400.000,00	337.400.000,00	90.239.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							247.161.000,00	337.400.000,00	337.400.000,00	90.239.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							247.161.000,00	337.400.000,00	337.400.000,00	90.239.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	247.161.000,00	337.400.000,00	337.400.000,00	-247.161.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	1 Laporan	247.161.000,00	337.400.000,00	337.400.000,00	90.239.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBEUREUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Omas	4 Pokmas / Omas	0,00	337.400.000,00	337.400.000,00	337.400.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Sridangpalay	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBEUREUM
		KELURAHAN LIMUSUNGGAJAL							326.361.000,00	386.600.000,00	386.600.000,00	60.239.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							326.361.000,00	386.600.000,00	386.600.000,00	60.239.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							326.361.000,00	386.600.000,00	386.600.000,00	60.239.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	326.361.000,00	386.600.000,00	386.600.000,00	-326.361.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	1 Laporan	326.361.000,00	386.600.000,00	386.600.000,00	60.239.000,00			-	-	-	Kelurahan Limus Nunggal	0,00	KECAMATAN CIBEUREUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Omas	4 Pokmas / Omas	0,00	386.600.000,00	386.600.000,00	386.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Limusunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIBEUREUM
		J U M L A H							8.163.846.180,00	8.700.482.414,00	8.773.962.414,00	609.636.234,00							0,00	

BAB IV PENUTUP

Perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai sebuah keberhasilan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibeureum memuat kegiatan sebelum perubahan, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di Kecamatan Cibeureum dalam periode Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPPA-SKPD) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun anggaran 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibeureum tahun 2024 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Cibeureum kepada Masyarakat demi terwujudnya Good Governance.

Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 ini.

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI